BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2025







Nomor : 35.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026
Tanggal : 29 MEI 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan A. P. Pettarani No. 31

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Takalar bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Takalar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Dipindai dengan CamScanner

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 35.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 29 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Winner Franky Haiomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
Register Akuntan Negara No. RNA-14533

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. TAKALAR

AUDITED



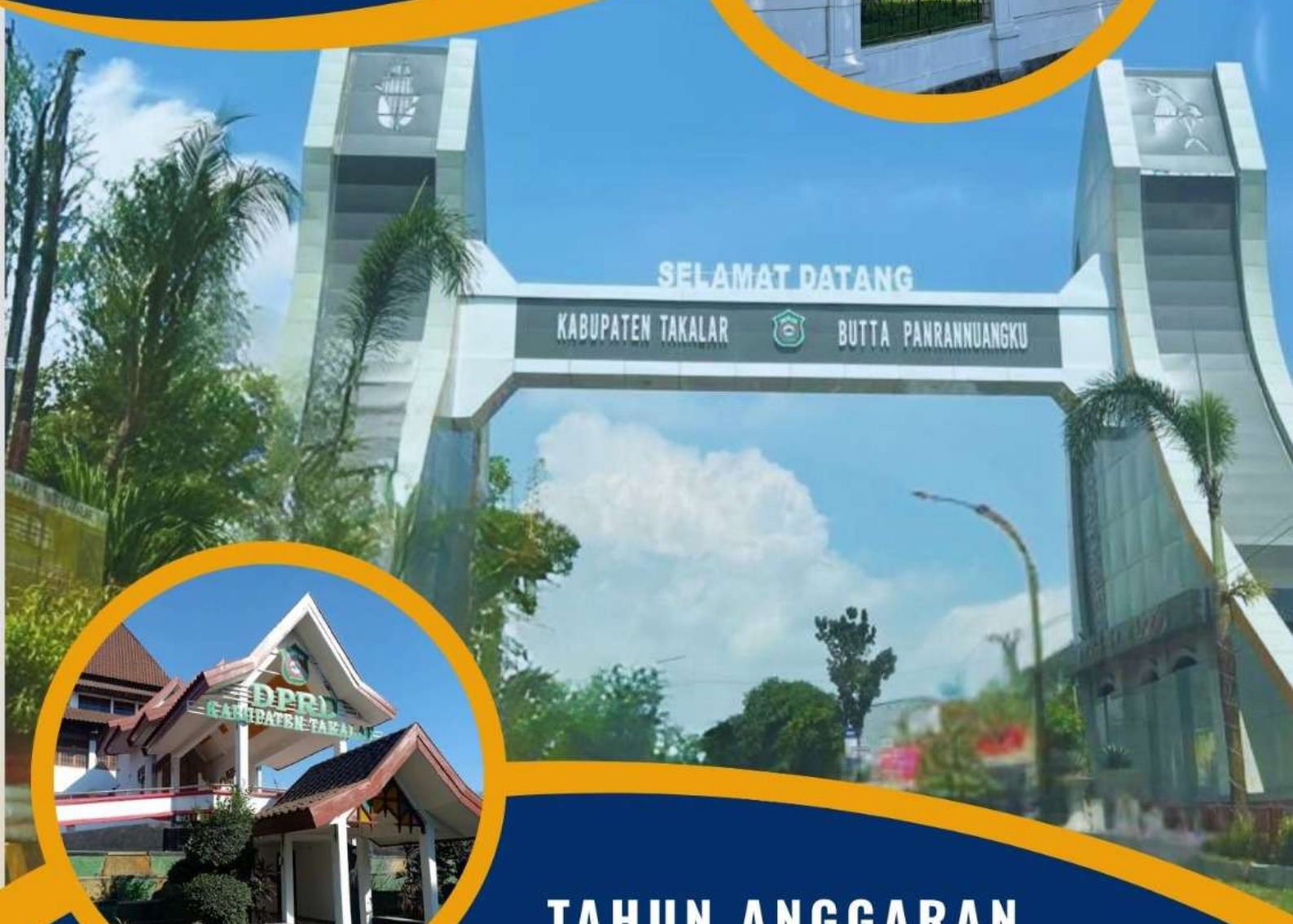

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
SITEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xvii
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SAL	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	11
7.1. Pendahuluan	11
7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	13
7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	14
7.2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	16
7.2.1. Gambaran Ekonomi Makro Kabupaten Takalar	16
7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan	17
7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	19
7.2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)	19
7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	20
7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi	21
7.2.1.6. Inflasi	21
7.2.1.7. Struktur Perekonomian	22
7.2.1.8. Potensi Unggulan Daerah	23
7.2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah	28
7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	30
7.3.1 Pendapatan Darah	36
7.3.2 Belanja Daerah	37
7.3.3 Hambatan dan Kendala	38
7.4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	38
7.4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	38
7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	40
7.4.3. Kebijakan Akuntansi	41
7.4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	41
7.4.3.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	84
7.4.3.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas	88
7.4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA	88
7.4.3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja	90
7.4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	91

7.4.3.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO 92
7.4.3.8. Kebijakan Akuntansi Beban 93
7.4.3.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan 95
7.4.3.10. Perubahan Kebijakan Akuntansi 99
7.4.3.11. Perubahan Estimasi Akuntansi 100
7.4.3.12. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan 100
7.4.3.13. Peristiwa Luar Biasa 101
7.5. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN 102
7.5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 102
7.5.1.1. Pendapatan LRA 102
7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 102
7.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 103
7.5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 115
7.5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 123
7.5.1.1.1.4. Lain lain PAD yang Sah 124
7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer 128
7.5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 129
7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah 135
7.5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 138
7.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah 138
7.5.1.1.3.2. Pendapatan Dana Darurat 138
7.5.1.1.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 138
7.5.1.2. Belanja Dareah 138
7.5.1.2.1. Belanja Operasi 139
7.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai 140
7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan jasa 146
7.5.1.2.1.3. Belanja Bunga 147
7.5.1.2.1.4. Belanja Subsidi 148
7.5.1.2.1.5. Belanja Hibah 148
7.5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial 148
7.5.1.2.1.7. Belanja Imbalan 149
7.5.1.2.2. Belanja Modal 149
7.5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah 149
7.5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150
7.5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151
7.5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 151
7.5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 152
7.5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya 152
7.5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga 153
7.5.1.2.4. Belanja Transfer 153
7.5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil 154
7.5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan 155
7.5.1.3. Pembiayaan Daerah 156
7.5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan 157

7.5.1.3.1.1. Penggunaan SiLPA 158
7.5.1.3.1.2. Pencairan Dana Cadangan 158
7.5.1.3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 158
7.5.1.3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah 158
7.5.1.3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 158
7.5.1.3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 158
7.5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan 158
7.5.1.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 158
7.5.1.3.2.2. Penyertaan Modal Daerah 158
7.5.1.3.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 159
7.5.1.3.2.4. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 159
7.5.1.3.2.5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 159
7.5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 160
7.5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal 160
7.5.2 2.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 160
7.5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 160
7.5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 161
7.5.3. Penjelasan Akun-akun Neraca 162
7.5.3.1. ASET 162
7.5.3.1.1. Aset Lancar 162
7.5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas 163
7.5.3.1.1.2. Investasi Jangka Pendek 167
7.5.3.1.1.3. Piutang Pajak Daerah 167
7.5.3.1.1.4. Piutang Retribusi Daerah 168
7.5.3.1.1.5. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 168
7.5.3.1.1.6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah 169
7.5.3.1.1.7. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 169
7.5.3.1.1.8. Piutang Transfer Antar Daerah 170
7.5.3.1.1.9. Piutang Lainnya 170
7.5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang 171
7.5.3.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka 172
7.5.3.1.1.12. Persediaan 173
7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang 173
7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen 173
7.5.3.1.2.2. Investasi Permanen 175
7.5.3.1.3. Aset Tetap 176
7.5.3.1.3.1. Tanah 177
7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin 180
7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan 185
7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 189
7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya 191
7.5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan 193
7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan 194

7.5.3.1.3.8. Aset Konsesi Jasa 173
7.5.3.1.3.9. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa 195
7.5.3.1.5. Dana Cadangan 196
7.5.3.1.5.1. Dana Cadangan 196
7.5.3.1.5.2. Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi 196
7.5.3.1.5.3. Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk 196
7.5.3.1.5. Aset Lainnya 195
7.5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang 196
7.5.3.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 197
7.5.3.1.5.3. Aset Tidak Berwujud 197
7.5.3.1.5.4. Aset Lain-lain 198
7.5.3.1.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 198
7.5.3.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 200
7.5.3.1.5.7. Kas yang Dibatasi Penggunaannya 200
7.5.3.1.5.8. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) 200
7.5.3.1.6. Properti Investasi 201
7.5.3.1.6.1. Properti Investasi Tanah 201
7.5.3.1.6.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan 201
7.5.3.1.6.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi 201
7.5.3.1.6.4. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 202
7.5.3.2. KEWAJIBAN 202
7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 203
7.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 203
7.5.3.2.1.2 Utang Bunga 203
7.5.3.2.1.3 Utang Pinjaman Jangka Pendek 203
7.5.3.2.1.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 204
7.5.3.2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka 204
7.5.3.2.1.6 Utang Belanja 205
7.5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya 207
7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 206
7.5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat 206
7.5.3.2.2.2 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) 206
7.5.3.2.2.3 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 207
7.5.3.2.2.4 Utang kepada Masyarakat 208
7.5.3.2.2.5 Kewajiban Konsesi Jasa 208
7.5.3.2.2.6 Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah 208
7.5.3.2.2.7 Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain 208
7.5.3.2.2.8 Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) 208
7.5.3.2.2.9 Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 209
7.5.3.3EKUITAS 209
7.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO) 210
7.5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO 210
7.5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO 210

7.5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO 209
7.5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO 211
7.5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 212
7.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO 213
7.5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO 213
7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 214
7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 218
7.5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO 219
7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO 219
7.5.4.1.3.2 Dana Darurat-LO 220
7.5.4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO 220
7.5.4.2 BEBAN DAERAH 220
7.5.4.2.1 BEBAN OPERASI 220
7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai 222
7.5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa 221
7.5.4.2.1.3 Beban Bunga 224
7.5.4.2.1.4 Beban Subsidi 224
7.5.4.2.1.5 Beban Hibah 225
7.5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial 224
7.5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang 224
7.5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi 226
7.5.4.2.1.9 Beban Imbalan 226
7.5.4.2.2 BEBAN TRANSFER 226
7.5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil 227
7.5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan 227
7.5.4.3 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO 227
7.5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 228
7.5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO 228
7.5.4.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 228
7.5.4.4. DEFISIT NON OPERASIONAL-LO 228
7.5.4.4.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO 228
7.5.4.4.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO 228
7.5.4.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 228
7.5.4.5. PENDAPATAN LUAR BIASA-LO 229
7.5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa-LO 229
7.5.4.6. BEBAN LUAR BIASA 229
7.5.4.6.1 Beban Luar Biasa 229
7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK) 230
7.5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 230
7.5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi 230
7.5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 231
7.5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 232
7.5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi 232
7.5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi 233

7.5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 233
7.5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan 233
7.5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan 233
7.5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 234
7.5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 234
7.5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 235
7.5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 237
7.5.6.1. Ekuitas Awal 237
7.5.6.2. Surplus/Defisit-LO 237
7.5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 237
7.5.6.3.1. Koreksi Ekuitas-Aset Lancar 237
7.5.6.3.2. Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang 237
7.5.6.3.3. Koreksi Ekuitas-Aset Tetap 237
7.5.6.3.4. Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan 237
7.5.6.3.5. Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya 237
7.5.6.3.6. Koreksi Ekuitas-Properti Investasi 237
7.5.6.3.7. Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek 238
7.5.6.3.8. Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang 238
7.6. PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA 239
7.7. PENUTUP 240

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Takalar 18
Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Takalar 18
Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Takalar 18
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Takalar 19
Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Takalar 19
Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar 20
Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar 21
Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Takalar 22
Tabel 9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar) 22
Tabel 10 Kondisi Komoditi Pertanian Tahun 2018-2020 23
Tabel 11 Kondisi Luas Kawasan Hutan Kabupaten Takalar Tahun 2015-2016 24
Tabel 12 Potensi Investasi Kabupaten Takalar 25
Tabel 13 Rekapitulasi Keragaman Koperasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 26
Tabel 14 Perbandingan APBD Pokok dan APBD Perubahan Tahun 2025 30
Tabel 15 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kab. Takalar TA. 2025 32
Tabel 16 Rincian Penambahan dan Perubahan Nomenklatur SKPD 39
Tabel 17 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kab. Takalar 39
Tabel 18 Penyisihan investasi non permanen 54
Tabel 19 Komponen Biaya Perolehan 55
Tabel 20 Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap 58
Tabel 21 Masa manfaat Aset Tetap 59
Tabel 22 Penambahan Masa Manfaat Renovasi Aset 62
Tabel 23 Masa manfaat Aset Tidak Berwujud 83
Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024 102
Tabel 25 Rincian Penerimaan PAD per Jenis Per 31 Desember 2025 dan 2024 103
Tabel 26 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 104
Tabel 27 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024 115
Tabel 28 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024 115
Tabel 29 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 119
Tabel 30 Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu 123
Tabel 31 Realisasi Deviden atas Penyertaan Modal TA 2025 dan TA 2024 124
Tabel 32 Realisasi Lain lain PAD yang Sah TA 2025 dan TA 2024 124
Tabel 33 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024 129
Tabel 34 Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan 2024 131
Tabel 35 Rincian Realisasi DAK TA 2025 134
Tabel 36 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 136
Tabel 37 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 136
Tabel 38 Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025 137
Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2025 139
Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025 140
Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 140
Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pegawai TA 2025 141
Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 146
Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025 148
Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 149
Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 150
Tabel 47 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 151
Tabel 48 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 152
Tabel 49 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 152
Tabel 50 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 153
Tabel 51 Transfer ke Desa/Bantuan Keuangan Parpol TA 2025 154
Tabel 52 Rincian Belanja Bagi Hasil TA 2025 154
Tabel 53 Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2025 dan 2024 156
Tabel 54 Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 dan 2024 157
Tabel 55 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 159
Tabel 56 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 dan 2024 160
Tabel 57 Rekapitulasi Aset TA 2025 dan 2024 162
Tabel 58 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 162
Tabel 59 Saldo Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 163
Tabel 60 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 163
Tabel 61 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 164
Tabel 62 Saldo Kas di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2025 165
Tabel 63 Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 167
Tabel 64 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 168
Tabel 65 Umur Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 168
Tabel 66 Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025 168
Tabel 67 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah 169
Tabel 68 Rincian Piutang Lainnya TA 2025 170

Tabel 69 Rincian Penyisihan Piutang TA 2025 171
Tabel 70 Saldo Investasi per 31 Desember 2025..... 173
Tabel 71 Rekapitulasi Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2024 173
Tabel 72 Rincian Saldo Dana Kukesrata, PEP2T, Kuperta dan Dana Bergulir di Bank 174
Tabel 73 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025..... 175
Tabel 74 Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 176
Tabel 75 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah 177
Tabel 76 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 180
Tabel 77 Tabel Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 184
Tabel 78 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap atas Kekurangan Volume Pekerjaan 188
Tabel 79 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 188
Tabel 80 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Kekurangan Volume Pekerjaan 190
Tabel 81 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 191
Tabel 82 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan..... 193
Tabel 83 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... 194
Tabel 84 Rincian Aset Lainnya 196
Tabel 85 Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran..... 196
Tabel 86 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi 197
Tabel 87 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud 197
Tabel 88 Rincian Properti Investasi TA 2025 dan 2024..... 201
Tabel 89 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024..... 203
Tabel 90 Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025..... 203
Tabel 91 Jadwal pembayaran kewajiban pinjaman PEN..... 204
Tabel 92 Rekapitulasi Pendapatanditerima dimuka per 31 Desember 2025..... 205
Tabel 93 Daftar Mutasi Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024..... 205
Tabel 94 Daftar Utang Belanja BLUD Per 31 Desember 2025..... 206
Tabel 95 Pendapatan - LO TA 2025 dan 2024..... 210
Tabel 96 Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 dan 2024 210
Tabel 97 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025..... 211
Tabel 98 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2025 dan 2024 211
Tabel 99 Realisasi Pendapatan hasil Pengelolaan 212
Tabel 100 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 dan 2024 213
Tabel 101 Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2025 dan 2024..... 214
Tabel 102 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2025 dan 2024..... 214
Tabel 103 Realisasi Dana Bagi Hasil-LO TA 2025 dan 2024 215
Tabel 104 Rincian DAU-LO TA 2025 dan 2024 215
Tabel 105 Rincian Realisasi DAK Fisik- LO TA 2025 dan 2024 216
Tabel 106 Rincian Realisasi DAK Non Fisik- LO TA 2025 dan 2024..... 217
Tabel 107 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 dan 2024 218
Tabel 108 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025 dan 2024..... 218
Tabel 109 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2025 dan 2024 219
Tabel 110 Realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2025 dan 2024 219
Tabel 111 Realisasi Beban-LO TA 2025 dan 2024 220
Tabel 112 Realisasi Beban Operasi TA 2025 dan 2024..... 220
Tabel 113 Realisasi Beban Pegawai TA 2025 dan 2024..... 221
Tabel 114 Realisasi Beban Persediaan TA 2025 dan 2024 222
Tabel 115 Realisasi Beban Jasa TA 2025 dan 2024..... 222
Tabel 116 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024 223
Tabel 117 Realisasi Beban Hibah TA 2025 dan 2024..... 225
Tabel 118 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024 226
Tabel 119 Realisasi Beban Transfer TA 2025 dan 2024..... 227
Tabel 120 Tabel Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024..... 229
Tabel 121 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024..... 230
Tabel 122 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi..... 230
Tabel 123 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi..... 231
Tabel 124 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset 232
Tabel 125 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 232
Tabel 126 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 233
Tabel 127 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris..... 234
Tabel 128 Saldo akhir kas TA 2025 dan 2024 235
Tabel 129 Rincian Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025..... 236

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 1a.	Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025
Lampiran 1b.	Daftar Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / JKN per 31 Desember 2025
Lampiran 1c.	Rincian Saldo Kas BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2025
Lampiran 1d.	Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD - SMP Tahun 2025
Lampiran 2	Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Daftar Piutang dan Penyisihan Retribusi Daerah Bapenda per 31 Desember 2025
Lampiran 3a.	Daftar Piutang dan Penyisihan Retribusi Daerah Dinas Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2025
Lampiran 3b.	Daftar Piutang dan Penyisihan Retribusi Daerah Dinas Perikanan per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah (BLUD) per 31 Desember 2025
Lampiran 4a.	Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Sewa BMD) per 31 Desember 2025
Lampiran 4b.	Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Denda PBB-P2) per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Daftar Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Daftar Rincian Piutang Lainnya Denparm per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Daftar Piutang Lainnya Pihak Ketiga per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Daftar Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Rekapitulasi Saldo Persediaan per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 11a.	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per OPD per 31 Desember 2025
Lampiran 11b.	Daftar Tanah yang Dikuasai/Diklaim Sebagian atau Keseluruhan oleh Pihak Ketiga
Lampiran 12	Persertifikatan Tanah per SKPD per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per SKPD per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Kurang catat Peralatan dan Mesin per OPD per 31 Desember 2025
Lampiran 15	Penambahan Bantuan dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 16	Daftar Aset Kendaraan Bermotor yang Digunakan/Dipinjam Pakai oleh Instansi Vertikal per 31 Desember 2025
Lampiran 17	Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 18	Penambahan dari Bantuan Revitalisasi dari satuan pendidikan per 31 Desember 2025
Lampiran 19	Ekstrakomptabel Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 20	Daftar Belanja Modal Gedung yang diakui sebagai Pelunasan Kewajiban atas Pekerjaan Fisik Tahun Sebelumnya yang dibayarkan melalui

	Rekening Belanja Modal Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2025
Lampiran 21	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD per 31 Desember 2025
Lampiran 22	Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan yang di reklasifikasi ke KDP per 31 Desember 2025
Lampiran 23	Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Gedung dan Bangunan per OPD Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 24	Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Ekstracomtable per 31 Desember 2025
Lampiran 25	Daftar belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun berjalan per 31 Desember 2025
Lampiran 26	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 27	Mutasi Konstruski Dalam Pengerjaan (KIB F) per 31 Desember 2025
Lampiran 28	Rincian Konstruski Dalam Pengerjaan (KIB F) per OPD Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 29	Daftar Akumulasi Penyusutan Per OPD Tahun 2022 dan 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 30	Daftar Piutang Penjualan Aset Daerah (Tagihan Penjualan Angsuran) per 31 Desember 2025
Lampiran 31a.	Daftar Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 31b.	Daftar Aset Lainnya Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 32	Daftar Rincian Aset Tak Berwujud per OPD Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 33	Daftar Mutasi Aset Lain-lain per OPD OPD Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 34	Daftar Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lain-lain Tahun 2025 per 31 Desember 2025
Lampiran 35	Daftar Mutasi Kas yang dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025
Lampiran 36	Properti Investasi per 31 Desember 2025
Lampiran 37a.	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka (Reklame) per 31 Desember 2025
Lampiran 37b.	Daftar Pendapatan Diterima Dimuka (Sewa BMD) per 31 Desember 2025
Lampiran 38	Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2025
Lampiran 39	Daftar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025

BUPATI TAKALAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisikeuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Takalar, Mei 2026

BUPATI TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	**7.5.1.1**	**1.221.756.468.182,00**	**1.194.544.244.500,95**	**97,77**	**1.180.050.595.491,33**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**7.5.1.1.1**	**185.918.476.414,00**	**176.717.954.156,95**	**95,05**	**145.865.361.443,60**
Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	46.767.000.000,00	51.722.570.240,00	110,60	26.191.140.591,50
Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	2.790.300.000,00	2.981.016.909,00	106,83	2.295.688.340,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	10.483.318.114,00	10.316.849.525,00	98,41	10.097.366.422,00
Lain-lain PAD yang sah	7.5.1.1.1.4	125.877.858.300,00	111.697.517.482,95	88,73	107.281.166.090,10
PENDAPATAN TRANSFER	**7.5.1.1.2**	**1.035.837.991.768,00**	**1.017.826.290.344,00**	**98,26**	**1.034.028.839.233,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.1.1.2.1	**945.117.271.000,00**	**955.992.500.339,00**	**101,15**	**974.248.331.749,00**
Dana Perimbangan	a	-	-	-	-
Dana Insentif Daerah (DID)	b	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	c	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	d	-	-	-	-
Dana Desa	e	76.268.700.000,00	76.268.700.000,00	100,00	78.203.364.000,00
Insentif Fiskal	f	14.085.609.000,00	14.085.609.000,00	100,00	12.448.276.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	g	19.712.721.000,00	18.247.465.700,00	92,57	12.235.247.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	h	651.690.726.000,00	666.777.754.612,00	102,32	634.554.049.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	i	183.359.515.000,00	180.612.971.027,00	98,50	236.807.395.749,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.2.2	**90.720.720.768,00**	**61.833.790.005,00**	**68,16**	**59.780.507.484,00**
Pendapatan Bagi Hasil	a	52.859.114.052,00	61.833.790.005,00	116,98	54.160.821.484,00
Bantuan Keuangan	b	37.861.606.716,00	-	-	5.619.686.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**7.5.1.1.3**	-	-	-	**156.394.814,73**
Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1	-	-	-	-
Dana Darurat	7.5.1.1.3.2	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.3.3	-	-	-	156.394.814,73
BELANJA DAERAH	**7.5.1.2**	**1.191.545.536.310,00**	**1.089.038.268.854,73**	**91,40**	**1.175.052.230.559,93**
BELANJA OPERASI	**7.5.1.2.1**	**958.865.030.489,27**	**876.684.714.140,37**	**91,43**	**896.799.157.434,93**
Belanja Pegawai	7.5.1.2.1.1	572.073.250.948,88	532.422.437.350,17	93,07	526.206.586.954,93
Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.1.2	*354.864.353.178,39*	*312.488.982.645,20*	*88,06*	311.105.460.162,00
Belanja Bunga	7.5.1.2.1.3	12.096.567.195,00	12.699.563.978,00	104,98	14.475.619.087,00
Belanja Subsidi	7.5.1.2.1.4	-	-	-	-
Belanja Hibah	7.5.1.2.1.5	19.815.859.167,00	19.058.730.167,00	96,18	43.343.891.231,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.1.6	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	1.667.600.000,00
Belanja Imbalan	7.5.1.2.1.7	-	-	-	-
BELANJA MODAL	**7.5.1.2.2**	**81.969.901.917,73**	**65.642.524.759,36**	**80,08**	**133.717.632.456,00**
Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.2.1	429.300.000,00	415.341.000,00	96,75	2.138.361.440,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.2.2	28.314.775.374,00	24.610.634.185,00	86,92	34.608.590.475,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.2.2.3	18.803.815.602,73	17.152.877.619,00	91,22	46.263.878.562,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.1.2.2.4	32.883.010.941,00	21.930.774.355,36	66,69	50.388.636.979,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.2.5	114.000.000,00	113.397.600,00	99,47	199.585.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.2.2.6	1.425.000.000,00	1.419.500.000,00	99,61	118.580.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**7.5.1.2.3**	**4.400.000.000,00**	**634.620.320,00**	**14,42**	-
Belanja Tidak Terduga		*4.400.000.000,00*	*634.620.320,00*	*14,42*	-
BELANJA TRANSFER	**7.5.1.2.4**	**146.310.603.903,00**	**146.076.409.635,00**	**99,84**	**144.535.440.669,00**
Belanja Bagi Hasil	7.5.1.2.4.1	**3.110.744.903,00**	**2.952.978.128,00**	**94,93**	**2.999.991.000,00**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	a	2.855.465.463,00	2.688.132.378,00	94,14	1.055.626.300,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	b	255.279.440,00	264.845.750,00	103,75	1.944.364.700,00
Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.2.4.2	**143.199.859.000,00**	**143.123.431.507,00**	**99,95**	**141.535.449.669,00**
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	a	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	b	-	-	-	63.301.380.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	c	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	d	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	e	143.199.859.000,00	143.123.431.507,00	99,95	78.234.069.669,00
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	f	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT)		**30.210.931.872,00**	**105.505.975.646,22**	**349,23**	**4.998.364.931,40**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	**7.5.1.3**	**(30.210.931.872,00)**	**(29.814.228.411,08)**	**98,69**	**4.077.185.145,52**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**7.5.1.3.1**	**9.075.550.077,00**	**9.075.550.076,92**	**100,00**	**23.953.750.896,52**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.5.1.3.1.1	9.075.550.077,00	9.075.550.076,92	100,00	23.953.750.896,52
Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.3.1.2	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.3.1.3	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	7.5.1.3.1.4	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.3.1.5	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.3.1.6	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**7.5.1.3.2**	**39.286.481.949,00**	**38.889.778.488,00**	**98,99**	**19.876.565.751,00**
Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.3.2.1	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	7.5.1.3.2.2	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.5.1.3.2.3	39.286.481.949,00	38.889.778.488,00	98,99	19.876.565.751,00
Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.3.2.4	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.3.2.5	-	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		**(30.210.931.872,00)**	**(29.814.228.411,08)**	**98,69**	**4.077.185.145,52**
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI		**-**	**75.691.747.235,14**	**-**	**9.075.550.076,92**
KOREKSI SILPA		**-**	**-**	**-**	**-**
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA/(SIKPA)		**-**	**75.691.747.235,14**	**-**	**9.075.550.076,92**

BUPATI TAKALAR

MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	7.5.2.1	9.075.550.076,92	23.953.750.896,52
PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	7.5.2.2	9.075.550.076,92	23.953.750.896,52
Subtotal		0,00	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3	75.691.747.235,14	9.075.550.076,92
Subtotal		75.691.747.235,14	9.075.550.076,92
KOREKSI KESALAHAN +/(-) PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	7.5.2.4	-	-
LAIN-LAIN		-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR		75.691.747.235,14	9.075.550.076,92

BUPATI TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	7.5.3.1	**1.913.276.571.884,64**	**1.864.017.087.392,84**
ASET LANCAR	**7.5.3.1.1**	**122.094.738.435,52**	**62.645.126.699,05**
Kas dan Setara Kas	7.5.3.1.1.1	75.728.222.875,83	9.111.864.940,61
Kas di Kas Daerah	a	73.924.945.360,21	3.622.207.306,36
Kas di Bendahara Penerimaan	b	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	c	8.701.097,00	23.829.184,07
Kas di BLUD	d	565.624.979,89	4.773.169.304,45
Kas Dana BOS	e	-	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	f	-	-
Kas Lainnya	g	-	-
Setara Kas	h	-	-
Kas Dana Desa	i	-	-
Kas Dana BOSP	j	561.221.339,73	285.158.798,73
Kas Dana BOK Puskesmas	k	667.730.099,00	407.500.347,00
Kas Otonomi Khusus	l	-	-
Kas Dana Abadi Daerah	m	-	-
Investasi Jangka Pendek	7.5.3.1.1.2	-	-
Piutang Pajak Daerah	7.5.3.1.1.3	14.184.206.800,00	13.518.954.851,00
Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.1.1.4	4.348.101.522,00	3.851.044.052,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.3.1.1.5	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.1.1.6	10.441.609.713,85	10.705.848.795,57
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.1.7	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.1.1.8	-	19.078.053.435,00
Piutang Lainnya	7.5.3.1.1.9	801.642.425,83	226.135.000,00
Penyisihan Piutang	7.5.3.1.1.10	(17.359.544.513,35)	(16.435.423.436,82)
Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.1.11	50.993.807,41	36.962.917,49
Persediaan	7.5.3.1.1.12	33.899.505.803,95	22.551.686.144,20
INVESTASI JANGKA PANJANG	**7.5.3.1.2**	**99.454.263.991,71**	**95.809.633.010,89**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.5.3.1.2.1	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.3.1.2.2	99.454.263.991,71	95.809.633.010,89
ASET TETAP	**7.5.3.1.3**	**1.511.368.923.829,98**	**1.525.654.009.435,26**
Tanah	7.5.3.1.3.1	351.951.624.130,50	350.201.733.430,50
Peralatan dan Mesin	7.5.3.1.3.2	415.743.855.206,70	386.497.976.787,82
Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.3.3	944.937.343.520,93	917.253.877.019,55
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.3.1.3.4	1.505.184.599.936,44	1.485.296.369.875,14
Aset Tetap Lainnya	7.5.3.1.3.5	12.955.942.725,63	13.045.865.125,63
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.1.3.6	8.251.846.716,48	5.797.762.702,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.3.1.3.7	(1.727.656.288.406,70)	(1.632.439.575.505,38)
Aset Konsesi Jasa	7.5.3.1.3.8	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	7.5.3.1.3.9	-	-
DANA CADANGAN	**7.5.3.1.4**	-	-
Dana Cadangan	7.5.3.1.4,1	-	-
Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi	7.5.3.1.4,2	-	-
Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk	7.5.3.1.4,3	-	-
ASET LAINNYA	**7.5.3.1.5**	**80.085.539.246,41**	**77.765.764.376,40**
Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.1.5.1	1.340.092.716,03	1.075.986.986,86
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.1.5.2	-	-
Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.5.3	6.561.486.435,76	5.141.986.435,76
Aset Lain-lain	7.5.3.1.5.4	195.775.932.926,70	192.856.983.642,74
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.3.1.5.5	(4.957.218.835,76)	(4.442.485.035,76)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	7.5.3.1.5.6	(119.656.578.829,32)	(117.882.214.532,20)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	7.5.3.1.5.7	1.021.824.833,00	1.015.506.879,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.3.1.5.8	-	-

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
PROPERTI INVESTASI	**7.5.3.1.6**	**100.273.106.381,02**	**102.142.553.871,24**
Properti Investasi Tanah	7.5.3.1.6.1	100.675.551.706,10	100.675.551.706,10
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	7.5.3.1.6.2	14.987.026.214,69	14.987.026.214,69
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	7.5.3.1.6.3	2.364.902.000,00	2.364.902.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	7.5.3.1.6.4	(17.754.373.539,77)	(15.884.926.049,55)
JUMLAH ASET		**1.913.276.571.884,64**	**1.864.017.087.392,84**
KEWAJIBAN	**7.5.3.2**	**207.796.574.446,60**	**259.220.656.683,86**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**7.5.3.2.1**	**71.682.368.460,60**	**87.457.487.083,86**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.2.1.1	36.475.640,69	36.314.863,69
Utang Bunga	7.5.3.2.1.2	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	7.5.3.2.1.3	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.3.2.1.4	38.889.778.488,00	42.130.593.362,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.2.1.5	79.489.388,34	46.389.510,42
Utang Belanja	7.5.3.2.1.6	32.676.624.943,57	45.244.189.347,75
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.2.1.7	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**7.5.3.2.2**	**136.114.205.986,00**	**171.763.169.600,00**
Utang kepada Pemerintah Pusat	7.5.3.2.2.1	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.5.3.2.2.2	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.5.3.2.2.3	136.114.205.986,00	171.763.169.600,00
Utang kepada Masyarakat	7.5.3.2.2.4	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	7.5.3.2.2.5	-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah	7.5.3.2.2.6	-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	7.5.3.2.2.7	-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	7.5.3.2.2.8	-	-
Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.5.3.2.2.9	-	-
EKUITAS	**7.5.3.3**	**1.705.479.997.438,04**	**1.604.796.430.708,98**
EKUITAS		**1.705.479.997.438,04**	**1.604.796.430.708,98**
Ekuitas		1.705.479.997.438,04	1.604.796.430.708,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.913.276.571.884,64**	**1.864.017.087.392,84**

BUPATI TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	**7.5.4.1**	**1.128.361.080.558,83**	**1.105.222.433.951,64**	**23.138.646.607,19**	**2,09**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**7.5.4.1.1**	**183.009.468.554,43**	**140.022.127.598,95**	**42.987.340.955,48**	**30,70**
Pajak Daerah-LO	7.5.4.1.1.1	52.376.005.061,08	27.444.830.802,30	24.931.174.258,78	90,84
Retribusi Daerah-LO	7.5.4.1.1.2	3.314.271.909,00	3.090.790.677,00	223.481.232,00	7,23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-	7.5.4.1.1.3	14.901.283.308,12	2.533.287.387,78	12.367.995.920,34	488,22
Lain-lain PAD yang Sah-LO	7.5.4.1.1.4	112.417.908.276,23	106.953.218.731,87	5.464.689.544,36	5,11
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**7.5.4.1.2**	**922.479.536.909,00**	**953.411.353.580,00**	**(30.931.816.671,00)**	**(3,24)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	**7.5.4.1.2.1**	**879.723.800.339,00**	**896.044.967.749,00**	**(16.321.167.410,00)**	**(1,82)**
Dana Perimbangan-LO	a	-	883.596.691.749,00	(883.596.691.749,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	b	18.247.465.700,00	-	18.247.465.700,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	c	666.777.754.612,00	-	666.777.754.612,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	d	180.612.971.027,00	-	180.612.971.027,00	-
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	e	-	-	-	-
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO	f	-	-	-	-
Dana Keistimewaan-LO	g	-	-	-	-
Dana Desa-LO	h	-	-	-	-
Insentif Fiskal-LO	i	14.085.609.000,00	12.448.276.000,00	1.637.333.000,00	13,15
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**7.5.4.1.2.2**	**42.755.736.570,00**	**57.366.385.831,00**	**(14.610.649.261,00)**	**(25,47)**
Pendapatan Bagi Hasil-LO	a	42.755.736.570,00	56.766.385.831,00	(14.010.649.261,00)	(24,68)
Bantuan Keuangan-LO	b	-	600.000.000,00	(600.000.000,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**7.5.4.1.3**	**22.872.075.095,40**	**11.788.952.772,69**	**11.083.122.322,71**	**94,01**
Pendapatan Hibah-LO	7.5.4.1.3.1	22.872.075.095,40	11.632.557.957,96	11.239.517.137,44	96,62
Dana Darurat-LO	7.5.4.1.3.2	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.5.4.1.3.3	-	156.394.814,73	(156.394.814,73)	(100,00)
BEBAN DAERAH	**7.5.4.2**	**1.046.573.449.319,42**	**1.085.530.328.379,53**	**(38.956.879.060,11)**	**(3,59)**
BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1	**976.765.739.684,42**	**1.019.198.251.710,53**	**(42.432.512.026,11)**	**(4,16)**
Beban Pegawai	7.5.4.2.1.1	530.620.886.199,60	530.234.313.499,01	386.572.700,59	0,07
Beban Barang dan Jasa	7.5.4.2.1.2	295.794.804.612,08	306.052.297.654,20	(10.257.493.042,12)	(3,35)
Beban Bunga	7.5.4.2.1.3	12.699.563.978,00	14.475.619.087,00	(1.776.055.109,00)	(12,27)
Beban Subsidi	7.5.4.2.1.4	-	-	-	-
Beban Hibah	7.5.4.2.1.5	18.800.745.167,00	46.237.349.581,00	(27.436.604.414,00)	(59,34)
Beban Bantuan Sosial	7.5.4.2.1.6	15.000.000,00	1.667.600.000,00	(1.652.600.000,00)	(99,10)
Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.7	926.854.638,94	874.113.361,21	52.741.277,73	6,03
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.2.1.8	117.907.885.088,80	119.656.958.528,11	(1.749.073.439,31)	(1,46)
Beban Imbalan	7.5.4.2.1.9	-	-	-	-
BEBAN TRANSFER	**7.5.4.2.2**	**69.807.709.635,00**	**66.332.076.669,00**	**3.475.632.966,00**	**5,24**
Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.2.1	2.952.978.128,00	2.999.991.000,00	(47.012.872,00)	(1,57)
Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.2.2	*66.854.731.507,00*	*63.332.085.669,00*	*3.522.645.838,00*	*5,56*
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**81.787.631.239,41**	**19.692.105.572,11**	**62.095.525.667,30**	**315,33**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**7.5.4.3**	**6.551.516,41**	**3.450.000,00**	**3.101.516,41**	**89,90**
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.5.4.3.1	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	7.5.4.3.2	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	7.5.4.3.3	6.551.516,41	3.450.000,00	3.101.516,41	89,90
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	***7.5.4.4***	***172.843.707,30***	***1.760.633.072,08***	***(1.587.789.364,78)***	***(90,18)***
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.5.4.4.1	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	7.5.4.4.2	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	7.5.4.4.3	172.843.707,30	1.760.633.072,08	(1.587.789.364,78)	(90,18)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(166.292.190,89)**	**(1.757.183.072,08)**	**1.590.890.881,19**	**(90,54)**
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**81.621.339.048,52**	**17.934.922.500,03**	**63.686.416.548,49**	**355,10**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA-LO	**7.5.4.5**	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa-LO	7.5.4.5.1	-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	**7.5.4.6**	**634.620.320,00**	**14.044.574,00**	**620.575.746,00**	**4.418,62**
Beban Luar Biasa	7.5.4.6.1	634.620.320,00	14.044.574,00	620.575.746,00	4.418,62
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		***80.986.718.728,52***	***17.920.877.926,03***	***63.065.840.802,49***	***351,91***

BUPATI TAKALAR

MUHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.1	**1.192.614.384.900,95**	**1.180.001.596.491,33**
Pajak Daerah		51.722.570.240,00	26.191.140.591,50
Retribusi Daerah		2.981.016.909,00	2.295.688.340,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.316.849.525,00	10.097.366.422,00
Lain-lain PAD yang Sah		109.767.657.882,95	107.232.167.090,10
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		955.992.500.339,00	974.248.331.749,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		61.833.790.005,00	59.780.507.484,00
Pendapatan Hibah		-	-
Dana Darurat		-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	156.394.814,73
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1.2	**1.023.395.744.095,37**	**1.041.334.598.103,93**
Belanja Pegawai		532.422.437.350,17	526.206.586.954,93
Belanja Barang dan Jasa		312.488.982.645,20	311.105.460.162,00
Belanja Bunga		12.699.563.978,00	14.475.619.087,00
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		19.058.730.167,00	43.343.891.231,00
Belanja Bantuan Sosial		15.000.000,00	1.667.600.000,00
Belanja Imbalan		-	-
Belanja Tidak Terduga		634.620.320,00	-
Belanja Bagi Hasil		2.952.978.128,00	2.999.991.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		143.123.431.507,00	141.535.449.669,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**169.218.640.805,58**	**138.666.998.387,40**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.1	**1.929.859.600,00**	**48.999.000,00**
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		1.929.859.600,00	48.999.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2.2	**65.642.524.759,36**	**133.717.632.456,00**
Belanja Modal Tanah		415.341.000,00	2.138.361.440,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		24.610.634.185,00	34.608.590.475,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		17.152.877.619,00	46.263.878.562,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		21.930.774.355,36	50.388.636.979,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		113.397.600,00	199.585.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		1.419.500.000,00	118.580.000,00
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Daerah		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		**(63.712.665.159,36)**	**(133.668.633.456,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3.1	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3.2	**38.889.778.488,00**	**19.876.565.751,00**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		38.889.778.488,00	19.876.565.751,00
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		**(38.889.778.488,00)**	**(19.876.565.751,00)**

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.1	**58.346.659.273,00**	**75.249.194.198,74**
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		58.346.659.273,00	75.249.194.198,74
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Masuk		-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4.2	**58.346.498.496,00**	**75.231.923.929,99**
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		58.346.498.496,00	75.231.923.929,99
Pemberian Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Keluar		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		**160.777,00**	**17.270.268,75**
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS		**66.616.357.935,22**	**(14.860.930.550,85)**
SALDO AWAL KAS		**9.111.864.940,61**	**23.972.795.491,46**
KOREKSI SILPA TAHUN LALU		-	-
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)		-	-
SALDO AKHIR KAS		**75.728.222.875,83**	**9.111.864.940,61**

BUPATI TAKALAR

MOHAMMAD KHDAUS DAENG MANYE

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	***7.5.6.1***	***1.604.796.430.708,98***	***1.577.047.163.819,12***
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	**7.5.6.2**	**80.986.718.728,52**	**17.920.877.926,03**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	**7.5.6.3**	**19.696.848.000,54**	**9.828.388.963,83**
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar	7.5.6.3.1	3.000,00	-
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	7.5.6.3.2	(766.959.095,00)	(3.531.047.110,84)
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap	7.5.6.3.3	20.418.718.225,14	16.923.166.252,87
Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan	7.5.6.3.4	-	-
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	7.5.6.3.5	-	-
Koreksi Ekuitas-Properti Investasi	7.5.6.3.6	-	-
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	7.5.6.3.7	45.085.870,40	(3.563.730.178,20)
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang	7.5.6.3.8	-	-
EKUITAS AKHIR		**1.705.479.997.438,04**	**1.604.796.430.708,98**

BUPATI TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

7.1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar terdiri dari 12 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mangarabombang, Mappakasunggu, Sanrobone, Kepulauan Tanakeke, Polombangkeng Selatan, Pattallassang, Polombangkeng Utara, Galesong Selatan, Galesong, Galesong Utara, Polongbangkeng Timur dan Laikang Kabupaten Takalar terdiri dari 86 Desa dan 24 Kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km^2. Jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Pemerintah Kabupaten Takalar merupakan entitas hukum yang berbentuk Pemerintah Daerah Kabupaten, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai entitas pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Takalar memiliki kapasitas hukum untuk mengelola keuangan dan aset daerah, serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Takalar mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Takalar, yang terdiri dari berbagai kecamatan dan desa. Yurisdiksi ini menentukan ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat untuk masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang diperlukan oleh berbagai pihak guna membuat keputusan dan kebijakan diselaraskan dengan keperluannya masing-masing. Sebagai tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan, laporan keuangan pemerintah daerah juga menunjukan realisasi pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.

Untuk mendasari pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, berpedoman pada Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama satu periode pelaporan (satu tahun anggaran). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Takalar, dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Selain laporan pokok di atas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik *(good governance*).

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak secara khusus hanya ditujukan untuk pembaca tertentu ataupun Pemerintah Kabupaten Takalar semata. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
b. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
    1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
    2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
    3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
    4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
    5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
    6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
c. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
    1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran; dan

2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

d. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
   1) Aset;
   2) Kewajiban;
   3) Ekuitas;
   4) Pendapatan-LRA;
   5) Belanja;
   6) Pembiayaan;
   7) Saldo Anggaran Lebih;
   8) Pendapatan-LO;
   9) Beban; dan
   10) Arus Kas.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 6856);
e. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
f. Undang – Undang Nomor 132 Tahun 2024, tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7096);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025;
w. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025;
x. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
y. Peraturan Bupati Takalar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
z. Peraturan Bupati Takalar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah;
aa. Peraturan Bupati Takalar Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
bb. Peraturan Bupati Takalar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.1. Pendahuluan
- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7.2.1 Gambaran Ekonomi Makro di Kabupaten Takalar
- 7.2.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.3.1. Pendapatan Daerah
7.3.2. Belanja Daerah
7.3.3. Hambatan dan Kendala
7.4. Kebijakan Akuntansi
7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.4.3 Kebijakan Akuntansi Akun
7.5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan
7.5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
7.5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
7.5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
7.5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
7.5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
7.5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7.6. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya
7.7. Penutup

7.2. Ekonomi Makro dan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

7.2.1. Gambaran Ekonomi Makro Kabupaten Takalar

Perekonomian Kabupaten Takalar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2025 mencapai Rp14.390,57 Milyar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp8.201,59 Milyar. Dengan pertumbuhan ekonomi senilai 4,71% pada Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025, diarahkan untuk "Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam Untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat" dengan prioritas meliputi: (a) Peningkatan mutu tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; (b) Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu; (c) Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan; (d) Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu; (e) Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu; (f) Pengembangan sektor pariwisata guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas; (g) Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa yang berkelanjutan; (h) Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat; (i) Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penatakelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan Nasional, Kabupaten Takalar diharapkan mampu melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah penyanggah Kota Makassar yang tergabung dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mamminasata memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Selain bisa meningkatkan peran Takalar pada sektor jasa serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi, potensi sumber daya alam khususnya pada sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor unggulan, serta pengembangan kawasan pariwisata yang dapat membantu peningkatan peran pada sektor jasa. Rencana pengembangan Kawasan Industri Takalar juga diharapkan mampu berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja produktif. Optimalisasi potensi-potensi tersebut, diharapkan mampu menjadi motor di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Takalar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Takalar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Takalar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2025, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran yang ditekan peningkatannya.

Perekonomian Kabupaten Takalar pada perubahan Tahun 2025 dititikberatkan pada menekan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan berusaha (penyederhanaan proses perizinan dan digitalisasi perizinan, mempermudah akses ke penyedia modal, dan lain-lain)
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Mendorong investasi seluruh bidang usaha;
4. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur);
6. Bersama-sama pemerintah desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan;
7. Mengembangkan ketenagakerjaan; dan
8. Peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan titik-titik strategis perekonomian rakyat.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemda Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan senilai 7,75 % atau 24,24 ribu jiwa dari 312.810 ribu jiwa penduduk Kabupaten Takalar;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) senilai 3,84% atau 12.011 jiwa dari 312.810 ribu jiwa penduduk Kabupaten Takalar;
c. *Gini Ratio* senilai 0,385%;
d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 72,06%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 4,34%;
f. Tingkat Inflasi senilai 1.19%; dan
g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2024 senilai Rp13,428 Triliun.

7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Seperti halnya dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Penduduk miskin di Takalar pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2024 yang menurun senilai 0,48 persen, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial masyarakat akan semakin membaik, maka Pemerintah Kabupaten Takalar menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin setiap tahunnya dibawah target provinsi dan nasional.

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai Rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non

pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Takalar

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	7,75	7,27	-6,19
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	23,51	22,17	-5,70
3	Provinsi (%)	8,06	7,06	-12,41
4	Nasional (%)	9,03	8,47	-23,21
5	Peringkat Provinsi	10	10	
6	Peringkat Nasional	18	18	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Persentase penduduk miskin Kabupaten Takalar pada tahun 2025 sebesar 7,27% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 atau persentasenya sebesar -6,19%. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun. Persentase penduduk miskin Kabupaten Takalar di bawah dari provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Takalar

No.	Tingkat	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,22	0,82	-32,79
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,39	1,40	0,72
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,46	1,37	-24,31
4	Peringkat Provinsi	15	5	
5	Peringkat Nasional	18	18	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Takalar

No.	Tingkat	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,29	0,17	-41,38
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,34	0,35	2,94
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,35	0,32	-8,57
4	Peringkat Provinsi	17	7	
5	Peringkat Nasional	13	22	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja terdiri dari:

(i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
(ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
(iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
(iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten, TPT Kabupaten Takalar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Takalar

No.	TPT (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,84	3,76	-2,08
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,19	4,21	0,48
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	4,91	4,85	-1,22
4	Peringkat Provinsi	14	16	
5	Peringkat Nasional	21	20	

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

TPT Kabupaten Takalar menurut data BPS pada tahun 2025 menunjukkan angka 3,76%, sedangkan TPT pada Tahun 2024 adalah 3.84%. TPT Provinsi/Nasional sebesar 4,21% dan 4,85%.

7.2.1.3. Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi dan Kabupaten, koefisien *gini ratio* Kabupaten Takalar Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Gini Ratio Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/ turun (%)
1.	Tingkat Kab/Kota	0.368	0.375	0.365	0,385	0,340	-
2.	Tingkat Provinsi	0.382	0.377	0.377	0,363	0,363	-
3.	Tingkat Nasional	0.384	0.384	0.388	0,379	0,375	-
4.	Peringkat Provinsi	15	18	18	23	17	-
5.	Peringkat Nasional	28	28	28	28	26	-

Sumber Dokumen:BPS Nasional/Prov/Kab

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di dalam

Kabupaten Takalar tidak terlalu lebar ataupun sempit jaraknya. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Stagnansi ini mengindikasikan perkembangan antar wilayah cenderung stagnan pada angka 0,36 – 0,34 selama periode 2021 - 2025.

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi dan Kabupaten, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Takalar Tahun 2025 adalah senilai 72,79 poin dengan kategori sedang sebagaimana dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/(turun) (%)
1.	Kabupaten/Kota	72,06	72,79	0,73
2.	Provinsi	75,18	75,92	0,74
3.	Indonesia/Nasional	75,02	75,90	0,88
4.	Peringkat Provinsi	19	19	
5.	Peringkat Nasional	15	14	

Sumber Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Angka IPM Kabupaten Takalar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Takalar. IPM terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam Rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Takalar pada Tahun 2024 senilai 72.06 dan Tahun 2025 senilai 72.79. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Takalar terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah senilai 72.06 poin, dibandingkan Tahun 2025 senilai 72.79 poin mengalami kenaikan senilai 0,73 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

IPM di Kabupaten Takalar pada saat ini berada pada urutan 19 dari 24

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi
dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Kabupaten Takalar			Provinsi	Nasional
		2023	2024	2025	2025	2025
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	7.507,06	7.832,92	8.201,59	417.633,94	13.580.524,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.86	4,34	4.71	5.43	5.11
3	Peringkat Provinsi	15	18	16		
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	26	16	10		

Sumber Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Selama kurun waktu Tahun 2023-2025 perekonomian Kabupaten Takalar tumbuh rata-rata 4,30%. Dalam skala provinsi, laju pertumbuhan Kabupaten Takalar menempati urutan ke-16 pada tahun 2025 dari laju pertumbuhan kota/kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian nasional, provinsi, dan Kabupaten Takalar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

(i) Inflasi ringan (*Creeping Inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
(ii) Inflasi sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
(iii) Inflasi berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

(iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi dan Kabupaten Takalar, Tingkat Inflasi Kabupaten Takalar Tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 2,69%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Takalar

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,19	2,69	1,5
2.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,23	2,84	1,61
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,57	2,92	1,35
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5.	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tingkat inflasi di Kabupaten Takalar Tahun 2024 menurut data BPS mengacu menunjukkan angka sebesar 1,19%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2025 adalah sebesar 2,69% lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024.

7.2.1.7. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Takalar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar)

(dalam Rupiah)

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.699,39	6.320,33	6.530,13	6.660,66	7.275,86
B	Pertambangan dan Penggalian	194,26	208,08	229,29	232,73	253,12
C	Industri Pengolahan	534,69	604,13	639,11	686,99	714,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,26	12,86	13,83	14,76	16,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,82	5,29	5,54	5,80	6,02
F	Konstruksi	776,83	865,43	939,05	973,20	991,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.340,95	1.475,83	1.601,04	1.722,77	1.828,80
H	Transportasi dan Pergudangan	279,50	314,71	357,45	389,97	414,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,52	37,08	40,96	44,67	47,76
J	Informasi dan Komunikasi	426,28	455,91	490,50	526,06	556,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	198,32	214,10	212,76	217,56	228,86
L	*Real Estate*	546,61	595,75	639,89	690,42	757,92
M,N	Jasa Perusahaan	0,59	0,67	0,77	0,79	0,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	748,12	788,53	776,95	831,50	845,16
P	Jasa Pendidikan	147,85	152,71	164,37	183,97	189,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	159,04	180,00	197,62	212,65	226,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	23,06	25,64	29,12	33,59	38,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**11.126,11**	**12.257,05**	**12.868,38**	**13.428,09**	**14.390,57**

PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Takalar pada tahun 2025 mencapai 14.390,57 miliar Rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13.428,09 miliar Rupiah pada tahun 2024. Adapun kontribusi terbesar pada PDRB atas Dasar Harga Berlaku tahun 2025 di Kabupaten Takalar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 46,93 persen. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Takalar pada tahun 2025 mencapai angka 8.201,59 miliar Rupiah. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha yang ada.

7.2.1.8. Potensi Unggulan Daerah

A. Potensi Komoditi Pertanian

Kabupaten Takalar memiliki komoditi pertanian yang potensial untuk dikembangkan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Dengan meningkatnya produksi pertanian dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar. Kondisi komoditi pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 10 Kondisi Komoditi Pertanian Tahun 2018-2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Padi			
	- Luas (ha)	27.665,00	27.708,0	37,476,00
	- Produksi (ton)	137.339,00	142.854	138,480,69
	- Produktivitas (ton/ha)	4,91	5,35	4,80
2	Jagung			
	- Luas (ha)	11.922,00	13.959,0	12,519,00
	- Produksi (ton)	69.710,00	83.825,37	66,356,16
	- Produktivitas (ton/ha)	5,83	6,01	6,21
3	Ubi Kayu			
	- Luas (ha)	87,00	115.0	163,00
	- Produksi (ton)	1.682,20	2.356,07	2,314,70
	- Produktivitas (ton/ha)	19,34	20,49	20,85
4	Ubi Jalar			
	- Luas (ha)	87,70	98.05	165,00
	- Produksi (ton)	1.547,20	1.743,96	2,673,44
	- Produktivitas (ton/ha)	17,64	17,79	18,06
5	Kacang Tanah			
	- Luas (ha)	53,10	54.00	31,00
	- Produksi (ton)	73,60	60,29	18,69
	- Produktivitas (ton/ha)	1,39	1,12	0,60
6	Kacang Kedelei			
	- Luas (ha)	260,30	193.00	150,00
	- Produksi (ton)	210,02	155,26	113,67
	- Produktivitas (ton/ha)	0,81	0,80	0,78
7	Kacang Hijau			
	- Luas (ha)	1.152,30	1.054.95	1,219,00
	- Produksi (ton)	1.525,70	1.391,33	1,745,89
	- Produktivitas (ton/ha)	1,32	1,32	1,44

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar 2020 dan Kabupaten Takalar dalam Angka 2021

Produksi padi di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan, di tahun 2018 produksinya sebanyak 137.339 ton yang dipanen dari lahan seluas 27.665,00 ha, meningkat menjadi 142.854,00 yang dipanen dari lahan

seluas 27.708 ha pada tahun 2019. Produksi jagung pada tahun 2018 mencapai 69.710 ton dari lahan seluas 11.922 ha meningkat menjadi 83.825,37 ton dari luas lahan seluas 13.959,00 ha pada tahun 2019. Begitu pun dengan produksi ubi jalar, mengalami peningkatan produksi dibanding dengan produksi tahun 2018. Namun, untuk produksi kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah produksi tahun 2018.

Kawasan hutan di Kabupaten Takalar memiliki luas 9.724 ha. Dari luas tersebut terdapat 7.635,62 ha yang perlu direhabilitasi. Namun demikian, sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan rehabilitasi hutan seluas 4.599 ha. Belum diperoleh data kondisi luas kawasan hutan Kabupaten Takalar per 2017 s.d 2019. Adapun rincian luas kawasan hutan Kabupaten Takalar disajikan berikut ini:

Tabel 11 Kondisi Luas Kawasan Hutan Kabupaten Takalar Tahun 2015-2016

No	Luas Kawasan Hutan	2015 (ha)	2016 (ha)
1	Hutan Lindung	86	86
2	Hutan Produksi	3.482	3.482
3	Hutan Mangrove	1.460	1.460
4	Hutan Konservasi	4.696	4.696
	Jumlah	9.724	9.724
	Hutan yang perlu direhabilitasi	7.845,62	7.635,62
	Hutan yang telah direhabilitasi	4.389	4.599

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Takalar 2016

B. Potensi Perikanan

Kabupaten Takalar dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 108 km dengan kawasan area perikanan budidaya laut sekitar 3.046 ha serta 3.978 ha kawasan area perikanan budidaya tambak. Produksi perikanan di Takalar meliputi produksi perikanan tambak, perikanan darat, dan perikanan laut. Produksi ikan laut di Kabupaten Takalar pada tahun 2019 mencapai 30.587 ton mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai
28.096 ton atau sebesar 8,87 persen. Jika dilihat menurut jenis ikan laut terdapat 6 jenis yang utama yaitu Ikan Layang, Ikan Selar, Ikan Terbang, Ikan Gulama, Ikan Kembung, dan Ikan Tembang, sedangkan untuk perikanan darat adalah Ikan Bandeng dengan produksi 3.204,4 ton pada tahun 2018, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencapai 2.231,77 ton. Jika dibandingkan dengan produksi dari 5 jenis rumput laut secara total juga mengalami penurunan produksi pada tahun 2018 mencapai 538.680,4 ton menjadi 455.198,38 ton pada tahun 2019, dengan melibatkan pelaku usaha perikanan sekitar 14.824 orang, dengan jumlah perahu/motor tempel/kapal motor berkisar 3.741 buah, dan terdapat 14 jenis alat penangkapan ikan dengan jumlah 1.162 unit armada penangkapan berukuran 1-30 GT.

C. Potensi Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Takalar merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang didukung dengan keadaan alam, kehidupan masyarakat, kondisi sosial budaya dan dunia usaha. Untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Takalar, pihak pemerintah dan pengelola terus memacu pengembangan objek-objek wisatanya dalam upaya merangsang perekonomian daerah serta menciptakan lapangan kerja.

Potensi wisata Kabupaten Takalar dapat dibagi atas tiga yaitu yang sudah dipasarkan, sudah dikembangkan dan belum dikembangkan. Objek wisata yang telah dipasarkan adalah Pantai Topejawa, merupakan kawasan wisata pantai yang terletak di Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang.

Potensi wisata yang sudah dikembangkan adalah kawasan wisata bahari di Pulau Sanrobengi dan Pulau Palenggu, kawasan permandian alam di Permandian Alam Baruga, dan kawasan wisata budaya berupa rumah adat Karaeng Galesong dan Maudu Lompoa di Cikoang.

D. Pesta Nelayan

Kawasan wisata yang belum dikembangkan adalah kepariwisataan. Kepariwisataan di Kabupaten Takalar yang dapat dikembangkan adalah kawasan wisata pantai Pasir Putih Mangarabombang, Pantai Pokko dan Pantai Parappa, taman wisata alam Pulau Tanakeke, kawasan wisata budaya berupa pesta adat Gaukang Karaeng Galesong, Benteng Sanrobone dan makam ibu Sultan Hasanuddin.

Selain potensi wisata tersebut, juga terdapat kawasan agrowisata. Sebenarnya Kabupaten Takalar memiliki potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang besar tetapi belum dikembangkan/dipromosikan secara optimal, sehingga kurang dikenal oleh para wisatawan asing maupun lokal.

E. Potensi Investasi

Secara garis besar potensi investasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Takalar mencakup:

Tabel 12 Potensi Investasi Kabupaten Takalar

No	Sektor	Komoditi	Lokasi
1	Pertanian	Tebu, padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, sayur-sayuran,dan buah-buahan serta ternak	Seluruh wilayah kecamatan Takalar se-Kab.
2	Kelautan dan Perikanan	Perikanan laut, perikanan budidaya, rumput laut, dan telur ikan terbang	Kec.Marbo, Kec. Mapsu, Kec. Sanrobone, Kec. Galesong, Galsel, dan Galut
3	Industri	Briket batubara, Etanol, Gerabah, Meubel, Pembuatan batu bata, Pengolahan rumput laut, pengolahan ikan, garam, konveksi, anyaman bambu, serat lontara dan daun pandan, pertenunan dan lain sebagainya	Tersebar di sembilan kecamatan
4	Perdagangan dan Jasa	Transportasi darat dan laut, swalayan/ minimarket, Koperasi dan UKM, properti	Tersebar di sembilan kecamatan
5	Pariwisata	Hotel Pantai wisata, Penginapan, rumah makan, Travel, BPLH Puntondo, dan objek wisata pantai, pulau, budaya, dan agama	Tersebar di sembilan kecamatan

Sumber: Kabupaten Takalar Dalam Angka 2022.

Di dalam pengembangan investasi Pemerintah Kabupaten Takalar berupaya mengembangkan investasi terpadu, untuk lebih memudahkan investor dalam menciptakan peluang usaha. Proyek investasi yang ditawarkan adalah;

a) Pengembangan Kawasan Kota Mandiri/Kawasan Industri Takalar yang dipusatkan di Kecamatan Mangarabombang dengan luas untuk tahap pertama 5.000 ha. Atas kawasan ini sudah dilakukan kerja sama dengan pihak PT Jababeka.

b) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Takalar dengan luas 3.500 ha di Kecamatan Mangarabombang Desa Punaga, Desa Laikang, dan Desa Cikoang untuk tahap pertama 350 ha.
c) Pengembangan Bendungan Pammukkulu yang sementara berlangsung, pembebasan lahan untuk kebutuhan irigasi persawahan, dan pusat listrik khusus Kabupaten Takalar.
d) Pusat pengembangan agribisnis perikanan dan rumput laut sampai dengan tahun 2019 memproduksi rumput laut Kabupaten Takalar baik jenis *euchema cottoni*, jenis *gracillaria* serta jenis *eucheuma spinosum* mencapai lebih dari 455.198,38 ribu ton basah, sehingga tidak dapat dipungkiri Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki produksi terbesar, walaupun harus diakui kualitas kedua jenis rumput laut tersebut perlu terus didorong untuk ditingkatkan.
e) Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Takalar memiliki potensi objek wisata yang cukup beragam, antara lain objek wisata pantai yang terbentang sepanjang 74 km garis pantai mulai dari Kecamatan Galesong Utara, Galesong, Galesong Selatan, Sanrobone, Mappakasunggu, dan Mangarabombang. Objek wisata gunung dan pulau serta objek wisata budaya seperti Maudu Lompoa di Cikoang dan Pesta Nelayan di Galesong.
f) Pengembangan Pusat Pelelangan Ikan yang ditempatkan di Pelabuhan Beba Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.
g) Pengembangan kawasan perkebunan tebu di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan.

F. Potensi Pengembangan Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pembinaan di bidang koperasi dan UMKM diarahkan pada bimbingan, pengawasan, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selain itu fasilitasi permodalan dan pengesahan lembaga hukum dalam rangka peningkatan produktivitas pengusaha, membangun motivasi, disiplin, dan etos kerja yang profesional mengarah pada proses produksi efisiensi efektif yang mengembangkan pola kemitraan dan kewirausahaan.

Pada tahun 2025, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Takalar sebanyak 258 unit. Seluruh koperasi tersebut tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Takalar. Menurut jenis koperasi, pada tahun 2025, terdapat 19 unit Koperasi Unit Desa (KUD), 41 unit Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), 5 unit Koperasi Karyawan (KOPKAR), dan 318 unit koperasi lainnya di Kabupaten Takalar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel keragaman koperasi di Kabupaten Takalar dibawah ini:

Tabel 13 Rekapitulasi Keragaman Koperasi Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Kelompok/jenis	Koperasi (unit)				Anggota/ (orang)	
		Jml	Aktif	Tidak Aktif	Beku	Lk	Pr
1	Koperasi Unit Desa (KUD)	19	17	2	0	7.282	3.746
2	Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)	41	33	7	1	2.342	1.136

No	Kelompok/jenis	Koperasi (unit)				Anggota/ (orang)	
		Jml	Aktif	Tidak Aktif	Beku	Lk	Pr
3	Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPOL)	1	1	0	0	489	158
4	Primer Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD)	2	2	0	0	312	18
5	Primer Koperasi Veteran Indonesia (PRIMKOVERI)	1	0	0	1	32	-
6	Koperasi Wanita (KOPWAN)	14	9	4	1	-	1.112
7	Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	36	27	6	3	3.088	2.206
8	Koperasi Karyawan (KOPKAR)	5	4	1	0	382	181
9	Koperasi Pasar (KOPPAS)	3	1	0	2	646	544
10	Koperasi Serba Usaha (KSU)	88	59	18	11	5.507	3.705
11	Koperasi Pertanian (KOPTAN)	26	12	7	7	1.881	824
12	Koperasi Perikanan (KOPIN)	23	15	5	3	2.280	354
13	Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)	7	4	2	1	990	436
14	Koperasi Industri dan Kerajinan (KOPINKRA)	1	0	0	1	16	7
15	Koperasi Perkebunan	5	2	2	1	300	110
16	Koperasi Peternakan	2	0	2	0	69	-
17	Koperasi Lainnya	102	70	22	10	3.819	2.097
18	Koperasi Sekunder	2	2	0	0	286	72

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Takalar 2025

Industri kecil dan menengah di Kabupaten Takalar cukup memberikan peranan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan karena industri ini mandiri dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Kabupaten Takalar dikenal sebagai sentra pengembangan industri kerajinan gerabah dan berbagai bentuk anyaman dari serat daun lontar dengan kualitas yang sudah diakui tingkat nasional serta berbagai bentuk kerajinan lainnya yang dikelola dalam bentuk industri rumah tangga. Keberadaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Takalar layak mendapatkan perhatian yang lebih, dalam pengembangan dan pembinaan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk bisa bersaing dalam persaingan pasar modern.

Dari 10 Kecamatan di Kabupaten Takalar terdapat sejumlah kelompok industri kecil dan menengah yang menghasilkan aneka produk khas yang diantaranya menjadi produk unggulan Kabupaten Takalar, seperti:

a) Industri kerajinan serat lontar

Kerajinan serat lontar adalah salah satu kerajinan yang terkenal di Kabupaten Takalar yang bahan bakunya berasal dari serat pelepah pohon lontar. Kerajinan serat lontar ini merupakan kerajinan yang sudah dikenal sejak dulu dan sudah menjadi kerajinan warisan nenek moyang yang tersebar di beberapa desa. Sentra dari kerajinan ini terletak di Desa Bontokassi dan Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan. Hasil kerajinan serat lontar antara lain songkok guru dan sejenis topi lainnya, kipas anyaman, hiasan-hiasan meja, gelang, gantungan kunci dan

berbagai kerajinan lainnya.

b) Industri mebel

Salah satu pusat industri mebel di Sulawesi Selatan terletak di Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar. IKM mebel di Manongkoki memproduksi berbagai jenis mebel dengan jumlah tenaga kerja yang sangat banyak. Bahkan hampir tiap rumah yang ada di kelurahan ini membuat mebel. Namun sayangnya jenis mebel yang diproduksi kebanyakan masih dalam bentuk setengah jadi yang kemudian dijual di daerah lain untuk diproduksi lebih lanjut.

c) Industri gerabah

Gerabah adalah salah satu kerajinan tangan tradisonal yang berkembang lama di Kecamatan Pattallassang dan Mappakasunggu sejak tahun 1980. Usaha kerajinan gerabah kebanyakan adalah industri kecil atau bahkan termasuk industri rumah tangga. Hasil kerajinan gerabah antara lain seperti guci, kursi gerabah, vas bunga, tungku, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Sentra gerabah terletak di Kecamatan Pattallassang dan beberapa di Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar.

d) Industri garam

Kabupaten Takalar merupakan penghasil garam terbesar kedua setelah Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas lahan ±320 ha dan pada tahun 2018 produksi garam di Kabupaten Takalar sekitar 10.451,80 ton. Karena itu industri garam beryodium sangat potensial berkembang di Takalar dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan garam lokal. Industri garam beryodium terdapat di tiga kecamatan yakni Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Mangarabombang, dan Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar.

e) Industri rumput laut

Kondisi wilayah Kabupaten Takalar yang berbatasan langsung dengan selat dan laut, memungkinkan penduduk di sekitarnya dapat mengembangkan budidaya rumput laut terutama di Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Sanrobone. Namun industri pengolahan jumlahnya masih cukup terbatas dan kebanyakan masih skala industri rumah tangga sehingga kebanyakan rumput laut kering langsung dijual tanpa pengolahan lebih lanjut.

f) Aneka industri kecil lainnya

Di Kabupaten Takalar selain dikenal dengan sentra serat lontar dan gerabah juga masih banyak IKM yang mempunyai hasil produksi tak kalah dengan daerah lainnya, seperti makanan dodol yang terdapat di Kecamatan Mangarabombang, Selain itu juga tak kalah menariknya produksi cemilan lainnya yang merupakan ciri khas Kabupaten Takalar, seperti bipang yang terletak di Kecamanatan Pattallassang. Bipang ini merupakan produksi IKM yang paling diminati masyarakat yang berkunjung ke Takalar, karena mempunyai aneka macam rasa dan sangat cocok dijadikan buah tangan.

7.2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Idealnya Pemerintah Kabupaten Takalar mampu melaksanakan semua

urusan pemerintahan dan pembangunan hanya bertumpu pada PAD.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta capaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Arah dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan pendapatan diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kabupaten termasuk mengembangkan BUMD.

Program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Takalar. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Akan tetapi, kenyataan menunjukkan target PAD yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten setiap tahunnya belum terpenuhi. Selama ini PAD bertumpu pada Pajak dan Retribusi Daerah, padahal berdasarkan Undang- undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa PAD bisa juga diperoleh dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya untuk memaksimalkan PAD dari hasil perusahaan daerah bisa dilakukan dengan pemberdayaan BUMD yang dapat ditempuh melalui strategi reformasi BUMD, restrukturisasi BUMD, dan profitisasi BUMD.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah yaitu kemampuan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mengingat kontribusi PAD terhadap pendapatan yang masih relatif kecil terhadap pendapatan daerah maka PAD senantiasa harus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat mengimbangi pendapatan daerah dari dana perimbangan.

b. Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik *(public accountability)* dengan berdasar pada prinsip *value for money*.

Untuk itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja *(performance bugdet)* yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan adanya efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada standar analisis belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung guna meningkatkan aspek transparansi. Kriteria tersebut bertitik tolak dari kegiatan yang dilakukan.

Penggunaan belanja juga direncanakan untuk lebih berfokus kepada kegiatan-kegiatan yang lebih aspiratif dan kreatif yang merangsang perkembangan masyarakat dan pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan hendaknya yang merupakan pengembangan potensi masyarakat dan potensi pemerintah dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dengan membandingkan antara nilai ekonomis dan manfaat kegiatan itu sendiri.

c. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan dalam hal terjadi defisit anggaran adalah menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penggunaan dana cadangan, dan penjualan aset daerah yang dipisahkan untuk menutupi defisit tersebut.

Hal tersebut diambil agar kebijakan fiskal dapat berjalan sehingga dapat mendorong dan mengembangkan perekonomian daerah serta menjalankan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

d. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaran pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Takalar terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat. Angka melek huruf yang semula tercatat senilai 80,80% menjadi 100%. Keberhasilan lain terlihat di Bidang Kesehatan dengan dijalankannya Program Kesehatan Gratis, atau akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar 72.79% pada tahun 2025. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Takalar Tahun 2025).

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan APBD merupakan mekanisme penyesuaian terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Anggaran Pokok), yang dilakukan apabila terjadi perkembangan keadaan yang menyebabkan perencanaan dalam anggaran semula tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini.

Secara umum, perubahan anggaran ini ditujukan untuk menyesuaikan target pendapatan agar lebih terukur, rasional, dapat dicapai dan menyesuaikan alokasi belanja sesuai kebijakan efisiensi dan prioritas pembangunan, serta menyesuaikan pembiayaan berdasarkan hasil audit atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Tabel 14 Perbandingan APBD Pokok dan APBD Perubahan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran		selisih Kenaikan (Penurunan)	%
		APBD Pokok	Setelah Perubahan		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**219.248.884.957,00**	**185.918.476.414,00**	**-33.330.408.543,00**	**-17,93**
4.1.01	Pajak Daerah	48.186.474.957,00	46.767.000.000,00	-1.419.474.957,00	-3,04
4.1.02	Retribusi Daerah	2.913.210.000,00	2.790.300.000,00	-122.910.000,00	-4,40
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000.000.000,00	10.483.318.114,00	-3.516.681.886,00	-33,55

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran		selisih Kenaikan (Penurunan)	%
		APBD Pokok	Setelah Perubahan		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	154.149.200.000,00	125.877.858.300,00	-28.271.341.700,00	-22,46
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**993.506.890.081,00**	**1.035.837.991.768,00**	**42.331.101.687,00**	**4,09**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	953.479.438.000,00	945.117.271.000,00	-8.362.167.000,00	-0,88
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.027.452.081,00	90.720.720.768,00	50.693.268.687,00	55,88
	Jumlah	**1.212.755.775.038,00**	**1.221.756.468.182,00**	**9.000.693.144,00**	**0,74**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**964.455.676.638,00**	**958.865.030.489,27**	**-5.590.646.148,73**	**-0,58**
5.1.01	Belanja Pegawai	580.076.850.812,86	572.073.250.948,88	-8.003.599.863,98	-1,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.951.326.463,14	354.864.353.178,39	21.913.026.715	6
5.1.03	Belanja Bunga	12.096.567.195,00	12.096.567.195,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	39.315.932.167,00	19.815.859.167,00	-19.500.073.000,00	-98,41
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**67.689.480.138,00**	**81.969.901.917,73**	**14.280.421.779,73**	**17,42**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.215.500.000,00	429.300.000,00	-1.786.200.000,00	-416,07
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.006.003.407,00	28.314.775.374,00	308.771.967,00	1,09
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.593.736.946,00	18.803.815.602,73	3.210.078.656,73	17,07
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.624.239.785,00	32.883.010.941,00	11.258.771.156,00	34,24
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		114.000.000,00	114.000.000,00	100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	1.425.000.000,00	1.175.000.000,00	82,46
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.400.000.000,00**	**4.400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	0,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**146.997.082.403,00**	**146.310.603.903,00**	**-686.478.500,00**	**-0,47**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.110.744.903,00	3.110.744.903,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.886.337.500,00	143.199.859.000,00	-686.478.500,00	-0,48
	Jumlah Belanja	**1.183.542.239.179,00**	**1.191.545.536.310,00**	**8.003.297.131,00**	**0,67**
	surplus/devisit	**29.213.535.859,00**	**30.210.931.872,00**	**997.396.013,00**	**3,30**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**10.000.000.000,00**	**9.075.550.077,00**	**-924.449.923,00**	**-10,19**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	9.075.550.077,00	-924.449.923,00	-10,19
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**39.213.535.859,00**	**39.286.481.949,00**	**72.946.090,00**	**0,19**
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	39.213.535.859,00	39.286.481.949,00	72.946.090,00	0,19
Jumlah Pembiayaan Netto		**-29.213.535.859,00**	**-30.210.931.872,00**	**-997.396.013,00**	**3,30**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian target keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah akan memberikan gambaran dan solusi dalam upaya perbaikan suatu

daerah dimasa yang akan datang. Pada akhirnya hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil proses keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah.

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah akan memberikan gambaran dan solusi dalam upaya perbaikan suatu daerah dimasa yang akan datang. Pada akhirnya hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil proses keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah.

Kabupaten Takalar sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah karena memiliki komoditi pertanian yang potensial untuk dikembangkan, potensi perikanan dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 108 km dengan kawasan area perikanan budidaya laut sekitar 3.046 ha serta 3.978 ha kawasan area perikanan budidaya tambak dan merupakan salah satu penopang kota makassar. Perekonomian Kabupaten Takalar 2024-2025 tumbuh positif, didorong utama oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang hampir 50% PDRB, didukung potensi rumput laut dan agromaritim. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,34% pada 2024, didukung sektor jasa. Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah pemerintah kabupaten/kota umumnya diukur melalui realisasi pendapatan daerah melebihi target APBD dan efektivitas pengelolaan belanja. Kinerja keuangan yang baik ditandai dengan PAD yang cukup efektif dan rasio kemandirian daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Berikut adalah poin-poin utama terkait pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Takalar pada tahun Anggaran 2025:

Pada Tahun Anggaran 2025 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar ditetapkan sebesar Rp 1.191.545.536.310,00,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 185.918.476.414,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 1.035.837.991.768,00. Realisasi kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Takalar selama Tahun Anggaran 2025 dapat di lihat pada tabel berikut..

Tabel 15 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kab. Takalar TA. 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	46.767.000.000,00	51.722.570.240,00	(4.964.608.825,00)	110,62
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2.790.300.000,00	2.981.016.909,00	(190.716.909,00)	106,83
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.483.318.114,00	10.316.849.525,00	166.468.589,00	98,41
6	Lain-lain PAD yang Sah	125.877.858.300,00	111.697.517.482,95	14.189.393.156,05	88,73
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**185.918.476.414,00**	**176.717.954.156,95**	**9.200.536.011,05**	**95,05**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	15.543.009.000,00	14.065.640.700,00	1.477.368.300,00	90,49
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.169.712.000,00	4.181.825.000,00	(12.113.000,00)	100,29
13	Dana Alokasi Umum	651.690.726.000,00	666.777.754.612,00	(15.087.028.612,00)	102,32
14	Dana Alokasi Khusus	183.359.515.000,00	180.612.971.027,00	2.746.543.973,00	98,50
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**854.762.962.000,00**	**865.638.191.339,00**	**(10.875.229.339,00)**	**101,27**
16					
17	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA**				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	90.354.309.000,00	90.354.309.000,00	0,00	100,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya**	**90.354.309.000,00**	**90.354.309.000,00**	**0,00**	**100,00**
21					
22	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.859.114.052,00	61.833.790.005,00	(8.974.675.953,00)	116,98
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Bantuan Keuangan	37.861.606.716,00	0,00	37.861.606.716,00	0,00
26	**Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi**	**90.720.720.768,00**	**61.833.790.005,00**	**28.886.930.763,00**	**68,16**
27	**Total Pendapatan Transfer**	**1.035.837.991.768,00**	**1.017.826.290.344,00**	**18.011.701.424,00**	**98,26**
28					
29	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
30	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34					
35	**JUMLAH PENDAPATAN**	**1.221.756.468.182,00**	**1.194.544.244.500,95**	**27.212.223.681,05**	**97,77**
36					
37	**BELANJA**				
38	**BELANJA OPERASI**				
39	Belanja Pegawai	572.073.250.948,88	532.422.437.350,17	39.650.813.598,71	93,07
40	Belanja Barang dan Jasa	354.864.353.178,39	312.488.982.645,20	42.375.370.533,19	88,06

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
41	Belanja Bunga	12.096.567.195,00	12.699.563.978,00	(602.996.783,00)	104,98
42	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Hibah	19.815.859.167,00	19.058.730.167,00	757.129.000,00	96,18
44	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
45	**Jumlah Belanja Operasi**	**958.865.030.489,27**	**876.684.714.140,37**	**82.180.316.348,90**	**91,43**
46					
47	**BELANJA MODAL**				
48	Belanja Tanah	429.300.000,00	415.341.000,00	13.959.000,00	96,75
49	Belanja Peralatan dan Mesin	28.314.775.374,00	24.610.634.185,00	3.704.141.189,00	86,92
50	Belanja Gedung dan Bangunan	18.803.815.602,73	17.152.877.619,00	1.650.937.983,73	91,22
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.883.010.941,00	21.930.774.355,36	10.952.236.585,64	66,69
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	114.000.000,00	113.397.600,00	602.400,00	99,47
53	Belanja Aset Lainnya	1.425.000.000,00	1.419.500.000,00	5.500.000,00	99,61
54	**Jumlah Belanja Modal**	**81.969.901.917,73**	**65.642.524.759,36**	**16.327.377.158,37**	**80,08**
55					
56	**BELANJA TAK TERDUGA**				
57	Belanja Tak Terduga	4.400.000.000,00	634.620.320,00	3.765.379.680,00	14,42
58	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**4.400.000.000,00**	**634.620.320,00**	**3.765.379.680,00**	**14,42**
59					
60	**TRANSFER**				
61	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**				
62	Bagi Hasil Pajak	2.855.465.463,00	2.839.113.978,00	16.351.485,00	99,43
63	Bagi Hasil Retribusi	255.279.440,00	229.910.300,00	25.369.140,00	90,06
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa**	**3.110.744.903,00**	**3.069.024.278,00**	**41.720.625,00**	**98,66**
66					
67	**TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN**				
68	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kpd Desa	143.199.859.000,00	143.007.385.357,00	192.473.643,00	99,87
71	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan**	**143.199.859.000,00**	**143.007.385.357,00**	**192.473.643,00**	**99,87**
72					

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
73	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER**	**1.191.545.536.310,00**	**1.089.038.268.854,73**	**102.507.267.455,27**	**91,40**
74					
75	**SURPLUS/DEFISIT**	**30.210.931.872,00**	**105.505.975.646,22**	**(75.295.043.774,22)**	**349,23**
76					
77	**PEMBIAYAAN**				
78	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
79	Penggunaan SiLPA	9.075.550.077,00	9.075.550.076,92	0,08	100,00
80	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**9.075.550.077,00**	**9.075.550.076,92**	**0,08**	**100,00**
92					
93	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
94	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	39.286.481.949,00	38.889.778.488,00	396.703.461,00	98,99
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
105	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**39.286.481.949,00**	**38.889.778.488,00**	**396.703.461,00**	**98,99**
106					
107	**PEMBIAYAAN NETTO**	**(30.210.931.872,00)**	**(29.814.228.411,08)**	**(396.703.460,92)**	**98,69**
108					
109	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**0,00**	**75.691.747.235,14**	**(75.691.747.235,14)**	**0,00**

Berikut adalah poin-poin utama terkait pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Takalar pada tahun Anggaran 2025:

7.3.1. Pendapatan Daerah

Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pendapatan Asli Daerah Dalam Penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memperhatikan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan;
2. Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada, peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah serta pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang berbasis Digital;
3. Pendapatan BLUD diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran dan dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran, kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukkannya.

Pendapatan Transfer Penganggaran Pendapatan daerah yang

bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan berkurang dari alokasi Tahun Anggaran berjalan, namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025;
2. Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan berkurang dari alokasi Tahun Anggaran berjalan, namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu defenitif dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025;
3. Rencana alokasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran berjalan namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Pusat;
4. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) diasumsikan sama dengan alokasi Tahun Anggaran berjalan.

Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak dianggarkan dalam Perubahan Tahun Anggaran 2025

Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025. Ikhtisar ini disusun untuk menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pada tahun anggaran 2025 Realisasi Pendapatan Daerah kabupaten Takalar senilai Rp1.194.544.244.500,95 atau 97,77% dari anggaran senilai Rp1.221.756.468.182,00 ditetapkan dalam APBD Perubahan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp176.717.940.402,95 atau 95,05% dari target sebesar Rp185.918.476.414,00, hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mencapai target dan memperlihat tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber pendapatan daerah. Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan operasional pada Badan Pendapatan Daerah dan OPD Lainnya.

7.3.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025 realisasi belanja kabupaten Takalar senilai Rp1.089.038.268.854,73 atau sebesar 91,40% dari anggaran senilai Rp1.191.545.536.310,00. Pencapaian belanja ini bersifat fluktuatif dan masih fokus pada belanja operasional seperti belanja pegawai dan barang dan jasa untuk pelayanan publik. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan selain penerimaan, belanja, dan pembiayaan juga ditentukan kualitas Sumber Daya Manusia, serta kondisi makro ekonomi daerah.

Pencapaian Kinerja Operasional Secara keseluruhan, kegiatan operasional yang berdimensi keuangan pada Tahun Anggaran 2025 telah mencapai hasil sebagai berikut:

Surplus Anggaran: Tercapai surplus senilai Rp105.505.975.646,22, atau sebesar 349,23% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar

Rp4.998.364.931,40.

Surplus ini merupakan selisih positif antara realisasi pendapatan dan belanja yang akan menambah Saldo Anggaran Lebih. Tingkat Penyerapan Anggaran pada seluruh OPD, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional telah sesuai dengan perencanaan waktu dan anggaran. Konsistensi terhadap Perencanaan mengindikasikan akurasi perencanaan dan pengendalian anggaran yang baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pencapaian ini menjadi dasar untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.

7.3.3. Hambatan dan Kendala

Pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1) Dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program infrastruktur;
2) Belum optimalnya realisasi belanja sebesar 91,39% akibat keterlambatan proses administrasi dan teknis;
3) Potensi PAD belum tergali maksimal sehingga diperlukan pemutakhiran data PBB-P2 dan digitalisasi sistem pembayaran retribusi;
4) Pengawasan terhadap wajib pajak perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan.

7.4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas di pemerintah Daerah terdiri atas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Takalar secara keseluruhan, sedangkan entitas akuntansi meliputi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga teknis daerah lainnya yang dibentuk dengan peraturan daerah.

Setiap entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Takalar berkewajiban menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan entitas akuntansi akan menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat lima SKPD yang mengalami perubahan nomenkelatur dan tiga SKPD mengalami pemekaran. dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 16 Rincian Penambahan dan Perubahan Nomenklatur SKPD

No	Nomenklatur SKPD Lama	Nomenklatur SKPD Baru	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perubahan
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Perubahan
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perubahan
4	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Perubahan
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perubahan
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Perubahan
7		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penambahan
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Perubahan
9		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penambahan
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perubahan
11		Badan Pendapatan Daerah	Penambahan
12	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Perubahan

Adapun entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah Kabupaten Takalar sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2022 pada tabel berikut:

Tabel 17 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Kab. Takalar

No.	OPD	Keterangan
1	Pemerintah Daerah Kab. Takalar	Entitas Pelaporan Keuangan Konsolidasi
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Entitas Akuntansi
3	Dinas Kesehatan	Entitas Akuntansi
4	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	Entitas Akuntansi
5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Entitas Akuntansi
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Entitas Akuntansi
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Entitas Akuntansi
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Entitas Akuntansi
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Entitas Akuntansi
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Entitas Akuntansi
11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Entitas Akuntansi
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	Entitas Akuntansi
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Entitas Akuntansi
14	Dinas Perhubungan	Entitas Akuntansi
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Entitas Akuntansi
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Entitas Akuntansi

No.	OPD	Keterangan
17	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Entitas Akuntansi
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Entitas Akuntansi
19	Dinas Perikanan	Entitas Akuntansi
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Entitas Akuntansi
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Entitas Akuntansi
22	Sekretariat Daerah	Entitas Akuntansi
23	Sekretariat DPRD	Entitas Akuntansi
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Entitas Akuntansi
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Entitas Akuntansi
26	Badan Pendapatan Daerah	Entitas Akuntansi
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Entitas Akuntansi
27	Inspektorat	Entitas Akuntansi
28	Kecamatan Pattallassang	Entitas Akuntansi
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	Entitas Akuntansi
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	Entitas Akuntansi
31	Kecamatan Mangarabombang	Entitas Akuntansi
32	Kecamatan Mappakasunggu	Entitas Akuntansi
33	Kecamatan Sanrobone	Entitas Akuntansi
34	Kecamatan Galesong Selatan	Entitas Akuntansi
35	Kecamatan Galesong	Entitas Akuntansi
36	Kecamatan Galesong Utara	Entitas Akuntansi
37	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Entitas Akuntansi
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Entitas Akuntansi

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan istilah Sisa (lebih/kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian, atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Adapun penerapan basis akuntansi akrual ini baru diterapkan Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.3. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar ditetapkan melalui Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan defenisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun. Kebijakan akuntansi adalah inplementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

Kebijakan Akuntansi Akun dan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi Aset;
b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA;
e. Kebijakan Akuntansi Belanja;
f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
g. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
h. Kebijakan Akuntansi Beban;
i. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
j. Perubahan Kebijakan Akuntansi;
k. Perubahan Estimasi Akuntansi;
l. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan; dan
m. Peristiwa Luar Biasa.

Penjelasan atas kebijakan akuntansi pemda adalah sebagai berikut:

7.4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

- **Aset Lancar**

a. Definisi Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah;
(2) Kas di Bendahara Penerimaan;

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
(5) Kas lainnya.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:
(1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
(2) Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Klasifikasi Kas dan Setara Kas secara terinci diuraikan dalam BAS.

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:
(1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
(2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Atas dasar angka 1 tersebut dapat dikatakan bahwa Kas dan Setara Kas diakui pada saat Kas dan Setara Kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Kas di BLUD merupakan Kas di bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan Kas dan Setara Kas, antara lain :
1. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
2. rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

- **Investasi Jangka Pendek**

a. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

1) Pengeluaran kas menjadi Investasi Jangka Pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi Jangka Pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2) nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai *(reliable)* karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

3) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan, pengurang Investasi Jangka Pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan,
4) Jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
5) Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai *(cash dividend)* diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

b. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
2) Pengukuran Investasi Jangka Pendek dapat diuraikan sebagai berikut: Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
   (a) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
   (b) apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

a) Investasi Jangka Pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
b) Pengungkapan Investasi Jangka Pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   (1) kebijakan akuntansi penentuan nilai Investasi Jangka Pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
   (2) jenis-jenis Investasi Jangka Pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
   (3) perubahan nilai pasar Investasi Jangka Pendek (jika ada);
   (4) penurunan nilai Investasi Jangka Pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
   (5) perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi Investasi Jangka Pendek, Aset Tetap, aset Lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

- **Piutang**

1) Pengakuan Piutang

a) Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
   (1) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
   (2) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta

belum dilunasi.

b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
   (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   (2) jumlah Piutang dapat diukur.

c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku senilai hak daerah yang belum dibayarkan.

d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya senilai jumlah yang belum ditransfer.

f) Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:
   (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
   (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

h) Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

i) Piutang Kelebihan Transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K), Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

2) Pengukuran Piutang

a) Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-

undangan, adalah sebagai berikut:

(1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

(2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

(3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

(2) Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten; dan

(3) Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d) Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(1) Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(2) Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di

atas 12 bulan berikutnya.

e) Pengukuran berikutnya *(subsequent measurement)* terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.
g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value),* yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 5 (lima) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   (1) kualitas piutang lancar;
   (2) kualitas piutang lancar dengan perhatian khusus;
   (3) kualitas piutang kurang lancar;
   (4) kualitas piutang diragukan; dan
   (5) kualitas piutang macet.
i) Penggolongan kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   (1) Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment);* dan
   (2) Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.
j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:
   (1) kualitas lancar, dengan kriteria:
      (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
      (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
      (c) Wajib Pajak kooperatif;
      (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
      (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
   (2) kualitas lancar dengan perhatian khusus, dengan kriteria:
      (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
      (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
      (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
      (d) Wajib Pajak mengajukan keberpiutaatan/banding.
   (3) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
      (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
      (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
      (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
      (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
   (4) kualitas diragukan, dengan kriteria:
      (a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun;
      (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
      (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
      (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
   (5) kualitas macet, dengan kriteria:
      (a) Umur piutang diatas 4 tahun;

(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

k) Penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:
(1) kualitas lancar, dengan kriteria:
(a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
(b) Wajib Pajak kooperatif;
(c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
(d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
(2) kualitas lancar dengan perhatian khusus, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
(b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
(c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
(3) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
(b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
(c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
(4) kualitas diragukan, dengan kriteria:
(a) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun;
(b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
(c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(5) kualitas macet, dengan kriteria:
(a) Umur piutang diatas 4 tahun;
(b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
(c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
(d) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

l) Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
(1) kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
(2) kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
(3) kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
(4) kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

m) Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
(1) kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
(2) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
(3) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
(4) kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan

Piutang Daerah/Negara.

n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
   (1) 1.0% (satu perseratus) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
   (2) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar dengan perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   (3) 25% (dua puluh lima perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   (4) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   (5) 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

3) Pemberhentian Pengakuan

a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down)*.

c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
   (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
      (a) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas

akuntansi dan entitas pelaporan.

(b) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.

(c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

g) Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur, dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar Rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar Rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

(5) Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

(6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, dan melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.

(7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off)* masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

4) Pengungkapan Piutang

a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
   (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
   (2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   (3) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
   (4) jaminan atau sita jaminan jika ada.

b) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dan dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan Pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

- **Beban Dibayar Dimuka**

1) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

2) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/dibayarkan.

3) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

- **Persediaan**

1. Pengakuan Persediaan
   a. Persediaan diakui:
      (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
      (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
   b. Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
2. Pengukuran Persediaan
   a. Metode pencatatan Persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran Persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.

b. Persediaan disajikan senilai:
   (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   (2) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(arm length transaction)*.

3. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
   a. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
   b. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
      1. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
      2. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

- **Aset untuk Dikonsolidasikan**
  1) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
     Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
  2) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
     Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
  3) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan
     Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Aset Lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.
- **Aset Non Lancar**
  Aset Non Lancar terdiri dari Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.
  a. Investasi Jangka Panjang
     1) Pengakuan Investasi Jangka Panjang
        a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
           (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
           (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai *(reliable)*.
        b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

(1) deviden tunai;
(2) deviden saham; dan
(3) bagian laba.

c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

e) Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
(2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi Permanen misalnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran Investasi Jangka Panjang untuk Investasi Nonpermanen yaitu:
(1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
(2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
(3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
(4) Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah senilai biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
(5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
(6) Investasi Non Permanen Lainnya dalam bentuk Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan

digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value).*

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi *(carrying value)* tersebut.
e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
(1)metode biaya;
(2)metode ekuitas; dan
(3)metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat senilai biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal senilai biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi senilai bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.
j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

3) Penyajian dan pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
(1) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman

masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih beredar *(outstanding)*.

(2) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

(3) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.

(4) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut:

(5) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

Tabel 18 Penyisihan investasi non permanen

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
		Tidak melampaui jatuh tempo	Jatuh tempo 0-3 Bulan	Jatuh Tempo 4-9 bulan	Jatuh Tempo 10-12 bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 bulan
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%

b. Aset Tetap

1) Pengakuan Aset Tetap

a) Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

b) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) berwujud;

(2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

(6) nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal.

d) Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e) Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

g) Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara

hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran Aset Tetap
   a) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan.
   b) Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
   c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
   d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
   e) Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
   f) Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 19 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluara nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi Aset Tetap.
h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

3) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

4) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5) Aset Tetap Digunakan Bersama
a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusanpenggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b) Aset Tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

6) Aset Perjanjian Kerja Sama Fasos Fasum
a) Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
b) Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos fasum diperoleh.

7) Pertukaran Aset *(Exchange of Assets)*
a) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah

disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

b) Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat *(carrying amount)* atas aset yang dilepas.

c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan *(impairment)* nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan *(written down)* dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan *(written down)* tersebut merupakan nilai aset yang diterima.
Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

8) Aset Donasi

a) Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

b) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

c) Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

9) Pengeluaran Setelah Perolehan *(Subsequent Expenditures)*
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap *(subsequent expenditures)* adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu Aset Tetap *(subsequent expenditures)* yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

a) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan

akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas Aset Tetap yang dipelihara:
   (a) bertambah ekonomis/efisien;
   (b) bertambah umur ekonomis;
   (c) bertambah volume; dan/atau
   (d) bertambah kapasitas produksi.

(2) Nilai Rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan Aset Tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang ditetapkan *(capitalization thresholds)*.

b) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

c) Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap *(capitalization thresholds)* ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 20 Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No		Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
1		Tanah	Tidak dibatasi
2		Peralatan dan Mesin. Terdiri Atas	
2.1		Alat Besar	
	2.1.1	Alat Besar Darat	50.000.000,00
	2.1.2	Alat Besar Apung	50.000.000,00
	2.1.3	Alat Bantu	5.000.000,00
2.2		Alat Angkutan	
	2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.500.000,00
	2.2.2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	1.500.000,00
	2.2.3	Alat Angkut Apung Bermotor	3.000.000,00
	2.2.4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1.500.000,00
	2.2.5	Alat Angkut Bermotor Udara	10.000.000,00
2.3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4		Alat Pertanian	500.000,00
2.5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
2.6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.000.000,00
2.7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.500.000,00
2.8		Alat Laboratorium	1.500.000,00
2.9		Alat Persenjataan	500.000,00
2.1		Komputer	500.000,00
2.11		Alat Eksplorasi	500.000,00
2.12		Alat Pengeboran	500.000,00
2.13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	500.000,00
2.14		Alat Bantu Eksplorasi	500.000,00

No		Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan
2.15		Alat Keselamatan Kerja	500.000,00
2.16		Alat Peraga	500.000,00
2.17		Peralatan Proses/Produksi	500.000,00
2.18		Rambu - Rambu	500.000,00
2.19		Peralatan Olah Raga	500.000,00
3		Gedung dan Bangunan	50.000.000,00
4		Jalan Irigasi dan Jaringan	50.000.000,00
5		Aset Tetap Lainnya, Terdiri atas :	
5.1		Bahan perpustakaan	100.000,00
5.2		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	500.000,00
5.3		Hewan	Tidak dibatasi
5.4		Biota perairan	Tidak dibatasi

10) Penyusutan

a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus *(straight line method)* berdasarkan tahun perolehan.

b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai *(overhaul)*.
   (1)Nilai residu 0;
   (2)Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang

c) Untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan laporan keuangan tahun berkenaan.

d) Masa manfaat Aset Tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21 Masa manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**			**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**		**Peralatan dan Mesin**	
1	**3**	**2**	**01**	**Alat Besar**	
1	3	2	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	Alat Bantu	7
1	**3**	**2**	**02**	**Alat Angkutan**	
1	3	2	02	Alat Angkutan DaratBermotor	7
1	3	2	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	**3**	**2**	**03**	**Alat Bengkel dan Alat Ukur**	
1	3	2	03	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	Alat Ukur	5
1	**3**	**2**	**04**	**Alat Pertanian**	

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	04	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	**3**	**2**	**05**	**Alat Kantor dan Rumah Tangga**	
1	3	2	05	Alat Kantor	5
1	3	2	05	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	**3**	**2**	**06**	**Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**	
1	3	2	06	Alat Studio	5
1	3	2	06	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	**3**	**2**	**07**	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	
1	3	2	07	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	Alat Kesehatan Umum	5
1	**3**	**2**	**08**	**Alat Laboratorium**	
1	3	2	08	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	Alat Laboratorium	7
				Lingkungan Hidup	
1	3	2	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	**3**	**2**	**09**	**Alat Persenjataan**	
1	3	2	09	Senjata Api	10
1	3	2	09	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	Senjata Sinar	3
1	3	2	09	Alat Khusus Kepolisian	3
1	**3**	**2**	**10**	**Komputer**	
1	3	2	10	Komputer Unit	5
1	3	2	10	Peralatan Komputer	4
1	**3**	**2**	**11**	**Alat Eksplorasi**	
1	3	2	11	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	**3**	**2**	**12**	**Alat Pengeboran**	
1	3	2	12	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	**3**	**2**	**13**	**Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian**	
1	3	2	13	Sumur	10
1	3	2	13	Produksi	10

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	13	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	**3**	**2**	**14**	**Alat Bantu Eksplorasi**	
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	Alat Bantu Produksi	10
1	**3**	**2**	**15**	**Alat Keselamatan Kerja**	
1	3	2	15	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	Alat Sar	2
1	3	2	15	Alat Kerja Penerbangan	10
1	**3**	**2**	**16**	**Alat Peraga**	
1	3	2	16	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	**3**	**2**	**17**	**Peralatan Proses/Produksi**	
1	3	2	17	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	**3**	**2**	**18**	**Rambu - Rambu**	
1	3	2	18	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	**3**	**2**	**19**	**Peralatan Olah Raga**	
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	3
1	**3**	**3**		**Gedung dan Bangunan**	
1	**3**	**3**	**01**	**Bangunan dan Gedung**	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	**3**	**3**	**02**	**Monumen**	
1	3	3	02	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	**3**	**3**	**03**	**Bangunan Menara**	
1	3	3	03	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	**3**	**04**	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	
1	3	3	04	Tugu / Tanda Batas	50
1	**3**	**4**		**Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	
1	**3**	**4**	**01**	**Jalan dan Jembatan**	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	01	Jembatan	50
1	**3**	**4**	**02**	**Bangunan Air**	
1	3	4	02	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	Bangunan Air Kotor	40

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**	**4**	**03**	**Instalasi**	
1	3	4	03	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	Instalasi Lain	20
1	**3**	**4**	**04**	**Jaringan**	
1	3	4	04	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	Jaringan Gas	30
1	**3**	**5**		**Aset Tetap Lainnya**	
1	**3**	**5**	**02**	**Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga**	
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian	4

e) Aset Tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan Ternak, dan Tanaman.

f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

g) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
   (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

h) Penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22 Penambahan Masa Manfaat Renovasi Aset

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
		>0% s.d. 30%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Pengaman Sungai/Panti & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi /*Overhaul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalamrenovasi	*Overhaul*	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan, Irigasi, dan Jaringandalam Renovasi	*Renovasi / Overhaul*	>0% s.d. 100%	5

11) Penilaian Kembali Aset Tetap *(Revaluation)*
    a) Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
    b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian Aset Tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Aset Tetap dibukukan dalam ekuitas.
12) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
    Suatu Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada keputusan dari kepala daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
    Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
13) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap
    a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
    b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
        (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount);*
        (2) *rekonsiliasi* jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
            (a) penambahan;
            (b) pelepasan;
            (c) Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
        (3) mutasi Aset Tetap Lainnya.
        (4) informasi penyusutan, meliputi:
            (a) nilai penyusutan;
            (b) metode penyusutan yang digunakan;

(c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
(d) nilai tercatat bruto dan Akumulasi Penyusutan pada awal dan akhir periode.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan Aset Tetap adalah sebagai berikut:
(1) Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
(2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
(3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
(4) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah *(heritage assets)* di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
(5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.
(6) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
(7) Suatu Aset Tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi Aset Tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
(8) Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya *(carrying amount)*.
(9) Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing- masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

c. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
1) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
(1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
(2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

2) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
(1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
(2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
(3) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
(1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
(2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
(3) biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
(4) biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan
(5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

d. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
(1) asuransi;
(2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
(3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

3) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d) uang muka kerja yang diberikan; dan
e) retensi.

d. Properti Investasi

- **Pengakuan**

1. Properti Investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/ perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan kepala daerah/sekretaris daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
a) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir

ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi; dan

b) biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

2. Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi .
5. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 15, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan Properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan, dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Pengukuran Saat Pengakuan Awal**
  1. Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
  2. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
  3. Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
  4. Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
     a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);
     b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
     c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.

5. Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
7. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai Properti Investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
8. Properti Investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan non moneter. Nilai perolehan Properti Investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
9. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
   a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
   b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
   c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

   Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
10. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

11. Properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

- **Pengukuran setelah Pengakuan awal**

1. Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
3. Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai *(costs and values)* pada tanggal yang berbeda. Namun, Properti Investasi dapat dinilai kembali secara bertahap *(rolling basis)* asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
7. Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Properti Investasi diakui pada akun Ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik Properti Investasi tersebut.
8. Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
9. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
10. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;

b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

11. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

- **Penyajian Properti Investasi**
  1. Properti Investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang Rupiah.
  2. Properti Investasi disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
  3. Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

- **Pengungkapan**
  1. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
     a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying amount);*
     b) metode penyusutan yang digunakan;
     c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
     d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
     e) rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
        (i) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
        (ii) penambalihan yang dihasilkan melalui penggabungan;
        (iii) pelepasan;
        (iv) penyusutan;
        (v) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
        (vi) perubahan lain.
     f) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
        (i) uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
        (ii) dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;

(iii) tanggal efektif penilaian kembali;
(iv) nilai tercatat sebelum revaluasi
(v) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
(vi) nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi.

g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;
h) apabila pengklasifikasian atas properti ínvestasi sulit dilakukan,
i) kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;
j) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
k) jumlah yang diakui dalam surplus/defitit untuk :
(i) penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;
(ii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
(iii) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan pendapatan sewa menyewa selama periode tersebut;
l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.
m) Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
n) Informasi lain terkait dengan Properti Investasi.

- **Alih Guna**

1. Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditujukkan dengan :
   a. dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh pemerintah daerah, dialihgunakan dari properti inestasi menjadi Aset Tetap;
   b. dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi persediaan;
   c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari Aset Tetap menhjadi Properti Investasi;
   d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditrasnfer dari persediaan menjadi Properti Investasi.
2. Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari Properti Investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut :
   a. pemerintah daerah mulai mengembangkan Properti Investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai Properti Investasi, maka Properti Investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
   b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan

dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset Properti Investasi menjadi persediaan; dan

c. terdapat keputusan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai Properti Investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan

3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti Investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai Properti Investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Alih guna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alih guna aset Properti Investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

- **Pelepasan**

1. Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
   a. pelepasan;
   b. ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
   c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa yang dapat diharapkan pada saat pelepasan;
2. Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu Properti Investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencacat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan Properti Investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, atau pengembalian Properti Investasi

diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

e. Dana Cadangan
   1) Pengakuan Dana Cadangan
      Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari Kas ke Dana Cadangan.
   2) Pengukuran Dana Cadangan
      a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
      b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
      c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
      d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
   3) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
      a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
      b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan senilai hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam CaLK.

f. Aset Lainnya
   1) Pengakuan Aset Lainnya
      a) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
      b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas, dan Lain-lain.
      c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
         (1) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
         (2) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
      d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
         (1) Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
         (2) Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
         (3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya

utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

(4) Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerja sama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

(5) Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerja sama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

(7) Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

2) Pengukuran Aset Lainnya

a) Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).

d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

(1) Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(2) Dana yang ditanamkan pemerintah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

(3) Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
   (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
   (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
   Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
      (a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
      (b) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
      (c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui senilai biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
   (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
   (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

i) Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

j) Proses penghapusan terhadap Aset Lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang- undangan.

3) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
   a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
   b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di laporan keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga menurut jenisnya.
e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
   (1) masa manfaat dan metode amortisasi;
   (2) nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan
   (3) penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:
   (1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas *(finite life)* yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;
   (2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas *(indefinite life)* yaitu *Goodwill*.

g. Amortisasi
1) Pengakuan Amortisasi
Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.
2) Pengukuran Amortisasi
   a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
   b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 23 Masa manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

3) Pengungkapan Amortisasi
Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu Amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

4) Penyajian Amortisasi
Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud", dengan format sebagai berikut:

NERACA
Per 31 Desember 20X1

ASET		KEWAJIBAN		
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
ASET TETAP				
……		EKUITAS		
ASET LAINNYA	XXX			
ASET TIDAK BERWUJUD	XXX	EKUITAS		XXX

7.4.3.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- **Kewajiban Jangka Pendek**

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(1) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
(a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
(b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

(2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

(3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
(a) Utang PFK merupakan Utang Jangka Pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
(b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga *(Accrued Interest)*

(1) Pengakuan Utang Bunga *(Accrued Interest)*

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

(2) Pengukuran Utang Bunga *(Accrued Interest)*

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga *(Accrued Interest)* Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan Kewajiban Jangka Pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian Utang Bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang Bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan Utang Jangka Pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

(2) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas Utang Jangka Pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

(3) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

(1) Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

(2) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

(a) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

(b) Kewajiban untuk Dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

(3) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(1) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali.

(b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi Kewajiban Jangka Pendek *(payable on demand).*

(2) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah senilai jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus Kewajiban Jangka Pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah senilai saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing- masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

(1) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

(2) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal Neraca.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

g. Utang Beban

(1) Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat:

(a) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(b) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

(c) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

(2) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

(3) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

h. Utang Jangka Pendek Lainnya

(1) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

(2) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah senilai kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

a. Utang Dalam Negeri

(1) Pengakuan Utang Dalam Negeri

(a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, Utang Dalam Negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

(b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

(2) Pengukuran Utang Dalam Negeri

(a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca untuk Utang dalam Negeri adalah senilai jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

(b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam Neraca adalah senilai total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

(c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Jangka Panjang Lainnya

(1) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

(b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

(2) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

(b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan Aset Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

(3) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

(a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

(b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

7.4.3.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Definisi Ekuitas

(1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

(2) Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada LPE.

(3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas Awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan Lain-lain yang tersaji dalam LPE.

(4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

(5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

(6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

a. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan Ekuitas berdasarkan saat pengakuan Aset dan Kewajiban.

b. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas Aset dan Kewajiban.

c. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

7.4.3.4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

a. Pengakuan Pendapatan LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan- LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

(a) kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

(b) kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

(c) kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD.

(d) kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

(e) kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

b. Pengukuran Pendapatan LRA

(1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

(1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

(a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

(b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

(c) penjelasan sebab-sebab tidaktercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

(d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

(1) Pendapatan Asli Daerah – LRA (PAD – LRA)

a. Pengakuan PAD – LRA

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

b. Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

c. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(2) Pendapatan Transfer –LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

(1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

(2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

b. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan

Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA

a. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
   (1) Lainl-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
   (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

b. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
   Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang Rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

7.4.3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Pengakuan Belanja diakui pada saat:
   (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
   (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.
   (3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

b. Pengukuran Belanja
   (1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
   (2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja
   (1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
      (a) Belanja Operasi;
      (b) Belanja Modal;
      (c) Belanja Tidak Terduga; dan
      (d) Belanja Transfer.
      dan dijelaskan dalam CaLK.
   (2) Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

d. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
   a. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan
      Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
   b. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan
      Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   c. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
2. Pengeluaran Pembiayaan
   a. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan
      Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
   b. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan
      Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
   c. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
   d. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir
      (1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
      (2) Pemberian Dana Bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
      (3) Penerimaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
      (4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai Piutang Dana Bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang.
      (5) Dana Bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
3. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   a. Pengakuan SAL
      (1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
      (2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
   b. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan pada lembar muka *(face)* laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

7.4.3.7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

a. Pengakuan Pendapatan-LO

(1) Pendapatan-LO diakui pada saat:

(a) timbulnya hak atas pendapatan *(earned);* atau

(b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*

(2) Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

(a) tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

(b) ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi

(c) dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

(d) sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

(e) sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

(3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

(4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

(a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

(b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:

i. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh

pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

ii. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Pengukuran Pendapatan-LO

(a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(b) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO

(a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

(b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

i. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

ii. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

iii. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan

iv. informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.3.8. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Pengakuan Beban

(1) Beban diakui pada:

(a) Saat timbulnya kewajiban;

(b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan

(c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

(3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

(4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

(5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   (a) beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   (b) beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   (c) beban diakui setelah pengeluaran kas.

(6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

(7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

(8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun Neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

(9) Pengakuan Beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

(10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
   (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban Beban Pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
   (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai

pengurang beban.

(c) Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai Beban Bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(f) Beban Transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

b. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

(1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.

(2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Penyajian dan Pengungkapan Beban

(1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

(a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;

(b) Beban Non Operasional; dan

(c) Beban Tidak Terduga.

(2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

(3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

(a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;

(b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan

(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

7.4.3.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. Ruang Lingkup

(1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi

yang tidak dilanjutkan.

(2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

(1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

(2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

(3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

(4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

(5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

(6) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Koreksi Kesalahan

(1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

(2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan- laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

(3) Kesalahan ditinjau dari kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
(a) kesalahan yang tidak berulang; dan
(b) kesalahan yang berulang dan sistemik.

(4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
(a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
(b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

(5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

(6) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

(7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

(8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan

pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

(9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

(10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.

(11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada SAL.
Contoh koreksi kesalahan Belanja:
   (a) yang menambah saldo Kas dan yang mengurangi saldo Kas. Contoh koreksi kesalahan Belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian Belanja Pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo Kas dan Pendapatan Lain-lain.
   (b) yang menambah saldo Kas terkait Belanja Modal yang menghasilkan aset, yaitu Belanja Modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan menambah akun Pendapatan Lain-lain-LRA.
   (c) yang mengurangi saldo Kas yaitu terdapat transaksi Belanja Pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo Kas.
   (d) yang mengurangi saldo Kas terkait Belanja Modal yang menghasilkan aset, yaitu Belanja Modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo Kas.

(12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Aset bersangkutan.
Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
   (a) yang menambah saldo Kas terkait perolehan aset selain Kas yaitu pengadaan Aset Tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan mengurangi akun terkait dalam pos Aset Tetap.
   (b) yang mengurangi saldo Kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan Aset Tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos Aset Tetap mengurangi saldo Kas.

(13) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas dan tidak memengaruhi secara

material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan Beban:

(a) yang menambah saldo Kas yaitu pengembalian Beban Pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan menambah Pendapatan Lain-lain-LO.

(b) yang mengurangi saldo Kas yaitu terdapat transaksi Beban Pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-lain-LO dan mengurangi saldo Kas.

(14) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

(a) yang menambah saldo Kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun Kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

(b) yang mengurangi saldo Kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

- pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo Kas.
- pemerintah pusat dengan menambah akun saldo Kas dan menambah SAL.

(15) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:

(a) yang menambah saldo Kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke Kas daerah dikoreksi dengan menambah akun Kas dan menambah akun Ekuitas.

(b) yang mengurangi saldo Kas yaitu pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

- pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo Kas.
- Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo Kas dan menambah Ekuitas.

(16) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

(a) yang menambah saldo Kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo Kas

dan menambah akun SAL.

(b) yang mengurangi saldo Kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo Kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

(a) yang menambah saldo Kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran Utang Jangka Panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi menambah saldo Kas dan menambah akun SAL.

(b) yang mengurangi saldo Kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo Kas dan mengurangi akun SAL.

(17) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

(a) yang menambah saldo Kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo Kas dan menambah akun kewajiban terkait.

(b) yang mengurangi saldo Kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo Kas.

(18) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak memengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok Aset Tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan menambah akun Peralatan dan Mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

(19) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

(20) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

7.4.3.10. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.

d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   (1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   (2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

7.4.3.11. Perubahan Estimasi Akuntansi

a. Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat Aset Tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat Aset Tetap tersebut.
c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7.4.3.12. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.
c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan Lain-lain.
e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
   (1) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   (2) fungsi tersebut tetap ada.
   (3) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya

berjalan seperti biasa. Relokasi program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

(4) menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

7.4.3.13. Peristiwa Luar Biasa

a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa lanjutan lampiran Peraturan Bupati Kebijakan Akuntansi daerah luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkat pemerintah yang lain.

c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran Belanja Tak Terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

d. Anggaran Belanja Tak Terduga atau anggaran Lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut tidak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran Belanja Tak Terduga atau anggaran Lain-lain untuk kebutuhan darurat.

e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   (1) Tidak merupakan kegiatan yang normal dari entitas;
   (2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   (3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
   (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

g. Hakikat, jumlah, dan pengaruh yang dikibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

7.5. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

7.5.1.1. Pendapatan LRA

TA 2025	TA 2024
Rp1.194.544.244.500,95	**Rp1.180.050.595.491,33**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

Pemerintah Kabupaten Takalar untuk Tahun Anggaran 2025 menganggarkan target Pendapatan senilai Rp1.221.756.468.182,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp185.918.476.414,00, Pendapatan Transfer Rp1.035.837.991.768,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp0,00. Dari target tersebut telah direalisasikan senilai Rp1.194.544.244.500,95 atau 97,77%. Pencapaian target Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp176.717.954.156,95 atau 95,05%, Pendapatan Transfer Rp1.017.826.290.344,00 atau 98,26% dan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp0,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 target Pendapatan senilai Rp1.243.313.729.847,00 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp223.560.600.000,00, Pendapatan Transfer Rp1.019.753.129.847,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah senilai Rp0,00. Dari target tersebut telah direalisasikan senilai Rp1.180.050.595.491,33 atau 94,91%. Pencapaian target Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp145.865.361.443,60 atau 65,25%, Pendapatan Transfer Rp1.034.028.839.233,00 atau 101,40% dan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp156.394.814,73.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 24 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	185.918.476.414,00	176.717.954.156,95	95,05	145.865.361.443,60
2	Pendapatan Transfer	1.035.837.991.768,00	1.017.826.290.344,00	98,26	1.034.028.839.233,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	156.394.814,73
Jumlah Pendapatan		**1.221.756.468.182,00**	**1.194.544.244.500,95**	**97,77**	**1.180.050.595.491,33**

Penjelasan pada pos-pos pendapatan sebagai berikut:

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

TA 2025	TA 2024
Rp176.717.954.156,95	**Rp145.865.361.443,60**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan murni yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya yang berasal dari Daerah Kabupaten Takalar. Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp185.918.476.414,00, dan terealisasi senilai Rp176.717.954.156,95 atau 95,05%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp30.852.592.713,35 atau 21,15% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai senilai Rp145.865.361.443,60. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar meliputi:

Tabel 25 Rincian Penerimaan PAD per Jenis Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah	46.767.000.000,00	51.722.570.240,00	110,60	26.191.140.591,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.790.300.000,00	2.981.016.909,00	106,83	2.295.688.340,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.483.318.114,00	10.316.849.525,00	98,41	10.097.366.422,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	125.877.858.300,00	111.697.517.482,95	88,73	107.281.166.090,10
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**185.918.476.414,00**	**176.717.954.156,95**	**95,05**	**145.865.361.443,60**

7.5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp51.722.570.240,00	**Rp26.191.140.591,50**

Pajak daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari Wajib Pajak dalam TA 2025. Pada TA 2025, Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan senilai Rp46.767.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp51.722.570.240,00 atau 110,60%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp25.531.429.648,50 atau 97,46% lebih tinggi dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai realisasi senilai Rp26.191.140.591,50. Merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar selama Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), khususnya Pasal 75, dan Perda Kab. Takalar No. 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kab. Takalar melakukan penyesuaian nomenklatur dan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penghapusan 5 (lima) jenis pajak daerah dan penggantiannya dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Perubahan nomenklatur tersebut dilaksanakan sesuai PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Kepmendagri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian perubahan nomenklatur sebagai berikut:

1. Pajak Hotel kode 4.1.1.02 berubah menjadi PBJT atas Jasa Perhotelan kode 4.1.1.01.03;
2. Pajak Restoran kode 4.1.1.03 berubah menjadi PBJT atas Makanan dan/atau Minuman kode 4.1.1.01.01;
3. Pajak Hiburan kode 4.1.1.04 berubah menjadi PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan kode 4.1.1.01.05;
4. Pajak Parkir kode 4.1.1.05 berubah menjadi PBJT atas Jasa Parkir kode 4.1.1.01.04; dan
5. Pajak Penerangan Jalan kode 4.1.1.06 berubah menjadi PBJT atas Tenaga Listrik kode 4.1.1.01.02.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 26 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Jenis pajak	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
a.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)				
	1. PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.100.000.000,00	1.553.200.709,00	141,20	790.905.165,00
	2. PBJT-Tenaga Listrik	13.499.000.000,00	13.966.083.946,00	103,46	14.036.682.257,00
	3. PBJT-Jasa Perhotelan	80.000.000,00	93.976.247,00	117,47	145.405.760,00
	4. PBJT-Jasa Parkir	250.000.000,00	525.552.880,00	210,22	206.133.000,00
	5. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	75.000.000,00	73.336.780,00	97,78	108.754.750,00
b.	Pajak Reklame	450.000.000,00	471.142.341,00	104,70	387.732.926,00
c.	Pajak Air Tanah	530.000.000,00	576.198.466,00	108,72	538.811.260,00
d.	Pajak Sarang Burung Walet	-	1.200.000,00	0,00	0,00
e.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.000.000,00	1.671.000,00	5,97	30.056.950,00
F	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.340.000.000,00	5.715.064.685,00	107,02	5.307.092.327,00
g.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.300.000.000,00	8.560.881.562,00	117,27	4.639.566.196,50
h.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.685.000.000,00	10.188.336.609,00	117,31	0,00
i.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.430.000.000,00	9.995.925.015,00	106,00	0,00
	Jumlah	**46.767.000.000,00**	**51.722.570.240,00**	**110,60**	**26.191.140.591,50**

a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terdiri dari: PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, dan PBJT-Jasa Parkir, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun anggaran 2025 senilai Rp16.212.150.562,00 atau 108,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp15.004.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melampaui target senilai Rp1.208.150.562,00 atau 8,05%. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh

a. Restoran yang paling rendah menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
   1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
   2. Penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
   3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Yang dikecualikan dari obyek PBJT atas penyerahan makanan dan/atau minuma:

a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan /atau minuman; dan
c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman.

PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp1.100.000.000,00 terealisasi senilai Rp1.553.200.709,00 atau senilai 141,20%, sedangkan pada tahun anggaran 2024 Pajak Restoran terealisasi senilai Rp790.905.165,00. Terjadi peningkatan realisasi PBJT-Makanan dan/atau Minuman Pada tahun 2025 disebabkan adanya penyetoran temuan pemeriksaan PBJT-Makanan dan/atau Minuman berupa jasa catering tahun 2024 yang disetorkan pada tahun 2025.

2. PBJT-Tenaga Listrik

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Konsumsi Tenaga Listrik yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tetentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi senilai 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri. pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi senilai 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada tahun anggaran 2025 PBJT-Tenaga Listrik dianggarkan senilai Rp13.499.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp13.966.083.946,00 atau senilai 103,46%. Namun pada tahun anggaran 2024 Pajak Penerangan Jalan terealisasi senilai Rp14.036.682.257,00. Pada tahun 2025 terjadi penurunan penerimaan PBJT-Tenaga Listrik disebabkan adanya paket stimulus ekonomi dari pemerintah berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 Volt Ampere (VA) ke bawah pada 1 Januari hingga Februari 2025.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun anggaran 2025, antara lain: rencana penggalian terhadap potensi penerimaan PPJ dari penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (contoh penggunaan genset badan/perorangan);

3. PBJT-Jasa Perhotelan

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Yang dimaksud jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

a. Hotel;
b. Hostel;
c. Vila;
d. Pondok wisata;
e. Motel;
f. Losmen;
g. Wisma pariwisata;
h. Pesanggrahan;
i. Rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cootage;
j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. Glamping.

Sedangkan yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi:

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dikalikan 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jasa Perhotelan pada tahun 2025 dianggarkan senilai Rp80.000.000,00, terealisasi senilai Rp93.976.247,00 atau senilai 117,47%. Sedangkan pada tahun anggaran 2024 realisasi tercatat senilai Rp145.405.760,00. Terjadi penurunan realisasi penerimaan Jasa Perhotelan pada tahun

2025 disebabkan dari 4 (empat) hotel yang ada di Kabupaten Takalar tersisa 2 (dua) hotel yang beroperasi.

Langkah-langkah kedepan mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

b. Melakukan uji petik pada wajib pajak untuk mendapatkan potensi penerimaan yang rill sebagai dasar target proyeksi pendapatan pajak restoran;
c. Melakukan optimalisasi pendataan terhadap wajib pajak baru;dan
d. Melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

4. PBJT-Jasa Parkir

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Jasa Parkir meliputi:

a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Yang dikecualikan dari jasa penyediaan parkir meliputi:

1. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;dan
4. Jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Realisasi Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir tahun anggaran 2025 adalah senilai Rp525.552.880,00 dari target yang ditetapkan senilai Rp250.000.000,00 atau senilai 210,22%. Namun pada tahun anggaran 2024 terealisasi senilai Rp206.133.000,00. Pada tahun 2025 penerimaan Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir mengalami peningkatan disebabkan adanya pembayaran tunggakan tahun 2024 oleh PT. ALFARIA TRIJAYA (ALFAMART).

5. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan, semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Jasa kesenian dan hiburan meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat, pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/sps.

Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
c. kegiatan kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun anggaran 2025 Jasa Kesenian dan Hiburan dianggarkan senilai Rp75.000.000,00 terealisasi senilai Rp73.336.780,00 atau senilai 97,78%, sedangkan Pajak Hiburan tahun anggaran 2024 terealisasi senilai Rp108.754.750,00. Pada tahun 2025 terjadi penurunan penerimaan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan disebabkan kegiatan hiburan rakyat maupun iven-iven kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan swasta berkurang.

Langkah-langkah kedepan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

1. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dan tidak melakukan pelaporan SPTPD;
2. kegiatan monitoring dan evaluasi ekstensifikasi melalui pendataan objek pajak baru;
3. mengoptimalkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak; dan
4. Mengoptimalkan sistem informasi pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak.

b. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

1) reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
2) reklame kain;
3) reklame melekat, stiker;
4) reklame selebaran;
5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6) reklame udara;
7) reklame apung;
8) reklame film/slide; dan
10) reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:

1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
5. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame tahun anggaran 2025 senilai Rp471.142.341,00 atau 104,70% dari target yang ditetapkan senilai Rp450.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target senilai Rp21.142.341,00 atau 4,70%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Reklame tahun anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp387.732.926,00 maka realisasi Pendapatan Pajak Reklame tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan senilai Rp83.409.415,00 atau 21,51%. Peningkatan jumlah ini disebabkan adanya penyetoran piutang Pajak Reklame tahun 2024.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan antara lain:
1. penagihan piutang SKPD pajak reklame lainnya;
2. ekstensifikasi melalui pendataan reklame, insidental dan lainnya;
3. mengawasi kepatuhan pajak reklame; dan
4. sosialisasi dan penyamaan persepsi tentang pengenaan pajak reklame kepada stakeholders atas reklame pengenal usaha;

c. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu collncalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Subyeknya orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Dikecualikan dari obyek Pajak sarang Burung Walet yakni pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pajak ini, yang diatur berdasarkan UU HKPD dan Peraturan Daerah (Perda), memiliki tarif sebesar 10% dari nilai jual.

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2025 adalah senilai Rp1.200.000,00 dari target yang ditetapkan senilai Rp0,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.000,00, jika dibandingkan

dengan realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun anggaran 2024 senilai Rp0,00.

d. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:

1. keperluan dasar rumah tangga;
2. pengairan pertanian rakyat;
3. perikanan rakyat;
4. peternakan rakyat;
5. keperluan keagamaan;
6. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
7. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya yang tidak akan dikomersilkan.

   Subyek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan PAT yakni nilai perolehan Air tanah.

Besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Nilai perolehan Air Tanah merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan biaya pengendalian sumber daya Air Tanah. Pemeliharaan dan Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:

1. jenis sumber air;
2. lokasi sumber air;
3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air; dan
6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp576.198.466,00 atau 108,71% dari target yang ditetapkan senilai Rp530.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melampaui target senilai Rp46.198.466,00 atau 8,72%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp37.387.206,00 atau 6,94%, jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah tahun anggaran 2024 senilai Rp538.811.260,00 maka realisasi Pajak Air Tanah TA. 2025 terjadi penurunan disebabkan

1. Volume pemakaian air tanah oleh WP menurun karena musim hujan yang panjang tahun 2025 dan beralih ke PDAM;
2. Belum optimalnya pemetaan wajib pajak baru pasca perubahan

nomenklatur; dan

3. Keterlambatan pembayaran WP besar sehingga denda belum maksimal.

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Obyek pajak MBLB merupakan kegaiatan pengambilan MBLB yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsodian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan MBLB lainnya seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga).

Yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan:

1. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
2. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2025 senilai Rp1.671.000,00 atau 5,96% dari target yang ditetapkan senilai Rp28.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak memenuhi target senilai Rp26.329.000,00 atau 94,03%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp28.385.950,00 atau 94,44% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun anggaran 2024 senilai Rp30.056.950,00.

Pada tahun 2025 terjadi penurunan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan disebabkan karena berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi, pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah dilakukan di mulut tambang wilayah Kabupaten Takalar saja.

f. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang dikecualikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

1. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
2. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. bumi Badan/atau Bangunan digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. bumi dan/atau Bangunan digunakan oleh badan atau perwakilan lemb1aga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan Negara;
7. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
8. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
9. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan berdasarkan besaran yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 11.

Realisasi PBB-P2 tahun anggaran 2025 senilai Rp5.715.064.685,00 atau 107,02% dari target yang ditetapkan senilai Rp5.340.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-P2 melampaui target senilai Rp375.074.685,00 atau 9,56%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp407.972.358,00 atau 7,96% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 tahun anggaran 2024 senilai Rp5.307.092.327,00 disebabkan adanya peningkatan penerimaan pembayaran PBB-P2 karena penagihan yang dilakukan secara pasif dan aktif.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini antara lain:

1. penambahan kanal dan metode pembayaran PBB-P2 untuk memudahkan Wajib Pajak melakukan pembayaran secara digital seperti melalui QRIS; dan
2. pemutakhiran data PBB-P2 secara intensif.

g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau

Bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang dikecualikan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

1. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara atau barang milik Daerah;
2. oleh negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan negara;
4. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
7. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

1. harga transaksi untuk jual beli;
2. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pemebeli dalam lelang.

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2025 senilai Rp8.560.881.562,00 atau 117,27% dari target yang ditetapkan senilai Rp7.300.000.000,00, dengan demikian realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melampaui target senilai Rp1.260.881.562,00 atau 17,27%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.921.315.365,50 atau 84,52% jika dibandingkan dengan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2024 senilai Rp4.639.566.196,50.

Pada tahun 2025 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya melampaui target karena meningkatnya aktivitas transaksi

meliputi:

1. tingginya volume jual-beli tanah dan bangunan termasuk perumahan baru;
2. optimalisasi dan sinergi dengan PPAT/Notaris, memperkuat sinergi dengan Pejabat pembuat akte tanah (PPAT);
3. penyesuaian nilai jual objek (NJOP) yang lebih mendekati harga pasar dapat meningkatkan dasar pengenaan pajak (DPP) secara signifikan; dan
4. adanya Program Strategis Nasional seperti PTSl, Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang memicu balik nama atau Peningkatan hak atas tanah sudah maksimalnya kegiatan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta penjualan tanah sudah menggunakan NJOP baru.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obyek opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB. Sedangkan tarif opsen PKB sebesar 66% dihitung dari besaran Pajak terutang, berlaku mulai 5 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan sinergi, mempercepat pendapatan daerah, dan mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur serta layanan publik di tingkat kabupaten/kota.

Realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun anggaran 2025 senilai Rp10.188.336.609,00 atau 117,31% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.685.000.000,00, dengan demikian realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melampaui target senilai Rp1.503.336.609,00 atau 17,31%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp10.188.336.609,00 jika dibandingkan dengan realisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) anggaran 2024 senilai Rp0,00. Pada tahun 2025 terjadi pelampauan target penerimaan disebabkan implementasi Opsen PKB 66% sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang berlaku 5 Januari 2025 mengantikan skema bagi hasil PKB 30% serta adanya penambahan kendaraan baru.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar pengenaan untuk opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. Sedangkan tarif opsen BBNKB sebesar 66% dihitung dari besaran Pajak terutang, mulai berlaku 5 Januari 2025. Opsen ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah (kabupaten/kota) secara langsung tanpa menambah beban total wajib pajak, serta mempercepat bagi hasil antara provinsi dan kabupaten/kota.

Realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2025 senilai Rp9.995.925.015,00 atau 106,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp9.430.000.000,00, dengan demikian realisasi melampaui target senilai Rp565.925.015,00 atau 6,00%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp9.995.925.015,00 jika dibandingkan dengan realisasi Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) anggaran 2024 senilai Rp0,00. Pada tahun 2025 terjadi pelampauan target penerimaan disebabkan implementasi Opsen BBNKB 66% sesuai UU No.

1 Tahun 2022 tentang HKPD yang berlaku 5 Januari 2025 mengantikan skema bagi hasil BBNKB yang lama, serta adanya penambahan kendaraan baru.

7.5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp2.981.016.909,00	**Rp2.295.688.340,00**

Retribusi daerah adalah Penerimaan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari wajib retribusi.

Jenis retribusi terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari obyek retribusi yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pendapatan retribusi daerah pada TA 2025 dianggarkan senilai Rp2.790.300.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.981.016.909,00 atau 106,83%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024, nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp685.328.569,00 atau 29,85% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp2.295.688.340,00. Pendapatan Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 27 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Retribusi Jasa Umum	1.161.600.000,00	1.226.565.543,00	105,59	1.020.954.932,00
2	Retribusi Jasa Usaha	728.700.000,00	724.223.000,00	99,39	665.802.000,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	900.000.000,00	1.030.228.366,00	114,47	608.931.408,00
	Jumlah	**2.790.300.000,00**	**2.981.016.909,00**	**106,83**	**2.295.688.340,00**

1) Retribusi Jasa Umum merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Persampahan/Kebersihan, Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Pelayanan Pasar yang seluruhnya mencapai realisasi senilai Rp1.226.565.543,00 atau 105,59% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp1.161.600.000,00. Untuk lebih jelasnya Pendapatan Retribusi Jasa Umum dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 28 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	365.000.000,00	482.325.543,00	132,14	375.973.932,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	165.000.000,00	198.360.000,00	120,22	122.170.000,00
3.	Retribusi Pelayanan	141.600.000,00	148.434.000,00	104,83	59.000.000,00

No	Jenis Retribusi Jasa Umum	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Parkir di tepi jalan umum				
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	490.000.000,00	397.446.000,00	81,11	463.811.000,00
	Jumlah	**1.161.600.000,00**	**1.226.565.543,00**	**105,59**	**1.020.954.932,00**

Retribusi Jasa Umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis.

Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp482.325.543,00 atau 132,14%, dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp365.000.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun anggaran 2024 senilai Rp375.973.932,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp106.351.611,00 atau 28,29%.

Pada tahun 2025 realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan terjadi pelampauan target disebabkan adanya:

1. Peningkatan Pasien Umum Non-BPJS yang berobat umum. Kunjungan rawat jalan umum naik;
2. Adanya beberapa Penyesuaian tarif Jasa layanan pada puskesmas, rumah sakit dan Labkesda sesuai Perda No 1/2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah antara lain tarif pada: layanan rawat jalan, rawat inap, layanan laboratorium, UGD, tindakan medis dan terapi, permintaan surat sehat, bebas narkoba, saat rekrutmen CPNS/P3K;
3. Penggunaan aplikasi Qris di Puskesmas atas beberapa layanan di puskesmas, rumah sakit dan Labkesda;
4. Adanya layanan pemeriksaan Calon Jemaah haji di 6 (enam) puskesmas; dan
5. Pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Lain Sejenis karena adanya penambahan data pemeriksaan air oleh Labkesda seperti uji Depot Air Minum, uji makanan, air minum dan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Uji Air Sumur Rumah Tangga, Uji makanan rumah makan, pemeriksaan air limbah pabrik Tahu.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 lebih besar daripada target TA 2025, hal ini disebabkan pada APBD Perubahan TA 2025 target tersebut telah disesuaikan dengan mempertimbangkan penurunan penerimaan retribusi dari RSUD Galesong yang tidak beroperasi sejak bulan Mei 2025. Kedepan, Dinas Kesehatan akan menyusun target retribusi berdasarkan metode analisis tren dan proyeksi realisasi bulanan agar lebih realistis dan sesuai kondisi riil.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pelayanan Kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi:

1. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;

3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
4. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp165.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp198.360.000,00 atau 120,22%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target senilai Rp33.360.000,00 atau 20,22%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun anggaran 2024 senilai Rp122.170.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp76.190.000,00 atau 62,36%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar dipengaruhi karena bertambahnya wajib retribusi pada pengangkutan sampah dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan dalam rangka peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif.

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp141.600.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp148.434.000,00 atau 104,83%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target senilai Rp6.834.000,00 atau 4,83%. Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar dipengaruhi oleh optimalnya pemungutan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun anggaran 2024 senilai Rp59.000.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan senilai Rp89.434.000,00 atau 151,58%.

d. Retribusi Pelayanan Pasar

Pelayanan Pasar merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Subyek retribusi pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp490.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp397.446.000,00 atau 81,11%. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar yang terdiri dari:

1. Retribusi Los senilai Rp272.896.000,00

2. Retribusi Kios senilai Rp124.550.000,00.

Dengan demikian, realisasi penerimaan Retribusi Kios dan Los tidak mencapai target sebesar Rp92.554.000,00 atau 18,89%. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya minat pedagang untuk menyewa los dan kios yang tersedia, yang disebabkan oleh pergeseran pola belanja masyarakat ke pusat perbelanjaan modern dan e-commerce. Kedepan, Pemerintah Daerah akan melakukan penyusunan target retribusi berdasarkan analisis tren dan proyeksi realisasi, serta memastikan penyesuaian target dilakukan pada saat APBD Perubahan agar lebih realistis.

Dengan demikian realisasi penerimaan retribusi tidak mencapai target senilai Rp92.554.000,00 atau 18,89%. Rendahnya realisasi retribusi tersebut dipengaruhi oleh: rendahnya ppedagang untuk menyewa Los dan Kios yang tersedia karena

1. Banyak keluhan dan para pedagang pasar terkait lesunya pembeli dan pengunjung pasar.
2. Daya beli masyarakat yang menurun yang berakibat tidak terisinya sebagian besar los (pedagang musiman) yang sangat berpengaruh pada setoran/penarikan retribusi bulanan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun anggaran 2024 senilai Rp463.811.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp66.365.000,00 atau 14,31%.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar dalam upaya peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar adalah melakukan penagihan secara intensif.

2) Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut meliputi:

a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
f. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terinci dalam tabel berikut:

Tabel 29 Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	38.650.000,00	429,44	20.350.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	150.000.000,00	275.500.000,00	183,67	140.800.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	145.000.000,00	0,00	0,00	121.832.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	162.000.000,00	151.000.000,00	93,21	195.600.000,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	70.000.000,00	79.100.000,00	113,00	121.850.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	30.000.000,00	25.440.000,00	84,80	27.760.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.500.000,00	1.995.000,00	133,00	600.000,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	37.000.000,00	37.538.000,00	101,45	37.010.000,00
9	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	124.200.000,00	115.000.000,00	92,59	0,00
	Jumlah	**728.700.000,00**	**724.223.000,00**	**99,39**	**665.802.000,00**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan seperti kendaraan Bachoe Loader, Stone Wallas, Asphalt Sparayer dan mobil truk. Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp9.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp38.650.000,00 atau 429,44%, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target senilai Rp29.650.000,00 atau 329,44%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun anggaran 2024 senilai Rp20.350.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp18.300.000,00 atau 89,93%. Kenaikan realisasi dipengaruhi kondisi kendaraan semakin membaik/layak karena adanya pemeliharaan dan perbaikan sehingga masyarakat dan swasta berminat untuk menyewa.

Sedangkan rendahnya penetapan target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijelaskan bahwa penetapan target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada APBD Pokok TA 2025 sepenuhnya sudah mengacu pada tren realisasi tahun sebelumnya, namun Pada APBD Perubahan, target tersebut dilakukan penyesuaian disebabkan adanya prediksi penurunan penerimaan Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah. Kedepan Dinas PUTRPKP akan menyusun target retribusi berdasarkan metode analisis tren dan proyeksi realisasi.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan pendapatan Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan yaitu Ruko Pasar Sentral Takalar.

Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp150.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp275.500.000,00 atau 183,67%, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target senilai Rp125.500.000,00 atau 83,67%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun anggaran 2024 senilai Rp140.800.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp134.700.000,00 atau 95,67%. Meningkatnya penerimaan retribusi ini disebabkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan ini antara lain:

a. optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana Pasar Pertokoan; dan
b. optimalisasi pemungutan dengan menambah personil pemungut.

c. Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Tempat Pelelangan merupakan penyediaan fasilitas lainnya ditempat pelelangan. Retribusi dikelola oleh Dinas Perikanan Kab. Takalar.

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp145.000.000,00 sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 tidak ada realisasi dikarenakan Retribusi Tempat Pelelangan berubah nomenklatur menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan. Sedangkan pada tahun anggaran 2024 realisasi Retribusi Tempat Pelelangan senilai Rp121.832.000,00.

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp162.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp151.000.000,00 atau 93,21%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target senilai Rp11.000.000,00 atau 6,79% disebabkan adanya pemutusan kerja sama dengan pihak ketiga pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir. Kerja sama tersebut tidak berjalan selama satu tahun penuh dan berakhir pada bulan September 2025, sehingga penerimaan retribusi parkir khusus tidak terealisasi secara optimal pada tahun berjalan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 2024 senilai Rp195.600.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp44.600.000,00 atau 22,80%, disebabkan adanya penyesuaian objek retribusi pada TA 2025, yaitu hanya diperuntukkan bagi parkir di Rumah Sakit Padjonga Daeng Ngalle. Sementara itu,

objek retribusi parkir pada pasar telah dikeluarkan dari cakupan retribusi tempat khusus parkir sesuai kebijakan yang berlaku pada TA 2025. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Takalar.

e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kab. Takalar merupakan Pendapatan yang berasal dari Sewa Gedung Islamic Centre Kab. Takalar, Pendapatan Sewa Gedung Juang Lapris Takalar dan Pendapatan Sewa Wisma Pemda Takalar. Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp70.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 senilai Rp79.100.000,00 atau 113%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target senilai Rp9.100.000,00 atau 13,00%, pelampauan target ini disebabkan masyarakat dalam melaksanakan acara di tempat atau gedung yang disediakan oleh pemerintah daerah mulai diminati.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila tahun anggaran 2024 senilai Rp121.850.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp42.750.000,00 atau 35,08% disebabkan aktivitas penyelenggaran acara maupun event kabupaten berkurang.

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp30.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp25.440.000,00 atau 84,80%, dengan demikian realisasi retribusi ini belum mencapai target senilai Rp4.560.000,00 atau 15,20%. disebabkan masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan RPH.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan tahun anggaran 2024 senilai Rp27.760.000,00 maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.320.000,00 atau 8,36% karena sarana dan prasarana rumah potong hewan (RPH) yang ada belum memadai sehingga mengurangi minat masyarakat menggunakan RPH yang disediakan oleh pemerintah meliputi RPH Pattallassang dan RPH Parappunganta Polongbangkeng Utara.

g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dikelola oleh Dinas Perhubungan. Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp1.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 senilai Rp1.995.000,00 atau 133,00%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target senilai Rp495.000,00 atau 33,00%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tahun anggaran 2024 senilai Rp600.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.395.000,00 atau 232,50%, hal ini disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana dermaga Takalar Lama semakin memadai untuk disandari perahu; dan
2. Meningkatnya kesadaran pemilik perahu untuk membayar retribusi.

h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini merupakan penerimaan Tempat Rekreasi (destinasi wisata topejawa) yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar.

Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp37.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 senilai Rp37.538.000.00 atau 101,45%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target senilai Rp538.000.00 atau 1,45%. Disebabkan kunjungan Wisatawan ke destinasi wisata pantai topejawa dan tempat lainnya semakin meningkat.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun anggaran 2024 senilai Rp37.010.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp528.000.00 atau 1,43%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

a. meningkatkan pelayanan kepada pengunjung melalui pemeliharaan fasilitas destinasi yang ada;
b. melakukan promosi melalui media sosial maupun kolaborasi dengan *travel agent*; dan
c. mengadakan event-event dan untuk menarik minat pengunjung.

i. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan merupakan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan yang terdapat di 3 (tiga) TPI yaitu Beba, Soreang dan Topejawa. Retribusi dikelola oleh Dinas Perikanan Kab. Takalar.

Pada tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp124.200.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 senilai Rp115.000.000,00 atau 92,59%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target senilai Rp9.200.000,00 atau 7,41%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2024 senilai Rp101.832.000,00, maka penerimaan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp13.168.000,00 atau 12,93%.

Upaya yang dilakukan SKPD terkait untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan antara lain dengan melakukan perbaikan sarana dan prasarana penyediaan tempat Pelelangan.

3) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30 Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam Rupiah)

No	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	900.000.000,00	1.030.228.366,00	114,47	608.931.408,00
	Jumlah	**900.000.000,00**	**1.030.228.366,00**	**114,47**	**608.931.408,00**

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun anggaran sebelumnya menggunakan nomenklatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp900.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp1.030.228.366.00 atau 114,47%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target senilai Rp130.228.366.00 atau 14,47%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun anggaran 2024 senilai Rp608.931.408,00, maka realisasi retribusi di tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp421.296.958.00 atau 69,19%.

Retribusi ini dilakukan pemungutan secara terpusat oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Takalar. Kenaikan ini disebabkan karena:

1. Kesadaran masyarakat untuk mengurus PBG sebelum membangun semakin meningkat; dan
2. Adanya dukungan data rill bangunan di Takalar yang belum mengurus PBG sehingga memudahkan untuk melakukan pemungutan.

	TA 2025	TA 2024
7.5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**Rp10.316.849.525,00**	**Rp10.097.366.422,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Takalar yang diperoleh dari bagian laba (dividen) atas modal yang diinvestasikan atau disertakan pada PT Bank Sulselbar dan PT BPR Gerbang Masa Depan Galesong pada TA 2025. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan senilai Rp10.483.318.114,00 dan terealisasi senilai Rp10.316.849.525,00 atau 98,41 %. Jika dibandingkan dengan TA 2024, nilai tersebut mengalami kenaikan 2,17% atau senilai Rp219.483.103,00 dari realisasi TA 2024 senilai Rp10.097.366.422,00. Pendapatan Deviden diterima dari PT. Bank Sulselbar untuk tahun buku 2025 senilai Rp10.316.849.525.00. Pendapatan ini dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Realisasi Deviden atas penyertaan modal dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 31 Realisasi Deviden atas Penyertaan Modal TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Anggaran Setelah Perubahan	Nilai Deviden 2025	%	Nilai Deviden 2024
1.	Bank Sulselbar	10.316.849.525,00	10.316.849.525,00	100,00	9.711.476.850,00
2.	BPR Galesong	166.468.589,00	-	0,00	385.889.572,00
	Jumlah	**10.483.318.114,00**	**10.316.849.525,00**	**98,41**	**10.097.366.422,00**

1. PT. Bank Sulselbar

Berdasarkan tabel di atas penerimaan deviden senilai Rp10.483.318.114,00 dari PT. Bank Sulselbar. Sehubungan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Takalar sudah mencatat pendapatan deviden dari PT Bank Sulselbar dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 namun belum menerima dokumen Risalah RUPS PT. Bank Sulselbar terkait penetapan deviden atas laba tahun buku 2025 sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini.

2. PT. BPR Gerbang Masa Depan BPR Galesong

Berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Bank Perekonomian Rakyat Gerbang Masa Depan BPR Galesong No. 9, tanggal 26 Juli 2025 memutuskan menyetujui penundaan pembagian deviden hingga dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga Pemerintah Kabupaten Takalar tidak mencatat penerimaan deviden dari PT. BPR Galesong dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025. Kondisi ini sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, belum menerima dokumen hasil penundaan RUPS PT. Bank Perekonomian Rakyat Gerbang Masa Depan BPR Galesong atas laba tahun buku 2025.

7.5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

TA 2025	TA 2024
Rp111.697.517.482,95	**Rp107.281.166.090,10**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar selain penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang meliputi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.

Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan senilai Rp125.877.858.300,00 dan terealisasi senilai Rp111.697.517.482,95 atau 88,73%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp4.416.351.392,85 atau 4,12% dari realisasi TA 2024 senilai Rp107.281.166.090,10.

Tabel 32 Realisasi Lain lain PAD yang Sah TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.929.859.600,00	96,49	48.999.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	120.000.000,00	175.505.536,00	146,25	105.000.000,00
3	Jasa Giro	2.250.000.000,00	2.801.472.581,00	124,51	4.435.460.084,00
4	Pendapatan Bunga	0,00	163.173.085,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.200.000.000,00	4.607.382.260,59	143,98	1.665.505.348,42
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	144.729.529,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	151.296.558,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	150.000.000,00	593.331.802,92	395,55	367.440.930,00
9	Pendapatan BLUD	118.157.858.300,00	101.282.063.088,44	85,72	100.495.496.126,68
10	Lain-Lain PAD	0,00	0,00	0,00	11.968.043,00
	Total	**125.877.858.300,00**	**111.697.517.482,95**	**88,73**	**107.281.166.090,10**

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dalam tahun anggaran 2025 di antaranya diperoleh dari hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang seperti penjualan Kendaraan roda 4 (empat), Penjualan Bongkaran pada Gedung/Ruang sekolah, yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kab. Takalar.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2025 ditargetkan senilai Rp2.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai Rp1.929.859.600,00 atau 96,49 %, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target senilai Rp70.140.400,00 atau 3,51%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp48.999.000,00, maka realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.880.860.600,00 atau 3838,57%. Pada tahun anggaran 2025 realisasi penerimaan Hasil Penjualan BMD tidak tercapai tapi lebih tinggi dari tahun 2024 disebabkan oleh:

1. Adanya penundaan lelang penjualan kendaraan dinas, peralatan dan mesin pada tahun 2025 yang dialihkan ke tahun 2025. Penundaan ini disebabkan karena alokasi anggaran yang tidak tersedia untuk melakukan penilaian proses penjualan kendaraan dinas, peralatan dan mesin.
2. Menurunnya nilai pembongkaran dari segi volume/kuantitas dan kualitas barang.

b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2025 diperoleh dari hasil sewa BMD: Cold Storage (gudang es) dan Pabrik Es yang dikelola oleh dinas Perikanan, sedangkan sewa BMD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Takalar.meliputi sewa tempat (tenant) dilapangan Makkatang, karcis Taman Kita, sewa Kios Alun-Alun, sewa kios depan RSUD, dan sewa Rumah Dinas.

Pada tahun anggaran 2025 realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan senilai Rp120.000.000,00, terealisasi senilai Rp175.505.536,00 atau 146,25%. Dengan demikian realisasi

penerimaan ini melampaui target senilai Rp55.505.536,00 atau 46,25%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2024 senilai Rp105.000.000,00, maka realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp70.505.536,00 atau 67,15%.

Kenaikan realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2025 terjadi akibat pembayaran utang yang dilakukan pihak penyewa pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran utang dari tahun sebelumnya senilai Rp45.000.000,00;
2. Pembayaran kewajiban sewa tahun berjalan Senilai Rp60.000.000,00.

c. Jasa Giro

Jasa Giro merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari bunga atas saldo rekening Kas Daerah/RKUD yang ditempatkan di Bank Umum. Pendapatan ini dikelola oleh BKAD.

Jasa Giro tahun anggaran 2025 ditargetkan senilai Rp2.250.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai senilai Rp2.801.472.581,00 atau 124,51 %, dengan demikian realisasi Jasa Giro melampaui target senilai Rp551.472.581,00 atau 24,51%. Realisasi penerimaan Jasa Giro tahun anggaran 2025 berasal dari pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp4.435.460.084,00 maka realisasi Jasa Giro tahun anggaran 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.633.987.503,00 atau 36,84%, hal ini disebabkan adanya penyesuaian alokasi tranfer ke daerah dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA. 2025 sehingga mengurangi penerimaan TKD kab. Takalar.

d. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun anggaran 2025 tidak ditargetkan, namun terdapat realisasi senilai Rp163.173.085,00. Pendapatan ini berasal dari penerimaan TDF Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH Tahun 2025, penerimaan ini yang dikelola oleh BKAD. Sedangkan tahun anggaran 2024 tidak terdapat target dan realisasi.

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan Rp3.200.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 senilai Rp4.607.382.260.59 atau 143,98%, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah melampaui target senilai Rp1.407.382.260.59 atau 43,98%. Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut diperoleh dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pendapatan ini dikelola oleh Sekretariat Daerah. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp1.665.505.348,42, realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.941.876.912.17 atau 176,64%.

f. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan namun terealisasi senilai Rp144.729.529,00. Yang merupakan Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Sedangkan tahun anggaran 2024 tidak terdapat target dan realisasi.

g. Denda Retribusi Daerah.

Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2025 tidak ditargetkan dan tidak terealisasi, namun terdapat realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2024 senilai Rp151.296.558,00,. Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun anggaran 2024 diperoleh dari Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan.

h. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS.

Pada tahun anggaran 2025 Pendapatan dari Pengembalian ditargetkan senilai Rp150.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 senilai Rp593.331.802,92 atau 395,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2024 senilai Rp367.440.930,00, maka realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan senilai Rp225.890.872,92 atau 61,48%. Pendapatan ini dikelola oleh BKAD Kab. Takalar.

i. Pendapatan BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah.

RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan perda ini maka rumah sakit menjadi unsur lembaga teknik daerah (LTD) dalam bidang pelayanan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Penetapan RSUD Pemerintah Kabupaten Takalar tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi).

Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan

dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerja sama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah. Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD tahun anggaran 2025 ditargetkan senilai Rp118.157.858.300,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 senilai Rp101.282.063.088,44 atau 85,72%, terdiri dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Senilai Rp73.330.138.817,44, Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain Senilai Rp 210.141.667.00 dan pendapatan BLUD dari Jasa layanan pada Dinas Kesehatan senilai Rp27.741.782.604,00. Dengan demikian realisasi Pendapatan BLUD belum mencapai target senilai Rp16.875.795.211,56 atau 14,287%. Mengalami kenaikan senilai Rp786.566.961,76 dari realisasi tahun anggaran 2024 senilai Rp100.495.496.126,68.

Pendapatan BLUD belum mencapai target khususnya untuk Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle disebabkan oleh salah satu faktor yaitu

1. Penurunan jumlah kunjungan pasien dengan hadirnya rumah sakit Tipe D di Takalar, dimana berlaku kunjungan dan rujukan berjenjang bagi pasien BPJS termasuk dalam kredensialing oleh pihak BPJS;
2. Ada Pengurangan jumlah tempat tidur dari Hasil Kredensialing Oleh BPJS;
3. Pembatasan kunjungan Pasien.dimana ada pembatasan dari Pihak BPJS pada Poliklinik bahwa dalam sehari Poliklinik hanya dapat melayani Pasien dengan jumlah tertentu;

j. Lain-lain PAD

Pada tahun anggaran 2025 Lain-lain PAD tidak terealisasi, namun pada tahun anggaran 2024 terealisasi senilai Rp11.968.043,00.

	TA 2025	TA 2024
7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer	**Rp1.017.826.290.344,00**	**Rp1.034.028.839.233,00**

Pendapatan Transfer merupakan realisasi transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah pada TA 2025. Pendapatan Transfer dianggarkan senilai Rp1.035.837.991.768,00 dan terealisasi senilai Rp1.017.826.290.344,00 atau 98,26%. Jika dibandingkan dengan TA 2024, nilai ini mengalami penurunan 1,57% atau senilai Rp16.202.548.889,00 dari jumlah realisasi TA 2024 senilai Rp1.034.028.839.233,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh:

1. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Takalar pada TA 2025.
2. Perubahan pagu Dana Desa berdasarkan formula dan data dasar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
3. Fluktuasi realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA sesuai penerimaan

negara yang dibagihasilkan.

Realisasi dan Anggaran Pendapatan transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	945.117.271.000,00	955.992.500.339,00	101,15	974.248.331.749,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.720.720.768,00	61.833.790.005,00	68,16	59.780.507.484,00
	Jumlah	**1.035.837.991.768,00**	**1.017.826.290.344,00**	**98,26**	**1.034.028.839.233,00**

Alokasi dana transfer berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2025 tanggal 30 November 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp945.117.271.000,00 terealisasi senilai Rp955.992.500.339,00. Yang terdiri dari Realisasi dana transfer senilai Rp931.031.662.000,00 dan realisasi Dana Insentif Daerah (DID-Insentif Fiskal) sebesar Rp14.085.609.000,00

7.5.1.1.2.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**TA 2025**	**TA 2024**
		Rp955.992.500.339,00	**Rp974.248.331.749,00**

Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, maka telah dilakukan penyesuaian klasifikasi dan kodefikasi pendapatan transfer dari tahun 2024 ke 2025 adalah Sinergi Bagan Akun Standar (BAS). Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan akuntansi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyesuaian ini mencakup pemutakhiran kode rekening untuk pendapatan transfer Pusat guna mendukung integrasi data pada sistem SIPD-RI.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 meliputi transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Insentif Fiskal, sedangkan pada TA 2024 merupakan realisasi Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal.

Pemerintah Kabupaten Takalar TA. 2025 menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp945.117.271.000,00 dan terealisasi senilai Rp955.992.500.339,00 atau 101,15%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, mengalami penurunan senilai Rp18.255.831.410,00 atau 1,87% dari jumlah pendapatan TA 2024 senilai Rp974.248.331.749,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2024.

Penurunan ini secara umum disebabkan oleh kebijakan fiskal nasional yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, di mana Pemerintah Pusat melakukan kebijakan pencadangan/efisiensi belanja negara untuk mendukung program strategis nasional. Meskipun realisasi DBH Kab. Takalar meningkat sekitar Rp7,7 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan pagu. Hal ini berdampak kepada efisiensi pos-pos belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, honorarium tim, dan belanja perkantoran guna memastikan anggaran lebih produktif. Secara spesifik penurunan ruang fiskal ini juga disebabkan adanya kewajiban penyelesaian utang Dana

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

a. Dana Perimbangan

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Dana Perimbangan.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Dana Insentif Daerah (DID).

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur.

d. Dana Keistimewaan

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Dana Keistimewaan.

e. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa adalah dana transfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditujukan khusus bagi desa, dan disalurkan langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 menganggarkan Dana Desa senilai Rp76.268.700.000,00 dan terealisasi senilai Rp76.268.700.000,00 atau 100% untuk 86 desa. Demikian halnya pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp78.203.364.000,00 atau 100% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA.2025 mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya penyesuaian alokasi anggaran untuk Dana Desa dari pemerintah pusat.

f. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana penghargaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai apresiasi atas perbaikan atau pencapaian kinerja tata kelola daerah tertentu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait instrumen keuangan.

Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 menganggarkan Dana Insentif Fiskal senilai Rp14.085.609.000,00 dan terealisasi senilai Rp14.085.609.000,00 atau 100%. Demikian halnya pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp12.448.276.000,00 atau 100% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA.2025 mengalami penurunan hal ini terjadi karena Dana Insentif Fiskal tidak bersifat dana alokasi rutin mandatori, melainkan jatah tahunannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat sebagai penghargaan kompetitif (reward) berbasis kinerja.

g. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari: DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (**SDA**).

Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 menganggarkan Dana Bagi Hasil senilai Rp19.712.721.000,00, dan terealisasi senilai Rp18.247.465.700,00 atau 92,56%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp10.516.658.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024,

realisasi TA. 2025 mengalami peningkatan senilai Rp7.730.807.700,00 atau 73,51%. Rincian Dana Bagi Hasil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 34 Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
A	**DBH Pajak**	**15.543.009.000,00**	**14.065.640.700,00**	**90,49**	**8.047.146.000,00**
1	DBH PBB	7.686.009.000,00	6.925.872.000,00	90,11	2.235.294.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.124.031.000,00	6.433.576.900,00	90,31	5.254.591.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	273.834.000,00	247.056.800,00	90,22	195.489.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	459.135.000,00	459.135.000,00	100,00	361.772.000,00
B	**DBH Sumber Daya Alam (SDA)**	**4.169.712.000,00**	**4.181.825.000,00**	**100,29**	**2.469.512.000,00**
1	DBH SDA Minyak Bumi	64.000,00	64.000,00	100,00	47.000,00
2	DBH SDA Gas Bumi	941.546.000,00	941.546.000,00	100,00	369.443.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.845.510.000,00	1.857.623.000,00	100,66	2.087.241.000,00
4	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	48.118.000,00	48.118.000,00	100,00	12.781.000,00
5	DBH SDA Perikanan	1.334.474.000,00	1.334.474.000,00	100,00	1.718.589.000,00
	Jumlah	**19.712.721.000,00**	**18.247.465.700,00**	**92,57**	**10.516.658.000,00**

1. DBH Pajak
   Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dalam APBN berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, meliputi DBH PBB, DBH PPh Pasal 21, DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN, dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT).
   Pada TA. 2025 Kab. Takalar menganggarkan DBH Pajak senilai Rp15.543.009.000,00, dan terealisasi senilai Rp14.065.640.700,00 atau 90,49%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp8.047.146.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA. 2025 mengalami peningkatan senilai Rp6.018.494.700,00 atau 42,78%.
2. DBH Sumber Daya Alam (SDA)
   Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah daerah yang bersangkutan meliputi DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Gas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan DBH SDA Perikanan.
   Pada TA. 2025 Kab. Takalar menganggarkan DBH Sumber Daya Alam (SDA) senilai Rp 4.169.712.000,00, dan terealisasi senilai Rp 4.181.825.000,00 atau 100,29%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp 2.469.512.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA. 2025 mengalami peningkatan senilai Rp1.712.313.000,00 atau 40,95%.

h. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen Transfer ke Daerah

(TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya meliputi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan. Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp651.690.726.000,00, dan terealisasi senilai Rp666.777.754.612,00 atau 102,31%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp634.554.049.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA. 2025 mengalami peningkatan senilai Rp32.223.705.612,00 atau 4,83%, disebabkan adanya Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah.

1. **DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya**

   DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (sering disebut sebagai *Block Grant*) adalah bagian dari Dana Alokasi Umum yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan kewenangan daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

   Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya senilai Rp 544.131.321.000,00, dan terealisasi senilai Rp 559.702.205.000,00 atau 102,86%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp 488.097.926.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA. 2025 mengalami peningkatan senilai Rp71.604.279.000,00 atau 12,79%, disebabkan adanya Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah.

2. **DAU yang Ditentukan Penggunaannya**

   DAU yang Ditentukan Penggunaannya (disebut juga *Specific Grant* atau DAU *Earmarked*) adalah bagian dari Dana Alokasi Umum yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan peruntukan belanja yang sudah ditetapkan secara spesifik, meliputi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan.

   Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya senilai Rp 107.559.405.000,00, dan terealisasi senilai Rp 107.075.549.612,00 atau 99,55%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp146.456.123.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA. 2025 mengalami penurunan senilai Rp39.380.573.388,00 atau 26,89%, disebabkan pada TA. 2025 terjadi penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat untuk Kab. Takalar berupa:

   1. penurunan tajam anggaran pada pos-pos *earmarked* untuk bidang Pendidikan & Kesehatan, dan
   2. Penghapusan DAU Bidang Pekerjaan Umum.

Rincian DAU yang Ditentukan Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
   DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan adalah alokasi dari pemerintah pusat untuk membantu kelurahan dalam mendanai pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat.
   Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan senilai Rp4.800.000.000,00, dan terealisasi senilai Rp Rp4.800.000.000,00 atau 100%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp4.800.000.000,00. Realisasi TA. 2025 dan 2024 tetap.
b. Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
   Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan pemberian imbalan berupa gaji dan tunjangan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
   Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar telah mengalokasikan anggaran untuk Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari komitmen penguatan manajemen aparatur sipil negara di daerah.
   Pencantuman anggaran ini didasarkan pada kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 dan diperbarui melalui KMK Nomor 29 Tahun 2025.
   Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan DAU Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja senilai Rp1.393.883.000,00, dan terealisasi senilai Rp910.027.612,00 atau 65,28%. Sedangkan pada TA 2024 tidak dianggarkan.
c. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
   DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang alokasi dan penggunaannya telah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat (*specific grant* atau *earmarked*) untuk mendanai urusan pendidikan di daerah.
   Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan senilai Rp59.599.842.000,00, dan terealisasi senilai Rp59.599.842.000,00 atau 100%. Sedangkan pada TA 2024 terealisasi senilai Rp78.059.338.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA. 2025 mengalami penurunan senilai Rp18.459.496.000,00 atau 30,97%, disebabkan pada TA. 2025 terdapat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk Kab. Takalar DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
d. DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
   DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum yang penggunaannya ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar di daerah.
   Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan senilai Rp41.765.680.000,00,

dan terealisasi senilai Rp41.765.680.000,00 atau 100%. Sedangkan pada TA 2024 terealisasi senilai Rp52.599.816.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi TA. 2025 mengalami penurunan senilai Rp10.834.136.000,00 atau 25,94%, disebabkan pada TA. 2025 terdapat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk Kab. Takalar DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan.

i. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK bertujuan meningkatkan sarana prasarana fisik, mengurangi kesenjangan antar daerah, serta mendukung operasional layanan publik.

Pada TA 2025 Kab. Takalar menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp183.359.515.000,00, dan terealisasi senilai Rp180.612.971.027,00 atau 98,50%. Sedangkan realisasi TA 2024 senilai Rp236.807.395.749,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2025 mengalami penurunan disebabkan Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini mengakibatkan pemangkasan/penghapusan anggaran DAK meliputi DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD, DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan, DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler, dan DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan.

Demikian hal Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 mengalami pemotongan senilai Rp11.324.287.723,00 yang merupakan sisa anggaran DAK Non Fisik tahun sebelumnya yang diperhitungkan pada tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pemotongan Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah senilai Rp9.052.396.138,00
b. Pemotongan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah senilai Rp19.632.500,00
c. Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan - Dinas senilai Rp958.158.129,00
d. Pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan - Puskesmas Rp418.306.344,00
e. Pemotongan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana senilai Rp713.415.612,00
f. Pemotongan - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak senilai Rp162.379.000,00.

Rincian realisasi DAK TA 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35 Rincian Realisasi DAK TA 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Transfer dari RKUN)	Penyerapan	Sisa
A.	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**8.594.530.000,00**	**8.423.598.807,00**	**8.410.025.307,00**	**13.573.500,00**
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	220.882.000,00	211.127.350,00	211.127.350,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi (Transfer dari RKUN)	Penyerapan	Sisa
2	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.018.020.000,00	1.938.314.337,00	1.924.753.737,00	13.560.600,00
3	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	3.547.140.000,00	3.547.140.000,00	3.547.127.100,00	12.900,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	2.808.488.000,00	2.727.017.120,00	2.727.017.120,00	0,00
B.	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**174.764.985.000,00**	**172.351.751.220,00**	**169.806.972.889,00**	**4.002.733.506,00**
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	80.204.267.000,00	80.493.578.500,00	80.493.578.500,00	0,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	220.250.000,00	339.500.000,00	339.500.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	249.724.380,00	150.935.620,00
4	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	42.252.800.000,00	42.222.650.000,00	42.222.650.000,00	0,00
5	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.992.500.000,00	1.992.500.000,00	1.992.500.000,00	0,00
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.453.200.000,00	4.448.076.000,00	4.448.076.000,00	0,00
7	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
8	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.045.600.000,00	5.037.150.000,00	5.037.150.000,00	0,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	11.815.668.000,00	10.194.532.679,00	8.419.591.985,00	1.774.940.694,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	21.775.249.000,00	21.331.728.653,00	21.071.498.901,00	260.229.752,00
12	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.725.849.000,00	4.012.433.388,00	3.714.747.948,00	297.685.440,00
13	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	1.518.942.000,00	1.518.942.000,00	1.457.955.175,00	60.986.825,00

7.5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	**TA 2025**	**TA 2024**
	Rp61.833.790.005,00	**Rp59.780.507.484,00**

Pendapatan Transfer antar daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kab. Takalar meliputi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Berrmotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Umum dan Khusus dari pemerintah Provinsi.

Pada tahun anggaran 2025 realisasi transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp61.833.790.005,00 atau 68,15% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp90.720.720.768,00. Realisasi ini tidak mencapai target disebabkan hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat penyaluran Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal

Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Takalar TA. 2023/2024 dari pemerintah Provinsi dan pemerintah kab. Takalar tidak melakukan permintaan penyaluran dana bantuan keuangan khusus sebesar Rp20.000.000.000,00 dari provinsi dengan alasan bahwa tidak mencukupi waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV tahun 2025; dan

2. Terdapat bagi hasil pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dari pemerintah provinsi yang belum terbayarkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi transfer Pendapatan Transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi TA 2024 terealisasi senilai Rp59.780.507.484,00, maka pada TA. 2025, mengalami peningkatan senilai Rp2.053.282.521,00 atau 3,43%.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 36 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.859.114.052,00	61.833.790.005,00	116,98	54.160.821.484,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	37.861.606.716,00	0,00	0,00	5.619.686.000,00
	Jumlah	**90.720.720.768,00**	**61.833.790.005,00**	**68,16**	**59.780.507.484,00**

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kab. Takalar meliputi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Berrmotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2025 mencapai nilai Rp61.833.790.005,00 atau 116,98% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp52.859.114.052,00. Bila dibandingkan dengan TA 2024, nilai tersebut mengalami kenaikan 14,17% atau senilai Rp7.672.968.521,00 dari jumlah yang dicapai selama TA 2024 senilai Rp54.160.821.484,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 37 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	11.783.921.076,00	9.393.744.997,00	79,72	10.498.843.189,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.294.132.359,00	6.929.367.537,00	95,00	7.565.985.798,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.154.928.000,00	21.448.591.331,00	176,46	16.214.466.700,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	270.000.000,00	171.418.486,00	63,49	79.965.143,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.356.132.617,00	23.890.667.654,00	111,87	19.801.560.654,00
	Jumlah	**52.859.114.052,00**	**61.833.790.005,00**	**116,98**	**54.160.821.484,00**

b. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah Kab. Takalar meliputi Bantuan Keuangan Umum dan Khusus. Penyaluran dana ini ditujukan untuk menjembatani kesenjangan fiskal, mempercepat pembangunan sarana prasarana atau menyukseskan program prioritas berskala provinsi di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada TA 2025 tidak terdapat realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dari anggarkan senilai Rp37.861.606.716,00, akan tetapi pada TA 2024 terdapat realisasi senilai Rp5.619.686.000,00.

Rincian Bantuan Keuangan TA 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 38 Realisasi Bantuan Keuangan TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	17.861.606.716,00	-	0,00	5.019.686.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	20.000.000.000,00	-	0,00	600.000.000,00
	Jumlah	**37.861.606.716,00**	**-**	**0,00**	**5.619.686.000,00**

Bantuan Keuangan TA. 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

   Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi merupakan Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Takalar.

   Pada Tahun Anggaran 2025,

   Pemerintah kab. Takalar menganggarkan Bantuan Keuangan Umum senilai Rp17.861.606.716,00, dan tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat penyaluran Bantuan Keuangan Umum berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No. 400.7.1/3269/DISKES Tanggal 26 Maret 2025 tentang Penghentian Sementara Bantuan Dana Sharing Bagi Peserta Program Kesehatan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan Integrasi kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan dan dibayarkan Iurannya oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk penyaluran bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBI PBPU dan BP) Jaminan Kesehatan se Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan setelah dilakukan pemutakhiran data, penetapan kuota, penetapan alur rujukan pelayanan kesehatan terintegrasi di wilayah Sulawesi Selatan yang berkeadilan bagi rumah sakit Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rumah Sakit

Pemerintah Kabupaten /Kota Se Sulawesi Selatan, dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan.

2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
   Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1263/VIII/2025, Tanggal 20 Agustus 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi meliputi Pembangunan Talud Penahan Abrasi Pantai, Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Bedah Rumah) 400 unit, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem serta Peningkatan Kualitas dan Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp20.000.000.000,00. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus tersebut nihil. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Takalar tidak mengajukan permintaan penyaluran dana bantuan keuangan khusus senilai Rp20.000.000.000,00. Ketidakajuan permintaan penyaluran dimaksud dikarenakan keterbatasan waktu dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

7.5.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp156.394.814,73**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada TA 2025 tidak terdapat realisasi, akan tetapi pada TA 2024 terealisasi senilai RpRp156.394.814,73. Lain–lain Pendapatan Yang Sah digunakan untuk pengembalian atas sisa dana yang ditransfer langsung ke rekening pengelola Dana BOS.

7.5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 dan 2024 tidak menganggarkan Pendapatan Hibah.

7.5.1.1.3.2. Dana Darurat

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 dan 2024 tidak menganggarkan Pendapatan Dana Darurat.

7.5.1.1.3.3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp156.394.814,73**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2025 tidak terdapat realisasi. Namun pada TA 2024 realisasi senilai Rp156.394.814,73. Yang diterima dari pengembalian dana BOS. Jika dibandingkan dengan TA 2024, terjadi penurunan yang disebabkan pada TA 2025 tidak terdapat penerimaan dari pengembalian dana BOS.

7.5.1.2. BELANJA DAERAH

TA 2025	TA 2024
Rp1.089.038.268.854,73	**Rp1.175.052.230.559,93**

Belanja dan Transfer untuk TA 2025 dianggarkan senilai Rp1.191.545.536.310,00 dengan realisasi senilai Rp1.089.038.268.854,73

atau 91,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp86.013.961.705,20 atau 7,32% dari realisasi TA 2024 senilai Rp1.175.052.230.559,93.

Realisasi tersebut di atas termasuk realisasi Belanja Dana BOS dan Belanja BLUD tahun 2025. Beberapa penyebab menurunnya realisasi belanja tahun anggaran 2025 antara lain:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan penyesuaian alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025;
2. Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat tersebut, maka APBD Kab. Takalar TA. 2025 mengalami penyesuaian beberapa sumber dana transfer yang dihapus, antara lain: Alokasi DAU SG Bidang Pekerjaan Umum, DAK Fisik-Bidang Jalan dan DAK Fisik-Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Pada APBD Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan penyesuaian belanja sesuai amanat Inpres Nomor 1 tahun 2025 dengan mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen).
4. Melakukan efisiensi maupun pengurangan belanja pendukung dan tidak memiliki output yang terukur meliputi honorarium pelaksanaan kegiatan, alat tulis kantor (ATK), lembur dan belanja rapat-rapat dinas.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2025

(dalam Rupiah)

No	Belanja Daerah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Operasi	958.865.030.489,27	876.684.714.140,37	91,43	896.799.157.434,93
2	Belanja Modal	81.969.901.917,73	65.642.524.759,36	80,08	133.717.632.456,00
3	Belanja Tak Terduga	4.400.000.000,00	634.620.320,00	14,42	0
4	Belanja Bagi Hasil	3.110.744.903,00	2.952.978.128,00	98,66	2.999.991.000,00
5	Belanja Transfer	143.199.859.000,00	143.123.431.507,00	99,87	141.535.449.669,00
	Jumlah	**1.191.545.536.310,00**	**1.089.038.268.854,73**	**91,4**	**1.175.052.230.559,93**

7.5.1.2.1. BELANJA OPERASI

TA 2025	TA 2024
Rp876.684.714.140,37	**Rp896.799.157.434,93**

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2025 senilai Rp 876.684.714.140,37. Belanja Operasi tersebut mencapai 91,43% atau lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp958.865.030.489,27. Jika dibandingkan dengan TA 2024, realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan senilai Rp20.114.443.294,56 atau 2,24% lebih rendah dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp896.799.157.434,93. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebagai berikut.

Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2025

(dalam Rupiah)

NO	Belanja Operasi	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Pegawai	572.073.250.948,88	532.422.437.350,17	93,07	526.206.586.954,93
2	Belanja Barang dan Jasa	354.864.353.178,39	312.488.982.645,20	88,06	311.105.460.162,00
3	Belanja Bunga	12.096.567.195,00	12.699.563.978,00	104,98	14.475.619.087,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	19.815.859.167,00	19.058.730.167,00	96,18	43.343.891.231,00
6	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	1.667.600.000,00
	Jumlah	**958.865.030.489,27**	**876.684.714.140,37**	**91,43**	**896.799.157.434,93**

7.5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

TA 2025	TA 2024
Rp532.422.437.350,17	**Rp526.206.586.954,93**

Belanja Pegawai pada TA 2025 terealisasi senilai Rp532.422.437.350,17 atau 93,07% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp572.073.250.948,88. Jika dibandingkan dengan TA 2024 realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan senilai Rp6.215.850.395,24 atau 1,18% dari realisasi Tahun 2024 yang mencapai realisasi senilai Rp526.206.586.954,93**.** Kenaikan Belanja Pegawai pada TA 2025 disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) ASN khususnya Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS;
2. Adanya pembayaran Gaji dan Tunjangan Pengangkatan PPPK formasi 2024 sebanyak 59 orang, SK nya terhitung september 2025 untuk PPPK Guru, dan Kesehatan; dan
3. Adanya kenaikan pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN/CPNS dan PPPK.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Belanja Pegawai	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	344.911.054.218,88	322.984.622.370,00	93,64	334.027.518.045,93
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	171.529.690.888,00	158.412.609.515,17	92,35	49.427.579.007,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	96.419.787.633,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.568.547.734,00	12.834.629.802,00	82,44	11.441.947.732,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	534.182.154,00	362.449.995,00	67,85	54.576.356,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	705.200.000,00	99,20	671.200.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	38.818.895.954,00	37.122.925.668,00	95,63	34.163.978.181,00
	Jumlah	**572.073.250.948,88**	**532.422.437.350,17**	**93,07**	**526.206.586.954,93**

1) **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada TA 2025 terealisasi senilai Rp322.984.622.370,00 atau 93,64% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp344.911.054.218,88. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penurunan senilai Rp11.042.895.675,93 atau 3,31%. Penurunan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada TA 2025 disebabkan berkurangnya jumlah pegawai sebanyak 180 orang karena memasuki usia pensiun, meninggal dunia, pemecatan dan pindah tugas kedaerah lain.

Rincian Belanja Gaji Pegawai disajikan sebagai berikut.

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pegawai TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Gaji Pokok ASN	256.573.839.277,00	245.103.353.662,00	95,53	255.413.258.530,93
2	Tunjangan Keluarga ASN	23.178.462.050,00	21.046.311.723,00	90,80	21.921.389.367,00
3	Tunjangan Jabatan ASN	6.000.780.628,00	4.958.155.000,00	82,63	5.206.740.000,00
4	Tunjangan Fungsional ASN	19.995.910.316,00	18.553.428.480,00	92,79	19.062.363.500,00
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.824.646.606,00	2.350.120.000,00	83,20	2.294.667.500,00
6	Tunjangan Beras ASN	13.142.234.546,00	11.464.194.630,00	87,23	11.947.199.820,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.068.361.226,40	2.693.059.867,00	53,13	2.849.857.216,00
8	Pembulatan Gaji ASN	4.917.709,48	3.060.334,00	62,23	3.357.777,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.777.341.816,00	14.799.659.232,00	93,80	13.233.836.842,00
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	583.399.634,00	503.319.860,00	86,27	538.562.618,00
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	1.761.160.410,00	1.509.959.582,00	85,74	1.556.284.875,00
	Jumlah	**344.911.054.218,88**	**322.984.622.370,00**	**93,64**	**334.027.518.045,93**

2) **Tambahan Penghasilan ASN**

Tambahan Penghasilan ASN pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp158.412.609.515,17 atau 92,35% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp171.529.690.888,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2024, Tambahan penghasilan ASN mengalami kenaikan senilai Rp108.985.030.508,17 atau 220,49% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp49.427.579.007,00.

Kenaikan realisasi belanja Tambahan Penghasilan ASN (TPP) dan Belanja Insentif bagi ASN pada TA 2025 disebabkan antara lain:

1. Pada Tahun Anggaran 2025, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan selama 12 bulan penuh. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai hanya dapat dilaksanakan selama 11 bulan, sehingga terdapat perbedaan periode pembayaran sebanyak 1 bulan antara TA 2025 dan TA 2024
2. Terdapat penambahan kode rekening baru pada kelompok Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025, meliputi: Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daera h-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK, dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK.

Rincian Belanja Tambahan penghasilan ASN pada Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp12.759.875.109,00 atau 84,38% dari yang dianggarkan Rp15.121.054.292,00. Jika dibandingkan Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp9.394.434.762,01 atau 42,40% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp22.154.309.871,01.
b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp2.443.642.838,00 atau 82,95% dari yang dianggarkan Rp2.945.672.798,00. Jika dibandingkan Tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp407.871.864,01.
c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp139.032.576,00 atau 99,00% dari yang dianggarkan Rp140.422.898,00. Jika dibandingkan Tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp73.703.249,00.
d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp30.415.494.853,17 atau 81,14% dari yang dianggarkan Rp37.482.455.134,00. Jika dibandingkan Tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp5.243.326.018,17.
e) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada Tahun 2025 merupakan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, dianggarkan senilai Rp 115.840.085.766,00, terealisasi senilai Rp 112.654.564.139,00 atau 97,25%, sedangkan pada tahun anggaran 2024 terealisasi senilai Rp96.419.787.633,00. Jika dibandingkan Tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp16.234.776.506,00 atau 14,415.

   Kenaikan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Tahun 2025 disebabkan adanya penambahan pembayaran insentif pajak baru yaitu Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran, Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

   Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah terdiri dari:

   1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp 7.959.071,00, terealisasi Rp 7.048.329,00 atau 88,55%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp 3.087.500,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel terjadi peningkatan.
   2. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp 79.921.827,00, terealisasi Rp 79.814.250,00 atau 99,86%. Sedangkan pada TA.

2024 tidak dianggarkan.

3. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp4.075.990,00, terealisasi Rp3.784.260,00 atau 92,84%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp4.210.214,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel terjadi penurunan.
4. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp24.074.144,00, terealisasi Rp23.316.981,00 atau 96,85%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp13.232.398,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame.
5. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp657.637.097,00, terealisasi Rp 650.045.649,00 atau 98,84%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp 602.902.325,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024, terjadi peningkatan realisasi belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan.
6. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp16.186.131,00, terealisasi Rp14.581.578,00 atau 90,08%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp3.562.500,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024, terjadi peningkatan realisasi belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
7. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp29.160.879,00, terealisasi Rp28.900.938,00 atau 99,10%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp 18.551.667,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah.
8. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp2.423.013,00, terealisasi Rp1.322.487,00 atau 54,58%. Sedangkan pada TA. 2024 tidak dianggarkan.
9. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp295.689.425,00, terealisasi Rp295.566.180,00 atau 99,95%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp176.297.561,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
10. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp382.409.615,00, terealisasi Rp379.156.823,00 atau 99,14%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp148.091.131,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja Insentif bagi ASN

atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

11. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp386.482.500,00, terealisasi Rp378.913.646,00 atau 98,04%. Sedangkan pada TA. 2024 tidak dianggarkan.
12. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp419.635.000,00, terealisasi Rp404.238.361,00 atau 96,33%. Sedangkan pada TA. 2024 tidak dianggarkan.
13. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp12.000.000,00, terealisasi Rp7.000.000,00 atau 58,33%. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp4.500.000,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan.
14. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp92.490.245.000,00, terealisasi Rp82.979.414.900,00 atau 89,71. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp76.454.582.996,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
15. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp220.250.000,00, terealisasi Rp196.500.000,00, atau 89,21. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp 695.750.000,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi penurunan realisasi belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.
16. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp20.053.680.074,00, terealisasi Rp16.478.801.357,00 atau 82,17. Sedangkan pada TA. 2024 terealisasi senilai Rp14.763.179.341,00. Jika dibandingkan dengan TA. 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.
17. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp672.756.000,00, terealisasi Rp10.497.658.400,00, atau 1.560,39%. Sedangkan pada TA. 2024 tidak dianggarkan.
18. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK pada TA. 2025 dianggarkan senilai Rp85.500.000,00, terealisasi Rp228.500.000,00 atau 267,25. Sedangkan pada TA. 2024 tidak dianggarkan.

3) **Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

Pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp12.834.629.802,00 atau 82,43% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp15.568.547.734,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri dari Belanja Uang Representasi DPRD, Belanja Tunjangan Keluarga DPRD, Belanja

Tunjangan Beras DPRD, Belanja Uang Paket DPRD, Belanja Tunjangan Jabatan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD, Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Reses DPRD, Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Pembulatan Gaji DPRD, Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dan Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.392.682.070,00 atau 12,17%. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian jumlah anggota DPRD Kabupaten Takalar berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024, sehingga realisasi TA 2025 menjadi Rp12.834.629.802,00 dari realisasi TA 2024 sebesar Rp11.441.947.732,00.

4) **Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp362.449.995,00 atau 67,85% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp534.182.154,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri dari Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH, dan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami kenaikan senilai Rp54.576.356,00 atau 1.062% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp 307.873.639,00. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi belanja gaji untuk jabatan Bupati dan Wakil Bupati definitif. Sementara pada Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja gaji hanya untuk jabatan Pelaksana Tugas Bupati.

5) **Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**

Pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp705.200.000,00 atau 99,20% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp710.880.000,00. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH mengalami kenaikan senilai Rp34.000.000,00 atau 5,07% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp671.200.000,00. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian besaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

6) **Belanja Pegawai BLUD**

Pada TA 2025 terealisasi senilai Rp37.122.925.668,00 atau 95,63% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp38.818.895.954,00, Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, Belanja Pegawai BLUD mengalami kenaikan 8,66% atau senilai Rp2.958.947.487,00 dari

realisasi Tahun 2024 senilai Rp34.163.978.181,00. Kenaikan Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya pembayaran belanja jasa pelayanan atas jasa media tahun sebelumnya yang belum terbayarkan pada BLUD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.

7.5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

TA 2025	TA 2024
Rp312.488.982.645,20	**Rp311.105.460.162,00**

Pada TA 2025, realisasi Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai Rp354.864.353.178,39 dan terealisasi senilai Rp312.488.982.645,20 atau 88,06%, sehingga terdapat selisih antara anggaran dan realisasi senilai Rp42.375.370.533,19. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 0,44% atau senilai Rp1.383.522.483,20. Pada TA 2024, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp332.608.114.667,60 dan terealisasi sebesar Rp311.105.460.162,00 atau 93,54%, sehingga terdapat selisih antara anggaran dan realisasi senilai Rp21.502.654.505,60. Jika dibandingkan anggaran dan realisasi TA 2024 dan TA 2025, terdapat peningkatan baik anggaran maupun realisasi. Namun, secara persentase terjadi penurunan karena rencana anggaran pada TA 2025 tidak seluruhnya direalisasikan, disebabkan beberapa program kegiatan yang tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
A	**Belanja Barang**	**98.836.768.597,68**	**77.920.592.090,00**	**78,84**	**70.763.216.156,00**
1	Belanja Barang Pakai Habis	97.458.728.280,68	76.674.590.265,00	78,67	64.046.127.380,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	28.103.500,00	8.753.008,00	31,15	24.353.552,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.349.936.817,00	1.237.248.817,00	91,65	6.692.735.224,00
B	**Belanja Jasa**	**109.373.716.733,08**	**100.765.768.514,20**	**92,13**	**83.103.661.627,00**
1	Belanja Jasa Kantor	58.618.024.933,08	53.934.459.173,20	92,01	50.514.384.760,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.252.582.400,00	33.520.342.649,00	92,46	27.539.721.181,00
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.918.192.400,00	7.459.690.452,00	94,21	2.360.176.826,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	315.690.000,00	278.050.000,00	88,08	534.520.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	917.854.000,00	853.569.100,00	93,00	258.249.500,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
7	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan	3.885.640.000,00	3.633.717.952,00	93,52	1.524.609.360,00
8	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	727.200.000,00	718.800.000,00	98,84	0,00

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
9	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	738.533.000,00	367.139.188,00	49,71	192.000.000,00
C	**Belanja Pemeliharaan**	**16.533.809.598,63**	**15.344.396.430,00**	**92,81**	**5.495.918.856,00**
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.584.602.504,00	2.199.593.838,00	85,10	2.358.928.433,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.375.159.148,63	7.610.855.921,00	90,87	1.978.246.893,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.574.047.946,00	5.533.946.671,00	99,28	1.152.743.530,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
D	**Belana Perjalanan Dinas**	**38.745.750.000,00**	**37.247.137.251,00**	**96,13**	**48.295.998.540,00**
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.595.750.000,00	37.098.487.822,00	96,12	48.210.933.540,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000,00	148.649.429,00	99,10	85.065.000,00
E	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**2.320.500.000,00**	**2.051.484.920,00**	**88,41**	**14.496.170.000,00**
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	516.750.000,00	482.750.000,00	93,42	11.897.770.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat	1.803.750.000,00	1.568.734.920,00	86,97	2.598.400.000,00
F	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.064.673.696,00**
G	**Belanja Barang dan Jasa BOSP**	**39.601.849.762,00**	**38.421.670.235,00**	**0,00**	**0,00**
H	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**49.451.958.487,00**	**40.737.933.205,00**	**82,38**	**47.885.821.287,00**
	Jumlah	**354.864.353.178,39**	**312.488.982.645,20**	**88,06**	**311.105.460.162,00**

7.5.1.2.1.3. Belanja Bunga

TA 2025	TA 2024
Rp12.699.563.978,00	**Rp14.475.619.087,00**

Belanja bunga merupakan belanja atas pembayaran bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Bunga senilai Rp12.096.567.195,00, terealisasi senilai 104,98% atau senilai Rp12.699.563.978,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 Belanja Bunga mengalami penurunan 12,27% atau senilai Rp1.776.055.109,00 dari realisasi TA 2024 senilai Rp14.475.619.087,00.

Pembayaran bunga pinjaman PEN antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai perjanjian Nomor PERJ-211/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pinjaman		Rp241.947.497.641,00
Jumlah kewajiban		Rp303.065.904.021,00
•Pokok	Rp233.338.652.206,00	
•Bunga	Rp69.727.251.815,00	
Jumlah Pengembalian		Rp61.292.238.244,00
•Pokok	Rp 28.053.734.679,00	
•Bunga	Rp33.238.503.565,00	
Sisa Kewajiban		Rp112.485.877.249,00
•Pokok	Rp 66.943.513.167,00	
•Bunga	Rp45.542.364.082,00	

7.5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Subsidi.

7.5.1.2.1.5. Belanja Hibah

TA 2025	TA 2024
Rp19.058.730.167,00	**Rp43.343.891.231,00**

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Hibah senilai Rp19.815.859.167,00 dan terealisasi senilai Rp19.058.730.167,00 atau 96,18%, Realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan senilai Rp24.285.161.064,00 atau 56,03% dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp43.343.891.231,00. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2025. Hal ini disebabkan adanya pemberian hibah untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) serta hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Rincian Belanja Hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.597.191.167,00	15.971.462.167,00	96,23	42.334.295.231,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.109.868.000,00	1.109.868.000,00	100,00	994.596.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	2.108.800.000,00	1.977.400.000,00	93,77	0,00
	Jumlah	**19.815.859.167,00**	**19.058.730.167,00**	**96,18**	**43.343.891.231,00**

7.5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

TA 2025	TA 2024
Rp15.000.000,00	**Rp1.667.600.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan Belanja Bantuan Sosial dari

Pemerintah Kabupaten Takalar kepada pihak lain. Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Bantuan Sosial senilai Rp15.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp15.000.000,00 atau 100%, Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan senilai Rp1.652.600.000,00 dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp1.667.600.000,00 atau 99,10%. Penurunan realisasi Belanja Sosial ini tidak mengindikasikan penurunan pelayanan dasar, karena sebagian program tetap dilaksanakan melalui skema belanja lain yang lebih sesuai dengan karakteristik bantuan.

7.5.1.2.1.7. Belanja Imbalan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Imbalan.

7.5.1.2.2. BELANJA MODAL

TA 2025	TA 2024
Rp65.642.524.759,36	**Rp133.717.632.456,000**

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah Aset Tetap. Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Pada TA 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Modal senilai Rp81.969.901.917,73 dan direalisasikan senilai Rp65.642.524.759,36 atau 80,08%. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp68.075.107.696,64 atau 50,91% dari realisasi Belanja Modal TA 2024 senilai Rp133.717.632.456,00. Penurunan Belanja Modal disebabkan karena keterbatasan kemampuan fiskal dengan adanya penyesuaian beberapa sumber dana transfer yaitu: Alokasi DAU SG Bidang Pekerjaan Umum, DAK Fisik-Bidang Jalan dan DAK Fisik-Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Tanah	429.300.000,00	415.341.000,00	96,75	2.138.361.440,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.314.775.374,00	24.610.634.185,00	86,92	34.608.590.475,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.803.815.602,73	17.152.877.619,00	91,22	46.263.878.562,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.883.010.941,00	21.930.774.355,36	66,69	50.388.636.979,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	114.000.000,00	113.397.600,00	99,47	199.585.000,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.425.000.000,00	1.419.500.000,00	99,61	118.580.000,00
Jumlah		**81.969.901.917,73**	**65.642.524.759,36**	**80,08**	**133.717.632.456,00**

7.5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

TA 2025	TA 2024
Rp415.341.000,00	**Rp2.138.361.440,00**

Belanja Modal Pengadaan Tanah merupakan belanja yang menambah aktiva tetap tanah. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 senilai Rp415.341.000,00 atau 96,74% dari anggaran senilai Rp429.300.000,00. Realisasi tersebut merupakan Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir, perencaanaa dan pengawasan Belanja Modal dan Persil pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024, belanja modal Pengadaan Tanah TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.723.020.440,00 atau 80,58%, dari Rp2.138.361.440,00 menjadi Rp415.341.000,00. Penurunan ini disebabkan berkurangnya kegiatan pengadaan tanah pada TA 2025 sehubungan dengan perubahan prioritas program pembangunan daerah. Meski demikian, penyerapan anggaran mencapai 96,74%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah berjalan optimal sesuai rencana yang ditetapkan.

7.5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2025	TA 2024
Rp24.610.634.185,00	**Rp34.608.590.475,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang menambah aktiva tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Takalar dalam periode TA 2025 senilai Rp24.610.634.185,00 atau 86,92% dari yang dianggarkan senilai Rp28.314.775.374,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp9.997.956.290,00 atau 28,89% dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp34.608.590.475,00. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian prioritas program pembangunan daerah dan pengurangan pagu anggaran pada TA 2025.

Tingkat penyerapan anggaran TA 2025 sebesar 86,91% menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin telah berjalan optimal. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Alat Besar	562.344.000,00	433.541.000,00	77,10	121.424.500,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.480.858.370,00	3.559.427.400,00	79,44	5.077.600.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	102.715.000,00	35.892.500,00	34,94	106.060.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	242.783.000,00	240.000.000,00	98,85	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.957.525.000,00	12.666.825.229,00	84,69	10.096.096.200,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	48.385.000,00	48.135.200,00	99,48	6.207.742.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.553.728.267,00	2.084.404.867,00	81,62	3.323.745.631,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	99.950.000,00
9	Belanja Modal Komputer	2.522.207.700,00	1.702.130.224,00	67,49	6.008.766.140,00
10	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	0,00	6.140.000,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	0,00	14.088.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	0,00	18.000.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	24.420.000,00	24.198.000,00	0,00	49.671.700,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	0,00	3.479.306.304,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.819.809.037,00	3.816.079.765,00	135,33	0,00
	Jumlah	**28.314.775.374,00**	**24.610.634.185,00**	**86,92**	**34.608.590.475,00**

7.5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

TA 2025	TA 2024
Rp17.152.877.619,00	**Rp46.263.878.562,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Takalar berupa konstruksi gedung dan bangunan dalam periode TA 2025 terealisasi senilai Rp17.152.877.619,00 atau 91,22% dari yang dianggarkan senilai Rp18.803.815.602,73. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan senilai Rp29.111.000.943,00 atau 62,92% lebih rendah dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 senilai Rp46.263.878.562,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 47 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	14.877.195.062,73	13.344.980.864,00	89,70	42.645.318.989,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.926.620.540,00	3.807.896.755,00	96,98	3.618.559.573,00
	Jumlah	**18.803.815.602,73**	**17.152.877.619,00**	**91,22**	**46.263.878.562,00**

Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 disebabkan karena Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang bersumber dari dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi (PEN) sudah terlaksana sebagian besar pada tahun 2024.

7.5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2025	TA 2024
Rp21.930.774.355,36	**Rp50.388.636.979,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Takalar berupa konstruksi jalan, irigasi dan jaringan dalam periode TA 2025 senilai Rp21.930.774.355,36 atau penyerapan 66,69% dari yang dianggarkan senilai Rp32.883.010.941,00. Penyerapan ini tidak sesuai anggaran disebabkan sumber dana Bantuan Keuangan Provinsi untuk pekerjaan

Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam tidak tersalurkan sampai dengan 31 desember 2025 dengan total anggaran senilai Rp10.780.228.000,00.

Sedangkan Realisasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp28.457.862.623,64 atau 56,48% dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp50.388.636.979,00. Penurunan ini terjadi karena pada APBD Kab. Takalar TA. 2025 mengalami penyesuaian beberapa sumber dana transfer yang dihapus, antara lain: Alokasi DAU SG Bidang Pekerjaan Umum, DAK Fisik-Bidang Jalan dan DAK Fisik-Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 48 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	16.513.945.985,00	16.120.174.018,00	97,62	42.294.357.394,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	15.203.125.396,00	4.648.829.696,00	30,58	7.598.877.785,00
4	Belanja Modal Jaringan	1.165.939.560,00	1.161.770.641,36	99,64	495.401.800,00
Jumlah		**32.883.010.941,00**	**21.930.774.355,36**	**66,69**	**50.388.636.979,00**

7.5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp113.397.600,00	**Rp199.585.000,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Takalar dalam periode TA 2025 senilai Rp113.397.600,00 dari yang dianggarkan senilai Rp114.000.000,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan senilai Rp86.187.400,00 atau 43,18% dibandingkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap pada Tahun 2024 senilai Rp199.585.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Tabel 49 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0	199.585.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	114.000.000,00	113.397.600,00	99,47	0,00
Jumlah		**114.000.000,00**	**113.397.600,00**	**99,47**	**199.585.000,00**

7.5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp1.419.500.000,00	**Rp118.580.000,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.419.500.000,00 atau 99,61% dari anggaran senilai Rp1.425.000.000,00. Belanja ini terdiri dari belanja modal aset tidak berwujud berupa hak cipta dan belanja modal pengadaan software yang menambah Aset Tetap Lainnya.

Terdapat sisa anggaran senilai Rp5.500.000,00 dengan tingkat penyerapan

99,61%. Penyerapan yang tinggi menunjukkan pelaksanaan pengadaan hak cipta dan software telah berjalan optimal sesuai perencanaan.
Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.300.920.000,00 atau 1.097,13% dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp118.580.000,00.
Kenaikan signifikan ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pengadaan software dan hak cipta untuk mendukung digitalisasi layanan pemerintahan Kabupaten Takalar pada TA 2025.

Tabel 50 Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.175.000.000,00	1.170.000.000,00	99,57	118.580.000,00
Jumlah		**1.425.000.000,00**	**1.419.500.000,00**	**99,61**	**118.580.000,00**

7.5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

TA 2025	TA 2024
Rp634.620.320,00	**Rp0,00**

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp4.400.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp634.620.320,00 atau 14,42%. Terdapat sisa anggaran senilai Rp3.765.379.680,00 dengan tingkat penyerapan 14,42%. Rendahnya penyerapan disebabkan sifat Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali, dan tidak diharapkan berulang.
Sedangkan Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp634.620.320,00 atau 100% dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp0,00. Kenaikan ini terjadi karena pada TA 2025 terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.
Rincian penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagai berikut :

- Pembuatan akta pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih Kabupaten Takalar sebesar Rp275.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Takalar Nomor 408 Tahun 2025
- Pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp85.525.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 371 Tahun 2025 tentang Penggunaan dana tidak terduga untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Takalar, yang terdiri dari biaya Andalalin sebesar Rp40.075.000,00 dan Penyusunan UKL-UPL sebesar Rp45.450.000,00

Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas sisa DAK sampai dengan 2023 dan sisa DAK Non Fisik Tahun 2024 yang masih ada di RKUD yang dipotong langsung melalui trasnfer DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp274.095.320,00 sesuai SK Bupati Takalar Nomor 398 Tahun 2025 tentang Penggunaan dana tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan Pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.

7.5.1.2.4. BELANJA TRANSFER

TA 2025	TA 2024
Rp146.076.409.635,00	**Rp144.535.440.669,00**

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil ke Desa TA 2025 senilai

Rp146.076.409.635,00 atau 99,83% dari yang dianggarkan senilai Rp146.310.603.903,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan 1,07% atau senilai Rp1.540.968.966,00, dibandingkan realisasi Tahun 2024 senilai Rp144.535.440.669,00. Rincian Transfer ke desa/Bantuan Keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 51 Transfer ke Desa/Bantuan Keuangan Parpol TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil	3.110.744.903,00	2.952.978.128,00	94,93	2.999.991.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	143.199.859.000,00	143.123.431.507,00	99,95	141.535.449.669,00
Jumlah		**146.310.603.903,00**	**146.076.409.635,00**	**99,84**	**144.535.440.669,00**

7.5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

TA 2025	TA 2024
Rp2.952.978.128,00	**Rp2.999.991.000,00**

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp3.110.744.903,00 dan terealisasi senilai Rp2.952.978.128,00 atau 94,93%. Belanja ini merupakan alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah desa. Terdapat sisa anggaran senilai Rp157.766.775,00 dengan tingkat penyerapan 94,93%. Sisa anggaran tersebut terjadi karena realisasi disesuaikan dengan permintaan dari masing-masing desa.

Realisasi TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp47.012.872,00 atau 1,57% dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp2.999.991.000,00.

Penurunan ini sejalan dengan penurunan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun sebelumnya yang menjadi dasar perhitungan alokasi bagi hasil untuk TA 2025. Rincian Transfer ke desa/Bantuan Keuangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 52 Rincian Belanja Bagi Hasil TA 2025

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.704.557.128,00	1.055.626.300,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	264.845.750,00	1.944.364.700,00
JUMLAH		**2.952.978.128,00**	**2.999.991.000,00**

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa senilai Rp2.855.465.463,00 dan direalisasikan senilai Rp2.688.132.378,00 atau 94,13%, sedangkan pada Tahun 2024 realisasi senilai 100% atau senilai Rp1.055.626.300,00. Untuk penganggaran Belanja Bagi Hasil Transfer ke desa sama dengan penganggaran Bagi Hasil Retribusi yaitu 10% dari realisasi tahun sebelumnya.

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar menganggarkan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa (BHPRD) senilai Rp255.279.440,00 dan terealisasi 103,75% atau senilai Rp264.845.750,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024

mengalami penurunan senilai Rp1.695.943.700,00 dari Realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.944.364.700,00.

7.5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

TA 2025	TA 2024
Rp143.123.431.507,00	**Rp141.535.449.669,00**

Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan pemerintah daerah yang kepada pemerintah desa. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp143.199.859.000,00 dan terealisasi senilai Rp143.123.431.507,00 atau 99,95%. Bantuan Keuangan ini digunakan untuk Belanja Dana Desa dan Belanja Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada 86 desa di Kabupaten Takalar.

Terdapat sisa anggaran senilai Rp76.427.493,00 dengan tingkat penyerapan 99,95%. Penyerapan yang sangat tinggi menunjukkan penyaluran bantuan keuangan kepada desa telah berjalan sesuai jadwal dan persyaratan administrasi. Realisasi TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp1.587.981.838,00 atau 1,12% dibandingkan realisasi TA 2024 senilai Rp141.535.449.669,00, kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan anggaran Alokasi Dana Desa. Rincian Belanja Bantuan Keuangan disajikan sebagai berikut:

a. Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada TA 2025 dan TA 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan antar Provinsi dan tidak ada realisasi.

b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten /Kota

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp63.301.380.000,00**

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota dan tidak terealisasikan, merupakan belanja Alokasi Dana Desa (ADD). Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp63.301.380.000,00 dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp63.301.380.000,00.

c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/ Kota

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada TA 2025 dan TA 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dan tidak ada realisasi.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada TA 2025 dan TA 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi dan tidak ada realisasi.

e. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa

TA 2025	TA 2024
Rp143.123.431.507,00	**Rp78.234.069.669,00**

Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 dianggarkan senilai Rp143.199.859.000,00 dan terealisasi senilai Rp143.123.431.507,00 atau 99,95%. Bantuan Keuangan ini digunakan untuk Belanja Dana Desa dan Belanja Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada 86 Desa dengan penyerapan yang sangat tinggi menunjukkan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa telah berjalan sesuai jadwal dan persyaratan administrasi.

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 53 Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Dana Desa	76.268.700.000,00	78.234.069.669,00
2	Alokasi Dana Desa	66.854.731.507,00	0,00
	Jumlah	**143.123.431.507,00**	**78.234.069.669,00**

f. Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/ Kota

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada TA 2025 dan TA 2024 Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/ Kota dan tidak ada realisasi.

Surplus/Defisit

TA 2025	TA 2024
Rp105.505.975.646,22	**Rp4.998.364.931,40**

Pada TA 2025 Pemerintah Kabupaten Takalar, anggaran surplus senilai Rp30.210.931.872,00 mengalami surplus senilai Rp105.505.975.646,22 atau 349,23%, Jika dibandingkan dengan TA 2024 surplus senilai Rp4.998.364.931,40 mengalami peningkatan senilai Rp100.507.610.714,82 atau 2010,81%. Surplus defisit disebabkan jumlah penerimaan lebih tinggi dari jumlah belanja pada Tahun 2025.

7.5.1.3. PEMBIAYAAN DAERAH

TA 2025	TA 2024
(Rp29.814.228.411,08)	**Rp4.077.185.145,52**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar (Rp29.814.228.411,08) atau terealisasi sebesar 98,69% dari jumlah yang dianggarkan sebesar (Rp30.210.931.872,00). Pembiayaan Neto merupakan selisih antara

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025. Pembiayaan Neto merupakan selisih lebih atau kurang antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Neto digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi akibat lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, atau sebaliknya digunakan untuk memanfaatkan terjadinya surplus anggaran.

Tabel 54 Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Penerimaan Pembiayaan	9.075.550.077,00	9.075.550.076,92	23.953.750.896,52
Pengeluaran Pembiayaan	39.286.481.949,00	38.889.778.488,00	19.876.565.751,00
Pembiayaan Neto	**(30.210.931.872,00)**	**(29.814.228.411,08)**	**4.077.185.145,52**

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp29.814.228.411,08) terealisasi sebesar 98,69% dari anggaran sebesar (Rp30.210.931.872,00). Selisih antara realisasi dengan anggaran sebesar Rp396.703.460,92 merupakan sisa anggaran pada pos Pengeluaran Pembiayaan, khususnya pada akun Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat.

Nilai Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 yang bernilai negatif menunjukkan bahwa Pengeluaran Pembiayaan lebih besar daripada Penerimaan Pembiayaan. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada Pemerintah Pusat yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38.889.778.488,00, sementara Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hanya sebesar Rp9.075.550.076,92.

Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun Anggaran 2024, Pembiayaan Neto bernilai positif sebesar Rp4.077.185.145,52, sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi bernilai negatif sebesar (Rp29.814.228.411,08). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kewajiban pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pada Tahun Anggaran 2025.

Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

TA 2025	TA 2024
Rp9.075.550.076,92	**Rp23.953.750.896,52**

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penerimaan piutang daerah.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp9.075.550.076,92 atau terealisasi sebesar 100,00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.075.550.077,00. Realisasi Penerimaan

Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.878.200.819,60 atau 62,11% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.953.750.896,52.

7.5.1.3.1.1. Penggunaan SiLPA

TA 2025	TA 2024
Rp9.075.550.076,92	**Rp23.953.750.896,52**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Penggunaan SiLPA sebesar Rp9.075.550.076,92 dari anggaran sebesar Rp9.075.550.077,00 atau terealisasi sebesar 100,00%. Selisih sebesar Rp0,08 merupakan pembulatan. Akun-akun penerimaan pembiayaan lainnya, antara lain Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah, tidak terdapat anggaran maupun realisasi pada Tahun Anggaran 2025.

7.5.1.3.1.2. Pencairan Dana Cadangan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Pencairan Dana Cadangan pada TA 2025 dan 2024.

7.5.1.3.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2025 dan 2024.

7.5.1.3.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Daerah pada TA 2025 dan 2024.

7.5.1.3.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada TA 2025 dan 2024.

7.5.1.3.1.6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada TA 2025 dan 2024.

7.5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

TA 2025	TA 2024
Rp38.889.778.488,00	**Rp19.876.565.751,00**

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2025 sejumlah Rp38.889.778.488,00 atau 98,99% dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp39,286,481,949.00, Sedangkan pada tahun 2024 terealisasi senilai Rp19.876.565.751,00.

7.5.1.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar tidak membentuk Dana Cadangan pada TA 2025 dan 2024.

7.5.1.3.2.2. Penyertaan Modal Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Penyertaan Modal Daerah TA 2025 dan 2024 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.3.2.3.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

TA 2025	TA 2024
Rp38.889.778.488,00	**Rp19.876.565.751,00**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat dalam TA 2025 sebesar Rp38.889.778.488,00 atau 98,99% dari anggaran Rp39.286.481.949,00 dan 2024 terealisasi senilai Rp19.876.565.751,00.

7.5.1.3.2.4.Pemberian Pinjaman Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemberian Pinjaman Daerah TA 2025 dan 2024 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

7.5.1.3.2.5.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. TA 2025 dan 2024 tidak dianggarkan dan tidak direalisasikan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

TA 2025	TA 2024
Rp75.691.747.235,14	**Rp9.075.550.076,92**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2025 senilai Rp75.691.747.235,14. merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam TA 2025. Adapun rincian SiLPA LRA sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Selisih
1	Kas di Kas Daerah	73.924.945.360,21	3.622.207.306,36	70.302.738.053,85
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.701.097,00	23.829.184,07	-15.128.087,07
4	Kas di BLUD	529.149.339,20	4.773.169.304,45	-4.244.019.965,25
5	Kas Dana BOS	561.221.339,73	285.158.798,73	276.062.541,00
6	Kas di Bendahara FKTP	667.730.099,00	407.500.347,00	260.229.752,00

7.5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi Saldo Anggaran Lebih Akhir yang diklasifikasikan berdasarkan SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berkenaan, SiLPA serta Koreksi Kesalahan Pembukuan sebelumnya.

7.5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2025 senilai Rp9.075.550.076,92, sedangkan saldo awal Tahun 2024 senilai Rp23.953.750.896,52,. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp14.878.200.819,60 atau 62,11%.

7.5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi mengenai perubahan Saldo Anggaran Lebih pada tahun anggaran pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan lain-lain, sehingga diperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir. Ikhtisar Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 56 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**9.075.550.076,92**	**23.953.750.896,52**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(9.075.550.076,92)	(23.953.750.896,52)
3	**Subtotal (1 - 2)**	**0,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	75.691.747.235,14	9.075.550.076,92
5	**Subtotal (3 + 4)**	**75.691.747.235,14**	**9.075.550.076,92**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-Lain	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**75.691.747.235,14**	**9.075.550.076,92**

7.5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun 2025 senilai Rp75.691.747.235,14, sedangkan untuk Tahun 2024 senilai Rp9.075.550.076,92, mengalami kenaikan senilai Rp66.616.197.158,22 atau 734,02%. Peningkatan SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran 2025 yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penerimaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Akhir Tahun Anggaran
   Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam jumlah yang cukup besar yang diterima pada akhir tahun anggaran. Penerimaan dana transfer pada akhir tahun tersebut mengakibatkan sebagian program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari dana dimaksud tidak dapat dilaksanakan secara optimal pada Tahun Anggaran 2025, sehingga saldo kas atas dana tersebut menjadi bagian dari SiLPA dan akan digunakan kembali pada Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peruntukan masing-masing.
2. Perubahan Program dan Kegiatan dalam RPJMD pada Tahun Berjalan
   Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan program dan kegiatan yang tercantum dalam` Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berjalan. Perubahan tersebut berdampak pada penyesuaian atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan, sehingga sebagian belanja yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025, dan turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya saldo SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Saldo SiLPA/SiKPA Tahun Anggaran 2025 tersebut akan menjadi sumber Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 melalui mekanisme Penggunaan SAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp0,00. Dan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp0,00.

Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 senilai Rp75.691.747.235,14 dan Tahun 2024 senilai Rp9.075.550.076,92 mengalami kenaikan senilai Rp66.616.197.158,22 atau 734,02%.

7.5.3. Penjelasan Akun-akun Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Posisi keuangan per 31 Desember 2025 terdiri dari aset senilai Rp1.913.276.571.884,64 kewajiban senilai Rp207.796.574.446,60 dan ekuitas senilai Rp1.705.479.997.438,04.

7.5.3.1. ASET

TA 2025	TA 2024
Rp1.913.276.571.884,64	**Rp1.864.017.087.392,84**

Total Aset Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.913.276.571.884,64. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.864.017.087.392,84, terjadi kenaikan sebesar Rp49.259.484.491,80 atau 2,64%.**Tabel 57 Rekapitulasi Aset TA 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

No	Akun	2025	2024
1	Aset Lancar	122.094.738.435,52	62.645.126.699,05
2	Investasi Jangka Panjang	99.454.263.991,71	95.809.633.010,89
3	Aset Tetap	1.511.368.923.829,98	1.525.654.009.435,26
4	Properti Investasi	100.273.106.381,02	102.142.553.871,24
5	Aset Lainnya	80.085.539.246,41	77.765.764.376,40
	Jumlah	**1.913.276.571.884,64**	**1.864.017.087.392,84**

7.5.3.1.1. ASET LANCAR

TA 2025	TA 2024
Rp122.094.738.435,52	**Rp62.645.126.699,05**

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp122.094.738.435,52. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.645.126.699,05, terjadi kenaikan sebesar Rp59.449.611.736,47 atau 94,90%. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2025	2024
1	Kas dan Setara Kas	75.728.222.875,83	9.111.864.940,61
2	nvestasi Jangka Pendek	0,00-	0,00
3	Piutang Pajak Daerah	14.184.206.800,00	13.518.954.851,00
4	Piutang Retribusi Daerah	4.348.101.522,00	3.851.044.052,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	10.441.609.713,85	10.705.848.795,57
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
8	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	19.078.053.435,00
9	Piutang Lainnya	801.642.425,83	226.135.000,00
10	Penyisihan Piutang	(17.359.544.513,35)	(16.435.423.436,82)
11	Beban Dibayar Dimuka	50.993.807,41	36.962.917,49
12	Persediaan	33.899.505.803,95	22.551.686.144,20
	JUMLAH	**122.094.738.435,52**	**62.645.126.699,05**

7.5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

TA 2025	TA 2024
Rp75.728.222.875,83	**Rp9.111.864.940,61**

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah;
(2) Kas di Bendahara Penerimaan;
(3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
(5) Kas lainnya.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

(1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
(2) Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

a. Kas di Kas Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp73.924.945.360,21	**Rp3.622.207.306,36**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp73.924.945.360,21. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.081.858.531,68, terjadi kenaikan sebesar Rp64.843.086.828,53 atau 714,17%. Rincian rekening Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 59 Saldo Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Nama Rekening	Bank	No. Rekening	2025	2024
1	Penampungan Potongan Gaji	PT Bank Sulselbar	021.100.0001.8	13,754,00	0,00
2	Kas Daerah	PT Bank Sulselbar	021.001.000000004.2	7.513.670.222,00	3.622.064.568,36
3	RKUD Kab. Takalar	PT Bank Sulselbar	021.001.0931.7	66.411.118.646,21	0,00
4	Pemda Kab. Takalar	PT Bank BNI	83193028	0,00	0,00
5	Pemda Kab Takalar	PT Bank BRI	0250.01.000248.30.4	142.738,00	142.738,00
			Jumlah	**73.924.945.360,21**	**3.622.207.306,36**

Rincian lebih lanjut dilihat pada **Lampiran 1.**

Adapun rincian Saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp73.924.945.360,21 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 60 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sisa Saldo
1	DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	21.999.071.392,00
2	DAU Pendanaan Kelurahan	0,00
3	DAU SG Bidang Pendidikan	2.245.075.958,00

No.	Uraian	Sisa Saldo
4	DAU SG Bidang Kesehatan	0,00
5	DAU SG Bidang PU	0,00
6	DAU SG THR Guru	15.570.884.000,00
7	DAU PPPK 2023	0,00
8	DBH - SDA	0,00
9	DBH - Pajak Pusat	0,00
10	DBH - Pajak Provinsi	22.100.783.182,00
11	DBH - Cukai	366.040.100,00
12	DBH - TDF	0,00
13	DAK F - Penugasan Sanitasi	12.900,00
14	DAK F - Penugasan Jalan	0,00
15	DAK F - Penugasan Pendidikan	0,00
16	DAK F - Penugasan Kesehatan	13.560.600,00
17	DAK F - Penugasan Pertanian	0,00
18	Pendapatan PPI Beba Bagian Provinsi (30%)	69.320.100,00
19	DAK NF - Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	2.979.449.560,00
20	DAK NF - Dana Tambahan Penghasilan Guru	0,00
21	Dana Tunjangan Khusus Guru	8.744.400,00
22	DAK NF - Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
23	DAK NF- Koperasi & UMKM	0,00
24	DAK NF - PPA	150.935.620,00
25	DAK NF - Ketapang	60.986.825,00
26	Dana BOK	1.774.940.694,00
27	Dana BOK Puskesmas	667.730.099,00
28	Dana BOKB	297.685.440,00
29	Dana BOP PAUD	5.124.000,00
30	INSENTIF Fiskal	4.671.922.150,00
31	Sisa Dana DPPID Tahun 2011	283.227.020,44
32	Dana Bankeu umum 2024	523.226.492,00
33	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	136.224.828,00
	Jumlah	**73.924.945.360,21**

b. Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan saldo Tahun 2024 senilai Rp0,00.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2025	TA 2024
Rp8.701.097,00	**Rp23.829.184,07**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.701.097,00. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.829.184,07, terjadi penurunan sebesar Rp15.128.087,07 atau 63,49% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 61 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Nama SKPD	Sisa Kas Tahun 2025	Sisa Kas Tahun 2024
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	3.723.074,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	16.800.000,00
3	Sekretariat DPRD	6.160.616,00	0,00
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.518.151,00	0,00
5	Kecamatan Mappakasunggu	0,00	0,00
6	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	0,00	100.000,00
7	Kecamatan Pattallassang	0,00	27,00
8	Kecamatan Sanrobone	22.330,00	0,29
9	Kecamatan Mangarabombang	0,00	3.206.081,00
10	Kantor RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	0,00	1,78
	JUMLAH	**8.701.097,00**	**23.829.184,07**

Saldo Kas Tahun 2025 senilai Rp8.701.097,00 merupakan saldo Kas yang terdiri dari sisa UP/GU/TU yang belum disetor ke rekening kas daerah sampai 31 Desember 2025 dan telah disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada tanggal 5 Januari 2026.

Rekapitulasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1a.**

d. Kas di BLUD

TA 2025	TA 2024
Rp565.624.979,89	**Rp4.773.169.304,45**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp565.624.979,89. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.773.169.304,45, terjadi penurunan sebesar Rp4.207.544.324,56 atau 88,15%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 62 Saldo Kas di BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Nama Bank	No Rekening	Saldo Kas BLUD Tahun 2025	Saldo Kas BLUD Tahun 2024
1	Bank Negara Indonesia	1418210652	0,00	0,00
2	Bank Rakyat Indonesia	25001000382302	0,00	0,00
3	Bank Rakyat Indonesia	25001001333306	451.084.989,89	4.247.462.015,45
4	Bank Negara Indonesia	686104497	2.000.000,00	58.004.311,00
5	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan BLUD	-	0,00	0,00
6	Bank SulSelBar BLUD	021.003.000022222.8	27.395.734,00	264.543.621,00
7	Bank SulSelBar Bend Pengeluaran BLUD	021.003.000033333.0	0,00	0,00
8	Bank SulSelBar Bend Penerimaan BLUD	021.003.000011111.6	27.922.200,00	191.768.700,00
9	Kas Tunai Bendahara Pengeluaran BLUD	-	57.222.056,00	11.390.657,00
		Jumlah	**565.624.979,89**	**4.773.169.304,45**

Rekapitulasi saldo Dana BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1b.**

e. Kas Dana Bos

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Tidak terdapat saldo kas yang berasal dari Dana

Bantuan Operasional Sekolah pada akhir Tahun Anggaran 2025, yang berarti seluruh penerimaan BOS telah digunakan sesuai peruntukannya selama tahun berjalan.

f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dana kapitasi yang diterima pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah digunakan sesuai peruntukannya selama Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak terdapat sisa kas yang belum dibelanjakan pada akhir tahun.

g. Kas Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya pada akhir Tahun Anggaran 2025.

h. Setara Kas	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Tidak terdapat investasi jangka pendek yang memenuhi kriteria setara kas pada akhir Tahun Anggaran 2025.

i. Kas Dana Desa	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Dana Desa per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Dana Desa yang diterima telah disalurkan dan digunakan oleh desa sesuai peruntukannya selama Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak terdapat sisa kas Dana Desa yang tercatat di pemerintah daerah pada akhir tahun.

j. Kas Dana BOSP	TA 2025	TA 2024
	Rp561.221.339,73	**Rp285.158.798,73**

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp561.221.339,73. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp285.158.798,73, terjadi kenaikan Rp276.062.541,00 atau 96,81% merupakan saldo Kas dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) Negeri TA 2025 yang dikelola oleh Bendahara Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tingkat Sekolah Dasar Negeri/sederajat se-Kabupaten Takalar sejumlah 234 sekolah, dimana saldo akhir pada Bendahara Dana BOS senilai Rp 300.494.570,73
b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri/sederajat se-Kabupaten Takalar sejumlah 39 sekolah, dimana saldo akhir pada Bendahara Dana BOS senilai Rp260.726.769,00.

Rincian Laporan Penggunaan Dana BOS SD–SDLB Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1c**.

k. Kas Dana BOK Puskesmas	TA 2025	TA 2024
	Rp667.730.099,00	**Rp407.500.347,00**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp667.730.099,00. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp407.500.347,00, terjadi kenaikan Rp260.229.752,00 atau 63,83%. dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 63 Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Puskesmas	2025	2024
1	Bulukunyi	2.200.000,00	1.115.000,00
2	Pattallasang	39.923.500,00	56.200.000,00
3	Polsel	9.188.000,00	1.289.000,00
4	Pattopakang	1.239.060,00	5.083.800,00
5	Sanrobone	60.807.486,00	84.378.000,00
6	Bontomaranmu	3.037.134,00	23.068.588,00
7	Galut	1.000.000,00	800,00
8	Polut	6.365.000,00	4.305.000,00
9	Mappakasunggu	227.785.000,00	13.994.800,00
10	Mangarabombang	0,00	79.000,00
11	Towata	12.050.000,00	80.475.928,00
12	Ko'mara	82.849.719,00	73.850.725,00
13	Galesong	74.820.000,00	152.000,00
14	Aeng Towa	68.328.000,00	21.292.000,00
15	Bontokassi	46.000,00	42.028.106,00
16	Bontomangape	77.739.000,00	4.800,00
17	Kepulauan Tanakeke	352.200,00	182.800,00
18	RSUD Pratama Takalar	0,00	0,00
	Jumlah	**667.730.099,00**	**407.500.347,00**

Rekapitulasi penerimaan Dana FKTP Bulan Januari sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1d.**

l. Kas Otonomi Khusus

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Otonomi Khusus per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Tidak terdapat saldo kas yang berasal dari Dana Otonomi Khusus pada akhir Tahun Anggaran 2025

m. Kas Dana Abadi Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Dana Abadi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat dana abadi daerah yang masih berada dalam bentuk kas pada akhir Tahun Anggaran 2025.

7.5.3.1.1.2. Investasi Jangka Pendek

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Investasi jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.3. Piutang Pajak Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp14.184.206.800,00	**Rp13.518.954.851,0**

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.184.206.800,00. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.518.954.851,00, terjadi kenaikan Rp665.251.949,00 atau 4,92%. Rincian Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pajak Air Bawah Tanah	**41.393.574,00**	29.368.700,00
2	Pajak Hotel	3.160.000,00	3.762.741,00
3	Pajak Restoran/Rumah Makan	519.131.136,00	298.344.702,00
4	Pajak Hiburan	20.676.407,00	19.336.903,00
5	Pajak Reklame	261.585.691,00	245.815.820,00
6	Pajak Penerangan Jalan	1.280.392.746,00	1.242.929.558,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	2.660.000,00	2.660.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	11.939.871.413,00	11.626.728.094,00
9	BPHTB	27.254.833,00	27.254.833,00
10	Pajak Parkir	88.081.000,00	22.753.500,00
	JUMLAH	**14.184.206.800,00**	**13.518.954.851,00**

Perubahan Nomenklatur pajak daerah telah dijelaskan pada calk Laporan Realisasi Pendapatan - Pendapatan Pajak Daerah kode 7.5.1.1.1.1. Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 2.**

Tabel 65 Umur Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	Saldo Piutang (Rp)	Lancar (0-1 Thn) 1%	Perhatian Khusus (>1-2 Thn) 10%	Kurang Lancar (>2-3 Thn) 25%	Diragukan (>3-4 Thn) 50%	Macet (>4 Thn) 100%	Kadaluarsa (≥5 Thn) 100%
Pajak Air Permukaan	41.393.574,00	341.457,00	214.680,00	816.200,00	918.150,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	3.160.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Pajak Restoran/ Rumah Makan	519.131.136,00	3.338.154,00	7.946.592,00	21.387.449,00	0,00	0,00	20.300.000,00
Pajak Hiburan	20.676.407,00	32.335,00	1.488.970,00	0,00	0,00	0,00	2.553.250,00
Pajak Reklame	261.585.691,00	1.044.780,00	6.404.125,00	12.612.891,00	0,00	2.087.500,00	40.527.377,00
Pajak Penerangan Jalan	1.280.392.746,00	12.796.388,00	0,00	71.850,00	10.085,00	406.400,00	40.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam	2.660.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00
PBB-P2	11.939.871.413,00	7.031.466,00	109.689.642,00	169.590.225,00	163.864.367,00	520.351.821,00	8.613.386.979,00
BPHTB	27.254.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.254.833,00
Pajak Parkir	88.081.000,00	880.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14.184.206.800,00**	**25.470.989,00**	**125.744.009,00**	**205.143.615,00**	**164.792.602,00**	**522.845.721,00**	**8.706.662.439,00**

7.5.3.1.1.4. Piutang Retribusi Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp4.348.101.522,00	**Rp3.851.044.052,00**

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.348.101.522,00. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.851.044.052,00, terjadi kenaikan Rp497.057.470,00 atau 12,90%. Rincian Piutang Retribusi pada tabel berikut:

Tabel 66 Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	**Dinas Perhubungan**		
	Piutang Retribusi Menara	88.871.773,00	88.871.773,00

No	Uraian	2025	2024
	Telekomunikasi		
2	**Badan Pendapatan Daerah**		
	Piutang Retribusi Sewa Kios	86.050.000,00	47.800.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	574.130.749,00	448.578.279,00
3	**Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan**		
	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.754.434.000,00	1.445.679.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.494.100.000,00	1.469.600.000,00
4	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		
	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.515.000,00	350.515.000,00
	Jumlah	**4.348.101.522,00**	**3.851.044.052,00**

Rincian Piutang Retribusi pada **Lampiran 3, Lampiran 3a dan Lampiran 3b**.

7.5.3.1.1.5. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan 2024 senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

TA 2025	TA 2024
Rp10.441.609.713,85	**Rp10.705.848.795,57**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp10.441.609.713,85 dan Rp10.705.848.795,57. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan piutang atas klaim pelayanan kesehatan bulan Desember Tahun 2025 pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Sewa BMD Dinas Perikanan dan Denda Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Piutang	Keterangan
1	Klaim Pelayanan BPJS		
	Rawat Jalan	2.122.104.100,00	Desember 2024
	Rawat Inap	3.273.468.100,00	Desember 2024
2	Sewa Lahan Parkir		
	PKS Tahun 2023	20.000.000,00	Juni 2022
	PKS Tahun 2022	20.000.000,00	Mei-Des 23
	PKS Tahun 2022	140.000.000,00	Okt – Des 2024
3	Denda Keterlambatan Pekerjaan	8.010.000,00	Selasar
4	Sewa BMD (Dinas Perikanan)	140.000.000,00	Desember 2024
5	Denda PBB (Bapenda)	4.718.027.513,85	Desember 2024
	Jumlah	**10.441.609.713,85**	

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada **Lampiran 4, Lampiran 4a dan Lampiran 4b**.

7.5.3.1.1.7. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00.

7.5.3.1.1.8. Piutang Transfer Antar Daerah

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp19.078.053.435,00**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar

Rp0,00. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.078.053.435,00, terjadi penurunan Rp19.078.053.435,00 atau 100%. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada **Lampiran 5.**

7.5.3.1.1.9. Piutang Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp801.642.425,83	**Rp226.135.000,00**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp801.642.425,83, mengalami kenaikan dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp226.135.000,00. terjadi kenaikan sebesar Rp575.507.425,83 atau 254,45% selama tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan hak pemerintah daerah atas tagihan kepada pihak ketiga yang belum dilunasi hingga akhir tahun, seperti piutang denda, piutang tuntutan ganti rugi, dan piutang lain-lain yang sah.

Tabel 68 Rincian Piutang Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Saldo Piutang	Piutang Setelah Penyisihan
1	Piutang Dana Denfarm KIPPK	149.691.000,00	0
2	Piutang kepada Pihak Ketiga (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan)	670.000,00	0
3	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	651.281.425,83	651.281.425,83
Jumlah		**801.642.425,83**	**651.281.425,83**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 merupakan piutang Dana Denfarm KIPPK, Piutang kepada Pihak Ketiga pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah penjelasan atas piutang lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Dana Denfarm KIPPK

   Merupakan saldo Piutang kepada 13 kelompok tani untuk pembuatan tanaman percontohan pada KIPPK/Badan Ketahanan Pangan dengan nilai piutang dan penyisihan senilai Rp149.691.000,00 dan saldo setelah penyisihan senilai Rp0,00. Rincian Piutang Dana Denfarm KIPPK dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

2) Piutang kepada Pihak Ketiga

   Merupakan saldo Piutang pengadaan sarana dan prasarana penangkaran benih menuju Desa Mandiri Benih pada UPTD Pertanian Sanrobone yang dilaksanakan oleh CV Fathir Putra Yasfat yang telah dibayar tahun 2025 senilai Rp670.000,00 sehingga saldo piutang sampai dengan tahun 2025 senilai Rp0,00 (Rp670.00,00 – Rp670.000,00). Rincian Piutang kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

3) Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp651.281.425,83 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2025 tersebut merupakan bagian dari Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diperkirakan akan diterima pembayarannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan ke depan

Sisa Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp915.387.355,00 tersebut diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan jangka waktu pelunasannya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp651.281.425,83, yaitu bagian piutang yang jatuh tempo pelunasannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan dan disajikan pada kelompok Aset Lancar di Neraca; dan
2. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Jangka Panjang) sebesar Rp264.105.929,17, yaitu bagian piutang yang jatuh tempo pelunasannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan disajikan pada kelompok Aset Lainnya di Neraca.

7.5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang	TA 2025	TA 2024
	(Rp17.359.544.513,35)	**(Rp16.435.423.436,82)**

Rincian penyisihan piutang pada tabel berikut:

Tabel 69 Rincian Penyisihan Piutang TA 2025

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak	Saldo Piutang	Penyisihan	Piutang Setelah Penyisihan
1	Pajak Hotel	3.160.000,00	2.605.600,00	554.400,00
2	Pajak Restoran/Rumah Makan	519.131.136,00	52.972.195,44	466.158.940,56
3	Pajak Hiburan	20.676.407,00	4.074.554,57	16.601.852,43
4	Pajak Reklame	261.585.691,00	62.676.672,76	198.909.018,24
5	Pajak Penerangan Jalan	1.280.392.746,00	13.324.722,76	1.267.068.023,24
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	2.660.000,00	665.000,00	1.995.000,00
7	PBB - P2	11.939.871.413,00	9.583.914.499,62	2.355.956.913,38
8	BPHTB	27.254.833,00	27.254.833,00	0,00
9	Pajak Parkir	88.081.000,00	880.810,00	87.200.190,00
10	Pajak Air Bawah Tanah	41.393.574,00	2.290.486,74	39.103.087,26
11	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	88.871.773,00	88.871.773,00	0,00
12	Piutang Retribusi Sewa Kios	86.050.000,00	8.545.000,00	77.505.000,00
13	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tenang/ruko)	574.130.749,00	315.821.247,60	258.309.501,40
14	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.754.434.000,00	977.952.975,00	776.481.025,00
15	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (lods dan kios)	1.494.100.000,00	1.080.235.000,00	413.865.000,00
16	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Empang)	350.515.000,00	298.015.000,00	52.500.000,00
17	Klaim BPJS Rawat Jalan	2.122.104.100,00	0,00	2.122.104.100,00
18	Klaim BPJS Rawat Inap	3.273.468.100,00	0,00	3.273.468.100,00
19	Sewa Lahan Parkir Tahun 2023	20.000.000,00	2.000.000,00	18.000.000,00
20	Sewa Lahan Parkir Tahun 2022	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
21	Sewa Lahan Parkir Tahun 2022	140.000.000,00	35.000.000,00	105.000.000,00
22	Denda Keterlambatan Pekerjaan	8.010.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00
23	Sewa BMD (Dinas Perikanan)	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
24	Denda PBB (Bapenda)	4.718.027.513,85	4.503.078.142,86	214.949.370,99
25	Piutang Dana Denfarm KIPPK	149.691.000,00	149.691.000,00	0,00
26	Piutang kepada Pihak Ketiga (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan)	670.000,00	670.000,00	0,00
	Jumlah	**29.124.279.035,85**	**17.359.544.513,35**	**11.764.734.522,50**

a. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2025 diperoleh dari piutang senilai Rp14.184.206.800,00 dengan nilai penyisihan Rp9.750.659.374,89 dan nilai setelah penyisihan Rp4.433.547.425,11 piutang pajak tersebut dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah. Piutang Pajak berasal dari Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, BPHTB, Pajak Parkir, dan Pajak Air Bawah Tanah, Rincian atas piutang pajak beserta penyisihannya per 31 Desember 2025 pada Lampiran 2.
b. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 diperoleh dari piutang retribusi senilai Rp4.348.101.522,00 dengan nilai penyisihan Rp2.769.440.995,60 sehingga nilai piutang retribusi neto menjadi senilai Rp1.578.660.526,40. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi, Piutang Retribusi Sewa Kios, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tenang/ruko lods dan kios Pasar, dan Empang), Piutang Retribusi Pelayanan Pasar, Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 3, Lampiran 3a dan Lampiran 3b.
c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 diperoleh dari piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp10.441.609.713,85 dengan nilai penyisihan Rp4.689.083.142,86 sehingga nilai netto Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp 5.752.526.570,99. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Adalah Klaim Pelayanan BPJS Rawat Jalan dan Rawat Inap, Sewa Lahan Parkir, denda Keterlambatan Pekerjaan, dan denda PBB. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Lampiran 4, Lampiran 4a dan Lampiran 4b.

7.5.3.1.1.11. Belanja Dibayar di Muka

TA 2025	TA 2024
Rp50.993.807,41	**Rp36.962.917,49**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.993.807,41. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.962.917,49, terjadi kenaikan sebesar Rp14.030.889,92 atau 37,96%. Rincian Belanja Dibayar di Muka pada **Lampiran 8.**

7.5.3.1.1.12. Persediaan

TA 2025	TA 2024
Rp33.899.505.803,95	**Rp22.551.686.144,20**

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.899.505.803,95. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.551.686.144,20, terjadi kenaikan Rp11.347.819.659,75 atau 50,32%. Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Takalar dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD per 31 Desember 2025. Rincian persediaan pada **Lampiran 9.**

7.5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

TA 2025	TA 2024
Rp99.454.263.991,71	**Rp95.809.633.010,89**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditujukan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp99.454.263.991,71. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.809.633.010,89, terjadi kenaikan Rp3.644.630.980,82 atau 3,80%

dengan rincian nilai investasi sebagai berikut:

Tabel 70 Saldo Investasi per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Akun	2025	2024
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	99.454.263.991,71	95.809.633.010,89
	Jumlah	**99.454.263.991,71**	**95.809.633.010,89**

7.5.3.1.2.1. Investasi Non Permanen

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang ditujukan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan senilai Rp0,00.

a. Pinjaman Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pinjaman Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Investasi dalam Obligasi

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Investasi dalam Obligasi Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

c. Investasi dalam Proyek Pembangunan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Investasi dalam Proyek Pembangunan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

d. Dana Bergulir

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang ditujukan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 71 Rekapitulasi Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Pokok dan Bunga	Penyisihan	NRV	Saldo di Bank	Nilai
1	**Dinas PPKBPPPA**	697.320.600,00	697.320.600,00	0,00	614.674.422,00	614.674.422,00
	Kukesrata	391.145.600,00	391.145.600,00	0,00	281.399.175,00	281.399.175,00
	PEP2T	306.175.000,00	306.175.000,00	0,00	333.275.247,00	333.275.247,00
2	**Dinas Perikanan**	1.638.926.919,00	1.638.926.919,00	0,00	94.087.408,00	94.087.408,00
3	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**	3.313.958.200,00	3.313.958.200,00	0,00	110.197.222,00	110.197.222,00
	Koperasi dan UMKM	2.835.064.120,00	2.835.064.120,00	0,00	110.076.222,00	110.076.222,00
	Perindag	478.894.080,00	478.894.080,00	0,00	121.000,00	121.000,00

No	Uraian	Nilai Pokok dan Bunga	Penyisihan	NRV	Saldo di Bank	Nilai
4	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	2.366.342.410,00	2.366.342.410,00	0,00	188.186.000,00	188.186.000,00
	Bid.Tanaman Pangan	1.220.834.576,00	1.220.834.576,00	0,00	103.226.000,00	103.226.000,00
	Bid.Peternakan	1.145.507.834,00	1.145.507.834,00	0,00	84.960.000,00	84.960.000,00
	Jumlah	**8.016.548.129,00**	**8.016.548.129,00**	**0,00**	**1.021.824.833,00**	**1.021.824.833,00**

Berdasarkan analisis umur piutang, Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dana Ketahanan Pangan, Dinas PPKBPPPA senilai Rp0,00. Investasi Non Permanen pada 4 SKPD tersebut termasuk dalam kategori macet, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72 Rincian Saldo Dana Kukesrata, PEP2T, Kuperta dan Dana Bergulir di Bank

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Bank	No. Rekening	Nilai
1	Dana KUKESRATA – BKBPP	BRI Cabang Takalar	00000-250-01-000264-30-0	281.399.175,00
2	Dana PEP2T – BKBPP	BNI Cabang Takalar	83192999	333.275.247,00
3	Dana Kuperta - Dinas perikanan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004066-1	93.687.000,00
4	Dana Bergulir – Dinas Perikanan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	002-000004314-8	400.408,00
5	Dana Kuperta – Eks Dinas Koperasi	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-003004216-8	110.076.222,00
6	Dana Kuperta – Eks Dinas Perindag	BNI Cabang Takalar	270869980	121.000,00
7	Dana Kuperta Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004232-0	103.226.000,00
8	Dana Kuperta Dinas Pertanian Bidang Peternakan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004187-1	84.960.000,00
Jumlah				**1.007.145.052,00**
9	Tim Pokjanis Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005506-5	373.669,00
10	Dinas Peternakan/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005624-0	9.049.609,00
11	Dinas Perikanan/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005625-8	469.701,00
12	Dinas Pertanian/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005698-3	4.786.802,00
Jumlah				**14.679.781,00**
Total				**1.021.824.833,00**

7.5.3.1.2.2. Investasi Permanen	TA 2025	TA 2024
	Rp99.454.263.991,71	**Rp95.809.633.010,89**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak ditujukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dicatat berdasarkan harga perolehan (metode biaya) untuk investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% dan dicatat dengan metode ekuitas untuk investasi dengan kepemilikan lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi pemerintah daerah memiliki kendali signifikan atas perusahaan.

a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp99.454.263.991,71. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp95.809.633.010,89, terjadi kenaikan Rp3.644.630.980,82 atau 3,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025

dalam Rupiah)

No.	Nama Bank/BUMD	Nilai Investasi per 31 Desember 2024	Nilai Investasi per 31 Desember 2025	Bertambah/ (berkurang)
1	PT Bank Sulselbar	53.230.000.000,00	53.230.000.000,00	0,00
2	PT BPR GMD	10.061.950.886,23	10.103.869.874,58	41.918.988,35
3	PT BPR Syariah Surya Sejati	1.682.462.254,66	1.705.650.578,13	23.188.323,47
4	Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku	29.387.976.201,00	33.734.458.965,00	4.346.482.764,00
5	PT Butta Panrannuangku (Perseroda)	680.284.574,00	680.284.574,00	0,00
	Total Nilai Investasi	**95.042.673.915,89**	**99.454.263.991,71**	**4.411.590.075,82**

1) PT Bank Sulselbar
   Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada PT Bank Sulselbar adalah Metode Biaya karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Takalar pada Bank Sulselbar hanya 3,00%. Saldo Penyertaan modal per 31 Desember 2025 senilai Rp53.230.000.000,00. Penyertaan Modal Pemda sesuai hasil RUPS tidak mengalami penambahan.
2) PT BPR Gerbang Masa Depan
   Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada PT BPR GMD adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten 98,24% sesuai Laporan Keuangan BPR GMD Galesong Tahun 2025. Berdasarkan hasil perhitungan saldo investasi permanen, kepemilikan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 menjadi Rp10.103.869.874,58 mengalami kenaikan senilai Rp41.918.988,35 dari nilai investasi Tahun 2024 senilai Rp10.061.950.886,24.
3) PT BPR Syariah Surya Sejati
   Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal

Pemerintah Kabupaten Takalar pada PT BPR Syariah Surya Sejati adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten pada PT BPR Syariah Surya Sejati senilai 49,78%. Saldo Penyertaan modal pada PT BPR Syariah Surya Sejati s.d. 31 Desember 2025 senilai Rp1.705.650.578,13, mengalami kenaikan senilai Rp23.188.323,47 dari nilai investasi Tahun 2024 senilai Rp1.682.462.254,66. Penyajian investasi ini tidak didukung oleh audit Kantor Akuntan Publik.

4) Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku
   Metode penilaian investasi yang selama ini digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku senilai 100%. Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Takalar s.d. 31 Desember 2025 pada Perumda Air Minum Tirta Panrannuangku senilai Rp33.734.458.965,00, mengalami kenaikan senilai Rp4.346.482.764,00 dari nilai investasi Tahun 2024 senilai Rp29.387.976.201,00.
5) PT Butta Panrannuangku (Perseroda)
   Pada Tahun 2023 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Panrannuangku menjadi PT Butta Panrannuangku (Perseroda).
   Metode penilaian investasi yang digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Takalar pada PT Butta Panrannuangku (Perseroda) adalah Metode Ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten adalah 100%. Saldo penyertaan modal pada Perusda Panrannuangku s.d. 31 Desember 2025 senilai Rp680.284.574,00, nilai investasi atas penambahan modal tidak mengalami perubahan karena tidak didukung dengan hasil RUPS.

Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

b. Investasi Permanen Lainnya

Saldo Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan senilai Rp0,00.

7.5.3.1.3. ASET TETAP

TA 2025	TA 2024
Rp1.511.368.923.829,98	**Rp1.525.654.009.435,26**

Aset Tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap Neto per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.511.368.923.829,98. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.525.654.009.435,26, terjadi penurunan Rp14.285.085.605,28 atau 0,94% disajikan pada tabel berikut:

Tabel 74 Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	350.201.733.430,50	2.419.527.700,00	669.637.000,00	351.951.624.130,50
2	Peralatan dan Mesin	386.497.976.787,82	44.295.456.093,00	15.049.577.674,12	415.743.855.206,70

No	Uraian	Per 31 Desember 2024	Mutasi		Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan	
3	Gedung dan Bangunan	917.253.877.019,55	49.125.809.922,34	21.442.343.420,96	944.937.343.520,93
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.485.296.369.875,14	25.459.668.555,36	5.571.438.494,06	1.505.184.599.936,44
5	Aset Tetap Lainnya	13.045.865.125,63	113.397.600,00	203.320.000,00	12.955.942.725,63
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.797.762.702,00	3.255.032.388,00	800.948.373,52	8.251.846.716,48
7	Akumulasi Penyusutan	- 1.632.439.575.505,38	- 108.872.391.903,24	- 13.655.679.001,92	- 1.727.656.288.406,70
Jumlah		**1.525.654.009.435,26**	**15.796.500.355,46**	**30.081.585.960,74**	**1.511.368.923.829,98**

Variabel yang memengaruhi Aset Tetap dijelaskan pada masing-masing akun Aset Tetap yang berkenaan dengan deskripsi sebagai berikut:

7.5.3.1.3.1. Tanah

TA 2025	TA 2024
Rp351.951.624.130,50	**Rp350.201.733.430,50**

anah per 31 Desember 2025 sebesar Rp351.951.624.130,50. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp350.201.733.430,50, terjadi kenaikan Rp1.749.890.700,00 atau 0,50%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2024 (LK *Audited*)	**350.201.733.430,50**
Saldo Aset Tetap Tanah 1 Januari 2025	**350.201.733.430,50**
Penambahan:	
Belanja Modal	415.341.000,00
Mutasi Masuk	409.296.000,00
Hasil Inventarisasi/Kurang Catat	1.594.890.700,00
Jumlah Penambahan	**2.419.527.700,00**
Mutasi Keluar	409.296.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tanah ke KDP	62.552.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah Ke Gedung	197.789.000,00
Jumlah Pengeluaran	**669.637.000,00**
Saldo Aset Tetap Tanah 31 Desember 2025	**351.951.624.130,50**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 11a.**

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah, selain bersumber dari realisasi Belanja Modal Tanah, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penyesuaian pencatatan Aset Tetap Tanah yang berasal dari hasil inventarisasi Barang Milik Daerah (aset kurang catat) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp1.594.890.700,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah senilai Rp185.920.000,00 berupa tanah lokasi kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar. Aset tersebut berlokasi di Jalan Ince Husain Dg. Parani dengan luas 1.162 m². Penentuan nilai perolehan didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pencatatan ini dilandasi oleh Berita Acara Inventarisasi Barang Kurang Catat Tanah Nomor 028/1634/Setda tanggal 5 Agustus 2025.
b. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan senilai Rp1.408.970.700,00 berupa 19 (sembilan belas) bidang tanah yang merupakan hasil pengadaan pembebasan tanah periode tahun 2003 sampai dengan 2011 yang sebelumnya belum tercatat secara lengkap dalam Daftar Barang. Pencatatan ini dilandasi oleh Berita Acara tentang Kekurangan Catatan Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor 713/DLHP-SET/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

2. Realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar **Rp62.552.000,00** yang dialokasikan untuk pekerjaan Perencanaan Teknis Penimbunan dan Pekerjaan *Paving Block* Parkiran Kantor Bupati. Namun demikian, sampai dengan akhir periode pelaporan, fisik pekerjaan tersebut belum terealisasi sepenuhnya, sehingga dilakukan penyesuaian pencatatan berupa reklasifikasi dari akun Tanah menjadi akun Konstruksi dalam Pengerjaan. Dasar pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah Kontrak Nomor 31/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dengan penyedia jasa CV Alymar Lestari Konsultan.
3. Realisasi Belanja Modal Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp197.789.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pekerjaan Pembangunan Parkiran Kawasan Wisata Paria Lau senilai Rp98.873.000,00; dan
   b. Pekerjaan Paving Block Kantor Inspektorat senilai Rp98.916.000,00.

Selain penjelasan mengenai mutasi tanah, perlu disampaikan pula bahwa terdapat permasalahan terkait aset tanah yang diklaim oleh pihak ketiga serta aset tanah yang masih dalam proses sengketa, dengan rincian sebagai berikut.

1. Tanah yang Diklaim oleh Pihak Ketiga
   Terdapat 10 (sepuluh) bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar yang masih diklaim oleh pihak ketiga. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) bidang tanah telah bersertifikat, sedangkan 9 (sembilan) bidang tanah lainnya belum bersertifikat. Rincian selengkapnya tercantum pada **Lampiran 11b.**
2. Tanah yang Masih dalam Sengketa
   Terdapat beberapa bidang tanah yang saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Tanah Empang Dengkang Berlokasi di Kampung Je'ne, Dusun Lau, Desa Laguruda, Kecamatan Sanrobone. Perkara ini terdaftar dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2023/PN.Tka. Kondisi terakhir: perkara sedang dalam proses pemeriksaan pada tingkat kasasi.
   b. Tanah SD Negeri No. 94 Berlokasi di Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara. Perkara ini terdaftar dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2025/PN.Tka. Kondisi terakhir: perkara masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, dengan pihak Penggugat atas nama Amr.

c. Tanah Puskesmas Pembantu (Pustu) Bontomanai dan TK Al-Badar Berlokasi di Desa Bontomanai. Perkara ini terdaftar dengan Nomor Perkara 34/Pdt.G/2025/PN.Tks. Kondisi terakhir: perkara masih dalam proses persidangan dan telah terdapat putusan sela yang dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.

Hingga 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Takalar mencatat total keseluruhan aset tanah sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) bidang dengan luas keseluruhan 7.532.875,92 m² dan nilai perolehan sebesar Rp380.061.903.630,50. Aset tanah tersebut terdiri atas tanah yang terklasifikasi sebagai Aset Tetap, Aset Lain-lain, dan Investasi Properti, yang masing-masing memiliki status sertifikasi berbeda sebagaimana diuraikan berikut:

1. Aset Tetap Tanah
   Total aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Takalar berjumlah 1.086 (seribu delapan puluh enam) bidang dengan luas 5.898.136,92 m² dan nilai perolehan sebesar Rp351.951.624.130,50. Dari jumlah tersebut, sebanyak 352 bidang (luas 1.903.629,00 m², nilai Rp175.743.549.477,17) telah bersertifikat, sedangkan 734 bidang (luas 3.994.507,92 m², nilai Rp176.208.074.653,33) belum bersertifikat dan masih memerlukan proses pensertifikatan guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikannya.
2. Aset Lain-Lain Tanah
   Total aset lain-lain berupa tanah berjumlah 53 (lima puluh tiga) bidang dengan luas 58.516,00 m² dan nilai perolehan sebesar Rp1.466.204.000,00. Seluruh bidang tanah pada kelompok ini telah bersertifikat.
3. Investasi Properti Tanah
   Total tanah yang terklasifikasi sebagai Investasi Properti berjumlah 33 (tiga puluh tiga) bidang dengan luas 1.576.223,00 m² dan nilai perolehan sebesar Rp26.644.075.500,00. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 bidang (luas 918.550,00 m², nilai Rp20.086.619.500,00) telah bersertifikat, sedangkan 8 bidang (luas 657.673,00 m², nilai Rp6.557.456.000,00) masih belum bersertifikat.

Secara keseluruhan, dari total 1.172 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar, sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) bidang dengan luas 2.880.695,00 m² dan nilai perolehan sebesar Rp197.296.372.977,17 telah bersertifikat. Angka tersebut merupakan gabungan dari Aset Tetap Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 352 bidang, Aset Lain-Lain Tanah sebanyak 53 bidang, dan Investasi Properti Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 25 bidang.

Sementara itu, sebanyak 742 (tujuh ratus empat puluh dua) bidang dengan luas 4.652.180,92 m² dan nilai perolehan sebesar Rp182.765.530.653,33 masih belum memiliki sertifikat. Angka tersebut merupakan gabungan dari Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 734 bidang dan Investasi Properti Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 8 bidang. Adapun seluruh Aset Lain-Lain Tanah sebanyak 53 bidang telah bersertifikat seluruhnya sehingga tidak terdapat dalam kelompok belum bersertifikat.

Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 63,31% dari total bidang tanah Pemerintah Kabupaten Takalar masih belum bersertifikat, sehingga percepatan proses pensertifikatan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar perlu terus diupayakan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas seluruh aset tanah daerah

Untuk Persertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Takalar per SKPD

pada **Lampiran 12.**

7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

TA 2025	TA 2024
Rp415.743.855.206,70	**Rp386.497.976.787,82**

Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp415.743.855.206,70. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp386.497.976.787,82, terjadi kenaikan Rp29.245.878.418,88 atau 7,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 (LK *Audited*)	**386.497.976.787,82**
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 1 Januari 2025	**386.497.976.787,82**
Penambahan:	
Belanja Modal	24.610.634.185,00
Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00
BOP Kesetaraan / Paud Negeri	27.058.000,00
Mutasi Masuk	4.825.621.872,00
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Peralatan	17.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lain Lain Ke Aset Tetap	15.601.000,00
Hasil Inventarisasi/Kurang Catat	5.300.673.336,00
Bantuan	9.230.866.900,00
Hibah Masuk	113.300.800,00
Jumlah Penambahan	**44.201.356.093,00**
Pengurangan:	
Mutasi Keluar	4.825.621.872,00
Reklasifikasi ke aset lainnya (Rusak Berat)	2.212.777.627,12
Extracomtable Belanja Modal	91.522.632,00
Extracomtable Dana BOS/JKN	164.401.765,00
Kriteria Beban Jasa	910.000,00
Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	2.537.596.367,00
Penghapusan Karena Penjualan	5.122.647.411,00
Jumlah Pengeluaran	**14.955.477.674,12**
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025	**415.743.855.206,70**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per SKPD pada **Lampiran 13**.

Penambahan dan pengurangan aset berupa peralatan dan mesin, selain yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor berikut:

1. penyesuaian pencatatan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp60.600.000,00 yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Barang tersebut telah diakui sebagai Aset Tetap dan dicatat dalam Daftar Barang Pengguna. Rincian penyesuaian pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.500.000,00, berupa pengadaan perangkat Closed Circuit Television (CCTV). Belanja ini bersumber dari kode rekening 5.1.02.01.01.0031 (Belanja Alat/Bahan

untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik) berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor: EP-01KBXR80C8QQYTCSJ6KTBCR251 tanggal 8 Desember 2025.

b. Inspektorat sebesar Rp56.100.000,00, berupa pengadaan lemari arsip 5 tin`gkat sebanyak 13 unit. Belanja ini bersumber dari kode rekening 5.1.02.01.04.0118 (Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor) berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor: 19/PPK-ITDA/SP/XII/2025 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 20/PPK-ITDA/SPK/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

2. Perolehan Aset Tetap yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan dan PAUD Reguler pada satuan pendidikan negeri dengan nilai total sebesar Rp27.058.000,00. Rincian perolehan aset tersebut adalah sebagai berikut:
   a. TK Negeri Pertiwi Pemwilda: Perolehan LCD Proyektor senilai Rp2.508.000,00.
   b. UPT Sanggar Kegiatan Belajar: Perolehan Layar LCD, Meja Kerja, dan Laptop senilai Rp15.000.000,00.
   c. TK Negeri Dharma Wanita Mangarabombang: Perolehan Laptop senilai Rp9.550.000,00.
3. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pengadaan aset senilai Rp17.000.000,00 untuk pekerjaan Pembuatan Bench Lapangan Sepak Bola dalam rangka kegiatan Sepak Bola PRA PORPROV Tahun 2025. Pengadaan ini dilaksanakan oleh penyedia CV. Lira Putra Sejahtera dan semula dibebankan pada kode rekening 5.2.03.01.01.0011 (Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga). Namun, berdasarkan bentuk fisik dan fungsinya, aset tersebut tergolong dalam kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pencatatan berupa reklasifikasi dari akun Gedung dan Bangunan menjadi akun Peralatan dan Mesin.
4. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dilakukan penyesuaian pencatatan berupa reklasifikasi aset senilai Rp15.601.000,00. Aset tersebut sebelumnya tercatat dengan status kondisi rusak berat pada kelompok Aset Lainnya, namun berdasarkan verifikasi fisik terkini telah dapat dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, aset berupa sepeda motor tersebut direklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan kondisi fisik yang sebenarnya.
5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari hasil inventarisasi Barang Milik Daerah (aset kurang catat) dengan nilai total sebesar Rp5.300.673.336,00. Rincian penyesuaian pencatatan tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Dinas Kesehatan sebesar Rp141.048.336,00, berupa perolehan Hibah tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya belum tercatat dalam Daftar Barang. Pencatatan ini dilandasi oleh Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: KN.02.07/V.4/ /2022.
   b. Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg Ngalle sebesar Rp198.980.000,00, yang terdiri dari:
      - 1 (satu) unit Mobil Ambulans senilai Rp87.000.000,00, diperoleh pada tahun 2016 yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sulselbar Cabang Takalar. Serah terima

aset dimaksud dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: /BAST-CSR.BSSB/IV/2016 tanggal 25 April 2016; dan

- 20 (dua puluh) unit Personal Computer (PC) senilai Rp111.980.000,00, diperoleh melalui mekanisme Bantuan Operasional berdasarkan Surat Persetujuan Bantuan Operasional RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Nomor: SR/237/R/DJS/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar mencatat adanya aset berupa perangkat pembelajaran yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan total nilai sebesar Rp4.960.645.000,00. Aset dimaksud berupa 840 (delapan ratus empat puluh) unit perangkat pembelajaran yang terdiri atas Chromebook (Laptop), Router, dan Proyektor, yang telah didistribusikan kepada 56 (lima puluh enam) sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dengan alokasi masing-masing sebanyak 15 (lima belas) unit per sekolah. Perangkat pembelajaran tersebut diterima dalam rentang periode tahun 2020 sampai dengan 2022.

  Namun demikian, perlu disampaikan bahwa hingga saat pemeriksaan dilakukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaksanakan inventarisasi secara menyeluruh atas perangkat dimaksud. Kondisi tersebut mengakibatkan keberadaan dan kondisi fisik aset tidak dapat ditelusuri dan diyakini kewajarannya secara memadai, serta berpotensi menyebabkan aset dimaksud tercatat kurang saji dalam laporan keuangan daerah. Rincian selengkapnya mengenai kurang catat Peralatan dan Mesin dimaksud dapat dilihat pada Lampiran **14.**

6. Terdapat perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat dengan nilai total sebesar Rp9.230.866.900,00. Rincian perolehan aset tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai Rp9.145.536.000,00, yang terdiri dari:
      - 276 unit Laptop senilai Rp1.792.896.000,00; dan
      - 276 unit Papan Interaktif Digital senilai Rp7.352.640.000,00.

      Dasar hukum: Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8622/C/DM.00.03/2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3989/C/DM.00.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025.
   b. Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan senilai Rp85.330.900,00 berupa Peralatan dan Mesin pada satuan pendidikan berikut:
      - UPT SD Negeri 155 Inpres Rajaya;
      - UPT SD Negeri 20 Tana-Tana;
      - UPT SD Negeri Inpres 162 Kampung Beru;
      - UPT SDN 129 Inpres Bontoloe; dan
      - UPT SMP Negeri 4 Mappakasunggu.

Rincian Penambahan dari Bantuan Pemerintah Pusat 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 15**

7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar mencatat penambahan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang bersumber dari hibah dengan nilai sebesar Rp113.300.800,00. Aset dimaksud berasal dari hibah yang diberikan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan berupa Perangkat Komputer (PC) dan Web Camera.
   Pencatatan aset hibah dimaksud dilandasi oleh:
   a. Naskah Perjanjian Hibah Nomor: B-1343/PL.130/H.12.22/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025; dan
   b. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Nomor: B-1342/PL.130/H.12.22/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

   Seluruh aset hibah tersebut telah dicatat dan dibukukan sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku.
8. Pengadaan barang dengan total nilai senilai Rp91.522.632,00 yang bersumber dari realisasi Belanja Modal. Namun demikian, barang-barang tersebut tidak memenuhi ambang batas kapitalisasi (*capitalization threshol*d) sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Takalar, sehingga tidak diklasifikasikan sebagai Aset Tetap, melainkan dicatat sebagai Beban pada Laporan Operasional.
9. Terdapat realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.537.596.367,00 yang dialokasikan untuk pelunasan utang belanja modal atas perolehan aset tetap yang telah dicatat dan diakui sebagai aset pada tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian, realisasi belanja dimaksud tidak mengakibatkan penambahan nilai aset tetap pada Neraca periode berjalan, melainkan semata-mata merupakan penyelesaian kewajiban (pelunasan utang) atas perolehan aset yang telah dikapitalisasi pada periode sebelumnya. Pencatatan atas transaksi ini dilakukan dengan mengurangi saldo utang belanja modal yang tercatat pada Neraca.
10. Pada Tahun 2025, terdapat pengurangan Aset Tetap Kendaraan Bermotor sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan nilai penghapusan sebesar Rp5.122.647.411,00. Pengurangan dimaksud dilakukan melalui mekanisme pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, yang terdiri atas dua mekanisme sebagai berikut:
    a. Penjualan Tanpa Lelang sebanyak 2 (dua) unit kendaraan kepada Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD) dengan nilai perolehan sebesar Rp844.724.513,00. Penjualan ini didasarkan pada Laporan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor: S-5155/KNL.1502/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Takalar Nomor 298 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.
    b. Penjualan Melalui Lelang Sebanyak 22 (dua puluh dua) unit kendaraan dinas lainnya dijual melalui mekanisme lelang dengan nilai perolehan sebesar Rp4.277.922.898,00. Penjualan melalui lelang dimaksud didasarkan pada Surat Persetujuan Penjualan Nomor: 00.2.3/970/Setda tanggal 13 Maret 2025 dan Risalah Lelang Nomor: 341/15.02/2025-01, serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Takalar Nomor 342 Tahun

2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar Berupa Kendaraan Dinas Jabatan.

Selain permasalahan penghapusan aset, perlu disampaikan pula bahwa tidak seluruh Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Takalar dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan operasional pemerintahan daerah. Terdapat beberapa unit kendaraan dinas yang saat ini digunakan dengan status pinjam pakai oleh instansi vertikal. Rincian selengkapnya mengenai kendaraan dinas yang dipinjampakaikan kepada instansi vertikal dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

Dalam pengelolaan aset kendaraan dinas, terdapat permasalahan berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Takalar yang saat ini masih dikuasai oleh pihak lain. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 3 (tiga) unit kendaraan dinas berupa sepeda motor dengan total nilai perolehan sebesar Rp29.150.000,00 yang hingga tanggal pelaporan masih berada dalam penguasaan pihak lain dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar. Adapun rincian kendaraan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER Tahun Pembelian 2003, dengan Nomor Rangka MH34ST1053K234424, Nomor Mesin 4ST-568403, Nomor Polisi DD 3091 C, senilai Rp7.100.000,00, tercatat pada Unit Kerja Kecamatan Polongbangkeng Utara, saat ini masih dikuasai oleh pihak lain.
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Titan 113 Tahun Pembelian 2012, dengan Nomor Rangka MH8BE4DUACJ-320139, Nomor Mesin E470-ID-351556, Nomor Polisi DD 4630 C, senilai Rp14.950.000,00, tercatat pada Unit Kerja Dinas Kesehatan, saat ini masih dikuasai oleh pihak lain.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER Tahun Pembelian 2003, dengan Nomor Rangka MH34ST1053K234362, Nomor Mesin 4ST-568547, Nomor Polisi DD 3072 C, senilai Rp7.100.000,00, tercatat pada Unit Kerja Kecamatan Polongbangkeng Utara, saat ini masih dikuasai oleh pihak lain.

Terhadap kendaraan-kendaraan dinas tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar terus berupaya melakukan penagihan dan penarikan kembali aset dimaksud dari pihak-pihak yang menguasainya, guna mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

TA 2025	TA 2024
Rp944.937.343.520,93	**Rp917.253.877.019,55**

Gedung & Bangunan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp944.937.343.520,93. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp917.253.877.019,55, terjadi kenaikan Rp27.683.466.501,38 atau 3,02%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 77 Tabel Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2024 (LK *Audited*)	917.253.877.019,55
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1 Januari 2025	917.253.877.019,55
Penambahan:	
Belanja Modal	17.152.877.619,00
Belanja Barang dan Jasa	3.070.108.622,00
Mutasi Masuk	19.302.936.329,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah Ke Gedung	197.789.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Bangunan	781.381.224,00

Uraian	Nilai
Reklasifikasi dari Extracomtable ke aset tetap	29.175.000,00
Reklasifikasi Bertambah dari KDP ke Aset Definitifnya	704.545.760,00
Koreksi Bertambah Atribusi Ke Induk	559.476.999,68
Hasil Inventarisasi/Kurang Catat	480.000.000,00
Bantuan	6.847.519.368,66
Jumlah Penambahan	**49.125.809.922,34**
Pengurangan:	
Mutasi Keluar	19.302.936.329,00
Reklasifikasi ke aset lainnya (Rusak Berat)	46.656.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan/JIJ ke /Tanah ke KDP	50.620.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Bangunan	17.000.000,00
Extracomtable Belanja Modal	163.279.266,66
Beban Pemeliharaan	67.695.180,00
Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	721.093.837,00
Koreksi Berkurang Atribusi Ke Induk	559.476.999,68
Koreksi Kekurangan Volume	513.585.808,62
Jumlah Pengurangan	**21.442.343.420,96**
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025	**944.937.343.520,93**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD pada **Lampiran 17.**

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selain yang bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan, disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari penyesuaian pencatatan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.070.108.622,00 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah
      Penambahan pada Sekretariat Daerah senilai Rp1.300.810.010,00 berupa Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Takalar Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor 005/SP.e-Purchasing/Setda/III/2025.
   b. Sekretariat DPRD
      Penambahan pada Sekretartiat DPRD senilai Rp1.769.298.612,00, merupakan gabungan dari 8 (delapan) item pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pekerjaan Interior dan Pemeliharaan Ruangan Wakil Ketua DPRD senilai Rp168.987.100,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 009/PPK-SEKWAN/SPK/XII/2025 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 26/BAST/SET.DPRD/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025;
      2) Pekerjaan Interior dan Pemeliharaan Ruangan Ketua DPRD senilai Rp365.679.800,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 43/BAST/SET.DPRD/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025;
      3) Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Tidak Bertingkat senilai Rp146.280.674,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003/SPK/PPK-SETDPRD/DAU/X/2025 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor

20/BAP/SET.DPRD/XI/2025 tanggal 19 November 2025;

4) Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor senilai Rp148.646.886,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 015/SPK/PPK-SETDPRD/DAU/X/2025 dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 15/BAP/SET.DPRD/XI/2025 tanggal 18 November 2025;
5) Pekerjaan Interior dan Pemeliharaan Ruangan Komisi I, II, dan III senilai Rp313.381.800,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 42/BAST/SET.DPRD/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025;
6) Pekerjaan Musyalla senilai Rp361.288.878,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 19/BAST/SET.DPRD/XI/2025;
7) Pekerjaan Taman/Halaman Rumah Jabatan DPRD senilai Rp55.714.374,00 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 17/BAP/SET.DPRD/XI/2025; dan
8) Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD senilai Rp209.319.100,00 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 14/BAP/SET.DPRD/X/2025 tanggal 13 November 2025.

2. Terdapat Penyesuaian pencatatan atas realisasi Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp781.381.224,00 berupa pekerjaan paving block pada satuan pendidikan. Pengadaan tersebut semula dibebankan pada pos Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Namun demikian, berdasarkan karakteristik dan lokasi pekerjaan yang merupakan bagian integral dari sarana dan prasarana satuan pendidikan (halaman sekolah) serta melekat secara permanen pada bangunan sekolah, aset dimaksud tergolong dalam kelompok Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pencatatan berupa reklasifikasi dari akun Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi akun Gedung dan Bangunan.
3. Terdapat Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp704.545.760,00 yang merupakan hasil penyelesaian pekerjaan Ruang Studio Kantor Bupati. Aset tersebut sebelumnya tercatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan konstruksi 100% (seratus persen) dan aset telah siap digunakan, dilakukan reklasifikasi pencatatan dari akun Konstruksi dalam Pengerjaan menjadi akun Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Reklasifikasi tersebut dilandasi oleh Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 02/BASTP/DPUTRPKP-CK/I/2025 tanggal 6 Januari 2025.
4. Terdapat Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah senilai Rp480.000.000,00 yang merupakan hasil inventarisasi atas bangunan kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dan sebelumnya belum tercatat dalam Daftar Barang (kurang catat). Pencatatan ini dilandasi oleh Berita Acara Inventarisasi Barang Kurang Catat Tanah Nomor 028/1634/Setda tanggal 5 Agustus 2025.
5. Terdapat Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp6.847.519.368,66 yang bersumber dari pelaksanaan program Revitalisasi Sekolah berdasarkan Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan. Rincian atas bantuan dimaksud disajikan pada **Lampiran 18**.

6. Terdapat Reklasifikasi aset dari akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp50.620.000,00. Penyesuaian ini dilakukan karena pekerjaan perencanaan terkait belum dapat diselesaikan secara fisik pada periode berjalan, sehingga belum memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp30.000.000,00 berupa pekerjaan Perencanaan Pembangunan Kantor Camat Tanakeke. Atas pekerjaan tersebut belum terdapat realisasi fisik pada periode berjalan, sehingga dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp20.620.000,00, yang terdiri atas:
      1) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Panggung Seni Museum Daerah Balla Appaka Sulapa senilai Rp3.900.000,00; dan
      2) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sekretariat Museum Daerah Balla Appaka Sulapa senilai Rp16.720.000,00.
7. Terdapat Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp67.695.180,00. Berdasarkan hasil verifikasi fisik dan administrasi, kegiatan tersebut merupakan pekerjaan pemeliharaan yang tidak menambah nilai aset secara signifikan dan tidak memperpanjang masa manfaat aset, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai Aset Tetap. Atas belanja dimaksud tetap diakui sebagai realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), namun tidak dicatat sebagai penambahan nilai aset pada Neraca. Rincian realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan senilai Rp49.860.000,00; dan
   b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp17.835.180,00.
8. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp163.279.266,66 yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Takalar, karena nilai perolehan aset tersebut tidak melebihi ambang batas kapitalisasi (*capitalization threshold*). Rincian atas realisasi belanja dimaksud disajikan pada **Lampiran 19**.
9. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp721.093.837,00 yang dialokasikan untuk pelunasan utang belanja modal atas perolehan Aset Tetap yang telah diakui dan dicatat sebagai aset pada tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian, realisasi belanja tersebut tidak mengakibatkan penambahan nilai Aset Tetap pada Neraca periode berjalan, melainkan merupakan penyelesaian kewajiban atas perolehan aset yang telah dikapitalisasi pada periode sebelumnya.
   Rincian realisasi Belanja Modal dimaksud disajikan pada **Lampiran 20.**
10. Terdapat koreksi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan nilai keseluruhan sebesar Rp513.585.808,62. Koreksi tersebut merupakan penyesuaian pencatatan

nilai aset sesuai dengan hasil pengukuran fisik di lapangan, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 78 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap atas Kekurangan Volume Pekerjaan

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Koreksi
1	Dinas PUTRPKP	Pekerjaan Atap, Plafon, dan Pengecatan Kantor Bupati (Lanjutan)	20.044.219,30
2	Dinas PUTRPKP	Pekerjaan Lanjutan Ruang Studio Kantor Bupati	10.045.574,72
3	Dinas PUTRPKP	Pekerjaan Interior Kantor Bupati	11.970.947,44
4	Dinas PUTRPKP	Pekerjaan Gerbang Perbatasan Takalar–Gowa	56.418.670,00
5	Dinas PUTRPKP	Rehabilitasi Kantor Camat Pattallassang	44.136.121,58
6	Dinas PUTRPKP	Pembangunan Gerbang Kawasan Wisata Paria Lau	2.113.125,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan Rehabilitasi SDN 139 Benteng Sanrobone	6.120.301,60
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 234 Inpres Takalar Kota	4.754.736,27
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Ruang Kelas UPT SMP Negeri 5 Takalar	7.824.051,93
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPT SMP Negeri 2 Takalar	10.713.852,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana UPT SMP Negeri 1 Polut	2.131.805,58
12	DPPKBPPPA	Pekerjaan Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB (DAK)	17.223.859,73
13	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Musyalla	9.499.249,53
14	Sekretariat DPRD	Pekerjaan Interior dan Pemeliharaan Ruangan Komisi I, II, dan III Sekretariat DPRD	90.824.373,67
15	Sekretariat DPRD	Pekerjaan Interior dan Pemeliharaan Ruangan Ketua DPRD dan Toilet Sekretariat DPRD	69.399.203,88
16	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor (Ruang Wakil Ketua I)	27.732.823,82
17	Sekretariat DPRD	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor (Ruang Wakil Ketua II)	41.511.628,44
18	Sekretariat Daerah	Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati	81.121.264,13
Total			**513.585.808,62**

Nilai koreksi sebagaimana tersebut di atas telah disesuaikan pada pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Neraca Pemerintah Kabupaten Takalar.

7.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

TA 2025	TA 2024
Rp1.505.184.599.936,44	**Rp1.485.296.369.875,14**

Jalan, Irigasi & Jaringan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.505.184.599.936,44. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.485.296.369.875,14, terjadi kenaikan Rp19.888.230.061,30 atau 1,34% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2024 (LK *Audited*)	**1.485.296.369.875,14**
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 1 Januari 2025	**1.485.296.369.875,14**
Penambahan:	

Uraian	Nilai
Belanja Modal	21.930.774.355,36
Belanja Barang dan Jasa	3.528.894.200,00
Jumlah Penambahan	**25.459.668.555,36**
Pengurangan:	
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke KDP	517.778.190,00
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Bangunan	781.381.224,00
Extracomtable Belanja Modal	2.080.270.790,36
Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	1.934.200.055,00
Koreksi Volume	257.808.234,70
Jumlah Pengeluaran	**5.571.438.494,06**
Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2025	**1.505.184.599.936,44**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD pada **Lampiran 21** Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan selain yang bersumber dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, juga diantaranya disebabkan adanya beberapa hal antara lain:

1. Terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp517.778.190,00. Namun demikian, berdasarkan monitoring kondisi fisik di lapangan, pekerjaan tersebut belum selesai 100% (seratus persen) pada akhir tahun anggaran sehingga belum memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai Aset Tetap. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian pencatatan berupa reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Realisasi tersebut terdiri atas pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp511.178.190,00 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.600.000,00
   Rincian Reklasifikasi ke KDP dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 22**.
2. Penyesuaian pencatatan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp3.528.894.200,00**. Atas pekerjaan-pekerjaan dimaksud telah diakui sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dan dicatat dalam Daftar Barang Pengguna, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Bontoloe (Sapanjang) senilai Rp1.525.289.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 317/SP/PPK/DPUTRPKP/XI/2025 tanggal 14 November 2025;
   b. Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ruas Laikang–Salambu (Punaga) senilai Rp489.091.200,00 berdasarkan Kontrak Nomor 317/SP/PPK/DPUTRPKP/XI/2025 tanggal 14 November 2025;
   c. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Bontolebang–Soreang senilai Rp457.335.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 305/SP/PPK/DPUTRPKP/XI/2025 tanggal 10 November 2025;
   d. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Sawakong (Dg. Ngilau) senilai Rp397.518.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 253/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025;
   e. Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Balangtanaya senilai Rp494.514.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 273/SP/PPK/DPUTRPKP/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025; dan

f. Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan Ruas Maradekaya–Lantang dan Ruas Cikoang–Puntondo senilai Rp165.147.000,00 berdasarkan Kontrak Nomor 163/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp781.381.224,00 yang direklasifikasi menjadi aset Gedung dan Bangunan berupa pekerjaan paving blok. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan penelaahan teknis yang menyatakan bahwa karakteristik aset tersebut lebih sesuai dengan kriteria Gedung dan Bangunan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Takalar. Rincian atas aset yang direklasifikasi dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 23.**
4. Tercatat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.080.270.790,36. Namun demikian, berdasarkan evaluasi terhadap kriteria pengakuan aset, belanja tersebut tidak memenuhi ambang batas kapitalisasi sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, belanja tersebut diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional dan tidak dicatat sebagai penambahan Aset Tetap pada Neraca, meskipun telah dianggarkan sebagai Belanja Modal dalam APBD.
   Rincian realisasi belanja modal dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 24.**
5. Terdapat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.934.200.055,00. Realisasi belanja tersebut merupakan penyelesaian kewajiban (pelunasan utang) atas perolehan aset yang telah diakui dan dicatat sebagai Aset Tetap pada tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu, realisasi belanja ini tidak mengakibatkan penambahan nilai perolehan Aset Tetap pada Neraca periode berjalan, melainkan merupakan pencatatan realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk penyelesaian kewajiban atas aset yang telah dikapitalisasi sebelumnya.
   Rincian realisasi belanja modal tersebut berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut:
   Rincian realisasi pelunasan utang dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 25.**
6. Terdapat koreksi nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2025 dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp257.808.234,70**. Koreksi tersebut merupakan penyesuaian pencatatan nilai 190able sesuai dengan hasil pengukuran fisik di lapangan, dengan rincian sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Kekurangan Volume Pekerjaan

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Koreksi (Rp)
1	Pekerjaan Perbaikan Tanggul Sungai Maudu Lompoa	903.612,50
2	Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Rajaya	2.690.423,18
3	Pekerjaan Talud Sirtu Desa Parangmata	3.422.327,60
4	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Bontokadatto	3.646.381,68
5	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Nelayan Dusun Bontoa Desa Popo	9.498.460,08
6	Pekerjaan Trotoar Jalan Poros Kota Takalar (Lanjutan)	10.414.686,00

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nilai Koreksi (Rp)
7	Pekerjaan *Paving Block* Desa Kalenna	38.679.078,15
8	Pekerjaan Pemeliharaan Bahu Jalan Ruas Pattallassang–Garassi	11.343.121,78
9	Pekerjaan Jalan Beton Cikoang–Ongkoa	98.401.475,03
10	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Laikang–Salambu (Punaga)	12.138.365,27
11	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Bontolebang–Soreang	59.497.503,75
12	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Sawakong	3.594.225,00
13	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Balangtanaya	2.114.250,00
14	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan Ruas Maradekaya–Lantang dan Ruas Cikoang–Puntondo	1.464.324,68
	Total	**257.808.234,70**

Nilai koreksi sebagaimana tersebut di atas telah disesuaikan pada pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca Pemerintah Kabupaten Takalar.

7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp12.955.942.725,63	**Rp13.045.865.125,63**

Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.955.942.725,63. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.045.865.125,63, terjadi penurunan Rp89.922.400,00 atau 0,69%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 81 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Lainnya 1 Januari 2025	**13.045.865.125,63**
Penambahan:	
Belanja Modal	113.397.600,00
Jumlah Penambahan	**113.397.600,00**
Pengurangan:	
Reklasifikasi ke aset lainnya (Hewan Mati)	203.320.000,00
Jumlah Pengeluaran	**203.320.000,00**
Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	**12.955.942.725,63**

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana disajikan pada **Lampiran 26**, selain bersumber dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, juga dipengaruhi oleh reklasifikasi aset pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dari akun Aset Tetap Lainnya menjadi akun Aset Lain-Lain berupa ternak sapi yang telah mati sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan nilai perolehan sebesar Rp203.320.000,00. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena aset dimaksud tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan telah diusulkan untuk dihapuskan.

Reklasifikasi ini merupakan tindak lanjut administratif sementara dalam rangka proses penghapusan Barang Milik Daerah, yang dilandasi oleh:

1. Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sapi karena Mati Nomor 524/511/DPKH/XI/2025 tanggal 28 November 2025; dan
2. Berita Acara Inventarisasi Barang Nomor 524/510/BA/DPKH/XI/2025 tanggal

28 November 2025.

Dalam kelompok Aset Tetap Lainnya, terdapat aset berupa hewan ternak sapi yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Takalar dan tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar. Hewan ternak dimaksud tidak dikelola secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, melainkan diserahkan kepada masyarakat peternak untuk dipelihara melalui mekanisme kerja sama yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (MOU) Pemeliharaan Sapi. Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menjalin kerja sama pemeliharaan hewan ternak sapi dengan pihak pemelihara (masyarakat), di mana Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar bertindak selaku Pihak Pertama, sedangkan masyarakat pemelihara bertindak selaku Pihak Kedua.

Adapun pokok-pokok ketentuan dalam perjanjian kerja sama dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Status Kepemilikan Aset. Hewan ternak yang menjadi objek pemeliharaan sepenuhnya merupakan milik Pemerintah Kabupaten Takalar selaku Pihak Pertama dan tetap dicatat sebagai aset daerah selama masa perjanjian berlangsung.
2. Kewajiban Pihak Pemelihara. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pemeliharaan yang meliputi kandang beserta perlengkapannya dan lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT), serta bertanggung jawab atas kelayakan dan kebersihan sarana prasarana dimaksud.
3. Penanganan Hewan Sakit. Apabila hewan ternak dalam kondisi sakit, Pihak Kedua wajib segera melaporkan kepada Pihak Pertama. Biaya pengobatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
4. Penanganan Kehilangan Hewan. Apabila terjadi kehilangan hewan ternak, Pihak Kedua wajib melaporkan kepada Pihak Pertama paling lambat 1 x 24 jam sejak kejadian dengan disertai surat keterangan kehilangan dari pemerintah setempat. Apabila kehilangan terbukti disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban mengganti hewan yang hilang sesuai kriteria hewan yang diperjanjikan. Pihak Pertama berhak memutuskan kerja sama sewaktu-waktu apabila Pihak Kedua tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan penggantian.
5. Penanganan Kematian Hewan. Apabila hewan ternak mati karena sebab apapun, Pihak Kedua wajib melaporkan kematiannya kepada Pihak Pertama paling lambat 1 x 24 jam sejak kejadian dengan disertai bukti berupa foto dan/atau video. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyertakan bukti atas kematian hewan dimaksud, maka Pihak Kedua berkewajiban mengganti hewan tersebut sesuai kriteria yang diperjanjikan. Dengan adanya kematian hewan, jumlah hewan yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua berkurang secara otomatis hingga perjanjian berakhir.
6. Klausul Ganti Rugi. Tidak terdapat tuntutan ganti rugi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atas kematian hewan ternak, dan sebaliknya tidak terdapat tuntutan ganti rugi dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
7. Bagi Hasil Anakan. Seluruh anakan yang lahir selama masa perjanjian berlangsung dihibahkan kepada Pihak Kedua sebagai kompensasi atas jasa pemeliharaan yang telah dilakukan.

Skema kerja sama pemeliharaan hewan ternak ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah berupa hewan ternak melalui pelibatan masyarakat peternak sebagai mitra

pemelihara, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Takalar. Seluruh hewan ternak yang menjadi objek perjanjian dimaksud tetap dicatat dan dilaporkan sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah yang berlaku

7.5.3.1.3.6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**TA 2025**	**TA 2024**
	Rp8.251.846.716,48	**Rp5.797.762.702,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.251.846.716,48. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.797.762.702,00, terjadi kenaikan Rp2.454.084.014,48 atau 42,29% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2024 (LK *Audited*)	**5.797.762.702,00**
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan1 Januari 2025	**5.797.762.702,00**
Penambahan:	
Belanja Barang dan Jasa	2.624.082.198,00
Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke KDP	57.220.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke KDP	511.178.190,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tanah ke KDP	62.552.000,00
Jumlah Penambahan	**3.255.032.388,00**
Pengurangan:	
Reklasifikasi Berkurang KDP Ke Aset Definitifnya	704.545.760,00
Koreksi Kekurangan Volume	96.402.613,52
Jumlah Pengeluaran	**800.948.373,52**
Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	**8.251.846.716,48**

Pengurangan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) sebagai akibat koreksi atas kekurangan volume pekerjaan pada 2 (dua) paket pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan nilai keseluruhan sebesar Rp96.402.613,52, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pemeliharaan Pagar Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD dengan nilai koreksi kekurangan volume sebesar Rp59.707.167,52; dan
2. Pekerjaan Rehabilitasi Atap dan *Mechanical Electrical* Mess Rumah Jabatan Bupati Takalar pada Sekretariat Daerah dengan nilai koreksi kekurangan volume sebesar Rp36.695.446,00.

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 27 dan Lampiran 28.**

7.5.3.1.3.7. **Akumulasi Penyusutan**	**TA 2025**	**TA 2024**
	(Rp1.727.656.288.406,70)	**(Rp1.632.439.575.505,38)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.727.656.288.406,70). Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.632.439.575.505,38), terjadi kenaikan Rp95.216.712.901,32 atau 5,84% merupakan hasil penghitungan akumulasi penyusutan dengan menggunakan Metode Garis Lurus *(Straight Line Method)* atas seluruh Aset Tetap, kecuali Tanah

dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 83 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 (LK *Audited*)	**-1.632.439.575.505,38**
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 1 Januari 2025	**-1.632.439.575.505,38**
Penambahan:	
Beban Penyusutan	-115.523.703.798,58
Reklasifkasi dari Extracomtable Ke Aset Tetap	-7.585.500,00
Reklasifkasi dari Aset Lain Lain Ke Aset Tetap	-15.601.000,00
Kurang Catat	-3.902.420.001,60
Mutasi Masuk	-6.295.169.853,86
Jumlah Penambahan	**-125.744.480.154,04**
Pengurangan:	
Koreksi Saldo Awal Akumulasi	-568.453.710,23
Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	-51.896.439,94
Mutasi Keluar	-6.295.169.853,86
Reklasifikasi ke aset lainnya Rusak Berat	-2.185.965.297,12
Penghapusan Karena Penjualan	-5.122.647.411,00
Kooreksi Saldo awal Penyusutan Karena masa manfaat	-16.303.634.540,57
Jumlah Pengeluaran	**-30.527.767.252,72**
Saldo Akhir Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025	**-1.727.656.288.406,70**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan per SKPD pada **Lampiran 29.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, setiap perubahan kebijakan akuntansi wajib disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap**
   Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 mengatur ketentuan baru mengenai masa manfaat Aset Tetap yang berbeda dengan kebijakan akuntansi sebelumnya. Penyesuaian masa manfaat tersebut berimplikasi pada penghitungan beban penyusutan per periode serta nilai akumulasi penyusutan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2025.
2. **Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat Perbaikan**
   Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 mengatur ketentuan mengenai penambahan masa manfaat Aset Tetap sehubungan dengan perbaikan yang dilakukan terhadap aset dimaksud, baik dalam bentuk overhaul maupun renovasi yang memenuhi kriteria kapitalisasi. Penambahan masa manfaat tersebut memengaruhi sisa umur ekonomis aset, sehingga turut mengubah besaran beban penyusutan dan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang bersangkutan.
3. **Perubahan Kebijakan secara Prospektif**
   Perubahan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 di atas diterapkan secara prospektif terhitung sejak Tahun 2022, yaitu sejak berlakunya Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan demikian:
   a. Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang telah dicatat pada periode-periode sebelum Tahun 2022 tidak dilakukan penyajian kembali (*restatement*); dan
   b. Penyesuaian masa manfaat dan penambahan masa manfaat Aset Tetap hanya berpengaruh terhadap penghitungan beban penyusutan dan

akumulasi penyusutan mulai Tahun 2022 dan periode-periode berikutnya, termasuk Tahun Anggaran 2025.

Penerapan secara prospektif dipilih dengan pertimbangan bahwa dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi pada periode-periode sebelum Tahun 2022 tidak dapat ditentukan secara andal, serta sejalan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

7.5.3.1.3.8. Aset Konsesi Jasa

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan dan tidak terdapat realisasi untuk Aset Konsesi Jasa. Dengan demikian tidak terdapat saldo Aset Konsesi Jasa pada Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

7.5.3.1.3.9. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Takalar tidak menganggarkan dan tidak terdapat realisasi untuk Aset Konsesi Jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

7.5.3.1.4. DANA CADANGAN

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar tidak membentuk Dana Cadangan pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

7.5.3.1.4.1. Dana Cadangan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar tidak membentuk Dana Cadangan pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00

7.5.3.1.4.2. Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar tidak membentuk Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00

7.5.3.1.4.3. Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pemerintah Kabupaten Takalar tidak membentuk Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Su pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00

7.5.3.1.5. ASET LAINNYA

TA 2025	TA 2024
Rp80.085.539.246,41	**Rp77.765.764.376,40**

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp80.085.539.246,41. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.765.764.376,40, terjadi kenaikan Rp2.319.774.870,01 atau 2,98%, rincian asset lainnya terdiri dari:

Tabel 84 Rincian Aset Lainnya

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	Penyisihan	Nilai setelah penyisihan
1	Tagihan Jangka Panjang	2.593.497.389,80	1.253.404.673,77	1.340.092.716,03
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tidak Berwujud	6.561.486.435,76	4.957.218.835,76	1.604.267.600,00
4	Aset Lain-lain	195.775.932.926,70	119.656.578.829,32	76.119.354.097,38
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	(4.957.218.835,76)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	(119.656.578.829,32)
7	Kas yang dibatasi penggunaannya	1.021.824.833,00	0,00	1.021.824.833,00
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**206.020.263.585,26**	**125.934.724.338,85**	**80.085.539.246,41**

7.5.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
Rp1.340.092.716,03	**Rp1.075.986.986,86**

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.340.092.716,03. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.075.986.986,86, terjadi kenaikan Rp264.105.729,17 atau 24,55%. Tagihan Jangka Panjang terdiri atas dua komponen, yaitu Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2025.

1) Tagihan Penjualan Angsuran pada Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 senilai Rp67.522.000,00 dan pengurangan penyetoran Tahun 2025 senilai Rp0,00, sehingga saldo tagihan penjualan angsuran senilai Rp67.522.000,00. Penyisihan tagihan penjualan angsuran senilai Rp67.522.000,00 sehingga diperoleh nilai neto senilai Rp0,00 dan Tahun 2024 senilai Rp0,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 85 Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Awal	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	67.522.000,00
Penyetoran Tahun 2025	0,00
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran	67.522.000,00
Penyisihan	67.522.000,00
Saldo setelah Penyisihan	0,00

Daftar rincian piutang dan penyisihan tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 30.**

2) Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp2.593.497.389,80 dan Rp2.329.391.660,63. Rekapitulasi saldo Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut:

Tabel 86 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo awal TGR	**2.329.391.660,63**
Penambahan	
Reklas dari aset lancar	0,00
Koreksi Tambah SKTJM 2025	264.105.729,17
Jumlah Penambahan	**264.105.729,17**
Pengurangan	
Pembayaran	0,00
Saldo TGR	**Rp2.593.497.389,80**

Tuntutan Ganti Rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebanyak 54 kasus senilai Rp2.593.497.389,80

Daftar rincian Tuntutan Ganti Rugian (TGR) per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 31a dan Lampiran 31b.**

7.5.3.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00.

7.5.3.1.5.3. Aset Tak Berwujud

TA 2025	TA 2024
Rp6.561.486.435,76	**Rp5.141.986.435,76**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp6.561.486.435,76 dan Rp5.141.986.435,76 Nilai neto Aset Tak Berwujud senilai Rp1.604.267.600,00 Rincian Aset Tak Berwujud pada tabel berikut:

Tabel 87 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2024 (LK *Audited*)	**5.141.986.435,76**
Saldo Aset Tidak Berwujud 1 Januari 2025	**5.141.986.435,76**
Penambahan:	
Belanja Modal	**1.419.500.000,00**
Jumlah Penambahan	**1.419.500.000,00**
Pengurangan:	
Mutasi Keluar	
Jumlah Pengeluaran	
Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2025 (Bruto)	**6.561.486.435,76**
Amortisasi	4.957.218.835,76
Saldo Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2025 (Neto)	**1.604.267.600,00**

Nilai Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp6.561.486.435,76, mengalami penambahan sebesar Rp1.419.500.000,00 dari saldo awal sebesar Rp5.141.986.435,76. Aset Tidak

Berwujud dimaksud terdiri atas tiga kelompok, dengan rincian sebagai berikut.

1. Software, dengan saldo awal sebesar Rp5.042.029.435,76 dan terdapat penambahan sebesar Rp1.170.000.000,00 selama tahun berjalan, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp6.212.029.435,76.
2. Kajian, dengan saldo awal sebesar Rp99.957.000,00 dan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan selama tahun berjalan, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp99.957.000,00.
3. Aset Tidak Berwujud Lainnya (Buku Digital), dengan saldo awal nihil dan terdapat penambahan sebesar Rp249.500.000,00 selama tahun berjalan, sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp249.500.000,00.

Selama tahun anggaran 2025, tidak terdapat pengurangan atas Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Takalar

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 32.**

7.5.3.1.5.4.Aset Lain-lain

TA 2025	TA 2024
Rp195.775.932.926,70	**Rp192.856.983.642,74**

Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp195.775.932.926,70. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp192.856.983.642,74, terjadi kenaikan Rp2.918.949.283,96 atau 1,49%.

Aset Lain-Lain terdiri atas dua klasifikasi, yaitu Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp113.362.889.613,19 dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp81.545.246.656,67, sebelum memperhitungkan koreksi hasil pemeriksaan. Selama Tahun Anggaran 2025, terdapat mutasi penambahan sebesar Rp2.462.753.627,12 yang bersumber dari dua hal. Pertama, reklasifikasi aset tetap yang kondisi fisiknya telah dinyatakan rusak berat sebesar Rp2.259.433.627,12. Aset-aset tersebut tidak lagi memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset tetap yang produktif dalam mendukung operasional pemerintah daerah, sehingga dipindahkan ke kelompok Aset Lain-Lain — Rusak Berat sesuai ketentuan penatausahaan aset daerah. Kedua, reklasifikasi hewan ternak yang mati pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp203.320.000,00, yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai aset tetap aktif.

Di sisi lain, terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp411.601.000,00 yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp396.000.000,00 dan reklasifikasi kembali ke aset tetap sebesar Rp15.601.000,00. Penghapusan dilakukan secara resmi atas aset yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan reklasifikasi kembali ke aset tetap dilakukan terhadap aset yang setelah dievaluasi ulang dinyatakan masih memenuhi kriteria sebagai aset tetap aktif.

Saldo akhir sebelum audit tercatat sebesar Rp194.908.136.269,86. Atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat koreksi penambahan atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp867.796.656,84, sehingga saldo akhir setelah koreksi (audited) menjadi Rp195.775.932.926,70

Rincian mutasi pada tabel berikut:

Tabel 87 Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(Dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Saldo Aset Lain-lain 31 Desember 2024 (LK Audited)	**74.974.769.110,54**
Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain	
Saldo Awal Aset Lain-lain 1 Januari 2025 Netto	**74.974.769.110,54**
Penambahan:	

Uraian	Nilai
Reklasifikasi ke aset lain lain (Hewan Mati)	203.320.000,00
Reklas dari Aset Lain Lain Rusak Berat	2.259.433.627,12
Koreksi Kekurangan Volume	867.796.656,84
Jumlah Penambahan	**3.330.550.283,96**
Pengurangan:	
Reklas Ke Aset Tetap	15.601.000,00
Penghapusan	396.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	**411.601.000,00**
Saldo Akhir Aset Lain-lain 31 Desember 2025 (Bruto)	**77.893.718.394,50**
Total koreksi bertambah penyusutan	**-2.185.965.297,12**
Total koreksi berkurang penyusutan	**-411.601.000,00**
Saldo Akhir Aset Lain-lain 31 Desember 2025 (Neto)	**76.119.354.097,38**

Selain reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa hewan mati dan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain berupa aset kondisi rusak berat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada Tahun Anggaran 2025 terdapat penambahan Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp867.796.656,84. Penambahan tersebut merupakan reklasifikasi atas nilai kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Perlakuan reklasifikasi ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, khususnya Bagian 3 mengenai Koreksi Kesalahan, yang mengatur bahwa terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Khusus untuk pengadaan Aset Tetap yang di-*mark-up* dan terdapat kelebihan nilai aset yang harus dikembalikan, kebijakan akuntansi mengatur perlakuan koreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos Aset Tetap.

Mengingat sampai dengan tanggal pelaporan belum terdapat pengembalian dari penyedia jasa atas nilai kekurangan volume dimaksud, atas nilai tersebut direklasifikasi terlebih dahulu dari akun Aset Tetap menjadi akun Aset Lain-Lain sesuai dengan substansi pencatatannya sebagai BMD yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan halaman 130 Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 yang mendefinisikan Aset Lain-Lain sebagai Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah, baik karena rusak berat, usang, maupun karena sedang menunggu proses pemindahtanganan.

Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama diterapkannya perlakuan reklasifikasi nilai kekurangan volume pekerjaan ke dalam akun Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kabupaten Takalar. Atas nilai dimaksud akan dilakukan tindak lanjut berupa pengembalian ke Kas Daerah oleh penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengembalian dilakukan akan dicatat sebagai pengurangan Aset Lain-Lain dan penambahan kas sesuai mekanisme koreksi kesalahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat aset yang hingga tanggal pelaporan belum dilakukan koreksi atas kekurangan volume pekerjaan. Aset dimaksud adalah pekerjaan Pemeliharaan Jalan Ruas Bontoloe (Sapanjang) yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Takalar.
Rincian penambahan Aset Lain-Lain yang bersumber dari koreksi kekurangan volume pekerjaan telah diuraikan secara lengkap pada bagian sebelumnya, yaitu pada Poin 7.5.3.1.3.3, Poin 7.5.3.1.3.4, dan Poin 7.5.3.1.3.5. Oleh karena itu, untuk menghindari pengulangan penjelasan, rincian dimaksud tidak diuraikan kembali pada bagian ini.
Informasi selengkapnya mengenai mutasi penambahan dan pengurangan Aset Lain-Lain per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dilihat pada **Lampiran 33**. Adapun informasi mengenai penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya dijabarkan secara rinci pada **Lampiran 34.**

7.5.3.1.5.5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

TA 2025	TA 2024
(Rp4.957.218.835,76)	**(Rp4.442.485.035,76)**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.957.218.835,76, mengalami kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.442.485.035,76.
Kenaikan ini merupakan beban amortisasi atas Aset Tidak Berwujud yang diakui selama Tahun Anggaran 2025 sesuai masa manfaat ekonomis masing-masing aset.

7.5.3.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

TA 2025	TA 2024
(Rp119.656.578.829,32)	**(Rp117.882.214.532,20)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp119.656.578.829,32, mengalami kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp117.882.214.532,20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada tabel berikut:

Tabel 88 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp119.656.578.829,32)	(Rp117.882.214.532,20)	(Rp1.774.364.297,12)	1,51

Kenaikan akumulasi penyusutan tersebut disebabkan oleh adanya reklasifikasi aset tetap ke dalam kelompok Aset Lain-Lain — Rusak Berat. Proses reklasifikasi ini dilakukan terhadap aset-aset yang kondisi fisiknya telah dinyatakan rusak berat dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang produktif dalam mendukung operasional pemerintah daerah.
Atas aset-aset yang direklasifikasi tersebut, akumulasi penyusutan yang sebelumnya melekat pada pos aset tetap ikut dipindahkan dan dicatat sebagai akumulasi penyusutan pada pos Aset Lainnya, sehingga saldo akumulasi penyusutan Aset Lainnya bertambah seiring dengan bertambahnya nilai bruto aset yang masuk ke kelompok tersebut. Dengan demikian, kenaikan saldo akumulasi penyusutan ini merupakan dampak langsung dari mutasi reklasifikasi dimaksud dan bukan berasal dari beban penyusutan periodik baru yang diakui selama Tahun Anggaran 2025

7.5.3.1.5.7. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

TA 2025	TA 2024
Rp1.021.824.833,00	**Rp1.015.506.879,00**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.021.824.833,00. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.015.506.879,00, terjadi kenaikan Rp6.317.954,00 atau 0,62%.

Kas yang dibatasi Penggunaanya adalah saldo rekening pengelola Dana Bergulir, KUPERTA, KUKESRATA dan PEP2T yang ada di Bank. Kas ini merupakan pengembalian dana investasi yang belum ditentukan dasar penggunaannya senilai Rp1.015.506.879,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 89 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Dinas PPKBPPPA	614.674.422,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	94.087.408,00
3	Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	110.197.222,00
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	202.865.781,00
Jumlah		**1.021.824.833,00**

Rincian mutasi Kas yang dibatasi penggunaannya dapat dilihat pada **Lampiran 35.**

7.5.3.1.5.8.Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	**TA 2025**	**TA 2024**
	Rp0,00	**Rp0,00**

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing senilai Rp0,00.

7.5.3.1.6. PROPERTI INVESTASI	**TA 2025**	**TA 2024**
	Rp100.273.106.381,02	**Rp102.142.553.871,24**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tanggal 1 Juli 2021. PSAP 17 merupakan salah satu acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Properti Investasi. Sejalan dengan implementasi peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar telah merumuskan kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 546 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Properti Investasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp100.273.106.381,02. Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp102.142.553.871,24, terjadi penurunan Rp1.869.447.490,22 atau 1,83%. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat mutasi penambahan maupun pengurangan atas Properti Investasi, sehingga saldo per 31 Desember 2025 sama dengan saldo per 31 Desember 2024 dengan rincian mutasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 90 Rincian Properti Investasi TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2025	2024
1	Properti Investasi Tanah	100.675.551.706,10	100.675.551.706,10
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	14.987.026.214,69	14.987.026.214,69
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	2.364.902.000,00	2.364.902.000,00
4	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(17.754.373.539,77)	(15.884.926.049,55)
	JUMLAH	**100.273.106.381,02**	**102.142.553.871,24**

Untuk Mutasi Penambahan dan Pengurangan Properti Investasi per SKPD pada **Lampiran 36**

7.5.3.1.6.1. Properti Investasi Tanah

TA 2025	TA 2024
Rp100.675.551.706,10	**Rp100.675.551.706,10**

Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp100.675.551.706,10. Sama dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.675.551.706,10. Tidak ada perubahan Rp0,00 atau 0%. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penambahan, pengurangan, reklasifikasi, maupun penurunan nilai atas aset Properti Investasi Tanah. Dengan demikian, nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai perolehan awal

7.5.3.1.6.2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

TA 2025	TA 2024
Rp14.987.026.214,69	**Rp14.987.026.214,69**

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp14.987.026.214,69, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat mutasi berupa penambahan, pengurangan, reklasifikasi, maupun penurunan nilai atas aset Properti Investasi Gedung dan Bangunan. Nilai tercatat tetap sesuai nilai perolehan awal.

7.5.3.1.6.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi

TA 2025	TA 2024
Rp2.364.902.000,00	**Rp2.364.902.000,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi per 31 Desember 2025 tercatat senilai Rp2.364.902.000,00, tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penambahan nilai, penyelesaian konstruksi, maupun reklasifikasi ke aset definitif atas kelompok ini. Aset tetap disajikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan konstruksi selesai dan siap digunakan.

7.5.3.1.6.4. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

TA 2025	TA 2024
(Rp17.754.373.539,77)	**(Rp15.884.926.049,55)**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp17.754.373.539,77). Dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp15.884.926.049,55), terjadi kenaikan Rp1.869.447.490,22 atau 11,77% sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 91 Rincian Properti Investasi TA 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(Rp17.754.373.539,77)	(Rp15.884.926.049,55)	(Rp1.869.447.490,22)	11,77

Kenaikan akumulasi penyusutan senilai Rp1.869.447.490,22 merupakan beban penyusutan Properti Investasi yang diakui selama Tahun Anggaran 2025. Beban penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset, berdasarkan PSAP 07 tentang Aset Tetap dan PSAP 13 tentang Properti Investasi. Tidak terdapat pengurangan akumulasi penyusutan akibat pelepasan atau reklasifikasi aset pada tahun berjalan. Nilai ini menyebabkan nilai buku bersih Properti Investasi per 31 Desember 2025 menjadi Rp100.273.106.381,02.

7.5.3.2 KEWAJIBAN

TA 2025	TA 2024
Rp207.796.574.446,60	**Rp259.220.656.683,86**

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa akan

datang. Kewajiban terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Total Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp207.796.574.446,60. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp259.220.656.683,86, terjadi penurunan Rp51.424.082.237,26 atau 19,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Kewajiban Jangka Pendek	71.682.368.460,60	87.457.487.083,86
2	Kewajiban Jangka Panjang	136.114.205.986,00	171.763.169.600,00
	Total	**207.796.574.446,60**	**259.220.656.683,86**

7.5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA-PENDEK

TA 2025	TA 2024
Rp71.682.368.460,60	**Rp87.457.487.083,86**

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.682.368.460,60. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp87.457.487.083,86, terjadi penurunan Rp15.775.118.623,26 atau 18,04%. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 senilai Rp71.682.368.460,60 terdiri atas:

Tabel 93 Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Akun	2025	2024
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	36.475.640,69	36.314.863,69
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	38.889.778.488,00	42.130.593.362,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	79.489.388,34	46.389.510,42
4	Utang Belanja	32.676.624.943,57	45.244.189.347,75
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**71.682.368.460,60**	**87.457.487.083,86**

7.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

TA 2025	TA 2024
Rp36.475.640,69	**Rp36.314.863,69**

Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.475.640,69. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.314.863,69, terjadi kenaikan Rp160.777,00 atau 0,44%, yang terdiri dari Pajak (PPh) yang belum disetor sampai dengan akhir tahun anggaran yang berasal dari dana BLUD senilai Rp36.475.640,69.

7.5.3.2.1.2. Utang Bunga

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan kewajiban utang bunga, sehingga tidak ada saldo yang disajikan pada pos ini.

7.5.3.2.1.3. Utang Pinjaman Jangka Pendek

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Pinjaman Jangka Pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama

dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pengadaan pinjaman jangka pendek maupun kewajiban jatuh tempo dalam waktu 12 bulan yang disajikan pada pos ini.

7.5.3.2.1.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
Rp38.889.778.488,00	**Rp42.130.593.362,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.889.778.488,00. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.130.593.362,00, terjadi penurunan Rp3.240.814.874,00 atau 7,69%. Bagian Lancar utang Jangka Panjang tersebut adalah pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT SMI sesuai perjanjian Nomor PERJ-211/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021Merupakan Utang pembayaran program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang dikucurkan pemerintah pusat ke Pemda lewat PT SMI sesuai atas pembanguanan infrastruktur, Rumah sakit dan UMKM sesuai dengan pokok pinjaman sebesar Rp241.947.497.641,00 pembayaran selama 8 Tahun dengan Jumlah Kewajiban Rp 303.065.904.021,00 dengan pokok pinjaman Rp233.338.652.206,00 bunga sebesar Rp69.727.251.815,00. Sampai dengan tahun 2025 Jumlah pokok pengembalian sebesar 66.943.513.167,00 dengan bunga Rp45.542.364.082,00 Dengan Persentasi Pengembalian sebesar 37,12%.

Jadwal pembayaran kewajiban pinjaman PEN dari PT SMI, baik yang telah direalisasikan maupun yang akan jatuh tempo pada tahun-tahun berikutnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 94 Jadwal pembayaran kewajiban pinjaman PEN

(dalam Rupiah)

No	Tahun	Kewajiban Pokok	Kewajiban Bunga	Jumlah Kewajiban	Keterangan
1	2022	–	3.869.514.721,00	3.869.514.721,00	Masa pencairan
2	2023	–	15.184.557.744,00	15.184.557.744,00	Grace period
3	2024	22.685.704.118,00	14.326.084.888,00	37.011.789.006,00	Mulai angsuran pokok
4	2025	38.889.778.488,00	12.096.567.195,00	50.986.345.683,00	Telah direalisasikan
5	2026	38.889.778.488,00	9.655.855.505,00	48.545.633.993,00	Bagian Lancar
6	2027	38.889.778.488,00	7.215.143.809,00	46.104.922.297,00	Jangka Panjang
7	2028	38.889.778.488,00	4.790.034.835,00	43.679.813.323,00	Jangka Panjang
8	2029	38.889.778.488,00	2.333.720.418,00	41.223.498.906,00	Jangka Panjang
9	2030	16.204.055.648,00	255.772.700,00	16.459.828.348,00	Pembayaran akhir
	Jumlah	**233.338.652.206,00**	**69.727.251.815,00**	**303.065.904.021,00**	

7.5.3.2.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka

TA 2025	TA 2024
Rp79.489.388,34	**Rp46.389.510,42**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp79.489.388,34. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.389.510,42, terjadi kenaikan Rp33.099.877,92 atau 71,39%, merupakan pendapatan diterima dimuka dari Pajak Reklame senilai Rp35.322.721,67 dan sewa sebagian tanah untuk ATM Bank Sulselbar senilai Rp44.166.666,67.

Tabel 95 Rekapitulasi Pendapatanditerima dimuka per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Akun	2025	2024
1	Pendapatan diterima dimuka dari Pajak Reklame	35.322.721,67	23.508.593,75
2	Pendapatan diterima dimuka dari sewa ATM	44.166.666,67	22.880.916,67
	Jumlah	**79.489.388,34**	**46.389.510,42**

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada **Lampiran 37a** dan **Lampiran 37b**

7.5.3.2.1.6. Utang Belanja

TA 2025	TA 2024
Rp32.676.624.943,57	**Rp45.244.189.347,75**

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.676.624.943,57. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp45.244.189.347,75, terjadi penurunan Rp12.567.564.404,18 atau 27,80%. Utang Belanja merupakan utang atas kegiatan yang telah selesai pekerjaannya namun belum diselesaikan pembayarannya. Rekapitulasi Utang Belanja pada **Lampiran 38**.

Tabel 96 Daftar Mutasi Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO	SKPD	Saldo Awal Utang 2025	Mutasi		Total Utang 2025
			Bertambah utang 2025	Berkurang/ Pembayaran	
1	Dinas Pekerjaan Umum	13.035.834.749,74	554.100,00	4.546.547.045,00	8.489.841.804,74
2	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	75.557.990,27	1.544.883.820,00	1.544.883.820,00	75.557.990,27
3	Dinas Kesehatan	7.043.539.080,00	1.156.195.600,00	6.022.960.641,00	2.176.774.039,00
4	BPKD	927.500,00	-		927.500,00
5	Dinas Perhubungan	77.777.500,00	-		77.777.500,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1.103.593.134,00	-	704.732.000,00	398.861.134,00
7	RSUD Padjonga Dg. Ngalle	20.184.204.021,34	19.388.684.719,56	18.850.506.647,34	20.722.382.093,56
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	486.439.257,00	-	99.112.000,00	387.327.257,00
9	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	36.013.700,00	774.800,00	1.021.700,00	35.766.800,00
10	Badan KB dan PP	426.976.200,00	188.100,00	426.976.200,00	188.100,00
11	BAPPEDA	121.494.400,00	589.700,00	99.999.400,00	22.084.700,00
12	Badan Kesbang Pol	15.497.500,00	-	12.000.000,00	3.497.500,00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	41.950.000,00	816.400,00	20.800.000,00	21.966.400,00
14	Sekretariat Daerah	130.800.000,00	-	110.900.000,00	19.900.000,00
15	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian dan ESDM	235.860.475,00	100.900,00		235.961.375,00
16	BPBD	-	-		-
17	Sekretariat DPRD	404.606.000,00	-	404.606.000,00	-

NO	SKPD	Saldo Awal Utang 2025	Mutasi		Total Utang 2025
			Bertambah utang 2025	Berkurang/ Pembayaran	
18	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.543.350,00	-		7.543.350,00
19	Dinas Perdagangan	-	-		-
20	Inspektorat Kabupaten	144.600,00	267.400,00	144.600,00	267.400,00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	-	80.959.000,00	80.959.000,00	-
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	144.501.200,00	-	144.501.200,00	-
JUMLAH		**43.573.260.657,35**	**22.174.014.539,56**	**33.070.650.253,34**	**32.676.624.943,57**

Per 31 Desember 2025, Saldo Utang Belanja pada RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle tercatat sebesar Rp20.722.382.093,56 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Enam Sen).

Tabel 97 Daftar Utang Belanja BLUD Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Utang
1.	Utang BLUD TA 2025	19.388.684.719,56
2.	Utang BLUD TA 2024	685.493.125,00
3.	Utang BLUD TA 2023	55.094.214,00
4.	Utang BLUD yang bersumber dari Pendapatan APBD	593.110.035,00
	JUMLAH	**20.722.382.093,56**

Nilai utang belanja tersebut telah sesuai dengan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Mohammad Sunusi & Rekan sesuai No. 00247/2.1392/AU.5/11/1488-2/1/V/2026, Tanggal 20 Mei 2026 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Utang belanja per 31 Desember 2025 tersebut terdiri dari utang belanja BLUD sebesar Rp20.129.272.058,56 dan utang belanja APBD sebesar Rp593.110.035,00. Utang ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya berupa utang belanja BLUD sebesar Rp19.591.093.986,34 dan utang belanja APBD sebesar Rp.593.047.035,00 dengan kenaikan terbesar pada utang belanja BLUD.

Neraca RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle menyajikan penambahan utang belanja BLUD untuk Tahun 2025 sebesar Rp19.388.684.719,56. Dari penambahan utang belanja BLUD tersebut, pengakuan utang belanja tersebut berdasarkan dua kondisi, yaitu berdasarkan sisa anggaran yang belum terealisasi pada TA 2025 sebesar Rp10.289.662.774,00 dan pengakuan utang belanja sebesar Rp9.099.021.945,56 berdasarkan kontrak pengadaan dan/atau surat pesanan yang belum didukung ketersediaan anggaran akan tetapi dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan mendesak yang menjaga keberlangsungan operasional rumah sakit, seperti belanja obat, BHP, Bahan Kimia, Oksigen, Bahan Makanan Pasien.

Penjelasan lebih lanjut atas Utang BLUD RSUD H.Padjonga Dg,Ngalle diketahui:

1. Pola manajemen kas rumah sakit dengan tidak memperhitungkan utang tahun sebelumnya pada penyusunan RBA telah dilakukan oleh manajemen rumah sakit pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan ketidaktahuan manajemen bahwa utang belanja dapat dimasukkan sebagai penyusun RBA.Manajemen

menganggap bahwa penyusunan RBA hanya dapat disusun atas belanja murni di tahun tersebut;

2. Dilakukannya pembayaran utang tahun sebelumnya pada tahun berjalan oleh manajemen rumah sakit disebabkan karena pihak Penyedia tidak akan mengirimkan atau menyuplai kembali barang kebutuhan rumah sakit apabila utang pada tahun sebelumnya belum diselesaikan oleh pihak rumah sakit; dan
3. Selain disebabkan oleh permasalahan pada poin 1 dan 2, terjadinya belanja/kegiatan yang menyebabkan utang pada akhir tahun karena pihak manajemen rumah sakit lebih memprioritaskan keberlangsungan operasional pelayanan kesehatan RSUD daripada ketersediaan anggaran belanja.

7.5.3.2.1.7. Utang Jangka Pendek-Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Jangka Pendek-Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat transaksi kewajiban jangka pendek lainnya yang memenuhi kriteria.

7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
Rp136.114.205.986,00	**Rp171.763.169.600,00**

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp136.114.205.986,00. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.763.169.600,00, terjadi penurunan Rp35.648.963.614,00 atau 20,74%. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp136.114.205.986,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp171.763.169.600,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp35.648.963.614,00 atau 20,75% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran angsuran pokok pinjaman pada Tahun Anggaran 2025 serta reklasifikasi bagian pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan ke pos Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

7.5.3.2.2.1. Utang kepada Pemerintah Pusat

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat kewajiban kepada Pemerintah Pusat yang timbul dari pinjaman, hibah yang harus dikembalikan, maupun transaksi lainnya.

7.5.3.2.2.2. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember 2025 sebesar Rp136.114.205.986,00. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.763.169.600,00, terjadi penurunan Rp35.648.963.614,00 atau 20,74%. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat pengadaan pinjaman maupun kewajiban jangka panjang lainnya kepada lembaga keuangan bank**.**

7.5.3.2.2.3. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

TA 2025	TA 2024
Rp136.114.205.986,00	**Rp171.763.169.600,00**

Saldo Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) per 31 Desember

TA 2025 senilai Rp136.114.205.986,00. Utang Jangka Panjang tersebut adalah pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Pemerintah Kabupaten Takalar dengan PT SMI sesuai perjanjian Nomor PERJ-211/SMI/1221 tanggal 29 Desember 2021. Rincian Utang Jangka Panjang telah dijelaskan pada akun LRA point 7.5.1.2.1.3. Rekapitulasi utang jangka panjang pada **Lampiran 39.**

		TA 2025	TA 2024
7.5.3.2.2.4.	**Utang kepada Masyarakat**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Utang kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat kewajiban kepada Masyarakat.

		TA 2025	TA 2024
7.5.3.2.2.5.	**Kewajiban Konsesi Jasa**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat perjanjian konsesi jasa yang menimbulkan kewajiban

		TA 2025	TA 2024
7.5.3.2.2.6.	**Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Utang Pembiayaan Utang Daerah – Pinjaman Daerah dari Pemerintah per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penarikan maupun kewajiban pinjaman daerah dari pemerintah pusat.

		TA 2025	TA 2024
7.5.3.2.2.7.	**Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Utang Pembiayaan Utang Daerah – Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat transaksi pinjaman antar pemerintah daerah yang menimbulkan kewajiban

		TA 2025	TA 2024
7.5.3.2.2.8.	**Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)**	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Saldo Utang Pembiayaan Utang Daerah – Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penarikan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang menimbulkan kewajiban.

7.5.3.2.2.9. Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	**Rp0,00**

Saldo Utang Pembiayaan Utang Daerah – Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00, sama dengan saldo per 31 Desember 2024. Selama Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat penarikan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang menimbulkan kewajiban

7.5.3.3 EKUITAS	TA 2025	TA 2024
	Rp1.705.479.997.438,04	**Rp1.604.796.430.708,98**

Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.705.479.997.438,04. Dibanding saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.604.796.430.708,98, terjadi kenaikan Rp100.683.566.729,06 atau 6,28%. Penjelasan akun Neraca posisi keuangan per 31 Desember 2025 terdiri dari Aset senilai Rp1.913.276.571.884,64, Kewajiban senilai Rp207.796.574.446,60 dan Ekuitas senilai Rp1.705.479.997.438,04. Saldo Ekuitas telah disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam penjelasan atas pos-pos LPE pada point 7.5.6.

7.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari realisasi pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Laporan Operasional (LO) Kabupaten Takalar TA 2025 merupakan rekapitulasi dari Laporan Operasional SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.

7.5.4.1 PENDAPATAN-LO

TA 2025	TA 2024
Rp1.128.361.080.558,83	**Rp1.105.222.433.951,64**

Pendapatan LO per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp1.128.361.080.558,83 dan Rp1.105.222.433.951,64 mengalami kenaikan senilai Rp23.138.646.607,19 atau 2,09%, merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Takalar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 98 Pendapatan - LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	% Kenaikan dan penurunan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	183.009.468.554,43	140.022.127.598,95	30,7
2.	Pendapatan Transfer-LO	922.479.536.909,00	953.411.353.580,00	-3,24
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	22.872.075.095,40	11.788.952.772,69	94,01
	Jumlah	**1.128.361.080.558,83**	**1.105.222.433.951,64**	**2,09**

7.5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

TA 2025	TA 2024
Rp183.009.468.554,43	**Rp140.022.127.598,95**

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Takalar per 31 Desember 2025 dan 2024 Rp183.009.468.554,43 dan Rp140.022.127.598,95, mengalami kenaikan senilai Rp42.987.340.955,48 atau 30,70%.

Tabel 99 Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Pajak Daerah	52.376.005.061,08	27.444.830.802,30	90,84
Pendapatan Retribusi Daerah	3.314.271.909,00	3.090.790.677,00	7,23
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.901.283.308,12	2.533.287.387,78	488,22
Lain-lain PAD yang sah	112.417.908.276,23	106.953.218.731,87	5,11
Jumlah	**183.009.468.554,43**	**140.022.127.598,95**	**30,7**

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

TA 2025	TA 2024
Rp52.376.005.061,08	**Rp27.444.830.802,30**

Pendapatan Pajak Daerah–LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari Wajib Pajak dalam TA 2025. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan

terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2025 sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2025 terealisasi senilai Rp52.376.005.061,08. Capaian realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp24.931.174.258,78 atau 90,84% dari realisasi TA 2024 senilai Rp27.444.830.802,30 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tabel berikut:

Tabel 100 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025

(dalam Rupiah)

No	Jenis pajak	2025	2024
1.	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**16.536.461.447,00**	**15.616.958.279,80**
	a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.773.987.143,00	956.510.014,00
	b. PBJT-Tenaga Listrik	14.003.547.134,00	14.164.416.765,00
	c.. PBJT-Jasa Perhotelan	93.373.506,00	146.273.136,00
	d. PBJT-Jasa Parkir	590.877.380,00	225.583.500,00
	e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	74.676.284,00	124.174.864,80
2.	**Pajak Reklame**	**475.098.084,08**	**496.713.837,00**
3.	**Pajak Air Tanah**	**588.223.340,00**	**544.482.060,00**
4.	**Pajak Sarang Burung Walet**	**1.200.000,00**	**0,00**
5.	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**1.671.000,00**	**30.056.950,00**
6.	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**6.028.208.004,00**	**6.117.053.479,00**
7.	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**8.560.881.562,00**	**4.639.566.196,50**
8.	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**10.188.336.609,00**	**0,00**
9.	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**9.995.925.015,00**	**0,00**
	Jumlah	**52.376.005.061,08**	**27.444.830.802,30**

7.5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

TA 2025	TA 2024
Rp3.314.271.909,00	**Rp3.090.790.677,00**

Pendapatan dipungut Pemerintah Kabupaten Takalar dari Wajib Retribusi dalam TA 2024. Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada TA 2025 terealisasi senilai Rp3.314.271.909,00. Capaian realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp223.481.232,00 atau 7,23% dari realisasi TA 2024 senilai Rp3.090.790.677,00. Adapun rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tabel berikut:

Tabel 101 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Retribusi	2025	2024
1	**Retribusi Jasa Umum**		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	482.325.543,00	375.973.932,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	198.360.000,00	122.170.000,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	148.434.000,00	59.000.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	706.201.000,00	806.766.000,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.650.000,00	283.297.337,00
	Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan	300.000.000,00	350.000.000,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	101.832.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	151.000.000,00	195.600.000,00
	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan	79.100.000,00	121.850.000,00

No	Retribusi	2025	2024
	Retribusi Rumah Potong Hewan	25.440.000,00	27.760.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.995.000,00	600.000,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.538.000,00	37.010.000,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	115.000.000,00	0,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**		
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.030.228.366,00	608.931.408,00
Total		**3.314.271.909,00**	**3.090.790.677,00**

Terdapat selisih antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA sebesar Rp333.255.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang dari penetapan tahun berjalan sebesar Rp433.060.000,00 merupakan pendapatan yang telah ditetapkan dan diakui sebagai hak daerah pada tahun berjalan, namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum diterima pembayarannya. Atas penetapan ini diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus menambah saldo Piutang, sehingga menambah selisih antara Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA.
2. Penerimaan retribusi atas pembayaran piutang retribusi sebesar Rp99.805.000,00 merupakan penerimaan atas pelunasan piutang retribusi yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO pada periode sebelumnya. Penerimaan ini diakui sebagai Pendapatan-LRA pada tahun berjalan, namun tidak menambah Pendapatan-LO karena pendapatannya telah diakui pada saat penetapan di periode sebelumnya, sehingga mengurangi selisih antara Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA.

Dengan demikian, selisih antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA sebesar Rp333.255.000,00 (Rp433.060.000,00 - Rp99.805.000,00).

7.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

TA 2025	TA 2024
Rp14.901.283.308,12	**Rp2.533.287.387,78**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO merupakan bagian laba yang dibagikan ke Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD senilai Rp10.316.849.525,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp7.783.562.137,22 atau 307,25% dari realisasi TA 2024 senilai Rp2.533.287.387,78, karena telah diakui lebih awal sebagai Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2023.

Perbandingan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 102 Realisasi Pendapatan hasil Pengelolaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Bank Sulselbar (laba metode biaya)	10.316.849.525,00	0,00
2	BPR GMD Galesong (laba metode ekuitas)	209.594.941,76	2.511.166.378,38
3	BPR Surya Sejati Palleko (laba metode ekuitas)	28.356.077,36	22.121.009,40
4	PAM Tirta Panrannuangku (laba metode ekuitas)	4.346.482.764,00	0,00

No	Uraian	2025	2024
	Jumlah	**14.901.283.308,12**	**2.533.287.387,78**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA senilai Rp10.316.849.525,00 merupakan Penerimaan deviden Bank Sulselbar senilai Rp10.316.849.525,00, peningkatan dari laba tahun berjalan BPR Galesong senilai Rp 209.594.941,76, peningkatan dari laba tahun berjalan PDAM Galesong senilai Rp 4.346.482.764,00, dan laba tahun berjalan BPR Surya Sejati Galesong senilai Rp 28.356.077,36.

7.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO

TA 2025	TA 2024
Rp112.417.908.276,23	**Rp106.953.218.731,87**

Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 senilai Rp112.417.908.276,23. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp5.464.689.544,36 atau 5,11% dari realisasi TA 2024 senilai Rp106.953.218.731,87 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 103 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	1.929.859.600,00	48.999.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	362.188.922,67	84.961.000,00
3	Jasa Giro-LO	2.801.472.581,00	4.435.460.084,00
4	Pendapatan Bunga-LO	163.173.085,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	5.449.495.415,59	1.664.505.348,42
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	37.164.447,28	251.241.949,40
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	593.331.802,92	367.440.930,00
9	Pendapatan dari BLUD-LO	101.081.222.421,77	100.069.784.126,68
10	Dana JKN pada FKRTL	0,00	0,00
11	Lain-Lain PAD-LO	0,00	30.826.293,37
	Jumlah	**112.417.908.276,23**	**106.953.218.731,87**

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO senilai Rp112.417.908.276,23 lebih tinggi senilai Rp720.390.793,28 dibandingkan dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA senilai Rp111.697.517.482,95 merupakan selisih alokasi bagi hasil Tahun 2025 yang belum diterima.

7.5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

TA 2025	TA 2024
Rp922.479.536.909,00	**Rp953.411.353.580,00**

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Takalar untuk periode 1 Januari 2025 s.d. tanggal 31 Desember 2025. Terdapat perbedaan nilai penyajian akuntansi yang signifikan antara akun Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) disebabkan adanya selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah senilai Rp19.078.053.435,00 yang merupakan piutang yang sudah diakui sebagai penerimaan pada tahun sebelumnya, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 104 Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	879.723.800.339,00	883.596.691.749,00	-1,82
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	42.755.736.570,00	57.366.385.831,00	- 25,5
Jumlah	**922.479.538.934,00**	**953.411.355.604,00**	**- 3,2**

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

TA 2025	TA 2024
Rp879.723.800.339,00	**Rp896.044.967.749,00**

Transfer Pemerintah Pusat-LO Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan Bagi Hasil Pajak, Sumber Daya Alam, DAU dan DAK dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Takalar dalam TA 2024 senilai Rp896.044.967.749,00 dan 2025 senilai Rp879.723.800.339,00 yang meliputi:

Tabel 105 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
Dana Perimbangan-LO	0,00	883.596.691.749,00	-100,00
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	18.247.465.700,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	666.777.754.612,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	180.612.971.027,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan-LO	0,00	0,00	0,00
Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal-LO	14.085.609.000,00	12.448.276.000,00	13,15
Jumlah	**879.723.800.339,00**	**896.044.967.749,00**	**-1,82**

a. Dana Perimbangan-LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp883.596.691.749,00**

Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan dari realisasi TA 2024 senilai Rp883.596.691.749,00. Penurunan 100% pada pos Dana Perimbangan-LO terjadi akibat reklasifikasi penyajian Dana Perimbangan secara rinci per komponen sesuai Struktur APBD Baru. Komponen Dana Perimbangan yang sebelumnya disajikan secara keseluruhan pada akun "Dana Perimbangan-LO" TA 2024, pada TA 2025 disajikan secara terpisah menjadi:

1. Dana Bagi Hasil-LO senilai Rp18.247.465.700,00;
2. Dana Alokasi Umum-LO senilai Rp666.777.754.612,00;
3. Dana Alokasi Khusus-LO senilai Rp180.612.971.027,00;
4. Insentif Fiskal-LO senilai Rp14.085.609.000,00.

Dengan demikian, saldo pos "Dana Perimbangan-LO" TA 2025 menjadi Rp0,00 karena sudah tidak digunakan lagi. Secara substansi, total Dana Perimbangan TA 2025 senilai Rp879.723.800.339,00 tetap diakui dan disajikan pada pos-pos yang baru.

b. Dana Bagi Hasil -LO

TA 2025	TA 2024
Rp18.247.465.700,00	**Rp0,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil-LO terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2025 senilai Rp18.247.465.700,00 dan TA 2024 senilai Rp0,00, adapun realisasi Dana Bagi Hasil-LO TA 2024 dikelompokkan pada akun Dana Perimbangan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106 Realisasi Dana Bagi Hasil-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
DBH Pajak-LO	**14.06.640.700,00**	**8.047.146.000,00**	**74,79**
DBH PBB-LO	6.925.872.000,00	2.235.294.000,00	209,84
DBH PPh Pasal 21-LO	6.433.576.900,00	5.254.591.000,00	22,44
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	247.056.800,00	195.489.000,00	26,38
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	459.135.000,00	361.772.000,00	26,91
DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	**4.181.825.000,00**	**4.188.101.000,00**	**- 0,15**
DBH SDA Minyak Bumi-LO	64.000,00	47.000,00	36,17
DBH SDA Gas Bumi-LO	941.546.000,00	369.443.000,00	154,86
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty -LO	1.857.623.000,00	2.087.241.000,00	- 11,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	48.118.000,00	12.781.000,00	276,48
DBH SDA Perikanan-LO	1.334.474.000,00	1.718.589.000,00	- 22,35
Jumlah	**18.247.465.700,00**	**12.235.247.000,00**	**49,14**

c. DAU – LO

TA 2025	TA 2024
Rp666.777.754.612,00	**Rp0,00**

Dana Alokasi Umum-LO merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 terealisasi senilai Rp666.777.754.612,00 dan TA 2024 senilai Rp0,00, adapun realisasi DAU-LO dikelompokkan pada akun Dana Perimbangan senilai Rp634.554.049.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107 Rincian DAU-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
DAU-LO	559.702.205.000,00	488.097.926.000,00	14,67
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	100,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	910.027.612,00	78.059.338.000,00	- 98,83
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	59.599.842.000,00	52.599.816.000,00	13,31
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	41.765.680.000,00	10.996.969.000,00	279,79
Jumlah	**666.777.754.612,00**	**634.554.049.000,00**	**5,08**

d. DAK - LO	**TA 2025**	**TA 2024**
	Rp180.612.971.027,00	**Rp0,00**

Dana Alokasi Khusus-LO merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 terealisasi senilai Rp180.612.971.027,00. dan TA 2024 senilai Rp0,00, adapun realisasi DAU-LO dikelompokkan pada akun Dana Perimbangan senilai Rp634.554.049.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai Kegiatan Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp8.423.598.807,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp172.189.372.220,00.

1). DAK Fisik - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp8.423.598.807,00	Rp74.864.555.022,00

Dana Alokasi Khusus Fisik-LO merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai Kegiatan Tahun 2025 senilai Rp8.423.598.807,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp66.440.956.215,00 atau 88,75% dari realisasi TA 2024 senilai Rp74.864.555.022,00.

Tabel 108 Rincian Realisasi DAK Fisik- LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	0,00	1.959.259.000,00	- 100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	211.127.350,00	5.973.686.009,00	- 96,47
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	0,00	3.107.560.750,00	- 100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	1.036.605.000,00	- 100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	517.800.000,00	- 100,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	12.786.201.100,00	- 100,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	17.668.393.240,00	-100,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	9.582.063.300,00	-100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	4.494.712.200,00	- 100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	17.738.274.423,00	-100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.938.314.337,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	3.547.140.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD-LO	2.727.017.120,00	0,00	0,00
Jumlah	**8.423.598.807,00**	**74.864.555.022,00**	**- 88,75**

2). DAK Non Fisik - LO	TA 2025	TA 2024
	Rp172.189.372.220,00	Rp161.942.840.727,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO merupakan dana dari Pemerintah Pusat untuk mendanai Kegiatan Tahun 2025 terealisasi senilai Rp172.189.372.220,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp10.246.531.493,00 atau 6,33% dari realisasi TA 2024 Senilai Rp161.942.840.727,00.

Tabel 109 Rincian Realisasi DAK Non Fisik- LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	80.493.578.500,00	75.809.654.000,00	6,18
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	339.500.000,00	746.801.000,00	- 54,54
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	238.281.000,00	406.000.000,00	- 41,31
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	42.222.650.000,00	42.243.980.000,00	- 0,05
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	1.992.500.000,00	2.300.000.000,00	- 13,37
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	4.448.076.000,00	4.645.980.000,00	- 4,26
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	180.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	5.037.150.000,00	3.862.400.000,00	30,42
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	180.000.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	10.194.532.679,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	21.331.728.653,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana-LO	4.012.433.388,00	24.674.740.517,00	- 83,74
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	1.518.942.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	0,00	545.875.000,00	- 100,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	578.974.800,00	- 100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	0,00	5.701.878.410,00	- 100,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	426.557.000,00	- 100,00
Jumlah	**172.189.372.220,00**	**161.942.840.727,00**	**6,33**

e. Dana Insentif Daerah (DID)-LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Dana Insentif Daerah (DID)-LO Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

f. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur -LO Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

g. Dana Keistimewaan-LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Dana Keistimewaan-LO Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

h. Dana Desa-LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Dana Desa-LO Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

i. Insentif Fiskal-LO

TA 2025	TA 2024
Rp14.085.609.000,00	**Rp12.448.276.000,00**

Insentif Fiskal-LO merupakan dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 terealisasi senilai Rp14.085.609.000,00 dan Tahun 2024 senilai Rp12.448.276.000,00. Dana ini adalah dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal).

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

TA 2025	TA 2024
Rp42.755.736.570,00	**Rp57.366.385.831,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar meliputi:

Tabel 110 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Bagi Hasil-LO	42.755.736.570,00	56.766.385.831,00	-24,68
Bantuan Keuangan	0,00	600.000.000,00	-100
Jumlah	**42.755.738.570,00**	**57.366.385.831,00**	**-25,47**

a. Pendapatan Bagi Hasil - LO

TA 2025	TA 2024
Rp42.755.736.570,00	**Rp56.766.385.831,00**

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, pada Tahun 2025 senilai Rp42.755.736.570,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp14.010.649.261,00 atau 24,68% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai Rp56.766.385.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 111 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Pajak Kendaraan Bermotor	4.123.201.139,00	11.185.695.783,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.422.979.706,00	8.481.905.847,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.410.586.379,00	17.081.299.978,00
4	Pajak Air Permukaan	144.015.958,00	70.705.885,00
5	Pajak Rokok	20.654.953.388,00	19.946.778.338,00
	Jumlah	**42.755.736.570,00**	**56.766.385.831,00**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Pendapatan Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp19.078.053.435,00 yang merupakan piutang Dana Bagi Hasil PKB, BBNKB, PPBKB dan Pajak Air Permukaan serta DBH Pajak Rokok Triwulan IV TA 2024 yang sudah diakui sebagai penerimaan pada tahun sebelumnya

b. Bantuan Keuangan LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp600.000.000,00**

Bantuan Keuangan-LO merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp600.000.000,00 atau 100% dari TA 2024 senilai Rp600.000.000,00.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

TA 2025	TA 2024
Rp22.872.075.095,40	**Rp11.788.952.772,69**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO senilai Rp22.872.075.095,40 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Takalar meliputi:

Tabel 112 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
1.	Pendapatan Hibah-LO	22.872.075.095,40	11.632.557.957,96	96,62
2.	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	156.394.814,73	-100,00
	Jumlah	**22.872.075.095,40**	**11.788.952.772,69**	**94,01**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp22.872.075.095,40 merupakan penerimaan Hibah Barang sebesar Rp 22.872.075.095,40 dengan rincian:

- Pendapatan Hibah Barang Obat-Obatan Dinas Kesehatan dari Provinsi sebesar Rp5.974.847.346,74
- Pendapatan Hibah Barang Obat-Obatan Dinas Kependudukan dan KB dari Provinsi sebesar Rp705.540.680,00
- Penerimaan Hibah Barang (Dinas Tanaman Pangan) sebesar Rp113.300.800,00
- Penerimaan Hibah/Bantuan Barang Dinas Pendidikan dari Kementerian sebesar Rp16.078.386.268,66

7.5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah- LO

TA 2025	TA 2024
Rp22.872.075.095,40	**Rp11.632.557.957,96**

Pendapatan Hibah-LO merupakan transfer hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Takalar yang meliputi:

Tabel 113 Realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	17.337.312.504,00	5.982.453.661,00	189,80
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.534.762.591,38	5.650.104.296,96	-2,04
	Jumlah	**22.872.075.095,40**	**11.632.557.957,96**	**96,62**

Rincian Realisasi pendapatan hibah tahun 2025 antara lain;

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp17.337.312.504,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Penerimaan Hibah Aset tetap dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementan No. 01/aset/2.09.3.27.0.00.11.0000/2025 senilai Rp113.300.800,00
   - Persediaan Penerimaan Hibah Obat-obatan dari Provinsi dan pemerintah pusat senilai Rp440.084.755,36
   - Penerimaan Hibah Obat No. 01/HIBAH/DPPKKB/2025 senilai Rp705.540.680,00

- Penerimaan Bantuan dari Kementrian pendidikan dasar dan menengah senilai Rp16.078.386.268,66

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp5.534.762.591,38 merupakan Penerimaan Hibah Obat-obatan dari Provinsi dan pemerintah pusat dengan No. 41/PERSEDIAAN/DINKES/XII/2025

7.5.4.1.3.2. Pendapatan Dana Darurat- LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pendapatan Dana Darurat-LO Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

7.5.4.1.3.3. Pendapatan Lainnya- LO

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp156.394.814,73**

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan yang diterima dari Temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS pada Tahun 2025 senilai Rp0,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp156.394.814,73 atau 100% dari Tahun 2024 yang diterima senilai Rp156.394.814,73.

7.5.4.2 Beban-LO

TA 2025	TA 2024
Rp1.046.573.449.319,42	**Rp1.085.530.328.379,53**

Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 senilai Rp1.046.573.449.319,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 114 Realisasi Beban-LO TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Beban	2025	2024
1	Beban Operasi	976.765.739.684,42	1.019.198.251.710,53
2	Beban Transfer	69.807.709.635,00	66.332.076.669,00
	JUMLAH	**1.046.573.449.319,42**	**1.085.530.328.379,53**

7.5.4.2.1 BEBAN OPERASI

TA 2025	TA 2024
Rp976.765.739.684,42	**Rp1.019.198.251.710,53**

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Rincian beban operasi dalam tabel berikut:

Tabel 115 Realisasi Beban Operasi TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Pegawai	530.620.886.199,60	530.234.313.499,01
2	Beban Barang dan Jasa	295.794.804.612,08	306.052.297.654,20
3	Beban Bunga	12.699.563.978,00	14.475.619.087,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00
5	Beban Hibah	18.800.745.167,00	46.237.349.581,00
6	Beban Bantuan Sosial	15.000.000,00	1.667.600.000,00
7	Beban Penyisihan Piutang	926.854.638,94	874.113.361,21
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	117.907.885.088,80	119.656.958.528,11
9	Beban Imbalan	0	0
	Jumlah	**976.765.739.684,42**	**1.019.198.251.710,53**

7.5.4.2.1.1. Beban Pegawai

TA 2025	TA 2024
Rp530.620.886.199,60	**Rp530.234.313.499,01**

Beban Pegawai-LO disajikan dengan basis akrual yaitu pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai Beban Pegawai-LO senilai belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan Utang Belanja Pegawai yang terjadi pada Tahun 2024.

Beban Pegawai merupakan saldo beban periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 senilai Rp530.620.886.199,60. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp386.572.700,59 atau 0,07% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai Rp530.234.313.499,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 116 Realisasi Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan	322.984.622.370,00	334.027.518.045,93
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	158.412.609.515,17	49.427.579.007,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.321.374.517,43	134.611.492.358,08
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.834.629.802,00	11.441.947.732,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	362.449.995,00	54.576.356,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	705.200.000,00	671.200.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00
	Jumlah	**530.620.886.199,60**	**530.234.313.499,01**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pegawai-LO, sebesar Rp1.801.551.150,57 merupakan pengurangan utang belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp2.361.882.500,00 dan penambahan Beban Pegawai Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN BLUD sebesar Rp560.331.349,43.

7.5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

TA 2025	TA 2024
Rp295.794.804.612,08	**Rp306.052.297.654,20**

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp295.794.804.612,08. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp10.257.493.042,12 atau 3,35% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai Rp306.052.297.654,20 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 117 Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Persediaan	103.214.006.260,80	119.513.255.574,35
2	Beban Jasa	147.804.069.150,28	124.618.019.519,85
3	Beban Pemeliharaan	8.081.167.950,00	9.357.554.507,00
4	Beban Perjalanan Dinas	36.695.561.251,00	52.563.468.053,00
	Jumlah	**295.794.804.612,08**	**306.052.297.654,20**

a. Beban Persediaan

TA 2025	TA 2024
Rp103.214.006.260,80	**Rp119.513.255.574,35**

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp103.214.006.260,80. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp16.299.249.313,55 atau 13,64% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai Rp119.513.255.574,35 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 118 Realisasi Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Barang Pakai Habis	100.329.705.381,78	114.296.441.047,12
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	8.753.008,00	81.833.969,00
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.875.547.871,02	5.134.980.558,23
4	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00
	Jumlah	**103.214.006.260,80**	**119.513.255.574,35**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Belanja Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Persediaan pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp25.293.414.170,80 dengan rincian sebagai berikut:

Pengurangan nilai dari realisasi sebesar Rp15.939.145.706,75 dengan rincian:

- Realisasi Belanja Barang untuk pembayaran utang belanja tahun lalu senilai Rp4.530.726.047,00
- Realisasi belanja barang yang merupakan kategori aset tetap senilai Rp60.600.000,00
- Realisasi belanja barang yang masih tersisa sebagai saldo persediaan senilai Rp11.347.819.659,75

Penambahan realisasi sebesar Rp41.232.559.877,55 dengan rincian:

- Hibah Barang persediaan senilai Rp6.680.388.026,74
- Realisasi Belanja Modal yang nilainya di bawah kapitalisasi (extracom) senilai Rp2.499.474.454,02
- Realisasi belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp17.226.967.432,34

b. Beban Jasa

TA 2025	TA 2024
Rp147.804.069.150,28	**Rp124.618.019.519,85**

Beban Jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp147.804.069.150,28. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp23.186.049.630,43 atau 18,61% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai Rp124.618.019.519,85.

Tabel 119 Realisasi Beban Jasa TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Jasa Kantor	62.087.316.254,28	75.621.586.052,85
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	33.520.342.649,00	27.539.721.181,00
3	Beban Sewa Peralatan Mesin	7.449.944.452,00	2.690.563.926,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	278.050.000,00	549.080.000,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	853.569.100,00	267.249.500,00
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	819.915.000,00

No	Uraian	2025	2024
7	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	2.040.167.860,00
8	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	3.147.302.352,00	28.816.000,00
9	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00
10	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	367.139.188,00	192.000.000,00
11	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.678.734.920,00	14.868.920.000,00
12	Beban Barang dan Jasa BOSP	38.421.670.235	0,00
	JUMLAH	**147.804.069.150,28**	**124.618.019.519,85**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Belanja Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Jasa pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp6.937.895.481,08 merupakan penambahan realisasi sebesar Rp8.718.309.170,49 pada dengan rincian:

- Belanja modal yang merupakan beban jasa sebesar Rp910.000,00
- Beban Jasa dari barang dan jasa BLUD sebesar Rp8.008.623.264,00
- Beban Jasa dari utang belanja 2025 sebesar Rp671.812.989,00
- Belanja jasa yang kategori belanja di bayar di muka sebesar Rp36.962.917,49

Dan pengurangan realisasi sebesar Rp2.153.163.689,41 dengan rincian:

- Belanja Jasa yang merupakan pembayaran Utang belanja sebesar Rp2.102.169.882,00
- Beban jasa dari belanja di bayar di muka tahun lalu sebesar Rp50.993.807,41.

c. Beban Pemeliharaan

TA 2025	TA 2024
Rp8.081.167.950,00	**Rp9.357.554.507,00**

Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp8.081.167.950,00. Realisasi tersebut mengalami Penurunan senilai Rp1.276.386.557,00 atau 13,64% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai Rp9.357.554.507,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.912.021.058,00	3.445.260.940,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	3.353.621.421,00	1.946.061.416,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan,irigasi dan jaringan	1.815.525.471,00	1.370.229.632,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	2.596.002.519,00
	Jumlah	**8.081.167.950,00**	**9.357.554.507,00**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp7.263.228.480,00 merupakan penambahan realisasi sebesar Rp2.281.135.500,00 dengan rincian:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang merupakan pemeliharaan sebesar Rp67.695.180,00. Belanja ini semula dianggarkan dan dibayarkan melalui Belanja Modal, namun sifat kegiatannya merupakan pemeliharaan (tidak menambah nilai aset), sehingga diakui sebagai beban pemeliharaan di LO.
2. Beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang dan

Jasa BLUD sebesar Rp1.968.909.420,00. Kegiatan pemeliharaan ini dibiayai dari dana BLUD dan tercatat dalam kelompok Belanja Barang dan Jasa, namun substansinya merupakan beban pemeliharaan sehingga diakui di LO.

3. Beban pemeliharaan Alat Kesehatan serta Gedung dan Bangunan yang berasal dari utang belanja tahun 2025 sebesar Rp244.530.900,00. Kegiatan pemeliharaan ini telah dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga bebannya diakui di LO, namun pembayarannya belum dilakukan (masih menjadi utang) sehingga belum tercatat sebagai belanja di LRA.

Dan pengurangan realisasi sebesar Rp9.544.363.980,00 dengan rincian:

1. Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang merupakan penambah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.694.190.820,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.528.894.200,00. Belanja ini memenuhi kriteria kapitalisasi karena menambah masa manfaat atau nilai aset, sehingga dicatat sebagai penambah nilai aset tetap, bukan sebagai beban pemeliharaan di LO.
2. Belanja pemeliharaan yang merupakan pembayaran utang belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.551.960,00, peralatan dan mesin sebesar Rp10.200.000,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp189.527.000,00. Belanja ini merupakan pembayaran atas kewajiban (utang) tahun sebelumnya, sehingga bebannya telah diakui pada periode sebelumnya dan tidak diakui kembali sebagai beban di LO tahun berjalan.

Dengan memperhitungkan penambahan sebesar Rp2.281.135.500,00 dan pengurangan sebesar Rp9.544.363.980,00, diperoleh selisih bersih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp7.263.228.480,00. Nilai ini menunjukkan bahwa Beban Pemeliharaan-LO lebih kecil dibandingkan Belanja Pemeliharaan-LRA, yang terutama disebabkan oleh besarnya belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi penambah nilai aset tetap.

d. Beban Perjalanan Dinas

TA 2025	TA 2024
Rp36.695.561.251,00	**Rp52.563.468.053,00**

Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp36.695.561.251,00 yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp36.546.911.822 dan perjalanan dinas luar negeri senilai Rp148.649.429 Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp15.867.906.802 atau 30,19% dari realisasi TA 2024 senilai Rp52.563.468.053,00.

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp551.576.000,00 merupakan utang belanja perjalanan dinas periode tahun sebelumnya pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp252.280.000,00
- Dinas Sosial, PMD senilai Rp20.800.000,00
- Dinas Kesehatan senilai Rp278.496.000,00

7.5.4.2.1.3. Beban Bunga

TA 2025	TA 2025
Rp12.699.563.978,00	**Rp14.475.619.087,00**

Beban Bunga Kabupaten Takalar Tahun 2025 senilai Rp12.699.563.978,00 dan 2024 senilai Rp14.475.619.087,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2025.

7.5.4.2.1.4. Beban Subsidi

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Beban Subsidi Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00.

7.5.4.2.1.5. Beban Hibah

TA 2025	TA 2024
Rp18.800.745.167,00	**Rp46.237.349.581,00**

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp18.800.745.167 yang mengalami penurunan senilai Rp27.436.604.414 atau 59,34% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp46.237.349.581,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 121 Realisasi Beban Hibah TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	263.260.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.740.535.167,00	42.919.413.581,00
3	Beban Hibah Dana BOS	0,00	2.060.080.000,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.109.868.000,00	994.596.000,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	1.950.342.000,00	0,00
	Jumlah	**18.800.745.167,00**	**46.237.349.581,00**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Belanja Hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Hibah pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp257.985.000,00 merupakan pembayaran utang belanja hibah periode tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Hibah di Dinas Pendidikan untuk membayar Utang Belanja Hibah Rp230.927.000,00
- Belanja Hibah Dana BOSP-BOS (PAUD) Negeri berupa Peralatan dan Mesin (seharusnya dianggarkan Belanja Modal peralatan dan Mesin BOS) senilai Rp27.058.000,00

7.5.4.2.1.6. Beban Bantuan Sosial

TA 2025	TA 2024
Rp15.000.000,00	**Rp1.667.600.000,00**

Beban Bantuan Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2025 senilai Rp15.000.000,00 merupakan belanja pemberian bantuan dana sosial yang direncanakan kepada keluarga dan Tahun 2024 senilai Rp1.667.600.000,00 merupakan pemberian bantuan dana biaya operasional peserta didik dan tambahan penghasilan tutor program kesetaraan pada 46 lembaga PKBM/SKB senilai Rp759.000.000,00, pemberian bantuan dana tambahan penghasilan tenaga pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini senilai Rp873.600.000,00, bantuan sosial uang bagi pemenang lomba dan pameran kreatifitas PAUD dalam meningkatkan PAUD Holistik Integratif dan penilaian kinerja penurunan stunting senilai Rp35.000.000,00.

7.5.4.2.1.7. Beban Penyisihan Piutang

TA 2025	TA 2024
Rp926.854.638,94	**Rp874.113.361,21**

Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Takalar Tahun 2025 sebesar Rp926.854.638,94. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp52.741.277,73 atau 6,03% dibandingkan realisasi Tahun 2024 yang sebesar Rp874.113.361,21.

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban yang dibentuk untuk memperhitungkan kemungkinan tidak tertagihnya piutang daerah. Kenaikan Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2025 disebabkan oleh adanya penambahan piutang, khususnya piutang pajak, sehingga penyisihan piutang menjadi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

7.5.4.2.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2025	TA 2024
Rp117.907.885.088,80	**Rp119.656.958.528,11**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 senilai Rp117.907.885.088,80. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.749.073.439,31 atau -1,46% dari realisasi TA 2024 yang mencapai nilai Rp119.656.958.528,11. Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi dari tahun sebelumnya karena reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya akibat penghapusan dan penyerahan beberapa aset, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.460.862.424,16	36.147.219.149,06
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.048.200.181,89	20.584.266.123,61
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	58.985.430.792,53	60.760.609.715,22
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	29.210.400,00	861.000,00
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	514.733.800,00	294.555.050,00
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.869.447.490,22	1.869.447.490,22
	Jumlah	**117.907.885.088,80**	**119.656.958.528,11**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp117.907.885.088,80, lebih rendah dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp119.656.958.528,11. Dengan demikian, terdapat penurunan sebesar Rp1.749.073.439,31 atau sekitar 1,46% dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini terjadi meskipun nilai aset tetap secara keseluruhan mengalami peningkatan pada periode berjalan. Dalam metode penyusutan, beban penyusutan dihitung dengan membagi nilai aset yang masih dapat disusutkan (nilai buku) secara merata sepanjang sisa masa manfaat yang tersisa. Apabila sisa masa manfaat diperpanjang, maka jumlah periode penyusutan menjadi lebih besar, sehingga beban penyusutan yang dibebankan setiap tahun menjadi lebih kecil meskipun nilai aset bertambah.

Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya koreksi sisa masa manfaat aset tetap, khususnya pada kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Koreksi mencakup penambahan maupun pengurangan sisa masa manfaat, namun koreksi penambahan masa manfaat lebih dominan dibandingkan koreksi pengurangan. Dampak pengurangan beban penyusutan akibat perpanjangan masa manfaat tersebut lebih besar daripada tambahan beban yang berasal dari aset baru, sehingga secara akumulatif beban penyusutan Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024.

7.5.4.2.1.9. Beban Imbalan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Beban Imbalan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00.

7.5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

TA 2025	TA 2024
Rp69.807.709.635,00	**Rp66.332.076.669,00**

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 terealisasi senilai Rp69.807.709.635,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai

Rp3.475.632.966,00 atau 5,24% dari realisasi TA 2024 senilai Rp66.332.076.669,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 123 Realisasi Beban Transfer TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Beban Bagi Hasil	2.952.978.128,00	2.999.991.000,00
2	Beban Bantuan Keuangan	66.854.731.507,00	63.332.085.669,00
	Jumlah	**69.807.709.635,00**	**66.332.076.669,00**

Terdapat perbedaan nilai penyajian akun Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Beban Transfer pada Laporan Operasional (LO), sebesar Rp76.268.700.000,00 merupakan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (tidak masuk dalam pelaporan operasional daerah) pada LRA.

7.5.4.2.2.1.Beban Bagi Hasil

TA 2025	TA 2024
Rp2.952.978.128,00	**Rp2.999.991.000,00**

Beban Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.952.978.128,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp47.012.872,00 atau 1,57% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp2.999.991.000,00. Penurunan Beban Bagi Hasil TA 2025 sebesar 1,57% disebabkan oleh penurunan realisasi pendapatan khususnya dari Pendapatan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

7.5.4.2.2.2.Beban Bantuan Keuangan

TA 2025	TA 2024
Rp66.854.731.507,00	**Rp63.332.085.669,00**

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp66.854.731.507,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.522.645.838,00 atau 5,56% dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp63.332.085.669,00.

Beban Bantuan Keuangan adalah beban berupa transfer uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pemerintah desa, mengalami kenaikan disebabkan Peningkatan realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) (Tambahkan penjelasan Selisih LRA dan LO)

7.5.4.3. SURPLUS NON OPERASIONAL

TA 2025	TA 2024
Rp6.551.516,41	**Rp3.450.000,00**

Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 terealisasi senilai Rp6.551.516,41 sedangkan pada TA 2024 senilai Rp3.450.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 jumlah Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kenaikan senilai Rp3.101.516,41 atau 89,9%. Uraian rincian Surplus Non Operasional sebagai berikut :

7.5.4.3.1. Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 dan 2025 senilai Rp0,00.

7.5.4.3.2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 dan 2025 senilai Rp0,00.

7.5.4.3.3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	TA 2025	TA 2024
	Rp6.551.516,41	Rp3.450.000,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 terealisasi senilai Rp6.551.516,41 sedangkan pada TA 2024 senilai Rp3.450.000,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 jumlah Surplus Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami kenaikan senilai Rp3.101.516,41 atau 89,9%. Uraian rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebagai berikut :

- Penyesuaian Penyisihan Piutang Hotel senilai Rp6.027,41
- Penyesuaian Piutang Pajak Parkir senilai Rp227.535,00
- Penyesuaian kas yang dibatasi penggunaannya 2025 senilai Rp2.000.000,00
- Penambahan kas yang dibatasi penggunaannya senilai Rp4.317.954,00.

7.5.4.4. DEFISIT NON OPERASIONAL	TA 2025	TA 2024
	Rp172.843.707,30	Rp1.760.633.072,08

Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 terealisasi senilai Rp172.843.707,30 yang merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sedangkan pada TA 2024 senilai Rp1.760.633.072,08. Jika dibandingkan dengan TA 2024 Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami penurunan senilai Rp1.587.789.364,78 atau 90,18%, dengan rincian sebagai berikut:

7.5.4.4.1. Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

7.5.4.4.2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	TA 2025	TA 2024
	Rp0,00	Rp0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

7.5.4.4.3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	TA 2025	TA 2024
	Rp172.843.707,30	Rp1.760.633.072,08

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 terealisasi senilai Rp172.843.707,30 yang merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sedangkan pada TA 2024 senilai Rp1.760.633.072,08. Jika dibandingkan dengan TA 2024 Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar mengalami penurunan senilai Rp1.587.789.364,78 atau 90,18%.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON PERASIONAL	TA 2025	TA 2024
	(Rp 166.292.190,89)	(Rp1.757.183.072,08)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 terealisasi senilai (Rp166.292.190,89) sedangkan pada TA 2024 senilai (Rp1.757.183.072,08).

Tabel 124 Tabel Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	% Kenaikan/ Penurunan
1.	Surplus Non Operasional	6.551.516,41	3.450.000,00	89,90
2.	Defisit Non Operasional	-172.843.707,30	-1.760.633.072,08	- 90,18
	Jumlah	-166.292.190,89	-1.757.183.072,08	- 90,54

7.5.4.5. PENDAPATAN LUAR BIASA

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Pendapatan Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 dan 2024 senilai Rp0,00.

7.5.4.6. BEBAN LUAR BIASA

TA 2025	TA 2024
Rp634.620.320,00	**Rp14.044.574,00**

Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Takalar TA 2025 terealisasi senilai Rp634.620.320,00 mengalami kenaikan 4.418,62% dari realisasi TA 2024 senilai Rp14.044.574,00

Rincian Realisasi Beban Luar Biasa tahun 2025 antara lain;

1. Pembayaran Penerima Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Pembuatan Badan Hukum Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2434/SJ Tentang Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih senilai Rp275.000.000,00
2. Pembayaran Penerima Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk sarana dan prasarana pendukung lainya untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Takalar (ANDALALIN) Dinas Perhubungan, Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2025 senilai Rp40.075.000,00
3. Pembayaran Kepada Penerima Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Takalar (UKL/UPL) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2025 senilai Rp45.450.000,00
4. Potongan langsung DAU atas sisa DAK non Fisik yang ada di RKUD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 398 TAhun 2025 senilai Rp260.474.680,00 dan Rp13.620.640,00

SURPLUS/DEFISIT - LO

TA 2025	TA 2024
Rp80.986.718.728,52	**Rp17.920.877.926,03**

Surplus/Defisit LO Kabupaten Takalar TA 2025 adalah surplus senilai Rp80.986.718.728,52 sedangkan pada TA 2024 surplus senilai Rp17.920.877.926,03. Jika dibandingkan dengan TA 2024 surplus tahun 2025 mengalami kenaikan Rp63.065.840.802,49 atau 351,91%.

7.5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

7.5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	TA 2025	TA 2024
	Rp169.218.640.805,58	**Rp138.666.998.387,40**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp169.218.640.805,58 dan Rp138.666.998.387,40 yang terdiri dari:

Tabel 125 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	1.192.614.384.900,95	1.180.001.596.491,33
2	Arus Kas Keluar	1.023.395.744.095,37	1.041.334.598.103,93
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**169.218.640.805,58**	**138.666.998.387,40**

7.5.5.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2025 dan 2024 dari aktivitas operasi adalah senilai Rp1.192.614.384.900,95 dan senilai Rp1.180.001.596.491,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 126 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	51.722.570.240,00	26.191.140.591,50
2	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	2.981.016.909,00	2.295.688.340,00
3	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekaayaan Daerah yang dipisahkan	10.316.849.525,00	10.097.366.422,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	109.767.657.882,95	107.232.167.090,10
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	18.247.465.700,00	12.235.247.000,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	666.777.754.612,00	634.554.049.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi - Fisik	8.423.598.807,00	74.864.555.022,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	172.189.372.220,00	161.942.840.727,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	14.085.609.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
11	Penerimaan Dana Keistimewaan	0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	76.268.700.000,00	90.651.640.000,00
13	Penerimaan Pendapatan	61.833.790.005,00	54.160.821.484,00

No	Uraian	2025	2024
	Bagi Hasil dari Provinsi		
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	5.619.686.000,00
15	Penerimaan Hibah	0,00	0,00
16	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya	0,00	156.394.814,73
Jumlah		**1.192.614.384.900,95**	**1.180.001.596.491,33**

Berdasarkan tabel di atas, beberapa Perbandingan arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 menunjukkan perubahan pada beberapa jenis penerimaan, sebagai berikut:

- Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup drastis sebesar Rp25.531.429.648,50 (97.48%) dari Rp26.191.140.591,50 menjadi Rp51.722.570.240,00, mencerminkan peningkatan potensi perpajakan daerah dan efektivitas pemungutan pajak.
- Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat sebesar Rp32.223.705.612,00 (5.08%), yang mencerminkan penyesuaian alokasi dari pemerintah pusat.
- Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami penurunan tajam sebesar Rp66.440.956.215,00 (-88.75%) dari Rp74.864.555.022,00 menjadi Rp8.423.598.807,00, mencerminkan perubahan kebijakan alokasi DAK Fisik dari pemerintah pusat.
- Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp14.085.609.000,00 merupakan penerimaan baru yang tidak ada pada TA 2024, mencerminkan keberhasilan daerah dalam memenuhi kriteria pemberian insentif.
- Penerimaan Dana Desa menurun sebesar Rp14.382.940.000,00 (-15.87%) sesuai dengan penyesuaian kebijakan anggaran transfer dana desa dari pemerintah pusat.

7.5.5.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2025 dan 2024 untuk aktivitas operasi senilai Rp1.023.395.744.095,37 dan Rp1.041.334.598.103,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Belanja Pegawai	532.422.437.350,17	526.206.586.954,93
2	Belanja Barang	312.488.982.645,20	311.105.460.162,00
3	Belanja Bunga	12.699.563.978,00	14.475.619.087,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	19.058.730.167,00	43.343.891.231,00
6	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000,00	1.667.600.000,00
7	Belanja Tidak Terduga	634.620.320,00	0,00
8	Belanja Bagi Hasil Pajak	2.952.978.128,00	2.999.991.000,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	63.301.380.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
11	Bantuan Keuangan ke Desa	143.123.431.507,00	78.234.069.669,00
	Jumlah	**1.023.395.744.095,37**	**1.041.334.598.103,93**

Berdasarkan tabel di atas, beberapa perubahan signifikan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp6.215.850.395,24 (1.18%) yang mencerminkan penyesuaian gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sesuai kebijakan pemerintah pusat.

- Belanja Hibah menurun signifikan sebesar Rp24.285.161.064,00 (-56.03%) dari Rp43.343.891.231,00 menjadi Rp19.058.730.167,00 sesuai dengan perubahan prioritas belanja daerah.
- Bantuan Keuangan ke Desa meningkat drastis sebesar Rp64.889.361.838,00 (82.94%) dari Rp78.234.069.669,00 menjadi Rp143.123.431.507,00, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan dukungan keuangan kepada pemerintahan desa.
- Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota pada TA 2025 nihil dibandingkan TA 2024 sebesar Rp63.301.380.000,00, yang berdampak positif terhadap efisiensi pengeluaran operasional.

7.5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	TA 2025	TA 2024
	(Rp63.712.665.159,36)	**(Rp133.668.633.456,00)**

Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Takalar kepada masyarakat di masa yang akan datang. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi aset Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 dan 2024 senilai (Rp63.712.665.159,36) dan (Rp133.668.633.456,00).
Terjadi penurunan defisit arus kas investasi yang signifikan, yaitu sebesar Rp69.955.968.296,64 atau -52.34% lebih rendah dibandingkan TA 2024. Hal ini mencerminkan berkurangnya intensitas belanja modal pada TA 2025 akibat penyesuaian anggaran, khususnya pada perolehan gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 128 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Arus Kas Masuk	1.929.859.600,00	48.999.000,00
2	Arus Kas Keluar	65.642.524.759,36	133.717.632.456,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		**-63.712.665.159,36**	**-133.668.633.456,00**

7.5.5.2.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp1.929.859.600,00 dan Rp48.999.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Bangunan	0,00	0,00
6	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Penjualan Aset Lainnya	1.929.859.600,00	48.999.000,00
8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**1.929.859.600,00**	**48.999.000,00**

Arus kas investasi diterima dari Penjualan Aset Lainnya berupa kendaraan dinas roda dua, roda empat dan *scrap* yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

7.5.5.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2025 dan 2024 untuk aktivitas Investasi Aset senilai Rp65.642.524.759,36 dan Rp133.717.632.456,00 yang terdiri dari:

Tabel 130 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	415.341.000,00	2.138.361.440,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	24.610.634.185,00	34.608.590.475,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	17.152.877.619,00	46.263.878.562,00
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Bangunan	21.930.774.355,36	50.388.636.979,00
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	113.397.600,00	199.585.000,00
7	Perolehan Aset Lainnya	1.419.500.000,00	118.580.000,00
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Jumlah	**65.642.524.759,36**	**133.717.632.456,00**

Penurunan signifikan pada komponen-komponen arus keluar investasi tersebut mencerminkan perubahan prioritas belanja modal daerah, di mana pada TA 2025 pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung operasional pemerintahan daripada pembangunan fisik skala besar sebagaimana dilakukan pada TA 2024

7.5.5.3	TA 2025	TA 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**(Rp38.889.778.488,00)**	**(Rp19.876.565.751,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan kas dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Takalar dan klaim Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Tidak terdapat Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 adapun arus kas keluar senilai (Rp38.889.778.488,00) untuk pembayaran percepatan pengembalian pokok utang pinjaman PEN dan arus kas bersih TA 2024 senilai (Rp19.876.565.751,00).

7.5.5.3.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit. Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2025 dan 2024 dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

7.5.5.3.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan penggunaan surplus. Arus kas keluar yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2025 dan 2024 untuk Aktivitas Pendanaan masing-masing senilai Rp38.889.778.488,00 dan Rp19.876.565.751,00

7.5.5.4 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	TA 2025	TA 2024
	Rp160.777,00	**Rp17.270.268,75**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Kas bersih yang digunakan untuk Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Takalar pada TA 2025 dan 2024 senilai Rp160.777,00 dan Rp17.270.268,75 yang merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penerimaan kembali Kas Bendahara Pengeluaran. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran PFK terdiri dari penerimaan dan pembayaran atas Iuran Wajib Pegawai (IWP), Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum), Pajak Penghasilan (PPh) 21, Pajak Penghasilan (PPh) 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa.

Tabel 131 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	**Arus Kas Masuk**		
	a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	58.346.659.273,00	75.249.194.198,74
	b. Penerimaan (Pendapatan) Dana BOS	0,00	0,00
	Jumlah	**58.346.659.273,00**	**75.249.194.198,74**
2	**Arus Kas Keluar**		
	a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	58.346.498.496,00	75.231.923.929,99
	b. Pengeluaran (Belanja) Dana BOS	0,00	0,00
	Jumlah	**58.346.498.496,00**	**75.231.923.929,99**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**160.777,00**	**17.270.268,75**

Rincian mutasi Utang PFK selama Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo awal Utang PFK per 1 Januari 2025 (saldo akhir Tahun 2024) tercatat sebesar Rp36.314.863,69.
2. Sepanjang Tahun 2025, atas saldo awal tersebut telah dilakukan penyetoran/pelunasan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.206.081,00, sehingga sisa Utang PFK Tahun 2024 yang belum disetorkan adalah sebesar Rp33.108.782,69.
3. Pada Tahun 2025 terdapat penambahan Utang PFK baru sebesar Rp3.366.858,00, yang berasal dari pungutan/potongan Tahun 2025 yang belum disetorkan sampai dengan tanggal pelaporan.
4. Dengan demikian, saldo akhir Utang PFK per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.475.640,69 (Rp36.314.863,69 - Rp3.206.081,00 + Rp3.366.858,00).

7.5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan kas. Arus kas masuk yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2025 dan 2024 dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp58.346.659.273,00 dan Rp75.249.194.198,74.

7.5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris mencerminkan pengeluaran kas. Arus kas keluar Pemerintah Kabupaten Takalar selama TA 2025 dan 2024 atas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp58.346.498.496,00 dan Rp75.231.923.929,99

KENAIKAN/	TA 2025	TA 2024
(PENURUNAN) KAS	**Rp66.616.357.935,22**	**(Rp14.860.930.550,85)**

Kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Non Anggaran. Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih selama Tahun 2025 senilai Rp66.616.357.935,22 dan Tahun 2024 senilai (Rp14.860.930.550,85).

SALDO AWAL KAS	TA 2025	TA 2024
	Rp9.111.864.940,61	**Rp23.972.795.491,46**

Saldo Awal Kas di Bendahara Umum Daerah sesuai dengan data Neraca Tahun 2025 senilai Rp9.111.864.940,61 dan Tahun 2024 senilai Rp23.972.795.491,46

Saldo Akhir Kas	TA 2025	TA 2024
	Rp75.728.222.875,83	**Rp9.111.864.940,61**

Saldo akhir kas di BUD Tahun 2025 senilai Rp75.728.222.875,83 merupakan penjumlahan Kenaikan Kas senilai Rp66.616.357.935,22 dengan Saldo awal kas BUD senilai Rp9.111.864.940,61 Saldo akhir kas di BUD terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya-Dana BOS, Kas di Bendahara JKN, dan Kas di BLUD. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 132 Saldo akhir kas TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024
1	Kas di Kas Daerah	73.924.945.360,21	3.622.207.306,36
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.701.097,00	23.829.184,07
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
4	Kas Lainnya-Dana BOS	561.221.339,73	285.158.798,73
5	Kas di Bendahara JKN	667.730.099,00	407.500.347,00
6	Kas di BLUD	565.624.979,89	4.773.169.304,45
7	Kas Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	**75.728.222.875,83**	**9.111.864.940,61**

7.5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2025. Laporan Perubahan ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas Awal 2025 senilai Rp1.604.796.430.708,98
2. Surplus/Defisit-LO senilai Rp80.986.718.728,52 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2025; dan
3. Adanya dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, merupakan transaksi penyesuaian akun neraca yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 dilakukan penyesuaian.

Tabel 133 Rincian Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	**Ekuitas Awal**	**1.604.796.430.708,98**	**1.577.047.163.819,12**	**27.749.266.889,86**
2.	**Surplus/Defisit-LO**	**80.986.718.728,52**	**17.920.877.926,03**	**63.065.840.802,49**
3.	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**	**19.696.848.000,54**	**9.828.388.963,83**	**9.868.459.036,71**
	Koreksi Saldo Awal Kas	0	0	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0,00
	Koreksi Nilai Piutang	3.000,00	0	3.000,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	0	0	0,00
	Koreksi Nilai Utang Belanja	45.085.870,40	-3.563.730.178,20	3.608.816.048,60
	Koreksi Nilai Aset Tetap	7.404.739.036,00	3.374.569.000,00	4.030.170.036,00
	Koreksi Nilai Aset Lainnya	0	0	0,00
	Koreksi Investasi Non Permanen	0	0	0,00
	Koreksi Nilai Penyisihan Investasi	0	0	0,00
	Koreksi Nilai Penyusutan	13.013.979.189,14	13.548.597.252,87	-534.618.063,73
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0,00
	Koreksi Investasi Permanen	-766.959.095,00	-3.531.047.110,84	2.764.088.015,84
	Koreksi Saldo Awal Kas Dana Kapitasi	0	0	0,00
	Lain-lain	0	0	0,00
4.	**Ekuitas Akhir**	**1.705.479.997.438,04**	**1.604.796.430.708,98**	**100.683.566.729,06**

Saldo ekuitas akhir Pemerintah Kab. Takalar per 31 Desember 2025 senilai Rp1.705.830.709.297,00. Saldo ekuitas akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari:

7.5.6.1. Ekuitas Awal

TA 2025	TA 2024
Rp1.604.796.430.708,98	**Rp1.577.047.163.819,12**

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Takalar per 1 Januari 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp1.604.796.430.708,98 dan Rp1.577.047.163.819,12.

7.5.6.2. Surplus/Defisit-LO

TA 2025	TA 2024
Rp80.986.718.728,52	**Rp17.920.877.926,03**

Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 senilai Rp80.986.718.728,52 dan Rp17.920.877.926,03 merupakan surplus/defisit dari Operasi dan jumlah surplus defisit dari Kegiatan Non Operasional.

7.5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

TA 2025	TA 2024
Rp19.696.848.000,54	**Rp9.828.388.963,83**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.696.848.000,54, mengalami kenaikan sebesar Rp9.868.459.036,71 atau 100,41% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.828.388.963,83.
Saldo tersebut merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan periode sebelumnya dan/atau dampak penerapan kebijakan akuntansi yang memengaruhi ekuitas secara langsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

7.5.6.3.1. Koreksi Nilai Piutang

TA 2025	TA 2024
Rp3.000,00	**Rp0,00**

Koreksi Nilai Piutang pada Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dan 2024 Rp3.000,00 dan Rp0,00.

7.5.6.3.2. Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
(Rp766.959.095,00)	**(Rp3.531.047.110,84)**

Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 senilai (Rp766.959.095,00) dan Tahun 2024 senilai (Rp3.531.047.110,84).

7.5.6.3.3. Koreksi Ekuitas-Aset Tetap

TA 2025	TA 2024
Rp20.418.718.225,14	**Rp16.923.166.252,87**

Koreksi Ekuitas- Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 senilai Rp20.418.718.225,14 dan Tahun 2024 senilai Rp16.923.166.252,87.

7.5.6.3.4. Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Koreksi Ekuitas-dana Cadangan pada Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00 dan Rp.0,00.

7.5.6.3.5. Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya pada Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00 dan Rp.0,00.

7.5.6.3.6. Koreksi Ekuitas-Properti Investasi

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Koreksi Ekuitas- Properti Investasi pada Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00 dan Rp.0,00.

7.5.6.3.7. Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek

TA 2025	TA 2024
Rp45.085.870,40	**(Rp3.563.730.178,20)**

Koreksi Ekuitas- Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2025 senilai Rp45.085.870,40 adalah koreksi saldo awal utang lebih catat pada Dinas Kesehatan dan Tahun 2024 senilai (Rp3.563.730.178,20).

7.5.6.3.8. Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang

TA 2025	TA 2024
Rp0,00	**Rp0,00**

Koreksi Ekuitas- Kewajiban Jangka Panjang pada Pemerintah Kab. Takalar Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp0,00 dan Rp.0,00.

Ekuitas Akhir

TA 2025	TA 2024
Rp1.705.479.997.438,04	**Rp1.604.796.430.708,98**

Ekuitas Akhir merupakan jumlah Ekuitas Awal Tahun 2025 ditambah Surplus/Defisit LO ditambah/(dikurangi) koreksi berdampak ke Ekuitas senilai Rp1.705.830.709.297,00. Jumlah tersebut sama dengan jumlah Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2025 senilai Rp1.705.830.709.297,00.

7.6 PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah tersebut didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah *(strategic apex),* Sekretaris Daerah *(middle line),* Dinas Daerah *(operating core),* Badan/fungsi penunjang *(technostructure),* dan staf pendukung *(supporting staft).*

Pembentukan organisasi Pemerintah Daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Tanakeke, serta Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan penyesuaian sesuai dengan aturan yang baru tersebut. Penataan organisasi melalui proses pemetaan urusan wajib dan urusan pilihan melalui proses verifikasi dan validasi oleh masing-masing kementerian urusan pemerintahan dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur. Dari hasil proses verifikasi dan validasi data akan menentukan tipe dari organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Takalar Peraturan Bupati Takalar Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keputusan Bupati Takalar Nomor 534 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Keputusan Bupati Takalar Nomor 148 Tahun 2024 Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Besaran Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan tujuan meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara tunai dan mengurangi penggunaan UP.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi telah menerbitkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Daerah yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tentang properti investasi.

Informasi terkait penanganan kasus hukum Pemerintah Daerah Kab. Takalar mencakup Sengketa Perdata aset eks pasar Tala-Tala Kecamatan Galesong antara Pemerintah Daerah Kab. Takalar dengan masyarakat yang menggugat yang dimenangkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Takalar, sementara dalam tahap eksekusi.

7.7 PENUTUP

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan senilai Rp1.194.544.244.500,95 atau mengalami peningkatan senilai Rp14.493.649.009,62 jika dibandingkan dengan Pendapatan TA 2024 senilai Rp1.180.050.595.491,33 atau 1,23%, realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp176.717.954.156,95 dari jumlah anggaran senilai Rp185.918.476.414,00 atau 95,05%, Dana Perimbangan senilai Rp865.638.191.339,00 dari jumlah anggaran senilai Rp854.762.962.000,00 atau 101,27%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–lainnya senilai Rp90.354.309.000,00 dari jumlah yang dianggarkan senilai Rp90.354.309.000,00 atau 100,00%. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi senilai Rp61.833.790.005,00 dari jumlah anggaran senilai Rp90.720.720.768,00 atau 68,16%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah senilai Rp0,00. Jadi secara total jumlah realisasi Pendapatan senilai Rp1.194.544.244.500,95 dari jumlah anggaran Rp1.221.756.468.182,00 atau 97,77%.

Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2025 senilai Rp1.089.038.268.854,73 mengalami penurunan senilai Rp86.013.961.705,20 atau 7,32% dari realisasi TA 2024 senilai Rp1.175.052.230.559,93. Realisasi Belanja Operasi senilai Rp876.684.714.140,37 dari jumlah anggaran Rp958.865.030.489,27 atau 91,43%.

Realisasi Belanja Modal senilai Rp65.642.524.759,36 dari jumlah anggaran senilai Rp81.969.901.917,73 atau 80,08%. Sedangkan realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp634.620.320,00 dari jumlah anggaran senilai Rp4.400.000.000,00 atau 14,42% serta Belanja Transfer senilai Rp146.076.409.635,00 dari jumlah anggaran senilai Rp146.310.603.903,00 atau 99,84%.

Total Aset per 31 Desember 2025 senilai Rp1.913.276.571.884,64, jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 senilai Rp1.864.017.087.392,84 mengalami peningkatan senilai Rp49.259.484.491,80 atau 2,64%. Total Kewajiban senilai Rp207.796.574.446,60, jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu senilai Rp259.220.656.683,86 mengalami penurunan senilai Rp51.424.082.237,26 atau 19,84%. Ekuitas senilai Rp1.705.479.997.438,04, jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu senilai Rp1.604.796.430.708,98 mengalami kenaikan senilai Rp100.683.566.729,06 atau 6,27%.

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 senilai Rp75.691.747.235,14 mengalami kenaikan senilai Rp66.616.197.158,22, jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp9.075.550.076,92 sedangkan Surplus (Defisit) LO TA 2025 senilai Rp80.986.718.728,52 atau mengalami kenaikan senilai Rp63.065.840.802,49, jika dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp17.920.877.926,03.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Takalar atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai selama TA 2025 sebagaimana telah kami uraikan di atas.

BUPATI TAKALAR

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KAS DI KAS DAERAH
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo	Keterangan
1	PT Bank BRI Cab.Takalar	0250.01.000248-30.4	142,738.00	Pemda Kab. Takalar
		Saldo	**142,738.00**	
2	PT Bank BNI Capem Takalar	0083193028	-	Pemda Kab. Takalar
		saldo	**-**	
3	PT Bank Sul - Sel bar	20.100.0001.8	13,754.00	Penampungan Pemotongan Gaji
4	PT Bank Sul - Sel bar	20.100.0003.4	-	Penampungan Pemotongan Non Gaji
5	PT Bank Sul - Sel bar	20.100.0004.2	7,513,670,222.00	Kasda
		Saldo	**7,513,683,976.00**	
6	PT Bank Sul - Sel bar	20.100.0931.7	66,411,118,646.21	RKUD
		Saldo	**66,411,118,646.21**	
Jumlah Keseluruhan Per 31 Desember 2025			**73,924,945,360.21**	

Catatan :

Lampiran 1a

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KAS BENDAHARA PENGELUARAN
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO	SKPD	SALDO AWAL	SETORAN SALDO AWAL	SISA SALDO AWAL	KAS TUNAI	KAS BANK	JUMLAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5=3-4*	*6*	*7*	*8=5+6+7*	*9*
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Rp 3,723,074.00	Rp 3,723,074.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Sekretariat Daerah	Rp 16,800,000.00	Rp 16,800,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Sekretariat DPRD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,160,616.00	Rp 6,160,616.00	
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,518,151.00	Rp 2,518,151.00	
5	Kecamatan Mappakasunggu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Kecamatan Pattallassang	Rp 27.00	Rp 27.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Kecamatan Sanrobone	Rp 0.29	Rp 0.29	Rp -	Rp 22,330.00	Rp -	Rp 22,330.00	
9	Kecamatan Mangarabombang	Rp 3,206,081.00	Rp 3,206,081.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Kantor RSUD HP DG. Ngalle	Rp 1.78	Rp 1.78	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
TOTAL		**Rp 23,829,184.07**	**Rp 23,829,184.07**	**Rp -**	**Rp 22,330.00**	**Rp 8,678,767.00**	**Rp 8,701,097.00**	

Lampiran 1b

Kas BLUD Tahun 2025 dan 2024
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No.	REKENING		PER 31-12-2025	PER 31-12-2024
1	BRI BLUD	25001001333306	0.00	0.00
2	BNI BLUD	01418210652	0.00	0.00
3	Bank SulSelBar BLUD	021-003-000022222-8	451,084,989.89	4,247,462,015.45
4	Bank SulSelBar BK BLUD	021-003-000033333-0	2,000,000.00	58,004,311.00
5	Bank BRI BP	025001000382302	0.00	0.00
6	Bank BPD BP	021.003.000011111.6	27,395,734.00	264,543,621.00
7	Kas Tunai Bendahara Pengeluaran BLUD		0.00	0.00
8	Kas Tunai Bendahara Penerimaan BLUD		27,922,200.00	191,768,700.00
9	Bank BNI BP	0686104497	57,222,056.00	11,390,657.00
10		**Jumlah**	**565,624,979.89**	**4,773,169,304.45**
11		Saldo PFK	36,475,640.69	33,108,782.69
12	**SiLPA (10-11)**		**529,149,339.20**	**4,740,060,521.76**

Lampiran 1c

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD - SMP

KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2025

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.03.02	40301718	UPT SD NEGERI 1 CENTRE PATTALLASSANG	5,755,578.00	613,800,000.00	22,500,000.00	636,300,000.00		590,854,500.00	45,445,500.00	636,300,000.00		1,881,700.00		7,637,278.00
08.01.03.03	40301536	UPT SDN 2 PATTALLASSANG	8,800.00	84,600,000.00		84,600,000.00		83,500,000.00	1,100,000.00	84,600,000.00		6,733,700.00		6,742,500.00
08.01.03.04	40301483	UPT SDN 3 PATTALLASSANG	91,059.00	56,700,000.00	22,500,000.00	79,200,000.00		76,260,000.00	2,940,000.00	79,200,000.00				91,059.00
08.01.03.05	40301478	UPT SD NEGERI 4 SOMPU	500,000.00	122,400,000.00		122,400,000.00		119,300,000.00	3,100,000.00	122,400,000.00		579,700.00		1,079,700.00
08.01.03.06	40301500	UPT SD NEGERI 5 BALLO	133.00	163,800,000.00	22,500,000.00	186,300,000.00		176,216,000.00	10,084,000.00	186,300,000.00				133.00
08.01.03.07	40301492	UPT SD NEGERI 6 BILACADDI	109,918.00	117,000,000.00	22,500,000.00	139,500,000.00		139,500,000.00	-	139,500,000.00				109,918.00
08.01.03.08	40301599	UPT SD NEGERI 7 TALA	-	153,900,000.00		153,900,000.00		140,000,000.00	13,900,000.00	153,900,000.00		530,100.00		530,100.00
08.01.03.09	40301588	UPT SD NEGERI 8 TAMASONGO	796,681.00	57,600,000.00		57,600,000.00		57,600,000.00	-	57,600,000.00		86,200.00		882,881.00
08.01.03.10	40308431	UPT SDN 9 BONE-BONE	93,354.00	121,500,000.00		121,500,000.00		111,010,500.00	10,489,500.00	121,500,000.00		251,100.00		344,454.00
08.01.03.11	40301717	UPT SD NEGERI 10 PAPPA	6,338.00	40,500,000.00		40,500,000.00		37,020,000.00	3,480,000.00	40,500,000.00		139,500.00		145,838.00
08.01.03.12	40301524	UPT SD NEGERI 11 BONTOSANRA	1,500,000.00	156,600,000.00	22,500,000.00	179,100,000.00		159,364,000.00	19,736,000.00	179,100,000.00		458,800.00		1,958,800.00
08.01.03.13	40308384	UPT SD NEGERI 17 PASULEYANG	1,955,004.00	89,100,000.00	22,500,000.00	111,600,000.00		98,540,000.00	13,060,000.00	111,600,000.00		300,700.00		2,255,704.00
08.01.03.14	40308405	UPT SD NEGERI 45 BIRINGBALANG	6,428,440.00	215,100,000.00		215,100,000.00		171,345,000.00	43,755,000.00	215,100,000.00		3,469,485.00		9,897,925.00
08.01.03.15	40301504	UPT SD NEGERI 46 SALAKA	1,289,649.00	83,700,000.00		83,700,000.00		83,700,000.00	-	83,700,000.00		298,100.00		1,587,749.00
08.01.03.16	40301503	UPT SD NEGERI 47 ALLUKA	147,778.00	76,500,000.00		76,500,000.00		70,500,000.00	6,000,000.00	76,500,000.00		217,000.00		364,778.00
08.01.03.17	40301697	UPT SD NEGERI 101 INPRES PATTALLASSANG	-	140,400,000.00	22,500,000.00	162,900,000.00		162,100,000.00	800,000.00	162,900,000.00		483,650.00		483,650.00
08.01.03.18	40301544	UPT SD NEGERI 103 INPRES SOMPU	123,650.00	75,600,000.00		75,600,000.00		65,497,000.00	10,103,000.00	75,600,000.00				123,650.00
08.01.03.19	40308436	UPT SD INPRES 104 MARADEKAYA	258,140.00	68,400,000.00	22,500,000.00	90,900,000.00		86,250,000.00	4,650,000.00	90,900,000.00				258,140.00
08.01.03.20	40301525	UPT SD NEGERI 105 INPRES PABUNDUKANG	3,844.00	58,500,000.00		58,500,000.00		49,300,000.00	9,200,000.00	58,500,000.00		86,800.00		90,644.00
08.01.03.21	40301640	UPT SD INPRES 125 BAJENG	1,550,000.00	150,300,000.00		150,300,000.00		137,500,000.00	12,800,000.00	150,300,000.00		390,600.00		1,940,600.00
08.01.03.22	40301520	UPT SD NEGERI 133 INPRES PARIRISI	2,180,000.00	333,900,000.00		333,900,000.00		323,502,000.00	10,398,000.00	333,900,000.00		1,125,300.00		3,305,300.00
08.01.03.23	40301518	UPT SD NEGERI 135 INPRES PASULEANG	8,493.00	52,200,000.00	22,500,000.00	74,700,000.00		74,700,000.00	-	74,700,000.00		186,000.00		194,493.00
08.01.03.24	40301517	UPT SD NEGERI 149 INPRES LIMBUNGANG	1,543.00	103,500,000.00	22,500,000.00	126,000,000.00		111,150,000.00	14,850,000.00	126,000,000.00				1,543.00
08.01.03.25	40301515	UPT SD NEGERI 150 INPRES TAMALALANG	-	81,000,000.00	22,500,000.00	103,500,000.00		100,252,000.00	3,248,000.00	103,500,000.00		232,500.00		232,500.00
08.01.03.26	40301514	UPT SD NEGERI 151 INPRES KALAMPA	173,935.00	64,800,000.00		64,800,000.00		55,150,000.00	9,650,000.00	64,800,000.00				173,935.00
08.01.03.27	40301513	UPT SD NEGERI 165 INPRES AL QAMAR	13,794.00	115,200,000.00	22,500,000.00	137,700,000.00		124,792,000.00	12,908,000.00	137,700,000.00		396,800.00		410,594.00
08.01.03.28	40301533	UPT SD NEGERI 201 INPRES PALEMBA	80,000.00	47,700,000.00	22,500,000.00	70,200,000.00		69,200,000.00	1,000,000.00	70,200,000.00		101,600.00		181,600.00
08.01.03.29	40301508	UPT SD NEGERI 234 INPRES TAKALAR KOTA	2,024,135.00	282,600,000.00	22,500,000.00	305,100,000.00		289,207,800.00	15,892,200.00	305,100,000.00		1,946,800.00		3,970,935.00
08.01.04.02	40301487	UPT SD NEGERI 25 SANROBONE	1,520,025.00	78,300,000.00		78,300,000.00		77,515,000.00	785,000.00	78,300,000.00		378,200.00		1,898,225.00
08.01.04.03	40301484	UPT SD NEGERI 29 BANYUANYARA	2,327,961.00	85,500,000.00		85,500,000.00		81,680,000.00	3,820,000.00	85,500,000.00		412,300.00		2,740,261.00
08.01.04.04	40301482	UPT SD NEGERI 30 PADDINGING	1,778,335.00	76,500,000.00		76,500,000.00		60,075,000.00	16,425,000.00	76,500,000.00		368,900.00		2,147,235.00
08.01.04.05	40301481	UPT SD NEGERI 31 LAU	2,562,270.00	65,700,000.00		65,700,000.00		62,200,000.00	3,500,000.00	65,700,000.00		300,000.00		2,862,270.00
08.01.04.06	40301473	UPT SDN 35 MACCINIBAJI	28,968.00	135,000,000.00		135,000,000.00		115,772,000.00	19,228,000.00	135,000,000.00				28,968.00
08.01.04.07	40301474	UPT SD NEGERI 36 TONASA PARAPPA	1,748,284.00	118,800,000.00		118,800,000.00		99,667,000.00	19,133,000.00	118,800,000.00		570,400.00		2,318,684.00

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.04.08	40308402	UPT SD NEGERI 38 PARASANGAN BERU	753,736.00	91,800,000.00		91,800,000.00		81,200,000.00	10,600,000.00	91,800,000.00		440,200.00		1,193,936.00
08.01.04.09	40301652	UPT SD NEGERI 107 INPRES KUNJUNG	-	151,200,000.00	22,500,000.00	173,700,000.00		173,700,000.00	-	173,700,000.00		8,420,600.00		8,420,600.00
08.01.04.10	40301561	UPT SD NEGERI 108 INPRES TONASA	522.00	91,800,000.00		91,800,000.00		86,800,000.00	5,000,000.00	91,800,000.00		443,300.00		443,822.00
08.01.04.11	40301642	UPT SDN 123 INPRES UJUNG LAU	-	151,200,000.00	22,500,000.00	173,700,000.00		136,700,000.00	37,000,000.00	173,700,000.00		1,129,725.00		1,129,725.00
08.01.04.12	40301745	UPT SD NEGERI 139 INPRES BENTENG SANROBONE	12,336.00	160,200,000.00		160,200,000.00		147,650,000.00	12,550,000.00	160,200,000.00		775,000.00		787,336.00
08.01.04.13	40301767	UPT SD NEGERI INPRES 162 KAMPUNG BERU	1,711,831.00	88,200,000.00		88,200,000.00		84,800,000.00	3,400,000.00	88,200,000.00		303,800.00		2,015,631.00
08.01.04.14	40301768	UPT SD NEGERI INPRES 163 BONTOPANNO	863,285.00	111,600,000.00		111,600,000.00		95,624,000.00	15,976,000.00	111,600,000.00		539,400.00		1,402,685.00
08.01.04.15	40308503	UPT SD NEGERI INPRES 206 SALEKOWA	-	63,000,000.00	22,500,000.00	85,500,000.00		75,000,000.00	10,500,000.00	85,500,000.00		305,000.00		305,000.00
08.01.04.16	40301730	UPT SD NEGERI INPRES 228 BORONG UNTIA	1,600,432.00	69,300,000.00	22,500,000.00	91,800,000.00		86,555,000.00	5,245,000.00	91,800,000.00		372,000.00		1,972,432.00
08.01.05.02	40301601	UPT SD NEGERI 68 CENTER GALESONG II	82,593.00	119,700,000.00		119,700,000.00		113,240,000.00	6,460,000.00	119,700,000.00		579,700.00		662,293.00
08.01.05.03	40301600	UPT SD NEGERI 69 GALESONG I	2,357,577.00	278,100,000.00		278,100,000.00		263,966,000.00	14,134,000.00	278,100,000.00		1,264,800.00		3,622,377.00
08.01.05.04	40301598	UPT SD NEGERI 70 BODDIA	108,621.00	261,900,000.00		261,900,000.00		256,965,000.00	4,935,000.00	261,900,000.00		1,271,000.00		1,379,621.00
08.01.05.05	40301597	UPT SD NEGERI 71 MARIO	1,200,000.00	83,700,000.00	22,500,000.00	106,200,000.00		102,100,000.00	4,100,000.00	106,200,000.00		403,000.00		1,603,000.00
08.01.05.06	40301596	UPT SDN 72 BONTOLOE	340.00	241,200,000.00		241,200,000.00		188,798,000.00	52,402,000.00	241,200,000.00		1,162,500.00		1,162,840.00
08.01.05.07	40301595	UPT SDN 73 BONTORITA I	-	205,200,000.00		205,200,000.00		198,376,000.00	6,824,000.00	205,200,000.00		988,900.00		988,900.00
08.01.05.08	40301594	UPT SD NEGERI 74 BONTORITA II	-	116,100,000.00		116,100,000.00		97,768,000.00	18,332,000.00	116,100,000.00		561,100.00		561,100.00
08.01.05.09	40301619	UPT SD NEGERI 84 PATTINOANG	22,335.00	106,200,000.00		106,200,000.00		82,700,000.00	23,500,000.00	106,200,000.00		886,500.00		908,835.00
08.01.05.10	40308434	UPT SD NEGERI 99 KAMPUNG BERU	39,388.00	116,100,000.00		116,100,000.00		82,600,000.00	33,500,000.00	116,100,000.00		434,000.00		473,388.00
08.01.05.11	40308367	UPT SD NEGERI 100 PALALAKKANG	-	151,200,000.00		151,200,000.00		146,200,000.00	5,000,000.00	151,200,000.00		737,800.00		737,800.00
08.01.05.12	40301649	UPT SD NEGERI 115 INPRES GALESONG	-	310,500,000.00		310,500,000.00		258,810,000.00	51,690,000.00	310,500,000.00		2,564,860.00		2,564,860.00
08.01.05.13	40301648	UPT SD NEGERI 117 INPRES BONTOMANGAPE	600.00	62,100,000.00		62,100,000.00		57,686,000.00	4,414,000.00	62,100,000.00		303,800.00		304,400.00
08.01.05.14	40301734	UPT SDN 129 INPRES BONTOLOE	-	145,800,000.00		145,800,000.00		129,013,000.00	16,787,000.00	145,800,000.00		629,300.00		629,300.00
08.01.05.15	40301748	UPT SD NEGERI 132 INPRES PARASANGAN BERU	150,888.00	147,600,000.00		147,600,000.00		147,600,000.00	-	147,600,000.00		719,200.00		870,088.00
08.01.05.16	40301741	UPT SD NEGERI 145 INPRES BAYOWA	-	82,800,000.00		82,800,000.00		71,971,000.00	10,829,000.00	82,800,000.00		359,600.00		359,600.00
08.01.05.17	40301739	UPT SD NEGERI 147 INPRES PALALAKKANG	9,261.00	77,400,000.00		77,400,000.00		77,400,000.00	-	77,400,000.00		370,000.00		379,261.00
08.01.05.18	40301754	UPT SD NEGERI 190 INPRES BURANE	45,390.00	257,400,000.00		257,400,000.00		206,300,000.00	51,100,000.00	257,400,000.00		1,116,000.00		1,161,390.00
08.01.05.19	40301753	UPT SD INPRES 191 PAKU	994.00	149,400,000.00		149,400,000.00		141,850,000.00	7,550,000.00	149,400,000.00		722,300.00		723,294.00
08.01.05.20	40308352	UPT SD NEGERI 192 INPRES TAMALALANG	124,655.00	167,400,000.00	22,500,000.00	189,900,000.00		162,500,000.00	27,400,000.00	189,900,000.00		806,000.00		930,655.00
08.01.05.21	40301733	UPT SD NEGERI 193 INPRES PAJANGENGANG	10,785.00	63,000,000.00		63,000,000.00		56,500,000.00	6,500,000.00	63,000,000.00		753,800.00		764,585.00
08.01.05.22	40308492	UPT SD INPRES 195 KAMPUNG BERU	7,807.00	133,200,000.00		133,200,000.00		117,700,000.00	15,500,000.00	133,200,000.00		655,707.00		663,514.00
08.01.05.23	40308506	UPT SD NEGERI 211 INPRES CAMPAGAYA	46,950.00	97,200,000.00	22,500,000.00	119,700,000.00		119,700,000.00	-	119,700,000.00		232,500.00		279,450.00
08.01.05.24	40301656	UPT SD NEGERI 212 INPRES BONTOKANANG	36,341.00	17,100,000.00		17,100,000.00		15,300,000.00	1,800,000.00	17,100,000.00		34,100.00		70,441.00
08.01.05.25	40301698	UPT SDN 224 INPRES MANNYAMPA	19,074.00	83,700,000.00		83,700,000.00		71,681,800.00	12,018,200.00	83,700,000.00		403,000.00		422,074.00
08.01.05.26	40301715	UPT SD NEGERI 226 INPRES LANNA	135,127.00	160,200,000.00		160,200,000.00		159,650,000.00	550,000.00	160,200,000.00		775,000.00		910,127.00
08.01.06.02	40301593	UPT SD NEGERI 75 BENTANG	56,262.00	135,900,000.00		135,900,000.00		120,072,000.00	15,828,000.00	135,900,000.00		654,100.00		710,362.00

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.06.03	40301592	UPT SD NEGERI 76 TAROWANG	768,270.00	146,700,000.00		146,700,000.00		126,044,000.00	20,656,000.00	146,700,000.00		706,800.00		1,475,070.00
08.01.06.04	40301591	UPT SD NEGERI 77 KANAENG	6,040.00	184,500,000.00	22,500,000.00	207,000,000.00		181,285,000.00	25,715,000.00	207,000,000.00		889,700.00		895,740.00
08.01.06.05	40301590	UPT SDN 78 BALANG	327,377.00	199,800,000.00		199,800,000.00		188,450,000.00	11,350,000.00	199,800,000.00		961,000.00		1,288,377.00
08.01.06.06	40301589	UPT SD NEGERI 79 SAWAKONG TOWA	99,561.00	127,800,000.00		127,800,000.00		123,300,000.00	4,500,000.00	127,800,000.00		731,300.00		830,861.00
08.01.06.07	40301587	UPT SD NEGERI 80 POPO	3,236,507.00	189,900,000.00	22,500,000.00	212,400,000.00		177,319,000.00	35,081,000.00	212,400,000.00		2,323,200.00		5,559,707.00
08.01.06.08	40301586	UPT SD NEGERI 81 KALUKUBODO	249,412.00	187,200,000.00		187,200,000.00		149,400,000.00	37,800,000.00	187,200,000.00		902,100.00		1,151,512.00
08.01.06.09	40301602	UPT SD NEGERI 82 BARAMMAMASE	176,125.00	112,500,000.00		112,500,000.00		108,348,000.00	4,152,000.00	112,500,000.00		542,500.00		718,625.00
08.01.06.10	40301603	UPT SD NEGERI 83 MANGINDARA	391,138.00	72,000,000.00		72,000,000.00		66,500,000.00	5,500,000.00	72,000,000.00		347,200.00		738,338.00
08.01.06.11	40308453	UPT SD NEGERI 130 INPRES BONTOMARANNU	676,789.00	134,100,000.00		134,100,000.00		129,948,000.00	4,152,000.00	134,100,000.00		644,800.00		1,321,589.00
08.01.06.12	40301740	UPT SD NEGERI 146 INPRES BONTOKANANG	551.00	138,600,000.00	22,500,000.00	161,100,000.00		141,096,000.00	20,004,000.00	161,100,000.00		666,500.00		667,051.00
08.01.06.13	40301758	UPT SDN 186 INPRES BONTOA	60.00	180,000,000.00		180,000,000.00		148,331,800.00	31,668,200.00	180,000,000.00		877,940.00		878,000.00
08.01.06.14	40301757	UPT SD NEGERI 187 INPRES DENGILAU	3,752.00	89,100,000.00		89,100,000.00		74,286,000.00	14,814,000.00	89,100,000.00		424,700.00		428,452.00
08.01.06.15	40301756	UPT SD NEGERI 188 INPRES UWEYA	152,708.00	135,900,000.00		135,900,000.00		122,020,000.00	13,880,000.00	135,900,000.00		1,939,100.00		2,091,808.00
08.01.06.16	40301755	UPT SD INPRES 189 KANITE	49,391.00	120,600,000.00		120,600,000.00		116,750,000.00	3,850,000.00	120,600,000.00		584,260.00		633,651.00
08.01.06.17	40301705	UPT SD INPRES 210 KATONOKANG	20,325.00	94,500,000.00	22,500,000.00	117,000,000.00		113,750,000.00	3,250,000.00	117,000,000.00		470,685.00		491,010.00
08.01.06.18	40301699	UPT SD INPRES 223 KADATONG	46,862.00	154,800,000.00		154,800,000.00		142,296,000.00	12,504,000.00	154,800,000.00		744,000.00		790,862.00
08.01.06.19	40314367	UPT SD NEGERI NO 225 INPRES RITA	78,036.00	60,300,000.00	22,500,000.00	82,800,000.00		82,800,000.00	-	82,800,000.00		288,300.00		366,336.00
08.01.07.02	40301618	UPT SD NEGERI 85 CENTRE BONTOLEBANG	-	183,600,000.00		183,600,000.00		156,037,000.00	27,563,000.00	183,600,000.00		2,311,500.00		2,311,500.00
08.01.07.03	40301617	UPT SD NEGERI 86 AENG TOWA	3,286.00	153,000,000.00		153,000,000.00		141,230,000.00	11,770,000.00	153,000,000.00		737,800.00		741,086.00
08.01.07.04	40301616	UPT SD NEGERI 87 TAMANROYA	36,070.00	213,300,000.00		213,300,000.00		189,050,000.00	24,250,000.00	213,300,000.00		1,029,200.00		1,065,270.00
08.01.07.05	40301615	UPT SD NEGERI 88 AENG BATU-BATU	7,952,000.00	59,400,000.00		59,400,000.00		58,850,000.00	550,000.00	59,400,000.00		285,200.00		8,237,200.00
08.01.07.06	40308430	UPT SD NEGERI 89 PAKKABBA	808,721.00	137,700,000.00		137,700,000.00		117,000,000.00	20,700,000.00	137,700,000.00		1,163,400.00		1,972,121.00
08.01.07.07	40301614	UPT SD NEGERI 90 SAMPULUNGAN	7,284.00	124,200,000.00		124,200,000.00		108,594,800.00	15,605,200.00	124,200,000.00		602,000.00		609,284.00
08.01.07.08	40308432	UPT SD NEGERI 91 SOREYANG	391.00	162,900,000.00		162,900,000.00		136,316,000.00	26,584,000.00	162,900,000.00		725,000.00		725,391.00
08.01.07.09	40301612	UPT SD NEGERI 92 TABARINGAN	327,082.00	115,200,000.00		115,200,000.00		92,434,500.00	22,765,500.00	115,200,000.00		787,400.00		1,114,482.00
08.01.07.10	40301611	UPT SD NEGERI 93 SAWAKUNG BEBA	-	102,600,000.00		102,600,000.00		92,076,000.00	10,524,000.00	102,600,000.00		461,900.00		461,900.00
08.01.07.11	40301610	UPT SD NEGERI 94 BEBA	152,307.00	248,400,000.00		248,400,000.00		229,150,000.00	19,250,000.00	248,400,000.00		917,600.00		1,069,907.00
08.01.07.12	40301609	UPT SD NEGERI 95 CAMPAGAYA	44,398.00	116,100,000.00		116,100,000.00		103,450,000.00	12,650,000.00	116,100,000.00		558,000.00		602,398.00
08.01.07.13	40301608	UPT SD NEGERI 96 KALONGKONG	5,710.00	130,500,000.00		130,500,000.00		124,850,000.00	5,650,000.00	130,500,000.00		2,199,300.00		2,205,010.00
08.01.07.14	40301607	UPT SD NEGERI 97 TAMASONGO	152,026.00	166,500,000.00		166,500,000.00		152,150,000.00	14,350,000.00	166,500,000.00		1,140,800.00		1,292,826.00
08.01.07.15	40301647	UPT SD NEGERI 118 INPRES BONTOLEBANG	127,021.00	146,700,000.00		146,700,000.00		126,358,000.00	20,342,000.00	146,700,000.00		644,800.00		771,821.00
08.01.07.16	40301645	UPT SD INPRES 119 BONTOSUNGGU	49,409.00	151,200,000.00		151,200,000.00		129,311,000.00	21,889,000.00	151,200,000.00		980,600.00		1,030,009.00
08.01.07.17	40301644	UPT SD NEGERI 120 INPRES TAMALATE	-	233,100,000.00	22,500,000.00	255,600,000.00		204,554,000.00	51,046,000.00	255,600,000.00		1,060,200.00		1,060,200.00
08.01.07.18	40301749	UPT SD NEGERI 131 INPRES BATU-BATU	3,471,999.73	267,300,000.00		267,300,000.00		254,400,000.00	12,900,000.00	267,300,000.00		3,397,500.00		6,869,499.73
08.01.07.19	40308464	UPT SDN 148 INPRES JULUMATA	15,178.00	181,800,000.00		181,800,000.00		158,266,000.00	23,534,000.00	181,800,000.00		877,300.00		892,478.00
08.01.07.20	40301732	UPT SD INPRES 194 TAIPANAORANG	25,137.00	212,400,000.00	22,500,000.00	234,900,000.00		187,547,000.00	47,353,000.00	234,900,000.00		973,000.00		998,137.00
08.01.07.21	40308493	UPT SD NEGERI 196 INPRES BONTOMAJANNANG	793.00	176,400,000.00		176,400,000.00		150,240,600.00	26,159,400.00	176,400,000.00		790,500.00		791,293.00

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.07.22	40308494	UPT SD NEGERI 197 INPRES BONTOPAJJA	3,090,360.00	110,700,000.00		110,700,000.00		102,700,000.00	8,000,000.00	110,700,000.00		496,000.00		3,586,360.00
08.01.07.23	40308495	UPT SD NEGERI 198 INPRES BONTORITA	-	165,600,000.00		165,600,000.00		153,468,000.00	12,132,000.00	165,600,000.00		789,000.00		789,000.00
08.01.07.24	40308353	UPT SD NEGERI 199 INPRES BONTOLANRA	3,643.00	101,700,000.00		101,700,000.00		91,685,000.00	10,015,000.00	101,700,000.00		489,800.00		493,443.00
08.01.07.25	40308496	UPT SD NEGERI 200 INPRES BONTOKADDOPEPE	2,488,300.00	112,500,000.00		112,500,000.00		107,308,000.00	5,192,000.00	112,500,000.00		387,500.00		2,875,800.00
08.01.07.26	40308507	UPT SD NEGERI 213 INPRES KABALLOKANG	716.00	99,000,000.00	22,500,000.00	121,500,000.00		116,450,000.00	5,050,000.00	121,500,000.00		437,100.00		437,816.00
08.01.07.27	40308508	UPT SD NEGERI 214 INPRES PANGKAJENE	1,134,032.00	145,800,000.00		145,800,000.00		135,150,000.00	10,650,000.00	145,800,000.00		700,600.00		1,834,632.00
08.01.07.28	40308511	UPT SDN 221 INPRES LABBUMESANG	-	111,600,000.00	22,500,000.00	134,100,000.00		124,680,000.00	9,420,000.00	134,100,000.00		502,000.00		502,000.00
08.01.07.29	40301700	UPT SD INPRES 222 SAMPULUNGAN	-	188,100,000.00		188,100,000.00		147,649,000.00	40,451,000.00	188,100,000.00		846,300.00		846,300.00
08.01.08.02	40301477	UPT SD NEGERI 39 CENTRE PALLEKO	2,811,801.00	235,800,000.00		235,800,000.00		218,100,000.00	17,700,000.00	235,800,000.00		914,500.00		3,726,301.00
08.01.08.03	40301489	UPT SDN 40 PALLEKO II	792,675.00	57,600,000.00		57,600,000.00		52,800,000.00	4,800,000.00	57,600,000.00		282,100.00		1,074,775.00
08.01.08.04	40308404	UPT SD NEGERI 41 MALEWANG	840,000.00	103,500,000.00		103,500,000.00		87,055,000.00	16,445,000.00	103,500,000.00		499,100.00		1,339,100.00
08.01.08.05	40301506	UPT SDN 42 PANGEMBANG	1,542,075.00	66,600,000.00		66,600,000.00		63,600,000.00	3,000,000.00	66,600,000.00				1,542,075.00
08.01.08.06	40301719	UPT SD NEGERI 43 MANONGKOKI I	2,308,930.00	107,100,000.00		107,100,000.00		83,084,000.00	24,016,000.00	107,100,000.00		654,320.00		2,963,250.00
08.01.08.07	40301559	UPT SD NEGERI 44 MANONGKOKI II	2,292,133.00	63,000,000.00		63,000,000.00		55,950,000.00	7,050,000.00	63,000,000.00		306,900.00		2,599,033.00
08.01.08.08	40301502	UPT SD NEGERI 48 MANUJU	1,600,000.00	91,800,000.00		91,800,000.00		89,850,000.00	1,950,000.00	91,800,000.00		443,300.00		2,043,300.00
08.01.08.09	40301501	UPT SD NEGERI 49 PANJOJO	1,376,037.00	236,700,000.00		236,700,000.00		182,900,000.00	53,800,000.00	236,700,000.00		3,010,500.00		4,386,537.00
08.01.08.10	40301624	UPT SD NEGERI 50 LASSANG I	840,000.00	148,500,000.00		148,500,000.00		113,900,000.00	34,600,000.00	148,500,000.00		713,000.00		1,553,000.00
08.01.08.11	40301495	UPT SDN 56 LASSANG II	770,482.00	98,100,000.00	22,500,000.00	120,600,000.00		119,100,000.00	1,500,000.00	120,600,000.00		558,000.00		1,328,482.00
08.01.08.12	40308409	UPT SD NEGERI 51 LAUWA	1,600,271.00	63,000,000.00		63,000,000.00		60,800,000.00	2,200,000.00	63,000,000.00		1,548,300.00		3,148,571.00
08.01.08.13	40301498	UPT SD NEGERI 52 LEREKANG	3,742.00	88,200,000.00		88,200,000.00		84,000,000.00	4,200,000.00	88,200,000.00		391,000.00		394,742.00
08.01.08.14	40308411	UPT SD NEGERI 53 SAULEYA	918,091.00	139,500,000.00	22,500,000.00	162,000,000.00		150,550,000.00	11,450,000.00	162,000,000.00		669,400.00		1,587,491.00
08.01.08.15	40301497	UPT SD NEGERI 54 MALOLO	770,021.00	103,500,000.00		103,500,000.00		87,550,000.00	15,950,000.00	103,500,000.00		1,096,000.00		1,866,021.00
08.01.08.16	40301496	UPT SD NEGERI 55 KOMARA	1,606,049.00	56,700,000.00		56,700,000.00		51,203,000.00	5,497,000.00	56,700,000.00		230,100.00		1,836,149.00
08.01.08.17	40301605	UPT SD NEGERI 109 INPRES PANRANNUANGKU	1,569,914.00	86,400,000.00	22,500,000.00	108,900,000.00		87,700,000.00	21,200,000.00	108,900,000.00		418,500.00		1,988,414.00
08.01.08.18	40301761	UPT SD NEGERI 167 INPRES MALEWANG	1,065,804.00	96,300,000.00	22,500,000.00	118,800,000.00		112,372,000.00	6,428,000.00	118,800,000.00		709,460.00		1,775,264.00
08.01.08.19	40308440	UPT SD NEGERI 110 INPRES MATTOMPODALLE	960,153.00	103,500,000.00		103,500,000.00		87,967,000.00	15,533,000.00	103,500,000.00		499,100.00		1,459,253.00
08.01.08.20	40308441	UPT SD NEGERI 111 INPRES LASSANG I	764,419.00	99,000,000.00		99,000,000.00		88,000,000.00	11,000,000.00	99,000,000.00		567,300.00		1,331,719.00
08.01.08.21	40301621	UPT SD NEGERI INPRES 126 PARAPPUNGANTA I	6,355,737.00	223,200,000.00		223,200,000.00		187,460,000.00	35,740,000.00	223,200,000.00		1,078,800.00		7,434,537.00
08.01.08.22	40301696	UPT SD NEGERI 127 INPRES KOMARA I	1,640,832.00	134,100,000.00	22,500,000.00	156,600,000.00		129,400,000.00	27,200,000.00	156,600,000.00		1,160,000.00		2,800,832.00
08.01.08.23	40301626	UPT SDN 140 INPRES KO MARA II	1,520,000.00	94,500,000.00		94,500,000.00		88,700,000.00	5,800,000.00	94,500,000.00		477,400.00		1,997,400.00
08.01.08.24	40301743	UPT SD NEGERI 141 INPRES PARAPPUNGANTA II	2,920,000.00	144,900,000.00		144,900,000.00		131,151,000.00	13,749,000.00	144,900,000.00		1,297,500.00		4,217,500.00
08.01.08.25	40301742	UPT SD NEGERI 142 INPRES LASSANG II	856,245.00	113,400,000.00		113,400,000.00		99,600,000.00	13,800,000.00	113,400,000.00		650,300.00		1,506,545.00
08.01.08.26	40308476	UPT SD NEGERI 169 INPRES PARAMBADDO	862,684.00	129,600,000.00		129,600,000.00		110,380,000.00	19,220,000.00	129,600,000.00		629,300.00		1,491,984.00
08.01.08.27	40301762	UPT SDN NO. 166 INPRES BONTORITA	4,632,813.00	256,500,000.00		256,500,000.00		230,960,000.00	25,540,000.00	256,500,000.00		2,124,900.00		6,757,713.00
08.01.08.28	40301760	UPT SDN 168 INPRES ROMANGTANGNGAYA	1,521,272.00	75,600,000.00		75,600,000.00		71,371,400.00	4,228,600.00	75,600,000.00		786,071.00		2,307,343.00
08.01.08.29	40301630	UPT SD NEGERI 170 INPRES JENEMAEJA	866,761.00	55,800,000.00		55,800,000.00		55,800,000.00	-	55,800,000.00		267,000.00		1,133,761.00

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.08.30	40301635	UPT SD 171 INPRES BUTTADIDIA	840,000.00	94,500,000.00		94,500,000.00		89,900,000.00	4,600,000.00	94,500,000.00		3,593,700.00		4,433,700.00
08.01.08.31	40301631	UPT SD NEGERI 172 INPRES HOME BASE	1,661,580.00	79,200,000.00	22,500,000.00	101,700,000.00		91,600,000.00	10,100,000.00	101,700,000.00		384,400.00		2,045,980.00
08.01.08.32	40308477	UPT SDN 173 INPRES TANASAMBAYANG	1,043,382.00	127,800,000.00		127,800,000.00		105,350,000.00	22,450,000.00	127,800,000.00		554,900.00		1,598,282.00
08.01.08.33	40301709	UPT SD NEGERI 206 INPRES MANNYAMPA	21.00	109,800,000.00		109,800,000.00		102,418,000.00	7,382,000.00	109,800,000.00		768,800.00		768,821.00
08.01.08.34	40301706	UPT SD NEGERI 209 INPRES SALEKOWA	1,721,696.00	99,900,000.00	22,500,000.00	122,400,000.00		119,400,000.00	3,000,000.00	122,400,000.00		567,500.00		2,289,196.00
08.01.08.35	40301625	UPT SD NEGERI 215 INPRES KUPANGA	1,537,537.00	116,100,000.00		116,100,000.00		98,350,000.00	17,750,000.00	116,100,000.00		558,000.00		2,095,537.00
08.01.08.36	40301638	UPT SD NEGERI 216 INPRES MACCINI BAJI	408,294.00	44,100,000.00	22,500,000.00	66,600,000.00		66,600,000.00	-	66,600,000.00				408,294.00
08.01.08.37	40301728	UPT SD NEGERI 217 INPRES PANJARUNGAN	420,000.00	48,600,000.00		48,600,000.00		48,600,000.00	-	48,600,000.00		905,941.00		1,325,941.00
08.01.08.38	40316473	UPT SDN 56 PALILANG	22,076.00	45,000,000.00		45,000,000.00		42,500,000.00	2,500,000.00	45,000,000.00		217,000.00		239,076.00
08.01.09.02	40301522	UPT SD NEGERI 12 PATTE NE	200,588.00	90,000,000.00		90,000,000.00		81,825,000.00	8,175,000.00	90,000,000.00		437,000.00		637,588.00
08.01.09.03	40301521	UPT SD NEGERI 13 BONTOLEBANG	15,328.00	78,300,000.00	22,500,000.00	100,800,000.00		94,000,000.00	6,800,000.00	100,800,000.00		378,200.00		393,528.00
08.01.09.04	40308375	UPT SD NEGERI 14 MALLAKA	140,231.00	45,000,000.00		45,000,000.00		42,000,000.00	3,000,000.00	45,000,000.00		675,800.00		816,031.00
08.01.09.05	40308377	UPT SD NEGERI 15 LANTANG	207,529.00	124,200,000.00		124,200,000.00		99,950,000.00	24,250,000.00	124,200,000.00		607,600.00		815,129.00
08.01.09.06	40308379	UPT SD NEGERI 16 SAYOWANG	14,499.00	67,500,000.00		67,500,000.00		67,500,000.00	-	67,500,000.00		2,407,400.00		2,421,899.00
08.01.09.07	40301527	UPT SD NEGERI 18 BONTOKADATTO	2,042.00	56,700,000.00		56,700,000.00		53,300,000.00	3,400,000.00	56,700,000.00		815,900.00		817,942.00
08.01.09.08	40301542	UPT SD NEGERI 19 BABA	202,774.00	99,900,000.00		99,900,000.00		94,900,000.00	5,000,000.00	99,900,000.00		480,500.00		683,274.00
08.01.09.09	40301535	UPT SD NEGERI 20 TANA-TANA	6,964.00	104,400,000.00		104,400,000.00		94,200,000.00	10,200,000.00	104,400,000.00		719,200.00		726,164.00
08.01.09.10	40314368	UPT SD NEGERI 21 BULUKUNYI	-	94,500,000.00		94,500,000.00		94,500,000.00	-	94,500,000.00		458,800.00		458,800.00
08.01.09.11	40301529	UPT SD NEGERI 22 CAKURA	32,657.00	152,100,000.00		152,100,000.00		146,500,000.00	5,600,000.00	152,100,000.00		734,700.00		767,357.00
08.01.09.12	40301655	UPT SD NEGERI 102 INPRES BONTOKADATTO	108,713.00	153,900,000.00		153,900,000.00		114,420,000.00	39,480,000.00	153,900,000.00		741,022.00		849,735.00
08.01.09.13	40301641	UPT SD NEGERI 124 INPRES MONCONGKOMBA	224,778.00	77,400,000.00	22,500,000.00	99,900,000.00		85,200,000.00	14,700,000.00	99,900,000.00		176,700.00		401,478.00
08.01.09.14	40308451	UPT SD NEGERI 125 INPRES BULUKUNYI	265,537.00	88,200,000.00		88,200,000.00		81,850,000.00	6,350,000.00	88,200,000.00		427,800.00		693,337.00
08.01.09.15	40308457	UPT SD NEGERI 134 INPRES SURULANGI	274,461.00	99,900,000.00		99,900,000.00		90,900,000.00	9,000,000.00	99,900,000.00		480,500.00		754,961.00
08.01.09.16	40301747	UPT SD NEGERI 136 INPRES LANYARA	2,348.00	99,000,000.00		99,000,000.00		96,950,000.00	2,050,000.00	99,000,000.00		260,400.00		262,748.00
08.01.09.17	40301737	UPT SDN 153 INPRES BONTONOMPO	6,079.00	63,000,000.00		63,000,000.00		63,000,000.00	-	63,000,000.00		305,800.00		311,879.00
08.01.09.18	40301736	UPT SD NEGERI 154 INPRES BANTINOTO	-	105,300,000.00		105,300,000.00		96,800,000.00	8,500,000.00	105,300,000.00		505,300.00		505,300.00
08.01.09.19	40301735	UPT SD NEGERI 155 INPRES RAJAYA	14,721.00	86,400,000.00		86,400,000.00		73,950,000.00	12,450,000.00	86,400,000.00		418,500.00		433,221.00
08.01.09.20	40301751	UPT SD NEGERI 156 INPRES MAKAMMU	2,392.00	30,150,000.00	22,500,000.00	52,650,000.00		52,050,000.00	600,000.00	52,650,000.00		291,400.00		293,792.00
08.01.09.21	40301752	UPT SDN 157 INPRES PAJENEKANG	26,569.00	125,100,000.00		125,100,000.00		119,300,000.00	5,800,000.00	125,100,000.00		40,027.00		66,596.00
08.01.09.22	40301763	UPT SD NEGERI 158 INPRES JENEMATTALASA	13,526.00	108,900,000.00		108,900,000.00		90,900,000.00	18,000,000.00	108,900,000.00		503,000.00		516,526.00
08.01.09.23	40301764	UPT SD NEGERI 159 INPRES CAMPAGAYA	261.00	81,000,000.00		81,000,000.00		78,600,000.00	2,400,000.00	81,000,000.00		390,600.00		390,861.00
08.01.09.24	40301765	UPT SD NEGERI 160 INPRES BONTOLEBANG	1,264.00	78,300,000.00	22,500,000.00	100,800,000.00		91,800,000.00	9,000,000.00	100,800,000.00		372,000.00		373,264.00
08.01.09.25	40301713	UPT SD NEGERI 202 INPRES TIMBUSU	88,755.00	50,400,000.00		50,400,000.00		50,400,000.00	-	50,400,000.00		980,525.00		1,069,280.00
08.01.09.26	40301712	UPT SD NEGERI 203 INPRES BARUGAYA	13,449.00	42,300,000.00		42,300,000.00		38,300,000.00	4,000,000.00	42,300,000.00		204,560.00		218,009.00
08.01.09.27	40301711	UPT SD NEGERI 204 INPRES BALANG	2,469,893.00	106,200,000.00		106,200,000.00		88,600,000.00	17,600,000.00	106,200,000.00		511,500.00		2,981,393.00

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.09.28	40301704	UPT SD NEGERI 218 INPRES CURA-CURA	326,684.00	25,200,000.00		25,200,000.00		25,200,000.00	-	25,200,000.00		31,000.00		357,684.00
08.01.09.29	40301703	UPT SD NEGERI 219 INPRES BATUTARUTTU	5,534.00	71,100,000.00		71,100,000.00		63,370,000.00	7,730,000.00	71,100,000.00		347,200.00		352,734.00
08.01.09.30	40301702	UPT SD NEGERI 220 INPRES BONTOCINDE	31.00	19,800,000.00		19,800,000.00		19,800,000.00	-	19,800,000.00		93,000.00		93,031.00
08.01.10.02	40301604	UPT SDN 57 CENTRE MANGGADU	91,685.00	154,800,000.00		154,800,000.00		142,400,000.00	12,400,000.00	154,800,000.00		787,100.00		878,785.00
08.01.10.03	40301494	UPT SD NEGERI 58 LENGKESE	225,923.00	79,200,000.00	22,500,000.00	101,700,000.00		95,658,000.00	6,042,000.00	101,700,000.00		173,600.00		399,523.00
08.01.10.04	40301493	UPT SD NEGERI 59 PANYANGKALANG	37,129.00	201,600,000.00		201,600,000.00		171,200,000.00	30,400,000.00	201,600,000.00		1,426,000.00		1,463,129.00
08.01.10.05	40308416	UPT SD NEGERI 60 BONTOPARANG	642.00	208,800,000.00		208,800,000.00		192,400,000.00	16,400,000.00	208,800,000.00		976,500.00		977,142.00
08.01.10.06	40301491	UPT SD NEGERI 61 PUNTONDO	6,917.00	147,600,000.00	22,500,000.00	170,100,000.00		153,605,000.00	16,495,000.00	170,100,000.00				6,917.00
08.01.10.07	40308418	UPT SD NEGERI 62 LAIKANG	13,256.00	75,600,000.00	22,500,000.00	98,100,000.00		98,100,000.00	-	98,100,000.00		9.00		13,265.00
08.01.10.08	40301507	UPT SD NEGERI 63 PUNAGA	225,837.00	81,900,000.00		81,900,000.00		76,014,000.00	5,886,000.00	81,900,000.00				225,837.00
08.01.10.09	40308420	UPT SD NEGERI 64 JONGGOWA	40,885.00	61,200,000.00		61,200,000.00		59,000,000.00	2,200,000.00	61,200,000.00				40,885.00
08.01.10.10	40308421	UPT SDN 65 PA GANNAKKANG	185,799.00	55,800,000.00	22,500,000.00	78,300,000.00		78,300,000.00	-	78,300,000.00		291,400.00		477,199.00
08.01.10.11	40301545	UPT SD NEGERI 66 KAJANG	-	113,400,000.00	22,500,000.00	135,900,000.00		131,476,000.00	4,424,000.00	135,900,000.00		558,000.00		558,000.00
08.01.10.12	40301620	UPT SD NEGERI 67 BANGGAE	12,014.00	64,800,000.00		64,800,000.00		54,435,000.00	10,365,000.00	64,800,000.00		310,000.00		322,014.00
08.01.10.13	40308374	UPT SD NEGERI 14 INPRES CIKOWANG	8,810.00	144,000,000.00		144,000,000.00		125,540,000.00	18,460,000.00	144,000,000.00				8,810.00
08.01.10.14	40308442	UPT SD NEGERI 112 INPRES BONTOMANAI	3,500,000.00	233,100,000.00	22,500,000.00	255,600,000.00		217,700,000.00	37,900,000.00	255,600,000.00		1,125,300.00		4,625,300.00
08.01.10.15	40308369	UPT SD NEGERI 113 INPRES LAIKANG	37,426.00	190,800,000.00	22,500,000.00	213,300,000.00		182,325,000.00	30,975,000.00	213,300,000.00		886,600.00		924,026.00
08.01.10.16	40308443	UPT SD NEGERI 114 INPRES CIKOWANG LAKATONG	-	81,000,000.00		81,000,000.00		79,060,000.00	1,940,000.00	81,000,000.00		251,000.00		251,000.00
08.01.10.17	40308351	UPT SD NEGERI 128 INPRES LENGKESE 1	56,810.00	99,900,000.00		99,900,000.00		83,150,000.00	16,750,000.00	99,900,000.00				56,810.00
08.01.10.18	40308462	UPT SD NEGERI 143 INPRES TOPE JAWA	714.00	184,500,000.00	22,500,000.00	207,000,000.00		195,400,000.00	11,600,000.00	207,000,000.00		787,400.00		788,114.00
08.01.10.19	40308478	UPT SD NEGERI 174 INPRES KALAPPO	1,991.00	92,700,000.00		92,700,000.00		88,500,000.00	4,200,000.00	92,700,000.00				1,991.00
08.01.10.20	40301657	UPT SD NEGERI 175 INPRES BONTO BADDO	3,913.00	103,500,000.00		103,500,000.00		86,234,000.00	17,266,000.00	103,500,000.00				3,913.00
08.01.10.21	40308480	UPT SD NEGERI 176 INPRES LENGKESE II	41,968.00	133,200,000.00		133,200,000.00		113,305,000.00	19,895,000.00	133,200,000.00				41,968.00
08.01.10.22	40308481	UPT SD NEGERI 177 INPRES BOLO	62,252.00	179,100,000.00		179,100,000.00		160,860,000.00	18,240,000.00	179,100,000.00		861,800.00		924,052.00
08.01.10.23	40308482	UPT SD NEGERI 178 INPRES LAMANGKIA	4,235.00	90,000,000.00		90,000,000.00		88,750,000.00	1,250,000.00	90,000,000.00		429,000.00		433,235.00
08.01.10.24	40315703	UPT SD NEGERI 179 INPRES BALANG	8,310.00	128,700,000.00	22,500,000.00	151,200,000.00		142,796,000.00	8,404,000.00	151,200,000.00		635,500.00		643,810.00
08.01.10.25	40301759	UPT SD NEGERI 180 INPRES LAKATONG PULAU	316,834.00	100,800,000.00		100,800,000.00		88,300,000.00	12,500,000.00	100,800,000.00		150,000.00		466,834.00
08.01.10.26	40308484	UPT SD NEGERI 181 INPRES PATTOPAKANG	540,630.00	153,900,000.00	22,500,000.00	176,400,000.00		153,404,500.00	22,995,500.00	176,400,000.00		744,000.00		1,284,630.00
08.01.10.27	30408387	UPT SD NEGERI 182 INPRES BONTO-BONTO	1.00	137,700,000.00		137,700,000.00		110,887,000.00	26,813,000.00	137,700,000.00				1.00
08.01.10.28	40301628	UPT SD 183 INPRES KAMPUNG PARANG	-	172,800,000.00		172,800,000.00		152,020,000.00	20,780,000.00	172,800,000.00				-
08.01.10.29	40308485	UPT SD NEGERI 184 INPRES BODDIA	46,558.00	99,900,000.00	22,500,000.00	122,400,000.00		112,186,835.00	10,213,165.00	122,400,000.00		474,300.00		520,858.00
08.01.10.30	40308486	UPT SD NEGERI 185 INPRES SALAMBU	2,414.00	95,400,000.00	22,500,000.00	117,900,000.00		104,010,000.00	13,890,000.00	117,900,000.00		462,000.00		464,414.00
08.01.10.31	40308517	UPT SD NEGERI 229 INPRES ONGKOWA	40,062.00	140,400,000.00		140,400,000.00		131,290,000.00	9,110,000.00	140,400,000.00		62.00		40,124.00
08.01.10.32	40308519	UPT SD NEGERI 230 INPRES GARONGGONG	25,338.00	73,800,000.00		73,800,000.00		64,350,000.00	9,450,000.00	73,800,000.00				25,338.00

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.10.33	40301627	UPT SD NEGERI 231 INPRES KAPUNRENGANG	443,000.00	115,200,000.00		115,200,000.00		105,900,000.00	9,300,000.00	115,200,000.00		527,000.00		970,000.00
08.01.10.34	40301722	UPT SD NEGERI 33 TRANSMIGRASI LAIKANG	-	55,800,000.00		55,800,000.00		55,800,000.00	-	55,800,000.00				-
08.01.11.02	40301509	UPT SDN 23 CENTRE TAKALAR 1	14,728.00	95,400,000.00	22,500,000.00	117,900,000.00		102,676,100.00	15,223,900.00	117,900,000.00		458,800.00		473,528.00
08.01.11.03	40301488	UPT SDN 24 TAKALAR II	-	34,200,000.00	22,500,000.00	56,700,000.00		54,900,000.00	1,800,000.00	56,700,000.00				-
08.01.11.04	40301486	UPT SD NEGERI 26 SOREANG	1,507.00	61,200,000.00		61,200,000.00		54,870,000.00	6,330,000.00	61,200,000.00		294,500.00		296,007.00
08.01.11.07	40301480	UPT SD NEGERI 32 PATANI I	881.00	33,300,000.00		33,300,000.00		30,300,000.00	3,000,000.00	33,300,000.00		161,200.00		162,081.00
08.01.11.10	40301475	UPT SDN 37 PATANI II	5,544.00	74,700,000.00		74,700,000.00		74,700,000.00	-	74,700,000.00		362,700.00		368,244.00
08.01.11.11	40301653	UPT SD NEGERI 106 INPRES TAKALAR I	31.00	143,100,000.00	22,500,000.00	165,600,000.00		165,600,000.00	-	165,600,000.00		675,800.00		675,831.00
08.01.11.13	40301746	UPT SD NEGERI 138 INPRES MANGULABBE	386,631.00	203,400,000.00		203,400,000.00		174,400,000.00	29,000,000.00	203,400,000.00		700,600.00		1,087,231.00
08.01.11.16	40301769	UPT SD NEGERI INPRES 164 TAIPA	651,841.00	52,200,000.00		52,200,000.00		52,200,000.00	-	52,200,000.00		217,000.00		868,841.00
08.01.11.17	40301710	UPT SD NEGERI 205 INPRES MASALLENG	23,558.00	59,400,000.00		59,400,000.00		51,900,000.00	7,500,000.00	59,400,000.00		285,200.00		308,758.00
08.01.11.19	40301731	UPT SD NEGERI 227 INPRES TAKALAR II	6,044.00	152,100,000.00		152,100,000.00		141,740,000.00	10,360,000.00	152,100,000.00		1,047,800.00		1,053,844.00
08.01.12.01	40308381	UPT SDN 161 INPRES LANTANG PEO	236,177.00	51,300,000.00		51,300,000.00		48,500,000.00	2,800,000.00	51,300,000.00		359,600.00		595,777.00
08.01.12.02	40308364	UPT SD NEGERI BANGKOTINGGIA I	190,000.00	37,800,000.00		37,800,000.00		37,800,000.00	-	37,800,000.00		848,000.00		1,038,000.00
08.01.12.03	40308395	UPT SD NEGERI 28 KALUKUANG	577,483.00	87,300,000.00		87,300,000.00		78,300,000.00	9,000,000.00	87,300,000.00		601,400.00		1,178,883.00
08.01.12.04	40301472	UPT SD NEGERI 34 SATANGNGA	571,590.00	113,400,000.00		113,400,000.00		113,400,000.00	-	113,400,000.00		793,600.00		1,365,190.00
08.01.12.05	40301643	UPT SDN 121 INPRES BALANGDATU	212,680.00	88,200,000.00		88,200,000.00		81,700,000.00	6,500,000.00	88,200,000.00		663,400.00		876,080.00
08.01.12.06	40301744	UPT SD NEGERI 140 INPRES TOMPOTANAH	198,308.00	94,500,000.00		94,500,000.00		86,000,000.00	8,500,000.00	94,500,000.00		754,600.00		952,908.00
08.01.12.07	40301485	UPT SD NEGERI 27 TOMPO TANAH	257,018.00	81,000,000.00		81,000,000.00		77,500,000.00	3,500,000.00	81,000,000.00		1,017,000.00		1,274,018.00
08.01.12.08	40301479	UPT SD NEGERI 33 BAULUANG	224,093.00	44,100,000.00		44,100,000.00		44,100,000.00	-	44,100,000.00		303,800.00		527,893.00
08.01.12.09	40301563	UPT SD NEGERI KECIL 36 LABBOTALLUA	282,380.00	31,500,000.00		31,500,000.00		31,500,000.00	-	31,500,000.00		248,000.00		530,380.00
08.01.12.10	40301708	UPT SD NEGERI 207 INPRES CAMBANG-CAMBANGANG	190,000.00	51,300,000.00	22,500,000.00	73,800,000.00		68,800,000.00	5,000,000.00	73,800,000.00		372,000.00		562,000.00
08.01.12.11	40314338	UPT SD NEGERI KECIL BANGKOTINGGIA II	901,774.00	31,500,000.00		31,500,000.00		31,500,000.00	-	31,500,000.00		279,000.00		1,180,774.00
08.01.03.30	40308548	UPT SMP NEGERI 1 TAKALAR	5,581,500.00	816,200,000.00	35,000,000.00	851,200,000.00		775,622,000.00	75,578,000.00	851,200,000.00		6,900,600.00		12,482,100.00
08.01.03.31	40308553	UPT SMP NEGERI 2 TAKALAR	25,650.00	1,137,400,000.00		1,137,400,000.00		1,104,197,000.00	33,203,000.00	1,137,400,000.00		4,683,750.00		4,709,400.00
08.01.03.32	70039237	SMP NEGERI MARADEKAYA	-	33,000,000.00		33,000,000.00		21,308,000.00	11,692,000.00	33,000,000.00		279,000.00		279,000.00
08.01.04.17	69760819	UPT SMP NEGERI 1 SANROBONE	10,014.00	348,700,000.00		348,700,000.00		324,350,000.00	24,350,000.00	348,700,000.00		1,968,500.00		1,978,514.00
08.01.04.18	40308546	UPT SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU	1,684,915.00	429,000,000.00	35,000,000.00	464,000,000.00		432,068,000.00	31,932,000.00	464,000,000.00		3,627,000.00		5,311,915.00
08.01.05.27	40308549	UPT SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN	1,185,118.00	816,200,000.00	35,000,000.00	851,200,000.00		810,288,400.00	40,911,600.00	851,200,000.00		5,827,300.00		7,012,418.00
08.01.06.20	40308543	UPT SMP NEGERI 1 GALESONG SELATAN	464,573.00	300,300,000.00		300,300,000.00		273,480,000.00	26,820,000.00	300,300,000.00		3,467,090.00		3,931,663.00
08.01.06.21	40308556	UPT SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN	3,473,600.00	597,300,000.00	35,000,000.00	632,300,000.00		607,965,000.00	24,335,000.00	632,300,000.00		6,647,900.00		10,121,500.00
08.01.06.22	40318217	UPT SMP NEGERI 4 GALESONG SELATAN	330,000.00	218,900,000.00	35,000,000.00	253,900,000.00		218,329,000.00	35,571,000.00	253,900,000.00		1,876,100.00		2,206,100.00
08.01.07.30	40308544	UPT SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA	108,794,636.00	827,200,000.00	35,000,000.00	862,200,000.00		790,457,900.00	71,742,100.00	862,200,000.00		6,993,600.00		115,788,236.00
08.01.07.31	40308554	UPT SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA	12,110,000.00	701,800,000.00		701,800,000.00		632,008,000.00	69,792,000.00	701,800,000.00		4,947,500.00		17,057,500.00
08.01.07.32	40318219	UPT SMP NEGERI 3 GALESONG UTARA	439,600.00	248,600,000.00		248,600,000.00		206,430,000.00	42,170,000.00	248,600,000.00		2,251,800.00		2,691,400.00
08.01.07.33	70039245	SMP NEGERI PAKKABBA	-	110,000,000.00		110,000,000.00		89,206,500.00	20,793,500.00	110,000,000.00		837,000.00		837,000.00

Kode Sekolah	NTPN	Nama Sekolah	Saldo awal	Transfer		Total Transfer	Belanja Bos Reguler dan Kinerja			Total Belanja	Jasa Giro/ Penutupan	Pengembalian	Biaya Administrasi	Total Saldo Akhir
				Bos_reguler	Bos_kinerja		Pegawai	Barang Jasa	Peralatan dan Mesin					
08.01.08.39	40308547	UPT SMP NEGERI 1 POLONGBANGKENG UTARA	900,000.00	863,500,000.00	35,000,000.00	898,500,000.00		840,640,000.00	57,860,000.00	898,500,000.00		7,300,500.00		8,200,500.00
08.01.08.40	40308552	UPT SMP NEGERI 2 POLONGBANGKENG UTARA	5,313,806.00	426,800,000.00		426,800,000.00		410,800,000.00	16,000,000.00	426,800,000.00		3,590,600.00		8,904,406.00
08.01.08.41	40308559	UPT SMP NEGERI 3 POLONGBANGKENG UTARA	340,700.00	245,300,000.00		245,300,000.00		232,784,000.00	12,516,000.00	245,300,000.00		2,073,900.00		2,414,600.00
08.01.08.42	40308562	UPT SMP NEGERI 4 POLONGBANGKENG UTARA	912,202.00	58,300,000.00		58,300,000.00		50,200,000.00	8,100,000.00	58,300,000.00		309,900.00		1,222,102.00
08.01.08.43	40314358	UPT SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTARA	902,492.00	178,200,000.00	35,000,000.00	213,200,000.00		208,160,000.00	5,040,000.00	213,200,000.00		1,506,600.00		2,409,092.00
08.01.08.44	40318218	UPT SMP NEGERI 6 POLONGBANGKENG UTARA	360,000.00	44,000,000.00		44,000,000.00		41,200,000.00	2,800,000.00	44,000,000.00		735,300.00		1,095,300.00
08.01.08.45	40314362	UPT SMP NEGERI SATAP HOMEBASE	1,680,000.00	78,100,000.00	35,000,000.00	113,100,000.00		105,500,000.00	7,600,000.00	113,100,000.00		429,000.00		2,109,000.00
08.01.09.31	40308560	UPT SMP NEGERI 3 TAKALAR	188,092.00	353,100,000.00		353,100,000.00		290,100,000.00	63,000,000.00	353,100,000.00		13,606,492.00		13,794,584.00
08.01.09.32	40308563	UPT SMP NEGERI 4 TAKALAR	59,949.00	290,400,000.00		290,400,000.00		272,000,000.00	18,400,000.00	290,400,000.00		3,560,200.00		3,620,149.00
08.01.09.33	40308564	UPT SMP NEGERI 5 TAKALAR	407,727.00	225,500,000.00	35,000,000.00	260,500,000.00		246,200,000.00	14,300,000.00	260,500,000.00		1,906,500.00		2,314,227.00
08.01.10.35	40308545	UPT SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG	-	1,047,200,000.00	35,000,000.00	1,082,200,000.00		1,029,985,000.00	52,215,000.00	1,082,200,000.00		8,853,600.00		8,853,600.00
08.01.10.36	40308550	UPT SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG	37,558.00	272,800,000.00	35,000,000.00	307,800,000.00		299,184,700.00	8,615,300.00	307,800,000.00		2,306,400.00		2,343,958.00
08.01.10.37	40308557	UPT SMP NEGERI 3 MANGARABOMBANG	53,272.00	394,900,000.00	35,000,000.00	429,900,000.00		369,885,600.00	60,014,400.00	429,900,000.00		3,338,700.00		3,391,972.00
08.01.10.38	40308561	UPT SMP NEGERI 4 MANGARABOMBANG	71,193.00	273,900,000.00		273,900,000.00		253,398,000.00	20,502,000.00	273,900,000.00		2,306,700.00		2,377,893.00
08.01.10.39	69760812	UPT SMP NEGERI 5 MANGARABOMBANG	20,023.00	284,900,000.00	35,000,000.00	319,900,000.00		277,231,000.00	42,669,000.00	319,900,000.00		2,717,700.00		2,737,723.00
08.01.10.40	40314361	UPT SMP NEGERI SATU ATAP PUNAGA	-	85,800,000.00		85,800,000.00		65,580,000.00	20,220,000.00	85,800,000.00		725,400.00		725,400.00
08.01.11.23	40308551	UPT SMP NEGERI 2 MAPPAKASUNGGU	-	468,600,000.00		468,600,000.00		427,322,000.00	41,278,000.00	468,600,000.00		4,396,500.00		4,396,500.00
08.01.11.27	69787259	UPT SMP NEGERI 7 MAPPAKASUNGGU	6,832.00	42,900,000.00		42,900,000.00		42,020,000.00	880,000.00	42,900,000.00		782,700.00		789,532.00
08.01.12.12	40308558	UPT SMP NEGERI 3 MAPPAKASUNGGU	-	47,300,000.00		47,300,000.00		39,700,000.00	7,600,000.00	47,300,000.00		399,900.00		399,900.00
08.01.12.13	40312543	UPT SMP NEGERI SATU ATAP LANTANG PEO	-	34,100,000.00		34,100,000.00		32,600,000.00	1,500,000.00	34,100,000.00		1,525,500.00		1,525,500.00
08.01.12.14	40312541	UPT SMP NEGERI SATU ATAP KALUKUANG	117,627.00	51,700,000.00	35,000,000.00	86,700,000.00		84,757,000.00	1,943,000.00	86,700,000.00		437,100.00		554,727.00
08.01.12.15	69787260	UPT SMP SATAP 11 MAPPAKASUNGGU	44,156.00	33,000,000.00		33,000,000.00		33,000,000.00	-	33,000,000.00		279,000.00		323,156.00
08.01.12.16	69786299	UPT SMPN 10 MAPPAKASUNGGU	-	27,500,000.00		27,500,000.00		27,500,000.00	-	27,500,000.00		232,500.00		232,500.00
08.01.12.17	40313979	UPT SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU	-	74,800,000.00		74,800,000.00		62,600,000.00	12,200,000.00	74,800,000.00		632,400.00		632,400.00
08.01.12.18	40318576	UPT SMP NEGERI SATU ATAP TOMPOTANAH	3,803.00	52,800,000.00	35,000,000.00	87,800,000.00		84,510,000.00	3,290,000.00	87,800,000.00		636,400.00		640,203.00
08.01.12.19	69812067	UPT SMP NEGERI 8 MAPPAKASUNGGU SATU ATAP	152,999.00	18,700,000.00		18,700,000.00		18,700,000.00	-	18,700,000.00		158,100.00		311,099.00
Jumlah Total			**285,158,798.73**	**40,372,750,000.00**	**1,865,000,000.00**	**42,237,750,000.00**	**-**	**38,421,670,235.00**	**3,816,079,765.00**	**42,237,750,000.00**	**-**	**276,062,541.00**	**-**	**561,221,339.73**

Lampiran 1d

DAFTAR KAS DI BENDAHARA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) / JKN DAN BOK
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING	SALDO AWAL 01/01/2025		PENDAPATAN		BELANJA		SALDO AKHIR		SALDO AKHIR 31/12/2025	RINCIAN SALDO AKHIR		KETERANGAN
			FKTP	BOK	FKTP	BOK	FKTP	BOK	FKTP	BOK		SALDO BANK	selisih/bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bulukunyi	0210020000006838		1,115,000.00	1,058,701,852.00	1,346,450,000.00	1,058,701,852.00	1,345,365,000.00	-	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	-	
2	Pattallasang	0210020000006871		56,200,000.00	2,215,037,670.00	1,498,509,000.00	2,215,037,670.00	1,514,785,500.00	-	39,923,500.00	39,923,500.00	39,923,500.00	-	
3	Polsel	0210020000006820		1,289,000.00	947,125,554.00	1,245,241,000.00	947,125,554.00	1,237,342,000.00	-	9,188,000.00	9,188,000.00	9,218,852.00	30,852.00	
4	Pattopakang	0210020000006803		5,083,800.00	1,342,075,804.00	1,204,920,700.00	1,342,075,804.00	1,208,765,440.00	-	1,239,060.00	1,239,060.00	1,272,052.00	32,992.00	
5	Sanrobone	0210020000006781		84,378,000.00	1,027,630,133.00	1,280,297,000.00	1,027,630,133.00	1,303,867,514.00	-	60,807,486.00	60,807,486.00	60,876,618.00	69,132.00	
6	Bontomaranmu	0210020000006773		23,068,588.00	934,821,286.00	1,022,456,412.00	934,821,286.00	1,042,487,866.00	-	3,037,134.00	3,037,134.00	3,073,222.00	36,088.00	
7	Galut	0210020000006765		800.00	1,573,023,219.00	1,331,989,000.00	1,573,023,219.00	1,330,989,800.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,019,210.00	19,210.00	
8	Polut	0210020000006862		4,305,000.00	1,853,138,309.00	1,425,042,000.00	1,853,138,309.00	1,422,982,000.00	-	6,365,000.00	6,365,000.00	6,402,572.00	37,572.00	
9	Mappakasunggu	0210020000006790		13,994,800.00	807,021,966.00	1,129,020,200.00	807,021,966.00	915,230,000.00	-	227,785,000.00	227,785,000.00	227,961,620.00	176,620.00	
10	Mangarabombang	0210020000006811		79,000.00	1,477,990,430.00	1,193,609,000.00	1,477,990,430.00	1,193,688,000.00	-	-	-	-	-	
11	Towata	0210020000006854		80,475,928.00	796,455,070.00	968,679,072.00	796,455,070.00	1,037,105,000.00	-	12,050,000.00	12,050,000.00	12,080,933.00	30,933.00	
12	Ko'mara	0210020000006846		73,850,725.00	850,344,539.00	1,146,831,275.00	850,344,539.00	1,137,832,281.00	-	82,849,719.00	82,849,719.00	82,951,953.00	102,234.00	
13	Galesong	0210020000006749		152,000.00	2,002,223,565.00	1,656,208,000.00	2,002,223,565.00	1,581,540,000.00	-	74,820,000.00	74,820,000.00	74,820,000.00	-	
14	Aeng Towa	0210020000006757		21,292,000.00	917,664,856.00	1,215,402,000.00	917,664,856.00	1,168,366,000.00	-	68,328,000.00	68,328,000.00	68,424,697.00	96,697.00	
15	Bontokassi	0210020000006889		42,028,106.00	804,198,422.00	1,173,076,894.00	804,198,422.00	1,215,059,000.00	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	-	
16	Bontomangape	0210020000001208		4,800.00	767,952,155.00	1,296,349,700.00	767,952,155.00	1,218,615,500.00	-	77,739,000.00	77,739,000.00	77,799,988.00	60,988.00	
17	Kepulauan Tanakeke	0210020000001216		182,800.00	504,355,200.00	1,197,647,400.00	504,355,200.00	1,197,478,000.00	-	352,200.00	352,200.00	389,538.00	37,338.00	
Jumlah				**407,500,347.00**	**19,879,760,030.00**	**21,331,728,653.00**	**19,879,760,030.00**	**21,071,498,901.00**	**-**	**667,730,099.00**	**667,730,099.00**	**668,460,755.00**	**730,656.00**	
18	RSUD Pratama Takalar	0210030000007378			37,251,874.00		37,251,874.00	-	-	-	-	-		
Jumlah Total			**-**	**407,500,347.00**	**19,917,011,904.00**	**21,331,728,653.00**	**19,917,011,904.00**	**21,071,498,901.00**	**-**	**667,730,099.00**	**667,730,099.00**	**668,460,755.00**	**730,656.00**	**-**

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Saldo awal Piutang 2025	Ketetapan 2025	Setoran 2025	Saldo Akhir Piutang s/d 2025	Penyisihan							Nilai Piutang Pajak Setelah Penyisihan
						Lancar (0-1 tahun)	Lancar Dengan Perhatian Khusus	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun)	Macet (> 4 tahun)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas)	Jumlah	
						1%	10%	25%	50%	100%	100%		
1. BADAN PENDAPATAN DAERAH													
Pajak Hotel	s.d 2017	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2018	2,550,000.00			2,550,000.00						2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
	2019	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2020	50,000.00			50,000.00						50,000.00	50,000.00	0.00
	2021	0.00			0.00					0.00		0.00	0.00
	2022	0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
	2023	0.00			0.00			0.00				0.00	0.00
	2024	1,162,741.00		1,162,741.00	0.00		0.00					0.00	0.00
	2025		93,373,506.00	92,813,506.00	560,000.00	5,600.00						5,600.00	554,400.00
Jumlah		**3,762,741.00**	**93,373,506.00**	**93,976,247.00**	**3,160,000.00**	**5,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600,000.00**	**2,605,600.00**	**554,400.00**
Pajak Restoran/ Rumah Makan	s.d 2012	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2013	1,000,000.00			1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	2014	900,000.00			900,000.00						900,000.00	900,000.00	0.00
	2015	900,000.00			900,000.00						900,000.00	900,000.00	0.00
	2016	5,300,000.00			5,300,000.00						5,300,000.00	5,300,000.00	0.00
	2017	1,100,000.00			1,100,000.00						1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
	2018	11,100,000.00			11,100,000.00						11,100,000.00	11,100,000.00	0.00
	2019	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2021	0.00			0.00					0.00		0.00	0.00
	2022	0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
	2023	85,549,797.00			85,549,797.00			21,387,449.25				21,387,449.25	64,162,347.75
	2024	192,494,905.00		113,028,985.00	79,465,920.00		7,946,592.00					7,946,592.00	71,519,328.00
	2025		1,773,987,143.00	1,440,171,724.00	333,815,419.00	3,338,154.19						3,338,154.19	330,477,264.81
Jumlah		**298,344,702.00**	**1,773,987,143.00**	**1,553,200,709.00**	**519,131,136.00**	**3,338,154.19**	**7,946,592.00**	**21,387,449.25**	**0.00**	**0.00**	**20,300,000.00**	**52,972,195.44**	**466,158,940.56**
Pajak Hiburan	**s.d 2015**	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2016	301,500.00			301,500.00						301,500.00	301,500.00	0.00
	2017	753,750.00			753,750.00						753,750.00	753,750.00	0.00
	2018	1,498,000.00			1,498,000.00						1,498,000.00	1,498,000.00	0.00
	2019	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2021	0.00			0.00					0.00		0.00	0.00
	2022	0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
	2023	0.00			0.00			0.00				0.00	0.00
	2024	16,783,653.00		1,893,953.00	14,889,700.00		1,488,970.00					1,488,970.00	13,400,730.00
	2025		74,676,284.00	71,442,827.00	3,233,457.00	32,334.57						32,334.57	3,201,122.43
Jumlah		**19,336,903.00**	**74,676,284.00**	**73,336,780.00**	**20,676,407.00**	**32,334.57**	**1,488,970.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,553,250.00**	**4,074,554.57**	**16,601,852.43**
Pajak Reklame	**s.d 2012**	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2013	992,500.00			992,500.00						992,500.00	992,500.00	0.00
	2014	11,662,500.00			11,662,500.00						11,662,500.00	11,662,500.00	0.00
	2015	1,000,000.00			1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	2016	12,981,252.00			12,981,252.00						12,981,252.00	12,981,252.00	0.00
	2017	4,438,000.00			4,438,000.00						4,438,000.00	4,438,000.00	0.00
	2018	5,465,625.00			5,465,625.00						5,465,625.00	5,465,625.00	0.00
	2019	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2020	3,987,500.00			3,987,500.00						3,987,500.00	3,987,500.00	0.00
	2021	2,087,500.00			2,087,500.00					2,087,500.00		2,087,500.00	0.00
	2022	0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
	2023	57,795,313.00		7,343,750.00	50,451,563.00			12,612,890.75				12,612,890.75	37,838,672.25
	2024	145,405,630.00		81,364,380.00	64,041,250.00		6,404,125.00					6,404,125.00	57,637,125.00
	2025	0.00	486,912,212.00	382,434,211.00	104,478,001.00	1,044,780.01						1,044,780.01	103,433,220.99
Jumlah		**245,815,820.00**	**486,912,212.00**	**471,142,341.00**	**261,585,691.00**	**1,044,780.01**	**6,404,125.00**	**12,612,890.75**	**0.00**	**2,087,500.00**	**40,527,377.00**	**62,676,672.76**	**198,909,018.24**

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Saldo awal Piutang 2025	Ketetapan 2025	Setoran 2025	Saldo Akhir Piutang s/d 2025	Penyisihan							Nilai Piutang Pajak Setelah Penyisihan
						Lancar (0-1 tahun)	Lancar Dengan Perhatian Khusus	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun)	Macet (> 4 tahun)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas)	Jumlah	
						1%	10%	25%	50%	100%	100%		
Pajak Penerangan Jalan	s.d 2017	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2018	40,000.00			40,000.00						40,000.00	40,000.00	0.00
	2019	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2021	406,400.00			406,400.00					406,400.00		406,400.00	0.00
	2022	20,170.00			20,170.00				10,085.00			10,085.00	10,085.00
	2023	287,400.00			287,400.00			71,850.00				71,850.00	215,550.00
	2024	1,242,175,588.00		1,242,175,588.00	0.00		0.00					0.00	0.00
	2025	0.00	14,003,547,134.00	12,723,908,358.00	1,279,638,776.00	12,796,387.76						12,796,387.76	1,266,842,388.24
Jumlah		**1,242,929,558.00**	**14,003,547,134.00**	**13,966,083,946.00**	**1,280,392,746.00**	**12,796,387.76**	**0.00**	**71,850.00**	**10,085.00**	**406,400.00**	**40,000.00**	**13,324,722.76**	**1,267,068,023.24**
PBB	**s.d 2013**	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2014	4,140,749,282.00		73,947,330.00	4,066,801,952.00						4,066,801,952.00	4,066,801,952.00	0.00
	2015	1,036,157,060.00		18,477,572.00	1,017,679,488.00						1,017,679,488.00	1,017,679,488.00	0.00
	2016	1,198,804,351.00		19,742,723.00	1,179,061,628.00						1,179,061,628.00	1,179,061,628.00	0.00
	2017	1,060,028,077.00		21,164,270.00	1,038,863,807.00						1,038,863,807.00	1,038,863,807.00	0.00
	2018	511,281,824.00		10,902,022.00	500,379,802.00						500,379,802.00	500,379,802.00	0.00
	2019	275,471,630.00		6,035,728.00	269,435,902.00						269,435,902.00	269,435,902.00	0.00
	2020	554,091,881.00		12,927,481.00	541,164,400.00						541,164,400.00	541,164,400.00	0.00
	2021	539,571,495.00		19,219,674.00	520,351,821.00					520,351,821.00		520,351,821.00	0.00
	2022	339,937,644.00		12,208,910.00	327,728,734.00				163,864,367.00			163,864,367.00	163,864,367.00
	2023	719,208,618.00		40,847,719.00	678,360,899.00			169,590,224.75				169,590,224.75	508,770,674.25
	2024	1,251,426,232.00		154,529,809.00	1,096,896,423.00		109,689,642.30					109,689,642.30	987,206,780.70
	2025	0.00	6,028,208,004.00	5,325,061,447.00	703,146,557.00	7,031,465.57						7,031,465.57	696,115,091.43
Jumlah		**11,626,728,094.00**	**6,028,208,004.00**	**5,715,064,685.00**	**11,939,871,413.00**	**7,031,465.57**	**109,689,642.30**	**169,590,224.75**	**163,864,367.00**	**520,351,821.00**	**8,613,386,979.00**	**9,583,914,499.62**	**2,355,956,913.38**
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	s.d 2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2021	0.00			0.00							0.00	0.00
	2022	0.00			0.00							0.00	0.00
	2023	2,660,000.00			2,660,000.00			665,000.00				665,000.00	1,995,000.00
	2024	0.00			0.00		0.00				0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	1,671,000.00	1,671,000.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00
Jumlah		**2,660,000.00**	**1,671,000.00**	**1,671,000.00**	**2,660,000.00**	**0.00**	**0.00**	**665,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**665,000.00**	**1,995,000.00**
BPHTB	**s.d 2015**	0.00			0.00							0.00	0.00
	2016	26,254,833.00			26,254,833.00						26,254,833.00	26,254,833.00	0.00
	2017	1,000,000.00			1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	2018	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2019	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2021	0.00			0.00					0.00		0.00	0.00
	2022	0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
	2023	0.00			0.00			0.00				0.00	0.00
	2024	0.00			0.00		0.00					0.00	0.00
	2025	0.00	8,560,881,562.00	8,560,881,562.00	0.00	0.00						0.00	0.00
Jumlah		**27,254,833.00**	**8,560,881,562.00**	**8,560,881,562.00**	**27,254,833.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,254,833.00**	**27,254,833.00**	**0.00**
Pajak Parkir	s.d 2021	0.00			0.00					0.00		0.00	0.00
	2022	0.00			0.00				0.00			0.00	0.00
	2023	0.00			0.00			0.00				0.00	0.00
	2024	22,756,500.00		22,756,500.00	0.00		0.00					0.00	0.00
	2025	0.00	590,877,380.00	502,796,380.00	88,081,000.00	880,810.00						880,810.00	87,200,190.00
Jumlah		**22,756,500.00**	**590,877,380.00**	**525,552,880.00**	**88,081,000.00**	**880,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**880,810.00**	**87,200,190.00**
Pajak Air Bawah Tanah	s.d 2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	2021	0.00			0.00					0.00		0.00	0.00
	2022	1,836,300.00			1,836,300.00				918,150.00			918,150.00	918,150.00
	2023	3,264,800.00			3,264,800.00			816,200.00				816,200.00	2,448,600.00
	2024	24,267,600.00		22,120,800.00	2,146,800.00		214,680.00					214,680.00	1,932,120.00
	2025	0.00	588,223,340.00	554,077,666.00	34,145,674.00	341,456.74						341,456.74	33,804,217.26
Jumlah		**29,368,700.00**	**588,223,340.00**	**576,198,466.00**	**41,393,574.00**	**341,456.74**	**214,680.00**	**816,200.00**	**918,150.00**	**0.00**	**0.00**	**2,290,486.74**	**39,103,087.26**
TOTAL		**13,518,957,851.00**	**32,202,357,565.00**	**31,537,108,616.00**	**14,184,206,800.00**	**25,470,988.84**	**125,744,009.30**	**205,143,614.75**	**164,792,602.00**	**522,845,721.00**	**8,706,662,439.00**	**9,750,659,374.89**	**4,433,547,425.11**

Lampiran 3

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal Piutang	Penetapan Tahun 2025	Penyetoran Tahun 2025	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan							Saldo setelah penyisihan
							Lancar (0-1 tahun, 1%)	Lancar Dengan Perhatian Khusus (> 1	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun, 25%)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun, 50%)	Macet (> 4 tahun,100%)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas, 100%)	Jumlah	
	Kios	2014	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
		2015	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
		2016	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
		2017	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
		2018	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
		2019	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
		2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
		2021	250,000.00			250,000.00					250,000.00		250,000.00	0.00
		2022	1,200,000.00			1,200,000.00				600,000.00			600,000.00	600,000.00
		2023	17,850,000.00			17,850,000.00			4,462,500.00				4,462,500.00	13,387,500.00
		2024	28,500,000.00			28,500,000.00		2,850,000.00					2,850,000.00	25,650,000.00
		2025	0.00	59,250,000.00	21,000,000.00	38,250,000.00	382,500.00						382,500.00	37,867,500.00
Jumlah			**47,800,000.00**	**59,250,000.00**	**21,000,000.00**	**86,050,000.00**	**382,500.00**	**2,850,000.00**	**4,462,500.00**	**600,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**8,545,000.00**	**77,505,000.00**
Jumlah Piutang Retribusi Pelataran			**47,800,000.00**	**59,250,000.00**	**21,000,000.00**	**86,050,000.00**	**382,500.00**	**2,850,000.00**	**4,462,500.00**	**600,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**8,545,000.00**	**77,505,000.00**
													0.00	0.00
2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan													0.00	0.00
												0.00	0.00	0.00
		2019	350,000.00			350,000.00						350,000.00	350,000.00	0.00
		2020	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	Retribusi Pelayanan Pasar	2021	0.00			0.00					0.00		0.00	0.00
	1) Alun-alun Kios Makattang Daeng Sibali	2022	450,000.00			450,000.00				225,000.00			225,000.00	225,000.00
		2023	0.00			0.00			0.00				0.00	0.00
		2024	43,275,779.00			43,275,779.00		4,327,577.90					4,327,577.90	38,948,201.10
		2025	0.00	200,107,006.00	102,154,536.00	97,952,470.00	979,524.70						979,524.70	96,972,945.30
	Jumlah		**44,075,779.00**	**200,107,006.00**	**102,154,536.00**	**142,028,249.00**	**979,524.70**	**4,327,577.90**	**0.00**	**225,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**5,882,102.60**	**136,146,146.40**
		2014	44,500,000.00			44,500,000.00						44,500,000.00	44,500,000.00	0.00
		2015	40,230,000.00			40,230,000.00						40,230,000.00	40,230,000.00	0.00
		2016	14,780,000.00			14,780,000.00						14,780,000.00	14,780,000.00	0.00
		2017	22,790,000.00			22,790,000.00						22,790,000.00	22,790,000.00	0.00
		2018	0.00			0.00						0.00	0.00	0.00
	Retribusi Pemakaian	2019	64,515,000.00			64,515,000.00						64,515,000.00	64,515,000.00	0.00
	2) Kekayaan Daerah (Sewa Rumah Dinas)	2020	40,850,000.00			40,850,000.00						40,850,000.00	40,850,000.00	0.00
		2021	44,600,000.00			44,600,000.00					44,600,000.00		44,600,000.00	0.00
		2022	47,375,000.00			47,375,000.00				23,687,500.00			23,687,500.00	23,687,500.00
		2023	41,912,500.00		2,552,000.00	39,360,500.00			9,840,125.00				9,840,125.00	29,520,375.00
		2024	42,950,000.00		5,000,000.00	37,950,000.00		3,795,000.00					3,795,000.00	34,155,000.00
		2025	0.00	64,200,000.00	29,048,000.00	35,152,000.00	351,520.00						351,520.00	34,800,480.00
	Jumlah		**404,502,500.00**	**64,200,000.00**	**36,600,000.00**	**432,102,500.00**	**351,520.00**	**3,795,000.00**	**9,840,125.00**	**23,687,500.00**	**44,600,000.00**	**227,665,000.00**	**309,939,145.00**	**122,163,355.00**
Jumlah Piutang Retribusi Penyewaan Tanah			**448,578,279.00**	**264,307,006.00**	**138,754,536.00**	**574,130,749.00**	**1,331,044.70**	**8,122,577.90**	**9,840,125.00**	**23,912,500.00**	**44,600,000.00**	**228,015,000.00**	**315,821,247.60**	**258,309,501.40**
TOTAL PIUTANG RETRIBUSI			**496,378,279.00**	**323,557,006.00**	**159,754,536.00**	**660,180,749.00**	**1,713,544.70**	**10,972,577.90**	**14,302,625.00**	**24,512,500.00**	**44,850,000.00**	**228,015,000.00**	**324,366,247.60**	**335,814,501.40**

Lampiran 3a

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR PIUTANG DAN PENYISIHAN RETRIBUSI DAERAH
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal Piutang	Penetapan Tahun 2025	Penyetoran Tahun 2025	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan							Saldo setelah penyisihan
							Lancar (0-1 tahun, 1%)	Lancar Dengan Perhatian Khusus (> 1 s.d. < 2 tahun, 10%)	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun, 25%)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun, 50%)	Macet (> 4 tahun,100%)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas, 100%)	Jumlah	
A	**Dinas Perhubungan**													
	1) Retribusi Menara Telekomu	2015	88,871,773.00	0.00	0.00	88,871,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,871,773.00	88,871,773.00	0.00
	Jumlah		**88,871,773.00**	**0.00**	**0.00**	**88,871,773.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,871,773.00**	**88,871,773.00**	**0.00**
B	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**													
1	**Piutang Retribusi Pelataran**													
	3) Retribusi Pelayanan Pasar Lods													
1	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods dan kios) Pasar Aeng Towa	2014	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00						1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
		2015	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2016	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2017	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2018	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00						7,800,000.00	7,800,000.00	0.00
		2019	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00						1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
		2020	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00						2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
		2021	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00					1,950,000.00		1,950,000.00	0.00
		2022	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00				210,000.00			210,000.00	210,000.00
		2023	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00			572,500.00				572,500.00	1,717,500.00
		2024	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00		1,260,000.00					1,260,000.00	11,340,000.00
		2025		17,700,000.00	3,450,000.00	14,250,000.00	142,500.00						142,500.00	14,107,500.00
	Jumlah		**29,780,000.00**	**17,700,000.00**	**3,450,000.00**	**44,030,000.00**	**142,500.00**	**1,260,000.00**	**572,500.00**	**210,000.00**	**1,950,000.00**	**12,520,000.00**	**16,655,000.00**	**27,375,000.00**
2	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods) Pasar Bontolebang	2014	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00						1,720,000.00	1,720,000.00	0.00
		2015	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00						1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
		2016	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00						2,430,000.00	2,430,000.00	0.00
		2017	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00						2,220,000.00	2,220,000.00	0.00
		2018	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00						3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
		2019	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00						1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
		2020	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00						710,000.00	710,000.00	0.00
		2021	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00					1,580,000.00		1,580,000.00	0.00
		2022	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00				760,000.00			760,000.00	760,000.00
		2023	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00			290,000.00				290,000.00	870,000.00
		2024	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00		204,000.00					204,000.00	1,836,000.00
		2025		4,200,000.00	950,000.00	3,250,000.00	32,500.00						32,500.00	3,217,500.00
	Jumlah		**20,110,000.00**	**4,200,000.00**	**950,000.00**	**23,360,000.00**	**32,500.00**	**204,000.00**	**290,000.00**	**760,000.00**	**1,580,000.00**	**13,810,000.00**	**16,676,500.00**	**6,683,500.00**
3	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods dan kios) Pasar Bontorita	2014	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00						1,090,000.00	1,090,000.00	0.00
		2015	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00						790,000.00	790,000.00	0.00
		2016	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00						2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
		2017	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00						2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
		2018	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00						4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
		2019	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2020	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00						1,980,000.00	1,980,000.00	0.00
		2021	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00					1,860,000.00		1,860,000.00	0.00
		2022	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00				1,110,000.00			1,110,000.00	1,110,000.00
		2023	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00			112,500.00				112,500.00	337,500.00
		2024	8,350,000.00	0.00	0.00	8,350,000.00		835,000.00					835,000.00	7,515,000.00
		2025		23,100,000.00	6,275,000.00	16,825,000.00	168,250.00						168,250.00	16,656,750.00
	Jumlah		**26,890,000.00**	**23,100,000.00**	**6,275,000.00**	**43,715,000.00**	**168,250.00**	**835,000.00**	**112,500.00**	**1,110,000.00**	**1,860,000.00**	**14,010,000.00**	**18,095,750.00**	**25,619,250.00**
4	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods + Kios) Pasar Galesong	2014	8,030,000.00	0.00	0.00	8,030,000.00						8,030,000.00	8,030,000.00	0.00
		2015	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00						6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
		2016	6,640,000.00	0.00	0.00	6,640,000.00						6,640,000.00	6,640,000.00	0.00
		2017	6,860,000.00	0.00	0.00	6,860,000.00						6,860,000.00	6,860,000.00	0.00
		2018	12,600,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00						12,600,000.00	12,600,000.00	0.00
		2019	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2020	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00						3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
		2021	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00					1,350,000.00		1,350,000.00	0.00
		2022	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00				2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
		2023	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00			312,500.00				312,500.00	937,500.00
		2024	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00		750,000.00					750,000.00	6,750,000.00

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal Piutang	Penetapan Tahun 2025	Penyetoran Tahun 2025	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan							Saldo setelah penyisihan
							Lancar (0-1 tahun, 1%)	Lancar Dengan Perhatian Khusus (> 1 s.d. < 2 tahun, 10%)	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun, 25%)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun, 50%)	Macet (> 4 tahun,100%)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas, 100%)	Jumlah	
		2025		59,250,000.00	9,050,000.00	50,200,000.00	502,000.00						502,000.00	49,698,000.00
	Jumlah		**58,680,000.00**	**59,250,000.00**	**9,050,000.00**	**108,880,000.00**	**502,000.00**	**750,000.00**	**312,500.00**	**2,000,000.00**	**1,350,000.00**	**44,580,000.00**	**49,494,500.00**	**59,385,500.00**
5	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods dan Kios) Pasar Jonggowa	2014	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00						1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
		2015	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00						2,060,000.00	2,060,000.00	0.00
		2016	3,040,000.00	0.00	0.00	3,040,000.00						3,040,000.00	3,040,000.00	0.00
		2017	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00						1,970,000.00	1,970,000.00	0.00
		2018	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00						3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		2019	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00						1,210,000.00	1,210,000.00	0.00
		2020	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00						300,000.00	300,000.00	0.00
		2021	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00					1,200,000.00		1,200,000.00	0.00
		2022	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00				840,000.00			840,000.00	840,000.00
		2023	1,130,000.00	0.00	0.00	1,130,000.00			282,500.00				282,500.00	847,500.00
		2024	22,300,000.00	0.00	0.00	22,300,000.00		2,230,000.00					2,230,000.00	20,070,000.00
		2025		31,800,000.00	8,750,000.00	23,050,000.00	230,500.00						230,500.00	22,819,500.00
	Jumlah		**39,150,000.00**	**31,800,000.00**	**8,750,000.00**	**62,200,000.00**	**230,500.00**	**2,230,000.00**	**282,500.00**	**840,000.00**	**1,200,000.00**	**12,840,000.00**	**17,623,000.00**	**44,577,000.00**
6	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods + Kios) Pasar Lengkese	2014	1,745,000.00	0.00	0.00	1,745,000.00						1,745,000.00	1,745,000.00	0.00
		2015	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00						2,640,000.00	2,640,000.00	0.00
		2016	4,732,500.00	0.00	0.00	4,732,500.00						4,732,500.00	4,732,500.00	0.00
		2017	6,160,000.00	0.00	0.00	6,160,000.00						6,160,000.00	6,160,000.00	0.00
		2018	10,590,000.00	0.00	0.00	10,590,000.00						10,590,000.00	10,590,000.00	0.00
		2019	3,470,000.00	0.00	0.00	3,470,000.00						3,470,000.00	3,470,000.00	0.00
		2020	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00						500,000.00	500,000.00	0.00
		2021	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00					2,500,000.00		2,500,000.00	0.00
		2022	3,810,000.00	0.00	0.00	3,810,000.00				1,905,000.00			1,905,000.00	1,905,000.00
		2023	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00			987,500.00				987,500.00	2,962,500.00
		2024	10,435,000.00	0.00	0.00	10,435,000.00		1,043,500.00					1,043,500.00	9,391,500.00
		2025		25,800,000.00	14,375,000.00	11,425,000.00	114,250.00						114,250.00	11,310,750.00
	Jumlah		**50,532,500.00**	**25,800,000.00**	**14,375,000.00**	**61,957,500.00**	**114,250.00**	**1,043,500.00**	**987,500.00**	**1,905,000.00**	**2,500,000.00**	**29,837,500.00**	**36,387,750.00**	**25,569,750.00**
7	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods dan Kios) Pasar Malolo	2014	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00						1,930,000.00	1,930,000.00	0.00
		2015	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00						2,040,000.00	2,040,000.00	0.00
		2016	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00						2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
		2017	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00						1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
		2018	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00						1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
		2019	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2020	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2021	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00					2,870,000.00		2,870,000.00	0.00
		2022	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00				1,480,000.00			1,480,000.00	1,480,000.00
		2023	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00			122,500.00				122,500.00	367,500.00
		2024	11,820,000.00	0.00	0.00	11,820,000.00		1,182,000.00					1,182,000.00	10,638,000.00
		2025		12,450,000.00	3,725,000.00	8,725,000.00	87,250.00						87,250.00	8,637,750.00
	Jumlah		**27,210,000.00**	**12,450,000.00**	**3,725,000.00**	**35,935,000.00**	**87,250.00**	**1,182,000.00**	**122,500.00**	**1,480,000.00**	**2,870,000.00**	**9,070,000.00**	**14,811,750.00**	**21,123,250.00**
8	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods dan Kios) Pasar Palleko	2014	4,740,000.00	0.00	0.00	4,740,000.00						4,740,000.00	4,740,000.00	0.00
		2015	5,670,000.00	0.00	0.00	5,670,000.00						5,670,000.00	5,670,000.00	0.00
		2016	6,840,000.00	0.00	0.00	6,840,000.00						6,840,000.00	6,840,000.00	0.00
		2017	6,430,000.00	0.00	0.00	6,430,000.00						6,430,000.00	6,430,000.00	0.00
		2018	11,760,000.00	0.00	0.00	11,760,000.00						11,760,000.00	11,760,000.00	0.00
		2019	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00						1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
		2020	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2021	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	0.00
		2022	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00				705,000.00			705,000.00	705,000.00
		2023	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00			202,500.00				202,500.00	607,500.00
		2024	6,390,000.00	0.00	2,250,000.00	4,140,000.00		414,000.00					414,000.00	3,726,000.00
		2025		8,400,000.00	8,025,000.00	375,000.00	3,750.00						3,750.00	371,250.00
	Jumlah		**45,590,000.00**	**8,400,000.00**	**10,275,000.00**	**43,715,000.00**	**3,750.00**	**414,000.00**	**202,500.00**	**705,000.00**	**0.00**	**36,980,000.00**	**38,305,250.00**	**5,409,750.00**
9	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods) Pasar Kalongkong	2014	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00						140,000.00	140,000.00	0.00
		2015	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00						220,000.00	220,000.00	0.00
		2016	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00						890,000.00	890,000.00	0.00
		2017	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2018	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2019	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2020	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2021	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00					1,800,000.00		1,800,000.00	0.00
		2022	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00
		2023	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00
		2024	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00		156,000.00					156,000.00	1,404,000.00
		2025				0.00	0.00						0.00	0.00

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal Piutang	Penetapan Tahun 2025	Penyetoran Tahun 2025	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan							Saldo setelah penyisihan
							Lancar (0-1 tahun, 1%)	Lancar Dengan Perhatian Khusus (> 1 s.d. < 2 tahun, 10%)	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun, 25%)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun, 50%)	Macet (> 4 tahun,100%)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas, 100%)	Jumlah	
	Jumlah		4,610,000.00	0.00	0.00	4,610,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,250,000.00	3,206,000.00	1,404,000.00

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal Piutang	Penetapan Tahun 2025	Penyetoran Tahun 2025	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan							Saldo setelah penyisihan
							Lancar (0-1 tahun, 1%)	Lancar Dengan Perhatian Khusus (> 1 s.d. < 2 tahun, 10%)	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun, 25%)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun, 50%)	Macet (> 4 tahun,100%)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas, 100%)	Jumlah	
10	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods dan Kios) Pasar Pattalassang	2014	72,545,000.00	0.00	0.00	72,545,000.00						72,545,000.00	72,545,000.00	0.00
		2015	59,810,000.00	0.00	0.00	59,810,000.00						59,810,000.00	59,810,000.00	0.00
		2016	16,720,000.00	0.00	0.00	16,720,000.00						16,720,000.00	16,720,000.00	0.00
		2017	21,620,000.00	0.00	0.00	21,620,000.00						21,620,000.00	21,620,000.00	0.00
		2018	32,850,000.00	0.00	0.00	32,850,000.00						32,850,000.00	32,850,000.00	0.00
		2019	17,280,000.00	0.00	0.00	17,280,000.00						17,280,000.00	17,280,000.00	0.00
		2020	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00						3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
		2021	7,570,000.00	0.00	0.00	7,570,000.00					7,570,000.00		7,570,000.00	0.00
		2022	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00				5,250,000.00			5,250,000.00	5,250,000.00
		2023	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00			850,000.00				850,000.00	2,550,000.00
		2024	28,400,000.00	0.00	0.00	28,400,000.00		2,840,000.00					2,840,000.00	25,560,000.00
		2025		48,000,000.00	14,050,000.00	33,950,000.00	339,500.00						339,500.00	33,610,500.00
	Jumlah		**274,195,000.00**	**48,000,000.00**	**14,050,000.00**	**308,145,000.00**	**339,500.00**	**2,840,000.00**	**850,000.00**	**5,250,000.00**	**7,570,000.00**	**224,325,000.00**	**241,174,500.00**	**66,970,500.00**
11	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods) Pasar Sentral	2014	24,420,000.00	0.00	0.00	24,420,000.00						24,420,000.00	24,420,000.00	0.00
		2015	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00						31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
		2016	27,240,000.00	0.00	0.00	27,240,000.00						27,240,000.00	27,240,000.00	0.00
		2017	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00						3,860,000.00	3,860,000.00	0.00
		2018	27,100,000.00	0.00	0.00	27,100,000.00						27,100,000.00	27,100,000.00	0.00
		2019	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00						9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
		2020	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00						3,540,000.00	3,540,000.00	0.00
		2021	11,290,000.00	0.00	0.00	11,290,000.00					11,290,000.00		11,290,000.00	0.00
		2022	2,540,000.00	0.00	0.00	2,540,000.00				1,270,000.00			1,270,000.00	1,270,000.00
		2023	8,640,000.00	0.00	0.00	8,640,000.00			2,160,000.00				2,160,000.00	6,480,000.00
		2024	151,725,000.00	0.00	3,370,000.00	148,355,000.00		14,835,500.00					14,835,500.00	133,519,500.00
		2025		34,500,000.00	8,490,000.00	26,010,000.00	260,100.00						260,100.00	25,749,900.00
	Jumlah		**300,655,000.00**	**34,500,000.00**	**11,860,000.00**	**323,295,000.00**	**260,100.00**	**14,835,500.00**	**2,160,000.00**	**1,270,000.00**	**11,290,000.00**	**126,460,000.00**	**156,275,600.00**	**167,019,400.00**
12	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods + Kios) Pasar Soreang	2014	2,010,000.00	0.00	0.00	2,010,000.00						2,010,000.00	2,010,000.00	0.00
		2015	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2016	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2017	2,915,000.00	0.00	0.00	2,915,000.00						2,915,000.00	2,915,000.00	0.00
		2018	8,220,000.00	0.00	0.00	8,220,000.00						8,220,000.00	8,220,000.00	0.00
		2019	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2020	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2021	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00					4,500,000.00		4,500,000.00	0.00
		2022	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00				1,750,000.00			1,750,000.00	1,750,000.00
		2023	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00			610,000.00				610,000.00	1,830,000.00
		2024	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00		660,000.00					660,000.00	5,940,000.00
		2025		6,750,000.00	1,450,000.00	5,300,000.00	53,000.00						53,000.00	5,247,000.00
	Jumlah		**30,185,000.00**	**6,750,000.00**	**1,450,000.00**	**35,485,000.00**	**53,000.00**	**660,000.00**	**610,000.00**	**1,750,000.00**	**4,500,000.00**	**13,145,000.00**	**20,718,000.00**	**14,767,000.00**
13	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Kios & Lods) Pasar Tala-Tala	2014	4,915,000.00	0.00	0.00	4,915,000.00						4,915,000.00	4,915,000.00	0.00
		2015	3,385,000.00	0.00	0.00	3,385,000.00						3,385,000.00	3,385,000.00	0.00
		2016	5,632,500.00	0.00	0.00	5,632,500.00						5,632,500.00	5,632,500.00	0.00
		2017	7,520,000.00	0.00	0.00	7,520,000.00						7,520,000.00	7,520,000.00	0.00
		2018	11,220,000.00	0.00	0.00	11,220,000.00						11,220,000.00	11,220,000.00	0.00
		2019	3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00						3,390,000.00	3,390,000.00	0.00
		2020	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
		2021	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00					2,000,000.00		2,000,000.00	0.00
		2022	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00				800,000.00			800,000.00	800,000.00
		2023	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00			217,500.00				217,500.00	652,500.00
		2024	4,705,000.00	0.00	0.00	4,705,000.00		470,500.00					470,500.00	4,234,500.00
		2025		17,400,000.00	3,050,000.00	14,350,000.00	143,500.00						143,500.00	14,206,500.00
	Jumlah		**46,237,500.00**	**17,400,000.00**	**3,050,000.00**	**60,587,500.00**	**143,500.00**	**470,500.00**	**217,500.00**	**800,000.00**	**2,000,000.00**	**37,062,500.00**	**40,694,000.00**	**19,893,500.00**
14	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods + Kios) Pasar Bulukunyi	2014	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2015	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00						610,000.00	610,000.00	0.00
		2016	9,427,500.00	0.00	0.00	9,427,500.00						9,427,500.00	9,427,500.00	0.00
		2017	14,472,500.00	0.00	0.00	14,472,500.00						14,472,500.00	14,472,500.00	0.00
		2018	21,420,000.00	0.00	0.00	21,420,000.00						21,420,000.00	21,420,000.00	0.00
		2019	5,920,000.00	0.00	0.00	5,920,000.00						5,920,000.00	5,920,000.00	0.00
		2020	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00						1,820,000.00	1,820,000.00	0.00
		2021	5,350,000.00	0.00	0.00	5,350,000.00					5,350,000.00		5,350,000.00	0.00
		2022	28,430,500.00	0.00	0.00	28,430,500.00				14,215,250.00			14,215,250.00	14,215,250.00
		2023	3,420,000.00	0.00	0.00	3,420,000.00			855,000.00				855,000.00	2,565,000.00
		2024	11,635,000.00	0.00	4,175,000.00	7,460,000.00		746,000.00					746,000.00	6,714,000.00
		2025		49,200,000.00	37,900,000.00	11,300,000.00	113,000.00						113,000.00	11,187,000.00
	Jumlah		**102,505,500.00**	**49,200,000.00**	**42,075,000.00**	**109,630,500.00**	**113,000.00**	**746,000.00**	**855,000.00**	**14,215,250.00**	**5,350,000.00**	**53,670,000.00**	**74,949,250.00**	**34,681,250.00**

No	Uraian	Tahun	Saldo Awal Piutang	Penetapan Tahun 2025	Penyetoran Tahun 2025	Saldo Piutang Per 31 Desember 2025	Penyisihan							Saldo setelah penyisihan
							Lancar (0-1 tahun, 1%)	Lancar Dengan Perhatian Khusus (> 1 s.d. < 2 tahun, 10%)	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun, 25%)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun, 50%)	Macet (> 4 tahun,100%)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas, 100%)	Jumlah	
15	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods) Pasar Tammuloe	2014	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2015	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2016	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2017	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2018	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2019	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00						2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
		2020	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00						1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
		2021	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00					1,210,000.00		1,210,000.00	0.00
		2022	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00				1,340,000.00			1,340,000.00	1,340,000.00
		2023	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00			87,500.00				87,500.00	262,500.00
		2024	2,420,000.00	0.00	860,000.00	1,560,000.00		156,000.00					156,000.00	1,404,000.00
		2025		2,700,000.00	1,500,000.00	1,200,000.00	12,000.00						12,000.00	1,188,000.00
	Jumlah		**9,990,000.00**	**2,700,000.00**	**2,360,000.00**	**10,330,000.00**	**12,000.00**	**156,000.00**	**87,500.00**	**1,340,000.00**	**1,210,000.00**	**3,330,000.00**	**6,135,500.00**	**4,194,500.00**
16	Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Lods + Kios) Pasar Tepo	2022	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00
		2023	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			50,000.00				50,000.00	150,000.00
		2024	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		250,000.00					250,000.00	2,250,000.00
		2025		8,550,000.00	6,550,000.00	2,000,000.00	20,000.00						20,000.00	1,980,000.00
	Jumlah		**2,700,000.00**	**8,550,000.00**	**6,550,000.00**	**4,700,000.00**	**20,000.00**	**250,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	**4,380,000.00**
	Kios Pasar Sentral	2014	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00						1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
		2015	20,450,000.00	0.00	0.00	20,450,000.00						20,450,000.00	20,450,000.00	0.00
		2016	48,975,000.00	0.00	0.00	48,975,000.00						48,975,000.00	48,975,000.00	0.00
		2017	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2018	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2019	40,620,000.00	0.00	0.00	40,620,000.00						40,620,000.00	40,620,000.00	0.00
		2020	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00						3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
		2021	52,350,000.00	0.00	0.00	52,350,000.00					52,350,000.00		52,350,000.00	0.00
		2022	57,050,000.00	0.00	0.00	57,050,000.00				28,525,000.00			28,525,000.00	28,525,000.00
		2023	99,588,500.00	0.00	750,000.00	98,838,500.00			24,709,625.00				24,709,625.00	74,128,875.00
		2024	52,725,000.00	0.00	3,900,000.00	48,825,000.00		4,882,500.00					4,882,500.00	43,942,500.00
		2025		152,000,000.00	50,150,000.00	101,850,000.00	1,018,500.00						1,018,500.00	100,831,500.00
	Jumlah		**376,658,500.00**	**152,000,000.00**	**54,800,000.00**	**473,858,500.00**	**1,018,500.00**	**4,882,500.00**	**24,709,625.00**	**28,525,000.00**	**52,350,000.00**	**114,945,000.00**	**226,430,625.00**	**247,427,875.00**
	Sussung Pasar													
	Jumlah Piutang Retribusi Pelataran		**1,445,679,000.00**	**501,800,000.00**	**193,045,000.00**	**1,754,434,000.00**	**3,240,600.00**	**32,915,000.00**	**32,422,125.00**	**62,160,250.00**	**99,380,000.00**	**747,835,000.00**	**977,952,975.00**	**776,481,025.00**
2. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan														
	1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Ruko) Pasar Sentral	2014	32,150,000.00	0.00	0.00	32,150,000.00						32,150,000.00	32,150,000.00	0.00
		2015	37,900,000.00	0.00	0.00	37,900,000.00						37,900,000.00	37,900,000.00	0.00
		2016	311,850,000.00	0.00	0.00	311,850,000.00						311,850,000.00	311,850,000.00	0.00
		2017	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2018	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00
		2019	96,500,000.00	0.00	0.00	96,500,000.00						96,500,000.00	96,500,000.00	0.00
		2020	237,500,000.00	0.00	0.00	237,500,000.00						237,500,000.00	237,500,000.00	0.00
		2021	257,000,000.00	0.00	0.00	257,000,000.00					257,000,000.00		257,000,000.00	0.00
		2022	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00				45,000,000.00			45,000,000.00	45,000,000.00
		2023	193,500,000.00	0.00	0.00	193,500,000.00			48,375,000.00				48,375,000.00	145,125,000.00
		2024	213,200,000.00	0.00	84,500,000.00	128,700,000.00		12,870,000.00					12,870,000.00	115,830,000.00
		2025		300,000,000.00	191,000,000.00	109,000,000.00	1,090,000.00						1,090,000.00	107,910,000.00
	Jumlah		**1,469,600,000.00**	**300,000,000.00**	**275,500,000.00**	**1,494,100,000.00**	**1,090,000.00**	**12,870,000.00**	**48,375,000.00**	**45,000,000.00**	**257,000,000.00**	**715,900,000.00**	**1,080,235,000.00**	**413,865,000.00**
	Jumlah Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		**2,915,279,000.00**	**801,800,000.00**	**468,545,000.00**	**3,248,534,000.00**	**4,330,600.00**	**45,785,000.00**	**80,797,125.00**	**107,160,250.00**	**356,380,000.00**	**1,463,735,000.00**	**2,058,187,975.00**	**1,190,346,025.00**
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/sussung pasar		**3,004,150,773.00**	**801,800,000.00**	**468,545,000.00**	**3,337,405,773.00**	**4,330,600.00**	**45,785,000.00**	**80,797,125.00**	**107,160,250.00**	**356,380,000.00**	**1,552,606,773.00**	**2,147,059,748.00**	**1,190,346,025.00**

Lampiran 3b

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
RINCIAN SALDO PIUTANG RETRIBUSI SEWA EMPANG
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama Empang	Nama Penyewa	Tanggal/ tahun Penyewaan Empang	Tanggal waktu Penyelesaian	Umur	Nilai Kontrak	Saldo Awal (Per 1/1/2025	Kontrak/ Penetapan 2025	Penyetoran 2025	Saldo Akhir (Per 31/12/2025)	Piutang sewa empang dan Pabrik ES					Total Penyisihan	Saldo setelah Penyisihan (Per 31/12/2025)
											LANCAR (0-1)	LANCAR DNG PERHATIAN KHUSUS (>1,<=2)	KURANG LANCAR (>2,<=3)	KURANG LANCAR (>3,<=4)	MACET (>4,<=5)		
											1%	10%	25%	50%	100%		
1	Bo'donga	Ir. Alimuddin	2003	2006	15	9,000,000.00	6,500,000.00			6,500,000.00					6,500,000.00	6,500,000.00	-
2	Lompoa	Lemang R	2003	2006	15	100,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	Lompoa	DR. H. Muhlis Matu, MBA	2006	2009	13	125,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00					25,000,000.00	25,000,000.00	-
4	Dengkang	Alimuddin Gassing	2003	2006	15	30,150,000.00	16,900,000.00			16,900,000.00					16,900,000.00	16,900,000.00	-
5	Dengkang	DR. H. Muhlis Matu, MBA	2006	2009	13	33,015,000.00	8,015,000.00			8,015,000.00					8,015,000.00	8,015,000.00	-
	Kontrak 2012						-			-					-	-	-
6	Tepo'	H. Jamaluddin Naro	1-Sep-12	1-Sep-15	7	115,000,000.00	65,000,000.00			65,000,000.00					65,000,000.00	65,000,000.00	-
	Kontrak 2013						-			-					-	-	-
7	Ongkoa	Mallingkai Dg. Tombong	1-Apr-13	1-Aug-16	6	60,500,000.00	26,500,000.00			26,500,000.00					26,500,000.00	26,500,000.00	-
8	Parialau	Hamdani	1-Apr-13	1-Aug-16	6	15,000,000.00	-			-					-	-	-
9	Dengkang	Muh. Alwi Latief	1-Apr-13	1-Aug-16	6	60,125,000.00	-			-					-	-	-
10	Bo'donga	Nurhidayat.A	1-Apr-13	1-Aug-16	6	10,000,000.00	-			-					-	-	-
11	Lompoa	Hasanuddin	1-Apr-13	1-Aug-16	6	140,500,000.00	80,500,000.00			80,500,000.00					80,500,000.00	80,500,000.00	-
12	Puntondo	Muh. Kasim, S.Com	1-May-13	1-Sep-16	6	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00					6,000,000.00	6,000,000.00	-
13	Saro'	Nurhidayat.A	1-Apr-13	1-Aug-16	6	60,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00	-
	Kontrak 2015						-			-					-	-	-
14	Kalokkoka	Harismunanto	1-Dec-15	1-Dec-18	4	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00		-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00	-
15	Pandanga	Abdul latif dg serang	1-Dec-15	1-Dec-18	4	103,000,000.00	26,600,000.00			26,600,000.00		-	-	-	26,600,000.00	26,600,000.00	-
Total s/d 2016						**871,790,000.00**	**280,515,000.00**	**-**	**-**	**280,515,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280,515,000.00**	**280,515,000.00**	**-**
16	9 empang	Perusda Panrannuangku	18-Jan-21	31-Dec-21	1	145,000,000.00	-			-	-	-	-	-	-	-	-
17	9 empang	Perusda Panrannuangku	18-Jan-22	31-Dec-22	1	145,000,000.00	-			-	-	-	-	-	-	-	-
18	9 empang	Perusda Panrannuangku	18-Jan-23	31-Dec-23	1	145,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00	-	-	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	52,500,000.00
Total SEWA EMPANG						**435,000,000.00**	**70,000,000.00**	**-**	**-**	**70,000,000.00**	**-**	**-**	**17,500,000.00**	**-**	**-**	**17,500,000.00**	**52,500,000.00**
Total sewa BMD						**1,306,790,000.00**	**350,515,000.00**	**-**	**-**	**350,515,000.00**	**-**	**-**	**17,500,000.00**	**-**	**280,515,000.00**	**298,015,000.00**	**52,500,000.00**

Lampiran 4

Tabel 13
RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE KAB. TAKALAR
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Piutang	Keterangan / Klaim Bulan	Rekanan	Umur Piutang	%	Penyisihan Piutang	Piutang Seteleh Penyisihan
1	**Klaim Pelayanan BPJS**							
	Rawat Jalan	2,122,104,100.00	Desember 2025	BPJS Takalar	1 Bulan	0%	0.00	2,122,104,100.00
	Rawat Inap	3,273,468,100.00	Desember 2025	BPJS Takalar	1 Bulan	0%	0.00	3,273,468,100.00
2	**Sewa Lahan Parkir**							
	PKS TH 2023 (Tahun 2024)	20,000,000.00	Okt sd Des 2024	Pt. Perseroda	15 Bulan	10%	2,000,000.00	18,000,000.00
	PKS TH 2022	20,000,000.00	Juni 2022	PT. Perusda Panrannunangku	36 Bulan	25%	5,000,000.00	15,000,000.00
	PKS TH 2022	140,000,000.00	Mei sd Des 2023	PT. Perusda Panrannunangku	31 Bulan	25%	35,000,000.00	105,000,000.00
3	**Denda Keterlambatan Pekerjaan**	8,010,000.00	Desember 2022	Pekerjaan Selasar	37 Bulan	50%	4,005,000.00	4,005,000.00
	Jumlah	**5,583,582,200.00**					**46,005,000.00**	**5,537,577,200.00**

Lampiran 4a

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
RINCIAN SALDO PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH (SEWA BMD)
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Nama Empang	Nama Penyewa	Tanggal Penyewaan Coul Stroge Dan Pabrik Es	Tanggal waktu Penyelesaian	Umur	Nilai Kontrak	Saldo Awal (Per 1/1/2025	Kontrak/ Penetapan 2025	Penyetoran 2025	Saldo Akhir (Per 31/12/2025)	Piutang sewa empang dan Pabrik ES					Total Penyisihan	Saldo setelah Penyisihan (Per 31/12/2024)
											LANCAR (0-1)	LANCAR DNG PERHATIAN KHUSUS (>1,<=2)	KURANG LANCAR (>2,<=3)	KURANG LANCAR (>3,<=4)	MACET (>4,<=5)		
											1%	10%	25%	50%	100%		
	Kontrak 2017																
1	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Jan-18	31-Dec-18	6	100,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00	-	-	-	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-
2	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Jan-19	31-Dec-19	5	120,000,000.00	70,000,000.00			70,000,000.00	-	-	-	-	70,000,000.00	70,000,000.00	-
3	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Jan-20	31-Mar-20	4	30,000,000.00	-			-	-	-				-	-
3	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Apr-20	31-Dec-20	4	45,000,000.00	-			-	-	-				-	-
4	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Jan-21	31-Dec-21	3	60,000,000.00	-			-	-	-				-	-
5	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Jan-21	31-Dec-22	2	60,000,000.00	-			-	-	-				-	-
6	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Jan-21	31-Dec-23	1	60,000,000.00	-			-	-	-				-	-
7	Coul Stroge dan pabrik Es	PT. LONTARA JAYA SAKTI	1-Jan-21	31-Dec-24	0		-			-	-	-				-	-
TOTAL SEWA COUL STROGE DAN PABRIK ES						**475,000,000.00**	**140,000,000.00**	**-**	**-**	**140,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140,000,000.00**	**140,000,000.00**	**-**

Lampiran 4b

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH (DENDA PBB-P2)

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Saldo awal Piutang s/d 2025	Ketetapan 2025	Setoran 2025	Saldo Akhir Piutang s/d 2025	Penyisihan							Nilai Piutang Pajak Setelah Penyisihan
						Lancar (0-1 tahun)	Lancar Dengan Perhatian Khusus (> 1 s.d. < 2 tahun)	Kurang Lancar (> 2 s.d. < 3 tahun)	Diragukan (> 3 s.d. < 4 tahun)	Macet (> 4 tahun)	Kadaluarsa (5 tahun ke atas)	Jumlah	
						1%	10%	25%	50%	100%	100%		
1. BADAN PENDAPATAN DAERAH													
PBB	**s.d 2013**	0.00			0.00							0.00	0.00
	2014	1,987,510,408.88		35,494,717.00	1,952,015,691.88						1,952,015,691.88	1,952,015,691.88	0.00
	2015	497,340,188.16		8,869,232.00	488,470,956.16						488,470,956.16	488,470,956.16	0.00
	2016	575,426,091.44		9,476,505.00	565,949,586.44						565,949,586.44	565,949,586.44	0.00
	2017	508,813,491.48		10,158,856.00	498,654,635.48						498,654,635.48	498,654,635.48	0.00
	2018	245,415,280.68		5,232,965.00	240,182,315.68						240,182,315.68	240,182,315.68	0.00
	2019	132,226,382.96		2,897,153.00	129,329,229.96						129,329,229.96	129,329,229.96	0.00
	2020	265,964,113.80		6,205,193.00	259,758,920.80						259,758,920.80	259,758,920.80	0.00
	2021	256,833,025.04		9,225,445.00	247,607,580.04					247,607,580.04		247,607,580.04	0.00
	2022	159,740,227.58		4,639,387.00	155,100,840.58				77,550,420.29			77,550,420.29	77,550,420.29
	2023	180,583,756.31		9,022,916.00	171,560,840.31			42,890,210.08				42,890,210.08	128,670,630.23
	2024	15,739,629.24		9,354,886.00	6,384,743.24		638,474.32					638,474.32	5,746,268.92
	2025		28,125,862.28	25,113,689.00	3,012,173.28	30,121.73						30,121.73	2,982,051.55
Jumlah		**4,825,592,595.57**	**28,125,862.28**	**135,690,944.00**	**4,718,027,513.85**	**30,121.73**	**638,474.32**	**42,890,210.08**	**77,550,420.29**	**247,607,580.04**	**4,134,361,336.40**	**4,503,078,142.86**	**214,949,370.99**

Lampiran 5

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG LAINNYA	SALDO AWAL	MUTASI DI TAHUN 2025		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		1/1/2025	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	12/31/2025	
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5	7
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5,270,543,858.00		5,270,543,858.00	-	Piutang Dana Bagi Hasil -Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk bulan: 1 Juli SK No : 1174/X/TAHUN 2024, Tanggal 3 Oktober 2024 sebesar 1,199,656,292.00 2 Agustus SK No : 1349/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 sebesar 1,508,732,320.00 3 September SK No :1348/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 1,183,202,742.00 4 Oktober SK No :1575/XII/TAHUN 2024, Tanggal 28 Desember 2024 sebesar 1,378,952,504.00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)	3,506,387,831.00		3,506,387,831.00	-	Piutang Dana Bagi Hasil - Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) untuk bulan: 1 Juli SK No : 1174/X/TAHUN 2024, Tanggal 3 Oktober 2024 sebesar 934,537,551.00 2 Agustus SK No : 1349/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 sebesar 849,471,869.00 3 September SK No :1348/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 758,340,275.00 4 Oktober SK No :1575/XII/TAHUN 2024, Tanggal 28 Desember 2024 sebesar 964,038,136.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB)	7,038,004,952.00		7,038,004,952.00	-	Piutang Dana Bagi Hasil -Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) untuk bulan: 1 Juli SK No : 1174/X/TAHUN 2024, Tanggal 3 Oktober 2024 sebesar 1,844,810,832.00 2 Agustus SK No : 1349/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 sebesar 1,747,059,102.00 3 September SK No :1348/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 1,736,904,334.00 4 Oktober SK No :1575/XII/TAHUN 2024, Tanggal 28 Desember 2024 sebesar 1,709,230,684.00
4	Pajak Air Permukaan PDAM	27,402,528.00		27,402,528.00	-	Piutang Dana Bagi Hasil -Pajak Air Permukaan PDAM untuk bulan: 1 Juli SK No : 1174/X/TAHUN 2024, Tanggal 3 Oktober 2024 sebesar 6,527,807.00 2 Agustus SK No : 1349/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 sebesar 7,320,349.00 3 September SK No :1348/XI/TAHUN 2024, Tanggal 19 November 2024 7,357,603.00 4 Oktober SK No :1575/XII/TAHUN 2024, Tanggal 28 Desember 2024 sebesar 6,196,769.00
5	Pajak Air Permukaan Bakaru/Suwito	-	-	-	-	
6	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	3,235,714,266		3,235,714,266.00	-	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 SK NO: 188.44/V/Tahun 2025 Tanggal 16 Januari 2025 sebesar 3,235,714,266.00
7	Bantuan Keuangan Pembayaran Iuran BPJS	-	-	-	-	
	Jumlah	**19,078,053,435.00**	**-**	**19,078,053,435.00**	**-**	

Lampiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALA
DAFTAR RINCIAN PIUTANG LAINNYA - DENPARM
Per 31 Desember 2025

dalam rupiah

No	Nama	Kelompok Tani / Desa	Saldo Awal 2025	Pembayaran Tahun 2025	Saldo Akhir 2025	PENYISIHAN PIUTANG					Total Penyisihan	Saldo setelah Penyisihan
						0-1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	>4 tahun		
						1%	10%	25%	50%	100%		
A	**Dana DENFARM KIPPK**											
1	Islahuddin Muntu	Mabbulo Sibatang / Manongkoki	7,757,000.00		7,757,000.00	-	-	-	-	7,757,000.00	7,757,000.00	-
2	Asis Talli	Julu Atia / Parasangan Beru	9,857,000.00		9,857,000.00	-	-	-	-	9,857,000.00	9,857,000.00	-
3	Dg. Bado	Lebbae II / Paddingin	8,357,000.00		8,357,000.00	-	-	-	-	8,357,000.00	8,357,000.00	-
4	Abd Latif Awing	Terambeng / Boddia	10,257,000.00		10,257,000.00	-	-	-	-	10,257,000.00	10,257,000.00	-
5	Dg. Muntu	Bulu-bulu / Lantang	10,557,000.00		10,557,000.00	-	-	-	-	10,557,000.00	10,557,000.00	-
6	Islahuddin Muntu	Terang-terang/Barangmamase	8,118,000.00		8,118,000.00	-	-	-	-	8,118,000.00	8,118,000.00	-
7	Asis Talli	Gaddonga/Paddingin	6,618,000.00		6,618,000.00	-	-	-	-	6,618,000.00	6,618,000.00	-
8	Dg. Bado	Limbungan/Pallantikang	7,778,000.00		7,778,000.00	-	-	-	-	7,778,000.00	7,778,000.00	-
9	Abd Latif Awing	Tamalalang/Bella	11,618,000.00		11,618,000.00	-	-	-	-	11,618,000.00	11,618,000.00	-
10	Dg. Muntu	Anugrah/Malewang	10,118,000.00		10,118,000.00	-	-	-	-	10,118,000.00	10,118,000.00	-
11	Muh. Kasim Tera	Lantang/Lantang	19,552,000.00		19,552,000.00	-	-	-	-	19,552,000.00	19,552,000.00	-
12	M. Arif. Dg. Ngajang	Tunas Muda/Paddingin	19,552,000.00		19,552,000.00	-	-	-	-	19,552,000.00	19,552,000.00	-
13	H. Maro Sinjaya	Julu Kanaya/Pa'lalakkang	19,552,000.00		19,552,000.00	-	-	-	-	19,552,000.00	19,552,000.00	-
Jumlah			**149,691,000.00**		**149,691,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**149,691,000.00**	**149,691,000.00**	**-**

Lampiran 7

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR PIUTANG LAINNYA - PIHAK KETIGA
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Uaraian Kegiatan	Pelaksana	No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Saldo Awal 2025	Mutasi Tahun 2025/ Koreksi Kurang Catat		Jumlah Piutang	Penyisihan Piutang					Total Penyisihan	Saldo setelah Penyisihan (Per 31/12/2025)
							Jumlah	No STS		LANCAR (0-1)	LANCAR DNG PERHATIAN KHUSUS (>1,<=2)	KURANG LANCAR (>2,<=3)	KURANG LANCAR (>3,<=4)	MACET (>4,<=5)		
										1%	10%	25%	50%	100%		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkaran Benih pada UPTD Pertanian Sanrobone (DAK)	CV. Fathir Putra Yasfat	602.2/501/SPK-DAK/DP-UPTD/IX/2016	9/14/2016	33,900,000.00	3,170,000.00	2,500,000.00	Kurang Catat Tahun sebelumnya	670,000.00					670,000.00	670,000.00	0.00
2	Reahabilitasi Laboratorium UPT SMP Negeri 3 Mapsu	CV. Niago	33/DAU/PPK2-DISDIKBUD/SPK/IX/2024	24/9/2024	73,274,000.00	73,274,000.00	73,274,000.00	73.05/41.0/000361/STBP/4.01.0.00.0.00.37.0000/12/2025, tgl14/3/2025	0.00					0.00	0.00	0.00
	JUMLAH				**107,174,000.00**	**76,444,000.00**	**75,774,000.00**	**0.00**	**670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,000.00**	**670,000.00**	**0.00**

Lampiran 8

DAFTAR BEBAN STNK DAN BELANJA DI BAYAR DI MUKA TAHUN 2025

NO	NO.POLISI	MERK/TYPE	SAMPAI	REALISASI BELANJA STNK TAHUN 2025							SANKSI ADM	BEBAN BELANJA			BELANJA DI BAYAR DIMUKA		
				PKB	OPSEN PKB	SWDKLLJ	ADM. STNK	ADM. TNKB	PENGESAHAN	JUMLAH		PER BULAN	BULAN	AKUMULASI	PER BULAN	BULAN	AKUMULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (5+6+7+8+9+10)		12	13	14 = 12 X 13	15	16	17 = 15 X 16
Badan Penanngulangan Bencana Daerah										**1,492,621.00**				**626,014.00**			**866,607.00**
1	DD 6504 C	HONDA GL15B1DF M/T	12/14/2026	60,640.00	40,022.00	43,000.00			-	143,662.00		11,971.83	0	-	11,971.83	12	143,662.00
2	DD 6505 C	HONDA1C02N16M2 A/T	12/14/2026	54,300.00	35,838.00	43,000.00				133,138.00		11,094.83	0	-	11,094.83	12	133,138.00
3	DD 6506 C	HONDA GL15B1DF M/T	12/14/2026	60,640.00	40,022.00	43,000.00				143,662.00		11,971.83	0	-	11,971.83	12	143,662.00
4	DD 6507 C	HONDA1C02N16M2 A/T	12/14/2026	54,300.00	35,838.00	43,000.00				133,138.00		11,094.83	0	-	11,094.83	12	133,138.00
5	DD 8102 C	TOYOTA HILUX PICK UP	4/15/2026	419,290.00	276,731.00	243,000.00				939,021.00		78,251.75	8	626,014.00	78,251.75	4	313,007.00
Dinas KB										**7,289,980.00**				**7,289,980.00**			**-**
6	DD 7032 C	TOYOTA HI ACE M/T	11/18/2024	2,127,760.00	-	253,000.00	-	-	-	2,380,760.00		198,396.67	12	2,380,760.00	198,396.67	0	-
7	DD 7032 C	TOYOTA HI ACE M/T	11/18/2025	2,059,120.00	-	253,000.00				2,312,120.00		192,676.67	12	2,312,120.00	192,676.67	0	-
8	DD 1149 C	MITSUBISHI PAJERO	12/19/2025	2,354,100.00	-	243,000.00				2,597,100.00		216,425.00	12	2,597,100.00	216,425.00	0	-
Bappelitbangda										**1,336,797.00**				**971,490.00**			**365,307.00**
9	DD 4154 C	SUZUKI FD 110	12/30/2021	21,000.00	-	35,000.00				56,000.00		4,666.67	12	56,000.00	4,666.67	0	-
10	DD 4154 C	SUZUKI FD 110	12/30/2022	21,000.00	-	35,000.00				56,000.00		4,666.67	12	56,000.00	4,666.67	0	-
11	DD 4154 C	SUZUKI FD 110	12/30/2023	21,000.00	-	35,000.00				56,000.00		4,666.67	12	56,000.00	4,666.67	0	-
12	DD 4154 C	SUZUKI FD 110	12/30/2024	21,000.00	-	35,000.00				56,000.00		4,666.67	12	56,000.00	4,666.67	0	-
13	DD 4154 C	SUZUKI FD 110	12/30/2025	21,000.00	-	67,000.00	100,000.00	60,000.00		248,000.00		20,666.67	12	248,000.00	20,666.67	0	-
14	DD 4154 C	SUZUKI FD 110	12/30/2026	38,010.00	25,087.00	35,000.00				98,097.00		8,174.75	0	-	8,174.75	12	98,097.00
15	DD 2621 C	HONDA NF 125	10/23/2024	26,500.00	-	35,000.00				61,500.00		5,125.00	12	61,500.00	5,125.00	0	-
16	DD 2621 C	HONDA NF 125	10/23/2025	26,500.00	-	35,000.00				61,500.00		5,125.00	12	61,500.00	5,125.00	0	-
17	DD 2621 C	HONDA NF 125	10/23/2026	53,000.00	34,980.00	43,000.00	100,000.00	60,000.00		290,980.00		24,248.33	2	48,496.67	24,248.33	10	242,483.33
18	DD 4111 C	SUZUKI FD 110	1/13/2025	21,000.00	-	35,000.00				56,000.00		4,666.67	12	56,000.00	4,666.67	0	-
19	DD 4111 C	SUZUKI FD 110	1/13/2026	42,000.00	27,720.00	67,000.00	100,000.00	60,000.00		296,720.00		24,726.67	11	271,993.33	24,726.67	1	24,726.67
BKPSDM										**1,441,419.00**				**1,158,401.75**			**283,017.25**
20	DD 4265 C		6/15/2026							120,406.00		10,033.83	6	60,203.00	10,033.83	6	60,203.00
21	DD 6518 C		2/6/2026							139,345.00		11,612.08	10	116,120.83	11,612.08	2	23,224.17
22	DD 6581 C		1/26/2026							139,345.00		11,612.08	11	127,732.92	11,612.08	1	11,612.08
23	DD 4631 C		2/6/2026							133,834.00		11,152.83	10	111,528.33	11,152.83	2	22,305.67
24	DD 3123 C		4/19/2026							123,477.00		10,289.75	8	82,318.00	10,289.75	4	41,159.00
25	DD 6856 C		1/19/2026							305,818.00		25,484.83	11	280,333.17	25,484.83	1	25,484.83

NO	NO.POLISI	MERK/TYPE	SAMPAI	REALISASI BELANJA STNK TAHUN 2025							SANKSI ADM	BEBAN BELANJA			BELANJA DI BAYAR DIMUKA		
				PKB	OPSEN PKB	SWDKLLJ	ADM. STNK	ADM. TNKB	PENGESAHAN	JUMLAH		PER BULAN	BULAN	AKUMULASI	PER BULAN	BULAN	AKUMULASI
26	DD 3124 C		4/19/2026							114,977.00		9,581.42	8	76,651.33	9,581.42	4	38,325.67
27	DD 6114 C		2/4/2026							364,217.00		30,351.42	10	303,514.17	30,351.42	2	60,702.83
Inspektorat										**522,350.00**				**243,763.33**			**278,586.67**
28	DD 4270 C	SUZUKI FK 110	8/5/2026	61,470.00	43,000.00					104,470.00		8,705.83	4	34,823.33	8,705.83	8	69,646.67
29	DD 4271 C	SUZUKI FK 110	8/5/2026	61,470.00	43,000.00					104,470.00		8,705.83	4	34,823.33	8,705.83	8	69,646.67
30	DD 4272 C	SUZUKI FK 110	8/5/2026	61,470.00	43,000.00					104,470.00		8,705.83	4	34,823.33	8,705.83	8	69,646.67
31	DD 4269 C	SUZUKI FK 110	8/5/2025	61,470.00	43,000.00					104,470.00		8,705.83	12	104,470.00	8,705.83	0	-
32	DD 4269 C	SUZUKI FK 110	8/5/2026	48,600.00	67,000.00					104,470.00		8,705.83	4	34,823.33	8,705.83	8	69,646.67
Dinas Kesehatan										**29,564,815.00**				**20,994,591.50**			**8,570,223.50**
34	DD 9087 C	SUZUKI	11/30/2026	769,710.00	508,009.00	178,000.00				1,455,719.00		121,309.92	1	121,309.92	121,309.92	11	1,334,409.08
35	DD 9058 C	SUZUKI	8/11/2026	555,900.00	366,894.00	213,000.00				1,135,794.00		94,649.50	4	378,598.00	94,649.50	8	757,196.00
36	DD 9045 C	SUZUKI	2/18/2026	565,240.00	325,714.00	233,000.00				1,152,958.00		96,079.83	10	960,798.33	96,079.83	2	192,159.67
37	DD 2661 C	HONDA	12/31/2025	52,640.00		51,000.00	100,000.00	60,000.00		263,640.00		21,970.00	12	263,640.00	21,970.00	0	-
38	DD 4174 C	SUZUKI	2/8/2025	60,140.00		67,000.00				287,524.00		23,960.33	12	287,524.00	23,960.33	0	-
39	DD 4174 C	SUZUKI	2/8/2026	46,100.00	30,426.00	51,000.00	100,000.00	60,000.00		287,526.00		23,960.50	10	239,605.00	23,960.50	2	47,921.00
40	DD 6325 C	YAMAHA	1/21/2026	66,010.00	43,136.00	43,000.00				152,146.00		12,678.83	11	139,467.17	12,678.83	1	12,678.83
41	DD 2684 C	HONDA	10/28/2025	51,300.00		51,000.00				102,300.00		8,525.00	12	102,300.00	8,525.00	0	-
42	DD 2684 C	HONDA	10/28/2026	42,990.00		28,373.00	35,000.00			106,363.00		8,863.58	2	17,727.17	8,863.58	10	88,635.83
43	DD 6389 C	YAMAHA	3/16/2026							20,930.00		1,744.17	9	15,697.50	1,744.17	3	5,232.50
44	DD 1127 C	SUZUKI	3/22/2026	782,500.00	519,740.00					1,550,250.00		129,187.50	9	1,162,687.50	129,187.50	3	387,562.50
45	DD 9084 C	SUZUKI	11/30/2026	769,210.00	508,009.00	178,000.00				1,455,219.00		121,268.25	1	121,268.25	121,268.25	11	1,333,950.75
46	DD 1123 C	SUZUKI	3/22/2026	719,820.00	475,079.00	3,000.00				1,197,899.00		99,824.92	9	898,424.25	99,824.92	3	299,474.75
47	DD 9104 C	DAIHATSU	1/10/2026	684,180.00	451,559.00	163,000.00	200,000.00	100,000.00		1,598,739.00		133,228.25	11	1,465,510.75	133,228.25	1	133,228.25
48	DD 4604 C	SUZUKI	1/15/2027							102,230.00		8,519.17	11	93,710.83	8,519.17	1	8,519.17
49	DD 9047 C	SUZUKI	2/18/2026	550,060.00	359,477.00	178,000.00				1,087,537.00		90,628.08	10	906,280.83	90,628.08	2	181,256.17
50	DD 6384 C	YAMAHA	3/16/2026	72,710.00	47,985.00	67,000.00				187,695.00		15,641.25	9	140,771.25	15,641.25	3	46,923.75
51	DD 1121 C	SUZUKI	3/22/2026	719,820.00	475,079.00	3,000.00				1,197,899.00		99,824.92	9	898,424.25	99,824.92	3	299,474.75
52	DD 6391 C		3/16/2026							142,396.00		11,866.33	9	106,797.00	11,866.33	3	35,599.00
53	DD 1124 C	SUZUKI	3/23/2026	719,820.00	475,079.00	178,000.00				1,372,899.00		114,408.25	9	1,029,674.25	114,408.25	3	343,224.75
54	DD 9098 C	SUZUKI	11/30/2026	769,710.00	508,009.00	143,000.00				1,420,719.00		118,393.25	1	118,393.25	118,393.25	11	1,302,325.75
55	DD 9043 C		2/18/2026							898,188.00		74,849.00	10	748,490.00	74,849.00	2	149,698.00

NO	NO.POLISI	MERK/TYPE	SAMPAI	REALISASI BELANJA STNK TAHUN 2025							SANKSI ADM	BEBAN BELANJA			BELANJA DI BAYAR DIMUKA		
				PKB	OPSEN PKB	SWDKLLJ	ADM. STNK	ADM. TNKB	PENGESAHAN	JUMLAH		PER BULAN	BULAN	AKUMULASI	PER BULAN	BULAN	AKUMULASI
56	DD 6387 C	YAMAHA	3/16/2026	62,840.00	41,475.00	51,000.00				155,315.00		12,942.92	9	116,486.25	12,942.92	3	38,828.75
57	DD 6388 C		3/16/2026							155,315.00		12,942.92	9	116,486.25	12,942.92	3	38,828.75
58	DD 9081 C	TOYOTA HILUX	1/5/2026	1,914,170.00	1,263,352.00	243,000.00				3,420,522.00		285,043.50	11	3,135,478.50	285,043.50	1	285,043.50
59	DD 2680 C	HONDA	10/30/2026	42,990.00	28,373.00	43,000.00	100,000.00	60,000.00		274,363.00		22,863.58	2	45,727.17	22,863.58	10	228,635.83
60	DD 2651 C	HONDA	12/31/2026	42,540.00	28,076.00	35,000.00				105,616.00		8,801.33	0	-	8,801.33	12	105,616.00
61	DD 9046 C	SUZUKI	2/18/2026	539,270.00	355,918.00	243,000.00				1,138,188.00		94,849.00	10	948,490.00	94,849.00	2	189,698.00
62	DD 1406 C	SUZUKI	3/30/2022							371,380.00		30,948.33	12	371,380.00	30,948.33	0	-
63	DD 1406 C		3/30/2022							371,380.00		30,948.33	12	371,380.00	30,948.33	0	-
64	DD 1406 C		3/30/2022							1,301,205.00		108,433.75	9	975,903.75	108,433.75	3	325,301.25
65	DD 9081 C	TOYOTA HILUX	1/5/2027							2,863,956.00		238,663.00	11	2,625,293.00	238,663.00	1	238,663.00
66	DD 9064 C	SUZUKI	12/6/2025	616,980.00		3,000.00				619,980.00		51,665.00	12	619,980.00	51,665.00	0	-
67	DD 9094 C	SUZUKI	1/30/2026	769,710.00	508,000.00	178,000.00				1,455,710.00		121,309.17	11	1,334,400.83	121,309.17	1	121,309.17
68	DD 6386 C	YAMAHA	3/16/2026	62,840.00	41,475.00	51,000.00				155,315.00		12,942.92	9	116,486.25	12,942.92	3	38,828.7500
DPMPTSP										**2,724,180.00**				**1,746,693.58**			**977,486.42**
69	DD 1132 C		4/8/2026							2,435,611.00		202,967.58	8	1,623,740.67	202,967.58	4	811,870.33
70	DD 6563 C		11/14/2026							156,695.00		13,057.92	1	13,057.92	13,057.92	11	143,637.08
71	DD 4176 C		2/28/2026							131,874.00		10,989.50	10	109,895.00	10,989.50	2	21,979.00
BKAD										-				**6,475,187.42**			**3,206,208.00**
72	DD 6941 C		22-02-2026									9,803	10	98,029.17	9,802.92	2	19,605.83
73	DD 6321 C		21-01-2024									19,583	12	235,000.00	19,583.33	0	-
74	DD 6321 C		22-01-2025									19,583	12	235,000.00	19,583.33	0	-
75	DD 6321 C		23-01-2026									19,583	11	215,416.67	19,583.33	1	19,583.33
76	DD 4622 C		06-04-2024									3,583	12	43,000.00	3,583.33	0	-
77	DD 4622 C		06-04-2025									3,583	12	43,000.00	3,583.33	0	-
78	DD 4622 C		06-04-2026									3,667	4	14,666.67	3,666.67	8	29,333.33
79	DD 6469 C		06-05-2026									12,551	7	87,855.83	12,550.83	5	62,754.17
80	DD 19 C		23-05-2026									244,586	7	1,712,104.92	244,586.42	5	1,222,932.08
81	DD 2748 C		20-12-2024									68,347	12	820,160.00	68,346.67	0	-
82	DD 6551 C		09-06-2022									16,537	12	198,440.00	16,536.67	0	-
83	DD 6551 C		09-06-2023									16,537	12	198,440.00	16,536.67	0	-
84	DD 6551 C		09-06-2024									16,537	12	198,440.00	16,536.67	0	-

NO	NO.POLISI	MERK/TYPE	SAMPAI	REALISASI BELANJA STNK TAHUN 2025							SANKSI ADM	BEBAN BELANJA			BELANJA DI BAYAR DIMUKA		
				PKB	OPSEN PKB	SWDKLLJ	ADM. STNK	ADM. TNKB	PENGESAHAN	JUMLAH		PER BULAN	BULAN	AKUMULASI	PER BULAN	BULAN	AKUMULASI
85	DD 6551 C		09-06-2025									16,537	12	198,440.00	16,536.67	0	-
86	DD 6551 C		10-06-2026									29,520	6	177,122.00	29,520.33	6	177,122.00
87	DD 2730 C		30-05-2025									10,837	12	130,040.00	10,836.67	0	-
88	DD 2730 C		30-05-2026									10,918	5	54,588.75	10,917.75	7	76,424.25
89	DD 6545 C		16-03-2024									25,585	12	307,025.00	25,585.42	0	-
90	DD 6545 C		17-03-2025									24,740	12	296,878.00	24,739.83	0	-
91	DD 6545 C		18-03-2026									33,008	8	264,064.67	33,008.08	4	132,032.33
92	DD 6320 C		21-07-2025									17,208	12	206,500.00	17,208.33	0	-
93	DD 6320 C		22-07-2026									19,040	6	114,240.50	19,040.08	6	114,240.50
94	DD 6137 C		29-07-2026									25,202	5	126,007.92	25,201.58	7	176,411.08
95	DD 2751 C		20-12-2025									14,780	11	162,580.00	14,780.00	1	14,780.00
96	DD 2751 C		21-12-2026									27,002	1	27,001.67	27,001.67	11	297,018.33
97	DD 6351 C		15-08-2026									17,367	4	69,466.67	17,366.67	8	138,933.33
98	DD 1147 C		14-09-2026									80,560	3	241,679.00	80,559.67	9	725,037.00
Sekretariat Daerah										**49,638,876.00**				**18,198,523.67**			**31,440,352.33**
	DD 1192 C		09-04-2026							6,287,014		523,918	8	4,191,342.67	523,918	4	2,095,671.33
	DD 1191 C		15-01-2026							1,642,623		136,885	11	1,505,737.75	136,885	1	136,885.25
	DD 6810 C		16-05-2026							127,292		10,608	7	74,253.67	10,608	5	53,038.33
	DD 2710 C		25-05-2026							157,937		13,161	7	92,129.92	13,161	5	65,807.08
	DD 6356 C		19-09-2025							142,000		11,833	3	35,500.00	11,833	9	106,500.00
	DD 4235 C		28-06-2026							119,640		9,970	6	59,820.00	9,970	6	59,820.00
	DD 6358 C		19-09-2025							142,000		11,833	3	35,500.00	11,833	9	106,500.00
	DD 6502 C		14-12-2025							127,400		10,617	1	10,616.67	10,617	11	116,783.33
	DD 1126 C		04-03-2026							3,285,424		273,785	9	2,464,068.00	273,785	3	821,356.00
	DD 6344 C		23-06-2026							188,466		15,706	6	94,233.00	15,706	6	94,233.00
	DD 2633 C		15-04-2026							144,176		12,015	4	48,058.67	12,015	8	96,117.33
	DD 2766 C		10-03-2026							153,056		12,755	3	38,264.00	12,755	9	114,792.00
	DD 6367 C		19-09-2026							195,007		16,251	9	146,255.25	16,251	3	48,751.75
	DD 6713 C		09-07-2026							131,994		11,000	7	76,996.50	11,000	5	54,997.50
	DD 1298 C		15-08-2026							1,642,170		136,848	8	1,094,780.00	136,848	4	547,390.00
	DD 1092 C		06-08-2026							2,824,770		235,398	8	1,883,180.00	235,398	4	941,590.00

NO	NO.POLISI	MERK/TYPE	SAMPAI	REALISASI BELANJA STNK TAHUN 2025							SANKSI ADM	BEBAN BELANJA			BELANJA DI BAYAR DIMUKA		
				PKB	OPSEN PKB	SWDKLLJ	ADM. STNK	ADM. TNKB	PENGESAHAN	JUMLAH		PER BULAN	BULAN	AKUMULASI	PER BULAN	BULAN	AKUMULASI
	DD 6809 C		15-05-2026							136,955		11,413	5	57,064.58	11,413	7	79,890.42
	DD 6863 C		26-06-2026							294,317		24,526	6	147,158.50	24,526	6	147,158.50
	DD 6362 C		19-09-2026							195,007		16,251	9	146,255.25	16,251	3	48,751.75
	DD 6368 C		19-09-2026							195,007		16,251	9	146,255.25	16,251	3	48,751.75
	DD 6714 C		09-07-2026							131,992		10,999	6	65,996.00	10,999	6	65,996.00
	DD 6342 C		23-06-2025							359,474		29,956	6	179,737.00	29,956	6	179,737.00
	DD 1 C		30-09-2026							4,310,836		359,236	9	3,233,127.00	359,236	3	1,077,709.00
	DD 6 C		26-08-2026							3,423,042		285,254	8	2,282,028.00	285,254	4	1,141,014.00
	DD 1175 C		28-12-2026							1,696,760		141,397	0	-	141,397	12	1,696,760.00
	DD 1055 C		30-12-2025							5,038,880		419,907	0	-	419,907	12	5,038,880.00
	DD 1055 C		30-12-2026							16,365,305		1,363,775	0	-	1,363,775	12	16,365,305.00
	DD 6349 C		23-06-2026							180,332		15,028	6	90,166.00	15,028	6	90,166.00
Dinas Koperasi																	**204,853.33**
			8/8/2026	58,000.00	38,280.00	51,000.00	100,000.00	60,000.00		307,280.00		25,606.67	4	102,426.67	25,607	8	204,853.33
DPRD																	**3,345,877.33**
	DD 3 C	Mitsubishi pajero sport 2 4l	1/25/2026							2,730,556.00					227,546.33	1	227,546.33
	DD 7 C	Toyota Fortuner	4/8/2026							4,098,882.00					341,573.50	4	1,366,294.00
	DD 8 C	Toyota Fortuner	2/28/2026							2,109,820.00					175,818.33	2	351,636.67
	DD 1085 C	Kijang innova	6/30/2026							2,280,399.00					190,033.25	6	1,140,199.50
	DD 6579 C	Yamaha M-Max	1/26/2026							200,865.00					16,738.75	1	16,738.75
	DD 6578 C	Yamaha M-Max	1/26/2026							200,865.00					16,738.75	1	16,738.75
	DD 6576 C	Yamaha M-Max	1/26/2026							200,865.00					16,738.75	1	16,738.75
	DD 6577 C	Yamaha M-Max	1/26/2026							200,865.00					16,738.75	1	16,738.75
	DD 2625 C	Honda NF 100 SE	4/30/2026							111,973.00					9,331.08	4	37,324.33
	DD 6466 C	HONDA NF 100 SLD	6/30/2026							264,869.00					22,072.42	6	132,434.50
	DD 6698 C	Yamaha Vino	2/8/2026							140,922.00					11,743.50	2	23,487.00
Bapenda										**2,326,996.00**	**31,222.37**			**1,002,929.79**			**1,355,288.58**
	DD 6470 C	Motor Yamaha	05-06-2026	190,960.00	126,034.00	35,000.00				351,994.00		29,333	7	205,329.83	29,333	5	146,664.17
	DD 6877 C	Motor Yamaha	26/8/2026	45,250.00	29,865.00	35,000.00	100,000.00	60,000.00		270,115.00		22,510	4	90,038.33	22,510	8	180,076.67
	DD 2770 C	Motor Honda	10-03-2026	52,490.00	34,643.00	35,000.00				122,133.00		10,178	9	91,599.75	10,178	3	30,533.25
	DD 6813 C	Motor Yamaha	16-05-2026	50,230.00	33,152.00	35,000.00				118,382.00		9,865	7	69,056.17	9,865	5	49,325.83

NO	NO.POLISI	MERK/TYPE	SAMPAI	REALISASI BELANJA STNK TAHUN 2025							SANKSI ADM	BEBAN BELANJA			BELANJA DI BAYAR DIMUKA		
				PKB	OPSEN PKB	SWDKLLJ	ADM. STNK	ADM. TNKB	PENGESAHAN	JUMLAH		PER BULAN	BULAN	AKUMULASI	PER BULAN	BULAN	AKUMULASI
	DD 6468 C	Motor Yamaha	06-05-2026	95,480.00	63,017.00	35,000.00				193,497.00		16,125	7	112,873.25	16,125	5	80,623.75
	DD 1405 C	Toyota Kijang	30-08-2026	336,000.00	221,760.00	143,000.00	200,000.00	100,000.00		1,000,760.00	31,222.37	85,999	4	343,994.12	85,999	8	687,988.25
	DD 6883 C	Motor Yamaha	26-08-2026	45,250.00	29,865.00	35,000.00	100,000.00	60,000.00		270,115.00		22,510	4	90,038.33	22,510	8	180,076.67
Kec. Galesong																	**100,000.00**
	DD 4501 C	Suzuki FL 125 SD	17/12/2025	43,000.00	22,000.00	35,000.00				100,000.00					8,333.33	12	100,000.00
JUMLAH										**86,721,058.00**				**50,414,665.25**			**50,993,807.41**

Lampiran 9

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
REKAPITULASI SALDO PERSEDIAAN
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo Awal 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir 2025	Rincian	
			Penambahan	Pengurangan			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.952.000,00	6.517.136.590,00	6.520.778.590,00	2.310.000,00	Alat Tulis Kantor	2.060.000,00
						Bahan Komputer	250.000,00
2	Dinas Kesehatan	13.083.132.992,20	31.730.549.248,74	32.346.538.223,16	12.467.144.017,78	Obat	6.010.164.016,55
		-				Obat-obatan Lainnya	6.456.980.001,23
3	Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle	5.155.817.191,00	30.919.170.239,45	30.892.810.643,28	5.182.176.787,17	Bahan Kimia	572.935.187,00
		-				Bahan Baku	1.345.717.267,29
		-				Alat Tulis Kantor	9.512.500,00
		-				Bahan Cetak	38.962.000,00
		-				Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.516.550,00
		-				Obat	3.200.533.282,88
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.262.113.350,00	13.836.685.650,00	2.910.008.550,00	14.188.790.450,00	Alat Tulis Kantor	683.600,00
		-				Kertas dan Cover	749.000,00
		-				Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	9.279.567.650,00
		-				Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.907.790.200,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Peny	-	392.990.120,00	392.990.120,00	-		-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.451.800,00	39.402.730,00	37.413.530,00	5.441.000,00	Alat Tulis Kantor	63.000,00
		-				Bahan Komputer	123.000,00
						Natura	5.255.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	209.604.000,00	960.100.206,00	959.855.606,00	209.848.600,00	Alat Tulis Kantor	179.223.600,00
		-				Natura	30.625.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan T	188.494.400,00	755.797.417,00	410.556.905,00	533.734.912,00	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	533.734.912,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	225.280.367,00	1.184.948.902,00	1.248.661.953,00	161.567.316,00	Alat Tulis Kantor	1.034.100,00
						Obat	160.533.216,00
10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketah	74.301.439,00	4.149.191.340,00	3.384.311.398,00	839.181.381,00	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	839.181.381,00
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	312.000,00	1.029.055.345,00	1.029.024.345,00	343.000,00	Kertas dan Cover	239.000,00
		-				Bahan Komputer	104.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	284.405.100,00	1.008.926.950,00	1.075.649.310,00	217.682.740,00	Kertas dan Cover	102.960.000,00
						Bahan Komputer	114.722.740,00
13	Dinas Perhubungan	655.000,00	1.564.927.541,36	1.565.582.541,36	-		-
		-					-
		-					

No.	SKPD	Saldo Awal 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir 2025	Rincian	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	-	116.547.975,00	116.547.975,00	-		
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.065.700,00	66.616.687,00	63.879.687,00	5.802.700,00	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.620.000,00
		-				Kertas dan Cover	2.518.700,00
		-				Bahan Komputer	1.664.000,00
16	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	314.530,00	953.284.320,00	953.598.850,00	-		-
		-					-
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.399.800,00	35.721.490,00	36.772.290,00	349.000,00	Alat Tulis Kantor	56.000,00
		-				Bahan Komputer	293.000,00
18	Dinas Perikanan	-	1.898.846.226,00	1.898.846.226,00	-		
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	565.811.020,00	498.678.220,00	67.132.800,00	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	67.132.800,00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	27.122.600,00	27.122.600,00	-		
21	Sekretariat Daerah	491.000,00	6.350.744.059,00	6.350.900.059,00	335.000,00	Alat Tulis Kantor	231.000,00
		-				Bahan Komputer	104.000,00
22	Sekretariat DPRD	41.244.000,00	3.864.303.673,00	3.905.405.673,00	142.000,00	Perabot Kantor	142.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	966.000,00	412.054.462,00	411.020.362,00	2.000.100,00	Alat Tulis Kantor	2.000.100,00
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.917.800,00	2.495.903.563,00	2.488.942.363,00	11.879.000,00	Alat Tulis Kantor	3.685.000,00
		-				Bahan Komputer	1.769.000,00
						Perabot Kantor	85.000,00
						Alat Listrik	6.340.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	-	927.177.590,00	927.177.590,00	-		-
		-					-
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Mar	581.300,00	261.910.150,00	262.491.450,00	-		-
		-					-
27	Inspektorat	1.847.475,00	241.858.210,00	241.595.685,00	2.110.000,00	Alat Tulis Kantor	1.305.000,00
						Kertas dan Cover	585.000,00
						Benda Pos	220.000,00
28	Kecamatan Pattallassang	-	696.473.162,00	696.473.162,00	-		
29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	1.404.000,00	332.143.635,00	333.128.635,00	419.000,00	Bahan Komputer	419.000,00
30	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	-	352.850.052,00	352.850.052,00	-	Alat Tulis Kantor	-
31	Kecamatan Mangarabombang	458.700,00	36.506.810,00	36.797.510,00	168.000,00	Kertas dan Cover	45.000,00
						Alat Tulis Kantor	
		-				Bahan Komputer	123.000,00
32	Kecamatan Mappakasunggu	210.500,00	275.669.817,00	275.880.317,00	-		-
33	Kecamatan Sanrobone	211.500,00	61.611.440,00	61.822.940,00	-		-
34	Kecamatan Galesong	63.000,00	58.877.500,00	58.877.500,00	63.000,00	Kertas dan Cover	63.000,00
35	Kecamatan Galesong Utara	536.200,00	97.359.500,00	97.757.700,00	138.000,00	Alat Tulis Kantor	138.000,00
36	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	-	15.127.600,00	15.127.600,00	-		
37	Kecamatan Galesong Selatan	155.000,00	42.559.300,00	42.192.300,00	522.000,00	Alat Tulis Kantor	367.000,00

No.	SKPD	Saldo Awal 2025	Mutasi Tahun 2025		Saldo Akhir 2025	Rincian	
						Kertas dan Cover	155.000,00
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	300.000,00	285.862.800,00	285.937.800,00	225.000,00	Alat Tulis Kantor	225.000,00
Jumlah		**22.551.686.144,20**	**114.561.825.920,55**	**103.214.006.260,80**	**33.899.505.803,95**		**33.899.505.803,95**

Lampiran 10

KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	Nama Bank/BUMD	Metode Pengukuran	Prosentase Kepemilikan	Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2024	Penyesuaian Saldo Awal	Saldo Setelah Penyesuaian	Penambahan/ Pengurangan TA. 2025	Laporan Laba Rugi TA.2025	Pembayaran Deviden TA.2025	Nilai Investasi Per 31 Desember 2025
1	Bank Sulselbar	Cost	3.00%	53,230,000,000.00		53,230,000,000.00				53,230,000,000.00
2	BPR GMD Galesong	Equity	41.00%	10,061,950,886.23	-	10,061,950,886.23	(167,675,953.41)	209,594,941.76	-	10,103,869,874.58
3	BPR Surya Sejati Pattalassang	Equity	49.78%	1,682,462,254.66		1,682,462,254.66	(5,167,753.89)	28,356,077.36	-	1,705,650,578.13
4	PDAM	Equity	100.00%	30,154,935,296.00	(766,959,095.00)	29,387,976,201.00	-	4,346,482,764.00	-	33,734,458,965.00
5	Perusda Parranuangku	Equity	100.00%	680,284,574.00		680,284,574.00				680,284,574.00
JUMLAH				**95,809,633,010.89**	**(766,959,095.00)**	**95,042,673,915.89**	**(172,843,707.30)**	**4,584,433,783.12**	**-**	**99,454,263,991.71**

Lampiran 11a

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per OPD

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal Audited 2025	Penambahan			Pengurangan			Saldo Akhir 2025 Unaudited
			Belanja Modal	Mutasi Masuk	Hasil Inventarisasi/Kurang Catat	Mutasi Keluar	Reklasifikasi Belanja Modal Tanah ke KDP	Reklasifikasi Belanja Modal Tanah ke Gedung dan Bangunan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekretariat DPRD	1,534,698,000.00							1,534,698,000.00
2	Sekretariat Daerah	36,748,779,978.00		60,000,000.00	185,920,000.00	75,000,000.00			36,919,699,978.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	134,437,251,864.00	260,341,000.00				62,552,000.00	197,789,000.00	134,437,251,864.00
4	Dinas Perhubungan	5,368,553,293.33							5,368,553,293.33
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	-							-
6	Dinas Kesehatan	32,982,328,877.50		91,820,000.00					33,074,148,877.50
7	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	6,119,648,000.00							6,119,648,000.00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71,250,271,889.00		54,728,000.00					71,304,999,889.00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,076,912,000.00							1,076,912,000.00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,682,225,000.00							3,682,225,000.00
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	501,760,000.00							501,760,000.00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	791,136,000.00							791,136,000.00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,037,748,000.00				147,748,000.00			1,890,000,000.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan D	327,360,000.00							327,360,000.00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,492,800,000.00				60,000,000.00			1,432,800,000.00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-							-
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	2,001,527,000.00							2,001,527,000.00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1,930,108,000.00							1,930,108,000.00
19	Dinas Perikanan	2,757,600,000.00							2,757,600,000.00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,961,360,000.00							1,961,360,000.00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	488,650,000.00							488,650,000.00
22	Badan Pendapatan Daerah	-							-
23	Inspektorat	1,154,954,000.00							1,154,954,000.00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	779,724,000.00							779,724,000.00
25	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	13,514,507,890.67	155,000,000.00		1,408,970,700.00	126,548,000.00			14,951,930,590.67
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7,235,976,438.00		147,748,000.00					7,383,724,438.00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	341,700,000.00							341,700,000.00
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-							-
29	Kecamatan Mappakasunggu	1,504,213,000.00							1,504,213,000.00
30	Kecamatan Mangarabombang	523,260,000.00							523,260,000.00
31	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	8,531,629,000.00							8,531,629,000.00
32	Kecamatan Polongbangkeng Utara	5,464,583,000.00							5,464,583,000.00
33	Kecamatan Galesong Selatan	345,164,000.00							345,164,000.00
34	Kecamatan Galesong Utara	156,207,200.00							156,207,200.00
35	Kecamatan Pattallassang	2,155,282,000.00							2,155,282,000.00
36	Kecamatan Sanrobone	118,560,000.00							118,560,000.00
37	Kecamatan Galesong	885,255,000.00							885,255,000.00
38	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	-		55,000,000.00					55,000,000.00
	Total	**350,201,733,430.50**	**415,341,000.00**	**409,296,000.00**	**1,594,890,700.00**	**409,296,000.00**	**62,552,000.00**	**197,789,000.00**	**351,951,624,130.50**

Lampiran 11b

Daftar Tanah yang Dikuasai/Diklaim Sebagian atau Keseluruhan oleh Pihak Ketiga

No Urut	SKPD	Unti Kerja	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 108	Register	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Hak	Tanggal Sertifikat Tanah	Nomor Sertifikat Tanah	Penggunaan	Asal Usul	Nama Satuan	Jlm Brg	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Keterangan	penjelasan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD NEGERI 46 SALAKA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	1925	2001	salaka	Belum Bersertifikat	- -		areal sekolah	pengadaan	Bidang	1	144,375,000.00	144,375,000.00		diklaim oleh Drs. Basman, S.H., M.M yang merupakan ahli waris dari Hapid Tarru berdasarkan SPPT No 73.05.031.009.007-0340.0
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD NEGERI 47 ALLUKA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	2228	1984	ALLUKA	Belum Bersertifikat	- -		AREA SEKOLAH	HIBAH	Bidang	1	167,100,000.00	167,100,000.00		klaim keseluruhan, sudah diserahkan dengan syarat anaknya jadi bujang, dan terpenuhi, tapi sampai skrg belum diserahkan
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SDN 123 INPRES UJUNG LAU	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	2000	1977	Ujung Lau Kec. Sanrobone	Belum Bersertifikat	- -		Area Sekolah	Pembelian	Bidang	1	40,000,000.00	40,000,000.00	Proses Pensertifikatan 2023	Diklaim oleh Baharuddin Naja selaku ahli waris dari Ahmad Rama berdasarkan SPPT terhutang dengan luas 2000 m2 atas nama Ahmad Rama
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD NEGERI 125 INPRES BULUKUNYI	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	5236	1977	PANGKAJE" NE	Belum Bersertifikat	- -		Area Sekolah	Pembelian	Bidang	1	136,136,000.00	136,136,000.00		diklaim oleh Muhammad Yamin yang merupakan ahli waris dari Genra Mannarai berdasarkan Surat Keterangan Tanah No 201/DC/VII/2003 dan SPPT No. 73.05.030.005.025-0089.0
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD NEGERI 60 BONTOPARANG	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	1880	1960	bontoparang	Belum Bersertifikat	- -		Tanah Pendidikan Sekolah		Bidang	1	31,600,000.00	31,600,000.00		dklaim sebagian oleh Gassing Dg. Kulle yang merupakan salah satu ahli waris dari Pahu Bin Datang, berdasarkan SPPT NOP 73.05.010.011.002-0330.0
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD 183 INPRES KAMPUNG PARANG	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	3480	1981	Bonto baru	Belum Bersertifikat	- -		Hak pakai		Bidang	1	34,800,000.00	34,800,000.00		warga (gora) klaim keseluruhan dan ada tawaran kesepakatan dari yg bersangkutan , syaratnya mengambil sebagian tanah bagian depan tapi belum disepakati

No Urut	SKPD	Unti Kerja	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 108	Register	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Hak	Tanggal Sertifikat Tanah	Nomor Sertifikat Tanah	Penggunaan	Asal Usul	Nama Satuan	Jlm Brg	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Keterangan	penjelasan
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SDN 24 TAKALAR II	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	1496	1995	jln. panggarek no.24 takalar lama	Belum Bersertifikat	00-00-0000		banggunan sekolah	pembelian	BIDANG	1	37,800,000.00	37,800,000.00		diklaim oleh warga (sasoa) kondisi sekolah di tutup
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD NEGERI INPRES 164 TAIPA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	3713	1978	TAIPA DESA SOREANG	Hak Pakai	25-04-2013	Hak Pakai 00001	BANGUNAN SEKOLAH	PEMBELIAN	Bidang	1	96,000,000.00	96,000,000.00		diklaim sebagian oleh Sahriati Dg Ngai yang merupakan ahli waris dari Kayyong Dg Ngitung selaku pemilik tanah, menurut ahli waris memiliki bukti rincik dan surat keterangan terkait pemberian lahan.
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD NEGERI 34 SATANGNGA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	2000	1982	PULAU SATANGNGA	Belum Bersertifikat	- -		BANGUNAN SEKOLAH	PEMBELIAN	Bidang	1	20,000,000.00	20,000,000.00		diklaim oleh Bangsawan yang merupakan ahli waris dari Mantang Dg. Labbi berdasarkan SPPT No. 73.05.020.001.000.0084-7 dan Persil No. 000 P2 an. Mantang Dg. Labbi
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SMP NEGERI 3 MAPPAKASUNGGU	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	0001	10000	1992	Pulau satangnga	Belum Bersertifikat	- -		Areal sekolah	Hibah	Bidang	1	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		ada beberapa warga yang mengklaim, dan melarang untuk disertifkatkan an sekolah
	Total														**10**	**1,907,811,000.00**	**1,907,811,000.00**		

Lampiran 12

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Persertifikatan Tanah per SKPD
Per 31 Desember 2025

Jenis Aset	No	SKPD	Tanah Belum Bersertifikat			Tanah Bersertifikat			Grand Total
			Jumlah (Bidang)	Luas (M2)	Nilai Perolehan	Jumlah (Bidang)	Luas (M2)	Nilai Perolehan	
Aset Tetap	1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				1	1,139.00	341,700,000.00	**341,700,000.00**
	2	Badan Keuangan dan Aset Daerah				1	337.00	488,650,000.00	**488,650,000.00**
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	4,315.00	791,136,000.00				**791,136,000.00**
	4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				1	3,938.00	779,724,000.00	**779,724,000.00**
	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2,802.00	1,401,000,000.00	1	1,590.00	31,800,000.00	**1,432,800,000.00**
	6	Dinas Kesehatan	90	54,718.04	3,498,735,214.00	26	67,560.00	29,575,413,663.50	**33,074,148,877.50**
	7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	11,702.00	3,305,355,000.00	2	2,855.00	376,870,000.00	**3,682,225,000.00**
	8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	54	254,638.00	9,199,643,404.00	3	13,370.00	5,752,287,186.67	**14,951,930,590.67**
	9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	10	76,239.56	3,474,456,438.00	6	104,251.00	3,909,268,000.00	**7,383,724,438.00**
	10	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	323	2,813,631.00	120,745,271,864.00	27	326,121.00	13,691,980,000.00	**134,437,251,864.00**
	11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	131	329,781.11	16,195,676,440.00	181	596,587.00	55,109,323,449.00	**71,304,999,889.00**
	12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1	1,023.00	327,360,000.00	**327,360,000.00**
	13	Dinas Perhubungan	5	4,040.00	2,407,582,293.33	3	12,807.00	2,960,971,000.00	**5,368,553,293.33**
	14	Dinas Perikanan	3	21,119.00	557,600,000.00	2	20,000.00	2,200,000,000.00	**2,757,600,000.00**
	15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	1,500.00	459,000,000.00	4	19,184.00	1,502,360,000.00	**1,961,360,000.00**
	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				2	5,263.00	1,076,912,000.00	**1,076,912,000.00**
	17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	150,000.00	1,500,000,000.00	2	61,868.00	430,108,000.00	**1,930,108,000.00**
	18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1,000.00	90,000,000.00	2	100,555.00	1,800,000,000.00	**1,890,000,000.00**
	19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	8	27,086.00	1,438,616,000.00	2	1,643.00	562,911,000.00	**2,001,527,000.00**
	20	Inspektorat				2	2,259.00	1,154,954,000.00	**1,154,954,000.00**
	21	Kecamatan Galesong				2	9,254.00	885,255,000.00	**885,255,000.00**
	22	Kecamatan Galesong Selatan				7	11,310.00	345,164,000.00	**345,164,000.00**
	23	Kecamatan Galesong Utara	1	259.00	2,590,000.00	8	4,785.00	153,617,200.00	**156,207,200.00**
	24	Kecamatan Kepulauan Tanakeke				1	141.00	55,000,000.00	**55,000,000.00**
	25	Kecamatan Mangarabombang	4	6,785.00	364,500,000.00	1	735.00	158,760,000.00	**523,260,000.00**
	26	Kecamatan Mappakasunggu	4	1,318.50	163,484,000.00	4	23,753.00	1,340,729,000.00	**1,504,213,000.00**
	27	Kecamatan Pattallassang	2	5,270.00	196,330,000.00	11	9,061.00	1,958,952,000.00	**2,155,282,000.00**
	28	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	5	44,261.88	2,629,335,000.00	12	55,342.00	5,902,294,000.00	**8,531,629,000.00**
	29	Kecamatan Polongbangkeng Utara	8	101,102.00	1,034,038,000.00	12	51,077.00	4,430,545,000.00	**5,464,583,000.00**
	30	Kecamatan Sanrobone				1	1,592.00	118,560,000.00	**118,560,000.00**
	31	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle				1	30,752.00	6,119,648,000.00	**6,119,648,000.00**
	32	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				1	1,394.00	501,760,000.00	**501,760,000.00**
	33	Sekretariat Daerah	72	82,939.83	6,753,725,000.00	21	354,332.00	30,165,974,978.00	**36,919,699,978.00**
	34	Sekretariat DPRD				1	7,751.00	1,534,698,000.00	**1,534,698,000.00**
Aset Tetap Total			**734**	**3,994,507.92**	**176,208,074,653.33**	**352.00**	**1,903,629.00**	**175,743,549,477.17**	**351,951,624,130.50**
									-
Aset Lain Lain	1	Kecamatan Galesong				12	6,840.00	153,552,000.00	**153,552,000.00**
	2	Kecamatan Galesong Selatan				7	5,594.00	288,576,000.00	**288,576,000.00**
	3	Kecamatan Galesong Utara				9	5,025.00	126,001,000.00	**126,001,000.00**
	4	Kecamatan Mangarabombang				10	11,046.00	301,967,000.00	**301,967,000.00**

Jenis Aset	No	SKPD	Tanah Belum Bersertifikat			Tanah Bersertifikat			Grand Total
			Jumlah (Bidang)	Luas (M2)	Nilai Perolehan	Jumlah (Bidang)	Luas (M2)	Nilai Perolehan	
	5	Kecamatan Mappakasunggu				1	1,496.00	170,105,000.00	**170,105,000.00**
	6	Kecamatan Polongbangkeng Selatan				5	14,380.00	237,564,000.00	**237,564,000.00**
	7	Kecamatan Polongbangkeng Utara				6	10,299.00	92,645,000.00	**92,645,000.00**
	8	Kecamatan Sanrobone				3	3,836.00	95,794,000.00	**95,794,000.00**
Aset Lain Lain Total						**53.00**	**58,516.00**	**1,466,204,000.00**	**1,466,204,000.00**
									-
Properti Investasi	1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	3	4,973.00	3,293,956,000.00				**3,293,956,000.00**
	2	Dinas Perikanan	5	652,700.00	3,263,500,000.00	5	761,728.00	5,311,712,000.00	**8,575,212,000.00**
	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				17	126,613.00	13,681,227,500.00	**13,681,227,500.00**
	4	Kecamatan Galesong				1	20,000.00	280,000,000.00	**280,000,000.00**
	5	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle				1	7,245.00	463,680,000.00	**463,680,000.00**
	6	Sekretariat Daerah				1	2,964.00	350,000,000.00	**350,000,000.00**
Properti Investasi Total			**8**	**657,673.00**	**6,557,456,000.00**	**25.00**	**918,550.00**	**20,086,619,500.00**	**26,644,075,500.00**
Grand Total			**742**	**4,652,180.92**	**182,765,530,653.33**	**430.00**	**2,880,695.00**	**197,296,372,977.17**	**380,061,903,630.50**

Lampiran 13

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per SKPD

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal Audited 2025	Penambahan									Pengurangan							Saldo Akhir 2025 Audited
			Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	BOP Kesetaraan / Paud Negeri	Mutasi Masuk	Reklasifikasi Belanja Modal JJ ke Bangunan	Reklasifikasi dari Aset Lain Lain Ke Aset Tetap	Hasil Inventarisasi/Kurang Catat	Bantuan	Hibah Masuk	Mutasi Keluar	Reklasifikasi ke aset lainnya (Rusak Berat)	Extracomtable Belanja Modal	Extracomtable Dana BOS/JKN	Kriteria Beban Jasa	Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	Penghapusan Karena Penjualan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sekretariat DPRD	8,417,114,260.00	1,024,616,200.00									333,100,000.00		25,347,700.00			335,700,000.00	844,724,513.00	7,902,858,247.00
2	Sekretariat Daerah	25,937,164,140.59	4,464,955,621.00			513,150,000.00						1,500,212,508.00	62,005,000.00	15,840,000.00			62,150,000.00	182,700,000.00	29,092,362,253.59
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6,537,045,487.87	-										103,088,300.00					391,500,000.00	6,042,457,187.87
4	Dinas Perhubungan	7,093,333,334.00	1,382,443,950.00									455,500,000.00	258,546,175.00						7,761,731,109.00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3,604,484,628.00	291,133,300.00															192,250,000.00	3,703,367,928.00
6	Dinas Kesehatan	135,195,390,531.46	3,495,096,092.00						141,048,336.00			929,354,364.00	235,825,000.00	44,825,000.00			2,139,746,367.00		135,481,784,228.46
7	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	77,817,466,628.45				448,736,364.00			198,980,000.00			192,250,000.00	8,492,000.00						78,264,440,992.45
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54,197,186,051.86	11,400,234,632.00		27,058,000.00				4,960,645,000.00	9,230,866,900.00				197,932.00	164,401,765.00				79,651,390,886.86
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,241,564,703.00																174,960,303.00	3,066,604,400.00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,307,725,071.00	160,501,576.00									192,250,000.00	20,675,000.00		P				2,255,301,647.00
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5,476,480,892.37	38,960,700.00									46,680,000.00		5,312,000.00				269,100,000.00	5,194,349,592.37
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	492,036,508.50	39,117,550.00										106,686,560.00						424,467,498.50
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,366,768,301.00	5,183,700.00									229,100,000.00							1,142,852,001.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3,361,682,512.07	477,325,200.00																3,839,007,712.07
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,733,319,691.44	111,619,001.00	4,500,000.00		134,600,000.00							156,488,165.00					130,000,000.00	1,697,550,527.44
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,257,589,865.00																	1,257,589,865.00
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	5,302,042,388.24	245,183,700.00								113,300,800.00		56,265,600.00					247,700,000.00	5,356,561,288.24
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1,178,698,161.72	23,032,500.00										79,277,474.52						1,122,453,187.20
19	Dinas Perikanan	8,387,086,010.00										215,000,000.00	27,086,945.00						8,144,999,065.00
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,993,873,466.02	5,183,700.00									190,000,000.00	52,455,000.00						1,756,602,166.02
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7,266,920,874.17	65,501,100.00			3,568,000,508.00							913,213,642.00					829,557,892.00	9,157,650,948.17
22	Badan Pendapatan Daerah	1,950,559,156.00	54,884,000.00										42,000,000.00						1,963,443,156.00
23	Inspektorat	1,021,652,752.48	172,144,698.00	56,100,000.00		28,600,000.00							29,792,765.60					150,000,000.00	1,098,704,684.88
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,347,148,346.00	134,311,850.00			24,075,000.00												231,844,396.00	1,273,690,800.00
25	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	13,240,863,732.70	518,545,715.00															261,610,307.00	13,497,799,140.70
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	943,708,200.00	138,709,000.00			108,460,000.00	17,000,000.00	15,601,000.00					27,905,000.00			910,000.00		256,100,000.00	938,563,200.00
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	626,051,143.99																179,800,000.00	446,251,143.99
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	931,064,617.06	83,583,000.00									24,075,000.00	24,725,000.00						965,847,617.06
29	Kecamatan Mappakasunggu	288,990,921.23	5,183,700.00															172,700,000.00	121,474,621.23
30	Kecamatan Mangarabombang	459,354,000.00	38,469,000.00									172,700,000.00							325,123,000.00
31	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	673,874,507.00	75,773,000.00																749,647,507.00
32	Kecamatan Polongbangkeng Utara	685,007,807.00	60,024,000.00															172,700,000.00	572,331,807.00

No	SKPD	Saldo Awal Audited 2025	Penambahan									Pengurangan							Saldo Akhir 2025 Audited
			Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	BOP Kesetaraan / Paud Negeri	Mutasi Masuk	Reklasifikasi Belanja Modal JJ ke Bangunan	Reklasifikasi dari Aset Lain Lain Ke Aset Tetap	Hasil Inventarisasi/Kurang Catat	Bantuan	Hibah Masuk	Mutasi Keluar	Reklasifikasi ke aset lainnya (Rusak Berat)	Extracomtable Belanja Modal	Extracomtable Dana BOS/JKN	Kriteria Beban Jasa	Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	Penghapusan Karena Penjualan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	Kecamatan Galesong Selatan	363,521,616.00	16,095,000.00																379,616,616.00
34	Kecamatan Galesong Utara	376,650,000.00	14,488,000.00									172,700,000.00	7,000,000.00						211,438,000.00
35	Kecamatan Pattallassang	653,256,136.00	47,312,000.00															172,700,000.00	527,868,136.00
36	Kecamatan Sanrobone	243,745,000.00										172,700,000.00	1,250,000.00						69,795,000.00
37	Kecamatan Galesong	308,589,580.00	21,022,700.00															182,700,000.00	146,912,280.00
38	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	218,965,765.60																80,000,000.00	138,965,765.60
	Total	**386,497,976,787.82**	**24,610,634,185.00**	**60,600,000.00**	**27,058,000.00**	**4,825,621,872.00**	**17,000,000.00**	**15,601,000.00**	**5,300,673,336.00**	**9,230,866,900.00**	**113,300,800.00**	**4,825,621,872.00**	**2,212,777,627.12**	**91,522,632.00**	**164,401,765.00**	**910,000.00**	**2,537,596,367.00**	**5,122,647,411.00**	**415,743,855,206.70**

Lampiran 14

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Kurang Catat Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Unit Kerja	Sub Unit Kerja	Jenis Barang yang dibeli	Unit	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Refrigerator/Freezer	1	23,595,000.00
		UPT Puskesmas Bontomangape	UPT Puskesmas Bontomangape	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Bontomarannu	UPT Puskesmas Bontomarannu	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Galesong	UPT Puskesmas Galesong	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Galesong Utara	UPT Puskesmas Galesong Utara	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Komara	UPT Puskesmas Komara	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Mangarabombang	UPT Puskesmas Mangarabombang	oxygen concentrator	2	21,355,152.00
		UPT Puskesmas Mappakasunggu	UPT Puskesmas Mappakasunggu	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Polombangkeng Selatan	UPT Puskesmas Polombangkeng Selatan	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Sanrobone	UPT Puskesmas Sanrobone	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
		UPT Puskesmas Towata	UPT Puskesmas Towata	oxygen concentrator	1	10,677,576.00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD DIKPORA GALESONG	UPT SD NEGERI 115 INPRES GALESONG	Alat Kantor Lainnya	1	650,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,000,000.00
			UPT SD NEGERI 68 CENTER GALESONG II	LCD Projector/Infocus	1	5,000,000.00
			UPT SD NEGERI 69 GALESONG I	Lap Top	15	88,050,000.00
		UPTD DIKPORA GALESONG SELATAN	UPT SD NEGERI 75 BENTANG	Lap Top	15	88,050,000.00
			UPT SD NEGERI 76 TAROWANG	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
			UPT SD NEGERI 77 KANAENG	Lap Top	15	82,500,000.00
			UPT SD NEGERI 80 POPO	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI 81 KALUKUBODO	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI NO 225 INPRES RITA	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 GALESONG SELATAN	Lap Top	15	85,050,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	985,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 GALESONG SELATAN	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
		UPTD DIKPORA GALESONG UTARA	UPT SD NEGERI 89 PAKKABBA	Lap Top	15	88,050,000.00
			UPT SDN 221 INPRES LABBUMESANG	Lap Top	15	87,000,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
				Router	1	1,300,000.00
			UPT SDN 148 INPRES JULUMATA	Lap Top	15	87,000,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
				Router	1	1,300,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA	Lap Top	15	82,350,000.00
		UPTD DIKPORA SANROBONE	UPT SD NEGERI 107 INPRES KUNJUNG	Lap Top	15	88,050,000.00
			UPT SD NEGERI 30 PADDINGING	Lap Top	15	88,050,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	15	83,062,500.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,500,000.00
				Router	1	2,170,000.00

No	SKPD	Unit Kerja	Sub Unit Kerja	Jenis Barang yang dibeli	Unit	Harga Perolehan
			UPT SMP NEGERI 1 SANROBONE	Lap Top	15	83,062,500.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,500,000.00
				Router	1	2,170,000.00
		UPTD KEPULAUAN TANAKEKE	UPT SMP NEGERI 3 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
			UPT SMP NEGERI 8 MAPPAKASUNGGU SATU	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
			UPT SMP NEGERI SATU ATAP KALUKUANG	Lap Top	15	83,062,500.00
			UPT SMP NEGERI SATU ATAP LANTANG PEO	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
			UPT SMP SATAP 11 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	15	83,062,500.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,500,000.00
				Router	1	2,170,000.00
			UPT SMPN 10 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	15	83,062,500.00
		UPTD MAPPAKASUNGGU	TK Negeri Sehati	Alat Kantor Lainnya	1	650,000.00
3				Lap Top	1	5,520,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
				Router	1	2,750,000.00
			UPT SD NEGERI 106 INPRES TAKALAR I	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI 138 INPRES MANGULABBE	Lap Top	15	82,500,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SDN 23 CENTRE TAKALAR 1	Lap Top	15	87,000,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
			UPT SMP NEGERI 7 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
		UPTD POLONGBANGKENG SELATAN	UPT SD NEGERI 102 INPRES BONTOKADATT	Lap Top	15	88,050,000.00
			UPT SD NEGERI 21 BULUKUNYI	Lap Top	15	88,050,000.00
			UPT SD NEGERI 22 CAKURA	Lap Top	15	87,000,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
			UPT SDN 153 INPRES BONTONOMPO	Lap Top	15	88,050,000.00
			UPT SMP NEGERI 5 TAKALAR	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
		UPTD POLONGBANGKENG UTARA	UPT SD NEGERI 44 MANONGKOKI II	Lap Top	15	87,000,000.00
				Router	1	1,300,000.00
			UPT SD NEGERI 53 SAULEYA	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 POLONGBANGKENG UTA	Lap Top	15	82,800,000.00
			UPT SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTA	Lap Top	15	83,062,500.00
			UPT SMP NEGERI 6 POLONGBANGKENG UTA	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00

No	SKPD	Unit Kerja	Sub Unit Kerja	Jenis Barang yang dibeli	Unit	Harga Perolehan
		UPTD. Dikpora Pattallassang	UPT SD INPRES 125 BAJENG	Lap Top	15	87,000,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
			UPT SD NEGERI 101 INPRES PATTALLASSAN	Lap Top	15	87,000,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
				Router	1	1,300,000.00
			UPT SD NEGERI 135 INPRES PASULEANG	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI 150 INPRES TAMALALANG	Lap Top	15	87,000,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,600,000.00
			UPT SD NEGERI 201 INPRES PALEMBA	Lap Top	15	82,500,000.00
			UPT SD NEGERI 5 BALLO	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
			UPT SD NEGERI 6 BILACADDI	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
		UPTD. MANGARABOMBANG	UPT SD NEGERI 112 INPRES BONTOMANAI	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI 114 INPRES CIKOWANG LAK	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI 179 INPRES BALANG	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI 184 INPRES BODDIA	Lap Top	15	82,500,000.00
			UPT SD NEGERI 185 INPRES SALAMBU	Lap Top	15	82,800,000.00
			UPT SD NEGERI 66 KAJANG	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SD NEGERI 67 BANGGAE	Lap Top	15	82,500,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	5,120,000.00
				Router	1	1,800,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG	Lap Top	15	85,050,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	985,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
			UPT SMP NEGERI 5 MANGARABOMBANG	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
			UPT SMP NEGERI SATU ATAP PUNAGA	Lap Top	15	82,800,000.00
				LCD Projector/Infocus	1	4,450,000.00
				Router	1	940,000.00
	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg.	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	Mobil Ambulance	1	87,000,000.00
				P.C Unit	20	111,980,000.00
	Grand Total				949	5,300,673,336.00

Lampiran 15

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Penambahan dari Bantuan Pemerintah Pusat 2025
Per 31 Desember 2025

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
Bantuan Pemerintah Sarana Digitalisasi Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar	UPT. Sanggar Kegiatan Belajar	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD DIKPORA GALESONG	UPT SD INPRES 191 PAKU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 195 KAMPUNG BERU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 100 PALALAKKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 115 INPRES GALESONG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 117 INPRES BONTOMANGAPE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 132 INPRES PARASANGAN BERU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 145 INPRES BAYOWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 147 INPRES PALALAKKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 190 INPRES BURANE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 192 INPRES TAMALALANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 193 INPRES PAJANGENGANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 211 INPRES CAMPAGAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 212 INPRES BONTOKANANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 226 INPRES LANNA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 68 CENTER GALESONG II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 69 GALESONG I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 70 BODDIA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 71 MARIO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 74 BONTORITA II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 84 PATTINOANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 99 KAMPUNG BERU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 129 INPRES BONTOLOE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 224 INPRES MANNYAMPA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 72 BONTOLOE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
		UPT SDN 73 BONTORITA I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD DIKPORA GALESONG SELATAN	UPT SD INPRES 189 KANITE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 210 KATONOKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 223 KADATONG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 130 INPRES BONTOMARANNU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 146 INPRES BONTOKANANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 187 INPRES DENGILAU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 188 INPRES UWEYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 75 BENTANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 76 TAROWANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 77 KANAENG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 79 SAWAKONG TOWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 80 POPO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 81 KALUKUBODO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 82 BARAMMAMASE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 83 MANGINDARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI NO 225 INPRES RITA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 186 INPRES BONTOA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 78 BALANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 1 GALESONG SELATAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 4 GALESONG SELATAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD DIKPORA GALESONG UTARA	SMP NEGERI PAKKABBA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 119 BONTOSUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 194 TAIPANAORANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 222 SAMPULUNGAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 118 INPRES BONTOLEBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 120 INPRES TAMALATE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 131 INPRES BATU-BATU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 196 INPRES BONTOMAJANNANG	Lap Top	1	6,496,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 197 INPRES BONTOPAJJA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 198 INPRES BONTORITA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 199 INPRES BONTOLANRA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 200 INPRES BONTOKADDOPEPE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 213 INPRES KABALLOKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 214 INPRES PANGKAJENE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 85 CENTRE BONTOLEBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 86 AENG TOWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 87 TAMANROYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 88 AENG BATU-BATU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 89 PAKKABBA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 90 SAMPULUNGAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 91 SOREANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 92 TABARINGAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 93 SAWAKUNG BEBA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 94 BEBA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 95 CAMPAGAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 96 KALONGKONG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 97 TAMASONGO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 221 INPRES LABBUMESANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 148 INPRES JULUMATA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 3 GALESONG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD DIKPORA SANROBONE	UPT SD NEGERI 107 INPRES KUNJUNG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 108 INPRES TONASA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 139 INPRES BENTENG SANROBONE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 25 SANROBONE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 29 BANYUANYARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 30 PADDINGING	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
		UPT SD NEGERI 31 LAU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 36 TONASA PARAPPA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 38 PARASANGAN BERU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI INPRES 162 KAMPUNG BERU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI INPRES 163 BONTOPANNO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI INPRES 206 SALEKOWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI INPRES 228 BORONG UNTIA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 123 INPRES UJUNG LAU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 35 MACCINIBAJI	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 1 SANROBONE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD KEPULAUAN TANAKEKE	UPT SD NEGERI 140 INPRES TOMPOTANAH	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 207 INPRES CAMBANG-CAMBANGANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 27 TOMPO TANAH	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 28 KALUKUANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 33 BAULUANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 34 SATANGNGA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI BANGKOTINGGIA I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI KECIL 36 LABBOTALLUA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI KECIL BANGKOTINGGIA II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 121 INPRES BALANGDATU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 161 INPRES LANTANG PEO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 3 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 8 MAPPAKASUNGGU SATU ATAP	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI SATU ATAP KALUKUANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI SATU ATAP LANTANG PEO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI SATU ATAP TOMPOTANAH	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP SATAP 11 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMPN 10 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD MAPPAKASUNGGU	UPT SD NEGERI 106 INPRES TAKALAR I	Lap Top	1	6,496,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 138 INPRES MANGULABBE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 227 INPRES TAKALAR II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 26 SOREANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 32 PATANI I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI INPRES 164 TAIPA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI INPRES 205 MASALLENG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 23 CENTRE TAKALAR 1	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 37 PATANI II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 24 TAKALAR II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 2 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 7 MAPPAKASUNGGU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD POLONGBANGKENG SELATAN	UPT SD NEGERI 219 INPRES BATUTARUTTU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 102 INPRES BONTOKADATTO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 12 PATTE NE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 124 INPRES MONCONGKOMBA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 125 INPRES BULUKUNYI	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 13 BONTOLEBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 134 INPRES SURULANGI	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 136 INPRES LANYARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 14 MALLAKA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 15 LANTANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 154 INPRES BANTINOTO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 155 INPRES RAJAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 156 INPRES MAKAMMU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 158 INPRES JENEMATTALASA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 159 INPRES CAMPAGAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 16 SAYOWANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 160 INPRES BONTOLEBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 18 BONTOKADATTO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 19 BABA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
		UPT SD NEGERI 20 TANA-TANA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 202 INPRES TIMBUSU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 203 INPRES BARUGAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 204 INPRES BALANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 21 BULUKUNYI	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 218 INPRES CURA-CURA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 22 CAKURA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 220 INPRES BONTOCINDE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 153 INPRES BONTONOMPO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 157 INPRES PAJENEKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 3 TAKALAR	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 4 TAKALAR	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 5 TAKALAR	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD POLONGBANGKENG UTARA	UPT SD 171 INPRES BUTTADIDIA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 109 INPRES PANRANNUANGKU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 110 INPRES MATTOMPODALLE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 111 INPRES LASSANG I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 127 INPRES KOMARA I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 141 INPRES PARAPPUNGANTA II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 142 INPRES LASSANG II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 167 INPRES MALEWANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 169 INPRES PARAMBADDO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 170 INPRES JENEMAEJA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 172 INPRES HOME BASE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 206 INPRES MANNYAMPA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 209 INPRES SALEKOWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 215 INPRES KUPANGA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 216 INPRES MACCINI BAJI	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 217 INPRES PANJARUNGAN	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 39 CENTRE PALLEKO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 41 MALEWANG	Lap Top	1	6,496,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 43 MANONGKOKI I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 44 MANONGKOKI II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 48 MANUJU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 49 PANJOJO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 50 LASSANG I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 51 LAUWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 52 LEREKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 53 SAULEYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 54 MALOLO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 55 KOMARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI INPRES 126 PARAPPUNGANTA I	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 40 PALLEKO II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 140 INPRES KO MARA II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 168 INPRES ROMANGTANGNGAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 173 INPRES TANASAMBAYANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 42 PANGEMBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 56 LASSANG II	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 56 PALILANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN NO. 166 INPRES BONTORITA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 1 POLONGBANGKENG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 2 POLONGBANGKENG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 3 POLONGBANGKENG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 4 POLONGBANGKENG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 6 POLONGBANGKENG UTARA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI SATAP HOMEBASE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD. Dikpora Pattallassang	SMP NEGERI MARADEKAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		TK Negeri Pertiwi Pemwilda	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 104 MARADEKAYA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD INPRES 125 BAJENG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
		UPT SD NEGERI 1 CENTRE PATTALLASSANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 10 PAPPA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 101 INPRES PATTALLASSANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 103 INPRES SOMPU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 105 INPRES PABUNDUKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 11 BONTOSANRA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 133 INPRES PARIRISI	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 135 INPRES PASULEANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 149 INPRES LIMBUNGANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 150 INPRES TAMALALANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 151 INPRES KALAMPA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 165 INPRES AL QAMAR	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 17 PASULEYANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 201 INPRES PALEMBA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 234 INPRES TAKALAR KOTA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 4 SOMPU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 45 BIRINGBALANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 46 SALAKA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 47 ALLUKA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 5 BALLO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 6 BILACADDI	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 7 TALA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 8 TAMASONGO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 2 PATTALLASSANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 3 PATTALLASSANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 9 BONE-BONE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 1 TAKALAR	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 2 TAKALAR	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
	UPTD. MANGARABOMBANG	TK Negeri Dharma Wanita Mangarabombang	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD 183 INPRES KAMPUNG PARANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 112 INPRES BONTOMANAI	Lap Top	1	6,496,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 113 INPRES LAIKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 114 INPRES CIKOWANG LAKATONG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 128 INPRES LENGKESE 1	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 14 INPRES CIKOWANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 143 INPRES TOPE JAWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 174 INPRES KALAPPO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 175 INPRES BONTO BADDO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 176 INPRES LENGKESE 11	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 177 INPRES BOLO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 178 INPRES LAMANGKIA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 179 INPRES BALANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 180 INPRES LAKATONG PULAU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 181 INPRES PATTOPAKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 182 INPRES BONTO-BONTO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 184 INPRES BODDIA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 185 INPRES SALAMBU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 229 INPRES ONGKOWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 230 INPRES GARONGGONG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 231 INPRES KAPUNRENGANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 33 TRANSMIGRASI LAIKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 58 LENGKESE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 59 PANYANGKALANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 60 BONTOPARANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 61 PUNTONDO	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 62 LAIKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 63 PUNAGA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 64 JONGGOWA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 66 KAJANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SD NEGERI 67 BANGGAE	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SDN 57 CENTRE MANGGADU	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
		UPT SDN 65 PA GANNAKKANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 3 MANGARABOMBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 4 MANGARABOMBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI 5 MANGARABOMBANG	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
		UPT SMP NEGERI SATU ATAP PUNAGA	Lap Top	1	6,496,000.00
			Papan Interaktif	1	26,640,000.00
Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan	UPTD DIKPORA GALESONG	UPT SDN 129 INPRES BONTOLOE	Karpet	2	1,100,000.00
			Meja Kerja Kayu	13	6,700,000.00
			Rak Kayu	12	9,280,900.00
	UPTD DIKPORA SANROBONE	UPT SD NEGERI INPRES 162 KAMPUNG BERU	Lemari Kayu	1	1,000,000.00
			Meja Kerja Kayu	1	1,000,000.00
			Tempat Tidur Besi	2	4,000,000.00
	UPTD KEPULAUAN TANAKEKE	UPT SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU	Kursi Tamu	1	3,500,000.00
			Lemari Kayu	5	11,000,000.00
			Meja Kerja Kayu	7	12,250,000.00
			Meja Kerja Pejabat Lainnya	1	2,500,000.00
			Papan Pengumuman	1	500,000.00
	UPTD POLONGBANGKENG SELATAN	UPT SD NEGERI 155 INPRES RAJAYA	Lemari Kayu	1	1,000,000.00
			Meja Kerja Kayu	1	1,000,000.00
			Tempat Tidur Besi	2	4,000,000.00
		UPT SD NEGERI 20 TANA-TANA	Kasur/Spring Bed	2	1,000,000.00
			Lemari Kayu	7	7,800,000.00
			Meja Kerja Kayu	13	10,700,000.00
			Meja Kerja Pejabat Lainnya	1	1,500,000.00
			Sofa	1	3,700,000.00
			Tempat Tidur Besi	2	1,800,000.00
Grand Total				**628**	**9,230,866,900.00**

Penambahan dari Bantuan Pemerintah Pusat 2025 untuk aset extracomtable

No	Jenis Barang	SKPD	Sub Unit Kerja	Unit	Harga Perolehan
Bantuan Pemerintah S	Hard Disk	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMP NEGERI MARADEKAYA	1	408,000.00
			SMP NEGERI PAKKABBA	1	408,000.00
			TK Negeri Dharma Wanita Mangarabombang	1	408,000.00
			TK Negeri Pertiwi Pemwilda	1	408,000.00
			UPT SD 171 INPRES BUTTADIDIA	1	408,000.00
			UPT SD 183 INPRES KAMPUNG PARANG	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 104 MARADEKAYA	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 119 BONTOSUNGGU	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 125 BAJENG	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 189 KANITE	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 191 PAKU	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 194 TAIPANAORANG	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 195 KAMPUNG BERU	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 210 KATONOKANG	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 222 SAMPULUNGAN	1	408,000.00
			UPT SD INPRES 223 KADATONG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 219 INPRES BATUTARUTTU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 1 CENTRE PATTALLASSANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 10 PAPPA	1	408,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			UPT SD NEGERI 100 PALALAKKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 101 INPRES PATTALLASSANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 102 INPRES BONTOKADATTO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 103 INPRES SOMPU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 105 INPRES PABUNDUKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 106 INPRES TAKALAR I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 107 INPRES KUNJUNG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 108 INPRES TONASA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 109 INPRES PANRANNUANGKU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 11 BONTOSANRA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 110 INPRES MATTOMPODALLE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 111 INPRES LASSANG I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 112 INPRES BONTOMANAI	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 113 INPRES LAIKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 114 INPRES CIKOWANG LAKATONG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 115 INPRES GALESONG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 117 INPRES BONTOMANGAPE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 118 INPRES BONTOLEBANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 12 PATTE NE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 120 INPRES TAMALATE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 124 INPRES MONCONGKOMBA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 125 INPRES BULUKUNYI	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 127 INPRES KOMARA I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 128 INPRES LENGKESE 1	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 13 BONTOLEBANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 130 INPRES BONTOMARANNU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 131 INPRES BATU-BATU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 132 INPRES PARASANGAN BERU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 133 INPRES PARIRISI	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 134 INPRES SURULANGI	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 135 INPRES PASULEANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 136 INPRES LANYARA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 138 INPRES MANGULABBE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 139 INPRES BENTENG SANROBONE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 14 INPRES CIKOWANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 14 MALLAKA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 140 INPRES TOMPOTANAH	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 141 INPRES PARAPPUNGANTA II	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 142 INPRES LASSANG II	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 143 INPRES TOPE JAWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 145 INPRES BAYOWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 146 INPRES BONTOKANANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 147 INPRES PALALAKKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 149 INPRES LIMBUNGANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 15 LANTANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 150 INPRES TAMALALANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 151 INPRES KALAMPA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 154 INPRES BANTINOTO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 155 INPRES RAJAYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 156 INPRES MAKAMMU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 158 INPRES JENEMATTALASA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 159 INPRES CAMPAGAYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 16 SAYOWANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 160 INPRES BONTOLEBANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 165 INPRES AL QAMAR	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 167 INPRES MALEWANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 169 INPRES PARAMBADDO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 17 PASULEYANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 170 INPRES JENEMAEJA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 172 INPRES HOME BASE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 174 INPRES KALAPPO	1	408,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			UPT SD NEGERI 175 INPRES BONTO BADDO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 176 INPRES LENGKESE 11	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 177 INPRES BOLO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 178 INPRES LAMANGKIA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 179 INPRES BALANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 18 BONTOKADATTO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 180 INPRES LAKATONG PULAU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 181 INPRES PATTOPAKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 182 INPRES BONTO-BONTO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 184 INPRES BODDIA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 185 INPRES SALAMBU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 187 INPRES DENGILAU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 188 INPRES UWEYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 19 BABA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 190 INPRES BURANE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 192 INPRES TAMALALANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 193 INPRES PAJANGENGANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 196 INPRES BONTOMAJANNANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 197 INPRES BONTOPAJJA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 198 INPRES BONTORITA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 199 INPRES BONTOLANRA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 20 TANA-TANA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 200 INPRES BONTOKADDOPEPE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 201 INPRES PALEMBA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 202 INPRES TIMBUSU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 203 INPRES BARUGAYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 204 INPRES BALANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 206 INPRES MANNYAMPA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 207 INPRES CAMBANG-CAMBANGANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 209 INPRES SALEKOWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 21 BULUKUNYI	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 211 INPRES CAMPAGAYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 212 INPRES BONTOKANANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 213 INPRES KABALLOKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 214 INPRES PANGKAJENE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 215 INPRES KUPANGA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 216 INPRES MACCINI BAJI	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 217 INPRES PANJARUNGAN	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 218 INPRES CURA-CURA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 22 CAKURA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 220 INPRES BONTOCINDE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 226 INPRES LANNA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 227 INPRES TAKALAR II	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 229 INPRES ONGKOWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 230 INPRES GARONGGONG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 231 INPRES KAPUNRENGANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 234 INPRES TAKALAR KOTA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 25 SANROBONE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 26 SOREANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 27 TOMPO TANAH	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 28 KALUKUANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 29 BANYUANYARA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 30 PADDINGING	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 31 LAU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 32 PATANI I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 33 BAULUANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 33 TRANSMIGRASI LAIKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 34 SATANGNGA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 36 TONASA PARAPPA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 38 PARASANGAN BERU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 39 CENTRE PALLEKO	1	408,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			UPT SD NEGERI 4 SOMPU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 41 MALEWANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 43 MANONGKOKI I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 44 MANONGKOKI II	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 45 BIRINGBALANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 46 SALAKA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 47 ALLUKA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 48 MANUJU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 49 PANJOJO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 5 BALLO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 50 LASSANG I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 51 LAUWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 52 LEREKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 53 SAULEYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 54 MALOLO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 55 KOMARA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 58 LENGKESE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 59 PANYANGKALANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 6 BILACADDI	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 60 BONTOPARANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 61 PUNTONDO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 62 LAIKANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 63 PUNAGA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 64 JONGGOWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 66 KAJANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 67 BANGGAE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 68 CENTER GALESONG II	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 69 GALESONG I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 7 TALA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 70 BODDIA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 71 MARIO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 74 BONTORITA II	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 75 BENTANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 76 TAROWANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 77 KANAENG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 79 SAWAKONG TOWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 8 TAMASONGO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 80 POPO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 81 KALUKUBODO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 82 BARAMMAMASE	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 83 MANGINDARA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 84 PATTINOANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 85 CENTRE BONTOLEBANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 86 AENG TOWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 87 TAMANROYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 88 AENG BATU-BATU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 89 PAKKABBA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 90 SAMPULUNGAN	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 91 SOREANG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 92 TABARINGAN	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 93 SAWAKUNG BEBA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 94 BEBA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 95 CAMPAGAYA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 96 KALONGKONG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 97 TAMASONGO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI 99 KAMPUNG BERU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI BANGKOTINGGIA I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI INPRES 126 PARAPPUNGANTA I	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI INPRES 162 KAMPUNG BERU	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI INPRES 163 BONTOPANNO	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI INPRES 164 TAIPA	1	408,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			UPT SD NEGERI INPRES 205 MASALLENG	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI INPRES 206 SALEKOWA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI INPRES 228 BORONG UNTIA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI KECIL 36 LABBOTALLUA	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI KECIL BANGKOTINGGIA II	1	408,000.00
			UPT SD NEGERI NO 225 INPRES RITA	1	408,000.00
			UPT SDN 2 PATTALLASSANG	1	408,000.00
			UPT SDN 221 INPRES LABBUMESANG	1	408,000.00
			UPT SDN 23 CENTRE TAKALAR 1	1	408,000.00
			UPT SDN 37 PATANI II	1	408,000.00
			UPT SDN 40 PALLEKO II	1	408,000.00
			UPT SDN 121 INPRES BALANGDATU	1	408,000.00
			UPT SDN 123 INPRES UJUNG LAU	1	408,000.00
			UPT SDN 129 INPRES BONTOLOE	1	408,000.00
			UPT SDN 140 INPRES KO MARA II	1	408,000.00
			UPT SDN 148 INPRES JULUMATA	1	408,000.00
			UPT SDN 153 INPRES BONTONOMPO	1	408,000.00
			UPT SDN 157 INPRES PAJENEKANG	1	408,000.00
			UPT SDN 161 INPRES LANTANG PEO	1	408,000.00
			UPT SDN 168 INPRES ROMANGTANGNGAYA	1	408,000.00
			UPT SDN 173 INPRES TANASAMBAYANG	1	408,000.00
			UPT SDN 186 INPRES BONTOA	1	408,000.00
			UPT SDN 224 INPRES MANNYAMPA	1	408,000.00
			UPT SDN 24 TAKALAR II	1	408,000.00
			UPT SDN 3 PATTALLASSANG	1	408,000.00
			UPT SDN 35 MACCINIBAJI	1	408,000.00
			UPT SDN 42 PANGEMBANG	1	408,000.00
			UPT SDN 56 LASSANG II	1	408,000.00
			UPT SDN 56 PALILANG	1	408,000.00
			UPT SDN 57 CENTRE MANGGADU	1	408,000.00
			UPT SDN 65 PA GANNAKKANG	1	408,000.00
			UPT SDN 72 BONTOLOE	1	408,000.00
			UPT SDN 73 BONTORITA I	1	408,000.00
			UPT SDN 78 BALANG	1	408,000.00
			UPT SDN 9 BONE-BONE	1	408,000.00
			UPT SDN NO. 166 INPRES BONTORITA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 GALESONG SELATAN	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 POLONGBANGKENG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 SANROBONE	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 1 TAKALAR	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 MAPPAKASUNGGU	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 POLONGBANGKENG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 2 TAKALAR	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 3 GALESONG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 3 MANGARABOMBANG	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 3 MAPPAKASUNGGU	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 3 POLONGBANGKENG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 3 TAKALAR	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 GALESONG SELATAN	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 MANGARABOMBANG	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 POLONGBANGKENG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 4 TAKALAR	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 5 MANGARABOMBANG	1	408,000.00

Jenis Bantuan	Sub Unit	Nama Sekolah	Jneis Barang	Unit	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6
			UPT SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 5 TAKALAR	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 6 POLONGBANGKENG UTARA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 7 MAPPAKASUNGGU	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI 8 MAPPAKASUNGGU SATU ATAP	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI SATAP HOMEBASE	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI SATU ATAP KALUKUANG	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI SATU ATAP LANTANG PEO	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI SATU ATAP PUNAGA	1	408,000.00
			UPT SMP NEGERI SATU ATAP TOMPOTANAH	1	408,000.00
			UPT SMP SATAP 11 MAPPAKASUNGGU	1	408,000.00
			UPT SMPN 10 MAPPAKASUNGGU	1	408,000.00
			UPT. Sanggar Kegiatan Belajar	1	408,000.00
				276	**112,608,000.00**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Daftar Aset Kendaraan Bermotor yang Digunakan/Dipinjam Pakai oleh Instansi Vertikal
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Instansi	Jenis Barang	Nomor Register	Merek / Type / Lokasi	Ukuran / CC	Tahun Pembelian	Polisi	No Rangka	No Mesin	BPKB	Unit	Harga	Surat Perjanjian	Jangka Waktu	Mulai tanggal/Sampai tanggal
1	Sekretariat Daerah	Bawaslu	Station Wagon	0001-0001	TOYOTA KIJANG INNOVA V	1998 CC	2005	DD 1031 C	MHFXW43G054017074	1TR6085706	6849128 R	1	220,000,000.00	surat perjanjian pinjam pakai Pemda Takalar dan Bawaslu nomor 028/2159/Umum tanggal 1 September 2025	2 Tahun	1 September 2025 S/D 1 September 2027
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bawaslu	Station Wagon	0004-0004	Daihatsu Xenia F 600 RV	989 CC	2013	DD 1061 C	MHKV1AA1JDK005413	DP75090	K-03276310	1	142,800,000.00	surat perjanjian pinjam pakai Pemda Takalar dan Bawaslu nomor : 024/1978/umum tanggal 31 Agustus 2023	2 Tahun	31 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2025
3	Sekretariat Daerah	Bawaslu	Rumah Negera Gol II Type A	0010	Jl. Syech Yusuf Kabupaten Takalar	380 M2	1997					1	128,115,000.00	surat perjanjian pinjam pakai Pemda Takalar dan Bawaslu 028/2157/Umum tanggal 1 September 2025	2 Tahun	1 September 2025 S/D 1 September 2027
4	Sekretariat Daerah	Pengadilan Negeri Takalar	Station Wagon	0053-0053	Toyota All Kijang Inova 2.0 G M/T (Bensin)- (Vin 2016)	1998 CC	2016	DD 1097 C	MHFJW8EM2G2318508	1TRA187289	M-03322623 R	1	304,500,000.00	surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Pengadilan Negeri Takalar nomor 028/500/umum | w22.416/5/UM/I/2022 tanggal 04 januari 2022	5 Tahun	04 Januari 2022 S/D 04 Januari 2027
5	Sekretariat Daerah	Kementerian Agama	Station Wagon	0065-0065	Toyota Kijang Innova G Luxury	2000 CC	2015	DD 1076 C	MHFXW42G9F2319672	1TR8882328	L-11395838	1	382,050,000.00	surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kemenag Takalar nomor 028/320/umum | B.1467/KK.21.21/I/KS.01/4/2024 tanggal 1 April 2024	2 Tahun	01 April 2024 S/D 01 April 2026
6	Sekretariat Daerah	Kejaksaan Negeri Takalar	Station Wagon	0052-0052	Mitsubishi PAjero Sport Exceed 2.5 4x2 A/T 2015	2477 CC	2015	DD 1081 C	MMBGRKG40EF039407	4D56UCFW2823	M-10098009 R	1	423,416,000.00	surat perjanjain pinjam pakai Setda Takalar dan Kejari Takalar 028/2232/umum, B410/P432/C.P.I/II/2023	2 Tahun	01 Oktober 2023 S/D 1 Oktober 2025
7	Sekretariat Daerah	Kejaksaan Negeri Takalar	Station Wagon	0074-0074	Daihatsu Xenia	1300 CC	2015	DD 1073 C	MHKV5EA2JFJ003654	1NRF057183	L-11409758 R	1	174,600,000.00	surat perjanjain pinjam pakai Setda Takalar dan Kejari Takalar 028/2232/umum, B410/P432/C.P.I/II/2023	2 Tahun	01 Oktober 2023 S/D 1 Oktober 2025
8	Sekretariat Daerah	Kejaksaan Negeri Takalar	Station Wagon	0003-0003	Toyota New Venturer 2.0 A/T	2000 CC	2021	DD 1093 C	MHFAW3EM0L0001268	1TR A798946	Q-09815196	1	435,100,000.00	surat perjanjain pinjam pakai Setda Takalar dan Kejari Takalar 028/2232/umum, B410/P432/C.P.I/II/2023	2 Tahun	01 Oktober 2023 S/D 1 Oktober 2025
9	Sekretariat Daerah	Kejaksaan Negeri Takalar	Sepeda Motor	0001-0001	Vario 125 CBS	125 CC	2021	DD 6473 C	MH1JM4113LK668871	JM41E668434	Q-09814016	1	19,800,000.00	surat perjanjain pinjam pakai Setda Takalar dan Kejari Takalar 028/2232/umum, B410/P432/C.P.I/II/2023	2 Tahun	01 Oktober 2023 S/D 1 Oktober 2025
10	Sekretariat Daerah	Kejaksaan Negeri Takalar	Sepeda Motor	0002-0002	Vario 125 CBS	125 CC	2021	DD 6472 C	MH1JM4113LK650077	JM41E1649781	Q-09814017	1	19,800,000.00	surat perjanjain pinjam pakai Setda Takalar dan Kejari Takalar 028/2232/umum, B410/P432/C.P.I/II/2023	2 Tahun	01 Oktober 2023 S/D 1 Oktober 2025
11	Sekretariat Daerah	Kodim Takalar	Station Wagon	0004-0004	Toyota New Venturer 2.0 A/T	2000 CC	2021	DD 1092 C	MHFAW3EM2L0001322	1TR A799923	Q-09815195	1	435,100,000.00	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Pemda Takalar dan Kodim 1426 Takalar 00.2.1/2076/Setda - PP/15/X/2025	2 Tahun	1 Oktober 2025 S/D 1 Oktober 2027
12	Sekretariat Daerah	Kodim Takalar	Station Wagon	0041-0041	Toyota Kijang Innova 2.0 E DLX M/T	2000 CC	2014	DD 1298 C	MHFXW4167E0062698	1TR7807505	L-01583883 R	1	247,400,000.00	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Pemda Takalar dan Kodim 1426 Takalar 00.2.1/2076/Setda - PP/15/X/2025	2 Tahun	1 Oktober 2025 S/D 1 Oktober 2027
13	Sekretariat Daerah	Kodim Takalar	Station Wagon	0008-0008	Toyota Kijang Innova E	1998 cc	2005	DD 1173 C	MHFXW416850010965	1TR-6143294	8830350 R	1	163,500,000.00	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Pemda Takalar dan Kodim 1426 Takalar 00.2.1/2076/Setda - PP/15/X/2025	2 Tahun	1 Oktober 2025 S/D 1 Oktober 2027
14	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Station Wagon	0005-0005	Toyota New Venturer 2.0 A/T	2000 CC	2021	DD 1091 C	MHFAW3EM6L0001159	1TR A798315	Q-09814946	1	435,100,000.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
15	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Station Wagon	0006-0006	Mitsubishi Pajero Sport 2.5 L Exceed-L (4X2) 5 M/T Vin 2021	2500 CC	2021	DD 1126 C	MK2KRWMDNMJ000346	4D56UBE6425	S-00775753 R	1	509,907,750.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
16	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Pick Up	0003-0003	Toyota/KF 60 STD	1781 CC	2006	DD 8015 C	MHF31KF6060047370	7K-0826339	0650905 R	1	125,000,000.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
17	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Station Wagon	0015-0015	Toyota Rush 1.5 G A/T	1495 CC	2012	DD 1146 C	MHFE2CK2JCK003265	DCS5614	J-00035670 R	1	220,669,959.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
18	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Station Wagon	0060-0060	toyota Hillux 2,4 DC G (4X4) M/T-[Vin 2018]	2400 CC	2018	DD 8045 C	MROKB8CD4J1120302	2GD0593579	P 00148470 R	1	432,295,500.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
19	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Pick Up	0008-0008	Toyota Hilux 2.0 Single Cab 4x2 bensin Lux New	1998 CC	2014	DD 8108 C	MH0AW1267E0044878	1TR7771721	L-02140125 R	1	186,400,000.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025

No	SKPD	Instansi	Jenis Barang	Nomor Register	Merek / Type / Lokasi	Ukuran / CC	Tahun Pembelian	Polisi	No Rangka	No Mesin	BPKB	Unit	Harga	Surat Perjanjian	Jangka Waktu	Mulai tanggal/Sampai tanggal
20	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Station Wagon	0044-0044	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T	1998 CC	2015	DD 1083 C	MHFXW42G6E2289688	1TR7802562	L-07884867R	1	298,500,000.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
21	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Sepeda Motor	0103-0103	Honda CB 150R	150 cc	2014	DD 6855 C	MH1KC4112EK367714	KC41E1365926	L-05741255R	1	23,612,800.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
22	Sekretariat Daerah	Kepolisian Resort Takalar	Sepeda Motor	0104-0104	Honda CB 150R	150cc	2014	DD 6854 C	MH1KC4112EK309005	KC41E1307565	L-05741256R	1	23,612,800.00	Surat perjanjian pinjam pakai Setda Takalar dan Kepolisian Resort Takalar nomor 028/2373/Umum / Nomor B/06/XI/2023	2 Tahun	14 Nov 2023 S/D 14 Nov 2025
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyrakat dan Desa	Institut Seni Indonesia Surakarta	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0002	Jl. Abdul Malik Dg. Gassing		1999					1	198,170,000.00	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 028/778/Umum - 16/1T.6.1/HK.06.00/2022	4 Tahun	30 Mei 2022 S/D 30 Mei 2026
24	Sekretariat Daerah	Palang Merah Indonesia	Ambulance	0001-0001	Mitsubitshi Maven	1500 CC	2009	DD 9078 C	MHMUDW1E9J000722	4G15TE03348		1	98,000,000.00	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 028/407/Setda - 04/UM/5.5.6/II/2025 tanggal 3 Feb 2025	2 Tahun	02 Pebruari 2025 S/D 02 Pebruari 2027
						TOTAL						**24**	**5,647,449,809.00**			

Lampiran 17

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal Audited 2025	Penambahan										Pengurangan									Saldo Akhir 2025 Audited
			Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Mutasi Masuk	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah Ke Gedung	Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Bangunan	Reklasifikasi dari Extracomtable ke aset tetap	Reklasifikasi Bertambah dari KDP ke Aset Definitifnya	Koreksi Bertambah Atribusi Ke Induk	Hasil Inventarisasi/Kurang Catat	Bantuan	Mutasi Keluar	Reklasifikasi ke aset lainnya (Rusak Berat)	Reklasifikasi Belanja Modal Bangunan/JIJ ke /Tanah ke KDP	Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke Bangunan	Extracomtable Belanja Modal	Beban Pemeliharaan	Realisasi Utang Tahun Sebelumnya	Koreksi Kekurangan Volume	Koreksi Berkurang Atribusi Ke Induk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Sekretariat DPRD	7,528,524,385.44		1,769,298,612.00																238,967,279.34		9,058,855,718.10
2	Sekretariat Daerah	66,936,599,717.24		1,300,810,010.00	7,650,720,228.00					190,510,000.00	480,000,000.00		100,000,000.00							123,182,005.59	190,510,000.00	76,144,947,949.65
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50,813,153,508.12	6,695,063,030.00			197,789,000.00			704,545,760.00				14,523,363,200.00		30,000,000.00				244,524,790.00	2,113,125.00		43,610,550,183.12
4	Dinas Perhubungan	4,363,337,892.00	-		2,176,808,000.00															56,418,670.00		6,483,727,222.00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	285,516,328.00	-										285,516,328.00									-
6	Dinas Kesehatan	229,178,836,771.37	125,172,327.00		193,000,000.00														125,172,327.00			229,371,836,771.37
7	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	110,414,701,804.00	118,359,500.00										2,540,125,801.00				19,036,842.66					107,973,898,660.34
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	328,378,814,033.67	8,723,955,345.00		542,600,000.00		781,381,224.00	29,175,000.00		368,966,999.68		6,847,519,368.66			20,620,000.00		144,242,424.00		351,396,720.00	31,544,747.38	368,966,999.68	344,755,641,079.95
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10,421,727,500.00																				10,421,727,500.00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,835,155,740.88																				5,835,155,740.88
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2,744,137,315.00																				2,744,137,315.00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43,650,000.00																				43,650,000.00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,565,561,000.00	-		2,730,813,551.00								1,853,931,000.00									3,442,443,551.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3,644,015,266.00	1,405,632,237.00																	17,223,859.73		5,032,423,643.27
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,887,229,000.00																				1,887,229,000.00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143,200,000.00																				143,200,000.00
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	15,162,039,797.02	49,860,000.00															49,860,000.00				15,162,039,797.02
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6,864,860,830.00												46,656,000.00								6,818,204,830.00
19	Dinas Perikanan	12,621,803,646.19																				12,621,803,646.19
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,711,983,732.50																				9,711,983,732.50
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	191,350,000.00																				191,350,000.00
22	Inspektorat	780,593,850.00																				780,593,850.00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,976,061,545.00																				1,976,061,545.00
24	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	7,687,622,417.00																				7,687,622,417.00
25	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	17,272,053,127.61	34,835,180.00		5,334,361,750.00											17,000,000.00		17,835,180.00				22,606,414,877.61
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,685,058,820.00																				1,685,058,820.00
27	Kecamatan Mappakasunggu	2,457,227,735.63																				2,457,227,735.63
28	Kecamatan Mangarabombang	1,625,298,680.00																				1,625,298,680.00
29	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	2,751,520,182.84	-																			2,751,520,182.84
30	Kecamatan Polongbangkeng Utara	3,065,133,104.99	-																			3,065,133,104.99
31	Kecamatan Galesong Selatan	654,088,000.00																				654,088,000.00
32	Kecamatan Galesong Utara	1,970,402,429.50	-																			1,970,402,429.50
33	Kecamatan Pattallassang	3,096,048,125.56	-		674,632,800.00															44,136,121.58		3,726,544,803.98
34	Kecamatan Sanrobone	978,204,440.00																				978,204,440.00
35	Kecamatan Galesong	1,518,366,293.99																				1,518,366,293.99
	Total	**917,253,877,019.55**	**17,152,877,619.00**	**3,070,108,622.00**	**19,302,936,329.00**	**197,789,000.00**	**781,381,224.00**	**29,175,000.00**	**704,545,760.00**	**559,476,999.68**	**480,000,000.00**	**6,847,519,368.66**	**19,302,936,329.00**	**46,656,000.00**	**50,620,000.00**	**17,000,000.00**	**163,279,266.66**	**67,695,180.00**	**721,093,837.00**	**513,585,808.62**	**559,476,999.68**	**944,937,343,520.93**

Lampiran 18

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Penambahan dari Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025
Per 31 Desember 2025

SKPD	Unit	Sub Unit	nama barna	Unit	Harga Perolehan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD DIKPORA GALESONG	UPT SDN 129 INPRES BONTOLOE	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4	725,724,527.99
			Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	218,820,524.67
	UPTD DIKPORA SANROBONE	UPT SD NEGERI INPRES 162 KAMPUNG BERU	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	124,012,644.40
			Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2	477,448,683.52
			Kamar Mandi Gedung Pendidikan	1	133,231,192.08
	UPTD KEPULAUAN TANAKEKE	UPT SMP NEGERI 4 MAPPAKASUNGGU	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	114,445,249.25
			Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	189,970,879.18
			Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	140,630,984.82
			Kamar Mandi Gedung Pendidikan	1	75,552,886.75
		UPT SMP NEGERI SATU ATAP TOMPOTANAH	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	296,126,253.86
			Kamar Mandi Gedung Pendidikan	1	82,873,746.14
	UPTD MAPPAKASUNGGU	UPT SD NEGERI 106 INPRES TAKALAR I	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2	397,059,787.61
			Kamar Mandi Gedung Pendidikan	1	134,098,722.39
	UPTD POLONGBANGKENG SELATAN	UPT SD NEGERI 155 INPRES RAJAYA	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	389,651,244.03
			Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	124,348,581.79
			Kamar Mandi Gedung Pendidikan	1	133,592,841.18
		UPT SD NEGERI 20 TANA-TANA	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	218,141,573.34
			Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	3	609,408,463.35
			Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	122,707,254.11
			Kamar Mandi Gedung Pendidikan	2	163,774,653.20
		UPT SD NEGERI 21 BULUKUNYI	Kamar Mandi Gedung Pendidikan	1	136,659,058.00
	UPTD POLONGBANGKENG UTARA	UPT SD NEGERI 53 SAULEYA	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4	779,157,605.19
			Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	89,366,269.81
		UPT SD NEGERI 54 MALOLO	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4	866,913,228.09
			Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	103,802,513.91
Grand Total				39	6,847,519,368.66

Penambahan dari Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan 2025 Extracomtable

SKPD	Unit	Sub Unit	nama barna	Unit	Harga Perolehan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPTD DIKPORA GALESONG	UPT SDN 129 INPRES BONTOLOE	Kamar Mandi Gedung Pendidikan	1	37,500,047.34

Lampiran 19

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Extracomtable Belanja Modal

Per 31 Desember 2025

Kode Barang 108	Jenis Barang yang dibeli	Register	Thn Pengadaan/ Thn Induk	Tanggal Terima Barang	Nomor BAST	Banyak nya	Jumlah Harga	SKPD	Sub Unit Kerja	Keterangan
1.3.3.01.01.10.006	Kamar Mandi Gedung Pendidikan	0001	2025	31 Dec 2025	105/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	1	49,723,224.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SD NEGERI 1 CENTRE PATTALLASSANG	
1.3.3.01.01.10.006	Kamar Mandi Gedung Pendidikan	0002	2025	31 Dec 2025	169/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	1	44,944,424.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SMP NEGERI 2 TAKALAR	WC UPT SMP NEGERI 2 TAKALAR
1.3.3.01.01.25.004	Selasar	0002	2025	31 Dec 2025	00G /445/PPK-RSUD/1/2023	1	19,036,842.66	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	DEPAN PICU
1.3.3.01.01.30.033	Paving Blok	0001	2025	31 Dec 2025	73.05/04.0/000114/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P3/9/2025	1	49,574,776.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	UPT SMP NEGERI 1 TAKALAR	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SMP NEGERI 1 TAKALAR
Total						**4.00**	**163,279,266.66**			

Lampiran 20

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Daftar belanja modal gedung yang diakui sebagai pelunasan kewajiban atas pekerjaan fisik tahun sebelumnya yang dibayarkan melalui rekening belanja modal tahun berjalan

Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Nama Pekerjaan	Tanggal Kontrak Fisik	Nomor Kontrak Fisik	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi(Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung 1 (perencanaan teknis pembangunan baruga bappelitbangda) (utang ta, 2024)	23 Oktober 2024	146/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2024	10 Desember 2025	73.05/04.0/000260/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/12/2025	10,000,000
2	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung paket 9 (pengawasan teknis pembangunan baruga bappelitbangda) (utang ta, 2024)	22-Nov-24	218/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024	27-Nov-25	73.05/04.0/000242/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	8,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi asrama hipermata bontomate'ne (utang ta.2024)	14 Agustus 2024	135/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/VIII/2024	15 Juli 2025	73.05/04.0/000050/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ P3/7/2025	39,519,590
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis rehabilitasi asrama hipermata bontomate'ne (utang ta.2024)	9-Sep-24	141/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/IX/2024	20-Nov-25	73.05/04.0/000206/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	7,925,000
5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rehabilitasi gedung dekranasda (utang ta. 2024)	10 Desember 2024	224/DAU/PPK-PUTRPKP/SP/ XII/2024	19 Juni 2025	73.05/04.0/000036/ LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ P3/6/2025	90,617,000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pek. Plafond kantor bupati (utang ta. 2024)	31 Oktober 2024	152/PPK-PUTRPKP/ SPK/X/2024	20-Nov-25	73.05/04.0/000203/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	27,927,600
7	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung paket 9 (pengawasan teknis rehab. Gedung dekranasda, pengawasan teknis rehabilitasi kantor peternakan, pengawasan teknis rehabilitasi mes hipermata bajiateka) (utang ta, 2024)	22-Nov-24	218/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024	27-Nov-25	73.05/04.0/000242/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	15,996,000
8	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung 1 (perencanaan teknis rehabilitasi kantor peternakan) (utang ta, 2024)	23 Oktober 2024	146/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2024	10 Desember 2025	73.05/04.0/000260/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/12/2025	9,826,000
9	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pembangunan gedung-gedung 2 (perencanaan teknis rehab gedung dekranasda, perencanaan teknis rehabilitasi asrama hipermata bontomate'ne) (utang ta, 2024)	5 Juli 2024	125/SPKDAU/PPK/DPUTRPKP-CK/VII/2024	20-Nov-25	73.05/04.0/000196/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	15,000,000
10	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis rehabilitasi gedung lapris (utang ta, 2024)	23 Oktober 2024	148/PPK-PUTRPKP/ SPK/X/2024	20-Nov-25	73.05/04.0/000202/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	19,713,600
11	Dinas Kesehatan	Pembayaran 100% belanja modal bangunan kesehatan (rehabilitasi kantor dinas kesehatan) sumber dana DAU SG TA 2025 (Utang DAU SG TA. 2024) sesuai SPK No: 2404/PPK-DK24/SP-EP/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024. Lingkup Dinkes Kab. Takalar	5.2.03.01.01.0006 - Belanja Modal Bangunan Kesehatan	73.05/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/04/2025	26/03/2025	73.05/04.0/000021/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	125,172,327.00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembayaran utang rehabilitasi laboratorium upt. Smp negeri 1 mappakasunggu		29/DAU/PPK2-DISDIKBUD/SPK/IX/2024	25/03/2025	73.05/04.0/000033/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	73,049,000
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembayaran utang pembangunan pagar upt. Sd negeri 204 inpres balang		191/PPK-DISDIKBUD/SPK/X/2024	19/03/2025	73.05/04.0/000025/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/3/2025	125,490,540
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembayaran utang rehabilitasi ruang kelas upt. Sd negeri 164 taipa		327/PPK-DISDIKBUD/SPK/X/2024	19/03/2025	73.05/04.0/000024/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/3/2025	138,857,180
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengawasan rehabilitasi ruang kantor upt. Sd negeri 213 inpres kaballokang			26/03/2025	73.05/04.0/000039/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	6,000,000
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengawasan pembangunan pagar upt. Sd negeri 199 inpres bontolanra			26/03/2025	73.05/04.0/000039/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	8,000,000
	Total						**721,093,837**

Lampiran 21

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal Audited 2025	Penambahan			Saldo Akhir 2025 Audited
			Belanja Modal	Belanja Pemeliharaan	Hibah Masuk	
1	Sekretariat DPRD	17,705,000.00				17,705,000.00
2	Sekretariat Daerah	1,365,755,349.00				1,365,755,349.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,372,585,932,758.13	17,320,097,895.00	3,528,894,200.00		1,390,258,000,473.43
4	Dinas Perhubungan	26,254,335,368.00	1,121,042,041.36			26,254,335,368.00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	948,081,555.00	-			948,081,555.00
6	Dinas Kesehatan	14,257,068,852.64				14,257,068,852.64
7	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	2,153,358,358.00				2,153,358,358.00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,346,493,677.80	946,161,324.00			3,346,493,677.80
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6,451,000.00				6,451,000.00
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18,260,427,904.11				18,260,427,904.11
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	309,958,600.00				309,958,600.00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14,281,768,633.00				14,281,768,633.00
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68,039,000.00	40,728,600.00			68,039,000.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	21,500,000.00				21,500,000.00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90,097,300.00				90,097,300.00
16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1,674,833,668.04				1,674,833,668.04
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	70,230,000.00				70,230,000.00
18	Dinas Perikanan	16,091,484,288.00				16,091,484,288.00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3,686,455,592.31				3,686,455,592.31
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	133,921,000.00				133,921,000.00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	194,500,000.00				194,500,000.00
22	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	996,925,577.00				996,925,577.00
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1,212,655,483.00				1,212,655,483.00
24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	361,280,903.54				361,280,903.54
25	Kecamatan Mappakasunggu	199,500,000.00				199,500,000.00
26	Kecamatan Mangarabombang	525,611,219.40				525,611,219.40
27	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	1,384,471,320.00	573,782,245.00			1,834,839,191.00
28	Kecamatan Polongbangkeng Utara	2,049,077,900.00	979,532,600.00			2,865,442,725.00
29	Kecamatan Galesong Selatan	286,000,000.00				286,000,000.00
30	Kecamatan Galesong Utara	167,387,000.00	145,880,400.00			313,267,400.00
31	Kecamatan Pattallassang	2,177,536,568.17	803,549,250.00			2,981,085,818.17
32	Kecamatan Sanrobone	68,550,000.00				68,550,000.00
33	Kecamatan Galesong	48,976,000.00				48,976,000.00
	Total	**1,485,296,369,875.14**	**21,930,774,355.36**	**3,528,894,200.00**	**-**	**1,505,184,599,936.44**

Lampiran 22

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan yang di reklasifikasi ke KDP
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Nama Pekerjaan	Tanggal Kontrak Fisik	Nomor Kontrak Fisik	Nilai Kontrak Fisik (Rp)	Uang Muka / 100%			Termin 1			Perencanaan			Pengawasan			Harga Perolehan (Rp)	Sisa Kontrak (Rp)
						Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi(Rp)	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi (Rp)	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi (Rp)	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi (Rp)		
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I. MONCONGKOMBA	13 Agustus 2025	55/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/VIII/2025	98,719,500.00							31 Oktober 2025	73.05/04.0/000123/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/10/2025	98,719,500.00				98,719,500.00	-
2	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI D.I. UJUNG BASSI.	19 Agustus 2025	57/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/VIII/2025	98,528,000.00							31 Oktober 2025	73.05/04.0/000124/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/10/2025	98,528,000.00				98,528,000.00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pek. Jembatan Penghubung Polongbangkeng Selatan - Mangarabombang, Tana-Tana Dusun Bontobaddo Desa Lengkese Kec. Mangarabombang	27 Oktober 2025	249/SP/PPK/DPUTRPKP/X/2025	449,381,000.00	11/13/2025	73.05/04.0/000170/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	134,814,300.00	31 Desember 2025	73.05/04.0/000448/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PPR1/12/2025	157,283,350.00	9/19/2025	73.05/04.0/000085/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/9/2025	14,084,000.00	30 Desember 2025	73.05/04.0/000416/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PPR1/12/2025	7,749,040.00	313,930,690.00	157,283,350.00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERENCANAAN PEMASANGAN PEVING BLOK MUSEUM DAERAH BALLA APPAKA SULAPA			4,200,000.00							31/12/2025	73.05/04.0/000342/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	4,200,000.00			4,200,000.00	4,200,000.00	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PERENCANAAN REHABILITASI PAGAR MUSEUM DAERAH BALLA APPAKA SULAPA			2,400,000.00							31/12/2025	73.05/04.0/000342/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	2,400,000.00			2,400,000.00	2,400,000.00	
	Total																	**517,778,190.00**	

Lampiran 23

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Reklasifikasi Belanja Modal JJ ke Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2025

No	Nama Barang	Sekolah	Tanggal Kontrak Fisik	Nomor Kontrak Fisik	Nilai Kontrak Fisik (Rp)	Uang Muka			100%			Perencanaan 1			Pengawasan			Harga Perolehan (Rp)	Tanggal BAST Fisik	Nomor BAST Fisik	Nama Pihak Ketiga/Penyedia/ Rekanan Fisik
						Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi(Rp)	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi (Rp)	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi (Rp)	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi(Rp)				
1	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SD NEGERI 169 INPRES PARAMBADDO	UPT. SD NEGERI 169 INPRES PARAMBADDO	16/10/2025	003/PPK-DIKBUD/SPK-KONST/X/2025	93,480,602	17/11/2025			17/12/2025	73.05/04.0/000242/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	93,480,602	26/09/2025	73.05/04.0/000113/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P3/9/2025	2,850,000.00	24/12/2025	73.05/04.0/000295/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	3,625,000	99,955,602.00	3/12/2025	078/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	CV. PARANGMANI MAKMUR JAYA
2	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SD NEGERI 20 TANA-TANA	UPT. SD NEGERI 20 TANA-TANA	17/10/2025	022/PPK-DIKBUD/SPK-KONST/X/2025	93,879,216	11/11/2025			22/12/2025	73.05/04.0/000259/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	93,879,216	26/09/2025	73.05/04.0/000113/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P3/9/2025	2,850,000.00	24/12/2025	73.05/04.0/000295/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	3,625,000	100,354,216.00	18/12/2025	163/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	CV. NUR RAHMAN
3	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SD NEGERI 219 INPRES BATUTARUTTU	UPT. SD NEGERI 219 INPRES BATUTARUTTU	17/10/2025	018/PPK-DIKBUD/SPK-KONST/X/2025	93,754,339	7/11/2025	73.05/04.0/000144/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/11/2025	28,126,302	18/12/2025	73.05/04.0/000250/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	65,628,037	26/09/2025	73.05/04.0/000113/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P3/9/2025	2,850,000.00	24/12/2025	73.05/04.0/000295/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	3,625,000	100,229,339.00	3/12/2025	095/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	CV. AKBAR PUTRA BABA
4	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SMP NEGERI 1 TAKALAR	UPT. SMP NEGERI 1 TAKALAR	3/11/2025	042/PPK-DIKBUD/SPK-KONST/XI/2025	46,824,776				24/12/2025	73.05/04.0/000271/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	46,824,776	26/09/2025	73.05/04.0/000114/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P3/9/2025	1,500,000.00	24/12/2025	73.05/04.0/000292/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	1,250,000	49,574,776.00	8/12/2025	109/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	CV. KEMBAR JAYA
5	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SMP NEGERI 2 TAKALAR	UPT. SMP NEGERI 2 TAKALAR	14/11/2025	EP-01KA1FQQQQ3B9M4TXMPZ43R6FJ	93,120,175				24/12/2025	73.05/04.0/000266/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	93,120,175	26/09/2025	73.05/04.0/000114/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P3/9/2025	2,850,000.00	24/12/2025	73.05/04.0/000292/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	2,375,000	98,345,175.00	19/12/2025	169/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	CV. GOJENTA
6	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SD NEGERI 70 BODDIA	UPT. SD NEGERI 70 BODDIA	22/10/2025	029/PPK-DIKBUD/SPK-KONST/X/2025	103,894,390				31/12/2025	73.05/04.0/000322/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	103,894,390	20/11/2025	73.05/04.0/000174/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/11/2025	3,300,000.00	31/12/2025	73.05/04.0/000338/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	2,750,000	109,944,390.00	19/12/2025	190/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	CV. NUR AQIFAH
7	PEKERJAAN PAVING BLOK UPT SD SD NEGERI 94 BEBA	UPT. SD SD NEGERI 94 BEBA	16/10/2025	015/PPK-DIKBUD/SPK-KONST/X/2025	207,877,726	10/11/2025	73.05/04.0/000148/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/11/2025	62,363,318	24/12/2025	73.05/04.0/000269/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	145,514,408	20/11/2025	73.05/04.0/000174/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/11/2025	6,600,000.00	31/12/2025	73.05/04.0/000338/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	5,500,000	219,977,726.00	12/12/2025	136/PPK-DIKBUD/BAST/XII/2025	CV. PUTRA BUNGSU MANDIRI
8	PERENCANAAN PEMASANGAN PAVING BLOK UPT SD NEGERI 234 INPRES TAKALAR KOTA	UPT SD NEGERI 234 INPRES TAKALAR KOTA													24/12/2025	73.05/04.0/000289/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025	3,000,000	3,000,000.00			
	TOTAL																	**781,381,224.00**			

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan ke Beban Ekstracomtable
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Kode barang	Nama Brang	Register	BAST	Jumlah	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0018	62 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,935,000.00	Pekerjaan Paving Blok Desa Kampung Beru Parangbaddo
2	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0003	02/KP/XI/2025	1	49,414,374.00	
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0006	44 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,889,000.00	Pekerjaan Paving Blok Kel. Mattompodalle
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0005	44 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,889,000.00	Pekerjaan Paving Blok Desa Lassang Barat
5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0003	40 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,889,000.00	Pekerjaan Paving Blok Kel. Palleko
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0002	40 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,889,000.00	Pekerjaan Paving Blok Kel. Pattallassang
7	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0001	40 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,889,000.00	Pekerjaan Paving Blok Kel. Salaka
8	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0004	02/KP/XI/2025	1	40,000,000.00	
9	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0024	188 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XII/2025	1	49,888,000.00	Pekerjaan Paving Blok Kel. Bajeng
10	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0022	46 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,942,000.00	Pekerjaan Paving Blok Kec. Galesong Utara.
11	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0021	49 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,900,000.00	Pekerjaan Paving Blok RSUD Padjonga Dg. Ngalle.
12	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0020	45 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,789,000.00	Pekerjaan Paving Blok Pallantikang
13	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.13.01.03.08	Paving Blok Jalan	0019	62 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XI/2025	1	49,935,000.00	Pekerjaan Paving Blok Kel. Parangluara
14	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.14.04.04.02	Saluran Drainage	0011	100 /BASTP/DPUTRPKP-CK/XII/2025	1	48,434,000.00	Peningkatan Drainase Kel. Kalabbirang
15	Kecamatan Polongbangkeng Utara	04.14.04.04.02	Saluran Drainage	0002	350/KMD/XII/2025	1	45,460,950.00	Pembangunan Drainase Tahap II-Lingk. Manuju Utara Kel. Mattompodalle
16	Kecamatan Polongbangkeng Utara	04.14.04.04.02	Saluran Drainage	0002	002/BASTB/Palleko/XII/2025	1	38,029,160.00	Pembangunan Drainase Tahap II-Lingk. Palleko III Kel. Palleko
17	Kecamatan Polongbangkeng Utara	04.14.04.04.02	Saluran Drainage	0002	72/BAST/KM/XI/2025	1	37,855,670.00	Pembangunan Drainase Tahap II-Lingk. Maronde Kel. Malewang
18	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	04.14.04.04.02	Saluran Drainage	0001	02/KP/XI/2025	1	34,000,000.00	
19	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan	04.14.04.04.02	Saluran Drainage	0005	144 /BASTP/DPUTRPKP-PKP/XII/2025	1	34,650,000.00	PEK. DRAINASE GRIYA KENCANA (BELAKANG MASJID AGUNG)
20	Kecamatan Polongbangkeng Utara	04.14.04.04.02	Saluran Drainage	0002	1031/KP/XI/2025	1	41,821,995.00	Pembangunan Drainase Tahap II-Lingk. Je'netallasa Kel. Parangluara
21	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0057	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
22	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0001	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
23	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0002	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
24	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0003	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
25	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0004	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
26	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0005	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
27	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0006	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
28	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0007	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
29	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0008	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
30	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0009	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
31	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0010	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
32	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0011	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
33	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0012	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
34	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0013	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
35	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0014	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
36	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0015	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
37	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0016	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
38	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0017	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
39	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0018	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
40	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0019	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
41	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0020	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
42	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0021	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
43	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0022	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
44	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0023	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
45	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0024	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
46	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0025	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
47	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0026	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
48	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0027	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
49	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0028	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
50	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0029	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
51	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0030	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
52	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0035	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.40	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1

No	SKPD	Kode barang	Nama Brang	Register	BAST	Jumlah	Harga Perolehan	Keterangan
53	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0036	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.40	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
54	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0037	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.40	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
55	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0038	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.40	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
56	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0039	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
57	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0040	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
58	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0041	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
59	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0042	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
60	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0043	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
61	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0044	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
62	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0045	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
63	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0046	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
64	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0047	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
65	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0048	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.53	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
66	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0049	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
67	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0050	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
68	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0051	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
69	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0052	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
70	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0053	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
71	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0054	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
72	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0055	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
73	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0056	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
74	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0058	795/BAST/Dishub/XII/2025	1	9,757,046.52	Pomasangan Lampu PJU Tahap 2
75	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0031	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
76	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0032	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
77	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0033	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
78	Dinas Perhubungan	04.15.05.09.04	Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	0034	791 /BAST/Dishub/XI1/2025	1	9,776,892.39	Pomasangan Lampu PJU Tahap 1
79	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0079	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
80	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0080	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
81	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0081	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
82	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0082	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
83	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0083	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
84	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0084	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
85	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0085	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
86	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0011	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
87	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0010	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
88	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0009	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
89	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0008	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
90	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0007	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
91	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0006	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
92	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0021	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
93	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0005	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
94	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0001	07/415/DSPMD/2025	1	34,958,900.00	
95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0002	07/415/DSPMD/2025	1	5,769,700.00	Pembayaran Sertifikat layak Operasi dan biaya Suverfisi Nomor induk Instalasi (NIDI) daya 6.600
96	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0020	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
97	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0019	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
98	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0018	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
99	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0004	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
100	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0003	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
101	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0002	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
102	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0001	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
103	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0017	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
104	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0016	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
105	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0015	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
106	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0014	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
107	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0013	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex

No	SKPD	Kode barang	Nama Brang	Register	BAST	Jumlah	Harga Perolehan	Keterangan
108	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0012	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
109	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0022	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
110	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0023	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
111	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0024	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
112	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0025	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
113	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0026	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
114	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0027	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
115	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0028	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
116	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0029	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
117	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0030	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
118	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0031	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
119	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0032	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
120	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0033	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
121	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0034	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
122	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0035	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
123	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0036	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
124	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0037	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
125	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0038	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
126	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0039	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
127	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0040	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
128	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0041	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
129	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0042	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
130	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0043	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
131	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0044	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
132	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0045	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.24	Pemasangan Lampu Neon Flex
133	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0046	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
134	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0047	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
135	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0048	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
136	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0049	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
137	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0050	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
138	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0051	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
139	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0052	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
140	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0053	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
141	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0054	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
142	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0055	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
143	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0056	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
144	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0057	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
145	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0058	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
146	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0059	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
147	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0060	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
148	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0061	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
149	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0062	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
150	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0063	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
151	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0064	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
152	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0065	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
153	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0066	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
154	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0067	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
155	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0068	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
156	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0069	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
157	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0070	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
158	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0071	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
159	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0072	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
160	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0073	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
161	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0074	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
162	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0075	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex

No	SKPD	Kode barang	Nama Brang	Register	BAST	Jumlah	Harga Perolehan	Keterangan
163	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0076	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
164	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0077	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
165	Dinas Perhubungan	04.16.02.02.01	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	0078	492/BAST/Dishub/IX/2025	1	6,522,108.23	Pemasangan Lampu Neon Flex
			Total				**2,080,270,790.36**	

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Daftar belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang diakui sebagai pelunasan kewajiban atas pekerjaan fisik tahun sebelumnya yang dibayarkan melalui rekening belanja modal tahun berjalan Tahun Anggaran 2025

No	SKPD	Nama Pekerjaan	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi(Rp)	Nama Pihak Ketiga/Penyedia/ Rekanan Fisik
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan jalan aspal lapen desa topejawa mangarabombang (utang ta. 2024)	26 Juni 2025	73.05/04.0/00004 5/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ P3/6/2025	94,147,200	ABD. RAHMAN DIREKTUR CV. ANNISA PRATAMA
2	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan jalan beton desa kalukuang galesong(utang ta. 2024)	25 Juni 2025	73.05/04.0/00004 3/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	179,641,000	ABD. RAHMAN DIREKTUR CV. NUR RAHMAN
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan talud ruas sombala bella tala (lanjutan) (utang ta. 2024)	15 Juli 2025	73.05/04.0/00005 1/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ P3/7/2025	89,605,000	SALMAN, SE DIREKTUR CV. KARYA LEPPUJANG KONSTRUKSI
4	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan talud ruas tepo-cikoang (lanjutan) (utang ta. 2024)	19 Juni 2025	73.05/04.0/00003 9/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	89,799,000	JUPARMAN DIREKTUR CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA
5	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pek. Jalan beton kawasan tpa balang bontokadatto kec. Polsel (utang ta. 2024)	24 Juni 2025	73.05/04.0/00004 1/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	133,599,000	M. RAMLI DG. NYA,LA DIREKTUR CV. DIFAN PRATAMA
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pek. Jalan lapen kel. Bontokadatto polongbangkeng selatan (utang ta. 2024)	26 Juni 2025	73.05/04.0/00004 6/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	93,927,400	ABD. RAHMAN DIREKTUR CV. ANNISA PRATAMA
7	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pek. Lapen lingkungan bontopoko (utang ta. 2024)	24 Juni 2025	73.05/04.0/00004 0/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	125,699,700	ALFIAN YUSUF DIREKTUR CV. PELANGI
8	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pembuatan ded jembatan garassi (utang ta. 2024)	25-Nov-25	73.05/04.0/00023 0/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	189,960,000	SAHARUDDIN, ST DIREKTUR CV. ASHIMA CONSULTANT
9	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan ded dak ta. 2024 ruas bontoloe - bentang (utang ta. 2023)	26 Juni 2025	73.05/04.0/00004 4/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	49,938,900	MUHAMMAD SALEH KAMIL DIREKTUR CV. WIRA KAMIL KONSULTAN
10	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan ded dak ta. 2024 ruas mattompodalle-toata (utang ta. 2023)	25-Nov-25	73.05/04.0/00023 2/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	69,930,000	ABD. MUJIB SABIQ DIREKTUR CV. META KONSULTAN
11	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembuatan ded dak ta. 2024 ruas bentang -sarro (utang ta. 2023)	18-Nov-25	73.05/04.0/00019 7/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	59,855,400	NUR ALIM AHMAD, ST DIREKTUR CV. BADOLO KARYA ABADI
12	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pekerjaan jalan lapen dan jalan beton paket 2 (pengawasan teknis pek. Jalan aspal lapen desa topejawa, mangarabombang, pengawasan teknis pek. Jalan beton kawasan tpa balang, bontokadatto, kec. Polongbangkeng selatan, pengawasan teknis pek. Jalan beton desa kalukuang, galesong, pengawasan teknis pek. Lapen lingkungan bontopoko, pengawasan teknis pek. Jalan lapen kel. Bontokadatto, polongbangkeng selatan) (utang ta. 2024)	26-Nov-25	73.05/04.0/00022 2/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	33,932,000	NUR ALIM AHMAD, ST DIREKTUR CV. BADOLO KARYA ABADI
13	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis paket jalan 3 (pek. Jalan hotmix, palleko 2 polongbangkeng utara, pek. Lapen dusun lompo balangtanaya, pek. Talud pekuburan dusun parapa, desa pakkabba, kec. Galut, pek. Jalan beton dusun parapa, desa pakkabba, kec. Galesong utara dan pek. Jalan beton desa kalukuang, galesong) (utang ta. 2024)	25-Nov-25	73.05/04.0/00023 1/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	30,810,215	ABD. MUJIB SABIQ DIREKTUR CV. META KONSULTAN
14	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pekerjaan jalan sirtu dan talud paket 1 (pengawasan teknis pek. Jalan sirtu balang caddi, desa balangtanaya, pengawasan teknis pek. Jalan sirtu kunrea desa lassang, pengawasan teknis pek. Talud ruas maradekaya - lantang (lanjutan), pengawasan teknis pek. Talud ruas sombala bella - tala (lanjutan), pengawasan teknis pek. Talud ruas tepo - cikoang (lanjutan)) (utang ta. 2024)	25-Nov-25	73.05/04.0/00023 3/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	27,905,000	HERMAN, ST DIREKTUR CV. MEGA PUTRA ENGINEERING
15	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis jalan paket 2. (pek. Jalan sirtu balang caddi, desa balangtanatanaya, pek. Jalan sirtu kunrea desa lassang, pek. Jalan aspal lapen desa topejawa, mangarabombang) (utang ta. 2024)	28-Nov-25	73.05/04.0/00024 6/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	27,450,000	HAMKA, ST DIREKTUR CV. REZI ALTHAANI CONSULTANT
16	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan paving blok dusun kupanga kec. Polongbangkeng utara (utang ta. 2024)	17 Maret 2025	73.05/04.0/00000 9/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P1/3/2025	125,870,900	JUPARMAN DIREKTUR CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA
17	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan paving blok desa sawakung beba (utang ta. 2024)	25 Juni 2025	73.05/04.0/00004 2/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	94,389,400	JUPARMAN DIREKTUR CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA

No	SKPD	Nama Pekerjaan	Tanggal SP2D	No. Bukti/ Dok. Sumber	Nilai Realisasi(Rp)	Nama Pihak Ketiga/Penyedia/ Rekanan Fisik
18	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pek. Paving block paket 8 (pek. Paving block halaman kantor kwarcab pramuka kab. Takalar. Pattallassang, pek. Paving blok dusun kupanga, kec. Polongbangkeng utara, pek. Paving blok kel. Rajaya) (utang ta. 2024)	20-Nov-25	73.05/04.0/00020 4/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	24,947,000	RANDY OBERTIAS OHEO SUMARATA, ST.,M.SP DIREKTUR PT. DELINEASI RUPABUMI KONSULTAN
19	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pekerjaan paving blok paket 4 (pekerjaan paving blok desa sawakong beba, pek. Paving blok tala sompu dan lanjutan paving ke pekuburan sompu, kel. Sombala bella, pek. Paving block pekarangan dinas sosial (eks. Dinkes), pek. Paving blok kale ko'mara)) (utang ta. 2024)	20-Nov-25	73.05/04.0/00020 5/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	31,940,000	NOEL DIAKEN PATANDEAN, ST DIREKTUR PT. DINAMIKA KONSULTAN INDONESIA
20	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pek. Paving blok paket 5 (pek. Paving block kel. Bontolebang, galesong utara, pek. Paving block kec. Pattalassang, pek. Paving block kel. Maradekaya)) (utang ta. 2024)	10 Desember 2025	73.05/04.0/00026 2/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/12/2025	12,287,000	ABD. MUJIB SABIQ DIREKTUR CV. META KONSULTAN
21	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pekerjaan paving block dan drainase paket 12 (pengawasan teknis pek. Paving block kel. Bontolebang, galesong utara, pengawasan teknis pembangunan saluran drainase lingkungan di kelurahan takalar kec. Mappakasunggu)) (utang ta. 2024)	23 Mei 2025	73.05/04.0/00002 8/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P2/5/2025	7,992,000	ZAPARMAN, ST DIREKTUR CV. SENTRADESAIN KONSULTAN
22	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pekerjaan paving block dan drainase paket 11 (pengawasan teknis pek. Paving block kec. Pattallassang, pengawasan teknis pek. Paving block kel. Maradekaya, pengawasan teknis pek. Drainase kec. Pattalassang)) (utang ta. 2024)	25 Desember 2025	73.05/04.0/00036 2/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PPR1/12/2025	7,992,000	ZAPARMAN, ST DIREKTUR CV. SENTRADESAIN KONSULTAN
23	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan teknis pek. Drainase paket 6 (pembangunan saluran drainase lingkungan di kelurahan takalar, kec. Mappakasunggu) (utang ta. 2024)	15 Desember 2025	73.05/04.0/00028 4/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/12/2025	5,000,000	LA MAPPATUNRU TAIB, AE DIREKTUR PT. ARCLIP
24	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan saluran drainase lingkungan kel. Takalar kec. Mappakasunggu (utang ta. 2024)	26 Maret 2025	73.05/04.0/00001 6/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P2/3/2025	61,285,700	NURDIN DG. NGAGO DIREKTUR CV. NIAGO
25	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pek. Saluran irigasi kalebentang (utang ta. 2024)	19 Juni 2025	73.05/04.0/00003 7/ LS/1.03.1.04.0.00 .03.0000/ P3/6/2025	89,556,000	MULIANA DIREKTRIS CV. PANGKALANG KARYA
26	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pekerjaan drainase kel. Malewang (utang ta. 2024)	21 Juli 2025	73.05/04.0/00005 5/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ P3/7/2025	2,599,140	JUFRI DIREKTUR CV. REZKY PRATAMA
27	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan teknis pekerjaan drainase paket 5 (pengawasan teknis pek. Drainase kec. Sanrobone, pengawasan teknis pek. Drainase kel. Malewang, pengawasan teknis pek. Drainase dusun je'ne dinging desa balangtanaya, pengawasan teknis pek. Drainase kalappo - mangadu) (utang ta. 2024)	26-Nov-25	73.05/04.0/00024 0/LS/1.03.1.04.0. 00.03.0000/ PR/11/2025	15,961,000	HERMAN, ST DIREKTUR CV. MEGA PUTRA ENGINEERING
28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pek. Saluran irigasi kalebentang (utang ta. 2024)	26/03/2025	73.05/04.0/00003 9/LS/1.01.2.22.0. 00.01.0000/P2/3/ 2025	2,000,000	
29	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pekerjaan drainase kel. Malewang (utang ta. 2024)	26/03/2025	73.05/04.0/00003 9/LS/1.01.2.22.0. 00.01.0000/P2/3/ 2025	4,000,000	
30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengawasan teknis pekerjaan drainase paket 5 (pengawasan teknis pek. Drainase kec. Sanrobone, pengawasan teknis pek. Drainase kel. Malewang, pengawasan teknis pek. Drainase dusun je'ne dinging desa balangtanaya, pengawasan teknis pek. Drainase kalappo - mangadu) (utang ta. 2024)	26/03/2025	73.05/04.0/00003 9/LS/1.01.2.22.0. 00.01.0000/P2/3/ 2025	9,930,700	
31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemasangan paving blok upt. Sd negeri 118 inpres bontolebang	26/03/2025	73.05/04.0/00003 9/LS/1.01.2.22.0. 00.01.0000/P2/3/ 2025	4,000,000	
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi ruang kelas upt. Sd negeri 120 inpres tamalate	26/03/2025	73.05/04.0/00003 9/LS/1.01.2.22.0. 00.01.0000/P2/3/ 2025	2,000,000	
33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi ruang kelas upt. Sd negeri 86 aeng towa	13/03/2025	73.05/04.0/00001 9/LS/1.01.2.22.0. 00.01.0000/P1/3/ 2025	136,249,400	CV. MEGA ULENG
		Total			**1,934,200,055**	

Lampiran 26

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD

Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal Audited 2025	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2025 Audited
			Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Mutasi Keluar	Reklasifikasi ke aset lainnya (Hewan Mati)	
1	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,126,285,807.12					5,126,285,807.12
2	Dinas Perhubungan	94,900,000.00					94,900,000.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	520,613,500.00					520,613,500.00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,279,692,714.51	113,397,600.00				4,393,090,314.51
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	221,299,604.00					221,299,604.00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,500,000.00					3,500,000.00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,189,280,000.00				203,320,000.00	1,985,960,000.00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	454,370,000.00					454,370,000.00
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	150,000,000.00					150,000,000.00
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5,923,500.00					5,923,500.00
	Total	**13,045,865,125.63**	**113,397,600.00**	**-**	**-**	**203,320,000.00**	**12,955,942,725.63**

Lampiran 27

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Mutasi Konstruski Dalam Pengerjaan (KIB F)
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal Audited 2025	Penambahan					Pengurangan		Saldo Akhir 2025 Audited
			Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Reklasifikasi Belanja Modal Gedung ke KDP	Reklasifikasi Belanja Modal JIJ ke KDP	Reklasifikasi Belanja Modal Tanah ke KDP	Koreksi Kekurangan Volume	Reklasifikasi Berkurang KDP Ke Aset Definitifnya	
1	Sekretariat DPRD	-		372,395,500.00				59,707,167.52		312,688,332.48
2	Sekretariat Daerah	-		2,251,686,698.00				36,695,446.00		2,214,991,252.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5,797,762,702.00			30,000,000.00	511,178,190.00	62,552,000.00		704,545,760.00	5,696,947,132.00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-			27,220,000.00					27,220,000.00
	Total	**5,797,762,702.00**	**-**	**2,624,082,198.00**	**57,220,000.00**	**511,178,190.00**	**62,552,000.00**	**96,402,613.52**	**704,545,760.00**	**8,251,846,716.48**

Lampiran 28

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Rincian Konstruski Dalam Pengerjaan (KIB F) per OPD Tahun 2023
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Tahun KDP	No Kontrak	Tgl Kontrak	Nama Perusahaan	Bobot Keu	Bobot Fisik	Nilai Kontrak	Realisasi Keuangan 2025						KDP 2025
									Relisasi Kontrak	Realisasi Perencanaan	Pengawasan	Utang 2025	Koreksi Kekurangan	Realisasi Belanja Baran dan Jasa	
1	2	3						4							
A	**Dinas Pekerjaan Umum**														
1	Perencanaan Teknis Jalan Ruas Terang-Kanite, Kec. Galesong Selatan	2021	21/SPK-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2021	3/12/2021	CV. BUMI TAMALANREA KONSULTAN	100%		55,605,000.00							55,605,000.00
2	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Bontoloe - Mappakalompo - Bentang	2021	23/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2021	3/30/2021	CV. C 97 CONSULTANT	100%		210,210,000.00							210,210,000.00
3	Peningkatan Jalan Beton Ruas Mangindara,	2022	4162/KONTRAK/PPK-BM/DPUPRPKP/IX/2022	9/12/2022	CV. MULIA KARYA PERSADA	91%		515,172,610.00							471,217,403.00
4	Peningkatan Jalan Beton Campagaya - Taroang (Lanjutan)	2022	4162/KONTRAK/PPK-BM/DPUPRPKP/IX/2022	9/12/2022	CV. MULIA KARYA PERSADA	92%		1,099,979,648.00							1,010,701,209.00
5	Perencanaan Teknis Perintisan Jalan Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kec. Gal - Ut	2022	4801/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	Tanggal 18 November 2022	CV. ZIKRA UNIVERSAL KONSULTAN	0%		22,022,400.00							22,022,400.00
6	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Mess Hipermata, Perencanaan Teknis Pemb. Mess Hipermata, Makassar	2022	15/SP-BG/PPK-DAU/DPUPRPKP-CK/III/2022	7/25/2022	CV. MUTIARA DUTA PLAN			54,065,000.0							54,065,000.00
7	Perencanaan Teknis Rehab Bangunan Belakang Pasar Sentral	2022	18/SP-BG/PPK-DAU/DPUPRPKP-CK/III/2022	9/7/2022	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN			40,810,000.0							40,810,000.00
8	Perencanaan Teknis Pembuatan Pendopo PTSP, Perencanaan Teknis Pembuatan Pendopo Bappelitbangda	2022	27/SP-BG/PPK-DAU/DPUPRPKP-CK/VII/2022	9/9/2022	CV. PURINA CONSULTANT ENGINEERING			19,852,000.0							19,852,000.00
9	100% Perencanaan Teknis Rehabilitasi Mushallah Kantor Bupati	2022	23/SP-BG/PPK-DAU/DPUPRPKP-CK/III/2022	30 Dec 2022	CV. AULIFAH			22,110,000.0							22,110,000.00
10	Perencanaan Teknis Pemb.Pintu Gerbang Rusus Nelayan Laguruda, Kec.Sanrobone, Perencanaan Teknis Pemb.Pintu Gerbang Rusus Nelayan Desa Pattoppakang, Kec.Mangarabombang, Perencanaan Teknis Pemb.Pintu Gerbang Rusus Nelayan Desa Mangindara, Kec.Galesong Selatan, Perencanaan Teknis Pemb.Pintu Gerbang Rusus Masyarakat Pesisir Desa Bontosunggu,Kec.Galesong Utara	2022	01441/SP2D/LS-BARANG-JASA/VI/2022	7/8/2022				9,955,000.0							9,955,000.00
11	Perencanaan Teknis Peningkatan jalan Beton Damme-Lanyara	2022	15/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	6/23/2022	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN			40,800,100.0							40,800,100.00
12	Perencanaan Teknis Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Beton Bilacaddi - Maradekaya	2022	18/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	09 May 2022	CV. META KONSULTAN			43,635,500.0							43,635,500.00
13	Pembuatan DED DAK TA 2023 Ruas Pakkaba - Pangkajene	2022	4778/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	29 Dec 2022	PT. ARCLIP			45,500,000.0							45,500,000.00
14	Perencanaan Teknis Peningkatan jalan belakang RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle, Kec. Pattalasssang	2022	3990/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	9/9/2022	CV. MALIDASARI KONSULTAN			60,753,000.0							60,753,000.00
15	Perencanaan Teknis Rehabilitasi jalan Ruas Bantinoto-Cakura	2022	23/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	6/15/2022	CV. MALIDASARI KONSULTAN			61,556,000.0							61,556,000.00
16	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Beton Maradekaya - Moncokomba (Kantor Maradekaya)	2022	12/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	6/10/2022	CV. ADIL FAADHIL KONSULTAN			64,524,900.0							64,524,900.00
17	Pembuatan DED DAK TA.2023 Ruas Jalan Wilayah Kamp.Parapa	2022	4770/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	29 Dec 2022	CV. ADIL FAADHIL KONSULTAN			75,924,000.0							75,924,000.00
18	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Hotmix Poros Desa Ujing Baji lagaruda, Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jalan Hotmix Tepo - Cikoang	2022	08/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	12 May 2022	CV. ABYSEKA INDOCIPTA			83,737,500.0							83,737,500.00
19	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Beton Canrego - Tana tana, Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Beton Pappa - Damme (Depan Kantor Lurah Pattene)	2022	21/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	20 May 2022	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN			86,603,000.0							86,603,000.00
20	Perancanaan Teknis Rehabilitasi jalan Ruas Galesong-Limbung (Parangmata), Perencanaan Teknis Peningkatan jalan Ruas Jl. Syech Yusuf.	2022	09/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	12 May 2022	CV.ANNUR CONSULTANT			93,148,000.0							93,148,000.00
21	Perencanaan Teknis Peningkatan jalan ruas Tonasa Sanrobone (Depan Pasar Sanrobone)	2022	19/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/III/2022	20 May 2022	CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT			97,900,000.0							97,900,000.00
22	Pembuatan DED DAK TA. 2023 Ruas Cikoang-Puntondo	2022	4776/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	30 Dec 2022	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN			99,370,000.0							99,370,000.00
23	Pembuatan DED DAK TA. 2023 Ruas Tepo-Cikoang	2022	4762/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	27 Dec 2022	CV.ANNUR CONSULTANT			99,428,000.0							99,428,000.00
24	Pembuatan DED DAK TA 2023 Ruas Taroang - Campagaya	2022	4779/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	11/29/2022	CV. ZIKRA UNIVERSAL KONSULTAN			99,500,000.0							99,500,000.00
25	Pembuatan DED DAK TA 2023 Ruas Laikang - Salambu	2022	4777/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	28 Dec 2022	CV. ANTERA			99,500,000.0							99,500,000.00

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Tahun KDP	No Kontrak	Tgl Kontrak	Nama Perusahaan	Bobot Keu	Bobot Fisik	Nilai Kontrak	Realisasi Keuangan 2025						KDP 2025
									Relisasi Kontrak	Realisasi Perencanaan	Pengawasan	Utang 2025	Koreksi Kekurangan	Realisasi Belanja Baran dan Jasa	
26	Pembuatan DED DAK TA. 2023 Ruas Burane-Bontomangape	2022	4771/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	27 Dec 2022	PT. TRIKONS INDOPRATAMA			99,528,000.0							99,528,000.00
27	Pembuatan DED DAK TA. 2023 Ruas Pattingaloang - Talaka Labua	2022	4761/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	27 Dec 2022	CV. ALYMAR LESTARI KONSULTAN			99,600,000.0							99,600,000.00
28	Pembuatan DED DAK TA. 2023 Ruas Bontokassi - Bontokanang	2022	4765/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	29 Dec 2022	CV. ADI PERMATA KONSULTAN			99,600,000.0							99,600,000.00
29	Pembuatan DED DAK TA. 2023 Ruas Mangadu-Jonggowa	2022	4763/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	27 Dec 2022	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN			99,600,000.0							99,600,000.00
30	Pembuatan DED DAK TA. 2023 Ruas Bontorita - Taroang	2022	4774/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022	30 Dec 2022	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN			99,629,000.0							99,629,000.00
31	Perencanaan DAK 2023 D.I. Kewenangan Kabupaten	2022	4414/KONTRAK/PPK-PSDA/DPUPRPKP/VI/2022	9/27/2022	CV. SERIGALA JAYA			44,300,000.0							44,300,000.00
32	Perencanaan Teknis Pek. Saluran Irigasi Tersier Bontomanai	2022	4855/KONTRAK/PPK-SDA/DPUTRPKP/XII/2022	30 Dec 2022	CV. SERIGALA JAYA			9,984,000.0							9,984,000.00
33	Perencanaan Teknis Revitalisasi Pulau Sanrobengi	2023	Kontrak Nomor :5808/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/IX/2023, Tanggal 08 September 2023, Kontrak Addendum I Nomor : 5808-Add.I/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/X/2023,	Tanggal 08 September 2023,	KARMIATI SYAM Direktris CV.WIRA KAMIL KONSULTAN	100%		27,500,000.0							27,500,000.00
34	Perencanaan Teknis Pek. Atap Kantor Bupati (Gedung Tengah)	2024	127/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/VII/2024	Tanggal 10 Juli 2025	Direktur Utama PT. MAHAPANI KONSULTAN			29,953,000.0		29,953,000.00					29,953,000.00
35	Pembuatan DED DAK TA 2025 Ruas Jl. Wilayah Tala.	2024	6158/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023,	Tanggal 12 Desember 2023	Direktur CV. LINGKAR KARYA CONSULTANT			49,900,000.0		49,900,000.00					49,900,000.00
36	Pembuatan DED DAK TA 2025 Ruas Mattompodalle - Sp Malagina.,	2024	6179/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023,	Tanggal 13 Desember 2023,	Direktur CV. PARADUTA PRATAMA			49,894,500.0		49,894,500.00					49,894,500.00
37	Pembuatan DED DAK TA 2025 Ruas Mannongkoki-Panggembang/Bontorita.	2024	6155/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023,	Tanggal 12 Desember 2023	Direktur CV. PARADUTA PRATAMA			49,850,100.0		49,850,100.00					49,850,100.00
38	Pembuatan DED DAK TA. 2025 Ruas Kadatong-Tanrimata.,	2024	6157/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023,	Tanggal 11 Desember 2023,	Direktur CV. BADOLO KARYA ABADI			49,800,700.0		49,800,700.00					49,800,700.00
39	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Je'nemaeja,	2024	009/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-SDA/VI/2024,	Tanggal 07 Juni 2025	Direktur CV. REZI ALTHAANI CONSULTANT			59,884,500.0		59,884,500.00					59,884,500.00
40	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Lappo,	2024	010/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-SDA/VI/2024,	Tanggal 07 Juni 2025	Direktur CV. META KONSULTAN			79,864,500.0		79,864,500.00					79,864,500.00
41	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Ruas Cikoang - Puntondo,	2024	16/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VII/2024,	Tanggal 12 Juli 2025	Direktur CV. AFINRA KONSULINDO			99,775,000.0		99,775,000.00					99,775,000.00
42	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Ruas Pa'ganakang - Topejawa	2024	18/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VII/2024,	Tanggal 16 Juli 2025	Direktur CV. REZI ALTHAANI CONSULTANT			99,500,000.0		99,500,000.00					99,500,000.00
43	Perencanaan Teknis Pembuatan DED (Kawasan Industri) Ruas Buludoang - Cikoang	2024	19/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VII/2024,	Tanggal 23 Juli 2025	Direktur CV. NIRWANA RAHMA MAKMUR			99,949,000.0		99,949,000.00					99,949,000.00
44	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Ruas Pattallassang - Garassi,	2024	20/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VII/2024,	Tanggal 24 Juli 2025	Direktur PT. ANINDYA REKACIPTA UTAMA			99,800,100.0		99,800,100.00					99,800,100.00
45	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase 2 (Perencanaan Teknis Pek. Drainase Desa Parapunganta, Perencanaan Pek. Drainase Dusun Belaka, Desa Towata).	2024	137/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/VIII/2024,	Tanggal 13 Agustus 2025	Direktur CV. BADOLO KARYA ABADI			19,968,900.0		19,968,900.00					19,968,900.00
46	Perencanaan Teknis Jalan Paket 5 (Pek. Talud Desa Mangindara, Pek. Talud Desa Popo, Pek. Talud Desa Sawakong, Pek. Talud Desa Tamalate, Talud ruas Cikoang - Puntondo (lanjutan), Pek. talud ruas maradekaya - lantang (lanjutan), Pek. Talud ruas Pattallassang - Garassi, Pek. Talud ruas sombala bella - tala (lanjutan), Pek. Talud ruas Taroang - Campagaya, Pek. Talud ruas Tepo - Cikoang (lanjutan))	2024	21/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VII/2024,	Tanggal 31 Juli 2025	Direktur CV. ANUGERAH TEKNIK			49,983,300.0		35,000,000.00					35,000,000.00
47	Perencanaan Teknis Paket Jalan 3 (Pek. Jalan Hotmix, Palleko 2 Polongbangkeng Utara, Pek. Lapen Dusun Lompo Balangtanaya, Pek. Talud Pekuburan Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kec. Galut, Pek. Jalan Beton Dusun Parapa, desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara dan Pek. Jalan Beton Desa Kalukuang, Galesong),	2024	23/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VIII/2024,	Tanggal 19 Agustus 2025,	Direktur CV. META KONSULTAN			47,400,330.0		16,590,115.00					16,590,115.00

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Tahun KDP	No Kontrak	Tgl Kontrak	Nama Perusahaan	Bobot Keu	Bobot Fisik	Nilai Kontrak	Realisasi Keuangan 2025						KDP 2025
									Relisasi Kontrak	Realisasi Perencanaan	Pengawasan	Utang 2025	Koreksi Kekurangan	Realisasi Belanja Baran dan Jasa	
48	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Jembatan Garassi	2024	24/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/IX/2024,	Tanggal 30 Sept 2025	CV. ASHIMA CONSULTANT							189,960,000.00			189,960,000.00
49	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Ruas Bontokadatto A sampai Bontokadatto B	2024	27/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XI/2024,	Tanggal 20 November 2025	PT. MAHAPANI KONSULTAN							39,960,000.00			39,960,000.00
50	Pembuatan DED DAK TA. 2025 Ruas Bentang-Saro	2024	6161/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023,	Tanggal 11 Des 2023	CV. BADOLO KARYA ABADI							59,855,400.00			59,855,400.00
51	Pembuatan DED DAK TA. 2025 Ruas Mattompodalle - Toata	2024	6153/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023,	Tanggal 12 Des 2023	CV. META KONSULTAN							69,930,000.00			69,930,000.00
52	Pembuatan DED DAK TA. 2025 Ruas Bontoloe - Bentang	2024	6160/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-	Tanggal 12 Des 2023	CV. WIRA KAMIL KONSULTAN							49,938,900.00			49,938,900.00
53	Perencanaan Teknis Paket Jalan 3 (Pek. Jalan Hotmix, Palleko 2 Polongbangkeng Utara, Pek. Lapen Dusun Lompo Balangtanaya, Pek. Talud Pekuburan Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kec. Galut, Pek. Jalan Beton Dusun Parapa, desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara dan Pek. Jalan Beton Desa Kalukuang, Galesong)	2024	23/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VIII/2024,	Tanggal 19 Agustus 2025	CV. META KONSULTAN							20,810,215.00			20,810,215.00
54	Pembuatan DED Ruas Maradekaya - Lantang dan Ruas Tanrimata Saro-Bonto Marannu	2024	25/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XI/2024	11/20/2024	CV. MACARIO ENGINEER									89,923,000.00	89,923,000.00
55	Pembuatan DED Ruas Timporongan - Tamaona dan Ruas Canrego - Ciniayo/Anaaung	2024	26/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XI/2024	11/20/2024	Direktur CV. REZI AL THAANI CONSULTANT									84,940,000.00	84,940,000.00
	Perencanaan Teknis Penimbunan dan Pekerjaan Paving Block Parkiran Kantor Bupati	2025	31/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/VIII/2025	4 Agustus 2025	ABD. RAHMAN, ST DIREKTUR CV. ALYMAR LESTARI KONSULTAN					62,552,000.00					62,552,000.00
	Pembangunan Kantor Camat Tanakeke	2025			ILHAM YUNUS, ST.,MT DIREKTUR CV. ADI PERMATA KONSULTAN					30,000,000.00					30,000,000.00
	Perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi d.i. Moncongkomba	2025	55/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/VIII/2025	13 Agustus 2025						98,719,500.00					98,719,500.00
	Perencanaan teknis pembangunan jaringan irigasi d.i. Ujung bassi.	2025	57/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/VIII/2025	19 Agustus 2025						98,528,000.00					98,528,000.00
	Pek. Jembatan penghubung polongbangkeng selatan - mangarabombang, tana-tana dusun bontobaddo desa lengkese kec. Mangarabombang	2025	249/SP/PPK/DPUTRPKP/X/2025	27 Oktober 2025	DEDI RAMDANI ANUGRAH SYAM Direktur Cabang CV. MASAGENA ABADI KONSTRUKSI				292,097,650.00	14,084,000.00	7,749,040.00				313,930,690.00
	Jumlah							**4,666,926,588.0**	**292,097,650.0**	**1,143,613,915.0**	**7,749,040.0**	**430,454,515.0**		**174,863,000.0**	**5,696,947,132.0**
B	**Sekretariat DPRD**														
		2025	005/PPK-SETDPRD/SPK/XII/2025	04 Desember 2025				397,853,000.00		14,327,800.00			(59,707,167.52)	358,067,700.00	312,688,332.48
	Pagar Sekretariat DPRD														
	Jumlah							**397,853,000.0**	**-**	**14,327,800.0**	**-**	**-**	**(59,707,167.5)**	**358,067,700.0**	**312,688,332.5**
C	**Sekretariat Daerah**														
		2025	30/SP.Setda/XI/2025	10 Maret 2025	CV.AULIA PRIMA TEHNIK			2,364,236,665.00		98,235,000.00	25,638,700.00		(36,695,446.00)	2,127,812,998.00	2,214,991,252.00
	Rahabilitasi atap dan mechanical electrical mess rumah jabatan bupati tahun anggaran 2025														
	Jumlah							**2,364,236,665.0**	**-**	**98,235,000.0**	**25,638,700.0**	**-**	**(36,695,446.0)**	**2,127,812,998.0**	**2,214,991,252.0**
D	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**														
	Perencanaan pembangunan panggung seni museum daerah balla appaka sulapa	2025	73.05/04.0/000303/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025							3,900,000.00					3,900,000.00
	Perencanaan pembangunan sekretariat museum daerah balla appaka sulapa	2025	73.05/04.0/000303/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025					-	-	16,720,000.00	0	-		0	16,720,000.00
	Perencanaan pemasangan peving blok museum daerah balla appaka sulapa	2025	73.05/04.0/000342/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025							4,200,000.00					4,200,000.00
	Perencanaan rehabilitasi pagar museum daerah balla appaka sulapa	2025	73.05/04.0/000342/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2025							2,400,000.00					2,400,000.00
	Jumlah							**-**	**-**	**27,220,000.0**	**-**	**-**		**-**	**27,220,000.0**
	Total Jumlah							**7,429,016,253.0**	**292,097,650.0**	**1,283,396,715.0**	**33,387,740.0**	**430,454,515.0**	**(96,402,613.5)**	**2,660,743,698.0**	**8,251,846,716.5**

Lampiran 29

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Daftar Akumulasi Penyusutan Per OPD Tahun 2024 dan 2025
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (Audited) 2025	Koreksi Bertambah Akumulasi					Koreksi Berkurang Akumulasi				Beban Akumulasi 2025	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2025 (Unaudited)
			Koreksi Saldo Awal Akumulasi	Reklasifkasi dari Extracomtable Ke Aset Tetap	Reklasifkasi dari Aset Lain Lain Ke Aset Tetap	Kurang Catat	Mutasi Masuk	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Mutasi Keluar	Reklasifikasi ke aset lainnya Rusak Berat	Penghapusan Karena Penjualan		
1	Sekretariat DPRD	7,890,492,030.51	(53,658,806.01)	-	-		-	-	333,100,000.00	-	844,724,513.00	863,898,843.02	7,522,907,554.52
2	Sekretariat Daerah	38,303,758,705.78	(392,057,504.00)	-	-	-	605,922,090.24	7,620,400.00	1,600,212,508.00	62,005,000.00	182,700,000.00	3,328,142,173.42	39,993,227,557.44
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,081,716,947,121.17	(7,632,198,767.13)	-	-	-	-	-	615,832,754.00	103,088,300.00	391,500,000.00	56,010,493,000.43	1,128,984,820,300.47
4	Dinas Perhubungan	13,435,340,868.78	68,658,001.85	-	-	-	100,000,000.00	-	455,500,000.00	258,546,175.00	-	1,208,681,998.84	14,098,634,694.47
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	3,055,623,080.01	(67,248,486.62)	-	-	-	-	-	15,220,906.24	-	192,250,000.00	624,846,276.45	3,405,749,963.60
6	Dinas Kesehatan	111,658,909,331.58	(1,013,321,523.21)	-	-	84,629,001.60	42,460,000.00	-	749,859,818.40	233,161,000.00	-	21,662,723,514.97	131,452,379,506.54
7	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	92,725,525,677.05	(161,267,383.98)	-	-	203,496,000.00	269,241,818.40	-	732,009,950.58	8,492,000.00	-	3,903,309,214.05	96,199,803,374.94
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150,427,125,233.54	(7,834,162,238.75)	7,585,500.00	-	3,614,295,000.00	402,872,000.00	44,276,039.94	-	-	-	19,383,633,162.50	165,957,072,617.35
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,370,350,446.31	-	-	-	-	-	-	-	-	174,960,303.00	699,247,013.33	2,894,637,156.64
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19,961,140,551.83	(8,825,248.72)	-	-		-	-	192,250,000.00	20,675,000.00	-	230,699,659.91	19,970,089,963.02
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5,819,092,895.81	75,989,386.38	-	-		-	-	46,680,000.00	-	269,100,000.00	128,669,652.53	5,707,971,934.72
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8,686,417,078.08	108,410,990.00	-	-		-	-	-	106,686,560.00	-	1,099,485,023.86	9,787,626,531.94
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,151,123,704.19	(2,679,166.65)	-	-		543,573,705.58	-	607,328,916.64	-	-	92,534,360.52	2,177,223,687.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3,982,514,291.68	(149,293,179.46)	-	-		-	-	-	-	-	339,550,589.38	4,172,771,701.60
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,940,268,770.79	101,909,629.95	-	-		134,600,000.00	-	-	156,488,165.00	130,000,000.00	180,198,749.18	2,070,488,984.92
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,185,716,475.18	292,244.94	-	-		-	-	-	-		62,509,791.83	1,248,518,511.95
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	9,699,585,159.80	(121,904,931.18)	-	-	-	-	-	-	56,265,600.00	247,700,000.00	660,717,357.76	9,934,431,986.38
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,923,212,171.49	110,904,518.66	-	-		-	-	-	108,604,224.52	-	170,017,425.69	3,095,529,891.32
19	Dinas Perikanan	21,991,456,232.23	(18,829,332.53)	-	-	-	-	-	215,000,000.00	27,086,945.00	-	456,442,588.24	22,186,982,542.94
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7,371,647,022.06	88,093,182.51	-	-		-	-	190,000,000.00	51,535,000.00	-	498,595,712.12	7,716,800,916.69
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6,376,962,375.77	-	-	-		3,568,000,508.00	-	-	860,658,562.00	829,557,892.00	379,092,985.61	8,633,839,415.38
22	Badan Pendapatan Daerah	1,393,057,115.99	-	-	-		-	-	-	42,000,000.00		202,807,894.29	1,553,865,010.28
23	Inspektorat	1,217,268,926.10	58,666,637.65	-	-		28,600,000.00	-	-	29,792,765.60	150,000,000.00	89,316,746.86	1,214,059,545.01
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,430,596,958.77	(397,320,738.74)	-	-		24,075,000.00	-	-	-	231,844,396.00	84,667,574.06	1,910,174,398.09
25	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	12,214,464,502.61	(0.04)	-	-		-	-	-	-	261,610,307.00	1,203,058,886.80	13,155,913,082.37
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5,145,587,725.28	289,686,846.94	-	15,601,000.00		575,824,731.64	-	-	27,905,000.00	256,100,000.00	580,615,841.52	6,323,311,145.38
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,205,253,920.46	(11,355,882.30)	-	-		-	-	-	-	179,800,000.00	56,758,122.27	1,070,856,160.43
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	912,407,376.56	-	-	-		-	-	24,075,000.00	24,725,000.00		28,547,786.50	892,155,163.06
29	Kecamatan Mappakasunggu	1,188,704,720.14	4,447,487.12	-	-		-	-	-	-	172,700,000.00	81,223,509.54	1,101,675,716.80
30	Kecamatan Mangarabombang	1,004,642,082.59	(2,164,428.18)	-	-		-	-	172,700,000.00	-	-	87,237,657.51	917,015,311.92
31	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	2,051,089,471.31	(83,111,103.97)	-	-		-	-	-	-	-	282,151,417.69	2,250,129,785.03
32	Kecamatan Polongbangkeng Utara	3,049,529,962.89	(65,879,363.27)	-	-		-	-	-	-	172,700,000.00	345,543,176.66	3,156,493,776.28
33	Kecamatan Galesong Selatan	1,148,548,496.00	-	-	-		-	-	-	-	-	11,596,560.00	1,160,145,056.00
34	Kecamatan Galesong Utara	1,034,757,130.59	-	-	-	-	-	-	172,700,000.00	7,000,000.00	-	82,995,754.66	938,052,885.25
35	Kecamatan Pattallassang	2,963,170,905.60	287,081,423.10	-	-		-	-	-	-	172,700,000.00	339,471,098.39	3,417,023,427.09
36	Kecamatan Sanrobone	734,095,586.51	(13,330,898.31)	-	-		-	-	172,700,000.00	1,250,000.00	-	27,792,944.20	574,607,632.40
37	Kecamatan Galesong	854,225,634.74	(37,619,616.85)	-	-		-	-	-	-	182,700,000.00	36,429,733.99	670,335,751.88
38	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	218,965,765.60	-	-	-		-	-	-	-	80,000,000.00	-	138,965,765.60
	Total	**1,632,439,575,505.38**	**(16,872,088,250.80)**	**7,585,500.00**	**15,601,000.00**	**3,902,420,001.60**	**6,295,169,853.86**	**51,896,439.94**	**6,295,169,853.86**	**2,185,965,297.12**	**5,122,647,411.00**	**115,523,703,798.58**	**1,727,656,288,406.70**

Lampiran 30

DAFTAR PIUTANG PENJUALAN ASET DAERAH
(Tagihan Penjualan Angsuran)
Per 31 Desember 2025

dalam rupiah

No.	Nama Pembeli	Tahun	Umur Piutang (thn)	Saldo Awal Piutang	Mutasi Tahun 2024		Saldo Akhir 2024	Penyisihan Piutang					Total Penyisihan	Saldo Setelah Penyisihan
					Penambahan	Pengurangan		0-1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	>4 tahun		
								1%	10%	25%	50%	100%		
	Kendaraan Roda 4													
1	Drs. H. Zainal Abidin	2002	21	44,352,000.00	-		44,352,000.00	-	-	-	-	44,352,000.00	44,352,000.00	-
Jumlah Piutang Kendaraan Roda 4				**44,352,000.00**	**-**	**-**	**44,352,000.00**	-	-	-	-	**44,352,000.00**	**44,352,000.00**	**-**
	Kendaraan Roda 2													
2	H. Moh. Saleh	2007	16	880,000.00	-	-	880,000.00	-	-	-	-	880,000.00	880,000.00	-
3	Syahrir	2007	16	980,000.00	-	-	980,000.00	-	-	-	-	980,000.00	980,000.00	-
4	Bahtiar B	2007	16	920,000.00	-	-	920,000.00	-	-	-	-	920,000.00	920,000.00	-
5	Abd. Gaffar	2007	16	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	1,020,000.00	-
6	Kaharuddin	2007	16	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	1,020,000.00	-
7	Supardi, S. IP	2007	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Zainuddin Nyallang	2007	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	T a m m a	2007	16	940,000.00	-	-	940,000.00	-	-	-	-	940,000.00	940,000.00	-
10	Nurdin BN	2007	16	780,000.00	-	-	780,000.00	-	-	-	-	780,000.00	780,000.00	-
11	Lemang R	2007	16	680,000.00	-	-	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	680,000.00	-
12	Muh. Hatta	2007	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	H. Amiruddin MT	2007	16	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00	-	-	-	-	1,020,000.00	1,020,000.00	-
14	Abdul Razak, SKM	2007	16	740,000.00	-	-	740,000.00	-	-	-	-	740,000.00	740,000.00	-
15	H. Muchir Ismail	2007	16	680,000.00	-	-	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	680,000.00	-
16	Abdul Azis Beta	2007	16	760,000.00	-	-	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00	760,000.00	-
17	Hj. ST. Rosmah	2007	16	940,000.00	-	-	940,000.00	-	-	-	-	940,000.00	940,000.00	-
18	T e m b a	2007	16	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	800,000.00	-
19	Bahar T	2007	16	760,000.00	-	-	760,000.00	-	-	-	-	760,000.00	760,000.00	-
20	H. Djufri	2007	16	680,000.00	-	-	680,000.00	-	-	-	-	680,000.00	680,000.00	-
21	Muh. Noor Uthary, SE	2007	16	820,000.00	-	-	820,000.00	-	-	-	-	820,000.00	820,000.00	-
22	Drs. Abd. Haris, M. Pd	2007	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Oyang Orland	2007	16	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00	-	-	-	-	1,360,000.00	1,360,000.00	-
24	Syaripuddin N	2007	16	1,040,000.00	-	-	1,040,000.00	-	-	-	-	1,040,000.00	1,040,000.00	-
25	Zainal Abidin	2007	16	820,000.00	-	-	820,000.00	-	-	-	-	820,000.00	820,000.00	-
26	Drs. M. Said D	2007	16	980,000.00	-	-	980,000.00	-	-	-	-	980,000.00	980,000.00	-
27	Syaharuddin	2007	16	660,000.00	-	-	660,000.00	-	-	-	-	660,000.00	660,000.00	-
28	Saparuddin	2007	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Drs. Mustari Adam	2007	16	1,220,000.00	-	-	1,220,000.00	-	-	-	-	1,220,000.00	1,220,000.00	-
30	Hasim	2009	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Bakri	2009	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Haeruddin	2009	14	2,670,000.00	-	-	2,670,000.00	-	-	-	-	2,670,000.00	2,670,000.00	-
Jumlah Piutang Kendaraan Roda 2				**23,170,000.00**	**-**	**-**	**23,170,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**23,170,000.00**	**23,170,000.00**	**-**
Jumlah Piutang Tagihan Penjualan Angsuran				**67,522,000.00**	**-**	**-**	**67,522,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67,522,000.00**	**67,522,000.00**	**-**

Lampiran 31a

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR ASET LAINNYA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	NAMA	JATUH TEMPO	NILAI TEMUAN	PEMBAYARAN S.D TAHUN LALU	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SISA	TGR BAG. LANCAR	SISA TGR - ASET LAINNYA	KETERANGAN
1	Drs. H. Muslimin	2013	13,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	
	Nip. 19570906 198003 1 011										
2	Drs. Muh. Asdar, M.AP	2013	13,000,000.00	6,000,000.00	-			-	-	-	STS tgl 29 Desember 2011 sebesar Rp2.000.000,00 STS tgl 31 Maret 2016 sebesar Rp500.000,00 Keruneg I/2017 STS Tgl 22 Mei 2017 Rp4.000.000 Keruneg I/2017 STS Tgl 22 Mei 2017 Rp5.500.000 STS 10 Desember 2015 ebesar Rp1.000.000,00
	NIP. 19660927 198603 1 008										
3	Drs. H. Muhtar Samiallah	2013	21,000,000.00	5,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00	-	16,000,000.00	Tidak ada data di Runeg namun ada pada LKPD 2021 (Bag. Lancar)
	NIP.										
4	Umar	2013	1,045,000.00	-	1,045,000.00			1,045,000.00	-	1,045,000.00	
	NIP. 010360250										
5	Syahrir, B.BA	2013	4,845,000.00	-	4,845,000.00			4,845,000.00	-	4,845,000.00	
	NIP. 580010995										
6	Drs. Abd. Haris, M.Pd	2013	4,802,500.00	1,000,000.00	980,000.00			980,000.00	-	980,000.00	STS tgl 25-6-2014 Rp1.000.000,00 Keruneg I/2017 STS Tgl 23 Mei 2017 Rp2.822.500
	NIP. 19631231 198603 1 241										
7	Abd. Rahman, M.Si	2013	4,802,500.00	1,500,000.00	3,302,500.00			3,302,500.00	-	3,302,500.00	
	NIP. 19570906 198201 1 004										
8	Drs. Syamsuddin M	2013	4,802,500.00	1,000,000.00	3,802,500.00			3,802,500.00	-	3,802,500.00	
	NIP. 19601231 198203 1 285										
9	Parinringi	2013	2,125,000.00	1,900,000.00	225,000.00			225,000.00	-	225,000.00	
	NIP.										
10	Hj. St. Hapipah Tonri, A.Ma.Pd	2013	1,141,953.31	800,000.00	-			-	-	-	STS tgl 25/2/14 Rp200.000,- STS tgl 28/3/14 Rp200.000,- STS tgl 8/5/14 Rp142.000,-STS tgl 13-1-2014, 23-12-2013,14-11-2013
	NIP. 130462216										
11	Hj. Andi Allis	2013	5,076,444.05	846,074.08	4,230,369.97			4,230,369.97	-	4,230,369.97	
	NIP. 19630503 198303 2 007										
12	H. Muh. Idris, S.Pd	2013	1,896,051.95	-	1,896,051.95			1,896,051.95	-	1,896,051.95	
	NIP. 19601231 198306 1 008										
13	H. Haeruddin, S.Pd	2013	1,566,794.00	-	1,566,794.00			1,566,794.00	-	1,566,794.00	Selisih LKPD dan Runeg
	NIP. 132113565										
14	Maddolangan, A.Ma. Pd	2013	1,851,209.00	-	-			-	-	-	Keruneg Sem II 2021: Telah disetor dengan STS tanggal 23 November 2021 sebesar Rp1.851.209,05
	NIP. 19611231 198303 1 179										
15	H. Muh. Yasin, S.Pd	2013	4,638,500.00	-	4,638,500.00			4,638,500.00	-	4,638,500.00	
	NIP. 19621231 198306 1 059										
16	Firdaus, S.Pd	2013	13,630,043.19	567,918.46	13,062,124.73			13,062,124.73	-	13,062,124.73	
	NIP. 19621231 198306 1 064										
17	Hj. St. Salma Wahab	2013	2,088,775.49	-	2,088,775.49			2,088,775.49	-	2,088,775.49	
	NIP. 19531212 197401 2 003										
18	H. Baso	2013	806,410.50	537,689.88	268,720.62			268,720.62	-	268,720.62	
	NIP. 130510387										
19	Husain, S.Pd	2013	1,719,736.53	-	1,719,736.53			1,719,736.53	-	1,719,736.53	
	NIP. 19631231 198306 1 008										
20	Mappagau	2013	3,025,000.00	1,918,579.97	757,191.52			757,191.52	-	757,191.52	STS tgl 16/09/2015 No. 4055/STS/2015 sebesar Rp504.162,66,-, STS tgl 11/3/14, STS tgl 9-12-2013, 6-11-2013, 8-10-2013, 17-11-2013, 14-8-2013
	NIP. 130598673										
21	M. Jaelani, A.Ma,Pd	2013	12,005,116.02	1,000,000.00	11,005,116.02			11,005,116.02	-	11,005,116.02	
	NIP. 19641231 198611 1 062										
22	H. Usman, S.Pd	2013	1,182,136.77	-	1,182,136.77			1,182,136.77	-	1,182,136.77	
	NIP. 19670117 198803 1 006										
23	Mahmud S, A.Ma,Pd	2013	5,189,377.00	-	5,189,377.00			5,189,377.00	-	5,189,377.00	

No	NAMA	JATUH TEMPO	NILAI TEMUAN	PEMBAYARAN S.D TAHUN LALU	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SISA	TGR BAG. LANCAR	SISA TGR - ASET LAINNYA	KETERANGAN
	NIP. 19590917 198303 1 016										
24	Hj. St. Nurlia, S.Pd	2013	1,913,531.81	-	1,913,531.81			1,913,531.81	-	1,913,531.81	
	NIP. 19700510 200102 2 002										
25	Pattikai, S.Pd	2013	1,682,065.53	-	1,600,000.00			1,600,000.00	-	1,600,000.00	
	NIP. 19641231 198803 1 164										
26	Hj. Sonda, S.Pd	2013	1,661,414.68	-	1,661,414.68			1,661,414.68	-	1,661,414.68	
	NIP. 130668453										
27	SY Naqiatuddin, A.Ma.Pd	2013	849,652.68	-	849,652.68			849,652.68	-	849,652.68	
	NIP. 19690510 198803 2 009										
28	Hj. Raehana	2013	4,866,000.00	3,500,000.00	1,366,000.00			1,366,000.00	-	1,366,000.00	
	NIP.										
29	Muh. Habsyi, A.Ma.Pd	2013	1,276,021.00	-	-			-	-	-	STS tgl 29 - 03 -2013 sesuai STS dan RK sebesar Rp 1.276.021,60
	NIP. 130407074										
30	H. Ramli Razak S.Pd	2013	3,070,900.00	-	-			-	-	-	STS tgl 23 - 09 -2013 sesuai STS dan RK sebesar Rp 3.070.900
	NIP.										
31	M. SANUSI, A.Ma, Pd	2014	180,000.00	-	180,000.00			180,000.00	-	180,000.00	
	Nip.195712311982031175										
32	H. Abbas	2014	1,174,427,061.00	-	1,132,011,790.00			1,132,011,790.00	-	1,132,011,790.00	Ditindaklanjuti dengan setoran pada tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp15.006.157,00 dan Rp27.409.114,00
	NIP.										
33	Ikhwan, S.Sos., M.Si	2014	1,284,702.00	-	1,284,702.00			1,284,702.00	-	1,284,702.00	
	Nip.1980022120081009										
34	Drs. Arifuddin	2014	429,237.00	-	429,237.00			429,237.00	-	429,237.00	
	Nip.1968010520081015										
35	H. Abd. Wahab	2014	6,071,428.00	-	-			-	-	-	Keruneg I/2017 STS Tgl 26 Mei 2017 Rp6.071.428
	Nip.19671231198031076										
36	Sirajuddin. B	2014	274,064.00	-	274,064.00			274,064.00	-	274,064.00	
	Nip.										
37	M. Syahrir. S	2014	1,091,121.00	-	1,091,121.00			1,091,121.00	-	1,091,121.00	
	Nip.196812271990031007										
38	Tenreng, S.Sos	2014	2,156,458.00	200,000.00	1,756,458.00			1,756,458.00	-	1,756,458.00	Disetor sebesar Rp200.000,- dengan No. STS 4771/STS/2015 tgl 27/10/2015 dan STS tanggal 9-04-15 sebesar Rp200.000,00
	Nip.19600111200604l005										
39	Abd. Rahman Rasyid, S.Sos	2014	752,839.00	-	752,839.00			752,839.00	-	752,839.00	
	Nip.196407301989031011										
40	Syamsuddin, S.Sos	2014	593,659.00	-	593,659.00			593,659.00	-	593,659.00	
	Nip.196912311994011006										
41	Nadir	2017	93,900,000.00	35,642,690.00	34,782,310.00			34,782,310.00	-	34,782,310.00	
	NIP.										
42	Sapriani	2017	710,168,477.00	24,472,000.00	667,696,477.00			667,696,477.00	-	667,696,477.00	
	NIP.										
42	Mansyur Tompo	2015	1,020,223.00	500,000.00	520,223.00			520,223.00	-	520,223.00	
43	Syaharuddin, SE	2018	113,546,061.00	55,000,000.00	58,546,061.00			58,546,061.00	-	58,546,061.00	
	NIP. 196003101984031010										
44	Muh Amir	2015	1,808,936.00	-	1,808,936.00			1,808,936.00	-	1,808,936.00	
	NIP. 197112072009061003										
45	Drs Muh Syahrir	2016	6,500,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	-	1,500,000.00	Pada data SKTJM (Pak Hamka) Telah dilunasi Terdapat STS Tgl. 22 Juni 2016 belum dicatat oleh Tim PTL
	NIP. 196106241982031011										
53	KAHARUDDIN, SE	45292	3,131,922.05	-	3,131,922.05			3,131,922.05	-	3,131,922.05	
	NIP.										
54	PRAYITNO	45323	120,380,000.00	1,000,000.00	45,170,810.81			45,170,810.81	-	45,170,810.81	
	NIP.										

No	NAMA	JATUH TEMPO	NILAI TEMUAN	PEMBAYARAN S.D TAHUN LALU	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SISA	TGR BAG. LANCAR	SISA TGR - ASET LAINNYA	KETERANGAN
	Jumlah		2,375,143,899.51	153,384,952.39	2,043,726,103.63	-	-	2,043,726,103.63	-	2,043,726,103.63	

No	NAMA	JATUH TEMPO	NILAI TEMUAN	PEMBAYARAN S.D TAHUN LALU	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SISA	TGR BAG. LANCAR	SISA TGR - ASET LAINNYA	KETERANGAN
	Saldo Kas di bendahara Pengeluaran sampai dengan Tahun 2011										
	Dinas Ketahanan Pangan	2016	6,600,450.00		6,600,450.00			6,600,450.00	-	6,600,450.00	
	Dinas Pekerjaan Umum	2016	57,000,000.00		57,000,000.00			57,000,000.00	-	57,000,000.00	
	Dinas Pertanian	2016	26,946,698.00		26,946,698.00			26,946,698.00	-	26,946,698.00	
	Dinas Perikanan	2016	6,341,000.00		6,341,000.00			6,341,000.00	-	6,341,000.00	
	Jumlah		96,888,148.00	-	96,888,148.00	-	-	96,888,148.00	-	96,888,148.00	
	Saldo Kas di bendahara Pengeluaran sampai dengan Tahun 2021										
	Abdul Malik	2023	3,777,409.00		3,777,409.00			3,777,409.00	-	3,777,409.00	
	H.M. Ridwan Nur	2023	185,000,000.00		185,000,000.00			185,000,000.00	-	185,000,000.00	
	Jumlah		188,777,409.00	-	188,777,409.00	-	-	188,777,409.00	-	188,777,409.00	
TOTAL			**2,660,809,456.51**	**153,384,952.39**	**2,329,391,660.63**	**-**	**-**	**2,329,391,660.63**	**-**	**2,329,391,660.63**	

Lampiran 31b

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR ASET LAINNYA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
Per 31 Desember 2025

NO	NO. SKTJM	SKTJM			NILAI SKTJM	PEMBAYARAN	PIUTANG		
		MULAI	BATAS AKHIR	JANGKA WAKTU			SISA PIUTANG	PIUTANG LANCAR	PIUTANG LAINNYA
1	16.J/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	31-Dec-25	7	6,412,500.00	6,412,500.00	-	-	-
2	16.B/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	31-Dec-25	7	7,012,500.00	3,327,904.00	3,684,596.00	3,684,596.00	-
3	16.F/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	31-May-27	24	70,110,000.00	32,531,211.00	37,578,789.00	22,972,539.00	14,606,250.00
4	04/MP.TPTGR/IV/2025	23-Apr-25	30-Apr-25	1	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-
5	16.A/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	72,000,000.00	1,707,261.00	70,292,739.00	55,292,739.00	15,000,000.00
6	03/MP.TPTGR/IV/2025	11-Apr-25	30-Apr-25	1	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
7	12/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	13,415,195.00	57,834,805.00	42,991,055.00	14,843,750.00
8	16.L/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	31-Dec-25	7	5,937,500.00	5,937,500.00	-	-	-
9	16.K/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	31-May-27	24	68,400,000.00	12,531,211.00	55,868,789.00	41,618,789.00	14,250,000.00
10	07/MP.TPTGR/IV/2025	16-Apr-25	30-Apr-25	1	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
11	16/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,562,500.00	7,865,428.00	63,697,072.00	48,788,217.83	14,908,854.17
12	17/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	62,437,500.00	52,437,500.00	10,000,000.00	- 3,007,812.50	13,007,812.50
13	09/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	71,250,000.00	-	-	-
14	14/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	16,750,000.00	54,500,000.00	39,656,250.00	14,843,750.00
15	16.C/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	31-Dec-25	7	8,550,000.00	2,464,330.00	6,085,670.00	6,085,670.00	-
16	16.D/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	72,000,000.00	1,351,894.00	70,648,106.00	55,648,106.00	15,000,000.00
17	08/MP.TPTGR/IV/2025	14-Apr-25	30-Apr-25	1	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
18	16.E/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	11,865,428.00	59,384,572.00	44,540,822.00	14,843,750.00
19	15/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	34,565,428.00	36,684,572.00	21,840,822.00	14,843,750.00
20	16.I/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	76,950,000.00	31,115,144.00	45,834,856.00	29,803,606.00	16,031,250.00
21	02/MP.TPTGR/IV/2025	22-Apr-25	30-Apr-25	1	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-
22	05/MP.TPTGR/IV/2025	21-Apr-25	30-Apr-25	1	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-
23	16.G/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,437,500.00	7,865,428.00	63,572,072.00	48,689,259.50	14,882,812.50
24	01/MP.TPTGR/IV/2025	21-Apr-25	30-Apr-25	1	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-
25	16.H/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	1,865,428.00	69,384,572.00	54,540,822.00	14,843,750.00
26	06/MP.TPTGR/IV/2025	21-Apr-25	30-Apr-25	1	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-
27	16/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	35,415,428.00	35,834,572.00	20,990,822.00	14,843,750.00
28	11/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	21,450,000.00	49,800,000.00	34,956,250.00	14,843,750.00
29	13/MP.TPTGR/VI/2025	3-Jun-25	30-May-27	24	71,250,000.00	51,864,961.00	19,385,039.00	4,541,289.00	14,843,750.00
30		3-Jun-25	30-May-27	24	62,700,000.00	15,163,444.00	47,536,556.00	34,474,056.00	13,062,500.00
31		3-Jun-25	30-May-27	24	70,110,000.00	12,330,222.00	57,779,778.00	43,173,528.00	14,606,250.00
JUMLAH					**1,388,870,000.00**	**473,482,845.00**	**915,387,155.00**	**651,281,425.83**	**264,105,729.17**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Rincian Aset Tak Berwujud per OPD Tahun 2025
Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Sofware	Aset Tidak Berwujud						Amortisasi							Nilai Buku
		Saldo Awal 2025	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2025	Saldo Awal Amortisasi	Koreksi Bertambah (Mutasi)	Koreksi Berkurang (Mutasi)	Koreksi Berkurang (Penghapusan)	Beban Amortisasi	Saldo Akhir Amortisasi		
			Belanja Modal	Mutasi Masuk	Penghapusan	Mutasi Keluar									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13 = 9 +10 + 12 - 11	14 = 8 - 13	
	Sekretariat Daerah														
1	Website / aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	19,500,000.00					19,500,000.00	19,500,000.00					19,500,000.00	-	
	Jumlah	**19,500,000.00**	-	-	-	-	**19,500,000.00**	**19,500,000.00**	-	-	-	-	**19,500,000.00**	**-**	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman													-	
1	Asset Management System	44,825,000.00					44,825,000.00	44,825,000.00					44,825,000.00	-	
2	Penguatan Data Base Jalan dan Survey Kondisi	221,870,000.00					221,870,000.00	221,870,000.00					221,870,000.00	-	
3	Pengadaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	153,800,000.00					153,800,000.00	153,800,000.00					153,800,000.00	-	
4	SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SIMTARU)	175,530,435.76					175,530,435.76	175,530,435.76					175,530,435.76	-	
5	Software Autocad	24,900,000.00					24,900,000.00	24,900,000.00					24,900,000.00	-	
6	Software Database DPUPRPKP	99,979,000.00					99,979,000.00	99,979,000.00					99,979,000.00	-	
7	E-paksi daerah irigasi kewenangan kabupaten	99,957,000.00					99,957,000.00	99,957,000.00					99,957,000.00	-	
	Jumlah	**820,861,435.76**	-	-	-	-	**820,861,435.76**	**820,861,435.76**	-	-	-	-	**820,861,435.76**	**-**	
	Dinas Perhubungan														
1	Sofware Sistem Aplikasi Manajemen Media Centre Berbasis Webside	20,000,000.00					20,000,000.00	20,000,000.00					20,000,000.00	-	
2	Software Pengujian Kendaraan Bermotor	59,400,000.00					59,400,000.00	59,400,000.00					59,400,000.00	-	
	Jumlah	**79,400,000.00**	-	-	-	-	**79,400,000.00**	**79,400,000.00**	-	-	-	-	**79,400,000.00**	**-**	
	Dinas Komunikasi dan Informasika														
1	Website	19,800,000.00					19,800,000.00	19,800,000.00					19,800,000.00	-	
2	website	99,500,000.00					99,500,000.00	99,500,000.00					99,500,000.00	-	
3	Vmix broadcasting	11,615,000.00					11,615,000.00	11,615,000.00					11,615,000.00	-	
4	Website	83,913,000.00					83,913,000.00	83,913,000.00					83,913,000.00	-	
5	server 2016	25,969,000.00					25,969,000.00	10,387,600.00				5,193,800.00	15,581,400.00	10,387,600.00	
6	Pengadaan aplikasi Takalar Super APPS (Play store - Takalar One Click)		723,000,000.00				723,000,000.00					144,600,000.00	144,600,000.00	578,400,000.00	
7	Dashboard Monitorng Pelayanan Publik		447,000,000.00				447,000,000.00					89,400,000.00	89,400,000.00	357,600,000.00	
	Jumlah	**240,797,000.00**	**1,170,000,000.00**	-	-	-	**1,410,797,000.00**	**225,215,600.00**	-	-	-	**239,193,800.00**	**464,409,400.00**	**946,387,600.00**	
	Dinas Kesehatan														
1	Software Jaringan Puskesmas	64,500,000.00					64,500,000.00	64,500,000.00					64,500,000.00	-	
2	Pengadaan Aplikasi Pengembangan Pengintegrasian SIKDA	172,415,000.00					172,415,000.00	172,415,000.00					172,415,000.00	-	
	Jumlah	**236,915,000.00**	-			-	**236,915,000.00**	**236,915,000.00**	-	-		-	**236,915,000.00**	**-**	
	Rumah Sakit Umum Daerah H Padjonga Dg Ngalle														
1	Sofware Apotik	74,500,000.00					74,500,000.00	74,500,000.00					74,500,000.00	-	
2	Sofware aplikasi keuangan	74,778,000.00					74,778,000.00	74,778,000.00					74,778,000.00	-	
3	Software Pengelolaan BLUD RSUD HPAdjonga DgNgalle	193,790,000.00					193,790,000.00	193,790,000.00					193,790,000.00	-	
4	Software Jaringan Informasi Pelayanan Rawat Inap RSUD HPDN	191,600,000.00					191,600,000.00	191,600,000.00					191,600,000.00	-	
5	Website dan Hosting	22,000,000.00					22,000,000.00	22,000,000.00					22,000,000.00	-	
	Jumlah	**556,668,000.00**	-			-	**556,668,000.00**	**556,668,000.00**	-	-		-	**556,668,000.00**	**-**	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan														
1	APLIKASI LMS & MOOC	178,400,000.00					178,400,000.00	71,360,000.00				35,680,000.00	107,040,000.00	71,360,000.00	
2	SOFTWARE APLIKASI SMARTSCHOOL	178,400,000.00					178,400,000.00	71,360,000.00				35,680,000.00	107,040,000.00	71,360,000.00	
3	APLIKASI ASESMEN, PRESENSI & APLIKASI DIGITAL LAINNYA	178,400,000.00					178,400,000.00	71,360,000.00				35,680,000.00	107,040,000.00	71,360,000.00	
4	VMix Pro	35,000,000.00					35,000,000.00	7,000,000.00				7,000,000.00	14,000,000.00	21,000,000.00	
5	Buku Digital		249,500,000.00				249,500,000.00					49,900,000.00	49,900,000.00	199,600,000.00	
	Jumlah	**570,200,000.00**	**249,500,000.00**	-	-	-	**819,700,000.00**	**221,080,000.00**	-	-	-	**163,940,000.00**	**385,020,000.00**	**434,680,000.00**	
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
1	Website	48,785,000.00					48,785,000.00	48,785,000.00				-	48,785,000.00	-	
	Jumlah	**48,785,000.00**	-		-	-	**48,785,000.00**	**48,785,000.00**	-	-	-	-	**48,785,000.00**	**-**	

No	Jenis Sofware	Aset Tidak Berwujud						Amortisasi						Nilai Buku
		Saldo Awal 2025	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2025	Saldo Awal Amortisasi	Koreksi Bertambah (Mutasi)	Koreksi Berkurang (Mutasi)	Koreksi Berkurang (Penghapusan)	Beban Amortisasi	Saldo Akhir Amortisasi	
			Belanja Modal	Mutasi Masuk	Penghapusan	Mutasi Keluar								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13 = 9 +10 + 12 - 11	14 = 8 - 13
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi													
1	Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dan Website DPMPTSP	10,000,000.00					10,000,000.00	4,000,000.00				2,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00
	Jumlah	**10,000,000.00**	-	-	-	-	**10,000,000.00**	**4,000,000.00**	-	-	-	**2,000,000.00**	**6,000,000.00**	**4,000,000.00**
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah													
1	Sofware Sistem Transfer Data Elektronik KEUDA	267,465,000.00					267,465,000.00	267,465,000.00					267,465,000.00	-
2	Sofware Pengelolaan Aset Daerah	261,050,000.00					261,050,000.00	261,050,000.00					261,050,000.00	-
3	Sofware windos server 2008	16,000,000.00					16,000,000.00	16,000,000.00				-	16,000,000.00	-
4	Sofware pengadaan sistem SIP OPD	64,680,000.00					64,680,000.00	64,680,000.00				-	64,680,000.00	-
5	Pengembangan Sistem Informasi Pengeloaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual	231,000,000.00					231,000,000.00	231,000,000.00					231,000,000.00	-
6	Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD Secara Online	225,000,000.00					225,000,000.00	225,000,000.00					225,000,000.00	-
7	Tools Host To Host Keuangan Daerah	124,000,000.00					124,000,000.00	124,000,000.00					124,000,000.00	-
8	Pengadaan Windows Server	33,990,000.00					33,990,000.00	33,990,000.00					33,990,000.00	-
9	Software Aplikasi BPHTB	93,390,000.00					93,390,000.00	93,390,000.00					93,390,000.00	-
	Jumlah	**1,316,575,000.00**	-		-	-	**1,316,575,000.00**	**1,316,575,000.00**	-	-	-	-	**1,316,575,000.00**	-
	Badan Pendapatan Daerah													
1	Aplikasi Pajak Daerah (SMART PAD)	199,000,000.00					199,000,000.00	79,600,000.00				39,800,000.00	119,400,000.00	79,600,000.00
2	Aplikasi Monitoring dan Analitic	150,000,000.00					150,000,000.00	60,000,000.00				30,000,000.00	90,000,000.00	60,000,000.00
3	APLIKASI TAXATION MAP (WABGIS)	199,000,000.00					199,000,000.00	79,600,000.00				39,800,000.00	119,400,000.00	79,600,000.00
4	Sofware aplikasi PBB-P2 dan pendampingan	225,000,000.00					225,000,000.00	225,000,000.00					225,000,000.00	-
5	Sofwarepengadaan sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah	174,000,000.00					174,000,000.00	174,000,000.00					174,000,000.00	-
6	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	197,000,000.00					197,000,000.00	197,000,000.00					197,000,000.00	-
	Jumlah	**1,144,000,000.00**	-	-	-	-	**1,144,000,000.00**	**815,200,000.00**	-	-	-	**109,600,000.00**	**924,800,000.00**	**219,200,000.00**
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM													
1	Software e kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar	98,285,000.00					98,285,000.00	98,285,000.00					98,285,000.00	-
	Jumlah	**98,285,000.00**	-		-	-	**98,285,000.00**	**98,285,000.00**	-	-	-	-	**98,285,000.00**	-
TOTAL		**5,141,986,435.76**	**1,419,500,000.00**	-	-	-	**6,561,486,435.76**	**4,442,485,035.76**	-	-	-	**514,733,800.00**	**4,957,218,835.76**	**1,604,267,600.00**

Lampiran 33

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Mutasi Aset Lain-lain per OPD Tahun 2025
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Kode Aset Lain Lain	Saldo Awal 2025	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir 2025 Unaudited	Koreksi Audited Kekurangan Volume	Saldo Akhir 2025 Audited	Penyusutan												Nilai Buku Aset Lain lain 2025
				Rekalsifikasi dari Belanja Modal	Reklasifikasi ke aset lain lain (Hewan Mati)	Reklas dari Aset Lain Lain Tidak Ditemukan	Reklas dari Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Ke aset Tetap	Penghapusan				Saldo Awal Penyusutan	Koreks Saldo Awal	Koreksi bertambah Penyusutan	Reklas Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Aset Lain Lain Hasil Inventarisasi (Tidak ditemukan)	Reklas Aset Lain Lain Tidak ditemukan/ Pihak Ke 3	Reklasifikasi ke aset lain lain Kecurian	Penghapusan Berdasarkan SK Penghapusan	Reklas berkurang aset lain lain ke rusak berat	Reklasifikasi dari aset lain lain	Beban Penyusutan	Saldo Akhir Penyusutan Audited	
1	2		3	4	10		13	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25		30	34		36	37	38	39
1	Sekretariat DPRD	Aset Rusak Berat/Usang	407,748,735.00							407,748,735.00		407,748,735.00	407,748,735.00											407,748,735.00	-
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	44,500,000.00							44,500,000.00		44,500,000.00	33,060,000.00											33,060,000.00	11,440,000.00
		Kekurangan Volume									298,674,446.86	298,674,446.86													298,674,446.86
		Jumlah	**452,248,735.00**	-	-	-	-	-	-	**452,248,735.00**	**298,674,446.86**	750,923,181.86	**440,808,735.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**440,808,735.00**	**310,114,446.86**
2	Sekretariat Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	6,099,308,310.29				62,005,000.00			6,161,313,310.29		6,161,313,310.29	4,909,633,444.24			62,005,000.00								4,971,638,444.24	1,189,674,866.05
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	366,971,229.65							366,971,229.65		366,971,229.65	295,751,766.04											295,751,766.04	71,219,463.61
		Kekurangan Volume									117,816,710.13	117,816,710.13													117,816,710.13
		Jumlah	**6,466,279,539.94**	-	-	-	**62,005,000.00**	-	-	**6,528,284,539.94**	**117,816,710.13**	6,646,101,250.07	**5,205,385,210.28**	-	-	**62,005,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**5,267,390,210.28**	**1,378,711,039.79**
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Rusak Berat/Usang	16,520,246,574.93				103,088,300.00			16,623,334,874.93		16,623,334,874.93	8,701,163,537.41			103,088,300.00								8,804,251,837.41	7,819,083,037.52
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	38,400,082,633.05							38,400,082,633.05		38,400,082,633.05	13,123,242,715.00											13,123,242,715.00	25,276,839,918.05
		Kekurangan Volume									402,536,892.74	402,536,892.74													402,536,892.74
		Jumlah	**54,920,329,207.98**	-	-	-	**103,088,300.00**	-	-	**55,023,417,507.98**	**402,536,892.74**	55,425,954,400.72	**21,824,406,252.41**	-	-	**103,088,300.00**	-	-	-	-	-	-	-	**21,927,494,552.41**	**33,498,459,848.31**
4	Dinas Perhubungan	Aset Rusak Berat/Usang	4,496,638,981.00				258,546,175.00			4,755,185,156.00		4,755,185,156.00	2,851,341,691.59			258,546,175.00								3,109,887,866.59	1,645,297,289.41
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1,557,863,245.00							1,557,863,245.00		1,557,863,245.00	1,211,099,370.04											1,211,099,370.04	346,763,874.96
		Jumlah	**6,054,502,226.00**	-	-		**258,546,175.00**	-	-	**6,313,048,401.00**	-	6,313,048,401.00	**4,062,441,061.63**	-	-	**258,546,175.00**	-		-	-		-	-	**4,320,987,236.63**	**1,992,061,164.37**
5	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Aset Rusak Berat/Usang	232,042,514.06							232,042,514.06		232,042,514.06	145,770,412.06											145,770,412.06	86,272,102.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	43,642,982.50							43,642,982.50		43,642,982.50	23,319,291.34											23,319,291.34	20,323,691.16
		Jumlah	**275,685,496.56**	-	-		-	-	-	**275,685,496.56**	-	275,685,496.56	**169,089,703.40**	-	-	-	-		-	-		-	-	**169,089,703.40**	**106,595,793.16**
6	Dinas Kesehatan	Aset Rusak Berat/Usang	17,671,791,761.59				235,825,000.00			17,907,616,761.59		17,907,616,761.59	15,629,120,550.55			233,161,000.00								15,862,281,550.55	2,045,335,211.04
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	3,672,161,881.61							3,672,161,881.61		3,672,161,881.61	2,597,859,458.23											2,597,859,458.23	1,074,302,423.38
		Jumlah	**21,343,953,643.20**	-	-		**235,825,000.00**	-	-	**21,579,778,643.20**	-	21,579,778,643.20	**18,226,980,008.78**	-	-	**233,161,000.00**	-		-	-		-	-	**18,460,141,008.78**	**3,119,637,634.42**
7	Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	Aset Rusak Berat/Usang	14,277,033,208.92				8,492,000.00			14,285,525,208.92		14,285,525,208.92	13,990,854,457.87			8,492,000.00								13,999,346,457.87	286,178,751.05
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	166,350,000.00							166,350,000.00		166,350,000.00	22,508,999.90											22,508,999.90	143,841,000.10
		Jumlah	**14,443,383,208.92**	-	-		**8,492,000.00**	-	-	**14,451,875,208.92**	-	14,451,875,208.92	**14,013,363,457.77**	-	-	**8,492,000.00**	-		-	-		-	-	**14,021,855,457.77**	**430,019,751.15**
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aset Rusak Berat/Usang	28,299,713,470.21							28,299,713,470.21		28,299,713,470.21	14,305,321,307.47											14,305,321,307.47	13,994,392,162.74
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	8,354,045,348.56							8,354,045,348.56		8,354,045,348.56	3,114,232,461.07											3,114,232,461.07	5,239,812,887.49

No	SKPD	Kode Aset Lain Lain	Saldo Awal 2025	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir 2025 Unaudited	Koreksi Audited Kekurangan Volume	Saldo Akhir 2025 Audited	Penyusutan													
				Rekalsifikasi dari Belanja Modal	Reklasifikasi ke aset lain lain (Hewan Mati)	Reklas dari Aset Lain Lain Tidak Ditemukan	Reklas dari Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Ke aset Tetap	Penghapusan				Saldo Awal Penyusutan	Koreks Saldo Awal	Koreksi bertambah Penyusutan	Reklas Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Aset Lain Lain Hasil Inventarisasi (Tidak ditemukan)	Reklas Aset Lain Lain Tidak ditemukan/ Pihak Ke 3	Reklasifikasi ke aset lain lain Kecurian	Penghapusan Berdasarkan SK Penghapusan	Reklas berkurang aset lain lain ke rusak berat	Reklasifikasi dari aset lain lain	Beban Penyusutan	Saldo Akhir Penyusutan Audited	Nilai Buku Aset Lain lain 2025
		Kekurangan Volume									31,544,747.38	31,544,747.38														31,544,747.38
		Jumlah	**36,653,758,818.77**	-	-	-	-	-	-	**36,653,758,818.77**	**31,544,747.38**	36,685,303,566.15	**17,419,553,768.54**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**17,419,553,768.54**	**19,265,749,797.61**
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Aset Rusak Berat/Usang	243,422,050.00							243,422,050.00		243,422,050.00	238,022,050.00												238,022,050.00	5,400,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	129,537,595.00							129,537,595.00		129,537,595.00	112,945,154.11												112,945,154.11	16,592,440.89
		Jumlah	**372,959,645.00**	-	-		-	-	-	**372,959,645.00**	-	372,959,645.00	**350,967,204.11**	-	-	-	-		-	-		-	-	**350,967,204.11**	**21,992,440.89**
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Aset Rusak Berat/Usang	7,788,865,304.47				20,675,000.00			7,809,540,304.47		7,809,540,304.47	2,294,952,643.34			20,675,000.00									2,315,627,643.34	5,493,912,661.13
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	117,222,117.33							117,222,117.33		117,222,117.33	85,864,784.23												85,864,784.23	31,357,333.10
		Jumlah	**7,906,087,421.80**	-	-		**20,675,000.00**	-	-	**7,926,762,421.80**	-	7,926,762,421.80	**2,380,817,427.57**	-	-	**20,675,000.00**	-		-	-		-	-	**2,401,492,427.57**	**5,525,269,994.23**
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Aset Rusak Berat/Usang	1,027,420,282.47							1,027,420,282.47		1,027,420,282.47	966,597,384.86												966,597,384.86	60,822,897.61
		Aset Tetap yang Tidak	53,688,209.67							53,688,209.67		53,688,209.67	32,270,397.17												32,270,397.17	21,417,812.50
		Jumlah	**1,081,108,492.14**	-	-		-	-	-	**1,081,108,492.14**	-	1,081,108,492.14	**998,867,782.03**	-	-	-	-		-	-		-	-	**998,867,782.03**	**82,240,710.11**
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	54,982,746.50				106,686,560.00			161,669,306.50		161,669,306.50	50,057,746.50			106,686,560.00									156,744,306.50	4,925,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah								-		-													-	-
		Jumlah	**54,982,746.50**	-	-		**106,686,560.00**	-	-	**161,669,306.50**	-	161,669,306.50	**50,057,746.50**	-	-	**106,686,560.00**	-		-	-		-	-	**156,744,306.50**	**4,925,000.00**
13	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Aset Rusak Berat/Usang	189,225,172.00							189,225,172.00		189,225,172.00	188,326,772.00												188,326,772.00	898,400.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	204,922,115.00							204,922,115.00		204,922,115.00	116,267,115.00												116,267,115.00	88,655,000.00
		Jumlah	**394,147,287.00**	-	-		-	-	-	**394,147,287.00**	-	394,147,287.00	**304,593,887.00**	-	-	-	-		-	-		-	-	**304,593,887.00**	**89,553,400.00**
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Aset Rusak Berat/Usang	1,761,789,199.84							1,761,789,199.84		1,761,789,199.84	1,607,828,897.69												1,607,828,897.69	153,960,302.15
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	36,332,174.76							36,332,174.76		36,332,174.76	3,882,174.76												3,882,174.76	32,450,000.00
		Kekurangan Volume									17,223,859.73	17,223,859.73														17,223,859.73
		Jumlah	**1,798,121,374.60**	-	-	-	-	-	-	**1,798,121,374.60**	**17,223,859.73**	1,815,345,234.33	**1,611,711,072.45**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,611,711,072.45**	**203,634,161.88**
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Aset Rusak Berat/Usang	269,267,000.00				156,488,165.00			425,755,165.00		425,755,165.00	261,925,000.00			156,488,165.00									418,413,165.00	7,342,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah								-		-													-	-
		Jumlah	**269,267,000.00**	-	-		**156,488,165.00**	-	-	**425,755,165.00**	-	425,755,165.00	**261,925,000.00**	-	-	**156,488,165.00**	-		-	-		-	-	**418,413,165.00**	**7,342,000.00**
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aset Rusak Berat/Usang	221,507,229.00							221,507,229.00		221,507,229.00	221,507,229.00												221,507,229.00	-

No	SKPD	Kode Aset Lain Lain	Saldo Awal 2025	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir 2025 Unaudited	Koreksi Audited Kekurangan Volume	Saldo Akhir 2025 Audited	Penyusutan													
				Rekalsifikasi dari Belanja Modal	Reklasifikasi ke aset lain lain (Hewan Mati)	Reklas dari Aset Lain Lain Tidak Ditemukan	Reklas dari Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Ke aset Tetap	Penghapusan				Saldo Awal Penyusutan	Koreks Saldo Awal	Koreksi bertambah Penyusutan	Reklas Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Aset Lain Lain Hasil Inventarisasi (Tidak ditemukan)	Reklas Aset Lain Lain Tidak ditemukan/ Pihak Ke 3	Reklasifikasi ke aset lain lain Kecurian	Penghapusan Berdasarkan SK Penghapusan	Reklas berkurang aset lain lain ke rusak berat	Reklasifikasi dari aset lain lain	Beban Penyusutan	Saldo Akhir Penyusutan Audited	Nilai Buku Aset Lain lain 2025
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah								-		-											-	-
		Jumlah	**221,507,229.00**	-	-		-	-	-	**221,507,229.00**	-	221,507,229.00	**221,507,229.00**	-	-	-	-		-	-		-	-	**221,507,229.00**	-
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Aset Rusak Berat/Usang	671,954,400.51				56,265,600.00			728,220,000.51		728,220,000.51	658,661,344.50			56,265,600.00								714,926,944.50	13,293,056.01
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	13,175,037,924.00							13,175,037,924.00		13,175,037,924.00	12,677,651,081.96											12,677,651,081.96	497,386,842.04
		Jumlah	**13,846,992,324.51**	-	-		**56,265,600.00**	-	-	**13,903,257,924.51**	-	13,903,257,924.51	**13,336,312,426.46**	-	-	**56,265,600.00**	-		-	-		-	-	**13,392,578,026.46**	**510,679,898.05**
18	Dinas Perikanan	Aset Rusak Berat/Usang	4,246,955,534.00				27,086,945.00			4,274,042,479.00		4,274,042,479.00	3,969,199,846.00			27,086,945.00								3,996,286,791.00	277,755,688.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	7,586,371,260.00							7,586,371,260.00		7,586,371,260.00	5,652,615,276.90											5,652,615,276.90	1,933,755,983.10
		Jumlah	**11,833,326,794.00**	-	-		**27,086,945.00**	-	-	**11,860,413,739.00**	-	11,860,413,739.00	**9,621,815,122.90**	-	-	**27,086,945.00**	-		-	-		-	-	**9,648,902,067.90**	**2,211,511,671.10**
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Aset Rusak Berat/Usang	315,363,600.00				125,933,474.52			441,297,074.52		441,297,074.52	128,665,440.00			108,604,224.52								237,269,664.52	204,027,410.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1,528,352,498.10		203,320,000.00					1,731,672,498.10		1,731,672,498.10	223,867,498.10											223,867,498.10	1,507,805,000.00
		Jumlah	**1,843,716,098.10**	-	**203,320,000.00**		**125,933,474.52**	-	-	**2,172,969,572.62**	-	2,172,969,572.62	**352,532,938.10**	-	-	**108,604,224.52**	-		-	-		-	-	**461,137,162.62**	**1,711,832,410.00**
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Aset Rusak Berat/Usang					52,455,000.00			52,455,000.00		52,455,000.00				51,535,000.00								51,535,000.00	920,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1,930,155,000.00							1,930,155,000.00		1,930,155,000.00	1,164,568,984.99											1,164,568,984.99	765,586,015.01
		Jumlah	**1,930,155,000.00**	-	-		**52,455,000.00**	-	-	**1,982,610,000.00**	-	1,982,610,000.00	**1,164,568,984.99**	-	-	**51,535,000.00**	-		-	-		-	-	**1,216,103,984.99**	**766,506,015.01**
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	331,531,281.00				913,213,642.00			1,244,744,923.00		1,244,744,923.00	311,901,581.00			860,658,562.00								1,172,560,143.00	72,184,780.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah								-		-												-	-
		Jumlah	**331,531,281.00**	-	-		**913,213,642.00**	-	-	**1,244,744,923.00**	-	1,244,744,923.00	**311,901,581.00**	-	-	**860,658,562.00**	-		-	-		-	-	**1,172,560,143.00**	**72,184,780.00**
22	Badan Pendapatan Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	536,232,241.27				42,000,000.00		396,000,000.00	182,232,241.27		182,232,241.27	534,006,241.27			42,000,000.00				396,000,000.00				180,006,241.27	2,226,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	174,966,000.00							174,966,000.00		174,966,000.00	174,966,000.00											174,966,000.00	-
		Jumlah	**711,198,241.27**	-	-	-	**42,000,000.00**	-	**396,000,000.00**	**357,198,241.27**	-	357,198,241.27	**708,972,241.27**	-	-	**42,000,000.00**	-	-	-	**396,000,000.00**	-	-	-	**354,972,241.27**	**2,226,000.00**
23	Inspektorat	Aset Rusak Berat/Usang	85,314,572.56				29,792,765.60			115,107,338.16		115,107,338.16	78,738,019.70			29,792,765.60								108,530,785.30	6,576,552.86
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah								-		-												-	-
		Jumlah	**85,314,572.56**	-	-		**29,792,765.60**	-	-	**115,107,338.16**	-	115,107,338.16	**78,738,019.70**	-	-	**29,792,765.60**	-		-	-		-	-	**108,530,785.30**	**6,576,552.86**
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aset Rusak Berat/Usang	77,635,000.00							77,635,000.00		77,635,000.00	70,638,900.00											70,638,900.00	6,996,100.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	311,307,429.00							311,307,429.00		311,307,429.00	311,307,429.00											311,307,429.00	-

No	SKPD	Kode Aset Lain Lain	Saldo Awal 2025	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir 2025 Unaudited	Koreksi Audited Kekurangan Volume	Saldo Akhir 2025 Audited	Penyusutan													
				Rekalsifikasi dari Belanja Modal	Reklasifikasi ke aset lain lain (Hewan Mati)	Reklas dari Aset Lain Lain Tidak Ditemukan	Reklas dari Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Ke aset Tetap	Penghapusan				Saldo Awal Penyusutan	Koreks Saldo Awal	Koreksi bertambah Penyusutan	Reklas Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Aset Lain Lain Hasil Inventarisasi (Tidak ditemukan)	Reklas Aset Lain Lain Tidak ditemukan/ Pihak Ke 3	Reklasifikasi ke aset lain lain Kecurian	Penghapusan Berdasarkan SK Penghapusan	Reklas berkurang aset lain lain ke rusak berat	Reklasifikasi dari aset lain lain	Beban Penyusutan	Saldo Akhir Penyusutan Audited	Nilai Buku Aset Lain lain 2025
		Jumlah	**388,942,429.00**	-	-		-	-	-	**388,942,429.00**	-	388,942,429.00	**381,946,329.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**381,946,329.00**	**6,996,100.00**
25	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	Aset Rusak Berat/Usang	1,775,137,754.44							1,775,137,754.44		1,775,137,754.44	1,674,958,023.10											1,674,958,023.10	100,179,731.34
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1,065,761,688.24							1,065,761,688.24		1,065,761,688.24	401,777,469.32											401,777,469.32	663,984,218.92
		Jumlah	**2,840,899,442.68**	-	-		-	-	-	**2,840,899,442.68**	-	2,840,899,442.68	**2,076,735,492.42**	-	-	-	-		-	-		-	-	**2,076,735,492.42**	**764,163,950.26**
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Aset Rusak Berat/Usang	2,062,856,488.95				27,905,000.00	15,601,000.00		2,075,160,488.95		2,075,160,488.95	520,935,257.74			27,905,000.00						15,601,000.00		533,239,257.74	1,541,921,231.21
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	551,320,727.00							551,320,727.00		551,320,727.00	298,167,725.38											298,167,725.38	253,153,001.62
		Jumlah	**2,614,177,215.95**	-	-		**27,905,000.00**	**15,601,000.00**	-	**2,626,481,215.95**	-	2,626,481,215.95	**819,102,983.12**	-	-	**27,905,000.00**	-		-	-		**15,601,000.00**	-	**831,406,983.12**	**1,795,074,232.83**
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Aset Rusak Berat/Usang	171,779,062.97							171,779,062.97		171,779,062.97	162,518,062.97											162,518,062.97	9,261,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	6,029,877.00							6,029,877.00		6,029,877.00	6,029,877.00											6,029,877.00	-
		Jumlah	**177,808,939.97**	-	-		-	-	-	**177,808,939.97**	-	177,808,939.97	**168,547,939.97**	-	-	-	-		-	-		-	-	**168,547,939.97**	**9,261,000.00**
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Rusak Berat/Usang	102,214,710.00				24,725,000.00			126,939,710.00		126,939,710.00	102,214,710.00			24,725,000.00								126,939,710.00	-
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	36,250,000.00							36,250,000.00		36,250,000.00	36,250,000.00											36,250,000.00	-
		Jumlah	**138,464,710.00**	-	-	-	**24,725,000.00**	-	-	**163,189,710.00**	-	163,189,710.00	**138,464,710.00**	-	-	**24,725,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	**163,189,710.00**	-
29	Kecamatan Mangarabombang	Aset Rusak Berat/Usang	38,136,500.00							38,136,500.00		38,136,500.00	38,136,500.00											38,136,500.00	-
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	329,157,000.00							329,157,000.00		329,157,000.00	19,800,000.00											19,800,000.00	309,357,000.00
		Jumlah	**367,293,500.00**	-	-		-	-	-	**367,293,500.00**	-	367,293,500.00	**57,936,500.00**	-	-	-	-		-	-		-	-	**57,936,500.00**	**309,357,000.00**
30	Kecamatan Mappakasunggu	Aset Rusak Berat/Usang	625,441,786.59							625,441,786.59		625,441,786.59	355,664,747.95											355,664,747.95	269,777,038.64
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	472,236,535.20							472,236,535.20		472,236,535.20	24,170,522.81											24,170,522.81	448,066,012.39
		Jumlah	**1,097,678,321.79**	-	-		-	-	-	**1,097,678,321.79**	-	1,097,678,321.79	**379,835,270.76**	-	-	-	-		-	-		-	-	**379,835,270.76**	**717,843,051.03**
31	Kecamatan Polongbangkeng Selatan	Aset Rusak Berat/Usang	463,939,512.50							463,939,512.50		463,939,512.50	339,253,522.68											339,253,522.68	124,685,989.82
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	250,064,000.00							250,064,000.00		250,064,000.00	11,400,000.00											11,400,000.00	238,664,000.00
		Jumlah	**714,003,512.50**	-	-		-	-	-	**714,003,512.50**	-	714,003,512.50	**350,653,522.68**	-	-	-	-		-	-		-	-	**350,653,522.68**	**363,349,989.82**
32	Kecamatan Polongbangkeng Utara	Aset Rusak Berat/Usang	66,635,000.00							66,635,000.00		66,635,000.00	64,635,000.00											64,635,000.00	2,000,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	92,645,000.00							92,645,000.00		92,645,000.00	-											-	92,645,000.00
		Jumlah	**159,280,000.00**	-	-		-	-	-	**159,280,000.00**	-	159,280,000.00	**64,635,000.00**	-	-	-	-		-	-		-	-	**64,635,000.00**	**94,645,000.00**
33	Kecamatan Galesong Selatan	Aset Rusak Berat/Usang	64,027,000.00							64,027,000.00		64,027,000.00	64,027,000.00											64,027,000.00	-

No	SKPD	Kode Aset Lain Lain	Saldo Awal 2025	Penambahan				Pengurangan		Saldo Akhir 2025 Unaudited	Koreksi Audited Kekurangan Volume	Saldo Akhir 2025 Audited	Penyusutan													Nilai Buku Aset Lain lain 2025
				Rekalsifikasi dari Belanja Modal	Reklasifikasi ke aset lain lain (Hewan Mati)	Reklas dari Aset Lain Lain Tidak Ditemukan	Reklas dari Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Ke aset Tetap	Penghapusan				Saldo Awal Penyusutan	Koreks Saldo Awal	Koreksi bertambah Penyusutan	Reklas Aset Lain Lain Rusak Berat	Reklas Aset Lain Lain Hasil Inventarisasi (Tidak ditemukan)	Reklas Aset Lain Lain Tidak ditemukan/ Pihak Ke 3	Reklasifikasi ke aset lain lain Kecurian	Penghapusan Berdasarkan SK Penghapusan	Reklas berkurang aset lain lain ke rusak berat	Reklasifikasi dari aset lain lain	Beban Penyusutan	Saldo Akhir Penyusutan Audited	
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	304,395,186.00							304,395,186.00		304,395,186.00	15,819,186.00											15,819,186.00	288,576,000.00
		Jumlah	**368,422,186.00**	-	-		-	-	-	**368,422,186.00**	-	368,422,186.00	**79,846,186.00**	-	-	-	-		-	-		-	-	**79,846,186.00**	**288,576,000.00**
34	Kecamatan Galesong Utara	Aset Rusak Berat/Usang	47,000,000.00				7,000,000.00			54,000,000.00		54,000,000.00	27,105,263.16			7,000,000.00								34,105,263.16	19,894,736.84
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	126,751,000.00							126,751,000.00		126,751,000.00	450,000.00											450,000.00	126,301,000.00
		Jumlah	**173,751,000.00**	-	-		**7,000,000.00**	-	-	**180,751,000.00**	-	180,751,000.00	**27,555,263.16**	-	-	**7,000,000.00**	-		-	-		-	-	**34,555,263.16**	**146,195,736.84**
35	Kecamatan Pattallassang	Aset Rusak Berat/Usang	218,920,001.00							218,920,001.00		218,920,001.00	164,025,474.22											164,025,474.22	54,894,526.78
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	4,460,000.00							4,460,000.00		4,460,000.00	3,888,000.00											3,888,000.00	572,000.00
		Jumlah	**223,380,001.00**	-	-		-	-	-	**223,380,001.00**	-	223,380,001.00	**167,913,474.22**	-	-	-	-		-	-		-	-	**167,913,474.22**	**55,466,526.78**
36	Kecamatan Sanrobone	Aset Rusak Berat/Usang	50,980,000.00				1,250,000.00			52,230,000.00		52,230,000.00	49,805,000.00			1,250,000.00								51,055,000.00	1,175,000.00
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	95,794,000.00							95,794,000.00		95,794,000.00	-											-	95,794,000.00
		Jumlah	**146,774,000.00**	-	-		**1,250,000.00**	-	-	**148,024,000.00**	-	148,024,000.00	**49,805,000.00**	-	-	**1,250,000.00**	-		-	-		-	-	**51,055,000.00**	**96,969,000.00**
37	Kecamatan Galesong	Aset Rusak Berat/Usang	2,000,000.00							2,000,000.00		2,000,000.00	1,919,999.98											1,919,999.98	80,000.02
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	153,552,000.00							153,552,000.00		153,552,000.00	-											-	153,552,000.00
		Jumlah	**155,552,000.00**	-	-		-	-	-	**155,552,000.00**	-	155,552,000.00	**1,919,999.98**	-	-	-	-		-	-		-	-	**1,919,999.98**	**153,632,000.02**
38	Kecamatan Kepulauan Tanakeke	Aset Rusak Berat/Usang	-							-		-	-											-	-
		Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah								-		-												-	-
		Jumlah	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
Jumlah			**192,856,983,642.74**	-	**203,320,000.00**	-	**2,259,433,627.12**	**15,601,000.00**	**396,000,000.00**	**194,908,136,269.86**	**867,796,656.84**	**195,775,932,926.70**	**117,882,214,532.20**	-	-	**2,185,965,297.12**	-	-	-	**396,000,000.00**	-	**15,601,000.00**	-	**119,656,578,829.32**	**76,119,354,097.38**

Lampiran 34

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR PENGHAPUSAN ASET LAIN LAIN

Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA SKPD	Keputusan Bupati Takalar Nomor 342 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Takalar Berupa Kendaraan Dinas Jabatan
1	Sekretariat DPRD	844,724,513.00
2	Sekretariat Daerah	182,700,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	391,500,000.00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	192,250,000.00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	174,960,303.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	269,100,000.00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130,000,000.00
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	247,700,000.00
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	829,557,892.00
10	Badan Pendapatan Daerah	396,000,000.00
11	Inspektorat	150,000,000.00
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	231,844,396.00
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	261,610,307.00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	256,100,000.00
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	179,800,000.00
16	Kecamatan Mappakasunggu	172,700,000.00
17	Kecamatan Polongbangkeng Utara	172,700,000.00
18	Kecamatan Pattallassang	172,700,000.00
19	Kecamatan Galesong	182,700,000.00
		5,438,647,411.00

Lampiran 35

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR MUTASI KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nama Bank	No Rekening	Saldo Awal 2025	Kenaikan/ Penurunan	Saldo Akhir 2025
1	Dana KUKESRATA – BKBPP	BRI Cabang Takalar	00000-250-01-000264-30-0	281,399,175.00	-	281,399,175.00
2	Dana PEP2T – BKBPP	BNI Cabang Takalar	83192999	333,275,247.00	-	333,275,247.00
3	Dana Kuperta - Dinas kelautan dan perikanan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004066-1	93,687,000.00	-	93,687,000.00
4	Dana Bergulir – Dinas Kelautan dan Perikanan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	002-000004314-8	400,408.00	-	400,408.00
5	Dana Kuperta – Eks Dinas Koperasi	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-003004216-8	105,758,268.00	4,317,954.00	110,076,222.00
6	Dana Kuperta – Eks Dinas Perindag	BNI Cabang Takalar	270869980	121,000.00	-	121,000.00
7	Dana Kuperta Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004232-0	101,226,000.00	2,000,000.00	103,226,000.00
8	Dana Kuperta Dinas Pertanian BidangPeternakan	Bank Sulselbar Cabang Takalar	0021-002-000004187-1	84,960,000.00	-	84,960,000.00
Jumlah				**1,000,827,098.00**	**6,317,954.00**	1,007,145,052.00
9	Tim Pokjanis Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005506-5	373,669.00	-	373,669.00
10	Dinas Peternakan/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005624-0	9,049,609.00	-	9,049,609.00
11	Dinas Perikanan/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005625-8	469,701.00	-	469,701.00
12	Dinas Pertanian/FEE Kuperta	Bank Sulselbar Cabang Takalar	21-002-000005698-3	4,786,802.00	-	4,786,802.00
Jumlah				**14,679,781.00**	**-**	**14,679,781.00**
Total				**1,015,506,879.00**	**6,317,954.00**	**1,021,824,833.00**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
Daftar Properti Investasi Tahun 2025
Per 31 Desember 2025

SKPD	OPD / No Urut	Gol	Kode Barang	Uraian	Saldo Awal investasi properti Audited 2025	Koreksi Saldo Awal 2025		Saldo Awal investasi properti 2025 Setelah Koreksi	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir investasi properti 2025 Unaudited	Koreksi Audited Koreksi Berkurang Ke Aset Tetap	Saldo Akhir 2025 Audited	Saldo Awal investasi properti Akumulasi Penyusutan (Audited)	Koreksi Bertambah Akumulasi		Koreksi Berkurang Akumulasi		Beban Akumulasi investasi properti 2025	Saldo Akhir Akumulasi investasi properti Penyusutan 2025 (Unaudited)	Nilai Buku investasi properti Per 31 -Des-2025 (Unaudited)
						Koreksi Bertambah	Koreksi Berkurang		Reklassifikasi dari KDP	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Hibah Keluar					Koreksi Saldo Awal Akumulasi	Reklasifikasi dari aset tetap	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Reklasifikasi ke aset lain lain (Penjualan)			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sekretariat Daerah	**Sekretariat Daerah**																						
Sekretariat Daerah	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	350,000,000.00			350,000,000.00					350,000,000.00		350,000,000.00							-	350,000,000.00
Sekretariat Daerah	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin	-			-					-		-							-	-
Sekretariat Daerah	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan	8,207,854,474.63			8,207,854,474.63					8,207,854,474.63		8,207,854,474.63	1,924,539,705.67					204,470,033.44	2,129,009,739.11	6,078,844,735.52
Sekretariat Daerah	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Sekretariat Daerah	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-	-						-	-
Sekretariat Daerah	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Sekretariat Daerah	**Jumlah**				**8,557,854,474.63**	-	-	**8,557,854,474.63**	-	-	-	-	**8,557,854,474.63**	-	**8,557,854,474.63**	**1,924,539,705.67**	-	-	-	-	**204,470,033.44**	**2,129,009,739.11**	**6,428,844,735.52**
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman**																						
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah				-					-		-							-	-
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin				-					-		-							-	-
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan	2,364,902,000.00			2,364,902,000.00					2,364,902,000.00		2,364,902,000.00	189,192,160.00					47,298,040.00	236,490,200.00	2,128,411,800.00
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-	-						-	-
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-

SKPD	OPD / No Urut	Gol	Kode Barang	Uraian	Saldo Awal investasi properti Audited 2025	Koreksi Saldo Awal 2025		Saldo Awal investasi properti 2025 Setelah Koreksi	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir investasi properti 2025 Unaudited	Koreksi Audited Koreksi Berkurang Ke Aset Tetap	Saldo Akhir 2025 Audited	Saldo Awal investasi properti Akumulasi Penyusutan (Audited)	Koreksi Bertambah Akumulasi		Koreksi Berkurang Akumulasi		Beban Akumulasi investasi properti 2025	Saldo Akhir Akumulasi investasi properti Penyusutan 2025 (Unaudited)	Nilai Buku investasi properti Per 31 -Des-2025 (Unaudited)
						Koreksi Bertambah	Koreksi Berkurang		Reklassifikasi dari KDP	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Hibah Keluar					Koreksi Saldo Awal Akumulasi	Reklasifikasi dari aset tetap	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Reklasifikasi ke aset lain lain (Penjualan)			
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	07	KIB G	Investasi Properti Software				-					-		-							-	-
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah				2,364,902,000.00	-	-	2,364,902,000.00	-	-	-	-	2,364,902,000.00	-	2,364,902,000.00	189,192,160.00	-	-	-	-	47,298,040.00	236,490,200.00	2,128,411,800.00
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	Rumah Sakit Umum Daerah H Padjonga Dg Alle																						
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	463,680,000.00			463,680,000.00					463,680,000.00		463,680,000.00							-	463,680,000.00
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin				-					-		-							-	-
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan				-					-		-							-	-
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-	-						-	-
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg Ngalle	Jumlah				463,680,000.00	-	-	463,680,000.00	-	-	-	-	463,680,000.00	-	463,680,000.00	-	-	-	-	-	-	-	463,680,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																						
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah				-					-		-							-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin				-					-		-							-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan	1,438,279,225.06			1,438,279,225.06					1,438,279,225.06		1,438,279,225.06	331,919,529.02					28,795,184.50	360,714,713.52	1,077,564,511.54
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-	-						-	-

SKPD	OPD / No Urut	Gol	Kode Barang	Uraian	Saldo Awal investasi properti Audited 2025	Koreksi Saldo Awal 2025		Saldo Awal investasi properti 2025 Setelah Koreksi	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir investasi properti 2025 Unaudited	Koreksi Audited Koreksi Berkurang Ke Aset Tetap	Saldo Akhir 2025 Audited	Saldo Awal investasi properti Akumulasi Penyusutan (Audited)	Koreksi Bertambah Akumulasi		Koreksi Berkurang Akumulasi		Beban Akumulasi investasi properti 2025	Saldo Akhir Akumulasi investasi properti Penyusutan 2025 (Unaudited)	Nilai Buku investasi properti Per 31 -Des-2025 (Unaudited)
						Koreksi Bertambah	Koreksi Berkurang		Reklassifikasi dari KDP	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Hibah Keluar					Koreksi Saldo Awal Akumulasi	Reklasifikasi dari aset tetap	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Reklasifikasi ke aset lain lain (Penjualan)			
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**Jumlah**				**1,438,279,225.06**	-	-	**1,438,279,225.06**	-	-	-	-	**1,438,279,225.06**	-	**1,438,279,225.06**	**331,919,529.02**	-	-	-	-	**28,795,184.50**	**360,714,713.52**	**1,077,564,511.54**
Dinas Perikanan	**Dinas Perikanan**																						
Dinas Perikanan	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	8,575,212,000.00			8,575,212,000.00					8,575,212,000.00		8,575,212,000.00							-	8,575,212,000.00
Dinas Perikanan	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin	-			-					-		-							-	-
Dinas Perikanan	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan	4,496,319,000.00			4,496,319,000.00					4,496,319,000.00		4,496,319,000.00	893,072,890.92					90,081,152.73	983,154,043.65	3,513,164,956.35
Dinas Perikanan	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Dinas Perikanan	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-							-	-
Dinas Perikanan	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Dinas Perikanan	**Jumlah**				**13,071,531,000.00**	-	-	**13,071,531,000.00**	-	-	-	-	**13,071,531,000.00**	-	**13,071,531,000.00**	**893,072,890.92**	-	-	-		**90,081,152.73**	**983,154,043.65**	**12,088,376,956.35**
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**																						
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	13,328,108,500.00			13,328,108,500.00		353,119,000.00			13,681,227,500.00		13,681,227,500.00							-	13,681,227,500.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin	-			-					-		-							-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan	72,471,820,886.10			72,471,820,886.10					72,471,820,886.10		72,471,820,886.10	12,276,676,586.21					1,449,477,245.72	13,726,153,831.93	58,745,667,054.17
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-							-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	**Jumlah**				**85,799,929,386.10**	-	-	**85,799,929,386.10**	-	**353,119,000.00**	-	-	**86,153,048,386.10**	-	**86,153,048,386.10**	**12,276,676,586.21**	-	-	-	-	**1,449,477,245.72**	**13,726,153,831.93**	**72,426,894,554.17**
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	**Dinas Lingkungan dan Pertanahan**																						
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	3,293,956,000.00			3,293,956,000.00					3,293,956,000.00		3,293,956,000.00							-	3,293,956,000.00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin				-					-		-							-	-
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan				-					-		-							-	-
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-

SKPD	OPD / No Urut	Gol	Kode Barang	Uraian	Saldo Awal investasi properti Audited 2025	Koreksi Saldo Awal 2025		Saldo Awal investasi properti 2025 Setelah Koreksi	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir investasi properti 2025 Unaudited	Koreksi Audited Koreksi Berkurang Ke Aset Tetap	Saldo Akhir 2025 Audited	Saldo Awal investasi properti Akumulasi Penyusutan (Audited)	Koreksi Bertambah Akumulasi		Koreksi Berkurang Akumulasi		Beban Akumulasi investasi properti 2025	Saldo Akhir Akumulasi investasi properti Penyusutan 2025 (Unaudited)	Nilai Buku investasi properti Per 31 -Des-2025 (Unaudited)
						Koreksi Bertambah	Koreksi Berkurang		Reklassifikasi dari KDP	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Hibah Keluar					Koreksi Saldo Awal Akumulasi	Reklasifikasi dari aset tetap	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Reklasifikasi ke aset lain lain (Penjualan)			
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-							-	-
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	Jumlah				3,293,956,000.00	-	-	3,293,956,000.00	-	-	-	-	3,293,956,000.00	-	3,293,956,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,293,956,000.00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Takalar																						
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah				-					-		-							-	-
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin				-					-		-							-	-
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan	2,404,228,835.00			2,404,228,835.00					2,404,228,835.00		2,404,228,835.00	269,525,177.73					49,325,833.83	318,851,011.56	2,085,377,823.44
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-							-	-
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah				2,404,228,835.00	-	-	2,404,228,835.00	-	-	-	-	2,404,228,835.00	-	2,404,228,835.00	269,525,177.73	-	-	-	-	49,325,833.83	318,851,011.56	2,085,377,823.44
Kecamatan Galesong Utara	Kantor Kecamatan Galesong Utara																						
Kecamatan Galesong Utara	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	234,559,000.00			234,559,000.00			234,559,000.00		-		-							-	-
Kecamatan Galesong Utara	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong Utara	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong Utara	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong Utara	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong Utara	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong Utara	Jumlah				234,559,000.00	-	-	234,559,000.00	-	-	234,559,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Galesong	Kantor Kecamatan Galesong																						
Kecamatan Galesong	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	398,560,000.00			398,560,000.00			118,560,000.00		280,000,000.00		280,000,000.00							-	280,000,000.00
Kecamatan Galesong	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan				-					-		-							-	-
Kecamatan Galesong	Jumlah				398,560,000.00	-	-	398,560,000.00	-	-	118,560,000.00	-	280,000,000.00	-	280,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	280,000,000.00
KABUPATEN	Jumlah				118,027,479,920.79	-	-	118,027,479,920.79	-	353,119,000.00	353,119,000.00	-	118,027,479,920.79	-	118,027,479,920.79	15,884,926,049.55	-	-	-	-	1,869,447,490.22	17,754,373,539.77	100,273,106,381.02

SKPD	OPD / No Urut	Gol	Kode Barang	Uraian	Saldo Awal investasi properti Audited 2025	Koreksi Saldo Awal 2025		Saldo Awal investasi properti 2025 Setelah Koreksi	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir investasi properti 2025 Unaudited	Koreksi Audited Koreksi Berkurang Ke Aset Tetap	Saldo Akhir 2025 Audited	Saldo Awal investasi properti Akumulasi Penyusutan (Audited)	Koreksi Bertambah Akumulasi		Koreksi Berkurang Akumulasi		Beban Akumulasi investasi properti 2025	Saldo Akhir Akumulasi investasi properti Penyusutan 2025 (Unaudited)	Nilai Buku investasi properti Per 31 -Des-2025 (Unaudited)
						Koreksi Bertambah	Koreksi Berkurang		Reklassifikasi dari KDP	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Hibah Keluar					Koreksi Saldo Awal Akumulasi	Reklasifikasi dari aset tetap	Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk	Reklasifikasi ke aset lain lain (Penjualan)			
Kabupaten																							
KABUPATEN	1	01	KIB A	Investasi Properti Tanah	26,644,075,500.00	-	-	26,644,075,500.00	-	353,119,000.00	353,119,000.00	-	26,644,075,500.00	-	26,644,075,500.00	-	-	-	-	-	-	-	26,644,075,500.00
KABUPATEN	2	02	KIB B	Investasi Properti Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN	3	03	KIB C	Investasi Properti Gedung dan Bangunan	91,383,404,420.79	-	-	91,383,404,420.79	-	-	-	-	91,383,404,420.79	-	91,383,404,420.79	15,884,926,049.55	-	-	-	-	1,869,447,490.22	17,754,373,539.77	73,629,030,881.02
KABUPATEN	4	04	KIB D	Investasi Properti Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN	5	05	KIB E	Investasi Properti Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN	6	06	KIB F	Investasi Properti Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KABUPATEN	7	07	KIB G	Investasi Properti Software																			
					118,027,479,920.79	-	-	118,027,479,920.79	-	353,119,000.00	353,119,000.00	-	118,027,479,920.79	-	118,027,479,920.79	15,884,926,049.55	-	-	-	-	1,869,447,490.22	17,754,373,539.77	100,273,106,381.02

Lampiran 37a

DAFTAR PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK DITERIMA DI MUKA
PERIODE TAHUN 2025

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR	SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD							
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	000001/SKPD-REKLAME/I/2024	15 Januari 2025	P1202400024773050 40012	MAS BROW	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	887,500				-		887,500.00		
2	000002/SKPD-REKLAME/I/2024	15 Januari 2025	P1202400024773050 40012	MAS BROW	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	331,250				-		331,250.00		
3	000003/SKPD-REKLAME/I/2024	15 Januari 2025	P2202500000573059 99999	CV. FAJAR MANDIRI ADV.	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	4,700,000	4,700,000		4,700,000	-	4,700,000	-	04 Feb 2025	
4	000004/SKPD-REKLAME/I/2024	15 Januari 2025	P2202500000573059 99999	CV. FAJAR MANDIRI ADV.	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	4,700,000	4,700,000		4,700,000	-	4,700,000	-	04 Feb 2025	
5	000005/SKPD-REKLAME/I/2024	15 Januari 2025	P2202400020973050 31007	PT. ASTRA INTERNASIONAL (ASTRA MOTOR TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	4,550,000	4,550,000		4,550,000	-	4,550,000	-	15 April 2025	
6	000006/SKPD-REKLAME/I/2024	30 Januari 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	26 Jan 2025 s/d 01 Feb 2025	1,237,500	1,237,500		1,237,500	-	1,237,500	-	3 Februari 2025	
7	000007/SKPD-REKLAME/II/2025	12 Februari 2025	P2202400020273050 31006	CV Q-LINE STUDIO 57	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	4,700,000	4,700,000		4,700,000	-	4,700,000	-	13 Februari 2025	
8	000008/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	11 Feb 2025 s/d 24 Feb 2025	487,500	487,500		487,500	-	487,500	-	21 Februari 2025	
9	000009/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,537,500	2,537,500		2,537,500	-	2,537,500	-	17 Maret 2025	
10	000010/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	266,797	266,797		266,797	-	266,797	-	17 Maret 2025	
11	000011/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,210,000	1,210,000		1,210,000	-	1,210,000	-	17 Maret 2025	
12	000012/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,537,500	2,537,500		2,537,500	-	2,537,500	-	17 Maret 2025	
13	000013/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	266,797	266,797		266,797	-	266,797	-	17 Maret 2025	
14	000014/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,210,000	1,210,000		1,210,000	-	1,210,000	-	17 Maret 2025	
15	000015/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,537,500	2,537,500		2,537,500	-	2,537,500	-	17 Maret 2025	
16	000016/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	266,797	266,797		266,797	-	266,797	-	17 Maret 2025	
17	000017/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,537,500	2,537,500		2,537,500	-	2,537,500	-	17 Maret 2025	
18	000018/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	266,797	266,797		266,797	-	266,797	-	17 Maret 2025	
19	000019/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,210,000	1,210,000		1,210,000	-	1,210,000	-	17 Maret 2025	
20	000020/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,537,500	2,537,500		2,537,500	-	2,537,500	-	17 Maret 2025	
21	000021/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	266,797	266,797		266,797	-	266,797	-	17 Maret 2025	
22	000022/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,210,000	1,210,000		1,210,000	-	1,210,000	-	17 Maret 2025	
23	000023/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,537,500	2,537,500		2,537,500	-	2,537,500	-	17 Maret 2025	
24	000024/SKPD-REKLAME/II/2025	13 Februari 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	266,797	266,797		266,797	-	266,797	-	17 Maret 2025	
25	000025/SKPD-REKLAME/II/2025	18 Februari 2025	P2202400031873050 31006	PT. MANDALA MULTIFINANCE TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,806,250	1,806,250		1,806,250	-	1,806,250	-	23 Desember 2025	
26	000026/SKPD-REKLAME/II/2025	18 Februari 2025	P2202400031873050 31006	PT. MANDALA MULTIFINANCE TBK	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	23 Desember 2025	
27	000027/SKPD-REKLAME/II/2025	18 Februari 2025	P2202400008773050 31006	PT. BERKAH BERSAMA GEMILANG	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	3,200,000	3,200,000		3,200,000	-	3,200,000	-	10 Maret 2025	
28	000028/SKPD-REKLAME/II/2025	18 Februari 2025	P2202400008773050 31006	PT. BERKAH BERSAMA GEMILANG	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	425,000	425,000		425,000	-	425,000	-	10 Maret 2025	
29	000029/SKPD-REKLAME/II/2025	18 Februari 2025	P2202400008773050 31006	PT. BERKAH BERSAMA GEMILANG	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,480,000	1,480,000		1,480,000	-	1,480,000	-	10 Maret 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendapatan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	000030/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	19 Feb s/d 19 Maret 2025	405,000	405,000		405,000	-	405,000	-	19 Februari 2025	
31	000031/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BIRING BALANG DEKAT PDAM TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	3,162,500	3,162,500		3,162,500	-	3,162,500	-	9 Mei 2025	
32	000032/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BIRING BALANG DEKAT PDAM TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
33	000033/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (CANREGO, POLONGBANGKENG SELATAN)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
34	000034/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (CANREGO, POLONGBANGKENG SELATAN)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
35	000035/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (GALESONG AENG TOWA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
36	000036/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (GALESONG AENG TOWA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
37	000037/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BONTOKADDOPEPE TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
38	000038/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BONTOKADDOPEPE TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
39	000039/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INCE HUSAIN TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
40	000040/SKPD-REKLAME/II/2025	20 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (INCE HUSAIN TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
41	000041/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS BONTOLOE TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
42	000042/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS BONTOLOE TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
43	000043/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (MANGARABOMBANG TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
44	000044/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (MANGARABOMBANG TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
45	000045/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (TOPEJAWA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendapatan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	000046/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (TOPEJAWA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
47	000047/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BULUDOANG TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
48	000048/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BULUDOANG TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
49	000049/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
50	000050/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
51	000051/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (H. DEWAKANG DG TIRO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
52	000052/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (H. DEWAKANG DG TIRO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
53	000053/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (DIPONEGORO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
54	000054/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (DIPONEGORO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
55	000055/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS GALESONG KOTA)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
56	000056/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS GALESONG KOTA)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
57	000057/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (GALESONG KOTA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
58	000058/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (GALESONG KOTA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
59	000059/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (SULTAN HASANUDDIN TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
60	000060/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (SULTAN HASANUDDIN TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
61	000061/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (GALESONG UTARA)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
62	000062/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (GALESONG UTARA)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
63	000063/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BONTOSUNGGU TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	000064/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BONTOSUNGGU TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
65	000065/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (PALLEKO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
66	000066/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (PALLEKO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
67	000067/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (SANROBONE TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
68	000068/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (SANROBONE TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
69	000069/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS GALESONG BODDIA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
70	000070/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POROS GALESONG BODDIA TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
71	000071/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (RANGGONG DG ROMO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
72	000072/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (RANGGONG DG ROMO TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
73	000073/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BONTOKASSI TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
74	000074/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (BONTOKASSI TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
75	000075/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POLOMBANGKENG TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
76	000076/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POLOMBANGKENG TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
77	000077/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (TAMASAJU TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,581,250	1,581,250		1,581,250	-	1,581,250	-	9 Mei 2025	
78	000078/SKPD-REKLAME/II/2025	24 Februari 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (TAMASAJU TAKALAR)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	9 Mei 2025	
79	000079/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202500002273059 99999	PT. MITRA BISNIS KELUARGA	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	128,125	128,125		128,125	-	128,125	-	11 Maret 2025	
80	000080/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	59,375	59,375		59,375	-	59,375	-	13 Maret 2025	
81	000081/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	70,313	70,313		70,313	-	70,313	-	13 Maret 2025	
82	000082/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	243,750	243,750		243,750	-	243,750	-	13 Maret 2025	
83	000083/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	412,500	412,500		412,500	-	412,500	-	13 Maret 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	000084/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	84,375	84,375		84,375	-	84,375	-	13 Maret 2025	
85	000085/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	100,000	100,000		100,000	-	100,000	-	13 Maret 2025	
86	000086/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	593,750	593,750		593,750	-	593,750	-	13 Maret 2025	
87	000087/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	421,875	421,875		421,875	-	421,875	-	13 Maret 2025	
88	000088/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	731,250	731,250		731,250	-	731,250	-	13 Maret 2025	
89	000089/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	2,337,500	2,337,500		2,337,500	-	2,337,500	-	13 Maret 2025	
90	000090/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	1,181,250	1,181,250		1,181,250	-	1,181,250	-	13 Maret 2025	
91	000091/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	1,200,000	1,200,000		1,200,000	-	1,200,000	-	13 Maret 2025	
92	000092/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	59,375	59,375		59,375	-	59,375	-	13 Maret 2025	
93	000093/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	81,250	81,250		81,250	-	81,250	-	13 Maret 2025	
94	000094/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	1,168,750	1,168,750		1,168,750	-	1,168,750	-	13 Maret 2025	
95	000095/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	100,000	100,000		100,000	-	100,000	-	13 Maret 2025	
96	000096/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	118,750	118,750		118,750	-	118,750	-	13 Maret 2025	
97	000097/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	140,625	140,625		140,625	-	140,625	-	13 Maret 2025	
98	000098/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	162,500	162,500		162,500	-	162,500	-	13 Maret 2025	
99	000099/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	618,750	618,750		618,750	-	618,750	-	13 Maret 2025	
100	000100/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	07 Maret 2025 s/d 13 Maret 2025	200,000	200,000		200,000	-	200,000	-	13 Maret 2025	
101	000101/SKPD-REKLAME/III/2025	11 Maret 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	09 Maret 2025 s/d 22 Maret 2025	243,750	243,750		243,750	-	243,750	-	14 Maret 2025	
102	000102/SKPD-REKLAME/III/2025	13 Maret 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (POINT COFFE)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	775,000	581,250	193,750	775,000	-	775,000	-	15-Sep-2025	
103	000103/SKPD-REKLAME/III/2025	13 Maret 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (YUMMY CHOISE)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	775,000	581,250	193,750	775,000	-	775,000	-	15-Sep-2025	
104	000104/SKPD-REKLAME/IV/2025	08 April 2025	P2202500002473059 99999	CIPTA KARYA MANDIRI	08 April 2025 s/d 05 Mei 2025	1,137,500	1,137,500		1,137,500	-	1,137,500	-	11 April 2025	
105	000105/SKPD-REKLAME/IV/2025	13 April 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	13 April 2025 s/d 26 April 2025	975,000	975,000		975,000	-	975,000	-	8 Mei 2025	
106	000106/SKPD-REKLAME/IV/2025	16 April 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	9,400,000	7,050,000	2,350,000	9,400,000	-	9,400,000	-	17 April 2025	
107	000107/SKPD-REKLAME/IV/2025	16 April 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	4,700,000	3,525,000	1,175,000	4,700,000	-	4,700,000	-	17 April 2025	
108	000108/SKPD-REKLAME/IV/2025	22 April 2025	P2202400021273059 99999	PT. MODERN JAYA SENTOSA	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,700,000			1,700,000	-	1,700,000	-	24 April 2025	
109	000109/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400001573050 40018	PT. TIRTA SUKSES PERKASA	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	775,000			775,000	-	775,000	-	04 Juli 2025	
110	000110/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400021773059 999	CV. KREASI PISANG INDONESIA	25 April 2025 s/d 24 April 2026	1,480,000	986,667	493,333	1,480,000	-	1,480,000	-	14-May-25	
111	000111/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400021773059 999	CV. KREASI PISANG INDONESIA	25 April 2025 s/d 24 April 2026	1,143,750	762,500	381,250	1,143,750	-	1,143,750	-	14-May-25	
112	000112/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	23 April 2025 sd 29 April 2025	962,500	962,500		962,500	-	962,500	-	23 April 2025	
113	000113/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400026273050 31006	J&T EXPRESS	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	880,000	880,000		880,000	-	880,000	-	7 Jan 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	000114/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400026273050 31006	J&T EXPRESS	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	362,500	362,500		362,500	-	362,500	-	7 Jan 2025	
115	000115/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400026273050 31006	J&T EXPRESS	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	880,000	880,000		880,000	-	880,000	-	19 Juni 2025	
116	000116/SKPD-REKLAME/IV/2025	23 April 2025	P2202400026273050 31006	J&T EXPRESS	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	362,500	362,500		362,500	-	362,500	-	19 Juni 2025	
117	000117/SKPD-REKLAME/IV/2025	25 April 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	25 April 2025 s/d 22 Mei 2025	495,000	495,000		495,000	-	495,000	-	19 Mei 2025	
118	000118/SKPD-REKLAME/IV/2025	25 April 2025	P2202400020073059 99999	CV SINAR LOGAM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,560,000	2,560,000		2,560,000	-	2,560,000	-	05 Juni 2025	
119	000119/SKPD-REKLAME/IV/2025	25 April 2025	P2202400020073059 99999	CV SINAR LOGAM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,587,500	1,587,500		1,587,500	-	1,587,500	-	05 Juni 2025	
120	000120/SKPD-REKLAME/V/2025	19 Mei 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	19 Mei 2025 s/d 15 Juni 2025	880,000	880,000		880,000	-	880,000	-	19 Mei 2025	
121	000121/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	118,750	118,750		118,750	-	118,750	-	3 Juni 2025	
122	000122/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	1,137,500	1,137,500		1,137,500	-	1,137,500	-	3 Juni 2025	
123	000123/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	962,500	962,500		962,500	-	962,500	-	3 Juni 2025	
124	000124/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	168,750	168,750		168,750	-	168,750	-	3 Juni 2025	
125	000125/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	600,000	600,000		600,000	-	600,000	-	3 Juni 2025	
126	000126/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400025773059 99999	PT. BANK MANDIRI	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	14 Juli 2025	
127	000127/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400025773059 99999	PT. BANK MANDIRI	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	14 Juli 2025	
128	000128/SKPD-REKLAME/V/2025	28 Mei 2025	P2202400025773059 99999	PT. BANK MANDIRI	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,150,000	1,150,000		1,150,000	-	1,150,000	-	14 Juli 2025	
129	000129/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (NAILA CELL)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
130	000130/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (TK. ARDILLAH)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
131	000131/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (TK. RENALDI)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
132	000132/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (TK. AINI)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
133	000133/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (KASMA)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
134	000134/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (KS. 89)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
135	000135/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (KIOS ITA 59)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
136	000136/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (MART 77)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
137	000137/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (TK. WALDI)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
138	000138/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (ICHWAL SELULER)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
139	000139/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (SINAR HARAPAN, SYAMSIAH)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
140	000140/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (HARAPAN JAYA)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
141	000141/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (TOKO RATU)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
142	000142/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (DG NARANG)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,150,000	862,500	287,500	1,150,000	-	1,150,000	-	10 Juni 2025	
143	000143/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (LANTANG MANDIRI)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	412,500	309,375	103,125	412,500	-	412,500	-	10 Juni 2025	
144	000144/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	118,750	118,750		118,750	-	118,750	-	10 Juni 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	000146/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	1,375,000	1,375,000		1,375,000	-	1,375,000	-	10 Juni 2025	
146	000147/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	168,750	168,750		168,750	-	168,750	-	10 Juni 2025	
147	000148/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	600,000	600,000		600,000	-	600,000	-	10 Juni 2025	
148	000149/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	118,750	118,750		118,750	-	118,750	-	10 Juni 2025	
149	000150/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	1,625,000	1,625,000		1,625,000	-	1,625,000	-	10 Juni 2025	
150	000151/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	687,500	687,500		687,500	-	687,500	-	10 Juni 2025	
151	000152/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	843,750	843,750		843,750	-	843,750	-	10 Juni 2025	
152	000153/SKPD-REKLAME/VI/2025	02 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	28 Mei 2025 s/d 03 Juni 2025	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	1,000,000	-	10 Juni 2025	
153	000154/SKPD-REKLAME/VI/2025	04 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	04 Juni 2025 sd 02 Juli 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	4 Juni 2025	
154	000155/SKPD-REKLAME/VI/2025	20 Juni 2025	P2202400032173059 99999	CV. POINT PLUS INDONESIA (KIOS FARIDA DG SIANG 01)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	950,000	950,000		950,000	-	950,000	-	7 Juli 2025	
155	000156/SKPD-REKLAME/VI/2025	20 Juni 2025	P2202400032173059 99999	CV. POINT PLUS INDONESIA (TOKO DG TANNING)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	762,500	762,500		762,500	-	762,500	-	7 Juli 2025	
156	000157/SKPD-REKLAME/VI/2025	20 Juni 2025	P2202400032173059 99999	CV. POINT PLUS INDONESIA (KIOS SANDI 69)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,137,500	1,064,500		1,064,500	-	1,064,500	73,000.00	7 Juli 2025	
157	000158/SKPD-REKLAME/VI/2025	20 Juni 2025	P2202400032173059 99999	CV. POINT PLUS INDONESIA (KIOS MIRNA 02)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	762,500	762,500		762,500	-	762,500	-	7 Juli 2025	
158	000159/SKPD-REKLAME/VI/2025	20 Juni 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	23 April 2025 s/d 22 April 2026	4,700,000	3,525,000	1,175,000	4,700,000	-	4,700,000	-	25 Juni 2025	
159	000160/SKPD-REKLAME/VI/2025	24 Juni 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	23 Juni 2025 s/d 22 Juli 2025	2,700,000	2,700,000		2,700,000	-	2,700,000	-	25 Juni 2025	
160	000161/SKPD-REKLAME/VII/2025	03 Juli 2025	P2202400021273059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI (TOKO MEGA JAYA)	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	362,500	271,875	90,625	362,500	-	362,500	-	10 Juni 2025	
161	000162/SKPD-REKLAME/VII/2025	03 Juli 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	03 Juli 2025 s/d 30 Juli 2025	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	1,000,000	-	4 Juli 2025	
162	000163/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
163	000164/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	862,500	862,500		862,500	-	862,500	-	14 Juli 2025	
164	000165/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
165	000166/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	862,500	862,500		862,500	-	862,500	-	14 Juli 2025	
166	000167/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
167	000168/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	14 Juli 2025	
168	000169/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
169	000170/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	14 Juli 2025	
170	000171/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
171	000172/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	14 Juli 2025	
172	000173/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
173	000174/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	612,500	612,500		612,500	-	612,500	-	14 Juli 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	000175/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	18 November 2025	
175	000176/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,112,500	1,112,500		1,112,500	-	1,112,500	-	18 November 2025	
176	000177/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	1 Oktober 2025	
177	000178/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	987,500	987,500		987,500	-	987,500	-	1 Oktober 2025	
178	000179/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	3,590,000	3,590,000		3,590,000	-	3,590,000	-	14 Juli 2025	
179	000180/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	14 Juli 2025	
180	000181/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
181	000182/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	14 Juli 2025	
182	000183/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
183	000184/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	14 Juli 2025	
184	000185/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
185	000186/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	862,500	862,500		862,500	-	862,500	-	14 Juli 2025	
186	000187/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
187	000188/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	14 Juli 2025	
188	000189/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
189	000190/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	14 Juli 2025	
190	000191/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	14 Juli 2025	
191	000192/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	14 Juli 2025	
192	000193/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	15 Juli 2025	
193	000194/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	15 Juli 2025	
194	000195/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	15 Juli 2025	
195	000196/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	987,500	987,500		987,500	-	987,500	-	15 Juli 2025	
196	000197/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	18 November 2025	
197	000198/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	18 November 2025	
198	000199/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	15 Juli 2025	
199	000200/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	800,000	800,000		800,000	-	800,000	-	15 Juli 2025	
200	000201/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	18 November 2025	
201	000202/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	862,500	862,500		862,500	-	862,500	-	18 November 2025	
202	000203/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	15 Juli 2025	
203	000204/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	612,500	612,500		612,500	-	612,500	-	15 Juli 2025	
204	000205/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	18 November 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	000206/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	987,500	987,500		987,500	-	987,500	-	18 November 2025	
206	000207/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	BEAN SPOT	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	15 Juli 2025	
207	000208/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	BEAN SPOT	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	15 Juli 2025	
208	000209/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	BEAN SPOT	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	15 Juli 2025	
209	000210/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	BEAN SPOT	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	15 Juli 2025	
210	000211/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,795,000	1,795,000		1,795,000	-	1,795,000	-	1 Oktober 2025	
211	000212/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	1 Oktober 2025	
212	000213/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,795,000	1,346,250	448,750	1,795,000	-	1,795,000	-	1 Oktober 2025	
213	000214/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	800,000	600,000	200,000	800,000	-	800,000	-	1 Oktober 2025	
214	000215/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,795,000	1,346,250	448,750	1,795,000	-	1,795,000	-	1 Oktober 2025	
215	000216/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	987,500	740,625	246,875	987,500	-	987,500	-	1 Oktober 2025	
216	000217/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	1,795,000	1,346,250	448,750	1,795,000	-	1,795,000	-	1 Oktober 2025	
217	000218/SKPD-REKLAME/VII/2025	08 Juli 2025	P2202400011373059 99999	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Tbk	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	925,000	693,750	231,250	925,000	-	925,000	-	1 Oktober 2025	
218	000219/SKPD-REKLAME/VII/2025	09 Juli 2025	P2202500002873050 31006	PT. PEGADAIAN CABANG TAKALAR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,412,500	1,412,500		1,412,500	-	1,412,500	-	17 Oktober 2025	
219	000220/SKPD-REKLAME/VII/2025	09 Juli 2025	P2202500002873050 31006	PT. PEGADAIAN CAB TAKALAR (UNIT PEMBANTU CABANG SENTRAL)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,412,500	1,412,500		1,412,500	-	1,412,500	-	17 Oktober 2025	
220	000221/SKPD-REKLAME/VII/2025	09 Juli 2025	P2202500002873050 31006	PT. PEGADAIAN CAB TAKALAR (UNIT PEMBANTU CABANG MANGADU)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,130,000	1,130,000		1,130,000	-	1,130,000	-	17 Oktober 2025	
221	000222/SKPD-REKLAME/VII/2025	09 Juli 2025	P2202500002873050 31006	PT. PEGADAIAN CABANG TAKALAR (UNIT PEMBANTU CABANG CANREGO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,412,500	1,412,500		1,412,500	-	1,412,500	-	17 Oktober 2025	
222	000223/SKPD-REKLAME/VII/2025	09 Juli 2025	P2202500002873050 31006	PT. PEGADAIAN CABANG TAKALAR (UNIT PEMBANTU CABANG PALLEKO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,412,500	1,412,500		1,412,500	-	1,412,500	-	17 Oktober 2025	
223	000224/SKPD-REKLAME/VII/2025	09 Juli 2025	P2202500002873050 31006	PT. PEGADAIAN CABANG TAKALAR (UNIT PEMBANTU CABANG TALA-TALA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,412,500	1,412,500		1,412,500	-	1,412,500	-	17 Oktober 2025	
224	000225/SKPD-REKLAME/VII/2025	09 Juli 2025	P2202500002873050 31006	PT. PEGADAIAN CABANG TAKALAR (UNIT PEMBANTU CABANG PATTALLASSANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,412,500	1,412,500		1,412,500	-	1,412,500	-	17 Oktober 2025	
225	000226/SKPD-REKLAME/VII/2025	28 Juli 2025	P1202500012073050 31001	WE DRINK	01 Juni 2025 s/d 31 Mei 2026	1,887,500	1,101,042	786,458	1,887,500	-	1,887,500	-	12 Agustus 2025	
226	000227/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400025273050 31006	PT. DAYA INDAH YASA (MR DIY)	01 September 2025 s/d 31 Agustus 2026	3,775,000	1,258,333	2,516,667	3,775,000	-	3,775,000	-	4 September 2025	
227	000228/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400025273050 31006	PT. DAYA INDAH YASA (MR DIY)	01 September 2025 s/d 31 Agustus 2026	1,041,250	347,083	694,167	1,041,250	-	1,041,250	-	4 September 2025	
228	000229/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400025273050 31006	PT. DAYA INDAH YASA (MR DIY)	01 September 2025 s/d 31 Agustus 2026	128,125	42,708	85,417	128,125	-	128,125	-	4 September 2025	
229	0000003/09/2025-001	12 Agustus 2025	P2202400025273050 31006	PT. DAYA INDAH YASA (MR DIY)	01 September 2025 s/d 31 Agustus 2026	128,125	42,708	85,417	128,125	-	128,125	-	4 September 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	000230/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400026573050 60003	PT. DAYA INDAH YASA	11 Mei 2025 s/d 10 Mei 2026	3,088,000	1,801,333	1,286,667	3,088,000	-	3,088,000	-	4 September 2025	
231	000231/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400026573050 60003	PT. DAYA INDAH YASA	11 Mei 2025 s/d 10 Mei 2026	1,222,344	713,034	509,310	1,222,344	-	1,222,344	-	4 September 2025	
232	000232/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400026573050 60003	PT. DAYA INDAH YASA	11 Mei 2025 s/d 10 Mei 2026	179,688	104,818	74,870	179,688	-	179,688	-	4 September 2025	
233	000233/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400026573050 60003	PT. DAYA INDAH YASA	11 Mei 2025 s/d 10 Mei 2026	142,656	83,216	59,440	142,656	-	142,656	-	4 September 2025	
234	000234/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400021273059 99999	PT. DJARUM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,687,500	1,687,500		1,687,500	-	1,687,500	-	3 September 2025	
235	000235/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400020473059 99999	PT. DJARUM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	7,109,375	7,109,375		7,109,375	-	7,109,375	-	3 September 2025	
236	000236/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400020473059 99999	PT. DJARUM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	6,900,000	6,900,000		6,900,000	-	6,900,000	-	3 September 2025	
237	000237/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400020473059 99999	PT. DJARUM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	725,000	725,000		725,000	-	725,000	-	3 September 2025	
238	000238/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400020473059 99999	PT. DJARUM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	440,625	440,625		440,625	-	440,625	-	3 September 2025	
239	000239/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400020473059 99999	PT. DJARUM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,790,625	1,790,625		1,790,625	-	1,790,625	-	3 September 2025	
240	000240/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400020473059 99999	PT. DJARUM	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	3 September 2025	
241	000241/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400021973059 99999	PT. SHARP ELEKTRONIK INDONESIA (TOKO PRIMA JAYA)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	2,087,500	2,087,500		2,087,500	-	2,087,500	-	2 September 2025	
242	000242/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400021973059 99999	PT. SHARP ELEKTRONIK INDONESIA (AA ELEKTRONIK)	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	3,575,000	3,575,000		3,575,000	-	3,575,000	-	2 September 2025	
243	000243/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400008673050 31006	PT. YOTTA BERKAH MULIA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	30 Desember 2025	
244	000244/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P2202400008673050 31006	PT. YOTTA BERKAH MULIA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	134,375	134,375		134,375	-	134,375	-	30 Desember 2025	
245	000245/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P1202400027473050 31001	MOMOYO	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	962,500	962,500		962,500	-	962,500	-	21 Agustus 2025	
246	000246/SKPD-REKLAME/VIII/2025	12 Agustus 2025	P1202400027473050 31001	MOMOYO	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	284,375	284,375		284,375	-	284,375	-	21 Agustus 2025	
247	000247/SKPD-REKLAME/VIII/2025	19 Agustus 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	15 Agustus s/d 21 Agustus 2025	97,500	97,500		97,500	-	97,500	-	19 September 2025	
248	000248/SKPD-REKLAME/VIII/2025	19 Agustus 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	15 Agustus s/d 21 Agustus 2025	73,125	73,125		73,125	-	73,125	-	19 September 2025	
249	000249/SKPD-REKLAME/VIII/2025	19 Agustus 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	15 Agustus s/d 25 Agustus 2025	243,750	243,750		243,750	-	243,750	-	19 September 2025	
250	000250/SKPD-REKLAME/VIII/2025	19 Agustus 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	15 Agustus s/d 12 September 2025	337,500	337,500		337,500	-	337,500	-	16 Agust 2025	
251	000251/SKPD-REKLAME/VIII/2025	19 Agustus 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	15 Agustus s/d 12 September 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	16 Agust 2025	
252	000252/SKPD-REKLAME/VIII/2025	19 Agustus 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	31 Mei 2025 s/d 01 Juni 2026	1,331,000	776,417	554,583	1,331,000	-	1,331,000	-	15 September 2025	
253	000253/SKPD-REKLAME/VIII/2025	19 Agustus 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	31 Mei 2025 s/d 01 Juni 2026	590,000	344,167	245,833	590,000	-	590,000	-	8 September 2025	
254	000254/SKPD-REKLAME/VIII/2025	20 Agustus 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (YUMMY CHOISE)	26 Agustus 2025 s/d 25 Agustus 2026	775,000	258,333	516,667	775,000	-	775,000	-	8 September 2025	
255	000255/SKPD-REKLAME/VIII/2025	21 Agustus 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	01 Oktober 2025 s/d 30 September 2026	1,581,250	395,313	1,185,938	1,581,250	-	1,581,250	-	15 September 2025	
256	000256/SKPD-REKLAME/VIII/2025	21 Agustus 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	01 Oktober 2025 s/d 30 September 2026	1,300,000	325,000	975,000	1,300,000	-	1,300,000	-	8 September 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	000257/SKPD-REKLAME/VIII/2025	21 Agustus 2025	P2202400001973050 30002	PT. INDOMARCO PRISMATAMA (SAY BREAD)	01 Oktober 2025 s/d 30 September 2026	775,000	193,750	581,250	775,000	-	775,000	-	8 September 2025	
258	000258/SKPD-REKLAME/VIII/2025	21 Agustus 2025	P2202500000473050 31006	PT. SURACO JAYA ABADI MOTOR CAB.TAKALAR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	1,000,000	-	30 Desember 2025	
259	000259/SKPD-REKLAME/VIII/2025	21 Agustus 2025	P2202500000473050 31006	PT. SURACO JAYA ABADI MOTOR CAB.TAKALAR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	331,250	331,250		331,250	-	331,250	-	30 Desember 2025	
260	000260/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400025873059 99999	CV. SULAWESI ADVERTISING	01 Agustus s/d 31 Juli 2026	4,700,000	1,958,333	2,741,667	4,700,000	-	4,700,000	-	11 September 2025	
261	000261/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	03 September s/d 02 Oktober 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	3-Sep-2025	
262	000262/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	162,500	162,500		162,500	-	162,500	-	11-Sep-2025	
263	000263/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	687,500	687,500		687,500	-	687,500	-	11-Sep-2025	
264	000264/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	168,750	168,750		168,750	-	168,750	-	11-Sep-2025	
265	000265/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	600,000	600,000		600,000	-	600,000	-	11-Sep-2025	
266	000266/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	162,500	162,500		162,500	-	162,500	-	11-Sep-2025	
267	000267/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	137,500	137,500		137,500	-	137,500	-	11-Sep-2025	
268	000268/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	168,750	168,750		168,750	-	168,750	-	11-Sep-2025	
269	000269/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	400,000	400,000		400,000	-	400,000	-	11-Sep-2025	
270	000270/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	162,500	162,500		162,500	-	162,500	-	11-Sep-2025	
271	000271/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	275,000	275,000		275,000	-	275,000	-	11-Sep-2025	
272	000272/SKPD-REKLAME/IX/2025	11 September 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	14 September s/d 20 September 2025	400,000	400,000		400,000	-	400,000	-	11-Sep-2025	
273	000273/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400026173050 31006	BANK SYARIAH INDONESIA KCP. TAKALAR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,150,000	1,150,000		1,150,000	-	1,150,000	-	24 Desember 2025	
274	000274/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400026173050 31006	BANK SYARIAH INDONESIA KCP. TAKALAR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500	362,500		362,500	-	362,500	-	24 Desember 2025	
275	000275/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (TIKOLLA DG LEO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	13 Nov 2025	
276	000276/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (TIKOLLA DG LEO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	167,188	167,188		167,188	-	167,188	-	13 Nov 2025	
277	000277/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (MAPPAJALLING DG KAWANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	13 Nov 2025	
278	000278/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (MAPPAJALLING DG KAWANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	143,750	143,750		143,750	-	143,750	-	13 Nov 2025	
279	000279/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (GALESONG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	13 Nov 2025	
280	000280/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (GALESONG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	143,750	143,750		143,750	-	143,750	-	13 Nov 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendapatan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
281	000281/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (PALLEKO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	13 Nov 2025	
282	000282/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400008173050 70002	HISANA AYAM GEPREK (PALLEKO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	143,750	143,750		143,750	-	143,750	-	13 Nov 2025	
283	000283/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	14 Oktober 2025 s/d 27 Oktober 2025	487,500	487,500		487,500	-	487,500	-	8 Desember 2025	
284	000284/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	14 Oktober 2025 s/d 27 Oktober 2025	956,250	956,250		956,250	-	956,250	-	8 Desember 2025	
285	000285/SKPD-REKLAME/X/2025	20 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	753,125	753,125		753,125	-	753,125	-	3 November 2025	
286	000286/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
287	000287/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
288	000288/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
289	000289/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
290	000290/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
291	000291/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
292	000292/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	25 Oktober s/d 31 Oktober 2025	5,362,500	5,362,500		5,362,500	-	5,362,500	-	30 Okt 2025	
293	000293/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	25 Oktober s/d 31 Oktober 2025	400,000	400,000		400,000	-	400,000	-	30 Okt 2025	
294	000294/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	25 Oktober s/d 31 Oktober 2025	506,250	506,250		506,250	-	506,250	-	30 Okt 2025	
295	000295/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	25 Oktober s/d 31 Oktober 2025	687,500	687,500		687,500	-	687,500	-	30 Okt 2025	
296	000296/SKPD-REKLAME/X/2025	24 Oktober 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	25 Oktober s/d 31 Oktober 2025	812,500	812,500		812,500	-	812,500	-	30 Okt 2025	
297	000297/SKPD-REKLAME/X/2025	27 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
298	000298/SKPD-REKLAME/X/2025	27 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
299	000299/SKPD-REKLAME/X/2025	27 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
300	000300/SKPD-REKLAME/X/2025	27 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
301	000301/SKPD-REKLAME/X/2025	27 Oktober 2025	P2202400025473050 31006	PT. ADITYA INTI SEJAHTERA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	495,313	495,313		495,313	-	495,313	-	3 November 2025	
302	000302/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P1202400025173050 31006	TOKO NAZMA (TAYLOR, TEXTIL & SPORT)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,650,000				-		2,650,000.00		
303	000303/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P1202400025173050 31006	TOKO NAZMA (INTERIOR)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,650,000				-		2,650,000.00		
304	000304/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P1202400025173050 31006	TOKO NAZMA (DEPAN BANK SULSELBAR)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,650,000				-		2,650,000.00		

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
305	000305/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400021373059 99999	ROCKET CHICKEN TAKALAR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	6 November 2025	
306	000306/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400021373059 99999	ROCKET CHICKEN TAKALAR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	206,250	206,250		206,250	-	206,250	-	6 November 2025	
307	000307/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400021373059 99999	ROCKET CHICKEN TAKALAR	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	962,500	721,875	240,625	962,500	-	962,500	-	12 November 2025	
308	000308/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400021373059 99999	ROCKET CHICKEN TAKALAR	01 April 2025 s/d 31 Maret 2026	206,250	154,688	51,563	206,250	-	206,250	-	12 November 2025	
309	000309/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (TK. GALESONG JAYA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000	1,525,000		1,525,000	-	1,525,000	-	14 November 2025	
310	000310/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (TK. GALESONG JAYA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500	362,500		362,500	-	362,500	-	17 November 2025	
311	000311/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (TK. SINAR MAKMUR)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000				-		675,000.00		
312	000312/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (FARIS JAYA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
313	000313/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (UD. LANCAR JAYA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
314	000314/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (TK. SYAM MUJUR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000				-		675,000.00		
315	000315/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (TK. SYAM MUJUR	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000				-		1,525,000.00		
316	000316/SKPD-REKLAME/X/2025	28 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (MAJU JAYA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
317	000317/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (MAJU JAYA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000				-		1,525,000.00		
318	000318/SKPD-REKLAME/X/2025	13 November 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (UD. RISKY)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
319	000319/SKPD-REKLAME/X/2025	13 November 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (UD. RISKY)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000				-		1,525,000.00		
320	000320/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (H. UMAR SAINONG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
321	000321/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400026773059 99999	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS (TOKO SYAM MUJUR)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
322	000322/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400025373050 31001	APOTEK KIMIA FARMA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,650,000	2,650,000		2,650,000	-	2,650,000	-	24 Desember 2025	
323	000323/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400025373050 31001	APOTEK KIMIA FARMA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	253,125	253,125		253,125	-	253,125	-	24 Desember 2025	
324	000324/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400000373050 60011	CV. WISATA PANTAI BAHARI	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,150,000	1,150,000		1,150,000	-	1,150,000	-	30 Desember 2025	
325	000325/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400032373059 99999	PT. INDOOFOOD CBP SUKSES MAKMUR. TBK	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,075,000				-		1,075,000.00		
326	000326/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400032373059 99999	PT. INDOOFOOD CBP SUKSES MAKMUR. TBK	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,075,000				-		1,075,000.00		
327	000327/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400032373059 99999	PT. INDOOFOOD CBP SUKSES MAKMUR. TBK	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,075,000				-		1,075,000.00		
328	000328/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400032373059 99999	PT. INDOOFOOD CBP SUKSES MAKMUR. TBK	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,075,000				-		1,075,000.00		

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
329	000329/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400032373059 99999	PT. INDOOFOOD CBP SUKSES MAKMUR. TBK	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,075,000				-		1,075,000.00		
330	000330/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P2202400031973050 31006	CV. TAKALAR MITRA GROUP	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	775,000	775,000		775,000	-	775,000	-	24 Desember 2025	
331	000331/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P1202500000373050 31001	PT. MULTI GARMENJAYA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,562,500	2,562,500		2,562,500	-	2,562,500	-	17 November 2025	
332	000332/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P1202500000373050 31001	PT. MULTI GARMENJAYA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,360,000	2,360,000		2,360,000	-	2,360,000	-	17 November 2025	
333	000333/SKPD-REKLAME/X/2025	29 Oktober 2025	P1202500000273050 31001	PT. IDOLA INSANI	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,562,500	2,562,500		2,562,500	-	2,562,500	-	7 November 2025	
334	000334/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P1202500000273050 31001	PT. IDOLA INSANI	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,360,000	2,360,000		2,360,000	-	2,360,000	-	7 November 2025	
335	000335/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P1202500000273050 31001	PT. IDOLA INSANI	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	481,250	481,250		481,250	-	481,250	-	7 November 2025	
336	000336/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P1202500000373050 31001	PT. MULTI GARMEN JAYA	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	425,000	425,000		425,000	-	425,000	-	17 November 2025	
337	000337/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P1202500000673050 31001	I'M FASHION STORE	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	650,000	650,000		650,000	-	650,000	-	23 Januari 2025	
338	000338/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022273059 99999	PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,700,000	1,700,000		1,700,000	-	1,700,000	-	3 November 2025	
339	000339/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022273059 99999	PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	1,700,000	1,700,000		1,700,000	-	1,700,000	-	3 November 2025	
340	000340/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022773050 31007	CV, IRSAN GROUP TITIP GADAI (MANONGKOKI)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000	1,525,000		1,525,000	-	1,525,000	-	9 April 2025	
341	000341/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022773050 31007	CV, IRSAN GROUP TITIP GADAI (MANONGKOKI)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	568,750	568,750		568,750	-	568,750	-	9 April 2025	
342	000342/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022773050 31007	CV, IRSAN GROUP TITIP GADAI (MANONGKOKI)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500	362,500		362,500	-	362,500	-	9 April 2025	
343	000343/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022773050 31007	CV. IRSAN GROUP TITIP GADAI (KALABBIRANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,150,000	1,150,000		1,150,000	-	1,150,000	-	9 April 2025	
344	000344/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022773050 31007	CV. IRSAN GROUP TITIP GADAI (KALABBIRANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	9 April 2025	
345	000345/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202400022773050 31007	IRSAN PHONE 09 TITIP GADAI (PATTALLASSANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	675,000	675,000		675,000	-	675,000	-	9 April 2025	
346	000346/SKPD-REKLAME/X/2025	30 Oktober 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	31 Oktober 2025 s/d 6 November 2025	243,750	243,750		243,750	-	243,750	-	24 Desember 2025	
347	000347/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P22025000164730504	BRI CABANG TAKALAR (BRI CABANG TAKALAR)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	962,500				-		962,500.00		
348	000348/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P22025000164730504	BRI CABANG TAKALAR (BRI CABANG TAKALAR)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		
349	000349/SKPD-REKLAME/XI/2025	27 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000				-		1,525,000.00		
350	000350/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P22025000164730504	BRI CABANG TAKALAR (BRI UNIT BONTOLOE)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		
351	000351/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P22025000164730504	BRI CABANG TAKALAR (BRI UNIT GALESONG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		
352	000352/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P22025000164730504	BRI CABANG TAKALAR (BRI UNIT BONTOLEBANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
353	000353/SKPD-REKLAME/XI/2025	27 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
354	000354/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (BRI UNIT CANREGO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		
355	000355/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (BRI UNIT PATTALLASSANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		
356	000356/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (BRI UNIT PASAR SENTRAL)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		
357	000357/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (BRI UNIT PALLEKO)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,260,625				-		1,260,625.00		
358	000358/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (ATM SPBU TOPEJAWA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	805,000				-		805,000.00		
359	000359/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (ATM PABRIK GULA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	805,000				-		805,000.00		
360	000360/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (ATM RSU PADJONGA)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	805,000				-		805,000.00		
361	000361/SKPD-REKLAME/XI/2025	11 November 2025	P2202500016473050 4	BRI CABANG TAKALAR (ATM SPBU KALABBIRANG)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	805,000				-		805,000.00		
362	000362/SKPD-REKLAME/XI/2025	27 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000				-		1,525,000.00		
363	000363/SKPD-REKLAME/XI/2025	27 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,806,250				-		1,806,250.00		
364	000364/SKPD-REKLAME/XI/2025	27 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,806,250				-		1,806,250.00		
365	000365/SKPD-REKLAME/XI/2025	27 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,221,875				-		1,221,875.00		
366	000366/SKPD-REKLAME/XI/2025	28 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,337,500				-		1,337,500.00		
367	000367/SKPD-REKLAME/XI/2025	28 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	245,313				-		245,313.00		
368	000368/SKPD-REKLAME/XI/2025	28 November 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	1 November 2025 s/d 31 Oktober 2026	2,537,500	422,917	2,114,583	2,537,500	-	2,537,500	-	27-Nov-2025	
369	000369/SKPD-REKLAME/XI/2025	28 November 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	1 November 2025 s/d 31 Oktober 2026	266,797	44,466	222,331	266,797	-	266,797	-	27-Nov-2025	
370	000370/SKPD-REKLAME/XI/2025	28 November 2025	P2202400011273059 99999	PT. MIDI UTAMA INDONESIA TBK	1 November 2025 s/d 31 Oktober 2026	1,210,000	201,667	1,008,333	1,210,000	-	1,210,000	-	27-Nov-2025	
371	000371/SKPD-REKLAME/XI/2025	28 November 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	596,875				-		596,875.00		
372	000372/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,337,500				-		1,337,500.00		
373	000373/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,221,875				-		1,221,875.00		
374	000374/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,337,500				-		1,337,500.00		
375	000375/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	440,625				-		440,625.00		
376	000376/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendapatan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
377	000377/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,337,500				-		1,337,500.00		
378	000378/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	440,625				-		440,625.00		
379	000379/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,525,000				-		1,525,000.00		
380	000380/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,337,500				-		1,337,500.00		
381	000381/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	362,500				-		362,500.00		
382	000382/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,337,500				-		1,337,500.00		
383	000383/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,150,000				-		1,150,000.00		
384	000384/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	440,625				-		440,625.00		
385	000385/SKPD-REKLAME/XI/2025	2 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	2,087,500				-		2,087,500.00		
386	000386/SKPD-REKLAME/XII/2025	3 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	380,469				-		380,469.00		
387	000387/SKPD-REKLAME/XII/2025	3 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,337,500				-		1,337,500.00		
388	000388/SKPD-REKLAME/XII/2025	8 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	175,000				-		175,000.00		
389	000389/SKPD-REKLAME/XII/2025	3 Desember 2025	P1202400024773050 40012	MAS BROW	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	887,500				-		887,500.00		
390	000390/SKPD-REKLAME/XII/2025	3 Desember 2025	P1202400024773050 40012	MAS BROW	01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025	331,250				-		331,250.00		
391	000391/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (PANAIKANG CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
392	000392/SKPD-REKLAME/XII/2025	8 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	08 Des 2025 s/d 14 Des 2025	296,875	296,875		296,875	-	296,875	-	9 Desember 2025	
393	000393/SKPD-REKLAME/XII/2025	8 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	9 Des 2025 s/d 14 Des 2025	687,500	687,500		687,500	-	687,500	-	9 Desember 2025	
394	000394/SKPD-REKLAME/XII/2025	9 Desember 2025	P2202500001573059 99999	PT. BORONG BULOA JAYA	10 Des 2025 s/d 16 Des 2025	243,750	243,750		243,750	-	243,750	-	24 Desember 2025	
395	000395/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TK. RESTU JAYA)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
396	000396/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO AA ELEKTRONIK)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
397	000397/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO BUDI JAYA)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
398	000398/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO BINTANG TERANG)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
399	000399/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO LUCKY ELEKTRONIK)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	284,375	23,698	260,677	284,375	-	284,375	-	12 Desember 2025	
400	000400/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO BUNDA)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendapatan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401	000401/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO SINAR SURYA)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
402	000402/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO. MAJU JAYA)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
403	000403/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO NELAYAN AZKA)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
404	000404/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO SENTRAL 88 ELEKTRONIK)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	284,375	23,698	260,677	284,375	-	284,375	-	12 Desember 2025	
405	000405/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO KAMELIA)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
406	000406/SKPD-REKLAME/XII/2025	11 Desember 2025	P2202400028173059 99999	PT. BHAKTI IDOLA TAMA (TOKO UD. REZKY)	25 November 2025 s/ 24 November 2026	206,250	17,188	189,063	206,250	-	206,250	-	12 Desember 2025	
407	000407/SKPD-REKLAME/XII/2025	12 Desember 2025	P2202400028073059 99999	PT. WIN ACCESS TELECOMMUNICATION	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,587,500				-		1,587,500.00		
408	000408/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	11 Desember 2025 s/d 10 Januari 2026	337,500	-	337,500	337,500	-	337,500	-	11 Des 2025	
409	000409/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (KEFA CELL)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
410	000410/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (KEFA CELL)	01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	425,000				-		425,000.00		
411	000411/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (KEFA CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	3,950,000				-		3,950,000.00		
412	000412/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (KEFA CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	5,825,000				-		5,825,000.00		
413	000413/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (KEFA CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	143,750				-		143,750.00		
414	000414/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
415	000415/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	284,375				-		284,375.00		
416	000416/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	3,012,500				-		3,012,500.00		
417	000417/SKPD-REKLAME/XII/2025	16 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (EROKA CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
418	000418/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (EROKA CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	568,750				-		568,750.00		
419	000419/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (DEPPAQLATA CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
420	000420/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (IORA CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
421	000421/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (CAHAYA PONSEL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
422	000422/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (CAHAYA PONSEL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,300,000				-		1,300,000.00		
423	000423/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (CAHAYA PONSEL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,300,000				-		1,300,000.00		
424	000424/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (CAHAYA PONSEL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	389,844				-		389,844.00		

No.	SKPD		N.P.W.P.D	Nama WP/WR	Periode	KETETAPAN TAHUN 2025	PENDAPATAN					SISA PIUTANG	TANGGAL BAYAR	Keterangan
							REALISASI SESUAI SKPD			LEBIH/KKURANG BAYAR	TOTAL BAYAR			
	NO.	TANGGAL					pendaptan 2025	pendapatan diterima dimuka	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
425	000425/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (PANAIKANG CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
426	000426/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (ERAFONE)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,587,500				-		1,587,500.00		
427	000427/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (SUMBER ANUGRAH CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
428	000428/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (H2 CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
429	000429/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (MUP CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
430	000430/SKPD-REKLAME/XII/2025	17 Desember 2025	P2202400031673059 99999	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION (PANAIKANG CELL)	1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025	1,571,875				-		1,571,875.00		
431	000431/SKPD-REKLAME/XII/2025	18 Desember 2025	P2202500002473059 99999	CIPTA KARYA MANDIRI	18 Desember 2025 s/d 17 Desember 2026	1,325,000	-	1,325,000	1,325,000	-	1,325,000	-	19 Desember 2025	
432	000432/SKPD-REKLAME/XII/2025	18 Desember 2025	P2202500002473059 99999	CIPTA KARYA MANDIRI	18 Desember 2025 s/d 17 Desember 2026	1,325,000	-	1,325,000	1,325,000	-	1,325,000	-	19 Desember 2025	
433	000433/SKPD-REKLAME/XII/2025	18 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	18 Desember 2025 s/d 15 Januari 2026	337,500	168,750	168,750	337,500	-	337,500	-	18 Desember 2025	
434	000434/SKPD-REKLAME/XII/2025	19 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	19 Desember 2025 s/d 26 Desember 2025	593,750	593,750		593,750	-	593,750	-	23 Desember 2025	
435	000435/SKPD-REKLAME/XII/2025	19 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	19 Desember 2025 s/d 26 Desember 2025	1,375,000	1,375,000		1,375,000	-	1,375,000	-	23 Desember 2025	
436	000436/SKPD-REKLAME/XII/2025	19 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	19 Desember 2025 s/d 26 Desember 2025	421,875	421,875		421,875	-	421,875	-	23 Desember 2025	
437	000437/SKPD-REKLAME/XII/2025	19 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	19 Desember 2025 s/d 26 Desember 2025	500,000	500,000		500,000	-	500,000	-	23 Desember 2025	
438	000438/SKPD-REKLAME/XII/2025	19 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	19 Desember 2025 s/d 26 Desember 2025	2,241,250	2,241,250		2,241,250	-	2,241,250	-	23 Desember 2025	
439	000439/SKPD-REKLAME/XII/2025	22 Desember 2025	P2202400021173059 99999	CV. TAKA KARYA ABADI	22 Desember 2025 s/d 19 Januari 2026	1,012,500	-	1,012,500	1,012,500	-	1,012,500	-	22 Desember 2025	
					TOTAL	486,912,212.00	344,636,489.33	35,322,721.67	382,434,211.00	-	382,434,211.00	104,478,001.00		

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama WP/WR	Jenis Reklame	**Lokasi**	Periode	Penerimaan	Jangka Waktu (Bulan)		Jumlah / Bulan	Saldo Awal Pendapatan diterima di Muka 2025	Penambahan	Pendapatan LO 2025		Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka		Ket
			Pemasangan								**bln**	**Jumlah**	**bln**	**Jumlah**	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
	Hasil Sewa BMD														
1	PT. Bank Sulselbar	Sewa Sebagian Tanah bangunan untuk paymen poin Bank Sulselbar	Kantor BKAD	19-12-2022/19-12-2025	6,840,000.00	36	Bulan	190,000.00	2,090,000.00	-	11	2,090,000.00			
2	PT. Bank Sulselbar	Sewa Sebagian Tanah untuk ATM Bank Sulselbar	Kantor Bupat	19-12-2022/19-12-2025	39,549,000.00	36	Bulan	1,098,583.33	12,084,416.67	-	11	12,084,416.67			
3	PT. Bank Sulselbar	Sewa Sebagian Tanah untuk ATM Bank Sulselbar	Puskesmas Bulukunyi	19-12-2022/19-12-2025	28,494,000.00	36	Bulan	791,500.00	8,706,500.00	-	11	8,706,500.00			
	PT. Bank Sulselbar	Sewa Lokasi ATM Bank SulSelBar	RSUD	1-6-2-24/1-6-2027	75,000,000.00	36	Bulan	2,083,333.33	-		18	37,500,000.00	18	37,500,000.00	
	PT. BNI	Sewa Lokasi ATM Bank BNI	RSUD	15-4-2025/15-4-2026	20,000,000.00	12	Bulan	1,666,666.67	-		8	13,333,333.33	4	6,666,666.67	
Jumlah					**74,883,000.00**			**2,080,083.33**	**22,880,916.67**	**-**		**73,714,250.00**		**44,166,666.67**	

Lampiran 38

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR
DAFTAR UTANG BELANJA
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**1,620,441,810.27**	**-**	**-**			**1,544,883,820.00**	**75,557,990.27**
	Tahun 2008					**6,724,000.00**	**0.00**				**0.00**	**6,724,000.00**
1	CV. MATTOTORANG	Pembangunan TK Satria Cakura			2,310,000.00	2,310,000.00						2,310,000.00
2	CV. SAMUDRA INDONESIA	Rehabilitasi SDN Bontokadatto			2,090,000.00	2,090,000.00						2,090,000.00
3	CV. YUNITA	Rehabilitasi SMU Neg. 1 Takalar			2,324,000.00	2,324,000.00						2,324,000.00
	Tahun 2010					**23,000,000.00**	**0.00**				**0.00**	**23,000,000.00**
5	CV. NUR FITRIANI .	~ SDN No 181 Inp Pattopakang			92,000,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00
6	CV. BINTANG SEJAHTERA .	~ SDN No 56 Lassang II			92,000,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00
7	CV. CAHAYA TIMUR UTAMA	~ SDN No 176 Inp Lengkese II			92,000,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00
8	CV. PALOPO	~ SDN No 222 Inp Sampulungan			92,000,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00
9	CV. ALGAISA UTAMA	~ SDN No 219 Inp Batutaruttu			92,000,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00
	Tahun 2011					**3,292,500.00**	**0.00**				**0.00**	**3,292,500.00**
11	CV. MARIO	Pekerjaan Pengecetan Kantor Dinas Dikpora Kab. Takalar Tahun Anggaran 2011			8,000,000.00	400,000.00						400,000.00
12	CV. MARIO	Pekerjaan Rehabilitasi WC/KM Dikpora Kab. Takalar Tahun Anggaran 2011			20,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
13	CV. Utama Teknik	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Penambahan daya kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar Tahun Anggaran 2011			37,850,000.00	1,892,500.00						1,892,500.00
	Tahun 2012					**14,793,750.27**	**0.00**				**0.00**	**14,793,750.27**
14	CV. CITRA RAMA LESTARI	Pembangunan Pagar TK Da'watul Islamiyah			10,000,000.00	500,000.00						500,000.00
15	CV. EKA CIPTA	Rehabilitasi Ruangan Pengawas Dikpora Takalar			23,625,000.00	1,181,250.00						1,181,250.00
16	CV. RIMA	Pembangunan Lapangan Volly dan Takraw BTN Bombong Indah			28,350,000.00	1,417,500.00						1,417,500.00
17	CV. FATNUR SEJAHTERA	Lanjutan Rehabilitasi Gedung TK. Al-Munawarah Kel. Parangluara			19,950,000.00	997,500.00						997,500.00
18	CV. GOJENGTA	Penyempurnaan Pelataran dan Lantai Gedung TK.Gembira Desa Parangmata			29,950,000.00	1,497,500.27						1,497,500.27
19	CV. CAHAYA PELITA	Pemb. Perpustakaan SDN No. 96 Kalongkong Kec. Galut			92,000,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00
20	CV. RAHMAN PUTRA WAHID	Pemb. Perpustakaan SDN No. 132 Inp. Parasangang Beru Kec.Galesong			92,000,000.00	4,600,000.00						4,600,000.00
	Tahun 2013				**377,245,000.00**	**18,862,250.00**	**0.00**				**0.00**	**18,862,250.00**
21	CV. MANENG JAYA	Rehabilitasi TK Milenium			49,900,000.00	2,495,000.00						2,495,000.00
22	CV. NANANG JAYA	Pembangunan TK Barugaya			47,954,000.00	2,397,700.00						2,397,700.00
23	CV. IRZAL MAULANA KONSTRUKSI	Pembangunan TK Panrita Galesong			185,000,000.00	9,250,000.00						9,250,000.00
24	CV. ZAHRA PUTRI UTAMA	Rehabilitasi Gedung TK Bina Sejahtera 4			46,446,000.00	2,322,300.00						2,322,300.00
25	CV. ALFIAN PUTRA PRATAMA	Pembangunan TK Jabal Nur			47,945,000.00	2,397,250.00						2,397,250.00
	Tahun 2014				**213,496,666.67**	**3,371,000.00**	**0.00**				**0.00**	**3,371,000.00**
26	CV. Fachrul Yasfat Konstruksi	Pembangunan TK dan PAUD di Kepulauan pulau bauluang Desa Mattirobaji Kec. Mapsu			213,496,666.67	3,371,000.00						3,371,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2016					**1,538,490.00**	**-**				**-**	**1,538,490.00**
27	CV. Aulia Mitra Sejahtera	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Adat Accera Kalompoang Kec. Galesong			1,538,490.00	1,538,490.00						1,538,490.00
	Tahun 2017					**3,976,000.00**	**0.00**				**0.00**	**3,976,000.00**
28	**CV. ABYSEKA INDOCIPTA**	Perencanaan teknis TK. Dharma Wanita Bontolebang Galesong Utara, TK. Pertiwi Galesong Utara Kec. Galut sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pendidikan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2017			3,976,000.00	3,976,000.00						3,976,000.00
	Tahun 2024				**1,730,175,700.00**	**1,544,883,820.00**	**0.00**				**1,544,883,820.00**	**0.00**
	CV. MEGA ULENG	Pemasangan Paving Block UPT. SD Negeri 42 Pangembang dan Pembangunan Toilet/Jamban UPT. SD Negeri 42 Pangembang		289/PPK-DISDIKBUD/SPK/X/2024	136,249,400.00	136,249,400.00			73.05/04.0/000019/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/3/2025	3/14/2025	136,249,400.00	0.00
	CV. AVISA RISQY KONSTRUKSI	Rehabilitasi Ruang Kelas UPT. SD Negeri 164 Taipa		327/PPK-DISDIKBUD/SPK/X/2024	198,367,400.00	138,857,180.00			73.05/04.0/000024/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/3/2025	3/19/2025	138,857,180.00	0.00
	CV. APAR PRIMA PERKASA	Pembangunan Pagar UPT. SD Negeri 204 Inpres Balang		191/PPK-DISDIKBUD/SPK/X/2024	179,272,200.00	125,490,540.00			73.05/04.0/000025/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P1/3/2025	3/21/2025	125,490,540.00	0.00
	CV. WIKA KAROMAH UNGGUL	Rehabilitasi Laboratorium UPT. SMP Negeri 1 Mappakasunggu		29/DAU/PPK2-DISDIKBUD/SPK/IX/2024	73,049,000.00	73,049,000.00			73.05/04.0/000033/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/26/2025	73,049,000.00	0.00
	PT. ARCLIP	Pengawasan SD Paket XII	Belanja Modal Jalan Kabupaten Belanja Modal Pagar Belanja Modal Bangunan Kesehatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11/DAU/PPK2-DISDIKBUD/SPK/IX/2024	35,930,700.00	35,930,700.00			73.05/04.0/000039/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/27/2025	35,930,700.00	0.00
	PT. HOTEL KENARI TOWER	Jasa Akomodasi Kegiatan Asesmen Kurikulum Merdeka Belajar Setiap Kepala Satuan Pendidikan		168b/PPK-DISDIKBUD/SPK/XI/2024	64,660,000.00	64,660,000.00			73.05/04.0/000042/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/4/2025	4/15/2025	64,660,000.00	0.00
	PT. LIMA BENUA PERSADA/RAISING HOTEL MAKASSAR	Akomodasi Kegiatan Penguatan Literasi dan Numerasi Tingkat SD Angkatan II		176/PPK-DISDIKBUD/SPK/XII/2024	84,800,000.00	84,800,000.00			73.05/04.0/000036/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/27/2025	84,800,000.00	0.00
	BBPMP Prov. Sulawesi Selatan	Pendidikan dan Pelatihan Asesmen Kepala Sekolah		800.5/116/Disdikbud-GTK/IX/2024	507,500,000.00	507,500,000.00			73.05/04.0/000030/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/24/2025	507,500,000.00	0.00
	ILHAM MASRI BAHTIAR	Pembayaran Honorarium Tim Teknis Pekerjaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) untuk Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2024		800.5/17/DISDIKBUD-SEK/I/2024	96,000,000	24,000,000.00			73.05/04.0/000035/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/26/2025	24,000,000.00	0.00
	CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT	Pengawasan Teknis Pekerjaan TK Paket 1		43/DAU/PPK2-DISDIKBUD/SPK/IX/2024	35,936,000.00	35,936,000.00			73.05/04.0/000040/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/27/2025	35,936,000.00	0.00
	CV. NUR RAHMAN	Pengadaan Baju dan Celana Olahraga		143/SP/PPK-DAU/DISDIKBUD/XII/2024	20,600,000.00	20,600,000.00			73.05/04.0/000029/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/24/2025	20,600,000.00	0.00
	PT. MAKASSAR PALACE/HOTEL GRAND PALACE	Jasa Akomodasi Sosialisasi Pelaksanaan Sekolah Adhiwiatama Tingkat SMP		165/PPK-DISDIKBUD/SPK/XI/2024	51,410,000.00	51,410,000.00			73.05/04.0/000037/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/27/2025	51,410,000.00	0.00
	PT. MAKASSAR PALACE/HOTEL GRAND PALACE	Jasa Akomodasi Sosialisasi Pelaksanaan Sekolah Adhiwiatama Tingkat SD		166/PPK-DISDIKBUD/SPK/XI/2024	51,410,000.00	51,410,000.00			73.05/04.0/000038/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/27/2025	51,410,000.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	CV. NUR RAHMAN	Pembangunan Ruang Kelas TK Bina Anaprasa Pelita Tonasa		79/DAU/PPK2-DISDIKBUD/SPK/XI/2024	194,991,000.00	194,991,000.00			73.05/04.0/000031/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/P2/3/2025	3/21/2025	194,991,000.00	0.00
2. Dinas Kesehatan						**7,088,687,950.00**	**1,156,195,600.00**	**- 45,148,870.00**	**-**	**-**	**6,022,960,641.00**	**2,176,774,039.00**
	Tahun 2008					**81,920,059.00**	**0.00**				**0.00**	**81,920,059.00**
1	CV. KARYA FITRA PERKASA	Pembangunan poskesdes Panyangkalang				6,945,450.00						6,945,450.00
2	CV. ENI UTAMA	Pembangunan poskesdes Lantang				7,005,350.00						7,005,350.00
3	CV. TRY AS	Pembangunan ruang UGD dan poliklinik puskesmas Bulukunyi				51,065,280.00						51,065,280.00
4	CV. CAHAYA LUHUR KARUNIA	Rehabilitasi puskesmas pembantu Bajeng				5,144,650.00						5,144,650.00
5	CV. KUNJUNG MAE	Penyempurnaan puskesmas Galesong Utara				4,154,329.00						4,154,329.00
6	CV. MUHRARIZZAH PRIMA	Rehabilitasi rumah bidan puskesmas Mappakasunggu				2,320,000.00						2,320,000.00
7	CV. RAHMAT UTAMA	Penyempurnaan puskesmas Ko'mara Kecamatan Polobangkeng Utara				1,995,000.00						1,995,000.00
8	CV. USNUL KHATIMAH	Penyempurnaan rumah dokter puskesmas Marbo Kec. Marbo				1,645,000.00						1,645,000.00
9	MEGA MAS UTAMA	Penyempurnaan pustu Sawakong Kec. Galsel				1,645,000.00						1,645,000.00
	Tahun 2009				**385,939,000.00**	**20,657,580.00**	**0.00**				**0.00**	**20,657,580.00**
1	CV. BONTOMATE'NE INDAH	Rehab Pustu Tamasaju Kec. Galut Kab. Takalar		038 / KTR - DINKES/ IV / 2009, 1 April 2009	43,500,000.00	2,175,000.00						2,175,000.00
2	CV. NUR FITRIANI	Rehab Pustu Bontolanra Kec. Galut Kab. Takalar		040 / KTR - DINKES/ IV / 2009, 1 April 2009	46,300,000.00	2,315,000.00						2,315,000.00
3	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Rehab Puskesmas Bulukunyi Kec. Polsel Kab. Takalar		46 / KTR - DINKES/ IV / 2009, 1 April 2009	46,300,000.00	2,315,000.00						2,315,000.00
4	CV. TRI PUTRI KENCANA	Rehabilitasi Pagar Puskesmas Patoppakang		303 / KTR - DINKES/ X / 2009, 6 Oktober 2009	43,943,000.00	2,197,150.00						2,197,150.00
5	CV. ALAM KARYA	Penyempurnaan Poskesdes Lakatong		314 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,909,000.00	1,095,450.00						1,095,450.00
6	CV. CAHAYA BERINGIN	Penyempurnaan Pustu Ko'mara Jauh		307 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	26,343,000.00	1,317,150.00						1,317,150.00
7	CV. INDAH LESTARI	Penyempurnaan Pustu Ma'samaturu		312 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	24,120,000.00	1,206,000.00						1,206,000.00
8	CV. PELITA JAYA	Penyempurnaan Pustu Sabintang		309 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,943,000.00	1,097,150.00						1,097,150.00
9	CV. NUR FITRIANI	Rehabilitasi Pustu Je'ne Tallasa		306 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,943,000.00	1,097,150.00						1,097,150.00
10	CV. ARUNG MANDIRI	Penyempurnaan Pustu Patte'ne		313 / KTR - DINKES/ X / 2009, 06 Oktober 2009	21,943,000.00	1,097,150.00						1,097,150.00
11	CV. HAS FAMILY	Penyempurnaan Puskesmas Polombangkeng Utara Tahap II		311/KTR - DINKES/ X / 2009, 6 Oktober 2009	29,698,000.00	1,484,900.00						1,484,900.00
12	CV. CIPTA PERSADA NUSANTARA	Perencanaan Teknis Penyempurnaan Puskesmas Parangbaddo, Penyempurnaan Ruang UGD Puskesmas Bulukunyi, Rehabilitasi Pustu Je'ne Tallasa dan Penyempurnaan Pustu Sabintang		SPMK NO. /KTR - DINKES/ VII / 2009, 8 Juli 2009	3,531,000.00	31,000.00						31,000.00
13	CV. DUTA KONSTRUKSI	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pagar Puskesmas Pattoppkang, Rehabilitasi Pustu La'nyara,, Penyempurnaan Pustu Lakatong, Penyempurnaan Pustu Massamaturu.		SPMK NO. /KTR - DINKES/ VII / 2009, 8 Juli 2009	3,366,000.00	16,000.00						16,000.00
14	CV. TENRISAU KONSULTAN	Pengawasan teknis pembangunan Puskesmas Polut dan Penyempurnaan Puskesmas Towata		111/KTR - DINKES/ TU. 1 / VIII / 2008, 14 Juli 2008	31,100,000.00	3,213,480.00						3,213,480.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2011				**76,700,000.00**	**3,835,000.00**	**0.00**				**0.00**	**3,835,000.00**
1	CV. PANDI TUNGGAL	Pemb.Lumbung Pangan Desa Cakura		089/KTR-DINKES/VIII/2011	35,000,000.00	1,750,000.00						1,750,000.00
2	CV. IRA UTAMA	Pemb.Pagar Kantor BPP Kec. Sanrobone		599/KTR-DINKES/APBD/V/2011	41,700,000.00	2,085,000.00						2,085,000.00
	Tahun 2019				**211,589,000.00**	**211,589,000.00**	**0.00**				**0.00**	**211,589,000.00**
1		Pengakuan utang belanja obat-obatan tahun 2019			211,589,000.00	211,589,000.00						211,589,000.00
	Tahun 2023					**45,368,870.00**	**-**	**- 45,148,870.00**			**-**	**220,000.00**
	PT. KIMIA FARMA TRADING DAN DISTRIBUTION		Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	735/PPK-DK23/SPK-DK23/SPK-EP/IV/2023 26 April 2023	277,369,500.00	220,000.00						220,000.00
	PT. MALOGA PRIMA REZEKI		Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	862/PPK-DK23/SPK-EP/V/2023 tangGAL 11 MEI 2023	10,582,470.00	10,582,470.00		-10,582,470.00	02001/SP2D/LS-BARANG-JASA/VII/2024	7/16/2024		0.00
	PT. TOPABIRING TRANS LOGISTIK		Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	174/DK-II/SEK.1/II/2023 DAN NOMOR : 49/1800/X/2020 Tanggal 27 januari 2020	34,566,400.00	34,566,400.00		-34,566,400.00	02000/SP2D/LS-BARANG-JASA/VII/2024	7/16/2024		0.00
	Tahun 2024				**4,411,528,124.00**	**6,725,317,441.00**	**-**				**6,022,960,641.00**	**702,356,800.00**
	PT. KIMIA FARMA TRD CAB MAKASSAR	Pengadaan Obat-Obatan Sumber Dana DAU SG TA. 2024	Belanja Obat-Obatan-Obat	1600/PPK-DK24/SPK-EP/VII/2024	66,946,366.00	66,946,366.00			73.05/04.0/000031/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	66,946,366.00	0.00
	PT. KIMIA FARMA TRD CAB MAKASSAR	Pengadaan Obat-Obatan Sumber Dana DAU SG TA. 2024		1051/PPK-DK24/SPK-EP/V/2024	15,514,500.00	15,514,500.00			73.05/04.0/000033/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	15,514,500.00	0.00
	PT. KIMIA FARMA TRD CAB MAKASSAR	Pengadaan Obat RS Galesong Sumber Dana PAD TA.2024		1636/PPK-DK24/SPK-EP/VIII/2024	84,980,000.00	84,980,000.00			73.05/04.0/000363/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	18/12/2025	84,980,000.00	0.00
	PT. PARIT PADANG GLOBAL	pengadaan obat obatan sumber dana DAU TA 2024		1974/PPK-DK24/SPK-EP/X/2024	8,735,000.00	8,735,000.00			73.05/04.0/000034/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	8,735,000.00	0.00
	PT ADYA ARTHA ABADI	Pengadaan Obat Obatan sumber Dana DAU TA. 2024		2296/PPK-DK24/SPK-EP/X/2024	329,850,000.00	329,850,000.00			73.05/04.0/000037/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	329,850,000.00	0.00
	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	Pengadaan Obat Obatan RS Galesong sumber Dana DAU TA. 2024		1601/PPK-DK24/SPK-EP/VII/2024	129,126,024.00	129,126,024.00			73.05/04.0/000488/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	31/12/2025	129,126,024.00	0.00
	PT MERAPI UTAMA PHARMA	pengadaan obat RS Galesong bersumber dana PAD lingkup dinas kesehatan kab. takalar TA anggaran 2024		1635/PPK-DK24/SPK-EP/VIII/2024	21,090,000.00	21,090,000.00			73.05/04.0/000443/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	29/12/2025	21,090,000.00	0.00
	PT MERAPI UTAMA PHARMA	pengadaan obat RS Galesong bersumber dana PAD lingkup dinas kesehatan kab. takalar TA 2024		1637/PPK-DK24/SPK-EP/VIII/2024	42,490,000.00	42,490,000.00						42,490,000.00
	PT MERAPI UTAMA PHARMA	pengadaan obat RS galesong bersumber dana PAD lingkup dinas kesehatan kab. takalar TA 2024		1772/PPK-DK24/SPK-EP/VIII/2024	25,308,000.00	25,308,000.00			73.05/04.0/000295/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025	10/12/2025	25,308,000.00	0.00
	PT RAJAWALI NUSINDO MAKASSAR	Pengadaan Obat-Obatan RS Galesong Sumber Dana PAD TA. 2024		2736/PPK-DK24/SPK-EP/VI/2024	21,520,000.00	21,520,000.00			73.05/04.0/000291/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025	09/12/2025	21,520,000.00	0.00
	PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI	Pengadaan Obat-Obatan Sumber Dana DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kab.Takalar TA. 2024		1594/PPK-DK24/SPK-EP/VII/2024	16,980,000.00	16,980,000.00			73.05/04.0/000085/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025	13/06/2025	16,980,000.00	0.00
	PT SAMATOR GAS INDUSTRI MAKASSAR	Pengadaan BMHP RS GALESONG Sumber Dana PAD TA.2024		1116/PPK-DK24/SPK-EP/VI/2024	17,266,050.00	17,266,050.00			73.05/04.0/000374/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	19/12/2025	17,266,050.00	0.00
	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	pengadaan BMHP RS Galesong sumber dana PAD TA 2024		1170/PPK-DK24/SP-EP/VI/2024	71,390,190.00	71,390,190.00			73.05/04.0/000359/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	22/12/2025	71,390,190.00	0.00
	PT SANZAYA MEDIKA PRATAMA	pengadaan BMHP RS Galesong sumber dana PAD TA 2024		1449/PPK-DK24/SPK-EP/VII/2024	659,866,800.00	659,866,800.00						659,866,800.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL	Pengadaan BMHP RS Galesong Sumber Dana PAD TA. 2024		1785/PPK-DK24/SPK-EP/IX/2024	31,482,867.00	31,482,867.00			73.05/04.0/000360/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	18/12/2025	31,482,867.00	0.00
	PT BRAMASTA ARTA MEDIKA	Pengadaan BMHP RS Galesong Sumber Dana PAD TA. 2024		1925/PPK-DK24/SPK-EP/IX/2024	127,434,400.00	127,434,400.00			73.05/04.0/000296/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025	10/12/2025	127,434,400.00	0.00
	PT BERKIBAR JAYA ABADI	Belanja modal bangunan kesehatan (rehabilitasi kantor dinas kesehatan) sumber dana DAU SG TA 2024		2404/PPK-DK24/SP-EP/X/2024	178,817,610.00	125,172,327.00			73.05/04.0/000021/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	26/03/2025	125,172,327.00	0.00
	PT.Cut INTER MEDICA	Belanja modal Alat Kedokteran Umum Rs Umum Galesong		1765/PPK-DK24/SPK-EP/VIII/2024	98,490,000.00	98,490,000.00			73.05/04.0/000029/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	98,490,000.00	0.00
	PT INABATHA USAHA MANDIRI	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum RS Umum Galesong Sumber Dana DAU SG		1764/PPK-DK24/SPK-EP/VIII/2024	106,652,000.00	106,652,000.00			73.05/04.0/000016/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	106,652,000.00	0.00
	PT. DUMERPOWER INDONESIA	belanja modal alat kedokteran umum RS umum Galesong sumber dana DAU sesuai surat perjanjian nomor : 1766/PPK-EP/VIII/2024 Tanggal 30 agustus 2024		1766/PPK-EP/VIII/2024	3,000,000.00	3,000,000.00			73.05/04.0/000036/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	3,000,000.00	0.00
	PT. ANUGRAH YADEN UTAMA	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum RS Umum Galesong SUMBER DANA DAU SG TA. 2024		1767/PPK-DK24/SPK-EP/VIII/2024	6,968,000.00	6,968,000.00			73.05/04.0/000032/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	6,968,000.00	0.00
	CV. GLORY PROJECT	Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana PAD TA 2024		2837/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	11,733,000.00	11,733,000.00			73.05/04.0/000162/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P3/8/2025	26/08/2025	11,733,000.00	0.00
	CV. GLORY PROJECT	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sumber dana DAU SG TA.2024		2825/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	92,529,500.00	92,529,500.00			73.05/04.0/000035/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	92,529,500.00	0.00
	CV. GLORY PROJECT	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum RS UMUM GALESONG SUMBER DANA DBH-CHT TA. 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 2826/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024		2826/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	126,038,937.00	126,038,937.00			73.05/04.0/000184/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P3/8/2025	02/09/2025	126,038,937.00	0.00
	PT. ESTRELLA DUA INDONESIA/ WHIZPRIME HOTEL	Belanja Akomodasi Pertemuan Aksi #8 Rapat Koordinasi Review Kinerja Tahunan Pelaksanaan Konvergensi Stunting Sumber Dana DAU TA. 2024	belanja perjalanan dinas biasa	2823/PPK-DK24/SPK-EP/VI/2024	38,160,000.00	38,160,000.00			73.05/04.0/000030/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	38,160,000.00	0.00
	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNHAS	Penyusunan Dokumen Kajian Operasionalisasi RSIA Zainab Bersumber Dana DAU TA.2024	Belaja jasa tenaga ahli	1994/PPK-DK24/SPK-SW/X/2024	100,000,000.00	100,000,000.00			73.05/04.0/000290/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025	09/12/2025	100,000,000.00	0.00
	PT. Widi Mitra Prima (Hotel Aswin Makassar)	Belanja Akomodasi Pertemuan Evalusi PIN dlm rangka Penanggulangan KLB Polio Indonesia tingkat Kab. Takalar	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2632/PPK-DK24/SPK-EP/XI/2024	21,040,000.00	21,040,000.00			73.05/04.0/000014/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2025	20/03/2025	21,040,000.00	0.00
	PT. Makassar Palace (Hotel Grand Palace)	Belanja Akomodasi Penguatan Surveilans PD3I	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2899/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	21,040,000.00	21,040,000.00			73.05/04.0/000013/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2025	20/03/2025	21,040,000.00	0.00
	PT. Makassar Palace (Hotel Grand Palace)	Belanja Akomodasi Workshop dan Peningkatan Kapasitas Petugas dan Kader PKK Dalam Rangka Deteksi Dini CA Serviks	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2867/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	134,656,000.00	134,656,000.00			73.05/04.0/000012/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2025	19/03/2025	134,656,000.00	0.00
	PT. Estrella Delapan Indonesia (Whiz Prime Hotel hasanuddin Makassar)	Pertemuan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Takalar Tahun 2024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2865/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	42,400,000.00	42,400,000.00			73.05/04.0/000289/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025	15/12/2025	42,400,000.00	0.00
	DJULSI SIRANDE/ PT. PRIMA SEMESTA ABADI/ HOTEL PRIMA	Belanja Akomodasi Pertemuan Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Pratama Kabupaten Takalar di Hotel Prima Makassar Jl. DR.Ratulangi NO.17, Makassar Sumber Dana DAU TA 2024	Belanja Perjalanan Dinas biasa	2898/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	21,200,000.00	21,200,000.00			73.05/04.0/000038/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/3/2025	27/03/2025	21,200,000.00	0.00
	CV. MABEL SOLUSI MANDIRI	Belanja Modal Electric Generating Set (Prasarana Perlengkapan Penunjang) Dinas Kesehatan Kab.Takalar TA. 2024		1268/PPK-DK24/SPK-EP/VI/2024	205,000,000.00	205,000,000.00			73.05/04.0/000293/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PR/12/2025	09/12/2025	205,000,000.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	PT. HIDAYAH TRIPUTRA MEDIKA	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Pengadaan Alat Kesehatan RSKIA Zainab) Dinas Kesehatan Kab.Takalar TA. 2024		1438/PPK-DK24/SPK-EP/VII/2024	615,518,880.00	615,518,880.00			73.05/04.0/000044/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	15/04/2025	615,518,880.00	0.00
	PT. BUANA KREASINDO UTAMA	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Pengadaan Alat Kesehatan RSKIA Zainab) Dinas Kesehatan Kab.Takalar TA. 2024		1439/PPK-DK24/SPK-EP/VII/2024	641,884,000.00	641,884,000.00			73.05/04.0/000043/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	15/04/2025	641,884,000.00	0.00
	PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Pengadaan Alat Kesehatan RSKIA Zainab) Dinas Kesehatan Kab.Takalar TA. 2024		1440/PPK-DK24/SPK-EP/VII/2024	181,600,000.00	181,600,000.00			73.05/04.0/000042/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	15/04/2025	181,600,000.00	0.00
	PT. SAMUDRA CITRA PERSADA	Pengadaan BMHP PKD Sumber Dana DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kab.Takalar TA. 2024		1210/PPK-DK24/SPK-EP/VI/2024	58,754,000.00	58,754,000.00			73.05/04.0/000087/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/6/2025	13/06/2025	58,754,000.00	0.00
	PT. IFTALINK MEDIA KARYA	Belanja Modal Alat Pembersih		2716/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	2,740,000.00	2,740,000.00			73.05/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P3/8/2025	26/08/2025	2,740,000.00	0.00
	PT. IFTALINK MEDIA KARYA	Belanja Modal Mebel		2715/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	5,750,000.00	5,750,000.00			73.05/04.0/000168/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P3/8/2025	26/08/2025	5,750,000.00	0.00
	PT. IFTALINK MEDIA KARYA	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer		2717/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	3,400,000.00	3,400,000.00			73.05/04.0/000175/LS/1.02.0.00.0.00.02.	28/08/2025	3,400,000.00	0.00
					2,900,000.00	2,900,000.00			73.05/04.0/000175/L	28/08/2025	2,900,000.00	0.00
	PT. MITRA ERA GLOBAL	Belanja Modal Alat Pendingin dan Peralatan Komputer		2714/PPK-DK24/SPK-EP/XII/2024	21,276,000.00	21,276,000.00			73.05/04.0/000367/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/12/2025	22/12/2025	21,276,000.00	0.00
	BPJS	jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan			2,361,882,500.00			73.05/04.0/000015/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/3/2025	21/03/2025	2,361,882,500.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Labkesda)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			85,600.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	85,600.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Sekretariat PSC 119)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			574,900.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	574,900.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Gudang farmasi)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			68,000.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	68,000.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Rumah Dinas Dokter)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			68,500.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	68,500.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Puskesmas polut)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			1,819,300.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	1,819,300.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Puskesmas Galut)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			160,900.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	160,900.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Galesong Hospital)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			2,242,700.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	2,242,700.00	0.00
	PDAM	Tagihan PDAM Bulan Desember 2024 (Kantor BKN Takalar)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			532,200.00			73.05/04.0/000041/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P2/4/2025	09/04/2025	532,200.00	0.00
	Tahun 2025					-	**1,156,195,600.00**				-	**1,156,195,600.00**
	PT MEDQUEST JAYA GLOBAL	Pengadaan BMHP PKD Sumber Dana	Utang Belanja Obat-Obatan Obat	2082/PPK-DK25/SPK-EP/VII/20	1,152,564,000.00	-	1,152,564,000.00					1,152,564,000.00
	PDAM	GUDANG FARMASI	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air				61,000.00					61,000.00
	PDAM	LABKESDA	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air				72,400.00					72,400.00
	PDAM	KANTOR BKN TAKALAR	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air				726,000.00					726,000.00
	PDAM	SEKRETARIAT PSC 119	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air				543,000.00					543,000.00
	PDAM	RUMAH DINAS KADIS KESEHATAN	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air				61,000.00					61,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	PDAM	PUSKESMAS POLUT	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air				1,311,600.00					1,311,600.00
	PDAM	GALESONG HOSPITAL	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air				856,600.00					856,600.00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle						**20,184,141,021.74**	**19,388,684,719.56**	**63,000.40**			**18,850,506,647.34**	**20,722,382,093.56**
	Tahun 2008					**4,264,050.00**	**0.00**				**0.00**	**4,264,050.00**
1	CV. MUHARRIZZAH PRIMA	Pembangunan Selasar Perawatan III			2,019,050.00	2,019,050.00						2,019,050.00
2	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Pemeliharaan Pagar RSUD			2,245,000.00	2,245,000.00						2,245,000.00
	Tahun 2010					**6,316,650.00**					**0.00**	**6,316,650.00**
3	CV. INDAH LESTARI	Pembangunan Selasar			126,333,000.00	6,316,650.00						6,316,650.00
	Tahun 2012					**74,510,785.00**	**0.00**				**0.00**	**74,510,785.00**
4	CV. Nur Abdi Jaya	Rehab Ruang IGD			75,775,700.00	3,788,785.00						3,788,785.00
5	CV. Akram	Pengadaan Perlengkapan Kantor			70,722,000.00	70,722,000.00						70,722,000.00
	Tahun 2014					**99,988,550.00**					**0.00**	**99,988,550.00**
6	CV. MULYA UTAMA	Rehab Berat Gedung ICU			1,187,871,000.00	59,393,550.00						59,393,550.00
7	CV. PALANA	Pembuatan Garasi Parkir			29,700,000.00	1,485,000.00						1,485,000.00
8	CV. IRZHAL MAULANA KONSTRUKSI	Pembangunan drainase RSUD Takalar			187,500,000.00	9,275,000.00						9,275,000.00
9	CV. CITRA RATU MULIA	Pembuatan Pagar Depan RSUD Takalar			92,700,000.00	4,635,000.00						4,635,000.00
10	CV. NUR ABDI JAYA	Lanjutan Penimbunan Halaman Belakang RSUD Takalar			139,000,000.00	6,950,000.00						6,950,000.00
11	CV. GEMILANG UTAMA	Pembangunan Pagar dan Penimbunan Halaman belakang RSUD Takalar			215,900,000.00	10,795,000.00						10,795,000.00
12	CV. PANDI TUNGGAL	Dipdal selasar Gedung askes			99,500,000.00	4,975,000.00						4,975,000.00
13	CV. NURUL ABADI	Rehab Selasar Penghubung Ruang Perawatan			24,800,000.00	1,240,000.00						1,240,000.00
14	CV. NANDAR JAYA	Rehab Selasar Penghubung ruang ICU			24,800,000.00	1,240,000.00						1,240,000.00
	Tahun 2017					**2,900,000.40**	**0.00**	**0.40**			**0.00**	**2,900,000.00**
15	CV. DUTA KONSTRUKSI	Pengawasan Pagar Depan RSUD.H.Padjonga Dg.Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2016			2,900,000.00	2,900,000.00						2,900,000.00
16	PT.GLOBAL SYSTECH MEDIKA	Pengadaan Alat Kesehatan			9,390,650.40	0.40		0.40				0.00
	Tahun 2018					**(63,000.00)**	**0.00**	**63,000.00**			**0.00**	**0.00**
19	PT.MURTI INDAH SENTOSA	Pengadaa Alat Kesehatan (Sumber Dana DAU)		1359/445/PPK-RSUD/XI/2018	9,329,526.00	-63,000.00		63,000.00				0.00
	Tahun 2023					**1,006,777,231.00**	**-**				**951,683,017.00**	**55,094,214.00**
7	PT. Alexa Medika	Farmasi				280,298,387.00					280,298,387.00	0.00
9	PT. Andalan Medika Sejahtera	Farmasi				35,624,118.00					35,624,118.00	0.00
14	PT. Anugrah Salmah Medika	Farmasi				221,139,531.00					221,139,531.00	0.00
15	PT. Mitra Sejati Medika	Farmasi				22,561,078.00					22,561,078.00	0.00
31	PT. Intergastra Nusantara	Farmasi				94,032,949.00					94,032,949.00	0.00
49	PT. Binasanprima	Farmasi				353,121,168.00					298,026,954.00	55,094,214.00
	Tahun 2024					**18,989,446,755.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,898,823,630.34**	**1,090,623,125.00**
	Utang APBD					**405,130,000.00**	**0.00**				**0.00**	**405,130,000.00**
1	PT. Iftalink Media Karya	Belanja Modal System/Power Supply (Sumber Dana DAU) RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar Tahun 2024		308/PPK-RSUD/SP/XI/2024	74,250,000.00	74,250,000.00						74,250,000.00
2	PT. Iftalink Media Karya	Belanja Modal Peralatan Jaringan (Sumber Dana DAU) RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar Tahun 2024.		307/PPK-RSUD/SP/XI/2024	21,500,000.00	21,500,000.00						21,500,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
3	PT. Iftalink Media Karya	Belanja Modal Peralatan Jaringan (Sumber Dana DAU) RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar Tahun 2024.		305/PPK-RSUD/SP/XI/2024	299,500,000.00	299,500,000.00						299,500,000.00
4	CV. Aulia Mitra Sejahtera	Belanja Modal Barang Peralatan Permainan Anak (Sumber Dana DAU) RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kab. Takalar Tahun 2024		315.a/445/PPK-RSUD/XI/2024	9,880,000.00	9,880,000.00						9,880,000.00
	Utang Belanja BLUD :					**18,584,316,755.34**	**0.00**				**17,898,823,630.34**	**685,493,125.00**
1	**Utang Belanja Pegawai BLUD**					**3,674,221,990.08**	**0.00**				**3,674,221,990.08**	**0.00**
1	Medis dan Paramedis November 2024 BPJS					2,061,932,242.00					2,061,932,242.00	0.00
2	Pengelola, Evaluasi, TKMKB, Rekonsiliasi 2024 BPJS					474,143,141.38					474,143,141.38	0.00
3	Medis dan Paramedis November 2024 Umum					98,277,560.75					98,277,560.75	0.00
4	Pengelola November 2024 Umum					21,078,758.96					21,078,758.96	0.00
5	Medis dan Paramedis Agustus 2024 Jasa Raharja					36,780,762.00					36,780,762.00	0.00
6	Medis dan Paramedis September 2024 Jasa Raharja					31,252,073.00					31,252,073.00	0.00
7	Medis dan Paramedis Oktober 2024 Jasa Raharja					26,929,535.00					26,929,535.00	0.00
8	Insentif Bulan Desember 2024 Bagian Excellent Leader					7,600,000.00					7,600,000.00	0.00
9	Insentif Bulan November - Desember 2024 Pengawas Internal					3,000,000.00					3,000,000.00	0.00
10	Insentif Dokter Jaga Ugd Bulan Oktober-Desember 2024					60,000,000.00					60,000,000.00	0.00
11	Insentif Tim IT 7 (tujuh) Bulan (Juni sd Desember 2024)					827,587,917.00					827,587,917.00	0.00
12	Insentif Fisikawan Medik Radiologi Bulan November-desember 2024					3,000,000.00					3,000,000.00	0.00
13	Insentif Rehab Medik Fisioterapi Bulan September-desember 2024					14,000,000.00					14,000,000.00	0.00
14	Insentif rujukan ambulance bulan november 2024					8,640,000.00					8,640,000.00	0.00
2	**Utang Belanja Barang dan jasa BLUD :**					**14,661,274,865.26**	**0.00**				**14,033,081,740.26**	**628,193,125.00**
1	PT Alexa Medika	BHP				347,047,863.00					130,226,013.00	216,821,850.00
2	PT Palagimata Medika Alta	BHP				617,687,250.00					617,687,250.00	-
3	PT Anugrah Salman Medika	BHP				365,302,922.00					165,418,067.00	199,884,855.00
4	PT Siaga Medika Utama	BHP				41,268,380.00					41,268,380.00	-
5	PT Sinergi Berkat Agsindo	BHP				90,054,300.00					90,054,300.00	-
6	PT Raihan Berkah Jaya	BHP				57,297,999.00					57,297,999.00	-
7	PT Multi Sinergitas Nusantara	BHP				409,074,174.00					369,414,430.00	39,659,744.00
8	PT Sinar Panca Medika	BHP				45,894,888.00					45,894,888.00	-
9	PT Zansaya Medika Pratma	BHP				98,239,334.00					98,239,334.00	-
10	PT Millenium Pharmacon INT	BHP				414,574,931.00					414,574,931.00	-
11	PT Nusantara Prima Medicalindo	BHP				24,963,900.00					24,963,900.00	-
12	PT Fisio Global Alkesindo	BHP				13,140,000.00					13,140,000.00	-
13	PT Sinar Roda Utama	BHP				51,060,000.00					51,060,000.00	-
14	PT Duta Afiat	BHP				717,240,027.00					717,240,027.00	-
15	PT Andalan Medika Sejahtera	BHP				136,078,230.00					118,094,386.00	17,983,844.00
16	PT Intergastra Nusantara	BHP				-					-	-
17	PT Medical Solution	BHP				127,923,500.00					127,923,500.00	-
18	PT Gina Nusantara	BHP				45,462,500.00					45,462,500.00	-
19	PT Jaya Tiga Putra Mandiri	BHP				3,507,600.00					3,507,600.00	-
20	PT Bryan Medika	BK				700,449,370.00					700,449,370.00	-
21	PT Bintang Muda	BK				535,011,120.00					535,011,120.00	-
22	PT Omnno Makmur Jaya	BK				1,091,946,413.00					1,091,946,413.00	-
23	PT Arwana Medika	BK				87,464,626.00					87,464,626.00	-
24	PT Raja Eba Indochem	BK				152,697,080.00					152,697,080.00	-
25	PT Mutu Agung Lestari	BK				61,605,000.00					61,605,000.00	-
26	PT Rajawali Nusindo	Obat				17,688,660.00					17,688,660.00	-
27	PT Anugrah Parmindo Lestari	Obat				132,103,586.00					132,103,586.00	-
28	PT Kimia Farma	Obat				374,812,200.00					374,812,200.00	-
29	PT Anugrah Argon Medika	Obat				551,207,253.00					551,207,253.00	-
30	PT Merapi Utama Pharma	Obat				1,076,168,274.00					1,076,168,274.00	-
31	PT Enseval Putera Megatrading	Obat				646,466,156.39					646,466,156.39	-
32	PT Daya Muda Agung	Obat				222,200,111.00					222,200,111.00	-
33	PT Adya Artha Abad	Obat				469,069,059.00					469,069,059.00	-
34	PT Antarmitra Sembada	Obat				222,022,475.00					222,022,475.00	-
35	PT Penta Valent	Obat				439,509,549.00					439,509,549.00	-
36	PT Galoeh Husada Farma	Obat				428,206,715.00					428,206,715.00	-
37	PT Abadi Makmur Bersama	Obat				39,711,360.00					39,711,360.00	-
38	PT Bina San Prima	Obat				456,082,185.00					413,595,603.00	42,486,582.00
39	PT Parit Padang Global	Obat				838,958,652.66					838,958,652.66	-
40	PT Mensa Bina Sukses	Obat				85,201,356.00					85,201,356.00	-
41	PT United Dico Citas	Obat				378,485,602.21					378,485,602.21	-
42	PT Primanru Jaya	Limbah				88,401,822.00					88,401,822.00	-

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
43	PT Mitra Hijau Asia	Limbah				290,792,250.00					229,770,000.00	61,022,250.00
44	PT Cita Lestari	Limbah				38,073,000.00					38,073,000.00	-
45	CV Hafidz Azzahra	Cetak				88,486,000.00					88,486,000.00	-
46	PT Fajar Utama Intemedia	Cetak				25,432,500.00					25,432,500.00	-
47	CV Lindos	Cetak				69,010,000.00					69,010,000.00	-
48	CV Lindos	ATK				202,059,300.00					202,059,300.00	-
49	CV Lindos	Chemical				58,403,500.00					58,403,500.00	-
50	CV Zickha Anugrah	Mak Basah				324,809,977.00					324,809,977.00	-
51	PT Samator Gas Industri	O2				122,655,290.00					122,655,290.00	-
52	PT Surya Indotim Imex	O2				89,966,055.00					89,966,055.00	-
53	PT Kone Indo Elevator	Pem Eskalator				64,468,800.00					64,468,800.00	-
54	CV Milleah	Pem AC				128,025,810.00					128,025,810.00	-
55	PT Mitra Sejati Medika	alkes Ortho				-					-	-
56	CV Aulia Mitra Sejahtera	Pem Gedung				162,894,960.00					112,560,960.00	50,334,000.00
57	PT Mulya Husada Medika	Pem alat				48,285,000.00					48,285,000.00	-
58	PT Iftalink Media Karya	Jaringan				236,426,000.00					236,426,000.00	-
59	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kem	Pem alat				10,200,000.00					10,200,000.00	-
3	Utang Jasa dan lainnya BLUD					248,819,900.00					191,519,900.00	57,300,000.00
	Tahun 2025						**19,388,684,719.56**					**19,388,684,719.56**
	Utang Belanja BLUD :						**19,388,684,719.56**					**19,388,684,719.56**
1	PT Alexa Medika	BHP					131,667,090.00					131,667,090.00
2	PT Palagimata Medika Alta	BHP					245,539,082.00					245,539,082.00
3	PT Anugrah Salman Medika	BHP					157,511,651.00					157,511,651.00
4	PT Sinergi Berkat Agsindo	BHP					136,997,946.00					136,997,946.00
5	PT Raihan Berkah Jaya Medika	BHP					34,705,000.00					34,705,000.00
6	PT Multi Sinergitas Nusantara	BHP					497,306,784.00					497,306,784.00
7	PT Millenium Pharmacon INT	BHP					405,483,626.00					405,483,626.00
8	PT Nusantara Prima Medicalindo	BK					178,991,940.00					178,991,940.00
9	PT Fisio Global Alkesindo	BHP					10,220,000.00					10,220,000.00
10	PT Duta Afiat	BHP					995,446,752.00					995,446,752.00
11	PT Andalan Medika Sejahtera Abadi	BHP					72,298,595.00					72,298,595.00
12	PT Medical Solution Indonesia	BHP					134,035,271.00					134,035,271.00
13	PT Jaya Tiga Putra Mandiri	BHP					81,540,600.00					81,540,600.00
14	PT Bryan Medika	Bahan Kimia					358,810,608.00					358,810,608.00
15	PT Bintang Muda	Bahan Kimia					872,766,360.00					872,766,360.00
16	PT Rajaerba Indochem	Bahan Kimia					331,022,602.00					331,022,602.00
17	PT Mutu Agung Lestari	Bahan Kimia					39,072,000.00					39,072,000.00
18	PT Rajawali Nusindo	BHP					58,892,049.00					58,892,049.00
19	PT Anugrah Parmindo Lestari	Obat					235,808,024.00					235,808,024.00
20	PT Kimia Farma	Obat					886,129,331.00					886,129,331.00
21	PT Anugrah Argon Medika	Obat					788,094,858.00					788,094,858.00
22	PT Merapi Utama Pharma	Obat					802,191,209.00					802,191,209.00
23	PT Enseval Putera Megatrading	Obat					511,074,299.00					511,074,299.00
24	PT Daya Muda Agung	Obat					132,172,124.00					132,172,124.00
25	PT Adya Artha Abadi	Obat					145,097,218.00					145,097,218.00
26	PT Antarmitra Sembada	Obat					38,937,347.00					38,937,347.00
27	PT Penta Valent	Obat					1,083,259,192.00					1,083,259,192.00
28	PT Galoeh Husada Farma	Obat					229,610,000.00					229,610,000.00
29	PT Abadi Makmur Bersama	Obat					22,184,460.00					22,184,460.00
30	PT Bina San Prima	Obat					163,261,259.00					163,261,259.00
31	PT Parit Padang Global	Obat					1,250,776,617.00					1,250,776,617.00
32	PT Mensa Bina Sukses	Obat					238,343,531.00					238,343,531.00
33	PT United Dico Citas	Obat					251,536,320.00					251,536,320.00
34	PT Primanru Jaya	Limbah					118,960,414.00					118,960,414.00
35	PT Mitra Hijau Asia	Limbah					84,609,750.00					84,609,750.00
36	PT Cita Lestari Kreasi Abadi	Limbah					131,979,000.00					131,979,000.00
37	CV Hafid Atharrazka	Cetak					150,444,000.00					150,444,000.00
38	CV Lindos	ATK					270,548,600.00					270,548,600.00
39	CV Zickha Anugrah	Mak Basah					329,414,434.00					329,414,434.00
40	PT Samator Gas Industri	O2					140,463,840.00					140,463,840.00
41	PT Surya Indotim Imex	O2					57,609,000.00					57,609,000.00
42	PT Kone Indo Elevator	Pem Eskalator					69,152,075.00					69,152,075.00
43	PT Mitra Sejati Medika	BHP					27,687,610.00					27,687,610.00
44	CV Aulia Mitra Sejahtera	Pem Gedung					22,725,000.00					22,725,000.00
45	PT Mulya Husada Medika	Pem alat					135,538,000.00					135,538,000.00
46	Para Pegawai	Jasa					4,234,553,339.51					4,234,553,339.51
47	PT Alprido Alkasindo	BHP					39,766,843.00					39,766,843.00
48	PT Sanzaya Medika Pratama	BHP					194,212,528.05					194,212,528.05

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
49	PT Bintang Safwan	BHP					46,291,795.00					46,291,795.00
50	PT Kebayoran Pharma	Obat					248,285,463.00					248,285,463.00
51	PT Sapta Sari Tama	Obat					115,838,827.00					115,838,827.00
52	CV Aulia Mitra Sejahtera	Sanitasi					30,000,000.00					30,000,000.00
53	CV Aulia Mitra Sejahtera	Pemeliharaan					52,500,000.00					52,500,000.00
54	PT Wahyu Utama Pharma	Obat					86,354,122.00					86,354,122.00
55	PT Intisumber Hasil Sempurna	BHP					14,358,072.00					14,358,072.00
56	PT Ruma Utama Megatrading	BHP					117,278,899.00					117,278,899.00
57	PT Elang Karya Sejahtera	BHP					38,713,799.00					38,713,799.00
58	PT Strioem Tiba Mulkimed	BHP					5,775,002.00					5,775,002.00
59	PT Mitra Mecca	Bahan Kimia					293,235,298.00					293,235,298.00
60	PT Angka Pratama Medika	Bahan Kimia					109,188,844.00					109,188,844.00
61	PT Cahaya Muda Abadi	Bahan Kimia					244,506,795.00					244,506,795.00
62	CV Mulia Sentosa	Pem Gedung					47,667,000.00					47,667,000.00
63	PT Hypernova	Pem AC					-					-
64	PT Surya Limetrom Elynor	Pemeliharaan Alkes					49,950,000.00					49,950,000.00
65	PT Indomedik Niaga Perkasa	Pemeliharaan Alkes					7,539,000.00					7,539,000.00
66	CV Hasri Utama	Makanan					81,791,135.00					81,791,135.00
67	CV Makassar Mandiri	Komputer&Jaringan					24,675,000.00					24,675,000.00
68	CV Lira Putra Sejahtera	Sarana prasarana					123,900,000.00					123,900,000.00
69	PT Siemens	Pemeliharaan Alkes					99,999,900.00					99,999,900.00
70	PT Timur Raya Lestari						16,650,000.00					16,650,000.00
71	CV Difan Pratama						5,737,590.00					5,737,590.00
4. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						**13,035,834,749.74**	**554,100.00**	**0.00**			**4,546,547,045.00**	**8,489,841,804.74**
	Tahun 2008					**409,732,370.00**	-		-	-	-	**409,732,370.00**
1	CV. AMIKA JOINTKONSTRUKSI	Lanjutan Pemb. Jembatan Gantung Bassara'				82,832,000.00						82,832,000.00
2	CV. LARUMANGE	Pengaspalan jalan dengan hotmix wilayah Galut				60.00						60.00
3	PT. BERIGITA SARI PERSADA	Paket 4 :				64,580,550.00						64,580,550.00
4	CV. MA'MINASATA	Pengaspalan jalan ibukota Kec. Galut (Jalan Dg. Masurung & Jl. H. Pudu)				4,372,500.00						4,372,500.00
5	CV. GILANG SARANA	Rehabilitasi deker plat ruas Malewang - Maronde				448,500.00						448,500.00
6	CV. NANDAR JAYA	Rehabilitasi Jembatan Balla Borong				2,464,050.00						2,464,050.00
7	CV. AMIKA JOINT KONSTRUKSI	Pemb. Plat Duicker Bonttokassi				553,700.00						553,700.00
8	CV. SATRIA GALESONG	Rehabilitasi Jembatan Mangindara				2,280,500.00						2,280,500.00
9	CV. HADJI CHAKEKE	Pas. Talud + Plat Duicker Lakatong				2,475,000.00						2,475,000.00
10	CV. FULLATI PUTRA MANDIRI	Pembauatan Duiker Plat Punaga-Salambu				820,000.00						820,000.00
11	CV. HAMDAN JAYA	Pembangunan Bendung Panaikang				9,000,250.00						9,000,250.00
12	CV. ANUGRAH	Pembangunan Bendung Sederhana Buakkang				5,406,650.00						5,406,650.00
13	CV. SYIFA UTAMA	Peningkatan Saluran Tersier				2,497,500.00						2,497,500.00
14	CV. MAHA KARYA ABADI	Rehabilitasi Bendung Pattene				4,370,800.00						4,370,800.00
15	CV. BATARA KARYA	Pembangunan Mess Pemda				14,937,500.00						14,937,500.00
16	CV. CAHAYA TIMUR UTAMA	Pembangunan Pintu Gerbang Takalar - Jeneponto				175,159,600.00						175,159,600.00
17	CV. TRIDA TAWAR PERKASA	Pembangunan Landskap Ibukota Kabupaten				- 40.00						-40.00
18	CV. TUNGGAL PRATIWI	Pembangunan Taman Baca Desa Lakatong				515,000.00						515,000.00
19	CV. BUMI AKBAR PERSADA	Pembangunan Paving Blok Kel. Pallantikang				18,800,000.00						18,800,000.00
20	PT. MEGAPOLITAN NUGRAHA	Pembangunan PSAB Dusun Pandala Ds.Laikang				16,719,000.00						16,719,000.00
21	CV. MARSANIE LAW	Pembangunan MCK Ds Sawakung dan Banyuanyara				1,499,250.00						1,499,250.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2009				**1,821,369,433.00**	**433,829,109.00**	-		-	-	-	**433,829,109.00**
22	CV. AIY ARTHA PERDANA	Pembangunan Kantor Perhubungan			171,717,000.00	8,585,850.00						8,585,850.00
23	CV. TAKALAR JAYA	Pembangunan MCK Dusun Bontosanra Kel. Maradekaya			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
24	CV. ADHYTIA	Pembangunan MCK Lingkungan Palemba kelurahan Pattallassang			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
25	CV. MANNURUKI JAYA	Pembangunan MCK lelang Ikan Ds. Gusung Desa Lakatong			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
26	CV. RAMAYANA	Pembangunan MCK Lelang Ikan Ongkoa Desa Laikang			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
27	CV. PATWA NIRWANA	Pembangunan MCK Dusun Kalukuang Desa kalukuang			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
28	CV. BINTANG SEJAHTERA UTAMA	Pembangunan MCK Dusun Pa'batangan Desa Patani			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
29	CV. CAHAYA TIMUR UTAMA	Pembangunan MCK Desa Maccinibaji			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
30	CV. YUNITA	Pembangunan MCK Lelang lamangkia			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
31	CV. ANUGRAH	Pembangunan MCK Dusun Tamajannang Desa Banyuanyara			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
32	CV. JAYA AGUNG	Pembangunan MCK kelurahan Pattallassang			17,500,000.00	875,000.00						875,000.00
33	CV. SYAFIRA NUR	Pembangunan MCK Desa Cikoang			14,970,000.00	748,500.00						748,500.00
34	CV. DELAPAN TUJUH	Pembangunan MCK PS. Jonggoa Desa Bila-Bilaya & Dusun Jongoa			35,000,000.00	1,750,000.00						1,750,000.00
35	CV. PROYEKSI	Pembangunan Jalan Perumahan Nelayan Desa Mangindara			37,500,000.00	25,650,000.00						25,650,000.00
36	CV. MULTI KARYA GEMILANG	Pembangunan Jalan Paving Blok Soreang Caddi			49,800,000.00	100,000.00						100,000.00
37	CV.BINTANG SEJAHTERA UTAMA	Pemasangan Paving Blok Kelurahan Palantikang			19,800,000.00	990,000.00						990,000.00
38	CV.MISNA KONSTRUKTION	Peningkatan Jalan Beton Wil.Dusun Kamp.ParangBarangmamase			186,999,000.00	121,549,350.00						121,549,350.00
39	CV.SEJATI ANUGRAH PRATAMA	Pengerasan Jalan Poros PanaikangPallantikang (Lanjutan) Kec.Pattallassang			26,090,000.00	1,304,500.00						1,304,500.00
40	CV. SEMBILAN BATE	Pengawasan Teknis			42,990,000.00	42,990,000.00						42,990,000.00
41	CV.ALENA JAYA KONSTRUKSI	Pembangunan Jembatan Gantung Bassara (Lanjutan) Kel.Sabintang Kec.Pattallassang			97,500,000.00	733,800.00						733,800.00
42	CV.RAGA UTAMA	Pembangunan/Rehab Duiker Plat Kel.Mattompodalle Kec.Polut			23,690,000.00	1,184,500.00						1,184,500.00
43	SWAKELOLA	Pemeliharaan jalan dan jembatan tersebar 9 kecamatan			342,738,113.00	28,913,313.00						28,913,313.00
44	CV. MITRA JASA MANDIRI	Rehab. Bendung Campagaya			40,000,000.00	2,000,000.00						2,000,000.00
45	CV. CIPTA ANYGERAH MANDIRI	Rehab/Penggantian Pompa Pendorong SPAM Dusun Bontoberu Desa Cikoang			24,444,000.00	1,222,200.00						1,222,200.00
46	CV. MUNANDAR NUSANTARA	Pengadaan dan Pemasangan Pompa Kapasita 1.5 Ltr/Detik SPAM Cikoang Desa Cikoang			49,983,920.00	2,499,196.00						2,499,196.00
47	CV. KARYA BERINGIN	Pengadaan Bahan Bangunan Untuk Pemeliharaan Irigasi yeng Telah terbangun			171,168,400.00	171,168,400.00						171,168,400.00
48	CV. SAMATURU MANDIRI	Pembangunan Sumur Bor Desa Lantang			20,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
49	CV. ARYA AMALIA	Pembangunan STPDL Lantang II Desa Lantang			10,000,000.00	500,000.00						500,000.00
50	CV. ANUGRAH PELITA PERDANA	Pengadaan Bahan Material Pemasangan Paving Blok Jalan Desa Moncongkomba Kec. Polsel Kab. Takalar			38,209,000.00	1,000.00						1,000.00
51	CV. MATTOTORANG	Rehabilitasi Kantor Camat Marbo			138,770,000.00	6,938,500.00						6,938,500.00
52	CV. TRI PUTRI KENCANA	Pemeliharaan pengerasan jalan Sirtu			80,000,000.00	4,000,000.00						4,000,000.00
53	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Pemeliharaan pengerasan jalan sirtu Solonga Kec. Polut.			25,000,000.00	1,250,000.00						1,250,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2010				**1,146,670,000.00**	**55,101,150.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,101,150.00**
54	CV. MAROS	~Peningkatan Jalan Hotmix Panaikan-Bontorappo			593,533,000.00	29,676,650.00						29,676,650.00
55	CV. LANDI INDA KONSTRUKSI	~Pemeliharaan Jajan Sertu Ruas SMPN.3 Ko'mara Desa Ko'mara			69,850,000.00	3,492,500.00						3,492,500.00
56	CV. SATRIA GALESONG	~Pemeliharaan Jembatan Desa Mangindaran Kec.Gal.Selatan			44,987,000.00	17,000.00						17,000.00
57	CV. MARIO	~Pembayaran Tahap I 95 % Pekerjaan Pemeliharaan Plat Duiker Jalan Wilayah Ko'mara Kec.Pol.Utara			22,130,000.00	1,106,500.00						1,106,500.00
58	CV. BENTENG SANROBONE	~Rehabilitasi Jembatan Desa Boddia Kec.Galesong Selatan Kab.Takalar			24,610,000.00	1,230,500.00						1,230,500.00
59	CV. CITRA KARYA MANDIRI	~Pemeliharaan Jembatan Malolo Towa Kec.Polut.Kab.Takalar			16,950,000.00	847,500.00						847,500.00
60	CV. CITRA RATU MULIA	~Pembukaan Badan Jalan Wilayah Sabintang Kec.Pattallassang			11,677,000.00	583,850.00						583,850.00
61	CV. ARI ARTHA KENCANA	~ Rehab Bendung Sederhana Di Pa'lilangi			362,933,000.00	18,146,650.00						18,146,650.00
	Tahun 2011				**2,961,810,000.00**	**26,602,700.00**	-				-	**26,602,700.00**
62	PT.ATHIRA KASYLA	1 PAKET		343/KTR/11/344/SPMK/11	1,105,428,000.00	1,310,000.00						1,310,000.00
62	CV.NOOR DYAN UTAMI	~Rehabilitasi Duiker Palat Solonga - Tamasongo		782/KTR/2011,783/SPK/11	6,433,000.00	321,650.00						321,650.00
62	CV.CITRA RAMA LESTARI	~Pengerasan Jalan Sertu Jln.Desa Kalukuang		621/ktr/2011,622/SPMK/11	66,061,000.00	3,303,050.00						3,303,050.00
63	CV.PUTRA JAYA	~Peningkatan Jalan Hotmix Palleko-Malolo (Lanjutan)		750/KTR/11, 751/SPMK/2011	1,427,808,000.00	3,864,000.00						3,864,000.00
64	CV.AIY ARTHA PERDANA	~Pekerjaan Talud Abrasi Sungai Tana Tana		735/KTR/11,736/SPMK/11	48,925,000.00	2,446,250.00						2,446,250.00
65	CV.SYAFIRAH NUR	Biaya Pemeliharaan Talud Ruas Jalan Wilayah Kel.Patte'ne Kec. Polsel Kab.Takalar		42/KTR/2011,43/SPMK/2011	33,884,000.00	1,694,200.00						1,694,200.00
66	CV.ARYA	Pemeliharaan Jembatan Desa Parangmata Kec.Galesong		101/KTR/2011,102/SPMK/2011	25,546,000.00	1,277,300.00						1,277,300.00
67	CV.SYAFIRAH NUR	Biaya Pemeliharaan Jembatan Kayu Kel.Takalar Mapsu		127/KTR/11,128/SPMK/2011	17,125,000.00	856,250.00						856,250.00
68		~Pemeliharaan Jajan Sertu Ruas SMPN.3 Ko'mara Desa Ko'mara			69,850,000.00	3,492,500.00						3,492,500.00
69	CV.ZAHRA PUTRA UTAMA	~Rehab.Kantor Desa Topejawa		738/KTR/2011,739/SPMK/11	29,950,000.00	1,497,500.00						1,497,500.00
70	CV.SURYA SAKTI	~Pemb.Pagar Kantor Kec.Polsel		182/KTR/2011,183/SPMK/11	49,950,000.00	2,497,500.00						2,497,500.00
71	CV.BULU-BULU	~Pemb.Pagar Ex.Pasar Palleko		80/KTR/11,81/SPMK/11	49,950,000.00	2,497,500.00						2,497,500.00
72	CV.PARANGMATA KONSTRUKSI	~Pemb.Kamar WC.Rumah Adat Karaeng Galesong		694/KTR/2011,695/SPMK/2011	15,950,000.00	797,500.00						797,500.00
73	CV.IRA UTAMA	~Pembanunan Pagar Belakang Rumah Jabatan Sekda Yang Baru		700/KTR/2011,701/SPMK/2011	14,950,000.00	747,500.00						747,500.00
	Tahun 2012				**601,500,000.00**	**30,075,000.00**	-				-	**30,075,000.00**
80	CV. HAS FAMILY	~Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kab. Takalar			199,500,000.00	9,975,000.00						9,975,000.00
81	CV.WIRA	~Pembangunan Saluran Pembuang Bontokaddopepe Kec.Galut Kab.Takalar			44,900,000.00	2,245,000.00						2,245,000.00
82	CV.GUSUNG INDAH	~Pembangunan Pengaman Pantai Desa Mangindara Kec.Galsel Kab.Takalar			49,900,000.00	2,495,000.00						2,495,000.00
83	CV.FATNUR SEJAHTERA	~Pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Lakatong Kab.Takalar			39,900,000.00	1,995,000.00						1,995,000.00
84	CV.RAHMAT JAYA	~Rehabilitasi Kantor Lurah Pattallassang Kab.Takalar			44,900,000.00	2,245,000.00						2,245,000.00
85	CV.DISTRA PRATAMA	~Rehabilitasi Kantor Desa dan Pengadaan Mobiler untuk Desa Galesong Baru Kec.Galesong Kab.Takalar			27,700,000.00	1,385,000.00						1,385,000.00
86	CV.HAS FAMILY	~Penambahan Ruangan Gudang Kantor Samsat Kab.Takalar			90,650,000.00	4,532,500.00						4,532,500.00
87	CV. BUMBUNG INDAH	~ Pekerjaan Rehabilitasi Barugaya Pallantikang Karaeng Loe (Belakang SMP 1 Takalar)			27,250,000.00	1,362,500.00						1,362,500.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
88	CV.ZAHRA PUTRI UTAMA	~Rehabilitasi Balai Pertemuan Desa Panyangkalang			45,400,000.00	2,270,000.00						2,270,000.00
89	CV.AMROEL JAYA UTAMA	~Pemasangan Paving Blok dan Drainase Desa Bontolanra Kab.Takalar			31,400,000.00	1,570,000.00						1,570,000.00
	Tahun 2013				**2,465,177,000.20**	**121,833,850.01**	-				-	**121,833,850.01**
90	CV. AIY ARTHA PERDANA	Drainase Desa Belaka Desa Towata			44,750,000.00	2,237,500.00						2,237,500.00
91	CV. MUSKAL JAYA	Drainase Dusun Jamarang Kel. Bontolebang Kec. Galut			35,900,000.00	1,795,000.00						1,795,000.00
92	CV. MUTMAINNA UTAMA	Peningkatan Saluran Pembuang D. I. Kampung Bugisi di Canrego			49,750,000.00	2,487,500.00						2,487,500.00
93	CV. SAMATURU MANDIRI	Pembangunan Sumur Pompa Tangan Dalam Ujung Bori Kel. Bulukunyi dan Pengadaan Sumur Bor Lingkungan Kalebalang Kel. Botokadatto			32,400,000.00	1,620,000.00						1,620,000.00
94	CV. NURHALIFAH	Pembangunan Sumur Pompa Tangan Dalam Desa Lamangkia Desa Topejawa dan Dusun Bontomanai Desa Lengkese			27,000,000.00	1,350,000.00						1,350,000.00
95	CV. EKA CIPTA	Optimalisasi SPAM Kel. Parangluara			29,750,000.00	1,487,500.00						1,487,500.00
96	CV. CITRA RAMA LESTARI	Pembayaran Tahap I (Pertama) 95% Biaya Pembangunan Drainase Ballo I Kab. Takalar			92,760,000.00	4,638,000.00						4,638,000.00
97	CV. FACHRUL YASFAT KONSTRUKSI	Pembayaran Uang Muka 30% Biaya Drainase Jl. Mappajalling Daeng Kawang Kab. Takalar			120,750,000.00	6,037,500.00						6,037,500.00
98	CV. ANGGREK MERAH	Pembayaran Uang Muka 30% Biaya Perbaikan Drainase Dalam Kota			92,750,000.00	4,637,500.00						4,637,500.00
99	Direktur CV. PALANA	Pembayaran Tahap I (Pertama) 95% Biaya Penimbunan dan Peninggian Sistem Saluran Drainase Jl. Jend. Sudirman Kab. Takalar			51,800,000.00	2,590,000.00						2,590,000.00
100	CV. ALIFAH KONSTRUKSI	Pembayaran Tahap I (Pertama) 95% Biaya Pembangunan Saluran Drainase Ballo II			124,000,000.00	6,200,000.00						6,200,000.00
101	RESKYA MANDIRI (2013)	- Lanjutan Pemb. Kantor Desa Lassang Barat dan Desa Kadatong			61,000,000.00	3,050,000.00						3,050,000.00
102	CV. PALANA	Rehab. Pagar SDI Kota (Pembangunan)			29,500,000.00	1,475,000.00						1,475,000.00
103	CV. Farid Pratama	Rehab Ringan Kantor Desa Bontokanang Gal-Sel			18,400,000.00	920,000.00						920,000.00
104	CV. PALAMPANG JAYA	Pekerjaan Desain Interior Mess Pemda di Jakarta			74,800,000.00	3,740,000.00						3,740,000.00
105	CV. FACHRUL YASFAT KONSTRUKSI	Pembangunan Konstruksi Penahan Tanah (Talud) TPA Balang Kab. Takalar			41,700,000.00	2,085,000.00						2,085,000.00
106	CV. ANGGREK MERAH	Biaya Pembangunan Tempat Sampah (TPS)			13,220,000.00	661,000.00						661,000.00
107	CV. CIPTA JAYA KARYA	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Mangadu - Jonggoa (Lanjutan)			1,165,547,000.20	58,277,350.01						58,277,350.01
108	CV. MAMMINASATA	Pembuatan Talud dan Penimbunan Jalan Desa Campagaya Kel. Galesong			69,700,000.00	3,485,000.00						3,485,000.00
109	CV. ANUGERAH INTI UTAMA	Peningkatan Jalan Sirtu Ruas Poros Pa'gentungan Desa Kp. Beru - Parangbaddo			92,700,000.00	4,635,000.00						4,635,000.00
110	CV. DEVANT	Pembuatan Talud Depan Kantor Kecamatan Mapsu (Lanjutan)			34,900,000.00	1,745,000.00						1,745,000.00
111	CV. ANUGERAH INTI UTAMA	Pembuatan Plat Duiker Kampung Beru			39,800,000.00	1,990,000.00						1,990,000.00
112	CV. EKA KARYA CIPTA	Pembangunan Jembatan Campagaya Kel. Pattene Kab. Takalar			89,800,000.00	4,490,000.00						4,490,000.00
113	CV. TORINDO NUSANTARA	Pembangunan Jembatan Kayu Cambaloe Ds. Balangtanaya Kec. Mapsu			32,500,000.00	200,000.00						200,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2015				**8,689,110,000.00**	**602,797,500.00**	-				-	**602,797,500.00**
	A. Tahun 2015 Murni				**8,689,110,000.00**							
114	CV. UCHY SUKSES ABADI	Pembangunan Talud Taman Palleko		1033/KTR-DAU/PUK-BM/X/2014	99,800,000.00	4,990,000.00						4,990,000.00
115	CV. IRZAL MAULANA KONSTRUKSI	Pembuatan Talud Tebing Palleko Depan Dolog		1035/KTR-DAU/PUK-BM/X/2014	69,800,000.00	3,490,000.00						3,490,000.00
116	CV. CAHAYA BUANA LINTAS	Pembuatan Trotoar		839/KTR-DAU/PUK-BM/X/2014	69,900,000.00	3,495,000.00						3,495,000.00
117	CV. ANDARICA WARGA	Peningkatan Jalan Beton Ruas Panjo'jo Lassang (Lanjutan)		497/KTR-DAUPUD-BM/VI/2014	712,603,000.00	35,630,150.00						35,630,150.00
118	CV. CITRA LESTARI MANDIRI	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Parangbaddo-Kampungberu dan Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Malewang-Borongbaji (Lanjutan)		503/KTR-DAU/PUD-BM/VI/2014	728,422,000.00	36,421,100.00						36,421,100.00
119	CV. CIPTA JAYA KARYA	Peningkatan Jalan Kompleks Rujab Bupati dan Dinas PU Takalar		515/KTR-DAU/PUD-BM/VI/2014	774,656,000.00	38,732,800.00						38,732,800.00
120	CV. BINTANG REZKI	Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Desa Aengtowa Kec. Galut, Aeng batu-batu-Bontolanra, Bontokassi-Bontomarannu		519/KTR-DAU/PUD-BM/VII/2014	1,512,652,000.00	75,632,600.00						75,632,600.00
121	CV. UCHI SUKSES ABADI	Jalan Sirtu Bontoa Ballo II		384/KTR-DAU/PUD-BM/IV/2014	74,800,000.00	3,240,000.00						3,240,000.00
122	CV. TRIPUTRA	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung 9 Paket		418/KTR-DAU/PU-CK/III/2015	15,500,000.00	15,500,000.00						15,500,000.00
123	CV. ELANG PERKASA INDOSAKTI	Rehabilitasi Kantor Bupati		783/KTR-DAK/PU-CK/X/2014	4,489,817,000.00	224,490,850.00						224,490,850.00
124	TRIPUTRA JAYA	Pengawasan Teknis Pekerjaan Perbaikan Drainase 6 Paket Tersebar dalam Wilayah Kab. Takalar			28,700,000.00	28,700,000.00						28,700,000.00
125	CV. ARCHINDO KARYA PRATAMA	Perencanaan Teknis 8 Paket Pekerjaan		1507/KTR-DAU/PU-CK/X/2015	14,900,000.00	14,900,000.00						14,900,000.00
126	CV. NUR ABDI JAYA	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Massamaturu				3,600,000.00						3,600,000.00
127	CV. AUFA MULTI ARTHA	Pembangunan Saluran Air Tertutup Ds. Pa'batangang Mapsu		725/KTR-DAU/XI/2014		1,615,000.00						1,615,000.00
128	CV. CAKRAWALA SILAJA	Perencanaan Teknis Pekerjaan Talud dan Oprit Jembatan Panjarungan dan Perbaikan Jembatan Pangkarode Pattene			9,800,000.00	9,800,000.00						9,800,000.00
129	CV. GARIS BUMI CONSULTAN	Perencanaan Teknis :			43,210,000.00	43,210,000.00						43,210,000.00
130	CV. AQILLAH SEJAHTERA	Perencanaan Teknis embuatan Trotoar dalam Kota Takalar, Lanjutan Trotoar Depan Balla Lompoa Galesong dan Peningkatan Median Jalan Terminal Kalampa		075/KTR-DAU/PUK-BM/III/2015	12,900,000.00	12,900,000.00						12,900,000.00
131	CV. HOMAZ	Pengawasan Teknis		1549/KTR-DAK/PUK-BM/VIII/2015	27,200,000.00	27,200,000.00						27,200,000.00
132	PT. ARISTA CIPTA	Pengawasan Teknis Proteksi Pengaman Tanggul Sungai Sagge Bongga Galut (Lanjutan)		1709/KTR-DAU/PUK-SDA/IX/2015	4,450,000.00	4,450,000.00						4,450,000.00
	B. Koreksi Utang 2015											
133		Pengawasan Teknis Rehabilitasi Bendung Jenetallasa D.I Jenetallasa			14,800,000.00	14,800,000.00						14,800,000.00
	Tahun 2018					**20,000.00**	-				-	**20,000.00**
134	PT. GEMA TEKNIK KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Palleko - Malolo (Lanjutan)		102/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	150,287,500	-						0.00
	PT. DWINUR HASKA	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Bontonompo - Tana Tana		104/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	203,775,000	20,000.00						20,000.00
	CV. FIRMA KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Ruas Towata - Jenemaeja		106 VKTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	130,900,000	-						0.00
	PT. MAHAPANI KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Kunjung - Parappa		114/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	110,412,500	-						0.00
	PT. HEXA MULIA KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Bontokassi - Kalukubodo		116/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	216,700,000	-						0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	CV. WIRA KAMIL KONSULTAN	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Beton Ruas Julumata - Pangkajene		118/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 23 Juli 2018	99,770,000	-						0.00
	PT. TRIKONS INDO PRATAMA	Pengawasan Teknis : Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Lantang Selatan - Lantang Utara		124/KTR-DAK/DPU PRPKP-BM/VII/2018, 30 Juli 2018	137,280,000	-						0.00
	Tahun 2019					**0.73**	-				-	**0.73**
135	CV. MULTIGUNA KONSTRUKSI	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Tersebar Di 9 Kecamatan Di Kab. Takalar (DAU)		15/KTR-DAU/DPUPRPKP-PKP/XI/2019	878,637,795.73	0.73					0.00	0.73
	Tahun 2020					**99,584,100.00**	-				-	**99,584,100.00**
136	CV. NAFAS PERDANA NUSANTARA	Perencanaan Teknis Penataan dan Pengaturan RTH 1 (Perencanaan Teknis Penataan Lapangan Sepakbola Bauru Kr. Magau Bontolebang)		01/KTR-DAU/DPUPRPKP-TR/II/2020, 07 Februari 2020	9,000,000.00	-						0.00
137	CV. MATRA DESAIN	Pengawasan Teknis Penataan dan Pengaturan RTH 1 (Pengawasan Teknis Penataan Lapangan Sepakbola Bauru Kr. Magau Bontolebang)		03/KTR-DAU/DPUPRPKP-TR/II/2020, 18 Februari 2020	7,000,000.00	-						0.00
138	CV. TUJUH LIMA CONSULTANT	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase 2 (Pekerjaan Drainase Lanjutan Karaeng Manepasa, Drainase Jambua, Pekerjaan Drainase Jene Maeja, Pek. Drainase Dusun Bontowa Desa Komara Polut).		18/KTR-DAU/DPUPRPKP-CK/VIII/2020	27,940,000.00	-						0.00
139	KKM CAMPAGAYA	Pengadaan sarana prasarana air bersih (PAMSIMAS) Desa Campagaya Kec. Galesong Kab. Takalar		15/KTR-DAU/DPUPRPKP-CK/VII/2020, 17 Juli 2020	306,700,000.00	-						0.00
140	CV. DARMA CITRA UTAMA	Survei Kondisi Jalan Wilayah 1 (Daerah Pesisir Kec. Galut, Kec. Galesong, Kec. Galsel, Kec. Sanrobone, Kec. Mapsu, Dan Kec. Marbo)		15/KTR-DAU/DPUPRPKP-BM/XII/2020, 11 Desember 2020	99,584,100.00	99,584,100.00						99,584,100.00
						-						0.00
	Tahun 2021				**25,377,000.00**	**11,807,400.00**	-				-	**11,807,400.00**
1	CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN	- Pengawasan Teknis Pek. Jalan Lapen Kampung Baru - Pengawasan Teknis Pek. Talud Bontowa Ko,mara - Pengawasan Teknis Pek. Talud Kel. Pattene Kec. Polongbangkeng Selatan - Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Manyampa		84/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XII/2021, Tanggal 01 Desember 2021	16,962,000.00	3,392,400.00					0.00	3,392,400.00
	CV. KARAENG PANRITAYA	- Belanja Hibah,Pengawasan Teknis Rehab Ruang Tahanan Anak, - Belanja Hibah,Pengawasan teknis Pek,Bangunan Kantor Kodim		129/SPK-DAU/PPK/DPUPRPKP-CK/XII/2021, 02 Desember 2021	8,415,000.00	8,415,000.00						8,415,000.00
	Tahun 2022				**770,431,000.00**	**217,180,500.00**	-	-			-	**217,180,500.00**
159	CV. KARAENG PANRITAYA	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Taroang - Campagayya		57/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/X/2021, Tanggal 01 Oktober 2021	99,495,000.00	- 90,750.00						-90,750.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
161	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Drainase Anaung Pabundukang, Kec. Polongbangkeng Selatan,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Masalleng Kel. Takalar Lama,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Sawakung Beba (Lanjutan),Pengawasan Teknis Pek. Drainase Sompu,Pengawasan Teknis Drainase Kelurahan Palleko, Kec. Pol-Ut,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kelurahan Sombalabella,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Desa Lengkese,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kelurahan Mangadu, Kec. Mangarabombang,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kel. Panrannuangku		5053/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/XII/2022, 20 Desember 2022	37,407,000.00	37,407,000.00						37,407,000.00
162	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Bontosunggu, Pa'rappunganta,Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Kel. Bulukunyi,Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Kel. Pattalassang,Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Massalongko, Desa Pa'rappunganta		5034/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/XII/2022, 12 Desember 2022	14,985,000.00	14,985,000.00						14,985,000.00
164	CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Desa Palalakkang,Pengawasan Teknis Pek.Paving Block Pekuburan Sompu		5033/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XII/2022, 13 Desember 2022	5,300,000.00	5,300,000.00						5,300,000.00
165	CV. ANTERA	Pengawasan Teknis Pek. Drainase BTN Balindah,Pengawasan Teknis Perbaikan Drainase Jalan Sawi		5032/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XII/2022, 13 Desember 2022	7,414,000.00	7,414,000.00						7,414,000.00
166	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Alun-Alun		137/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/XI/2022, 18 November 2022	30,552,000.00	30,552,000.00						30,552,000.00
167	CV. ANTERA	Perencanaan Teknis Pek. Paving Block Desa Palalakkang,Perencanaan Teknis Pek.Paving Block Pekuburan Sompu		4846/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XI/2022, 23 November 2022	7,481,400.00	7,481,400.00						7,481,400.00
168	CV. SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	Perencanaan Teknis Pek. Drainase BTN Balindah,Perencanaan Teknis Perbaikan Drainase Jalan Sawi		4830/KONTRAK/PPK-PKP/DPUTRPKP/XI/2022, 23 November 2022	9,956,700.00	9,956,700.00						9,956,700.00
169	CV. DIFAN PRATAMA	Pek. Paving Block Jalan Pekuburan Limbungan, Pallantikang		4398/KONTRAK/PPK-PKP/DPUPRPKP/IX/2022, Tanggal 07 September 2022	87,890,000.00	17,578,000.00						17,578,000.00
170	CV. CAKRA RAHWANA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Sombala Bella - Tala (PEN)		3939/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/IV/2022 Tanggal 11 April 2022	92,400,000.00	23,100,000.00						23,100,000.00
171	CV TRI NUR HASGA	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Tepo - Cikoang (PEN)		3897/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/IV/2022, Tanggal 11 April 2022	125,620,000.00	12,562,000.00						12,562,000.00
172	PT. INOVASI KONSULINDO RAYA	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Bantinoto - Rajayya (PEN)		3893/SPK-PEN/PPK/DPUPRPKP-BM/IV/2022, Tanggal 11 April 2022	223,327,500.00	22,332,750.00						22,332,750.00
173	CV. ZIKRA UNIVERSAL KONSULTAN	Perencanaan Teknis Perintisan Jalan Dusun Campagaya, Desa Tamasaju, Kec. Galut		4801/SP-DAU/PPK/DPUPRPKP-BM/XI/2022, Tanggal 18 November 2022	22,022,400.00	22,022,400.00						22,022,400.00
174	CV. LIMA PERISAI KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Parkiran Polres (Samping BRI) dan Pek. Pagar Kuburan, Pariangan, Ballo		60/SPK-DAU/PPK/DPUPRPKP-CK/VIII/2021, 21 Agustus 2021	6,580,000.00	6,580,000.00						6,580,000.00
						-						

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2023					**4,768,509,800.00**	-	-			-	**4,768,509,800.00**
	CV. AQILAH KONSTRUKSI	Pengaspalan Jalan Lapen Parangmata - Pattinoang		4752/KONTRAK/PPK-BM/DPU	199,826,000.00	55,951,280.00						55,951,280.00
	CV. TIGA TIGA TUJUH CONSULTANT	Pengawasan Teknis Pek. Pelataran dan kios Sentra UMKM Desa Beba, Kec. Galesong Utara (PEN)		4683/KONTRAK/PPK-CK/DPU	68,437,000.00	13,687,400.00						13,687,400.00
	CV. TIGA TIGA TUJUH CONSULTANT	Pengawasan Teknis Pek. Pelataran dan kios Sentra UMKM Desa Aeng Batu-Batu, Kec. Galesong Utara (PEN)		4681/KONTRAK/PPK-CK/DPU	43,240,000.00	8,648,000.00						8,648,000.00
	CV. ASHIMA CONSULTANT	Pengawasan Teknis Pek. Pelataran dan kios Sentra UMKM Desa Pa,lalakkang, Kec. Galesong (PEN)		4682/KONTRAK/PPK-CK/DPU	68,154,000.00	13,630,800.00						13,630,800.00
	CV. TIRSA DWI GUNA	Pembangunan Pengaman Pantai Desa Popo		8338/KONTRAK/PPK-SDA/DP	3,276,484,000.00	1,638,242,000.00						1,638,242,000.00
	PT. ANUTA PURA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pembangunan Pengaman Pantai Desa Popo		5779/KONTRAK/PPK-SDA/DP	69,813,000.00	34,906,500.00						34,906,500.00
	CV. HARDI UTAMA	Pembangunan Pengaman Pantai Desa Kanaeng		8605/KONTRAK/PPK-SDA/DP	2,980,181,210.00	1,490,090,605.00						1,490,090,605.00
	CV. ADIL FAADHIL KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pembangunan Pengaman Pantai Desa Kanaeng		5778/KONTRAK/PPK-SDA/DP	59,040,900.00	29,520,450.00						29,520,450.00
	CV. ALKAUTZAR MANDIRI	Pembangunan Pengaman Pantai Desa Galesong Kota		9638/KONTRAK/PPK-SDA/DP	2,780,737,250.00	1,390,368,625.00						1,390,368,625.00
	PT. ANUTA PURA KONSULTAN	Perencanaan Teknis Pek. Instalasi Air Bersih (Perencanaan Teknis Pek. Pengeboran Sumur Bor Dalam, Desa Kadatong, Kec.Galesong Selatan, Perencanaan Teknis Pek. Instalasi Air Bersih Di Kawasan Sentra Umkm Pala"Lakang)		352/SPK-DAU/PPK/DPUTRPK	7,486,000.00	7,486,000.00						7,486,000.00
	CV.SANGGILANG PRATAMA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Drainase Desa Kampung Beru,Pengawasan Teknis Pek. Drainase Desa Tope Jawa, Kec.	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	5373/KONTRAK/PPK-PKP/DP	21,955,800.00	800.00						800.00
	PT. ANUTA PURA KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pek. Plafond Tribun Lapangan Makkatang,Pengawasan Teknis Pemeliharaan Tmp		431/SPK-DAU/PPK/DPUTRPK	7,947,600.00	7,947,600.00						7,947,600.00
	CV. ANUGERAH TEKNIK	Pengawasan Teknis Pekerjaan Paving Block 3 (Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Lingk. Tala Sompu, Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Paddinging I, Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Desa Bontosunggu, Maccini Sombala, Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Lingk. Ballo Kel. Sombala Bella, Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Saulea, Desa Timbuseng)		236/SPK-DAU/PPK/DPUTRPK	19,991,100.00	19,991,100.00						19,991,100.00
	CV. NIAGO	Pek. Paving Block Palleko 2		368/SPK-DAU/PPK/DPUTRPK	131,906,000.00	58,038,640.00						58,038,640.00
	Tahun 2024					**9,261,850,780.00**	**6,258,761,270.00**	-			**4,546,547,045.00**	**1,712,214,225.00**
1	CV. DIFAN PRATAMA	Pek. Jalan Beton Kawasan TPA Balang Bontokadatto Kec. Polsel	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	211/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XII/2024, Tanggal 02 Desember 2024	133,599,000.00	133,599,000.00			73.05/04.0/000041/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/6/2025	24 Juni 2025	133,599,000.00	0.00
2	CV. KARYA LEPPUJANG KONSTRUKSI	Pekerjaan Talud Ruas Sombala Bella - Tala (Lanjutan)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	227/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XII/2024, Tanggal 12 Desember 2024	89,605,000.00	89,605,000.00			73.05/04.0/000051/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/7/2025	15 Juli 2025	89,605,000.00	0.00
3	CV. ANNISA PRATAMA	Pek. Jalan Lapen Kel. Bontokadatto Polongbangkeng Selatan	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	204/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 28 November 2024	134,182,000.00	93,927,400.00			73.05/04.0/000046/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/6/2025	24 Juni 2025	93,927,400.00	0.00
4	CV. ANNISA PRATAMA	Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Desa Topejawa Mangarabombang	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	182/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 20 November 2024	134,496,000.00	94,147,200.00			73.05/04.0/000045/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/6/2025	26 Juni 2025	94,147,200.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
5	CV. NUR RAHMAN	Pekerjaan Jalan Beton Desa Kalukuang Galesong	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	169/DAU/PPk-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 18 November 2024	179,641,000.00	179,641,000.00			73.05/04.0/000043/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/6/2025	25 Juni 2025	179,641,000.00	0.00
6	CV. MEGA PUTRA ENGINEERING	Pengawasan Teknis Pekerjaan Jalan sirtu dan Talud Paket 1 (Pengawasan Teknis Pek. Jalan sirtu Balang Caddi, Desa Balangtanaya, Pengawasan Teknis Pek. Jalan sirtu Kunrea Desa Lassang, Pengawasan Teknis Pek. talud ruas maradekaya - lantang (lanjutan), Pengawasan Teknis Pek. Talud ruas sombala bella - tala (lanjutan), Pengawasan Teknis Pek. Talud ruas Tepo - Cikoang (lanjutan))	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	194/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	27,905,000.00	27,905,000.00			73.05/04.0/000233/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	25 November 2025	27,905,000.00	0.00
7	CV. PELANGI	Pek. Lapen Lingkungan Bontopoko	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	208/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 29 November 2024	179,571,000.00	125,699,700.00			73.05/04.0/000040/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/6/2025	24 Juni 2025	125,699,700.00	0.00
8	CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA	Pekerjaan Talud Ruas Tepo-Cikoang (Lanjutan)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	203/DAU/PPk-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 25 November 2024	89,799,000.00	89,799,000.00			73.05/04.0/000039/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/6/2025	19 Juni 2025	89,799,000.00	0.00
9	CV. ASHIMA CONSULTANT	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Jembatan Garassi	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	24/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/IX/2024, Tanggal 30 September 2024	189,960,000.00	189,960,000.00			73.05/04.0/000230/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	25 November 2025	189,960,000.00	0.00
10	CV. REZI AL THAANI CONSULTANT	Perencanaan Teknis Jalan Paket 2. (Pek. Jalan Sirtu Balang Caddi, Desa Balangtanatanaya, Pek. Jalan Sirtu Kunrea Desa Lassang, Pek. Jalan Aspal Lapen Desa Topejawa, Mangarabombang)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	kontrak awal:17/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VII/2024, Tanggal 16 Juli 2024 dan addendum:17.a/addendum/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/X/2024, Tanggal 28 Oktober 2024	27,450,000.00	27,450,000.00			73.05/04.0/000246/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	28 November 2025	27,450,000.00	0.00
11	CV. BADOLO KARYA ABADI	Pengawasan Teknis Pekerjaan Jalan Lapen dan Jalan Beton Paket 2 (Pengawasan Teknis Pek. Jalan Aspal Lapen Desa Topejawa, Mangarabombang, Pengawasan Teknis Pek. Jalan Beton Kawasan TPA Balang, Bontokadatto, Kec. Polongbangkeng Selatan, Pengawasan Teknis Pek. Jalan beton Desa Kalukuang, Galesong, Pengawasan Teknis Pek. Lapen Lingkungan Bontopoko, Pengawasan Teknis Pek. Jalan Lapen Kel. Bontokadatto, Polongbangkeng Selatan)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	199/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	33,932,000.00	33,932,000.00			73.05/04.0/000222/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	26 November 2025	33,932,000.00	0.00
12	PT. MAHAPANI KONSULTAN	Perencanaan Teknis Pembuatan DED Ruas Bontokadatto A sampai Bontokadatto B		27/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XI/2024, Tanggal 20 November 2024	39,960,000.00	39,960,000.00			73.05/04.0/000195/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	11/17/2025	39,960,000.00	0.00
13	CV. META KONSULTAN	Perencanaan Teknis Pekerjaan Pengecetan Cat Andesit Trotoar	5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	174/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 18 November 2024	9,973,000.00	9,973,000.00			73.05/04.0/000199/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	24 November 2025	9,973,000.00	0.00
14	CV. DIFAN PRATAMA	Pek. Pengecetan Cat Andesit Trotoar.	5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	226/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024	179,554,000.00	179,554,000.00			73.05/04.0/000185/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	14 November 2025	179,554,000.00	0.00
15	CV. MALKA DAYA KONSTRUKSI	Rehabilitasi Asrama Hipermata Bontomate'ne	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	135/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/VIII/2024, Tanggal 14 Agustus 2024	179,634,500.00	39,519,590.00			73.05/04.0/000050/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ P3/7/2025	15 Juli 2025	39,519,590.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
16	CV. ZIKRA UNIVERSAL KONSULTAN	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Asrama Hipermata Bontomate'ne	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	141/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/IX/2024, Tanggal 09 September 2024	7,925,000.00	7,925,000.00			73.05/04.0/000206/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/11/2025	20 November 2025	7,925,000.00	0.00
17	PT. ARCLIP	Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung-Gedung 1 (Perencanaan Teknis Pembangunan Baruga Bappelitbangda)	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	146/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2024, Tanggal 23 Oktober 2024	10,000,000.00	10,000,000.00			73.05/04.0/000260/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/12/2025	10 Desember 2025	10,000,000.00	0.00
18		Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung-Gedung 1 (Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kantor Peternakan)	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		9,826,000.00	9,826,000.00			73.05/04.0/000260/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/12/2025	10 Desember 2025	9,826,000.00	0.00
19	CV. SENTRA DESAIN KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Paket 9 (Pengawasan Teknis Pembangunan Baruga Bappelitbangda)	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	218/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 22 November 2024	8,000,000.00	8,000,000.00			73.05/04.0/000242/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/11/2025	27 November 2025	8,000,000.00	0.00
20		Pengawasan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Paket 9 (Pengawasan Teknis Rehab. Gedung Dekranasda, Pengawasan Teknis Rehabilitasi Kantor Peternakan, Pengawasan Teknis Rehabilitasi Mes Hipermata Bajiateka)	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor		15,996,000.00	15,996,000.00			73.05/04.0/000242/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/11/2025	27 November 2025	15,996,000.00	0.00
21	CV. MEGA PUTRA ENGINEERING	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Gedung Lapris	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	148/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2024, Tanggal 23 Oktober 2024	19,713,600.00	19,713,600.00			73.05/04.0/000202/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/11/2025	20 November 2025	19,713,600.00	0.00
22	CV. NIRWANA RAHMA MAKMUR	Pengawasan Teknis Pek. Plafond Kantor Bupati	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	152/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024	27,927,600.00	27,927,600.00			73.05/04.0/000203/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/11/2025	20 November 2025	27,927,600.00	0.00
23	CV. ANTARA	Rehabilitasi Gedung Dekranasda	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	224/DAU/PPK-PUTRPKP/SP/XII/2024, Tanggal 10 Desember 2024	90,617,000.00	90,617,000.00			73.05/04.0/000036/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ P3/6/2025	19 Juni 2025	90,617,000.00	0.00
24	CV. ANNUR CONSULTANT	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung-gedung 2 (Perencanaan Teknis Rehab Gedung Dekranasda, Perencanaan Teknis Rehabilitasi Asrama Hipermata Bontomate'ne)	5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Kontrak awal : 125/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/VII/2024, Tanggal 05 Juli 2024, No. addendum: 125.a/addendum-SPK/DPUTRPKP-CK/XI/2024, Tanggal 05 Nopember 2024	15,000,000.00	15,000,000.00			73.05/04.0/000196/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/11/2025	20 November 2025	15,000,000.00	0.00
25	CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA	Pekerjaan Paving Blok Dusun Kupanga Kec. Polongbangkeng Utara	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	166/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 18 November 2024	179,387,000.00	125,870,900.00			73.05/04.0/000009/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ P1/3/2025	17 Maret 2025	125,870,900.00	0.00
26	CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA	Pekerjaan Paving Blok Desa Sawakung Beba	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	173/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 18 November 2024	134,842,000.00	94,389,400.00			73.05/04.0/000042/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ P3/6/2025	25 Juni 2025	94,389,400.00	0.00
27	PT. DELINEASI RUPABUMI KONSULTAN	Perencanaan Teknis Pek. Paving Block Paket 8 (Pek. Paving Block Halaman Kantor Kwarcab Pramuka Kab. Takalar. Pattallassang, Pek. Paving Blok Dusun Kupanga, Kec. Polongbangkeng Utara, Pek. Paving Blok Kel. Rajaya)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	161/DAUPPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 11 November 2024	24,947,000.00	24,947,000.00			73.05/04.0/000204/ LS/1.03.1.04.0.00.03 .0000/ PR/11/2025	20 November 2025	24,947,000.00	0.00
28	PT. DINAMIKA KONSULTAN INDONESIA	Perencanaan Teknis Pekerjaan Paving Blok Paket 4 (Pekerjaan Paving Blok Desa Sawakong Beba, Pek. Paving Blok Tala Sompu dan Lanjutan Paving ke Pekuburan Sompu, Kel. Sombala Bella)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	157/DAUPPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 05 November 2024	11,940,000.00	11,940,000.00			73.05/04.0/000205/LS/1.03.1.04.0.00.03. 0000/ PR/11/2025	20 November 2025	11,940,000.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
29		Perencanaan Teknis Pekerjaan Paving Blok Paket 4 (Pek. Paving Block Pekarangan Dinas Sosial (Eks. Dinkes), Pek. Paving Blok Kale Ko'mara)	5.1.02.01.04.0576 : Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten		20,000,000.00	20,000,000.00			73.05/04.0/000205/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	20 November 2025	20,000,000.00	0.00
30	CV. DIFAN PRATAMA	Pek. Paving Block Kel. Maradekaya	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	209/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 29 November 2024	50,036,000.00	50,036,000.00						50,036,000.00
31	CV. META KONSULTAN	Perencanaan Teknis Pek. Paving Blok Paket 5 (Pek. Paving Block Kel. Bontolebang, Galesong Utara)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	160/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 08 November 2024	5,000,000.00	5,000,000.00			73.05/04.0/000262/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/12/2025	10 Desember 2025	5,000,000.00	0.00
32		Perencanaan Teknis Pek. Paving Blok Paket 5 (Pek. Paving Block Kec. Pattalassang, Pek. Paving Block Kel. Maradekaya)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten		7,287,000.00	7,287,000.00			73.05/04.0/000262/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/12/2025	10 Desember 2025	7,287,000.00	0.00
33	CV. SENTRA DESAIN KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pekerjaan Paving Block dan Drainase Paket 12 (Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Kel. Bontolebang, Galesong Utara)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	213/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	4,000,000.00	4,000,000.00			73.05/04.0/000028/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P2/5/2025	23 Mei 2025	4,000,000.00	0.00
34		Pengawasan Teknis Pekerjaan Paving Block dan Drainase Paket 12 (Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di Kelurahan Takalar Kec. Mappakasunggu)	5.2.04.02.07.0003 : Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor		3,992,000.00	3,992,000.00			73.05/04.0/000028/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P2/5/2025	23 Mei 2025	3,992,000.00	0.00
35	CV. SENTRADESAIN KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pekerjaan Paving Block dan Drainase Paket 11 (Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Kec. Pattallassang, Pengawasan Teknis Pek. Paving Block Kel. Maradekaya)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	201/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	6,000,000.00	6,000,000.00			73.05/04.0/000362/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PPR1/12/2025	25 Desember 2025	6,000,000.00	0.00
36		Pengawasan Teknis Pekerjaan Paving Block dan Drainase Paket 11 (Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kec. Pattalassang)	5.2.04.02.07.0003 : Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor		1,992,000.00	1,992,000.00			73.05/04.0/000362/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PPR1/12/2025	25 Desember 2025	1,992,000.00	0.00
37	PT. ARCLIP	Perencanaan Teknis Pek. Drainase Paket 6 (Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di kelurahan Takalar, Kec. Mappakasunggu)	5.2.04.02.07.0003 : Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	162/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 12 November 2024	5,000,000.00	5,000,000.00			73.05/04.0/000284/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/12/2025	15 Desember 2025	5,000,000.00	0.00
38		Perencanaan Teknis Pek. Drainase Paket 6 (Pek. Drainase Kec. Pattalassang)	5.2.04.02.07.0003 : Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor		2,423,000.00	2,423,000.00						2,423,000.00
39	CV. NIAGO	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kel. Takalar Kec. Mappakasunggu	5.2.04.02.07.0003 : Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	185/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	87,551,000.00	61,285,700.00			73.05/04.0/000016/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P2/3/2025	26 Maret 2025	61,285,700.00	0.00
40	CV. FILIA CONSULTINDO	Pengawasan Teknis Pembangunan Paving Blok di Kawasan Kumuh Paket 7 (Pengawasan Teknis Pembangunan Paving Blok di Kawasan Kumuh Bajeng, Pengawasan Teknis Pembangunan Paving Blok di Kawasan Kumuh Bontolebang Kampung Parang)	5.1.02.01.04.0576 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	196/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	29,914,000.00	29,914,000.00			73.05/04.0/000017/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P2/3/2025	3/27/2025	29,914,000.00	0.00
41	CV. NUR RAHMAN	Pembangunan Jalan Paving Blok di Kawasan Kumuh Bajeng	5.1.02.01.04.0576 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	179/DAU/PPK-PUTRPKP/SP/XI/2024, Tanggal 20 November 2024	348,623,000.00	244,036,100.00			73.05/04.0/000006/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P1/3/2025	3/12/2025	244,036,100.00	0.00
42	CV. NUR RAHMAN	Pembangunan Jalan Paving Blok di Kawasan Kumuh Sombalabella 1	5.1.02.01.04.0576 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	177/DAU/PPK-PUTRPKP/SP/XI/2024, Tanggal 20 November 2024	348,626,000.00	244,038,200.00			73.05/04.0/000008/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P1/3/2025	3/12/2025	244,038,200.00	0.00
43	CV. DIFAN PRATAMA	Pembangunan Jalan Paving Blok di Kawasan Kumuh Sombalabella II	5.1.02.01.04.0576 Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	178/DAU/PPK-PUTRPKP/SP/XI/2024, Tanggal 20 November 2024	348,753,000.00	244,127,100.00			73.05/04.0/000007/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P1/3/2025	3/12/2025	244,127,100.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
44	CV. BADOLO KARYA ABADI	Perencanaan Teknis Pek. Saluran Irigasi Kalebentang	5.2.04.02.01.0007 Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	220/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XII/2024, Tanggal 03 Desember 2024	4,995,000.00	4,995,000.00						4,995,000.00
45	CV. PANGKALANG KARYA	Pek. Saluran Irigasi Kalebentang	5.2.04.02.01.0007 Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	225/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024	89,556,000.00	89,556,000.00			73.05/04.0/000037/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ P3/6/2025	19 Juni 2025	89,556,000.00	0.00
46	CV. BADOLO KARYA ABADI	Pembuatan DED DAK TA. 2024 Ruas Bentang-Saro	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	6161/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023, Tanggal 11 Desember 2023	59,855,400.00	59,855,400.00			73.05/04.0/000197/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	18 November 2025	59,855,400.00	0.00
47	CV. META KONSULTAN	Pembuatan DED DAK TA. 2024 Ruas Mattompodalle - Toata	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	6153/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023, Tanggal 12 Desember 2023	69,930,000.00	69,930,000.00			73.05/04.0/000232/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	25 November 2025	69,930,000.00	0.00
48	CV. WIRA KAMIL KONSULTAN	Pembuatan DED DAK TA. 2024 Ruas Bontoloe - Bentang	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	6160/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/XII/2023, Tanggal 12 Desember 2023	49,938,900.00	49,938,900.00			73.05/04.0/000044/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ P3/6/2025	26 Juni 2025	49,938,900.00	0.00
49	CV. META KONSULTAN	Perencanaan Teknis Paket Jalan 3 (Pek. Jalan Hotmix, Palleko 2 Polongbangkeng Utara, Pek. Lapen Dusun Lompo Balangtanaya, Pek. Talud Pekuburan Dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kec. Galut, Pek. Jalan Beton Dusun Parapa, desa Pakkabba, Kec. Galesong Utara dan Pek. Jalan Beton Desa Kalukuang, Galesong)	5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	23/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-BM/VIII/2024, Tanggal 19 Agustus 2024	47,400,330.00	30,810,215.00			73.05/04.0/000231/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	25 November 2025	30,810,215.00	0.00
50	CV. NUR INDAH	PEMBANGUNAN DRAINASE POROS TALA-KACCI KACCI	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	Kontrak Awal :1646/KONTRAK/PPK-CK/DPUTRPKP/IX/2023, Tanggal 12 September 2023, Addendum I:1647/KONTRAK-ADD/PPK-CK/DPUTRPKP/XII/2023, Tanggal 29 Desember 2023, Addendum II:1647/KONTRAK-ADD2/PPK-CK/DPUTRPKP/XII/2023, Tanggal 29 Desember 2023	3,169,668,450.00	1,584,834,225.00						1,584,834,225.00
51	CV. ALYMAR LESTARI KONSULTAN	PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN DRAINASE POROS TALA-KACCI KACCI	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	287/SPK-DAU/PPK/DPUTRPKP-CK/IX/2023, Tanggal 21 September 2023	69,926,000.00	69,926,000.00						69,926,000.00
52	CV. REZKY PRATAMA	Pekerjaan Drainase Kel. Malewang	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	167/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 18 November 2024	86,638,000.00	2,599,140.00			73.05/04.0/000055/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ P3/7/2025	21 Juli 2025	2,599,140.00	0.00
53	CV. MEGA PUTRA ENGINEERING	Pengawasan Teknis Pekerjaan Drainase Paket 5 (Pengawasan Teknis Pek. Drainase Dusun Je'ne Dinging Desa Balangtanaya, Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kalappo - Mangadu, Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kec. Sanrobone, Pengawasan Teknis Pek. Drainase Kel. Malewang)	5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	219/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 29 November 2024	15,961,000.00	15,961,000.00			73.05/04.0/000240/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/ PR/11/2025	26 November 2025	15,961,000.00	0.00
54	CV. DARMA CITRA UTAMA	Pengawasan Teknis Pembangunan Reservoar SPAM Regional Mamminasata	5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	223/PPK-PUTRPKP/SPK/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	59,957,000.00	59,957,000.00			73.05/04.0/000229/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	11/21/2025	59,957,000.00	0.00
55	PT. PUTRA MANRAJAI KONSTRUKSI	Pembangunan Reservoar SPAM Regional Mamminasata	5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	183/DAU/PPK-PUTRPKP/SP/XI/2024, Tanggal 21 November 2024	1,811,238,000.00	1,267,866,600.00			73.05/04.0/000038/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P3/6/2025	6/18/2025	1,267,866,600.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
56	CV. ALFIYAH	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Bedah Rumah Kader Berprestasi Atau Tidak Mampu	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Nota Pesanan: 134/NPB/DPUTRPKP-PKP/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024	10,000,000.00	10,000,000.00			73.05/04.0/000223/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/PR/11/2025	11/20/2025	10,000,000.00	0.00
57	CV. RAYA PERSADA ABADI	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Penderita Stunting	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	216/DAU/PPK-PUTRPKP/SP/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024	218,769,000.00	153,138,300.00			73.05/04.0/000005/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P1/3/2025	3/11/2025	153,138,300.00	0.00
58	Agussalim, ST dan Maskur DL.	Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Tim Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Penderita Stunting Dan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Warga P3Ke	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	87/SK/DPUTRPKP/XI/2024, Tanggal 01 November 2024	25,000,000.00	25,000,000.00			73.05/04.0/000015/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P2/3/2025	3/25/2025	25,000,000.00	0.00
59	Agussalim, ST dan Maskur DL.	Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Tim Perencanaan Teknis Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat P3Ke	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	87/SK/DPUTRPKP/XI/2024, Tanggal 01 November 2024	12,500,000.00	12,500,000.00			73.05/04.0/000014/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P2/3/2025	3/25/2025	12,500,000.00	0.00
60	CV. NIRWANA RAHMA MAKMUR	Pengawasan Teknis Pembangunan Sumur Bor Paket 6 (Pembangunan Sumur Bor Desa Cikoang Kec. Mangarabombang dan Desa Kalebentang kec. Galesong Selatan)	5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	229/DAU/PPK-PUTRPKP/SPK/XII/2024, Tanggal 11 Desember 2024	5,938,000.00	5,938,000.00			73.05/04.0/000025/LS/1.03.1.04.0.00.03.0000/P2/4/2025	4/29/2025	5,938,000.00	0.00
	TAHUN 2025						**554,100.00**					**554,100.00**
	PDAM	Tagihan Air Bulan Desember 2025					554,100.00					554,100.00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						**41,950,000.00**	**816,400.00**	**-**			**20,800,000.00**	**21,966,400.00**
1	**Tahun 2015**					**1,250,000.00**					**0.00**	**1,250,000.00**
	CV. WAHYU CIPTA KARYA	Pemasangan Instalasi Air		027/1502/IX/DSTTK, tgl	25,000,000.00	1,250,000.00						1,250,000.00
	Tahun 2017					**19,900,000.00**						**19,900,000.00**
	CV. GARNINDO	Pemeliharaan Peningkatan Sarana		027/1558/DSTTK/XII/2017	9,950,000.00	9,950,000.00						9,950,000.00
	CV. GARNINDO	Pemeliharaan Peningkatan Sarana		027/1205/DSTTK/XII/2017	9,950,000.00	9,950,000.00						9,950,000.00
	Tahun 2024											
	PT. KENARI TOWER HOTEL	Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdesma (Full Day)		788/PPK-DINSOSPMD/SPK/XII/2024	20,800,000.00	20,800,000.00	0.00	0.00	73.05/04.0/000059/LS/1.06.2.13.0.00.08.0000/PR/11/2025	11/14/2025	20,800,000.00	0.00
	Tahun 2025						**816,400.00**				**0.00**	**816,400.00**
	PDAM	Tagihan PDAM Desember 2025					816,400.00					816,400.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**-**	**-**				**-**	**-**
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					**609,966,000**	**426,976,200.00**	**188,100.00**		**0**		**426,976,200.00**	**188,100.00**
	Tahun 2024											0.00
1	CV. Menara Tamalate	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh	07/SP/PPK/DPPKBPPPA/2024	609,966,000.00	426,976,200.00	-		73.05/04.0/000005/LS/2.08.2.14.0.00.10.0000/P1/3/2025	3/4/2025	426,976,200.00	0.00
	Tahun 2025											
	PDAM	Utang Tagian Air					188,100.00					188,100.00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan					**4,317,748,375.00**	**1,103,593,134.00**	**0.00**				**704,732,000.00**	**398,861,134.00**
	Tahun 2008				**0.00**	**2,435,000.00**					**0.00**	**2,435,000.00**
1	CV. PRIMA UTAMA	Pembangunan Pos IB (Pemeliharaan)	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		0.00	2,435,000.00						2,435,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2009				**497,405,000.00**	**24,870,250.00**					**0.00**	**24,870,250.00**
1	CV. HATI MULIA	Jaringan Irigasi Desa	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan (Irigasi		262,148,000.00	13,107,400.00						13,107,400.00
2	CV. USNUL KHATIMAH	Jalan Usaha Tani bt.kadatto	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		48,821,000.00	2,441,050.00						2,441,050.00
3	CV. BONTOMATE'NE INDAH	Jalan Usaha Tani	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		46,686,000.00	2,334,300.00						2,334,300.00
4	CV. RAHMAN PUTRA WAHID	Jalan Usaha Tani	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		49,900,000.00	2,495,000.00						2,495,000.00
5	CV. SOLUSI KARYA MANDIRI	Jalan Usaha Tani	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		49,900,000.00	2,495,000.00						2,495,000.00
6	CV. NURFITRIANI	Talud Jalan Usaha Tani	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		39,950,000.00	1,997,500.00						1,997,500.00
	Tahun 2010				**136,304,875.00**	**6,815,244.00**					**0.00**	**6,815,244.00**
1	CV. INDAH LESTARI	Pemb.Lumbung Pangan Desa Cakura	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		94,500,000.00	4,725,000.00						4,725,000.00
2	CV. GOJENTA	Pemb.Pagar Kantor BPP Kec. Sanrobone	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		34,588,875.00	1,729,444.00						1,729,444.00
3	CV. PATTALLASSANG PUTRA	Pemb.WC BPP Kec. Galesong	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		7,216,000.00	360,800.00						360,800.00
	Tahun 2011				**47,800,000.00**	**2,390,000.00**					**0.00**	**2,390,000.00**
1	PT.ATHIRA KASYLA	~ Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesmavet	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian		47,800,000.00	2,390,000.00						2,390,000.00
	Tahun 2013				**60,400,000.00**	**3,020,000.00**					**0.00**	**3,020,000.00**
1	CV. Sinar Mentari	Pembangunan Embung Desa Bontoparang	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa		60,400,000.00	3,020,000.00						3,020,000.00
	Tahun 2014				**504,749,500.00**	**19,623,000.00**					**0.00**	**19,623,000.00**
A.	**Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Talud**											
1	CV. Benteng Sanrobone	Jalan Usaha Tani dan Talud Desa Panranuangku	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		64,717,500.00	3,235,875.00						3,235,875.00
2	CV. Annisa Pratama	Jalan Usaha Tani dan Talud Kel. Bulukunyi	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		48,575,000.00	2,428,750.00						2,428,750.00
3	CV. Bulu-Bulu	Jalan Usaha Tani dan Talud Kel. Pappa	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		48,575,000.00	2,428,750.00						2,428,750.00
4	CV. Jabal Nur	Jalan Usaha Tani dan Talud Desa Bonto Lebang	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		48,575,000.00	2,428,750.00						2,428,750.00
5	CV. Distra Pratama	Jalan Usaha Tani dan Talud Desa Bonto Kassi	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		64,717,500.00	3,235,875.00						3,235,875.00
B.	**Pembangunan Gedung dan Bangunan**											0.00
6	CV. Samaturu Mandiri	Pembuatan Pintu Pagar Besi RPH Polut	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		4,950,000.00	247,500.00						247,500.00
C.	**Dinas Ketahanan Pangan**											0.00
7	CV SYAFIRA NUR	Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan DesaKabupaten	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		56,140,000.00	2,807,000.00						2,807,000.00
8	CV SAMATURU MANDIRI	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Lagaruda Kec. Sanrobone, Pada Kegiatan Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		56,159,500.00	2,807,500.00						2,807,500.00
9	CV HEFAISTOS CONTRCTION	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kec.Galesong Pada Kegiatan Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		56,190,000.00	500.00						500.00
10	CV BULU-BULU	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa Ko'mara Kec.Polut Pada Kegiatan Pembangunan Cadangan Lumbung Pangan Desa Kabupaten	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		56,150,000.00	2,500.00						2,500.00
	Tahun 2015				**174,800,000.00**	**30,000.00**					**0.00**	**30,000.00**
1	CV. Sinar Cenrana	Rehabilitasi Irigasi tersier bontolebang Kec. Galut	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan (Irigasi		174,800,000.00	30,000.00						30,000.00
	Tahun 2016				**1,877,858,000.00**	**150,228,640.00**					**0.00**	**150,228,640.00**
1	CV. Ashindo Nusa Persada	Pemb. Jalan Usaha Tani (DAK)	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten		1,877,858,000.00	150,228,640.00						150,228,640.00
	Tahun 2019				**0.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**
	Utang Non LS Tahun 2019											
1	Utang PDAM	Beban jasa air bulan Desember 2019				0.00					0.00	0.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2024				**1,018,431,000.00**	**894,181,000.00**	**0.00**	**0.00**			**704,732,000.00**	**189,449,000.00**
	CV. BADOLO KARYA ABADI	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Usaha Tani	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	89/DAU/PPK-DTPHPKP/SPK/X/2024	22,322,000.00	22,322,000.00						22,322,000.00
	CV. DIFAN PRATAMA	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	97/DAU/PPK-DTPHPKP/SPK/XI/2024	167,127,000.00	167,127,000.00						167,127,000.00
	CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA	Pengadaan Pompa Air	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	105/DAU/PPK-DTPHPKP/SPK/XII/2024	119,600,000.00	119,600,000.00			73.05/04.0/000036/LS/2.09.3.27.0.00.11.0000/P3/6/2025	6/30/2025	119,600,000.00	0.00
	CV. HM MAHARANI SEJAHTERA	Pengadaan Hand Traktor	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	107/DAU/PPK-DTPHPKP/SP/XII/2024	194,400,000.00	194,400,000.00			73.05/04.0/000035/LS/2.09.3.27.0.00.11.0000/P3/6/2025	6/30/2025	194,400,000.00	0.00
	CV. SENTRADESAIN KONSULTAN	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Usaha Tani	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	95/PPK-DTPHPKP/SPK/XI/2024	17,982,000.00	17,982,000.00			73.05/04.0/000115/LS/2.09.3.27.0.00.11.0000/PP/12/2025	12/12/2025	17,982,000.00	0.00
	CV. APAR PRIMA PERKASA	Pembangunan Screen House Modern, Automation System, Pump and Panel For Pump, Irrigation System dan Sarana Budidaya	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	85/DAK/PPK-DTPHPKP/SP/VII/2024	497,000,000.00	372,750,000.00			73.05/04.0/000012/LS/2.09.3.27.0.00.11.0000/P2/3/2025	3/27/2025	372,750,000.00	0.00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan					**74,824,400.00**	**36,013,700.00**	**774,800.00**				**1,021,700.00**	**35,766,800.00**
	Tahun 2009				**41,319,600.00**	**1,487,200.00**	**0.00**				**0.00**	**1,487,200.00**
1	CV. MAHA KARYA ABADI	Penyempyrnaan jaringan dan tambah daya listrik			29,744,000.00	1,487,200.00						1,487,200.00
	Tahun 2015				**5,787,800.00**	**5,787,800.00**	**-**				**-**	**5,787,800.00**
2	CV. Aulifa	Pengawasan Pembuatan WC Permanen taman kota			5,787,800.00	5,787,800.00						5,787,800.00
	Tahun 2016				**27,717,000.00**	**27,717,000.00**	**-**				**-**	**27,717,000.00**
1	CV. MULTILINE TATA RANCANA	- Perencanaan Taman Alun-alun Makkatang Dg. Sibali			3,960,000.00	3,960,000.00						3,960,000.00
2	CV. KARAENG PANRITAYA	- Perencanaan Taman Pedestrian Depan Kantor Depag			3,955,000.00	3,955,000.00						3,955,000.00
3	CV. MATRA DESAIN KONSULTAN	- Perencanaan Taman Hijau Segitiga Canrego			3,954,000.00	3,954,000.00						3,954,000.00
4	CV. KARAENG PANRITAYA	- Pengawasan Taman Alun-alun Makkatang Dg. Sibali			2,970,000.00	2,970,000.00						2,970,000.00
5	CV. MATRA DESAIN KONSULTAN	- Pengawasan Taman Pedestrian Depan Kantor Depag			2,992,000.00	2,992,000.00						2,992,000.00
6	CV. MULTILINE TATA RANCANA	- Pengawasan Taman Hijau Segitiga Canrego			2,986,000.00	2,986,000.00						2,986,000.00
7	CV. SERIGALA JAYA	- Perencanaan Taman Hijau Kompleks Ruko Pasar Sentral			3,950,000.00	3,950,000.00						3,950,000.00
8	CV. PUTRA ADITYA PERKASA	- Pengawasan Taman Hijau Kompleks Ruko Pasar Sentral			2,950,000.00	2,950,000.00						2,950,000.00
	Tahun 2024				**-**	**1,021,700.00**					**1,021,700.00**	**-**
	PDAM	Tagihan rek Air				1,021,700.00					1,021,700.00	0.00
	Tahun 2025					**-**	**774,800.00**				**-**	**774,800.00**
	PDAM	Tagihan rek Air					774,800.00					774,800.00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					**89,463,000.00**	**7,543,350.00**	**-**				**-**	**7,543,350.00**
	Tahun 2012											
	CV.NURFITRIANI	Lanjutan Saluran Samping Ruas Punaga SP 1 - Ongkoa			89,463,000.00	4,473,150.00						4,473,150.00
	Tahun 2019											
	PDAM	Utang air PDAM selama 6 bulan 2019				898,800.00						898,800.00
	Tahun 2020											
	PDAM					2,171,400.00						2,171,400.00
Dinas Perhubungan					**1,556,250,000.00**	**77,777,500.00**	**-**				**-**	**77,777,500.00**
	Tahun 2008											
1	CV. PUTRA JAYA	Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light			18,700,000.00	900,000.00						900,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2009											
2	CV. AIRSYAN	Pembuatan Papan Nama Kantor			10,000,000.00	500,000.00						500,000.00
	Tahun 2010											
3	CV. RIFKA JAYA	Pengadaan/Pembangunan Kapal Penyeberangan			1,405,850,000.00	70,292,500.00						70,292,500.00
4	CV. SYAFIRA NUR	Pembangunan rumah tunggu			10,000,000.00	500,000.00						500,000.00
	Tahun 2015											
5	CV. AMANDA BERSAUDARA	Pemeliharaan Marka Jalan			26,400,000.00	1,320,000.00						1,320,000.00
6	CV. AMANDA BERSAUDARA	Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan			85,300,000.00	4,265,000.00						4,265,000.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					**4,798,363,000.00**	**235,860,475.00**	**100,900.00**				**0.00**	**235,961,375.00**
	Tahun 2013				**57,500,000.00**	**2,875,000.00**			**0.00**	**1/0/1900**	**0.00**	**2,875,000.00**
1	CV. ANUGRAH	Rehabilitasi wc pasar lengkese			37,500,000.00	1,875,000.00						1,875,000.00
2	CV. MUSKAL JAYA	Renovasi Psr Galesong			20,000,000.00	1,000,000.00						1,000,000.00
	Tahun 2014				**4,706,415,000.00**	**198,537,475.00**			**0.00**	**1/0/1900**	**0.00**	**198,537,475.00**
3	-	Pengawasan Teknis renovasi WC Pasar Aeng towa			7,350,000.00	7,350,000.00						7,350,000.00
4	-	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Metrologi Legal			2,035,000,000.00	101,750,000.00						101,750,000.00
5	-	Pembangunan Pelataran Parkir Pasar Bulukunyi			62,000,000.00	31,000,000.00						31,000,000.00
6	-	Pembangunan Pelataran Gedung Kantor UPTD Metrologi Legal			153,000,000.00	- 25,000.00						-25,000.00
7	-	~ Renovasi WC dan Pembuatan Tempat Sampah Pasar Aeng Towa Kab.Takalar			31,600,000.00	1,580,000.00						1,580,000.00
8	-	Pembangunan PLTS Terpusat 15 KW			2,114,865,000.00	- 25.00						-25.00
9	-	Perencanaan Teknis Pembangunan PLTS			43,950,000.00	43,950,000.00						43,950,000.00
10	-	Penimbunan Peralatan Showroom Produk IKM			38,250,000.00	1,912,500.00						1,912,500.00
11	-	Pembangunan Lapak Barang Campuran			55,500,000.00	2,775,000.00						2,775,000.00
12	-	Penimbunan Lapak Kuliner			13,500,000.00	675,000.00						675,000.00
13	-	Pembangunan Lantai Jemur			85,000,000.00	4,250,000.00						4,250,000.00
14		Pembangunan /Peningkatan Akses Jalan Gudang Silo			51,500,000.00	2,575,000.00						2,575,000.00
15		Pemeliharaan Kantor Silo			14,900,000.00	745,000.00						745,000.00
	Tahun 2015				**34,448,000.00**	**34,448,000.00**			**0.00**		**0.00**	**34,448,000.00**
16	CV. Suar konsultan	perencanaan pemasangan kanopi pasar sentral			5,600,000.00	5,600,000.00						5,600,000.00
17	CV. Suar konsultan	perencanaan pembangunan plaza pasar sentral			5,950,000.00	5,950,000.00						5,950,000.00
18	CV. Suar konsultan	perencanaan pembangunan taman gedung showroom			2,400,000.00	2,400,000.00						2,400,000.00
19	CV. Atikah	pengawasan pembangunan taman gedung showroom			1,800,000.00	1,800,000.00						1,800,000.00
20	CV. Atikah	pengadaan alat pertukangan			9,898,000.00	9,898,000.00						9,898,000.00
21	CV. Atikah	pengawasan pembangunan Kanopi pasar sentral			4,450,000.00	4,450,000.00						4,450,000.00
22	CV. Atikah	pengawasan pembangunan Plaza Pasar Sentral			4,350,000.00	4,350,000.00						4,350,000.00
	Tahun 2020				**0.00**	**0.00**			**0.00**		**0.00**	**0.00**
23		Utang Non LS (PDAM)				-					0.00	0.00
	Tahun 2025					-	**100,900.00**		**0.00**		**0.00**	**100,900.00**
23	PDAM	Utang Non LS (PDAM)				-	100,900.00					100,900.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga						**80,959,000.00**	**-**				**80,959,000.00**	**-**
	Tahun 2024					**80,959,000.00**	**0.00**				**80,959,000.00**	**0.00**
	CV. SIPATOKKONG	Penimbunan Green Topejawa Coastral	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering	27/PPK-DISPAPORA/SPK/XI/2024	71,968,000.00	71,968,000.00			73.05/04.0/000086/LS/2.19.3.26.0.00.17.0000/PR/12/2025	15/12/2025	71,968,000.00	0.00
	CV. BADOLO KARYA ABADI	Perencanaan Teknis Penimbunan Green Topejawa Coastral	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering	14/PPK-DISPAPORA/SPK/VI/2024	4,995,000.00	4,995,000.00			73.05/04.0/000104/LS/2.19.3.26.0.00.17.0000/PPR1/12/2025	26/12/2025	4,995,000.00	0.00
	CV. NIRWANA RAHMA MAKMUR	Pengawasan Teknis Penimbunan Green Topejawa Coastral	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering	29/PPK-DISPAPORA/SPK/XI/2024	3,996,000.00	3,996,000.00			73.05/04.0/000111/LS/2.19.3.26.0.00.17.0000/PPR1/12/2025	30/12/2025	3,996,000.00	0.00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan						**0.00**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
Dinas Perikanan						**486,439,257.00**	**0.00**				**99,112,000.00**	**387,327,257.00**
	Tahun 2009				**809,339,000.00**	**8,184,657.00**	**0.00**		**0.00**	**1/0/1900**		**8,184,657.00**
1	CV. VIKARYA UTAMA	Pembangunan Pemecah Ombak		523/KONTRAK/316/X/2009, 16-10-2009	645,645,789.00	- 4.00						-4.00
2	CV. HATI MULIA	Pembangunan TPI Marbo (ST)		523/SPK/304.F/IX/2009, 30-09-2009	28,243,211.00	1,412,161.00						1,412,161.00
3	CV. PARISKAMANDIRI CORP	rehabilitasi TPI Topejawa		523/KONTRAK/323.a/X/2009, 23-10-2009	68,000,000.00	3,400,000.00						3,400,000.00
4	CV. TUTARRUSUNA GROUP	Pembangunan Pos Jaga 3 Unit		523/KONTRAK/109.a/IV/2009, 24-04-2009	67,450,000.00	3,372,500.00						3,372,500.00
	Tahun 2011				**269,423,000.00**	**4,542,500.00**	**0.00**		**0.00**	**1/0/1900**		**4,542,500.00**
5	CV.Parangmata Konstruksi	Pembuatasajun Jalan Nelayan Galesong Kota			89,414,000.00	-						0.00
6	CV.Intan Mandiri	Pembuatasajun Jalan Nelayan Tamalate			89,159,000.00	-						0.00
7	CV.Sinar Surya	Rehabilitasi Tambatan Perahu			71,000,000.00	3,550,000.00						3,550,000.00
8	CV.Puspa Indah Permai	Pemeliharaan parkir Mobil Dinas			19,850,000.00	992,500.00						992,500.00
	Tahun 2012				**97,990,000.00**	**4,899,500.00**	**0.00**		**0.00**	**1/0/1900**		**4,899,500.00**
9	Cv. Amar Jaya	Pembuatan Jalan Nelayan Bontokanang			97,990,000.00	4,899,500.00						4,899,500.00
	Tahun 2013				**41,660,000.00**	**2,083,000.00**	**0.00**		**0.00**	**1/0/1900**		**2,083,000.00**
10	CV. IRA UTAMA	Pembangunan Embung Desa Bontoparang			41,660,000.00	2,083,000.00						2,083,000.00
	Tahun 2014				**636,052,000.00**	**51,942,600.00**	**0.00**		**0.00**	**1/0/1900**		**51,942,600.00**
11	CV ARINA KONSULTAN	Perencanaan Penyediaan Tambatan Perahu dan Pembangunan Pemecah Ombak			10,250,000.00	10,250,000.00						10,250,000.00
12	PT ARISTA CIPTA	Pengawasan Saluran Irigasi Tambak Sanrobone			1,900,000.00	1,900,000.00						1,900,000.00
13	PT ARISTA CIPTA	Pengawasan UPR dan Pengawasan Unit Percontohan Bibit Rumput Laut			5,900,000.00	5,900,000.00						5,900,000.00
14	CV TRI PUTRA JAYA KONSULTAN	Pengawasan Pemecah Ombak			2,950,000.00	2,950,000.00						2,950,000.00
15	CV. MURDA JAIBATU	Pembangunan jalan Nelayan Boddia			46,600,000.00	2,520,000.00						2,520,000.00
16	CV ZICKHA ANUGERAH	Pembangunan jalan Nelayan Ujung Baji			131,752,000.00	6,587,600.00						6,587,600.00
17	CV AMANAH BUNDA	Pembuatan Tambatan Perahu			46,300,000.00	2,315,000.00						2,315,000.00
18	CV. MURDA JAIBATU	Pembangunan Pelataran TPI Soreang			46,400,000.00	2,320,000.00						2,320,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
19	CV IRZHAL MAULANA	Pembangunan Pemecah Ombak			149,500,000.00	7,475,000.00						7,475,000.00
20	CV UCHI SUKSES ABADI	Penyediaan Tambatan Perahu			194,500,000.00	9,725,000.00						9,725,000.00
	Tahun 2024				**414,787,000.00**	**414,787,000.00**	**0.00**				**99,112,000.00**	**315,675,000.00**
	CV. KARYA HAWE	Pengadaan Bibit Bandeng Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	004/KONTRAK-PPK/DP/XI/2024	49,950,000.00	49,950,000.00						49,950,000.00
	CV. KARYA HAWE	Pengadaan Bibit Bandeng Kecamatan Sanrobone	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	005/KONTRAK-PPK/DP/XI/2024	99,900,000.00	99,900,000.00						99,900,000.00
	Fonny Wijaya PT. BANUA NUSANTARA HOTELINDO	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	006/KONTRAK-PPK/DP/XI/2024	18,550,000.00	18,550,000.00						18,550,000.00
	CV. TUNAS JAYA	Pengadaan Jaring Kepiting (Kel. Mappakalompo)	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	007/KONTRAK-PPK/XI/2024	99,112,000.00	99,112,000.00			73.05/04.0/000041/LS/3.25.0.00.0.00.19.0000/PR/11/2025	11/20/2025	99,112,000.00	0.00
	CV. TUNAS JAYA	Pengadaan Mesin Perahu Katinting (Putaran Lambat)	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	008/KONTRAK-PPK/XI/2024	47,400,000.00	47,400,000.00						47,400,000.00
	CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA	PENGADAAN BIBIT RUMPUT LAUT (EUCHEMA COTTONI) (Desa Laikang)	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	010/KONTRAK-PPK/DP/CI/2024	99,875,000.00	99,875,000.00						99,875,000.00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					**144,501,200.00**	**144,501,200.00**	**-**				**144,501,200.00**	**-**
	Tahun 2024				**144,501,200.00**	**144,501,200.00**	**0.00**				**144,501,200.00**	**0.00**
1	CV. MULIAWAN MAHZUZ MANDIRI	Pembuatan kandang portable	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	008/PPK-DPKH/SP/X/2024	69,930,000.00	69,930,000.00			73.05/04.0/000015/LS/3.27.0.00.0.00.37.0000/P2/4/2025	4/11/2025	69,930,000.00	0.00
2	CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA	pengadaan barang jagung giling dan konsentrat	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	014/PPK-DPKH/SP/XII/2024	38,871,200.00	38,871,200.00			73.05/04.0/000007/LS/3.27.0.00.0.00.37.0000/P1/3/2025	3/17/2025	38,871,200.00	0.00
	CV. LIRA PUTRA SEJAHTERA	Pengadaan ayam kampung	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	009/PPK-DPKH/SP/XI/2024	35,700,000.00	35,700,000.00			73.05/04.0/000006/LS/3.27.0.00.0.00.37.0000/P1/3/2025	3/17/2025	35,700,000.00	0.00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan							**-**				**-**	**-**
Sekretariat Daerah					**130,800,000.00**	**130,800,000.00**	**-**				**110,900,000.00**	**19,900,000.00**
	Tahun 2016				**5,900,000.00**	**5,900,000.00**	**-**				**-**	**5,900,000.00**
1	CV. &I_GRADASI GARISARCH	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Perbaikan Pintu Utama Kantor Bupati Hutang Tahun Anggaran 2016 (DAU)		098/SPK-IX/Setda/2016	5,900,000.00	5,900,000.00						5,900,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2023				**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**-**				**-**	**14,000,000.00**
	CV. Badolo Karya Abadi	Jasa Konsultan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kantor Penghubung/Mess Pemda Takalar di Jakarta		127/SPK.PL/Setda/X/2023	10,000,000.00	10,000,000.00						10,000,000.00
	CV. Mutiara Qayya	Jasa Konsultan Pengawasan Teknis Pembuatan Pos Jaga Sebelah Timur Rumah Jabatan Bupati		132/SPK.PL/Setda/XI/2023	4,000,000.00	4,000,000.00						4,000,000.00
	Tahun 2024				**110,900,000.00**	**110,900,000.00**	**-**				**110,900,000.00**	**-**
	CV.DIFAN PRATAMA	Penanaman pohon cemara pada kantor Bupati Takalar Tahun Anggaran 2024	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan/Bibit Tanaman	026/SP.e-Purchasing/Setda/XI/2024	48,750,000.00	48,750,000.00			73.05/04.0/000166/LS/4.01.0.00.0.00.37.0000/P3/6/2025	6/18/2025	48,750,000.00	0.00
	CV.AKRAM JAYA	Pengadaan Kursi Besi Susun Pada Bagian Umum Setda Takalar Tahun Anggaran 2024	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	025/SP.e-Purchasing/Setda/XI/2024	58,750,000.00	58,750,000.00			73.05/04.0/000164/LS/4.01.0.00.0.00.37.0000/P3/6/2025	6/18/2025	58,750,000.00	0.00
	CV.AKRAM JAYA	Pengadaan Printer Pada Bagian Prokopim Setda Takalar Tahun Anggaran 2024	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	024/SP.e Purchasing/Setda/XI/2024	3,400,000.00	3,400,000.00			73.05/04.0/000165/LS/4.01.0.00.0.00.37.0000/P3/6/2025	6/18/2025	3,400,000.00	0.00
Sekretariat DPRD					**404,606,000.00**	**404,606,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,606,000.00**	**0.00**
	Tahun 2024				**404,606,000.00**	**404,606,000.00**	**-**				**404,606,000.00**	**-**
	CV. INDONESIA EMAS ADVERTISING	Pengadaan Vidiotron	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	023/SP/PPK-SEKWAN/XI/2024	270,500,000.00	270,500,000.00			73.05/04.0/000058/LS/4.02.0.00.0.00.21.0000/P3/6/2025	7/1/2025	270,500,000.00	0.00
	PT. IFTALINK MEDIA KARYA	Personal Computer/PC	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	024/SP/PPK-SEKWAN/XII/2024	36,800,000.00	36,800,000.00			73.05/04.0/000056/LS/4.02.0.00.0.00.21.0000/P3/6/2025	7/1/2025	36,800,000.00	0.00
	PT. INDOCARE PACIFIC	Pengharum Ruangan Ecocare	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	029/SP/PPK-SEKWAN/VII/2024	10,656,000.00	10,656,000.00			73.05/04.0/000057/LS/4.02.0.00.0.00.21.0000/P3/6/2025	7/1/2025	10,656,000.00	0.00
	CV. PELANGI	Pengadaan Sofa Letter	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	025/SP/PPK-SEKWAN/XI/2024	28,400,000.00	28,400,000.00			73.05/04.0/000156/LS/4.02.0.00.0.00.21.0000/PR/12/2025	7/1/2025	28,400,000.00	0.00
	PENJAHIT YANTI	Pakaian Batik Staf	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	021/SP/PPK-SEKWAN/XI/2024	26,250,000.00	26,250,000.00			73.05/04.0/000189/LS/4.02.0.00.0.00.21.0000/PPR1/12/2025	12/29/2025	26,250,000.00	0.00
	PT. IFTALINK MEDIA KARYA	Wi Fi	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11/IMK/XI/2024	16,000,000.00	16,000,000.00			73.05/04.0/000177/LS/4.02.0.00.0.00.21.0000/PPR1/12/2025	12/26/2025	16,000,000.00	0.00
	PT. IFTALINK MEDIA KARYA	Wi Fi	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12/IMK/XII/2024	16,000,000.00	16,000,000.00			73.05/04.0/000177/LS/4.02.0.00.0.00.21.0000/PPR1/12/2025	12/26/2025	16,000,000.00	0.00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					**152,749,400.00**	**121,494,400.00**	**589,700.00**				**99,999,400.00**	**22,084,700.00**
	Tahun 2012				**32,900,000.00**	**1,645,000.00**					**0.00**	**1,645,000.00**
1	CV.Putra Dadeko	Pembangunan Ruangan, Perencanaan Pembangunan Ruangan danPengawasan Pembangunan Ruangan (CV.Ulfa Consultant)			32,900,000.00	1,645,000.00						1,645,000.00
	Tahun 2016				**19,850,000.00**	**19,850,000.00**						**19,850,000.00**
2	CV. SERIGALA JAYA	Pengawasan Rehab. Sedang /Berat Gedung Kantor		050/143/REK/IX/2016	19,850,000.00	19,850,000.00						19,850,000.00

No.	NAMA PIHAK KETIGA	PEKERJAAN	Kelompok Utang	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	SALDO AWAL 2025	Bertambah	Koreksi Saldo awal	Pembayaran 2025			SALDO AKHIR
									NO. SP2D	TGL. CAIR	NOMINAL	
	Tahun 2024											**0.00**
3	**Fakultas Perikanan UNHAS**	Penyusunan Kajian Ikan Kerapu dan Ekonomi Biru		004/SPS/PPK/Bappelitbangda /X/2024	**99,999,400.00**	**99,999,400.00**			73.05/04.0/000012770 S/5.01.5.05.0.00.17. 0000/P3/8/2025	8/21/2025	**99,999,400.00**	0.00
	Tahun 2025											
	PDAM	Tagihan Air					**589,700.00**					589,700.00
Badan Keuangan dan Aset Daerah					**927,500.00**	**927,500.00**	**-**				**-**	**927,500.00**
	Tahun 2008				**927,500.00**	**927,500.00**			**0.00**	**1/0/1900**	**0.00**	**927,500.00**
1	CV. NUR RAHMATULLAH	Rehabilitasi Pasar Bulukunyi			927,500.00	927,500.00						927,500.00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**-**	**0.00**				**0.00**	**0.00**
	Tahun 2023					**-**			**0.00**		**0.00**	**0.00**
Inspektorat						**144,600.00**	**267,400.00**				**144,600.00**	**267,400.00**
	PDAM	Tagihan Air Des 2024				144,600.00	0.00				144,600.00	0.00
	PDAM 2025	Tagihan Air Des 2025					267,400.00					267,400.00
Kecamatan Pattallassang						**-**	0.00				0.00	0.00
Kecamatan Polongbangkeng Selatan						**-**	0.00				0.00	0.00
Kecamatan Mangarabombang						**-**	**-**		**-**		**-**	**-**
Kecamatan Sanrobone						**-**	**-**				**-**	**-**
Kecamatan Galesong						**-**	**-**				**-**	**-**
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik						**15,497,500.00**	**-**				**12,000,000.00**	**3,497,500.00**
	Tahun 2017					**3,497,500.00**	**-**		**0.00**		**-**	**3,497,500.00**
1	CV. Intan mandiri	Utang Retensi Belanja Modal Gedung dan Bangunan				3,497,500.00					0.00	3,497,500.00
	Tahun 2024					**12,000,000.00**	**0.00**				**12,000,000.00**	**0.00**
	MA'RUF ANIS. SE/ BRISMA	Pengadaan Baju Kaos	Utang Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor -Perlengkapan Dinas	183/SP/BKBP/X/2024	12,000,000.00	12,000,000.00			73.05/04.0/000038/L S/8.01.0.00.0.00.24. 0000/P3/8/2025	8/28/2025	12,000,000.00	0.00
	Jumlah					**45,244,189,347.75**	**20,548,171,719.56**	**- 45,085,869.60**			**33,070,650,253.34**	**32,676,624,943.57**

Rincian Simulasi

Pemda	SULAWESI SELATAN	
Kabupaten/Kota	KABUPATEN TAKALAR	
Komitmen/plafond	233,338,652,206.00	
Tenor (Tahun)	8	tahun
Tenor (Bulan)	96	bulan
Grace Period (GP)	24	Thursday, 06 June 2024
Masa Pencairan (AP)	12	Tuesday, 06 June 2023
Tanggal Cair Pertama	06/06/2022	
Bunga	6.19	%
Biaya Provisi	1	%

(dalam rupiah)

No	Tahun	Pinjaman	Kewajiban			Pengembalian		
		Pokok	Pokok	Bunga	Jumlah	Pokok	Bunga	Jumlah
1	2022	241,947,497,641.00		3,869,514,721.00	3,869,514,721.00		4,085,829,860.00	4,085,829,860.00
2	2023			15,184,557,744.00	15,184,557,744.00	8,608,845,435.00	14,677,054,618.00	23,285,900,053.00
3	2024		22,685,704,118.00	14,326,084,888.00	37,011,789,006.00	19,444,889,244.00	14,475,619,087.00	33,920,508,331.00
4	2025		38,889,778,488.00	12,096,567,195.00	50,986,345,683.00	38,889,778,488.00	12,303,860,517.00	51,193,639,005.00
5	2026		38,889,778,488.00	9,655,855,505.00	48,545,633,993.00			-
6	2027		38,889,778,488.00	7,215,143,809.00	46,104,922,297.00			-
7	2028		38,889,778,488.00	4,790,034,835.00	43,679,813,323.00			-
8	2029		38,889,778,488.00	2,333,720,418.00	41,223,498,906.00			-
9	2030		16,204,055,648.00	255,772,700.00	16,459,828,348.00			-
JUMLAH			**233,338,652,206.00**	**69,727,251,815.00**	**303,065,904,021.00**	**66,943,513,167.00**	**45,542,364,082.00**	**112,485,877,249.00**

No	Tahun 2026	Jml Pokok	Jml Bunga	Jml Total
1	Bagian Lancar	38,889,778,488.00	9,863,148,827.00	48,752,927,315.00
2	Jangka Pangjang	136,114,205,986.00	15,320,198,289.00	151,434,404,275.00
	Total Utang Jangka Panjang	**175,003,984,474.00**	**25,183,347,116.00**	**200,187,331,590.00**

Lampiran 40

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

KOREKSI NILAI PENYUSUTAN PER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	KIB B	KIB C	KIB D	Grand Total
	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Koreksi Berkurang Atribusi ke Induk		**- 44,276,039.94**		**- 44,276,039.94**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		- 44,276,039.94		- 44,276,039.94
Kurang Catat	**3,902,420,001.60**			**3,902,420,001.60**
Dinas Kesehatan	84,629,001.60			84,629,001.60
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,614,295,000.00			3,614,295,000.00
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	203,496,000.00			203,496,000.00
Reklasifkasi dari Extracomtable Ke Aset Tetap		**7,585,500.00**		**7,585,500.00**
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		7,585,500.00		7,585,500.00
Koreksi Saldo Akumulasi Penyusutan karena Kesalahan Perhitungan	**93,968,500.00**	**- 9,785,474,372.68**	**- 7,188,202,778.12**	**- 16,879,708,650.80**
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			- 11,355,882.30	- 11,355,882.30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			108,410,990.00	108,410,990.00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		- 397,320,738.73	- 0.01	- 397,320,738.74
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		101,909,629.95		101,909,629.95
Dinas Kesehatan		- 1,023,384,742.69	10,063,219.48	- 1,013,321,523.21
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian			- 67,248,486.62	- 67,248,486.62
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		- 8,825,248.74	0.02	- 8,825,248.72
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan		- 0.01	- 0.03	- 0.04
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		289,686,846.88	0.06	289,686,846.94
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		- 153,800,814.89	- 7,478,397,952.24	- 7,632,198,767.13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		292,244.94		292,244.94
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	188,068,500.00	- 8,021,305,535.63	- 925,203.12	- 7,834,162,238.75
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		- 149,293,179.46		- 149,293,179.46
Dinas Perhubungan		- 162,488,808.04	231,146,809.89	68,658,001.85
Dinas Perikanan		- 2,905,748.56	- 15,923,583.97	- 18,829,332.53
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		88,093,182.46	0.05	88,093,182.51
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		109,904,518.66	1,000,000.00	110,904,518.66
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		- 2,679,166.65		- 2,679,166.65
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan		- 84,862,014.74	- 37,042,916.44	- 121,904,931.18
Inspektorat		58,666,637.65		58,666,637.65
Kecamatan Galesong		- 37,148,880.48	- 470,736.37	- 37,619,616.85
Kecamatan Mangarabombang		- 1,857,204.07	- 307,224.11	- 2,164,428.18
Kecamatan Mappakasunggu		4,447,487.09	0.03	4,447,487.12
Kecamatan Pattallassang		287,081,423.09	0.01	287,081,423.10
Kecamatan Polongbangkeng Selatan		- 83,111,103.91	- 0.06	- 83,111,103.97
Kecamatan Polongbangkeng Utara		- 65,879,363.27		- 65,879,363.27
Kecamatan Sanrobone		- 13,330,898.31		- 13,330,898.31
Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle	- 94,100,000.00	- 67,167,383.98		- 161,267,383.98
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		3,141,198.77	72,848,187.61	75,989,386.38
Sekretariat Daerah		- 399,677,904.00		- 399,677,904.00
Sekretariat DPRD		- 53,658,806.01		- 53,658,806.01
Grand Total	**3,996,388,501.60**	**- 9,822,164,912.62**	**- 7,188,202,778.12**	**- 13,013,979,189.14**